



PEMERINTAH ACEH

---

LAPORAN KEUANGAN

Tahun

**2021**

*Audited*

---

TAHUN 2022



PEMERINTAH ACEH



# KATA PENGANTAR

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, atas rahmat dan karunia Allah S.W.T Pemerintah Aceh dapat melaksanakan program kerja Tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2021 dengan maksimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah dilakukan Refocusing dan beberapa kali pengeseran, terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2021 maka dengan ini Pemerintah Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi Kas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2021.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2021 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2021.
4. Laporan Operasional, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Aceh tahun 2021 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Aceh.
5. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Pemerintah Aceh yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir 2021.
6. Laporan Arus Kas, memberikan informasi arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, sehingga di ketahui kenaikan/penurunan kas selama periode pelaporan, ditambah saldo kas pada bendahara dan saldo kas BLUD.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, disertai penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, 27 April 2022

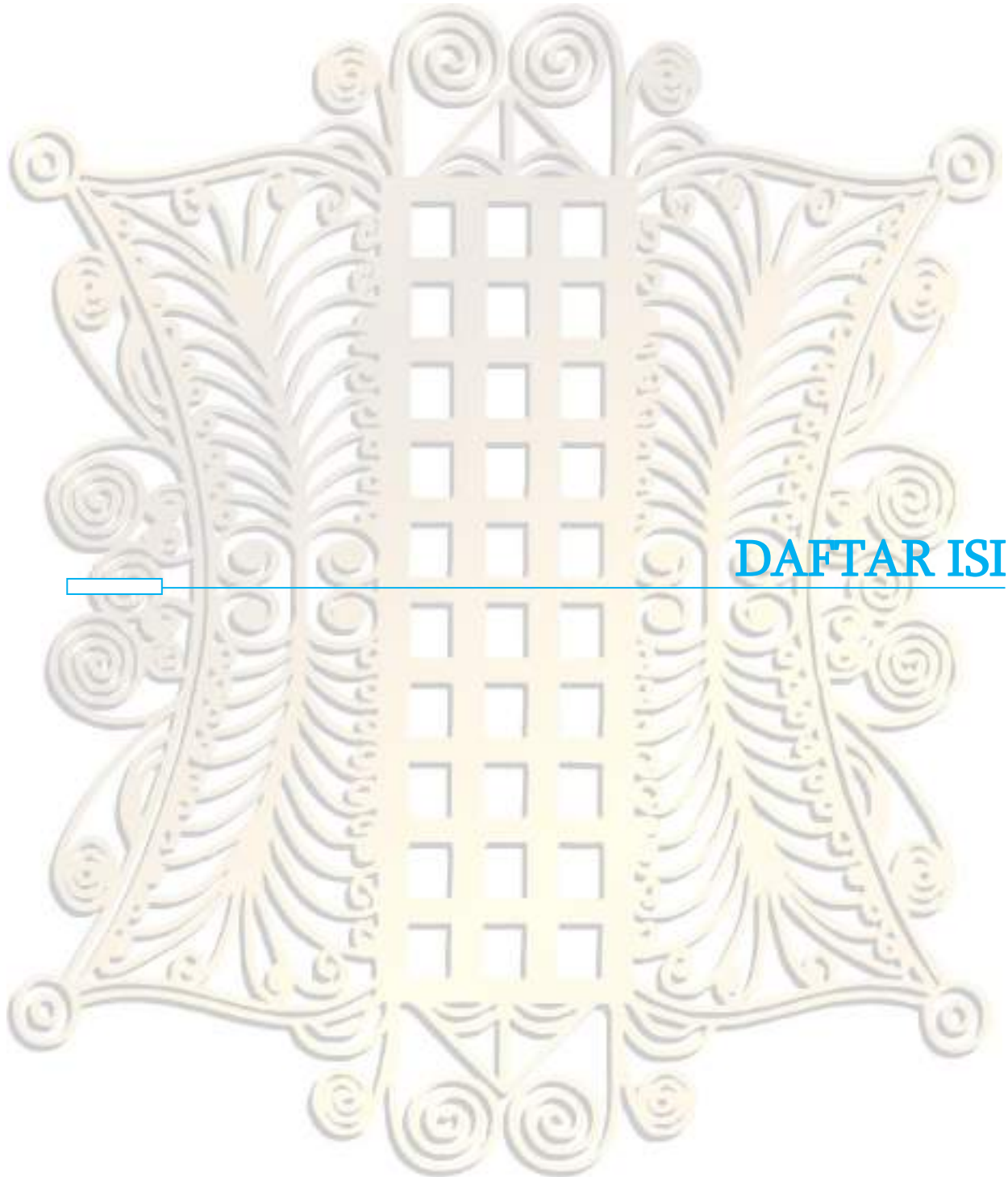
GUBERNUR ACEH



Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



## DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>xiv</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>xv</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN POKOK.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.....</b>	<b>1</b>
<b>B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....</b>	<b>3</b>
<b>C. NERACA .....</b>	<b>4</b>
<b>D. LAPORAN OPERASIONAL .....</b>	<b>7</b>
<b>E. LAPORAN ARUS KAS.....</b>	<b>9</b>
<b>F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>12</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ...	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	16
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Potensi Ekonomi Provinsi Aceh .....	18
2.2 Indikator Ekonomi Makro .....	22
2.3 Kebijakan Keuangan.....	25
2.4 Kebijakan Strategis.....	28

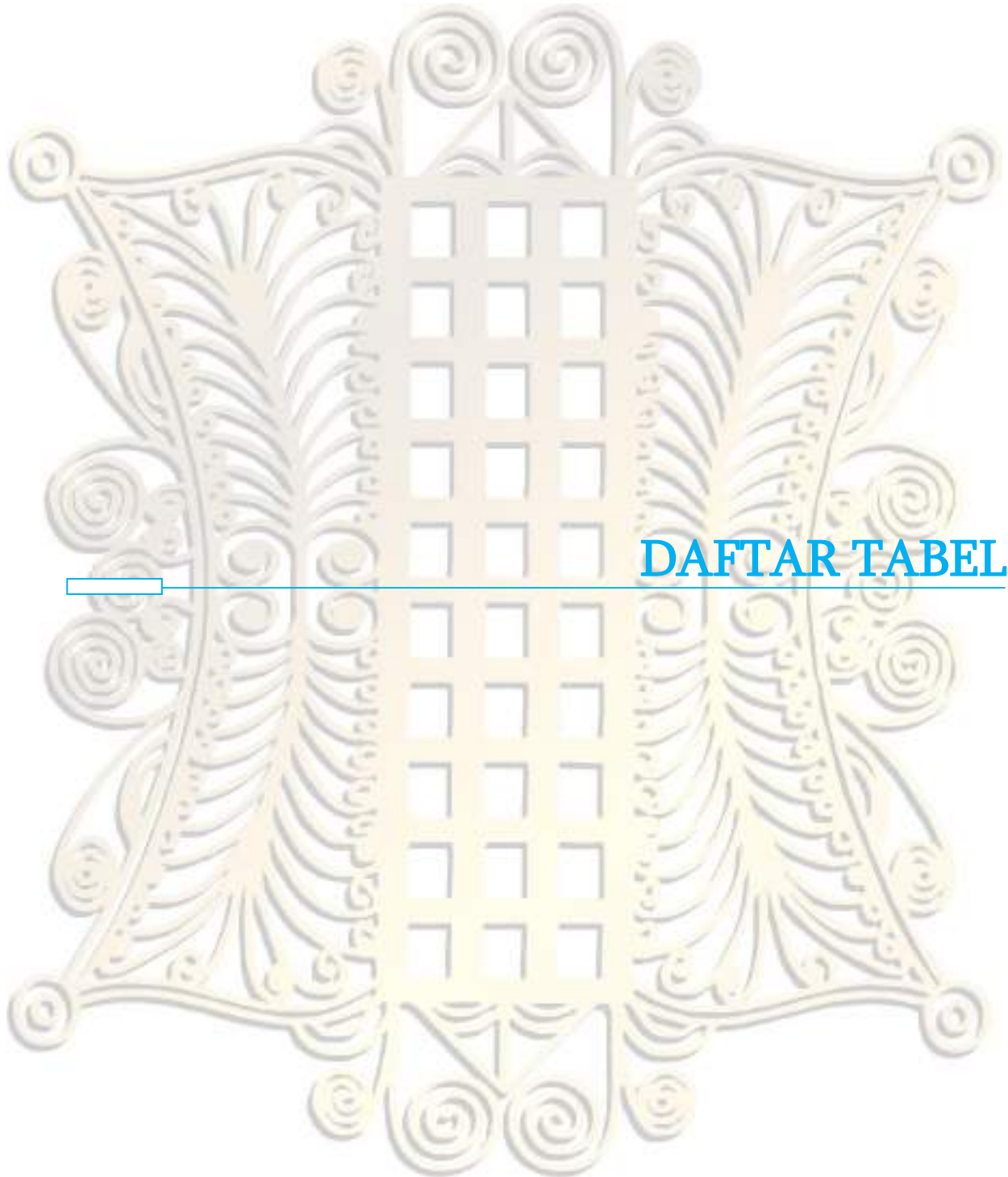
<b>BAB III</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>31</b>
	3.1 Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh.....	31
	3.2 Pencapaian Realisasi Belanja Aceh.....	34
	3.3 Pencapaian Realisasi Belanja Modal.....	39
	3.4 Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19.....	42
	3.5 Pencapaian Realisasi Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA....</b>	<b>52</b>
	4.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh.....	52
	4.2 Entitas Pelaporan Keuangan.....	52
	4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	53
	4.4 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	53
	4.5 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.....	54
	4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN..</b>	<b>107</b>
	5.1 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	107
	5.2 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	128
	5.3 Penjelasan atas Akun dalam Neraca.....	130
	5.4 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Operasional (LO)....	211
	5.5 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas (LAK)....	228
	5.6 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	231
<b>BAB VI</b>	<b>INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN ...</b>	<b>233</b>
	6.1 Penetapan APBA Tahun Anggaran 2021.....	233
	6.2 Dana Otonomi Khusus (Otsus).....	234
	6.3 Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA).....	236

6.4	Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang belum dibayarkan sampai dengan TA 2021 .....	237
6.5	Pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang belum dibayarkan sampai dengan TA 2021 .....	237
6.6	Pengadaan pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp95.347.907.960,00 belum dibayarkan sampai dengan TA 2021 .....	238
6.7	Utang Pemerintah Aceh pada Pemerintah Pusat.....	238
6.8	Belanja TA 2021 yang belum terbayarkan pada beberapa SKPA per 31 Desember 2021 .....	240
<b>BAB VII</b>	<b>PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	<b>243</b>
7.1	Gambaran Umum Provinsi Aceh.....	243
7.2	Visi dan Misi Pemerintah Aceh.....	247
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>252</b>

**LAMPIRAN**



PEMERINTAH ACEH



## DAFTAR TABEL



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komoditas Ekspor.....	19
Tabel 2.2.	Pelabuhan Muat Ekspor .....	19
Tabel 2.3.	Negara Tujuan Ekspor .....	20
Tabel 2.4.	Komoditas Utama Impor.....	21
Tabel 2.5.	Pelabuhan Bongkar Impor .....	21
Tabel 2.6.	Negara Asal Impor .....	22
Tabel 2.7.	Indikator Ekonomi Makro.....	22
Tabel 2.8.	Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Indikator Pembentuk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	24
Tabel 2.9.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (persen), 2017–2021 .....	24
Tabel 2.10.	APBA TA 2017-2021 .....	27
Tabel 2.11.	Perubahan APBA Akibat Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran 2021 .....	29
Tabel 3.1.	Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2021.....	31
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan Tahun Anggaran 2021 .....	33
Tabel 3.3.	Pencapaian Realisasi Belanja.....	34
Tabel 3.4.	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Bidang Kesehatan ..	44
Tabel 3.5.	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Bidang Sosial .....	45
Tabel 3.6.	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Bidang Ekonomi ....	45
Tabel 3.7.	Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2021.....	46
Tabel 3.8.	Rincian Silpa Zakat dan Infaq .....	46
Tabel 4.1.	Klasifikasi Kas dan Setara Kas .....	57
Tabel 4.2.	Klasifikasi Piutang .....	59
Tabel 4.3.	Perhitungan penyisihan Piutang.....	61
Tabel 4.4.	Klasifikasi Persediaan.....	62
Tabel 5. 1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2021 dan TA 2020 .....	107
Tabel 5. 2.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan TA 2020	107
Tabel 5. 3.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh.....	107
Tabel 5. 4.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak .....	108
Tabel 5. 5.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi .....	108
Tabel 5. 6.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal.....	109

Tabel 5. 7.	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah.....	110
Tabel 5. 8.	Pendapatan BLUD .....	110
Tabel 5. 9.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer .....	111
Tabel 5. 10.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak .....	111
Tabel 5. 11.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus.....	112
Tabel 5. 12.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik.....	113
Tabel 5. 13.	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah .....	114
Tabel 5. 14.	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020.....	115
Tabel 5. 15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	115
Tabel 5. 16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	115
Tabel 5. 17.	Realisasi Belanja BLUD.....	116
Tabel 5. 18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 .....	117
Tabel 5. 19.	Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Uang.....	118
Tabel 5. 20.	Belanja Hibah Keputusan Gubernur Aceh.....	119
Tabel 5. 21.	Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Barang .....	119
Tabel 5. 22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang .....	120
Tabel 5. 23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang .....	121
Tabel 5. 24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial .....	122
Tabel 5. 25.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	122
Tabel 5. 26.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah.....	123
Tabel 5. 27.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan Covid-19 .....	123
Tabel 5. 28.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	124
Tabel 5. 29.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan Covid-19 .....	124
Tabel 5. 30.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	124
Tabel 5. 31.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125
Tabel 5. 32.	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer.....	126
Tabel 5. 33.	Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ..	126
Tabel 5. 34.	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kePemerintah Daerah Lainnya.....	127
Tabel 5. 35.	SiLPA Berdasarkan Sumber Dana.....	128
Tabel 5. 36.	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal .....	129
Tabel 5. 37.	Perhitungan SiLPA .....	129
Tabel 5. 38.	Rincian Aset Lancar.....	130

Tabel 5. 39.	Rekonsiliasi Bank .....	131
Tabel 5. 40.	Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan.....	131
Tabel 5. 41.	Kas Di Bendahara Penerimaan Yang Telah Disetor.....	132
Tabel 5. 42.	Rincian Kas di BLUD .....	133
Tabel 5. 43.	Rekonsiliasi Bank Pada BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin ...	134
Tabel 5. 44.	Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Jiwa .....	134
Tabel 5. 45.	Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.....	135
Tabel 5. 46.	Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Syariat Islam.....	135
Tabel 5. 47.	Rekonsiliasi Bank pada BLUD Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh .....	135
Tabel 5. 48.	Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Peternakan Aceh .....	136
Tabel 5. 49.	Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2021 .....	136
Tabel 5. 50.	Kas Lainnya .....	137
Tabel 5. 51.	Rincian Kas Lainnya.....	137
Tabel 5. 52.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	138
Tabel 5. 53.	Piutang Pajak Air Permukaan .....	138
Tabel 5. 54.	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor .....	140
Tabel 5. 55.	Penyisihan Piutang Retribusi .....	141
Tabel 5. 56.	Piutang Lain-lain PAA yang Sah.....	141
Tabel 5. 57.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah .....	142
Tabel 5. 58.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah .....	142
Tabel 5. 59.	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah ....	143
Tabel 5. 60.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat.....	143
Tabel 5. 61.	Tagihan Penjualan Barang Milik Daerah.....	144
Tabel 5. 62.	Penyisihan Piutang Penjualan Barang Milik Daerah.....	144
Tabel 5. 63.	Sewa Dibayar Di Muka.....	145
Tabel 5. 64.	Asuransi Dibayar Di Muka .....	146
Tabel 5. 65.	Persediaan Barang Pakai Habis .....	147
Tabel 5. 66.	Dana Bergulir.....	148
Tabel 5. 67.	Rincian Setoran PER.....	149
Tabel 5. 68.	Rekening Dana PER .....	149
Tabel 5. 69.	Saldo Dana PER.....	150
Tabel 5. 70.	Saldo Dana PINBUK .....	150
Tabel 5. 71.	Pengembalian Dana PINBUK .....	151
Tabel 5. 72.	Penyisihan Dana Bergulir .....	151
Tabel 5. 73.	Investasi Permanen .....	152
Tabel 5. 74.	Penyertaan Modal Bank Aceh .....	152
Tabel 5. 75.	Penyertaan Modal BPR Mustaqim Sukamakmur .....	153
Tabel 5. 76.	Penyertaan Modal PD Pembangunan Aceh .....	153
Tabel 5. 77.	Mutasi Aset Tetap .....	154

Tabel 5. 78.	Mutasi Aset Tetap Tanah .....	154
Tabel 5. 79.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin .....	157
Tabel 5. 80.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	158
Tabel 5. 81.	Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin .....	158
Tabel 5. 82.	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa .....	159
Tabel 5. 83.	Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Peralatan dan Mesin .....	159
Tabel 5. 84.	Mutasi Antar SKPA Aset Peralatan dan Mesin .....	160
Tabel 5. 85.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap .....	161
Tabel 5. 86.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	162
Tabel 5.87.	Mutasi Kurang dari Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	162
Tabel 5. 88.	Mutasi Hibah Keluar Peralatan dan Mesin .....	162
Tabel 5. 89.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan beban tahun 2021 .....	162
Tabel 5. 90.	Mutasi Antar SKPA Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	163
Tabel 5. 91.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan .....	163
Tabel 5. 92.	Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	164
Tabel 5. 93.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya .....	165
Tabel 5. 94.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan Extracomtable .....	167
Tabel 5. 95.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan .....	168
Tabel 5. 96.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	168
Tabel 5. 97.	Mutasi Terima Hibah Gedung dan Bangunan .....	168
Tabel 5. 98.	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan .....	169
Tabel 5. 99.	Koreksi Pencatatan/Penambahan catat aset/baru ditemukan Gedung dan Bangunan.....	170
Tabel 5. 100.	Mutasi Antar SKPA Gedung dan Bangunan .....	171
Tabel 5. 101.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan .....	171
Tabel 5. 102.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan .....	172
Tabel 5. 103.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan beban tahun 2021 .....	172
Tabel 5. 104.	Koreksi Pencatatan/Pengurangan catat aset/baru ditemukan Gedung dan Bangunan.....	173
Tabel 5. 105.	Mutasi Antar SKPA Gedung dan Bangunan .....	173

Tabel 5. 106.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap .....	173
Tabel 5. 107.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya .....	174
Tabel 5. 108.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan Extracomtable .....	174
Tabel 5. 109.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	175
Tabel 5. 110.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	176
Tabel 5. 111.	Mutasi Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	176
Tabel 5. 112.	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	176
Tabel 5. 113.	Koreksi Pencatatan/Penambahan catat aset/baru ditemukan Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	177
Tabel 5. 114.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ...	177
Tabel 5. 115.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	178
Tabel 5. 116.	Jalan, Irigasi dan Jaringan yang menjadi Beban.....	178
Tabel 5. 117.	Koreksi Pencatatan/ Pengurangan catat aset/baru ditemukan Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	178
Tabel 5. 118.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ...	179
Tabel 5. 119.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya .....	179
Tabel 5. 120.	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan Extracomtable .....	180
Tabel 5. 121.	Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	180
Tabel 5. 122.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	181
Tabel 5. 123.	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya .....	181
Tabel 5. 124.	Koreksi Pencatatan/Penambahan catat aset/baru ditemukan Aset Tetap Lainnya .....	182
Tabel 5. 125.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya .....	182
Tabel 5. 126.	Koreksi Pencatatan/Pengurangan catat aset/baru ditemukan Aset Tetap Lainnya .....	183
Tabel 5. 127.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Persediaan.....	183
Tabel 5. 128.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya .....	184
Tabel 5. 129.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya .....	184
Tabel 5. 130.	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	185
Tabel 5. 131.	Mutasi Barang dan Jasa .....	185
Tabel 5. 132.	Mutasi Reklasifikasi Antar Aset Tetap .....	186
Tabel 5. 133.	Mutasi Koreksi Pencatatan/Pengurangan catat aset/baru ditemukan.....	186
Tabel 5. 134.	Mutasi Reklasifikasi Antar Aset Tetap.....	186

Tabel 5. 135.	Akumulasi Penyusutan.....	187
Tabel 5. 136.	Rincian Dana Cadangan.....	191
Tabel 5. 137.	Aset Kemitraan-sewa dengan PT. ASDP Indonesia Ferry ....	194
Tabel 5. 138.	Aset Kemitraan-sewa dengan Yayasan Tgk. Fakinah .....	195
Tabel 5. 139.	Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry .....	196
Tabel 5. 140.	Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT. Pembangunan Aceh – KIA Ladong .....	196
Tabel 5. 141.	Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan denganPT. Pembangunan Aceh – KEK Arun .....	197
Tabel 5. 142.	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama .....	198
Tabel 5. 143.	Rincian Aset Tak Berwujud.....	198
Tabel 5. 144.	Akumulasi Amortisaasi Aset Tak Berwujud .....	200
Tabel 5. 145.	Rincian Rusak Berat/Usang .....	201
Tabel 5. 146.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah .....	202
Tabel 5. 147.	Rincian Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang/TDF .....	203
Tabel 5. 148.	Rincian Aset Lain-lain Akan Dihilangkan/Rencana Hibah ....	203
Tabel 5. 149.	Rincian Aset Lain-lain .....	204
Tabel 5. 150.	Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BPKapet.....	205
Tabel 5. 151.	Kewajiban Jangka Pendek .....	205
Tabel 5. 152.	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) .....	206
Tabel 5. 153.	Pendapatan diterima dimuka.....	206
Tabel 5. 154.	Rincian Utang Belanja .....	207
Tabel 5. 155.	Rincian Utang Belanja Pegawai .....	207
Tabel 5. 156.	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa .....	208
Tabel 5. 157.	Utang Belanja Barang .....	208
Tabel 5. 158.	Utang Belanja Jasa .....	209
Tabel 5. 159.	Utang Belanja Hibah.....	210
Tabel 5. 160.	Utang Belanja Modal .....	210
Tabel 5. 161.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO.....	212
Tabel 5. 162.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Asli Aceh-LO.....	212
Tabel 5. 163.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO .....	212
Tabel 5. 164.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO.....	213
Tabel 5. 165.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.....	214
Tabel 5. 166.	Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO .....	214
Tabel 5. 167.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO .....	215
Tabel 5. 168.	Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil –LO .....	215
Tabel 5. 169.	Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO .....	216

Tabel 5. 170.	Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO ..	217
Tabel 5. 171.	Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO...	218
Tabel 5. 172.	Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO.....	218
Tabel 5. 173.	Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO .....	219
Tabel 5. 174.	Kenaikan/Penurunan Beban Jasa .....	220
Tabel 5. 175.	Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan .....	221
Tabel 5. 176.	Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas .....	221
Tabel 5. 177.	Kenaikan/Penurunan Beban Hibah .....	222
Tabel 5. 178.	Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial.....	223
Tabel 5. 179.	Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	224
Tabel 5. 180.	Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang .....	224
Tabel 5. 181.	Kenaikan/Penurunan Beban Transfer .....	225
Tabel 5. 182.	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020.....	228
Tabel 5. 183.	Arus Kas Dari Keluar Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020.....	229
Tabel 5. 184.	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2021 dan 2020 .....	229
Tabel 5. 185.	Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran Tahun 2021 dan 2020.....	230
Tabel 5. 186.	Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran Tahun 2021 dan 2020.....	230
Tabel 5. 187.	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....	232
Tabel 6. 1.	Tahapan Penetapan APBA 2021.....	233
Tabel 6. 2.	Penerimaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2008-2021.....	234
Tabel 6. 3.	Rincian Pengelolaan Dana Otsus Provinsi dan Kab/Kota 2008-2021 .....	235
Tabel 6.4.	Alokasi Dana Otsus Aceh Per Bidang Berdasarkan UU No. 11/2006 dan Qanun No.2/2008.....	235
Tabel 6.5.	Realisasi JKRA Tahun 2010-2021 .....	235
Tabel 6. 6.	Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang.....	238
Tabel 6. 7.	Rencana Debt Swap .....	239
Tabel 6. 8.	Realisasi Kegiatan Debt Swap.....	239
Tabel 6. 9.	Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan Debt Swap.....	239
Tabel 6. 10.	Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan Debt Swap .....	240
Tabel 7.1.	Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh .....	246



PEMERINTAH ACEH



# DAFTAR GAMBAR

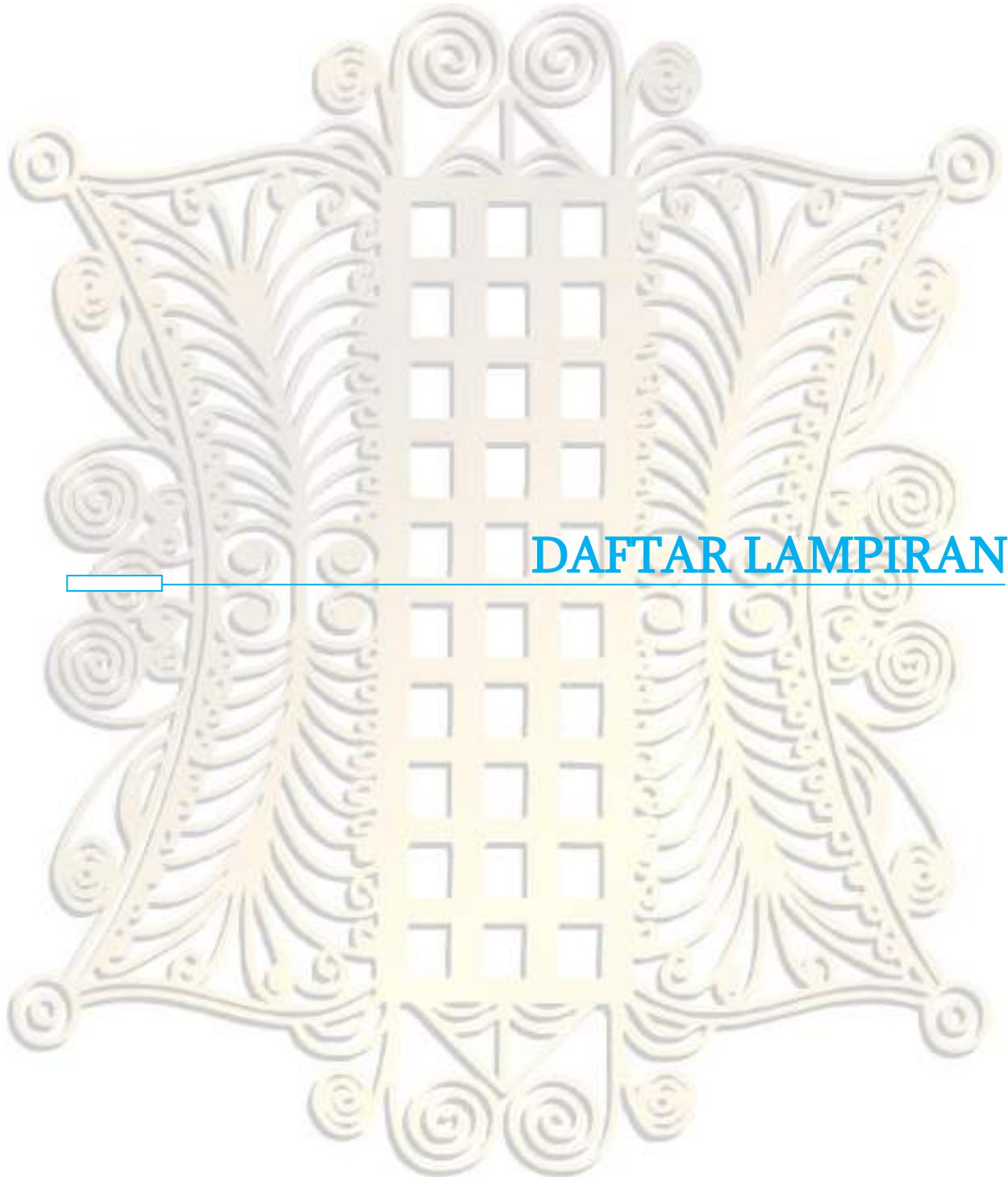


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Anggaran dan Realisasi APBA Tahun Anggaran 2021 .....	31
Gambar 3.2	Kontribusi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2021 .....	32
Gambar 3.3	Profil APBA Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi .....	36
Gambar 3.4	Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 .....	39
Gambar 3.5	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Tahun Anggaran 2021 ..	43



PEMERINTAH ACEH



## DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.
- Lampiran 2 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 3 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2021
- Lampiran 4 Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
- Lampiran 5 Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah
- Lampiran 6 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai Pemerintah Aceh
- Lampiran 6a Rincian Persediaan Barang Habis Pakai Pemerintah Aceh
- Lampiran 6b Daftar Obat Kadaluarsa Tahun 2021
- Lampiran 6c Daftar Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2021
- Lampiran 7 Rekapitulasi Perkembangan Pengembalian Dana LUEP APBA Periode 2021
- Lampiran 7a Resume Penyerahan Pengurusan Piutang LUEP Tahun 2021
- Lampiran 8 Aset Tetap Berdasarkan Kondisi Barang
- Lampiran 9 *Extracomtable* Aset Tetap
- Lampiran 10 Daftar Aset Tak Berwujud
- Lampiran 11 Aset Rusak Berat
- Lampiran 12 *Extracomtable* Aset Lain-lain
- Lampiran 13 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
- Lampiran 14 Beban Persediaan
- Lampiran 15 Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Lampiran 16a Daftar Kewajiban Pemerintah Aceh per tanggal 31 Desember 2021 Atas Putusan Hukum Terhadap Pekerjaan Tanggap Darurat pada Dinas Pengairan Aceh
- Lampiran 16b Daftar Kewajiban Pemerintah Aceh per tanggal 31 Desember 2021 Tanpa Gugatan Hukum Terhadap Pekerjaan Tanggap Darurat pada Dinas Pengairan Aceh
- Lampiran 17 Potensi Kewajiban Belum Bayar (100%) Kegiatan APBA Tahun 2021



PEMERINTAH ACEH

# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

---



## GUBERNUR ACEH

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 27 April 2022

GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



# RINGKASAN EKSEKUTIF

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan luas dengan titik berat otonomi diletakkan pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri, yaitu pengelolaan urusan rumah tangga maupun pengelolaan keuangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyetujui Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Aceh telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 pasal 100, 101, 102, 103 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh pasal 274, Pemerintah Aceh menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. **Laporan Realisasi Anggaran**, menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

1) Pendapatan	: Rp	13.948.388.273.436,12
2) Belanja dan Transfer	: Rp	13.683.582.127.431,68
Surplus	: Rp	264.806.146.004,44
3) Pembiayaan	:	
- Penerimaan	: Rp	3.970.103.175.594,59
- Pengeluaran	: Rp	301.228.709.208,64
- Pembiayaan Netto	: Rp	3.668.874.466.385,95

2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**, menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2021 dengan periode sebelumnya. Dengan realisasi sebagai berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp	3.969.617.354.782,29
b) Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)	: Rp	3.933.680.612.390,39
c) Saldo Anggaran Akhir	: Rp	3.933.680.612.390,39

3. **Neraca**, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

a) Aset	: Rp	31.850.790.344.624,26
b) Kewajiban	: Rp	519.675.649.403,62
c) Ekuitas	: Rp	31.331.114.695.220,64

4. **Laporan Operasional**, menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO	: Rp	14.710.892.858.258,06
b) Beban-LO	: Rp	13.389.487.700.242,59
Surplus dari Operasi LO	: Rp	1.321.405.158.015,47
c) Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO	: Rp	(281.267.712.925,36)
d) Surplus LO	: Rp	1.040.137.445.090,11

5. **Laporan Arus Kas**, menggambarkan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan aktivitas pendanaan dan aktivitas non anggaran.

Nilai arus kas bersih berdasarkan aktivitas selama satu Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a) Nilai kas bersih dari Aktivitas Operasi	: Rp	2.443.077.808.214,58
b) Nilai kas bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan	: Rp	(2.436.561.944.929,58)
c) Nilai kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	: Rp	496.500.313,38
d) Nilai kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran	: Rp	-

Saldo kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a) Kenaikan Kas Selama Periode Akuntansi	: Rp	7.012.363.598,38
b) Saldo Awal Kas di BUA & Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp	3.890.906.180.547,89
c) Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas Bendahara Pengeluaran	: Rp	3.897.918.544.146,27
d) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp	144.615.039,60
e) Saldo Akhir Kas BLUD	: Rp	35.382.363.720,40
f) Saldo Akhir Kas di BOS	: Rp	151.089.484,12
g) Saldo Akhir Kas Lainnya	: Rp	84.000.000,00
h) Saldo Akhir Kas	: Rp	3.933.680.612.390,39

6. **Laporan Perubahan Ekuitas**, menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a) Ekuitas Awal	: Rp	27.256.349.028.467,20
b) Surplus/Defisit LO	: Rp	1.040.137.445.090,11
c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	: Rp	3.034.628.221.663,33
d) Jumlah Ekuitas Akhir	: Rp	31.331.114.695.220,64

7. **Catatan atas Laporan Keuangan**, menguraikan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, Sistematika Penulisan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA, serta Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Kebijakan Akuntansi. Selain itu dalam rangka pengungkapan yang memadai, CaLK juga menyajikan informasi tentang Penjelasan atas Pos-Pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan, Informasi Penting dan Kewajiban Kontinjensi yang mempengaruhi Laporan Keuangan, serta Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan.



Laporan Keuangan Pemerintah Aceh disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Banda Aceh, 27 April 2022

GUBERNUR ACEH



Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Laporan Keuangan Tahun 2021  
Audited*

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN




**PEMERINTAH ACEH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	Ref (2)	Anggaran TA 2021 (3)	Realisasi TA 2021 (4)	% (5)	Realisasi TA 2020 (6)
<b>PENDAPATAN ACEH</b>					
<b>Pendapatan Asli Aceh</b>	<b>5.1.1.1.</b>	<b>2.401.682.455.965,00</b>	<b>2.505.887.909.031,12</b>	<b>104,34</b>	<b>2.570.775.877.183,15</b>
Pajak Aceh	5.1.1.1.1.	1.374.555.532.889,00	1.529.610.318.107,63	111,28	1.477.991.066.969,65
Retribusi Aceh	5.1.1.1.2.	12.133.554.700,00	8.307.103.680,00	68,46	8.159.969.910,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	182.385.550.448,00	152.434.096.229,00	83,58	181.700.799.036,00
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	5.1.1.1.4.	832.607.817.928,00	815.536.391.014,49	97,95	902.924.041.267,50
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>5.1.1.2.</b>	<b>11.435.885.996.400,00</b>	<b>11.431.169.265.498,00</b>	<b>99,96</b>	<b>11.826.017.687.067,00</b>
<b>Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.1.2.</b>	<b>3.873.329.990.400,00</b>	<b>3.868.613.259.498,00</b>	<b>99,88</b>	<b>3.885.903.189.991,00</b>
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.	153.487.130.400,00	202.310.251.468,00	131,81	127.272.935.167,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.1.1.2.	-	-	-	39.867.057.258,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.	1.945.980.616.000,0	1.945.980.616.000,00	100,00	1.956.492.796.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.	318.460.490.000,00	288.201.609.176,00	90,50	252.931.846.782,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.	1.455.401.754.000,00	1.432.120.782.854,00	98,40	1.509.338.554.784,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>5.1.1.2.</b>	<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.940.114.497.076,00</b>
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.	7.555.827.806.000,00	7.555.827.806.000,00	100,00	7.555.278.348.000,00
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.	-	-	-	384.836.149.076,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	100,00	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>5.1.1.3.</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	<b>11.331.098.907,00</b>	<b>41,34</b>	<b>43.126.992.771,00</b>
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.	27.410.001.577,00	9.815.653.425,00	35,81	43.126.992.771,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.	-	1.515.445.482,00	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>13.864.978.453.942,00</b>	<b>13.948.388.273.436,12</b>	<b>100,60</b>	<b>14.439.920.557.021,15</b>
<b>BELANJA ACEH</b>					
<b>Belanja Operasi</b>	<b>5.1.2.1.</b>	<b>10.058.436.337.426,00</b>	<b>8.649.317.139.857,74</b>	<b>85,99</b>	<b>7.985.982.044.904,10</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	2.829.428.312.694,00	2.631.227.115.328,00	93,00	2.483.284.443.746,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	5.936.917.132.917,00	5.125.955.152.315,14	86,34	3.702.404.761.736,99
Belanja Hibah	5.1.2.1.3.	907.787.487.926,00	758.581.422.107,25	83,56	1.422.789.246.408,91
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4.	384.303.403.889,00	133.553.450.107,35	34,75	377.503.593.012,20
<b>Belanja Modal</b>	<b>5.1.2.2.</b>	<b>3.315.459.457.224,00</b>	<b>2.199.333.370.928,94</b>	<b>66,34</b>	<b>1.755.472.079.286,47</b>
Belanja Tanah	5.1.2.2.1.	98.508.019.284,00	24.732.040.448,00	25,11	71.123.465.326,00

Uraian (1)	Ref (2)	Anggaran TA 2021 (3)	Realisasi TA 2021 (4)	% (5)	Realisasi TA 2020 (6)
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	366.162.644.235,00	259.171.614.346,38	70,78	421.332.296.912,80
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	1.053.964.400.810,00	734.555.768.109,80	69,69	567.190.383.202,63
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	1.595.091.662.803,00	1.055.849.598.983,31	66,19	572.579.779.264,78
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	201.732.730.092,00	125.024.349.041,45	61,98	123.246.154.580,26
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.1.2.3.</b>	<b>147.985.369.115,00</b>	<b>412.071.890,00</b>	<b>0,28</b>	<b>158.460.075.459,00</b>
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	147.985.369.115,00	412.071.890,00	0,28	158.460.075.459,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>13.521.881.163.765,00</b>	<b>10.849.062.582.676,68</b>	<b>80,23</b>	<b>9.899.914.199.649,57</b>
<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.2.4.</b>	<b>2.960.457.145.733,00</b>	<b>2.834.519.544.755,00</b>	<b>95,75</b>	<b>3.342.298.602.245,00</b>
<b>Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>5.1.2.4.1.</b>	<b>811.201.817.610,00</b>	<b>715.264.216.632,00</b>	<b>88,17</b>	<b>802.937.015.414,00</b>
Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1.	811.201.817.610,00	715.264.216.632,00	88,17	802.937.015.414,00
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>5.1.2.4.2.</b>	<b>2.149.255.328.123,00</b>	<b>2.119.255.328.123,00</b>	<b>98,60</b>	<b>2.539.361.586.831,00</b>
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.2.	2.149.255.328.123,00	2.119.255.328.123,00	98,60	2.539.361.586.831,00
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>16.482.338.309.498,00</b>	<b>13.683.582.127.431,68</b>	<b>83,02</b>	<b>13.242.212.801.894,57</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>5.1.3.</b>	<b>(2.617.359.855.556,00)</b>	<b>264.806.146.004,44</b>	<b>(10,12)</b>	<b>1.197.707.755.126,58</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.1.4.</b>	<b>2.924.359.855.556,00</b>	<b>3.970.103.175.594,59</b>	<b>135,76</b>	<b>2.848.097.021.013,53</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya	5.1.4.	2.924.359.855.556,00	3.969.606.675.281,21	135,74	2.846.141.906.063,38
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.	-	496.500.313,38	-	1.955.114.950,15
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.1.4.</b>	<b>307.000.000.000,00</b>	<b>301.228.709.208,64</b>	<b>98,12</b>	<b>76.187.421.357,82</b>
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.	65.000.000.000,00	59.791.509.208,64	91,99	76.187.421.357,82
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh	5.1.4.	242.000.000.000,00	241.437.200.000,00	99,77	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.1.4.</b>	<b>2.617.359.855.556,00</b>	<b>3.668.874.466.385,95</b>	<b>140,17</b>	<b>2.771.909.599.655,68</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)</b>	<b>5.1.5.</b>	<b>-</b>	<b>3.933.680.612.390,39</b>	<b>-</b>	<b>3.969.617.354.782,29</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 27 April 2022  
 GUBERNUR ACEH  
  
 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH

# LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

*Laporan Keuangan Tahun 2021  
Audited*

**B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**



**PEMERINTAH ACEH  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	Ref (2)	2021 (3)	2020 (4)
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	3.969.617.354.782,29	2.846.141.906.063,38
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	5.2.2.	3.969.606.675.281,21	2.846.141.906.063,38
<b>Subtotal</b>		<b>10.679.501,08</b>	<b>-</b>
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	5.2.3.	3.933.680.612.390,39	3.969.617.354.782,29
<b>Subtotal</b>		<b>3.933.691.291.891,47</b>	<b>3.969.617.354.782,29</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	(10.679.501,08)	-
Lain-lain		-	-
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>5.2.5.</b>	<b>3.933.680.612.390,39</b>	<b>3.969.617.354.782,29</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

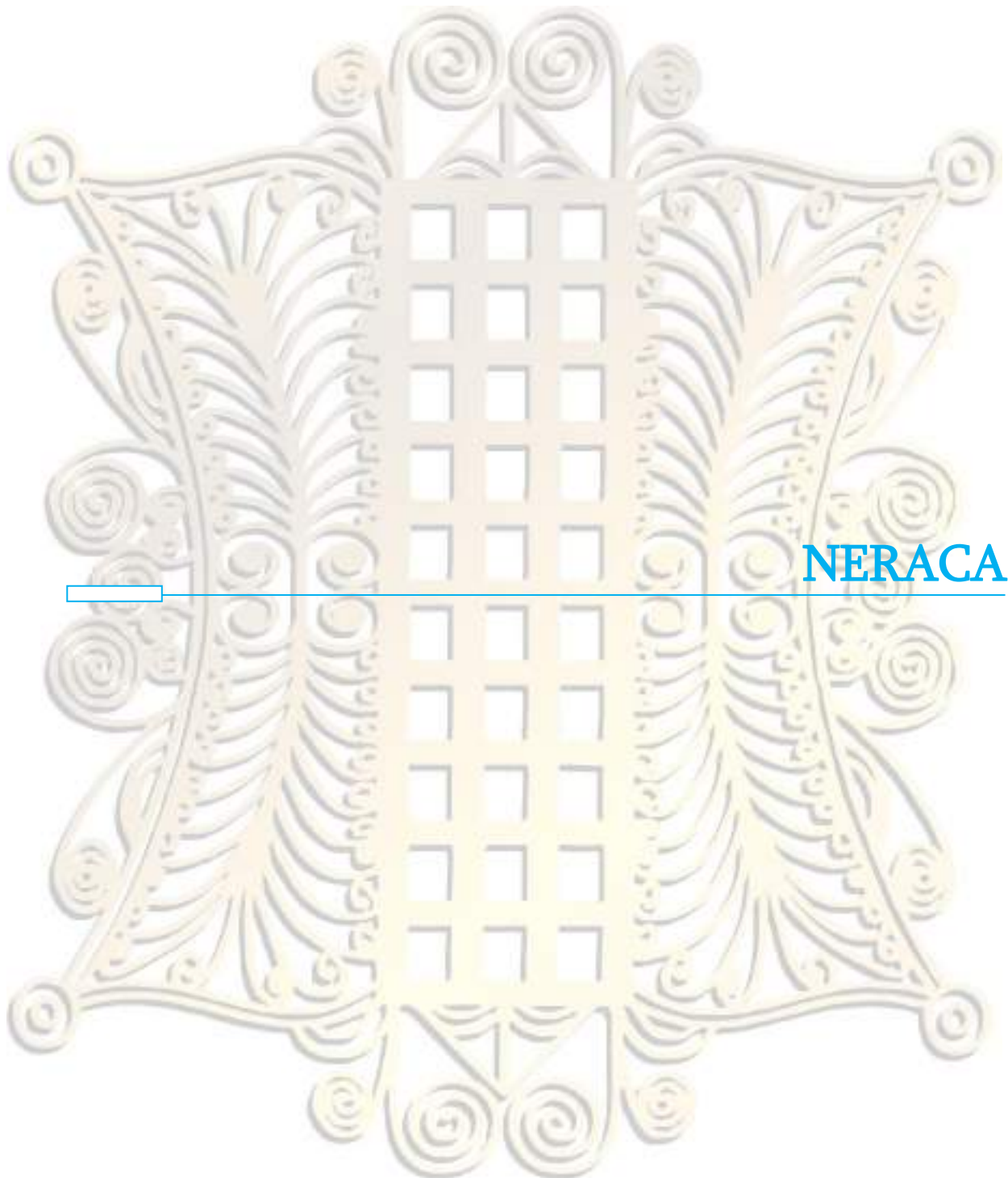
Banda Aceh, 27 April 2022

GUBERNUR ACEH

**Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**



PEMERINTAH ACEH



# NERACA

C. NERACA



**PEMERINTAH ACEH**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)


Uraian (1)	Ref (2)	2021 (3)	2020 (4)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Kas Aceh	5.3.1.1.	3.897.918.544.146,27	3.890.482.972.914,89
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2.	144.615.039,60	258.029.046,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3.	-	423.207.633,00
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.4.	35.382.363.720,40	77.958.725.389,05
Kas di BOS	5.3.1.5.	151.089.484,12	494.419.799,00
Kas Lainnya	5.3.1.6.	84.000.000,00	3.507.442.717,00
<b>Kas</b>		<b>3.933.680.612.390,39</b>	<b>3.973.124.797.499,29</b>
Piutang Pajak	5.3.1.7.	33.344.415.021,00	29.259.361.601,00
Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.8.	(1.164.333.522,70)	(539.560.617,15)
<b>Piutang Pajak Netto</b>		<b>32.180.081.498,30</b>	<b>28.719.800.983,85</b>
Piutang Retribusi	5.3.1.9.	479.595.070,00	453.327.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.10.	(5.141.575,35)	(2.266.635,00)
<b>Piutang Retribusi Netto</b>		<b>474.453.494,65</b>	<b>451.060.365,00</b>
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	5.3.1.11.	231.278.306.591,00	88.951.032.532,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	5.3.1.12.	(13.878.268.769,01)	(1.465.360.554,63)
<b>Piutang Lain-lain PAA yang Sah Netto</b>		<b>217.400.037.821,99</b>	<b>87.485.671.977,37</b>
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.3.1.13.	8.869.168.610,86	9.203.679.282,48
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.3.1.14.	(1.718.374.311,09)	(1.586.478.764,45)
<b>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto</b>		<b>7.150.794.299,77</b>	<b>7.617.200.518,03</b>
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.15.	31.223.992.221,00	-
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		-	-
<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto</b>		<b>31.223.992.221,00</b>	<b>-</b>
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.16.	57.884.934,53	83.165.150,58
Penyisihan bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran	5.3.1.17.	(21.983.262,24)	(29.339.528,79)
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</b>		<b>35.901.672,29</b>	<b>53.825.621,79</b>
<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>5.3.1.18.</b>	<b>6.151.108.897,29</b>	<b>3.440.814.702,92</b>



Uraian (1)	Ref (2)	2021 (3)	2020 (4)
<b>Persediaan</b>	<b>5.3.1.19.</b>	<b>617.647.953.016,98</b>	<b>602.280.998.808,15</b>
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>4.845.944.935.312,66</b>	<b>4.703.174.170.476,40</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
<b>Investasi Non permanen</b>			
Investasi Dana Bergulir	5.3.2.1.1.	89.609.733.099,52	90.081.023.084,90
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.2.1.2.	(89.609.733.099,52)	(90.081.023.084,90)
<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investasi Permanen</b>			
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	5.3.2.2.	1.965.004.767.319,77	1.592.869.162.510,55
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>1.965.004.767.319,77</b>	<b>1.592.869.162.510,55</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>1.965.004.767.319,77</b>	<b>1.592.869.162.510,55</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	5.3.3.1.	3.595.980.655.022,79	2.936.185.931.752,79
Peralatan dan Mesin	5.3.3.2.	4.469.286.328.132,84	4.337.215.141.058,98
Gedung dan Bangunan	5.3.3.3.	7.292.909.683.335,83	6.789.986.126.555,35
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.3.4.	13.486.016.681.931,70	13.459.106.691.222,60
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5.	911.380.355.361,97	839.875.057.814,71
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6.	2.346.294.324.390,22	1.364.315.528.268,97
Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7.	(12.802.734.057.897,63)	(11.280.179.473.953,53)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>19.299.133.970.277,72</b>	<b>18.446.505.002.719,87</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan	5.3.4.	1.304.152.498.489,66	1.244.360.989.281,02
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>1.304.152.498.489,66</b>	<b>1.244.360.989.281,02</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.5.1.	-	717.751,00
<b>Tagihan Penjualan Angsuran Netto</b>		<b>-</b>	<b>717.751,00</b>
Tututan Ganti Rugi	5.3.5.2.	25.582.204.954,43	25.601.678.307,43
<b>Tuntutan Ganti Rugi Netto</b>		<b>25.582.204.954,43</b>	<b>25.601.678.307,43</b>
Kerjasama Pemanfaatan	5.3.5.3.	363.881.861.600,00	188.012.963.600,00
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	5.3.5.4.	(135.551.276.525,89)	(78.536.124.236,20)
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>		<b>228.330.585.074,11</b>	<b>109.476.839.363,80</b>
Aset Tak Berwujud	5.3.5.5.	64.093.897.987,00	30.397.239.283,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.5.6.	(36.013.087.961,50)	(26.280.429.623,50)
<b>Aset Tak Berwujud Netto</b>		<b>28.080.810.025,50</b>	<b>4.116.809.659,50</b>
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>5.3.5.7.</b>	<b>4.154.560.573.170,41</b>	<b>4.167.731.657.253,69</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>4.436.554.173.224,45</b>	<b>4.306.927.702.335,42</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>31.850.790.344.624,26</b>	<b>30.293.837.027.323,26</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.6.1.1.	84.000.000,00	337.725.258,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.6.1.2.	11.473.298.011,00	2.595.633.905.910,65
Utang Belanja	5.3.6.1.3.	200.715.107.973,62	435.662.487.189,41

Uraian (1)	Ref (2)	2021 (3)	2020 (4)
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.6.1.4.	307.403.243.419,00	5.853.880.498,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>519.675.649.403,62</b>	<b>3.037.487.998.856,06</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>519.675.649.403,62</b>	<b>3.037.487.998.856,06</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	5.3.7.	31.331.114.695.220,64	27.256.349.028.467,20
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>31.331.114.695.220,64</b>	<b>27.256.349.028.467,20</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>31.850.790.344.624,26</b>	<b>30.293.837.027.323,26</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 27 April 2022  
 GUBERNUR ACEH  
  
 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH

# LAPORAN OPERASIONAL

*Laporan Keuangan Tahun 2021  
Audited*

**D. LAPORAN OPERASIONAL**



**PEMERINTAH ACEH  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	Ref (2)	2021 (3)	2020 (4)	Kenaikan / Penurunan (5)	(% (6)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)</b>					
Pendapatan Pajak Aceh	5.4.1.1.1.	1.533.695.371.527,63	1.477.180.062.811,65	56.515.308.715,98	3,83
Pendapatan Retribusi Aceh	5.4.1.1.2.	9.084.721.125,36	8.551.442.364,80	533.278.760,56	6,24
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.4.1.1.3.	282.618.355.584,23	249.290.944.300,35	33.327.411.283,88	13,37
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	5.4.1.1.4.	949.479.080.151,93	802.764.399.190,10	146.714.680.961,83	18,28
<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>		<b>2.774.877.528.389,15</b>	<b>2.537.786.848.666,90</b>	<b>237.090.679.722,25</b>	<b>9,34</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>					
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.2.1.	233.534.243.689,00	127.272.935.167,00	106.261.308.522,00	83,49
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		-	39.867.057.258,00	(39.867.057.258,00)	(100,00)
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.2.	1.945.980.616.000,00	1.956.492.796.000,00	(10.512.180.000,00)	(0,54)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.1.2.3.	303.560.249.603,38	248.193.047.721,00	55.367.201.882,38	22,31
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.1.2.4.	1.444.769.174.017,53	1.482.653.755.202,64	(37.884.581.185,11)	(2,56)
<b>Jumlah Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>		<b>3.927.844.283.309,91</b>	<b>3.854.479.591.348,64</b>	<b>73.364.691.961,27</b>	<b>1,90</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>					
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	5.4.1.2.5.	7.555.827.806.000,00	7.228.523.338.980,66	327.304.467.019,34	4,53
Dana Penyesuaian		-	374.445.514.076,00	(374.445.514.076,00)	(100,00)
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.6.	6.728.200.000,00	-	6.728.200.000,00	-
<b>Jumlah Pemerintah Pusat Lainnya</b>		<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>7.602.968.853.056,66</b>	<b>(40.412.847.056,66)</b>	<b>(0,53)</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>11.490.400.289.309,91</b>	<b>11.457.448.444.405,30</b>	<b>32.951.844.904,61</b>	<b>0,29</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.	444.099.595.077,00	181.871.439.464,00	262.228.155.613,00	144,18
Pendapatan Lainnya		-	10.390.635.000,00	(10.390.635.000,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.	1.515.445.482,00	-	1.515.445.482,00	-
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>445.615.040.559,00</b>	<b>192.262.074.464,00</b>	<b>253.352.966.095,00</b>	<b>131,77</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>14.710.892.858.258,06</b>	<b>14.187.497.367.536,20</b>	<b>523.395.490.721,86</b>	<b>3,69</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>					
Beban Pegawai	5.4.2.1.	2.742.283.882.520,86	2.437.166.511.656,00	305.117.370.864,86	12,52
Beban Persediaan	5.4.2.2.	1.661.907.541.870,17	818.172.618.627,15	843.734.923.243,02	103,12

Uraian (1)	Ref (2)	2021 (3)	2020 (4)	Kenaikan / Penurunan (5)	(%) (6)
Beban Jasa	5.4.2.3.	2.749.921.291.868,12	2.837.727.089.270,71	(87.805.797.402,59)	(3,09)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4.	196.900.067.946,01	115.090.923.976,51	81.809.143.969,50	71,08
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5.	255.667.716.027,26	165.634.702.617,00	90.033.013.410,26	54,36
Beban Hibah	5.4.2.6.	1.460.518.339.477,25	1.917.738.076.850,38	(457.219.737.373,13)	(23,84)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7.	133.553.450.107,35	17.921.460.000,00	115.631.990.107,35	645,22
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.8.	1.303.615.764.292,30	1.321.286.298.304,52	(17.670.534.012,22)	(1,34)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.9.	13.740.561.024,68	741.186.030,09	12.999.374.994,59	1.753,86
Beban Transfer	5.4.2.10.	2.849.853.355.246,00	3.280.202.492.984,00	(430.349.137.738,00)	(13,12)
Beban Lain-lain	5.4.2.11.	21.113.657.972,59	68.912.735.971,12	(47.799.077.998,53)	(69,36)
Beban Tak Terduga	5.4.2.12.	412.071.890,00	-	412.071.890,00	-
<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>13.389.487.700.242,59</b>	<b>12.980.594.096.287,48</b>	<b>408.893.603.955,11</b>	<b>3,15</b>
<b>Surplus/Defisit Dari Operasi</b>	<b>5.4.3.</b>	<b>1.321.405.158.015,47</b>	<b>1.206.903.271.248,72</b>	<b>114.501.886.766,75</b>	<b>9,49</b>
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>					
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.4.	281.267.712.925,36	-	281.267.712.925,36	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	132.361.566.706,83	(132.361.566.706,83)	(100,00)
<b>Jumlah Defisit Non Operasioanal</b>		<b>281.267.712.925,36</b>	<b>132.361.566.706,83</b>	<b>148.906.146.218,53</b>	<b>112,50</b>
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(281.267.712.925,36)</b>	<b>(132.361.566.706,83)</b>	<b>(148.906.146.218,53)</b>	<b>112,50</b>
<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>1.040.137.445.090,11</b>	<b>1.074.541.704.541,89</b>	<b>(34.404.259.451,78)</b>	<b>(3,20)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>5.4.5.</b>	<b>1.040.137.445.090,11</b>	<b>1.074.541.704.541,89</b>	<b>(34.404.259.451,78)</b>	<b>(3,20)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 27 April 2022

GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



# LAPORAN ARUS KAS

*Laporan Keuangan Tahun 2021  
Audited*

**E. LAPORAN ARUS KAS**



**PEMERINTAH ACEH  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	Ref (2)	Tahun 2021 (3)	Tahun 2020 (4)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Pajak Aceh	5.5.1.1.	1.529.610.272.807,63	1.477.991.066.969,65
Penerimaan Retribusi Aceh	5.5.1.1.	8.296.455.680,00	8.271.131.958,92
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.5.1.1.	152.434.096.229,00	181.700.799.036,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	5.5.1.1.	297.142.941.166,71	284.885.269.695,06
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.	202.310.251.468,00	541.585.506.501,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.	1.945.980.616.000,00	1.956.492.796.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.	701.839.429.030,00	661.008.601.566,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.	7.555.827.806.000,00	7.555.278.348.000,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1.	6.728.200.000,00	10.390.635.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.	11.331.098.907,00	43.126.992.771,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>12.411.501.167.288,34</b>	<b>12.720.731.147.497,63</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.	2.578.363.949.973,00	2.419.712.419.221,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.	3.662.992.920.241,16	2.992.920.704.867,99
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.	758.581.422.107,25	632.753.349.408,91
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.	133.553.450.107,35	377.503.593.012,20
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.	412.071.890,00	158.460.075.459,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.	2.119.255.328.123,00	2.539.361.586.831,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.2.	715.264.216.632,00	802.937.015.414,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>9.968.423.359.073,76</b>	<b>9.923.648.744.214,10</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>2.443.077.808.214,58</b>	<b>2.797.082.403.283,53</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.1.	59.791.509.208,64	76.187.421.357,82
Perolehan Tanah	5.5.2.1.	24.534.152.448,00	71.123.465.326,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.	258.810.818.456,38	421.332.296.912,80
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.	734.555.768.109,80	567.190.383.202,63
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.1.	1.055.849.598.983,31	572.579.779.264,78
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.	61.582.897.723,45	29.901.815.212,36
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	5.5.2.1.	241.437.200.000,00	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.436.561.944.929,58</b>	<b>1.738.315.161.276,39</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>		<b>(2.436.561.944.929,58)</b>	<b>(1.738.315.161.276,39)</b>

Uraian (1)	Ref (2)	Tahun 2021 (3)	Tahun 2020 (4)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Aceh	5.5.3.	496.500.313,38	1.955.114.950,15
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>496.500.313,38</b>	<b>1.955.114.950,15</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Aceh Lainnya		-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh		-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>		<b>496.500.313,38</b>	<b>1.955.114.950,15</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.	744.173.732.916,72	610.822.205.136,06
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>744.173.732.916,72</b>	<b>610.822.205.136,06</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.	744.173.732.916,72	610.822.205.136,06
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>744.173.732.916,72</b>	<b>610.822.205.136,06</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>7.012.363.598,38</b>	<b>1.060.722.356.957,29</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>3.890.906.180.547,89</b>	<b>2.830.183.823.590,60</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>3.897.918.544.146,27</b>	<b>3.890.906.180.547,89</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>144.615.039,60</b>	<b>258.029.046,35</b>
<b>Saldo Akhir Kas BLUD</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>35.382.363.720,40</b>	<b>77.958.725.389,05</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Bos</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>151.089.484,12</b>	<b>494.419.799,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>3.933.680.612.390,39</b>	<b>3.969.617.354.782,29</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 27 April 2022

GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT





PEMERINTAH ACEH

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**



**PEMERINTAH ACEH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	Ref (2)	2021 (3)	2020 (4)
Ekuitas Awal	5.6.1.	27.256.349.028.467,20	25.709.483.208.840,60
Surplus/Defisit-LO	5.6.2.	1.040.137.445.090,11	1.074.541.704.541,89
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>5.6.3.</b>	<b>3.034.628.221.663,33</b>	<b>472.324.115.084,73</b>
Koreksi/Penyesuaian Piutang	5.6.3.	(451.549.762,00)	(69.992.800.220,55)
Koreksi/Penyesuaian Persediaan	5.6.3.	14.666.467.222,73	(38.755.472.221,00)
Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	5.6.3.	25.360.728,00	-
Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	5.6.3.	471.289.985,38	-
Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	5.6.3.	514.145.454,00	(845.585.451,00)
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	5.6.3.	662.564.518.061,68	240.555.245.249,91
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	5.6.3.	(352.732.121.153,93)	55.621.320.815,67
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	5.6.3.	(43.218.151.289,07)	(16.831.239.537,64)
Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	5.6.3.	(148.138.663,00)	5.838.053.434,46
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	5.6.3.	57.549.434.867,59	270.455.312.318,83
Koreksi Utang	5.6.3.	2.697.822.180.028,74	23.837.286.846,22
Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.	575.465.684,29	3.004.450.049,83
Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	5.6.3.	(3.010.679.501,08)	(562.456.200,00)
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>5.6.4.</b>	<b>31.331.114.695.220,64</b>	<b>27.256.349.028.467,20</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 27 April 2022  
GUBERNUR ACEH

**Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**



PEMERINTAH ACEH

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Laporan Keuangan Tahun 2021  
Audited*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan ketentuan umum pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance*, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas untuk membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Gubernur Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Aceh melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

Pemerintah Aceh selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2021 untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan alokasi anggaran dan sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Aceh atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Aceh, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Aceh, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal tersebut dapat diketahui dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Aceh yang akan disajikan dalam laporan keuangan ini.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), dan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
- y. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah dilakukan Refocusing dan beberapa kali pengeseran, terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2021;

- z. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 54);
- aa. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 95);
- bb. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
- cc. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 1).

### 1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBA, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya**

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **Bab VI Informasi Penting dan Kewajiban Kontijensi serta Upaya yang Mempengaruhi Laporan Keuangan**

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh



yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

## **Bab VII Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada; penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya; penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca; penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan; dan kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

## **Bab VIII Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA**

#### **2.1. Potensi Ekonomi Provinsi Aceh**

##### **2.1.1. Ekspor**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian nasional. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan ekonomi regional dan pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi setiap penduduknya. Idealnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berbagai inovasi dan teknologi juga semakin ditingkatkan guna mengintensifkan pemanfaatan berbagai sumber daya tersebut. Penggunaan teknologi dimaksud dengan tetap memperhatikan lingkungan, kearifan lokal dan budaya setempat yang positif dalam melancarkan proses pembangunan.

Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa ke luar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (seperti barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri yang hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Sebagai salah satu sektor perekonomian, kegiatan ekspor menduduki peranan yang cukup penting melalui perluasan pasar ke beberapa negara. Nilai ekspor barang provinsi Aceh tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 502.956.835 USD atau meningkat sebesar 67,42% dari nilai ekspor tahun 2020 sebesar 300.417.274 USD.

**A. Komoditas Ekspor****Komoditas Ekspor Aceh Tahun 2021 sebesar 9,623 Juta kg****Tabel 2. 1. Komoditas Ekspor**

Jenis Komoditas (kg) (US \$) <i>Type of Commodity</i>	(kg)		(US \$)	
	2020 (2)	2021 (3)	2020 (4)	2021 (5)
Buah-buahan	16.560.230	14.165.788	22.972.440	25.159.843
Kopi, Teh, Rempah-rempah	18.679.880	16.974.120	83.249.482	72.388.421
Lemak & minyak hewan/nabati	9.707.822	39.595	5.136.538	242.034
Daging dan Ikan Olahan	2.035.760	2.932.620	8.013.236	11.566.480
Bahan bakar mineral	8.035.230.116	9.515.563.058	156.171.734	345.174.391
Bahan kimia anorganik	10.865.432	13.741.550	1.378.058	6.267.113
Pupuk	2	38.256.534	2	14.701.240
Minyak atsiri, Kosmetik wangi-wangian	198.851	4.581	7.625.704	154.147
Berbagai produk kimia	6.198.948	6.569.840	7.979.226	12.720.243
Perabot, penerangan rumah	55.337	1.156.572	278.282	4.216.179
Lainnya	18.640.685	14.310.573	7.612.572	10.366.744
<b>Aceh</b>	<b>8.118.173.063</b>	<b>9.623.714.831</b>	<b>300.417.274</b>	<b>502.956.835</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Pada tahun 2020, komoditas ekspor terbesar Aceh berupa bahan bakar mineral (batu bara) sebesar 156.171.734 USD, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 yaitu meningkat sebesar 345.174.391 USD. Komoditas ekspor kedua terbanyak tahun 2021 adalah kopi, teh, rempah-rempah, meskipun mengalami jumlah ekspor dari tahun 2020 namun masih tinggi dibandingkan komoditas lainnya yaitu sebesar 72.388.421 USD. Sementara itu ekspor buah-buahan, pupuk serta daging dan ikan olahan juga mengalami kenaikan ekspor masing-masing sebesar 25.159.843 USD untuk komoditas buah-buahan, pupuk sebesar 14.701.240 USD dan daging dan ikan olahan sebesar 11.566.480 USD.

**B. Pelabuhan Muat Ekspor****Tabel 2. 2. Pelabuhan Muat Ekspor**

Jenis Komoditas <i>Loading Port</i>	(kg)		(US \$)	
	2020 (2)	2021 (3)	2020 (4)	2021 (5)
Lhokseumawe	4.150.585	49.157.846	1.071.507	20.486.240
Calang	9.695.950	-	5.020.338	-
Meulaboh	8.035.230.000	9.515.563.000	156.171.214	345.174.262
Blang Lancang (Arun)	6.716.715	2.851.456	308.778	502.926
Krueng R Malahayati	98.778	133.530	696.730	892.451
Kuala Langsa	16.880.002	9.951.518	1.762.580	1.242.818
Belawan	44.936.627	45.533.696	130.825.546	128.160.825
Tanjung Priok	11.431	281.436	60.240	875.237
Soekarno Hatta (Udara)	103.571	99.748	3.328.824	5.372.927
Tanjung Perak	307.030	111.220	1.073.692	151.876
Lainnya	42.374	31.381	97.825	97.273
<b>Aceh</b>	<b>8.118.173.063</b>	<b>9.623.714.831</b>	<b>300.417.274</b>	<b>502.956.835</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Tiga pelabuhan utama dalam muat komoditas ekspor Aceh tahun 2021 adalah Meulaboh, Lhokseumawe dan Kuala Langsa. Komoditas yang dimuat di pelabuhan Meulaboh dengan komoditas Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal



(Batu bara) sebesar 345.174.262 USD, selanjutnya komoditas utama yang dimuat dari pelabuhan Lhokseumawe untuk diekspor adalah komoditas Crude Palm Oil (Minyak Sawit Mentah) sebesar 20.486.240 USD, sedangkan komoditas yang dimuat dari pelabuhan Kuala Langsa untuk diekspor adalah Palm Kernel Shells (cangkang sawit) sebesar 1.242.818 USD.

Komoditas ekspor dari Provinsi Aceh selain diekspor melalui pelabuhan yang ada di Provinsi Aceh, juga diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain. Hal ini selain dikarenakan masalah infrastruktur pelabuhan di Provinsi Aceh yang belum memenuhi standar untuk melakukan ekspor beberapa komoditas ke negara-negara tertentu juga karena perusahaan eksportir yang memusatkan kegiatan ekspornya bukan di Provinsi Aceh karena alasan efisiensi usaha.

Pada tahun 2021, komoditas ekspor dari Provinsi Aceh diekspor melalui pelabuhan di provinsi Aceh sebesar 79,28 persen dan melalui provinsi lain sebesar 20,72 persen. Total ekspor barang asal Provinsi Aceh tahun 2021 adalah sebesar 502,96 juta USD atau turun sebesar 67,42 persen dari tahun 2020. Ekspor barang melalui Provinsi lain paling besar adalah melalui Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 128.160.825 juta USD.

### C. Negara Tujuan Ekspor

Ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Aceh terbesar tertuju ke negara India dengan share sebesar 60,21 persen dari total ekspor dari pelabuhan di Aceh. Komoditas yang diekspor ke India berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal dan Crude Palm Oil yaitu sebesar 302.841.831 USD USD. Ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Aceh ditujukan kepada negara-negara yang berada di Asia. Dari keseluruhan ekspor tersebut, sebesar 17,59 persen diekspor ke negara-negara yang berada di wilayah ASEAN.

**Tabel 2. 3. Negara Tujuan Ekspor**

Jenis Komoditas <i>Destination Country</i> (1)	(kg)		(US \$)	
	2020 (2)	2021 (3)	2020 (4)	2021 (5)
Japan	18.922.662	12.543.513	4.321.568	7.448.009
Tiongkok	98.044.403	292.700.464	6.738.697	19.801.527
Thailand	590.596.090	802.581.807	25.414.388	49.266.612
Viet Nam	848.628.075	316.544.191	17.076.395	16.219.940
India	6.524.012.615	8.134.465.653	140.776.329	302.841.831
Iran	10.986.330	4.190.000	15.068.999	8.494.724
United States	9.132.361	9.068.862	43.757.848	40.084.051
Canada	1.122.731	1.202.430	5.578.839	5.156.002
Jerman	1.253.488	620.120	6.007.363	2.462.421
Belgium	2.179.200	2.782.500	11.752.310	13.077.968
Lainnya	13.295.108	47.015.291	23.924.538	38.103.750
<b>Aceh</b>	<b>8.118.173.063</b>	<b>9.623.714.831</b>	<b>300.417.274</b>	<b>502.956.835</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh

#### 2.1.2. Impor

Impor barang dari luar negeri diperlukan jika barang yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri, misalnya peralatan dan mesin-mesin yang belum atau tidak diproduksi di dalam negeri.



## A. Komoditas Utama Impor

Komoditas impor non migas ke Aceh terbesar dan terus meningkat adalah kelompok komoditas mesin-mesin/pesawat mekanik yaitu sebesar 99.636.881 dan mesin/peralatan listrik sebesar 10.636.588 USD sementara komoditas impor yang lain banyak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2. 4. Komoditas Utama Impor**

Jenis Komoditas <i>Type of Commodity</i>	(kg)		(US \$)	
	2020 (1)	2021 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Kopi, Teh, Rempah-rempah	23.044	4.872	94.435	33.741
Ampas/Sisa Industri Makanan	41.190	8.911	132.234	30.068
Garam, Belerang, Kapur	61.600.000	34.600.000	1.681.020	975.570
Bahan bakar mineral	16.627.590	10.908.188	5.718.196	4.701.961
Bahan kimia organik	2.199.195	2.278.469	1.885.093	2.774.768
Karet dan Barang dari Karet	37	13.849	2.559	110.240
Benda-benda dari Batu, Gips, dan Semen	23.289.300	350	3.094.627	1.076
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	5.821.933	23.434.537	12.617.270	99.636.881
Mesin/peralatan listrik	4.321	1.075.539	80.599	10.636.588
Kendaraan dan Bagiannya	57.775	-	321.863	-
Lainnya	31.054	30.053	148.822	147.416
<b>Aceh</b>	<b>109.695.439</b>	<b>72.354.768</b>	<b>25.776.718</b>	<b>119.048.309</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh

## B. Pelabuhan Bongkar Impor

Impor Aceh dilakukan melalui beberapa pelabuhan dan bandar udara. Impor paling besar melalui pelabuhan Calang sebesar 110.410.012 USD bertambah sebanyak 94.987.941 USD dari tahun 2020, selanjutnya melalui pelabuhan Krueng Raya, Malahayati yaitu senilai 3.365.569 USD, melalui pelabuhan kuala Langsa sebesar 2.774.768 USD, melalui pelabuhan Lhokseumawe sebesar 1.485.649 USD dan melalui pelabuhan Lhoknga 975.570 USD.

**Tabel 2. 5. Pelabuhan Bongkar Impor**

Pelabuhan Muat Loading Port	(kg)		(US \$)	
	2020 (1)	2021 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Sabang	14	-	207	-
Lhokseumawe	4.174.064	3.030.529	1.650.122	1.485.649
Calang	29.040.039	24.530.909	15.422.071	110.410.012
Tapaktuan	14.549	9.800	121.211	36.741
Bakongan	22	-	264	-
Labuhan Haji	6	-	90	-
Blang Bintang (U)	12.665	-	82.943	-
Krueng Raya Malahayati	12.654.873	7.905.061	4.932.734	3.365.569
Kuala Langsa	2.199.194	2.278.469	1.885.053	2.774.768
Lhoknga	61.600.000	34.600.000	1.681.020	975.570
Soekarno Hatta (Udara)	13	-	1.003	-
<b>Aceh</b>	<b>109.695.439</b>	<b>72.354.768</b>	<b>25.776.718</b>	<b>119.048.309</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh



### C. Negara Asal Impor

Impor Aceh tahun 2021 didatangkan dari beberapa negara. Impor paling besar berasal dari Tiongkok, dengan nilai sebesar 110.446.753 USD, selanjutnya barang yang diimpor melalui Singapura, yaitu senilai 6.217.878 USD, dari negara Malaysia senilai 1.258.851 USD dan dari negara Thailand senilai 1.124.827 USD.

**Tabel 2. 6. Negara Asal Impor**

Jenis Komoditas Country of Origin (1)	(kg)		(US \$)	
	2020 (2)	2021 (3)	2020 (4)	2021 (5)
Japan	6.972	-	8.040	-
Korea Selatan	272	-	4.046	-
Taiwan	3.006	-	14.785	-
Tiongkok	29.186.249	24.540.709	16.172.533	110.446.753
Thailand	61.665.765	34.627.402	1.904.379	1.124.827
Singapore	15.938.988	10.077.879	6.693.754	6.217.878
Malaysia	2.888.931	3.108.778	934.282	1.258.851
United States	4.186	-	27.083	-
Netherlands	56	-	2.809	-
Jerman	237	-	7.017	-
<b>Aceh</b>	<b>109.694.662</b>	<b>72.354.768</b>	<b>25.768.728</b>	<b>119.048.309</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh

### 2.2. Indikator Ekonomi Makro

**Tabel 2. 7. Indikator Ekonomi Makro**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,99	72,18
	a. Usia Harapan Hidup	Tahun	69,93	69,96
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,31	14,36
	c. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,33	9,37
	d. Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	9.492	9.572
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	5.388.093	5.459.114
	a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,35	1,32
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)			
	a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Miliar rupiah	166377,3*	184976,30
	b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Miliar rupiah	131585,02*	135249,59
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,37*	2,79
	a. Inflasi	Persen	3,59**	2,24**
	b. Indeks Gini	Indeks	0,32	0,32
5	Ketenagakerjaan:			
	a. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)		3.813.757	3.939.497
	b. Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	2.510.358	2.548.929
	c. Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas)	Jiwa	2.374.294	2.388.367
	d. Pengangguran	Jiwa	136.064	160.562
	e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65,10	65,14
	f. Tingkat Pengangguran Terbuka		6,59	6,30
6	Kemiskinan			
	a. Penduduk Miskin	Ribu jiwa	814,91	834,24
	b. Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk	Persen	14,99	15,33
7	Ekspor		300,42	502,96
8	Import		25,78	119,05

Sumber: BPS Provinsi Aceh



### 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Terkait dengan Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Aceh dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perhitungan BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh tahun 2021 mencapai 72,18 atau meningkat 0,19 poin (0,26 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,99). "Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan, setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, peningkatan IPM Provinsi Aceh sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).

Diketahui IPM secara rincian yakni Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Provinsi Aceh telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 0,88 tahun. UHH Provinsi Aceh pada tahun 2010 sebesar 69,08 tahun, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 69,96 tahun. Selanjutnya dari dimensi pengetahuan, Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 HLS provinsi Aceh adalah 14,36 dan RLS sebesar 9,37.

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Provinsi Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp9,572 juta per tahun. Angka tersebut meningkat 0,84 persen atau sebesar 80 ribu rupiah dibandingkan tahun 2020. Selama periode 2010-2021, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat secara rata-rata meningkat sebesar 1,73 persen per tahun. Dengan demikian, selama 2010-2021 IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen.

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya adalah tingkat kemiskinan. Untuk mengukur keadaan kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Pemerintah Provinsi Aceh dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 mencapai 850.26 ribu orang menurun dari tahun 2020 sebesar 834,24 ribu orang, selama periode Maret 2021–September 2021, persentase penduduk miskin di Aceh naik dari 15,33 persen menjadi 15,53 persen. Di daerah perdesaan naik 0,26 poin (dari 17,78 persen menjadi 18,04 persen) sedangkan di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,12 poin (dari 10,46 persen menjadi 10,58 persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin dua tahun terakhir ini terutama disebabkan oleh kondisi pandemi yang masih berlanjut yang sangat membatasi gerak para pelaku usaha di Aceh.

**Tabel 2. 8. Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Indikator Pembentuk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2021**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	<i>Indicator</i>				IPM
	Umur Harapan Hidup	Harapan Rata-rata Lama Lama Sekolah Sekolah	Pengeluaran Per Kapita		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simeulue	65,28	13,9	9,48	7,148	66,41
Aceh Singkil	67,43	14,32	8,68	8,776	69,22
Aceh Selatan	64,4	14,6	8,88	8,18	67,44
Aceh Tenggara	68,22	14,01	9,67	8,03	69,44
Aceh Timur	68,74	13,04	8,21	8,577	67,83
Aceh Tengah	68,86	14,28	9,86	10,78	73,37
Aceh Barat	67,99	14,61	9,55	9,593	71,67
Aceh Besar	69,79	14,73	10,33	9,644	73,58
Pidie	66,95	14,47	9	9,86	70,7
Bireuen	71,26	14,84	9,29	8,867	72,33
Aceh Utara	68,81	14,71	8,64	8,201	69,46
Aceh Barat Daya	65,06	13,65	8,67	8,428	66,99
Gayo Lues	65,53	13,78	8,4	8,856	67,56
Aceh Tamiang	69,63	13,76	8,91	8,367	69,48
Nagan raya	69,24	14,14	8,69	8,292	69,31
Aceh Jaya	67,19	13,99	8,71	9,666	69,84
Bener Meriah	69,26	13,47	10	11,118	73,27
Pidie Jaya	70,18	14,97	9,34	10,29	73,6
Banda Aceh	71,52	17,8	12,83	16,891	85,71
Sabang	70,56	14,13	11,18	11,378	76,11
Langsa	69,43	15,63	11,12	12,067	77,44
Lhokseumawe	71,64	15,21	11,11	11,39	77,57
Subulussalam	64,07	14,62	8,03	7,385	65,27
<b>Aceh</b>	<b>69,96</b>	<b>14,36</b>	<b>9,37</b>	<b>9,572</b>	<b>72,18</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh

**2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto**

Nilai PDRB ADHB Provinsi Aceh menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Rata-rata selama periode tahun 2017-2021, kenaikan PDRB ADHB terjadi sebesar Rp.7,83 triliun per tahunnya. Di Aceh, PDRB dihitung dengan dua jenis, yaitu PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. PDRB ADHB Aceh dengan migas tahun 2021 adalah sebesar Rp.184,98 triliun, atau meningkat Rp.18,60 triliun dibandingkan dengan nilai tahun 2020. Sementara itu PDRB ADHB Aceh tanpa migas tahun 2021 terhitung sebesar Rp.177,14 triliun rupiah atau meningkat Rp.15,84 triliun dari nilai tahun 2020. Untuk melihat laju pertumbuhan PDRB provinsi Aceh dapat dilihat dari perkembangan PDRB setiap kabupaten di provinsi Aceh selama lima tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan dalam table dibawah ini:

**Tabel 2. 9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (persen), 2017–2021**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simelue	3,18	3,08	2,62	1,77	1,62
Aceh Singkil	1,5	2,11	3,63	-4,06	1,96
Aceh Selatan	2,45	3,1	2,73	3,03	1,25
Aceh Tenggara	3,01	1,35	3,84	-3,22	-0,41





Kabupaten/Kota Regency/Municipality (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Aceh Timur	2,28	2,26	3,85	3,64	0,55
Aceh Tengah	2,08	2,11	3,2	-3,75	1,33
Aceh Barat	11,12	7,85	4,68	6,14	4,46
Aceh Besar	1,92	1,74	4,06	3,85	1,19
Pidie	2,82	2,61	3,62	1,79	1,43
Bireuen	2,02	2,3	4,5	5,4	3,15
Aceh Utara	0,76	3,25	2,77	3,35	-1,63
Aceh Barat Daya	2,73	2,93	3,61	-1	1,27
Gayo Lues	2,95	-0,45	1,01	-5,48	0,28
Aceh Tamiang	2,52	2,78	3,56	0,53	-0,47
Nagan Raya	1,95	2,29	6,67	1,42	3,61
Aceh Jaya	1,69	2,36	1,74	-0,54	0,85
Bener Meriah	2,16	2,32	3,64	-8,88	0,56
Pidie Jaya	3,53	2,45	3,76	-0,34	0,47
Banda Aceh	1,4	2,4	2,95	2,64	4,44
Sabang	4,96	4,06	6,55	-17,21	-0,08
Langsa	2,76	2,69	3,23	-5,85	2,17
Lhokseumawe	0,24	1,58	3,47	6,45	3,03
Subulussalam	2,74	2,48	4,71	-9,55	1,07

Sumber: BPS Provinsi Aceh

### 2.2.3. Inflasi

Inflasi tertinggi terjadi pada bulan November 2021 yang mencapai 0,80 persen. Sedangkan pada bulan Februari terjadi deflasi tertinggi sebesar -0,65 persen. Inflasi tertinggi pada Mei 2021 secara dominan disumbang oleh Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,62 persen dan Kelompok Transportasi sebesar 1,53 persen. Sedangkan deflasi tertinggi pada Februari 2021 secara dominan disumbang oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (-0,79 Persen) serta Kelompok Bahan Makanan (-0,65 persen).

### 2.3. Kebijakan Keuangan

Pendapatan Aceh meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Aceh, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Aceh dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Aceh. Pendapatan Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen:

1. Pendapatan Asli Aceh (PAA) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal Aceh serta lain-lain PAA yang sah.
2. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (TDBH Migas).
3. Dana Otonomi Khusus (OTSUS)
4. Lain-Lain Pendapatan yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus.

#### Strategi peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Pendapatan Aceh sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian Aceh, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan



yang bersumber dari dana transfer dan dana otonomi khusus. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan Aceh merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kemandirian Aceh harus tergambar dari semakin meningkatkannya Pendapatan Asli Aceh (PAA). Oleh karena itu, penerimaan PAA terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer dan Dana OTSUS yang memiliki jangka waktu terbatas.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dan Penagihan pajak kendaraan bermotor door to door;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan pengelolaan Aset, Zakat dan Keuangan daerah;
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan penambahan personil UPTD SKPA dan Samsat baik dari internal SKPA maupun kabupaten/kota;
8. Pengadaan Sarana dan prasarana layanan unggulan yang menghasilkan pendapatan asli aceh, baik berupa pembangunan gedung Kantor Bersama SAMSAT Subulussalam, Aceh Jaya dan Pidie Jaya, 21 unit Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, 21 unit Samsat Jempol, pembentukan dan implementasi e- retribusi dan integrasi database kendaraan bermotor secara nasional;
9. Melakukan sosialisasi optimalisasi pendapatan asli aceh;
10. Penerapan Aktif Pajak Progresif bagi kendaraan roda 4 serta 250 cc roda 2;
11. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua untuk Non BL;
12. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait penagihan Pajak Aceh dan razia lapangan secara efektif dengan mitra kerja terkait di Aceh.



Gambaran APBA Periode lima tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2. 10. APBA TA 2017-2021

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020		TA 2021	
	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>14.448.900,91</b>	<b>100,00</b>	<b>14.622.475,31</b>	<b>100,00</b>	<b>15.692.348,56</b>	<b>100,00</b>	<b>14.005.401,49</b>	<b>100,00</b>	<b>13.864.978,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.247.274,97</b>	<b>15,55</b>	<b>2.324.662,43</b>	<b>15,90</b>	<b>2.589.284,05</b>	<b>16,50</b>	<b>2.184.607,19</b>	<b>15,60</b>	<b>2.401.682,45</b>	<b>17,32</b>
Pajak Aceh	1.299.742,67	9,00	1.371.597,74	9,38	1.453.552,65	9,26	1.275.366,71	9,11	1.374.555,53	9,91
Retribusi Aceh	11.652,32	0,08	17.799,65	0,12	28.864,42	0,18	12.133,56	0,09	12.133,55	0,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	226.982,07	1,57	192.982,07	1,32	196.934,99	1,25	202.386,46	1,45	182.385,56	1,32
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	708.897,91	4,91	742.282,97	5,08	909.931,99	5,80	694.720,46	4,96	832.607,81	6,01
<b>Pendapatan Dana Perimbangan</b>	<b>3.871.303,44</b>	<b>26,79</b>	<b>3.864.634,04</b>	<b>26,43</b>	<b>4.238.307,28</b>	<b>27,01</b>	<b>4.011.409,90</b>	<b>28,64</b>	<b>3.880.058,20</b>	<b>27,98</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	238.618,10	1,65	208.727,71	1,43	184.977,03	1,18	182.205,53	1,30	153.487,13	1,11
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	11.489,96	0,08	19.239,54	0,13	100.865,15	0,64	24.006,08	0,17	-	-
Dana Alokasi Umum	2.060.263,23	14,26	2.060.263,23	14,09	2.126.193,32	13,55	1.961.334,01	14,00	1.945.980,61	14,04
Dana Alokasi Khusus	1.560.932,15	10,80	1.576.403,56	10,78	1.826.271,78	11,64	1.843.864,28	13,17	1.780.590,46	12,84
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>8.330.322,50</b>	<b>57,65</b>	<b>8.433.178,84</b>	<b>57,67</b>	<b>8.864.757,23</b>	<b>56,49</b>	<b>7.809.384,40</b>	<b>55,76</b>	<b>7.583.237,80</b>	<b>54,69</b>
Hibah	59.057,87	0,41	23.606,64	0,16	26.206,45	0,17	2.093,98	0,01	27.410,00	0,20
Dana Penyesuaian	281.026,17	1,94	379.780,60	2,60	481.079,13	3,07	252.012,08	1,80	-	-
Dana Otonomi Khusus	7.971.646,30	55,17	8.029.791,60	54,91	8.357.471,65	53,26	7.555.278,34	53,95	7.555.827,80	54,50
Pendapatan Lainnya	18.592,16	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BELANJA ACEH</b>	<b>14.911.632,80</b>	<b>100,00</b>	<b>55.044.003,93</b>	<b>100,00</b>	<b>17.327.727,84</b>	<b>100,00</b>	<b>15.827.709,38</b>	<b>100,00</b>	<b>16.482.338,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Tidak langsung</b>	<b>7.421.501,32</b>	<b>49,77</b>	<b>44.097.425,30</b>	<b>80,11</b>	<b>6.795.949,96</b>	<b>39,22</b>	<b>8.770.594,99</b>	<b>55,41</b>	<b>7.229.961,71</b>	<b>43,86</b>
Belanja Pegawai	2.413.113,43	16,18	2.393.404,74	4,35	2.540.794,10	14,66	2.829.021,39	17,87	2.829.428,31	17,17
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	680.891,61	4,57	708.607,99	1,29	805.716,05	4,65	788.203,46	4,98	907.787,48	5,51
Belanja Bantuan Sosial	268.251,07	1,80	236.705,20	0,43	13.017,35	0,08	1.085.908,44	6,86	384.303,40	2,33
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	588.421,50	3,95	653.458,75	1,19	691.397,38	3,99	883.489,94	5,58	811.201,83	4,92
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.430.680,15	23,01	105.248,62	0,19	2.647.313,01	15,28	2.744.211,29	17,34	2.149.255,32	13,04
Belanja Tidak Terduga	40.143,56	0,27	40.000.000,00	72,67	97.712,07	0,56	439.760,47	2,78	147.985,37	0,90
<b>Belanja Langsung</b>	<b>7.490.131,48</b>	<b>50,23</b>	<b>10.946.578,63</b>	<b>19,89</b>	<b>10.531.777,88</b>	<b>60,78</b>	<b>7.057.114,39</b>	<b>44,59</b>	<b>9.252.376,59</b>	<b>56,14</b>
Belanja Pegawai	554.672,12	3,72	764.428,43	1,39	762.689,40	4,40	805.372,14	5,09	-	-
Belanja Barang dan Jasa	4.460.363,24	29,91	6.880.850,56	12,50	6.098.857,56	35,20	4.157.224,23	26,27	5.936.917,13	36,02
Belanja Modal	2.475.096,12	16,60	3.301.299,64	6,00	3.670.230,92	21,18	2.094.518,02	13,23	3.315.459,46	20,12
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>462.731,90</b>	<b>100,00</b>	<b>832.354,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2.954.457,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1.822.307,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2.924.359,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>462.731,90</b>	<b>100,00</b>	<b>832.354,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2.954.457,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1.822.307,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2.924.359,85</b>	<b>100,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	-	-	65.000,00	100,00	72.000,00	100,00	-	-	307.000,00	100,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	307.000,00	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	65.000,00	100,00	72.000,00	100,00	-	-	-	-

Tabel 2.10. menunjukkan bahwa sumber pendapatan dalam struktur APBA adalah dari Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh, serta Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dalam kelompok



Pendapatan Asli Aceh. Kemudian ada Otonomi Khusus dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah, dilanjutkan dengan Tambahan Dana Migas dan Dana Alokasi Umum dalam kelompok Pendapatan Dana Perimbangan.

Komposisi pendanaan program dan kegiatan pemerintahan dalam periode tahun anggaran 2017 s.d 2021, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 yaitu pendapatan dari Pajak Aceh dianggarkan rata-rata sebesar 9,91 persen, diikuti oleh Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 14,04 persen, selanjutnya Dana Otonomi Khusus yang masih mendominasi dengan rata-rata sebesar 54,50.

Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Aceh atau PAA dianggarkan sebesar 15,60 persen, sementara tahun 2021 PAA dianggarkan sebesar 17,32 persen. Penerimaan Dana Otonomi Khusus cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 53,95 persen, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 54,50 persen. Sementara itu Dana Bagi Hasil cenderung menurun, diakibatkan oleh menurunnya penerimaan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diperkirakan akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang dengan belum adanya sumber-sumber dari ladang minyak dan gas yang baru.

#### **2.4. Kebijakan Strategis**

Pemerintah Aceh telah menuangkan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar dalam RPJM untuk tahun 2017 – 2022 dengan mempertimbangkan seluruh potensi, kondisi, tantangan, dan peluang yang menyertai rencana pembangunan. Rencana pembangunan berkelanjutan juga telah di kerucutkan dengan mengurutkan rencana tahunan berdasarkan prioritas pembangunan dengan tetap berpedoman pada visi dan misi pemerintah Aceh dalam menjalankan berbagai program tersebut. Secara ringkas, prioritas pembangunan pemerintah Aceh selama lima tahunan dapat dilihat pada table berikut;

1. Mutu Pendidikan dan Dinul Islam;
2. Akses dan Kualitas Kesehatan;
3. Infrastruktur Terintegrasi;
4. Ketahanan dan Kemandirian Pangan;
5. Nilai Tambah Sektor Strategis;
6. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
7. Investasi dan Kemandirian Energi;
8. Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan;
9. Perdamaian dan Reformasi Birokrasi.



Tabel 2. 11. Perubahan APBA Akibat Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran 2021

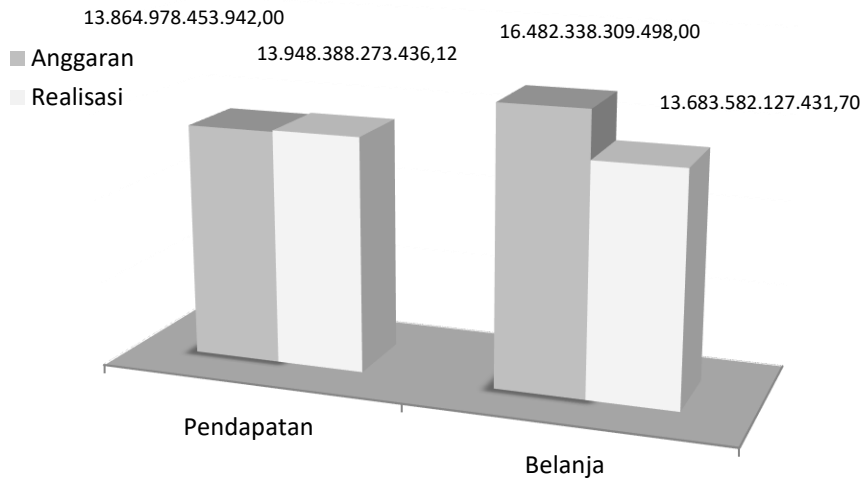
Uraian (1)	APBA Murni 2021 Qanun 1 Tahun 2021 (2)	Jumlah (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
		Pergeseran I No Pergub 22 Thn 2021 (3)	Pergeseran II No Pergub 30 Thn 2021 (4)	Pergeseran III No Pergub 34 Thn 2021 (5)	Pergeseran IV No Pergub 39 Thn 2021 (6)	Pergeseran V No Pergub 43 Thn 2021 (6)	(Rp) (7)=(2)-(6) (7)	% (8) (8)
<b>PENDAPATAN ACEH</b>								
<b>Pendapatan Asli Aceh</b>	<b>2.401.682.455.965,00</b>	<b>2.401.682.455.965,00</b>	<b>2.401.682.455.965,00</b>	<b>2.401.682.455.965,00</b>	<b>2.401.682.455.965,00</b>	<b>2.401.682.455.965,00</b>	-	-
Pendapatan Pajak Aceh	1.374.555.532.889,00	1.374.555.532.889,00	1.374.555.532.889,00	1.374.555.532.889,00	1.374.555.532.889,00	1.374.555.532.889,00	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	12.133.554.700,00	12.133.554.700,00	12.133.554.700,00	12.133.554.700,00	12.133.554.700,00	12.133.554.700,00	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAA Yang Sah	182.385.550.448,00	182.385.550.448,00	182.385.550.448,00	182.385.550.448,00	182.385.550.448,00	182.385.550.448,00	-	-
	832.607.817.928,00	832.607.817.928,00	832.607.817.928,00	832.607.817.928,00	832.607.817.928,00	832.607.817.928,00	-	-
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>11.754.301.755.400,00</b>	<b>11.754.301.755.400,00</b>	<b>11.754.301.755.400,00</b>	<b>11.435.885.996.400,00</b>	<b>11.435.885.996.400,00</b>	<b>11.435.885.996.400,00</b>	<b>318.415.759.000,00</b>	<b>2,71</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3.941.745.750.400,00</b>	<b>3.941.745.750.400,00</b>	<b>3.941.745.750.400,00</b>	<b>3.873.329.990.400,00</b>	<b>3.873.329.990.400,00</b>	<b>3.873.329.990.400,00</b>	<b>68.415.760.000,00</b>	<b>1,74</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	153.487.130.400,00	153.487.130.400,00	153.487.130.400,00	153.487.130.400,00	153.487.130.400,00	153.487.130.400,00	-	-
Dana Alokasi Umum	2.010.367.360.000,00	2.010.367.360.000,00	2.010.367.360.000,00	1.945.980.616.000,00	1.945.980.616.000,00	1.945.980.616.000,00	64.386.744.000,00	3,20
Dana Alokasi Khusus	1.777.891.260.000,00	1.777.891.260.000,00	1.777.891.260.000,00	1.773.862.244.000,00	1.773.862.244.000,00	1.773.862.244.000,00	4.029.016.000,00	0,23
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>7.812.556.005.000,00</b>	<b>7.812.556.005.000,00</b>	<b>7.812.556.005.000,00</b>	<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>249.999.999.000,00</b>	<b>3,20</b>
Dana Insentif Daerah	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.805.827.805.000,00	7.805.827.805.000,00	7.805.827.805.000,00	7.555.827.806.000,00	7.555.827.806.000,00	7.555.827.806.000,00	249.999.999.000,00	3,20
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	-	-
Pendapatan Hibah	27.410.001.577,00	27.410.001.577,00	27.410.001.577,00	27.410.001.577,00	27.410.001.577,00	27.410.001.577,00	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>14.183.394.212.942,00</b>	<b>14.183.394.212.942,00</b>	<b>14.183.394.212.942,00</b>	<b>13.864.978.453.942,00</b>	<b>13.864.978.453.942,00</b>	<b>13.864.978.453.942,00</b>	<b>318.415.759.000,00</b>	<b>2,24</b>
<b>BELANJA ACEH</b>								
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.982.079.906.265,00</b>	<b>9.982.234.783.031,00</b>	<b>9.982.234.783.031,00</b>	<b>9.996.229.301.737,00</b>	<b>9.996.229.301.737,00</b>	<b>10.058.436.337.426,00</b>	<b>(76.356.431.161,00)</b>	<b>(0,76)</b>
Belanja Pegawai	2.914.739.324.873,00	2.914.739.324.873,00	2.914.739.324.873,00	2.854.969.184.629,00	2.854.969.184.629,00	2.829.428.312.694,00	85.311.012.179,00	2,93
Belanja Barang dan Jasa	5.773.691.944.743,00	5.775.404.566.343,00	5.775.404.566.343,00	5.849.169.225.293,00	5.849.169.225.293,00	5.936.917.132.917,00	(163.225.188.174,00)	(2,83)
Belanja Hibah	907.326.772.760,00	907.787.487.926,00	907.787.487.926,00	907.787.487.926,00	907.787.487.926,00	907.787.487.926,00	(460.715.166,00)	(0,05)
Belanja Bantuan Sosial	386.321.863.889,00	384.303.403.889,00	384.303.403.889,00	384.303.403.889,00	384.303.403.889,00	384.303.403.889,00	2.018.460.000,00	0,52

Uraian (1)	APBA Murni 2021 Qanun 1 Tahun 2021 (2)	Jumlah (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
		Pergesaran I No Pergub 22 Thn 2021 (3)	Pergesaran II No Pergub 30 Thn 2021 (4)	Pergesaran III No Pergub 34 Thn 2021 (5)	Pergesaran IV No Pergub 39 Thn 2021 (6)	Pergesaran V No Pergub 43 Thn 2021 (6)	(Rp) (7)=(2)-(6)	% (8)
		<b>BELANJA Modal</b>	<b>3.339.924.118.950,00</b>	<b>3.339.769.242.184,00</b>	<b>3.339.769.242.184,00</b>	<b>3.319.367.168.486,00</b>	<b>3.319.367.168.486,00</b>	<b>3.315.459.457.224,00</b>
Belanja Modal Tanah	98.508.019.284,00	98.508.019.284,00	98.508.019.284,00	98.508.019.284,00	98.508.019.284,00	98.508.019.284,00	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.533.407.299,00	354.639.245.699,00	354.639.245.699,00	363.841.198.987,00	363.841.198.987,00	366.162.644.235,00	(12.629.236.936,00)	(3,57)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.090.490.036.873,00	1.089.229.321.707,00	1.089.229.321.707,00	1.059.625.294.721,00	1.059.625.294.721,00	1.053.964.400.810,00	36.525.636.063,00	3,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.595.091.662.803,00	1.595.091.662.803,00	1.595.091.662.803,00	1.595.091.662.803,00	1.595.091.662.803,00	1.595.091.662.803,00	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	202.300.992.691,00	202.300.992.691,00	202.300.992.691,00	202.300.992.691,00	202.300.992.691,00	201.732.730.092,00	568.262.599,00	0,28
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>347.873.793.729,00</b>	<b>347.873.793.729,00</b>	<b>347.873.793.729,00</b>	<b>169.000.597.180,00</b>	<b>169.000.597.180,00</b>	<b>147.985.369.115,00</b>	<b>199.888.424.614,00</b>	<b>57,46</b>
Belanja Tidak Terduga	347.873.793.729,00	347.873.793.729,00	347.873.793.729,00	169.000.597.180,00	169.000.597.180,00	147.985.369.115,00	199.888.424.614,00	57,46
<b>BELANJA Transfer</b>	<b>3.093.592.153.192,00</b>	<b>3.093.592.153.192,00</b>	<b>3.093.592.153.192,00</b>	<b>2.960.457.145.733,00</b>	<b>2.960.457.145.733,00</b>	<b>2.960.457.145.733,00</b>	<b>133.135.007.459,00</b>	<b>4,30</b>
Belanja Bagi Hasil	811.201.817.610,00	811.201.817.610,00	811.201.817.610,00	811.201.817.610,00	811.201.817.610,00	811.201.817.610,00	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	2.282.390.335.582,00	2.282.390.335.582,00	2.282.390.335.582,00	2.149.255.328.123,00	2.149.255.328.123,00	2.149.255.328.123,00	133.135.007.459,00	5,83
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.763.469.972.136,00</b>	<b>16.763.469.972.136,00</b>	<b>16.763.469.972.136,00</b>	<b>16.445.054.213.136,00</b>	<b>16.445.054.213.136,00</b>	<b>16.482.338.309.498,00</b>	<b>281.131.662.638,00</b>	<b>1,68</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(2.580.075.759.194,00)</b>	<b>(2.580.075.759.194,00)</b>	<b>(2.580.075.759.194,00)</b>	<b>(2.580.075.759.194,00)</b>	<b>(2.580.075.759.194,00)</b>	<b>(2.617.359.855.556,00)</b>	<b>37.284.096.362,00</b>	<b>(1,45)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>								
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.887.075.759.194,00</b>	<b>2.887.075.759.194,00</b>	<b>2.887.075.759.194,00</b>	<b>2.887.075.759.194,00</b>	<b>2.887.075.759.194,00</b>	<b>2.924.359.855.556,00</b>	<b>(37.284.096.362,00)</b>	<b>(1,29)</b>
Penggunaan SiLPA	2.887.075.759.194,00	2.887.075.759.194,00	2.887.075.759.194,00	2.887.075.759.194,00	2.887.075.759.194,00	2.924.359.855.556,00	(37.284.096.362,00)	(1,29)
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>307.000.000.000,00</b>	<b>307.000.000.000,00</b>	<b>307.000.000.000,00</b>	<b>307.000.000.000,00</b>	<b>307.000.000.000,00</b>	<b>307.000.000.000,00</b>	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	-	-
Penyertaan Modal Daerah	242.000.000.000,00	242.000.000.000,00	242.000.000.000,00	242.000.000.000,00	242.000.000.000,00	242.000.000.000,00	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>2.580.075.759.194,00</b>	<b>2.580.075.759.194,00</b>	<b>2.580.075.759.194,00</b>	<b>2.580.075.759.194,00</b>	<b>2.580.075.759.194,00</b>	<b>2.617.359.855.556,00</b>	<b>(37.284.096.362,00)</b>	<b>(1,45)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran (TA) 2021 dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kinerja pencapaian pendapatan Aceh dan sisi kinerja belanja Aceh baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBA TA 2021. Gambar 3.1 di bawah ini menggambarkan pelaksanaan APBA 2021 dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang dicapai.

**Gambar 3.1. Anggaran dan Realisasi APBA Tahun Anggaran 2021**



*Sumber: LRA TA 2021 (Audited)*

Dari Gambar 3.1 di atas kita ketahui bahwa realisasi pendapatan lebih besar dari pada belanja sehingga terjadi surplus sebesar Rp264.806.146.004,44. Bila dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu, maka TA 2021 terjadi penurunan perolehan pendapatan sebesar 3,52%, sedangkan realisasi belanja terjadi kenaikan sebesar 3,23%.

### 3.1. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh

Pencapaian realisasi menurut kelompok pendapatan Aceh TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

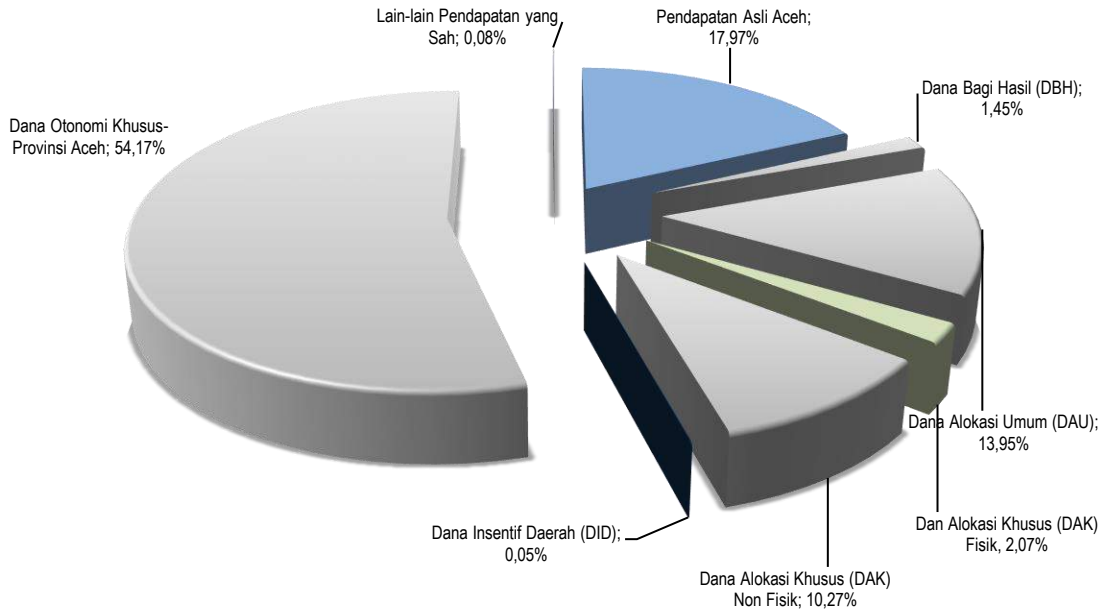
**Tabel 3. 1. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh TA 2021  
Menurut Kelompok Pendapatan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Pendapatan Asli Aceh	2.401.682.455.965,00	2.505.887.909.031,12	104,34	2.570.775.877.183,15
2	Pendapatan Transfer	11.435.885.996.400,00	11.431.169.265.498,00	99,96	11.826.017.687.067,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	27.410.001.577,00	11.331.098.907,00	41,34	43.126.992.771,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>13.864.978.453.942,00</b>	<b>13.948.388.273.436,12</b>	<b>100,60</b>	<b>14.439.920.557.021,15</b>

*Sumber : sipkd.acehprov.go.id*

Sedangkan kontribusi yang diberikan bagi pendapatan Aceh pada TA 2021 dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.2 di bawah ini.

**Gambar 3.2. Kontribusi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2021**



Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Dari Gambar 3.2 di atas, tampak bahwa Dana Otonomi Khusus memberikan kontribusi paling besar dibandingkan pendapatan lainnya yaitu 54,17% dari total keseluruhan pendapatan, sebagaimana tercermin pada struktur Pendapatan Aceh, sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Aceh dalam kurun waktu yang sama terhadap Pendapatan Aceh masih tergolong sangat kecil hanya mencapai 17,97%. Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada penerimaan Dana Otonomi Khusus dalam membiayai pembangunan, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian fiskal Aceh. Terlebih lagi pendapatan dari Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya.

Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Aceh jika dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan dan Otonomi Khusus) mencerminkan bahwa belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber Pendapatan Asli Aceh masih didominasi oleh Pajak Daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor, padahal sumber pendapatan tersebut bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan serta rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Secara detail realisasi Pendapatan Aceh TA 2021 berdasarkan objek penerimaan disajikan dalam Tabel 3.2.





Tabel 3. 2. Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan Tahun Anggaran 2021

URAIAN 1	ANGGARAN 2	REALISASI 3	% 4
<b>PENDAPATAN ACEH</b>	<b>13.864.978.453.942,00</b>	<b>13.948.388.273.436,12</b>	<b>100,60</b>
<b>PENDAPATAN ASLI ACEH</b>	<b>2.401.682.455.965,00</b>	<b>2.505.887.909.031,12</b>	<b>104,34</b>
<b>PAJAK ACEH</b>	<b>1.374.555.532.889,00</b>	<b>1.529.610.318.107,63</b>	<b>111,28</b>
Pajak Kendaraan Bermotor	433.680.500.000,00	496.878.691.912,00	114,57
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	277.507.310.499,00	315.373.023.780,00	113,64
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	318.285.069.211,00	349.120.764.433,00	109,69
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.680.000.000,00	2.730.279.025,63	162,52
Pajak Rokok	343.402.653.179,00	365.507.558.957,00	106,44
<b>RETRIBUSI ACEH</b>	<b>12.133.554.700,00</b>	<b>8.307.103.680,00</b>	<b>68,46</b>
Retribusi Jasa Umum	1.372.480.200,00	2.579.285.030,00	187,93
Retribusi Jasa Usaha	10.015.424.500,00	4.853.791.350,00	48,46
Retribusi Perizinan Tertentu	745.650.000,00	874.027.300,00	117,22
<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN ACEH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>182.385.550.448,00</b>	<b>152.434.096.229,00</b>	<b>83,58</b>
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Bank Aceh Syariah	182.385.550.448,00	152.434.096.229,00	83,58
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI ACEH YANG SAH</b>	<b>832.607.817.928,00</b>	<b>815.529.586.674,66</b>	<b>97,95</b>
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	13.700.000.000,00	13.067.589.205,05	95,38
Hasil Kerja Sama Daerah	-	4.471.257.706,00	-
Jasa Giro	20.000.000.000,00	21.867.510.208,30	109,34
Pendapatan Bunga	136.028.000.000,00	147.090.438.861,74	108,13
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	1.493.983.776,08	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	13.000.000.000,00	13.700.737.110,72	105,39
Pendapatan dari Pengembalian	-	8.911.378.129,13	-
Pendapatan BLUD	538.779.817.928,00	518.506.877.653,45	96,24
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	111.100.000.000,00	86.426.618.364,02	77,79
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>3.873.329.990.400,00</b>	<b>3.868.613.259.498,00</b>	<b>99,88</b>
Dana Bagi Hasil (DBH)	153.487.130.400,00	202.310.251.468,00	131,81
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.945.980.616.000,00	1.945.980.616.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	318.460.490.000,00	288.201.609.176,00	90,50
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.455.401.754.000,00	1.432.120.782.854,00	98,40
<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>	<b>6.728.200.000,00</b>	<b>6.728.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dana Insentif Daerah (DID)	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	100,00
<b>DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR</b>	<b>7.555.827.806.000,00</b>	<b>7.555.827.806.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	7.555.827.806.000,00	7.555.827.806.000,00	100,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ACEH YANG SAH</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	<b>11.331.098.907,00</b>	<b>41,34</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>27.410.001.577,00</b>	<b>11.331.098.907,00</b>	<b>41,34</b>
Pendapatan Hibah	27.410.001.577,00	9.815.653.425,00	35,81
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	1.515.445.482,00	-



### 3.2. Pencapaian Realisasi Belanja

Pencapaian kinerja keuangan menurut urusan Pemerintah Aceh, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program-program kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh SKPA sebagaimana Tabel 3.3.

**Tabel 3. 3. Pencapaian Realisasi Belanja**

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>9.506.417.725.671,00</b>	<b>8.153.515.081.163,39</b>
<b>1.01.</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>4.157.483.131.046,00</b>	<b>3.821.352.521.685,31</b>
1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan Aceh	3.559.656.352.270,00	3.274.593.923.669,01
1.01.0.00.0.00.08.	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	590.423.598.172,00	539.715.842.038,30
1.01.0.00.0.00.09.	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	7.403.180.604,00	7.042.755.978,00
<b>1.02.</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>	<b>2.603.432.753.468,00</b>	<b>2.429.820.930.479,10</b>
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan Aceh	1.395.688.158.388,00	1.314.303.619.835,50
1.02.0.00.0.00.02.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	1.035.740.728.866,00	963.740.707.735,02
1.02.0.00.0.00.03.	Rumah Sakit Jiwa	93.830.723.891,00	81.550.805.904,58
1.02.0.00.0.00.04.	Rumah Sakit Ibu dan Anak	78.173.142.323,00	70.225.797.004,00
<b>1.03.</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.770.699.856.938,00</b>	<b>1.191.803.854.546,24</b>
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	1.365.634.229.119,00	917.322.847.127,24
1.03.0.00.0.00.02.	Dinas Pengairan Aceh	405.065.627.819,00	274.481.007.419,00
<b>1.04.</b>	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>735.548.130.974,00</b>	<b>517.009.756.910,74</b>
1.04.1.03.0.00.01.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	735.548.130.974,00	517.009.756.910,74
<b>1.05.</b>	<b>KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>109.825.030.665,00</b>	<b>84.475.162.280,00</b>
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	44.542.064.093,00	41.487.507.089,00
1.05.0.00.0.00.02.	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	65.282.966.572,00	42.987.655.191,00
<b>1.06.</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>	<b>129.428.822.580,00</b>	<b>109.052.855.262,00</b>
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial Aceh	129.428.822.580,00	109.052.855.262,00
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.255.712.815.973,00</b>	<b>895.602.958.550,82</b>
<b>2.07</b>	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>54.670.791.083,00</b>	<b>44.960.743.374,00</b>
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	54.670.791.083,00	44.960.743.374,00
<b>2.08</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>19.395.207.642,00</b>	<b>16.126.597.530,00</b>
2.08.0.00.0.00.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	19.395.207.642,00	16.126.597.530,00
<b>2.09</b>	<b>BIDANG PANGAN</b>	<b>40.357.230.433,00</b>	<b>37.190.024.410,74</b>
2.09.0.00.0.00.01.	Dinas Pangan Aceh	40.357.230.433,00	37.190.024.410,74
<b>2.10</b>	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>13.097.533.918,00</b>	<b>11.167.643.237,00</b>
2.10.0.00.0.00.01.	Dinas Pertanahan Aceh	13.097.533.918,00	11.167.643.237,00
<b>2.11</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>177.178.613.998,00</b>	<b>160.535.363.365,35</b>
2.11.3.28.0.00.01.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	177.178.613.998,00	160.535.363.365,35
<b>2.12</b>	<b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>13.962.182.137,00</b>	<b>13.406.186.706,71</b>
2.12.0.00.0.00.01.	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	13.962.182.137,00	13.406.186.706,71
<b>2.13</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>34.662.325.598,00</b>	<b>23.890.559.791,00</b>
2.13.0.00.0.00.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	34.662.325.598,00	23.890.559.791,00
<b>2.15</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>176.165.427.540,00</b>	<b>82.550.757.979,07</b>
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan Aceh	176.165.427.540,00	82.550.757.979,07
<b>2.16</b>	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	<b>42.196.750.326,00</b>	<b>38.285.030.275,00</b>

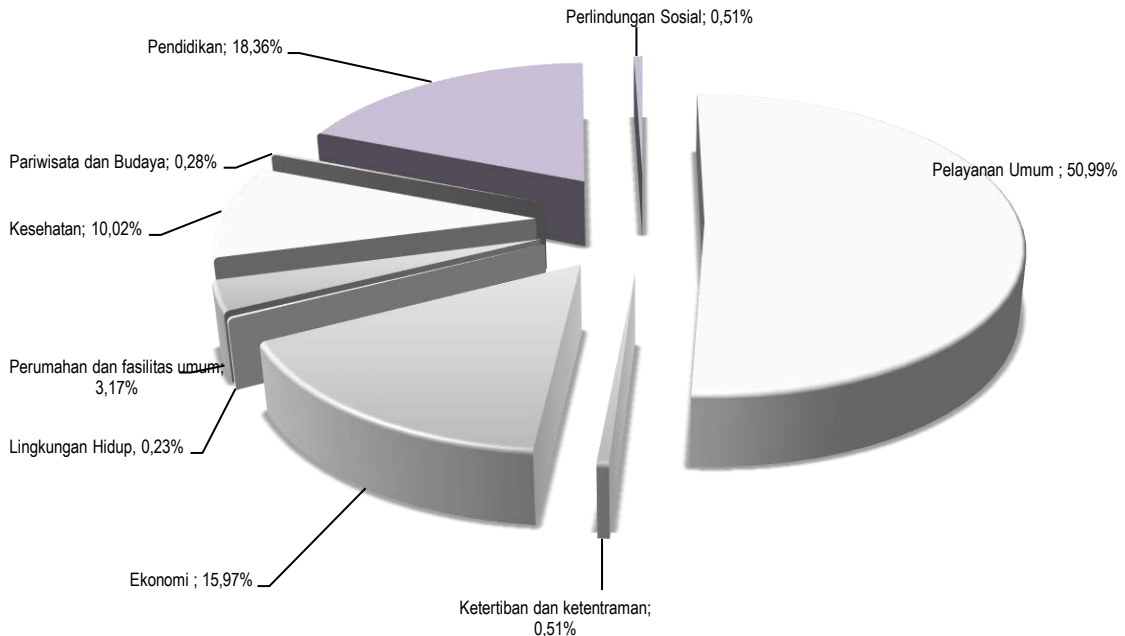


Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	42.196.750.326,00	38.285.030.275,00
<b>2.17</b>	<b>BIDANG KOPERSI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>64.214.698.016,00</b>	<b>50.085.309.572,35</b>
2.17.0.00.0.00.01.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	64.214.698.016,00	50.085.309.572,35
<b>2.18</b>	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>51.609.324.768,00</b>	<b>45.273.117.182,00</b>
2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	51.609.324.768,00	45.273.117.182,00
<b>2.19</b>	<b>BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>273.017.772.912,00</b>	<b>152.380.667.460,00</b>
2.19.0.00.0.00.01.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	273.017.772.912,00	152.380.667.460,00
<b>2.22</b>	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>147.427.975.331,00</b>	<b>112.975.547.854,43</b>
2.22.0.00.0.00.06.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	18.843.865.128,00	10.604.043.013,00
2.22.3.26.0.00.01.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	128.584.110.203,00	102.371.504.841,43
<b>2.23</b>	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>147.756.982.271,00</b>	<b>106.775.409.813,17</b>
2.23.2.24.0.00.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	147.756.982.271,00	106.775.409.813,17
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>768.354.775.286,00</b>	<b>557.183.004.834,18</b>
<b>3.25</b>	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>212.171.626.949,00</b>	<b>137.015.863.977,00</b>
3.25.0.00.0.00.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	212.171.626.949,00	137.015.863.977,00
<b>3.27</b>	<b>BIDANG PERTANIAN</b>	<b>461.482.271.160,00</b>	<b>338.057.477.995,00</b>
3.27.0.00.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	253.752.515.029,00	208.560.524.903,97
3.27.0.00.0.00.02.	Dinas Peternakan Aceh	207.729.756.131,00	129.496.953.091,03
<b>3.29</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>37.424.871.743,00</b>	<b>35.910.346.160,72</b>
3.29.0.00.0.00.01.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	37.424.871.743,00	35.910.346.160,72
<b>3.30</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>57.276.005.434,00</b>	<b>46.199.316.701,46</b>
3.30.3.31.0.00.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	57.276.005.434,00	46.199.316.701,46
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>624.024.555.156,00</b>	<b>435.163.200.871,76</b>
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>349.006.609.873,00</b>	<b>238.591.127.853,76</b>
4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah Aceh	349.006.609.873,00	238.591.127.853,76
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRA</b>	<b>275.017.945.283,00</b>	<b>196.572.073.018,00</b>
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRA	275.017.945.283,00	196.572.073.018,00
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>3.693.387.931.169,00</b>	<b>3.298.681.101.869,79</b>
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>90.987.433.327,00</b>	<b>61.028.821.951,00</b>
5.01.5.05.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	90.987.433.327,00	61.028.821.951,00
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>3.334.635.881.980,00</b>	<b>3.000.320.320.283,21</b>
5.02.0.00.0.00.00.	PPKA	-	-
5.02.0.00.0.00.01.	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	3.334.635.881.980,00	3.000.320.320.283,21
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>30.534.341.514,00</b>	<b>26.005.841.415,33</b>
5.03.0.00.0.00.01.	Badan Kepegawaian Aceh	30.534.341.514,00	26.005.841.415,33
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>208.848.070.489,00</b>	<b>185.325.293.861,25</b>
5.04.0.00.0.00.01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	208.848.070.489,00	185.325.293.861,25
<b>5.07</b>	<b>PENGHUBUNG</b>	<b>28.382.203.859,00</b>	<b>26.000.824.359,00</b>
5.07.0.00.0.00.01.	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	28.382.203.859,00	26.000.824.359,00
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>58.573.352.022,00</b>	<b>39.829.994.928,00</b>
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>58.573.352.022,00</b>	<b>39.829.994.928,00</b>
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat Aceh	58.573.352.022,00	39.829.994.928,00
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>34.491.410.304,00</b>	<b>29.041.145.425,00</b>
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>34.491.410.304,00</b>	<b>29.041.145.425,00</b>
8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	34.491.410.304,00	29.041.145.425,00
<b>9</b>	<b>UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN</b>	<b>541.375.743.917,00</b>	<b>274.565.639.788,74</b>
<b>9.01</b>	<b>KEKHUSUSAN ACEH</b>	<b>541.375.743.917,00</b>	<b>274.565.639.788,74</b>
9.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	43.186.695.197,00	32.758.083.359,00
9.01.0.00.0.00.02.	Dinas Syariat Islam Aceh	111.318.509.867,00	85.981.762.018,71
9.01.0.00.0.00.03.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	20.906.797.134,00	18.113.259.532,00
9.01.0.00.0.00.04.	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	37.772.226.486,00	31.839.429.410,00
9.01.0.00.0.00.05.	Sekretariat Baitul Mal Aceh	328.191.515.233,00	105.873.105.469,03
<b>TOTAL</b>		<b>16.482.338.309.498,00</b>	<b>13.683.582.127.431,68</b>



Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi fungsi, maka profil APBA TA 2021 dapat di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.3. Profil APBA Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi**



Dari Gambar 3.3 tersebut, alokasi anggaran terbesar pada fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar 3,17% dan terkecil pada fungsi lingkungan hidup sebesar 0,23%.

Pelaksanaan belanja berdasarkan kelompok pada SKPA, baik urusan wajib, pilihan, pemerintahan maupun keistimewaan adalah sebagai berikut :

### 3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

- Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp4.157.483.131.046,00, direalisasikan sebesar Rp3.821.352.521.685,31, yaitu 91,92%;
- Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh, Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dari total anggaran sebesar Rp2.603.432.753.468,00, direalisasikan sebesar Rp2.429.820.930.479,10, yaitu 93,33%;
- Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Aceh, dan Dinas Pengairan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp1.770.699.856.938,00, direalisasikan sebesar Rp1.191.803.854.546,24, yaitu 67,31%;
- Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp735.548.130.974,00, direalisasikan sebesar Rp517.009.756.910,74, yaitu 70,29%;
- Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, dan Badan Penanggulangan



Bencana Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp109.825.030.665,00 direalisasikan sebesar Rp84.475.162.280,00 yaitu 76,92%;

- f. Bidang Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp129.428.822.580,00, direalisasikan sebesar Rp109.052.855.262,00, yaitu 84,26%.

### **3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

- a. Bidang Tenaga Kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp54.670.791.083,00, direalisasikan sebesar Rp44.960.743.374,00, yaitu 82,24%;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp19.395.207.642,00, direalisasikan sebesar Rp16.126.597.530,00, yaitu 83,15%;
- c. Bidang Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp40.357.230.433,00, direalisasikan sebesar Rp37.190.024.410,74, yaitu 92,15%;
- d. Bidang Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp13.097.533.918,00 direalisasikan sebesar Rp11.167.643.237,00, yaitu 85,27%;
- e. Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp177.178.613.998,00, direalisasikan sebesar Rp160.535.363.365,35, yaitu 90,61%;
- f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp13.962.182.137,00, direalisasikan sebesar Rp13.406.186.706,71, yaitu 96,02%;
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp34.662.325.598,00, direalisasikan sebesar Rp23.890.559.791,00, yaitu 68,92%;
- h. Bidang Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp176.165.427.540,00, direalisasikan sebesar Rp82.550.757.979,07, yaitu 46,86%;
- i. Bidang Komunikasi dan Informasi, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp42.196.750.326,00, direalisasikan sebesar Rp38.285.030.275,00, yaitu 90,73%;
- j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp64.214.698.016,00, direalisasikan sebesar Rp50.085.309.572,35, yaitu 78,00%;
- k. Bidang Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp51.609.324.768,00, direalisasikan sebesar Rp45.273.117.182,00 yaitu 87,72%;
- l. Bidang Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp273.017.772.912,00, direalisasikan sebesar Rp152.380.667.460,00, yaitu 55,81%;



- m. Bidang Kebudayaan, dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp147.427.975.331,00, direalisasikan sebesar Rp112.975.547.854,43, yaitu 76,63%;
- n. Bidang Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp147.756.982.271,00, direalisasikan sebesar Rp106.775.409.813,17 yaitu 72,26%.

### **3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

- a. Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp212.171.626.949,00, direalisasikan sebesar Rp137.015.863.977,00, yaitu 64,58%;
- b. Bidang Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dan Dinas Peternakan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp461.482.271.160,00, direalisasikan sebesar Rp338.057.477.995,00, yaitu 73,25%;
- c. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp37.424.871.743,00, direalisasikan sebesar Rp35.910.346.160,72, yaitu 95,95%;
- d. Bidang Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp57.276.005.434,00, direalisasikan sebesar Rp46.199.316.701,46, yaitu 80,66%.

### **3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

- a. Bidang Sekretariat Daerah, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp349.006.609.873,00, direalisasikan sebesar Rp238.591.127.853,76, yaitu 68,36%;
- b. Bidang Sekretariat DPRA, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp275.017.945.283,00, direalisasikan sebesar Rp196.572.073.018,00, yaitu 71,48%.

### **3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

- a. Bidang Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp90.987.433.327,00, direalisasikan sebesar Rp61.028.821.951,00, yaitu 67,07%;
- b. Bidang Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp3.334.635.881.980,00, direalisasikan sebesar Rp3.000.320.320.283,21, yaitu 89,97%;
- c. Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp30.534.341.514,00, direalisasikan sebesar Rp26.005.841.415,33, yaitu 85,17%;
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp208.848.070.489,00, direalisasikan sebesar Rp185.325.293.861,25, yaitu 88,74%;



- e. Bidang Penghubung, dilaksanakan oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp28.382.203.859,00, direalisasikan sebesar Rp26.000.824.359,00, yaitu 91,61%.

### 3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Bidang Inspektorat, dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp58.573.352.022,00, direalisasikan sebesar Rp39.829.994.928,00, yaitu 68,00%.

### 3.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp34.491.410.304,00, direalisasikan sebesar Rp29.041.145.425,00, yaitu 84,20%.

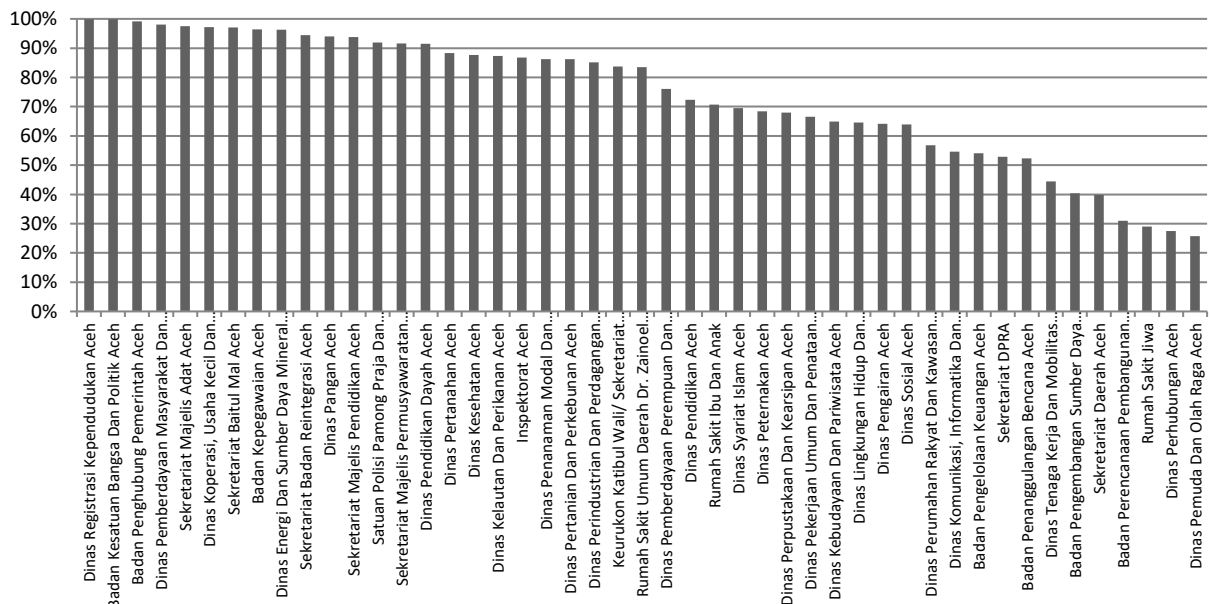
### 3.2.8. Unsur Kekhususan Dan Keistimewaan

Bidang Kekhususan Aceh, dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp541.375.743.917,00, direalisasikan sebesar Rp274.565.639.788,74, yaitu 50,72%.

## 3.3. Pencapaian Realisasi Belanja Modal

Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini:

Gambar 3.4. Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021



Pelaksanaan Belanja Modal pada SKPA adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dari anggaran sebesar Rp277.500.000,00 direalisasikan sebesar Rp277.270.210,75, yaitu 99,92%;



- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dari anggaran sebesar Rp481.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp480.450.279,00 yaitu 99,89%;
- c. Badan Penghubung Pemerintah Aceh dari anggaran sebesar Rp3.185.111.297,00 direalisasikan sebesar Rp3.156.870.212,00, yaitu 99,11%;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dari anggaran sebesar Rp1.104.866.439,00 direalisasikan sebesar Rp1.082.881.500,00 yaitu 98,01%;
- e. Sekretariat Majelis Adat Aceh dari anggaran sebesar Rp249.615.200,00 direalisasikan sebesar Rp243.282.500,00 yaitu 97,46%;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dari anggaran sebesar Rp951.593.924,00 direalisasikan sebesar Rp924.569.358,00 yaitu 97,16%.
- g. Sekretariat Baitul Mal Aceh dari anggaran sebesar Rp747.351.129,00 direalisasikan sebesar Rp725.692.536,03 yaitu 97,10%;
- h. Badan Kepegawaian Aceh dari anggaran sebesar Rp4.205.399.720,00 direalisasikan sebesar Rp4.055.789.207,33 yaitu 96,44%;
- i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dari anggaran sebesar Rp1.606.740.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.547.672.000,00 yaitu 96,32%;
- j. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dari anggaran sebesar Rp443.358.242,00 hanya terealisasi sebesar Rp418.905.000,00 yaitu 94,48%;
- k. Dinas Pangan Aceh dari anggaran sebesar Rp1.392.169.760,00 direalisasikan sebesar Rp1.308.476.275,11 yaitu 93,99%;
- l. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dari anggaran sebesar Rp3.200.000,00 direalisasikan sebesar Rp3.000.000,00 yaitu 93,75%;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dari anggaran sebesar Rp2.070.769.346,00 direalisasikan sebesar Rp1.903.839.951,00 yaitu 91,94%;
- n. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dari anggaran sebesar Rp1.268.608.117,00 direalisasikan sebesar Rp1.162.131.497,00 yaitu 91,61%;
- o. Dinas Pendidikan Dayah Aceh dari anggaran sebesar Rp6.650.895.661,00 direalisasikan sebesar Rp6.085.820.415,30 yaitu 91,50%;
- p. Dinas Pertanahan Aceh dari anggaran sebesar Rp845.190.936,00 direalisasikan sebesar Rp746.583.800,00 yaitu 88,33%;
- q. Dinas Kesehatan Aceh dari anggaran sebesar Rp215.879.096.089,00 direalisasikan sebesar Rp189.237.184.398,50, yaitu 87,66%;
- r. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dari anggaran sebesar Rp9.824.245.978,00 direalisasikan sebesar Rp8.580.845.561,00 yaitu 87,34%;
- s. Inspektorat Aceh dari anggaran sebesar Rp116.463.500,00 direalisasikan sebesar Rp101.060.000,00, yaitu 86,77%;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dari anggaran sebesar Rp19.341.835.680,00 direalisasikan sebesar Rp16.678.970.092,00 yaitu 86,23%;





- u. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari anggaran sebesar Rp8.343.783.698,00 direalisasikan sebesar Rp7.192.464.038,37 yaitu 86,20%;
- v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dari anggaran sebesar Rp3.993.720.236,00 direalisasikan sebesar Rp3.400.863.603,46 yaitu 85,16%;
- w. Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dari anggaran sebesar Rp6.270.285.463,00 direalisasikan sebesar Rp5.250.191.027,00 yaitu 83,73%;
- x. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin dari anggaran sebesar Rp245.596.535.963,00 direalisasikan sebesar Rp205.079.119.559,00 yaitu 83,50%;
- y. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dari anggaran sebesar Rp990.932.942,00 direalisasikan sebesar Rp754.159.581,00 yaitu 76,11%;
- z. Dinas Pendidikan Aceh dari anggaran sebesar Rp507.407.785.580,00 direalisasikan sebesar Rp367.081.705.227,13 yaitu 72,34%;
- aa. Rumah Sakit Ibu dan Anak dari anggaran sebesar Rp1.951.703.326,00 direalisasikan sebesar Rp1.378.788.397,00 yaitu 70,65%;
- bb. Dinas Syariat Islam Aceh dari anggaran sebesar Rp42.982.274.349,00 direalisasikan sebesar Rp29.885.625.297,26 yaitu 69,53%;
- cc. Dinas Peternakan Aceh dari anggaran sebesar Rp2.280.976.010,00 direalisasikan sebesar Rp1.559.820.200,00, yaitu 68,38%;
- dd. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dari anggaran sebesar Rp106.881.208.879,00 direalisasikan sebesar Rp72.579.919.676,44 yaitu 67,91%;
- ee. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh anggaran sebesar Rp1.278.278.453.763,00 direalisasikan sebesar Rp850.629.662.914,24 yaitu 66,54%;
- ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dari anggaran sebesar Rp36.760.346.227,00 direalisasikan sebesar Rp23.870.932.654,85, yaitu 64,94%;
- gg. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dari anggaran sebesar Rp8.635.531.680,00 direalisasikan sebesar Rp5.573.589.682,60 yaitu 64,54%;
- hh. Dinas Pengairan Aceh dari anggaran sebesar Rp315.303.949.794,00 direalisasikan sebesar Rp202.089.529.321,00 yaitu 64,09%;
- ii. Dinas Sosial Aceh dari anggaran sebesar Rp9.165.268.176,00 direalisasikan sebesar Rp5.856.891.937,00 yaitu 63,90%;
- jj. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dari anggaran sebesar Rp59.516.194.249,00 direalisasikan sebesar Rp33.786.553.878,65, yaitu 56,77%;
- kk. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dari anggaran sebesar Rp2.367.353.951,00 direalisasikan sebesar Rp1.294.141.936,00 yaitu 54,67%;
- ll. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dari anggaran sebesar Rp31.398.880.438,00 direalisasikan sebesar Rp16.961.654.876,21 yaitu 54,02%;
- mm. Sekretariat DPRA dari anggaran sebesar Rp37.221.594.301,00 direalisasikan sebesar Rp19.676.062.889,00 yaitu 52,86%;



- nn. Badan Penanggulangan Bencana Aceh dari anggaran sebesar Rp14.267.260.433,00 direalisasikan sebesar Rp7.461.478.097,00 yaitu 52,30%;
- oo. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dari anggaran sebesar Rp7.992.282.192,00 direalisasikan sebesar Rp3.550.565.070,00 yaitu 44,42%;
- pp. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dari anggaran sebesar Rp13.714.504.689,00 direalisasikan sebesar Rp5.540.175.384,14 yaitu 40,40%;
- qq. Sekretariat Daerah Aceh dari anggaran sebesar Rp64.086.577.387,00 direalisasikan sebesar Rp25.512.999.588,50 yaitu 39,81%;
- rr. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dari anggaran sebesar Rp15.241.528.087,00 direalisasikan sebesar Rp4.714.085.090,00 yaitu 30,93%;
- ss. Rumah Sakit Jiwa dari anggaran sebesar Rp5.463.544.182,00 direalisasikan sebesar Rp1.587.407.600,00, yaitu 29,05%;
- tt. Dinas Perhubungan Aceh dari anggaran sebesar Rp119.909.445.884,00 direalisasikan sebesar Rp32.970.274.393,07, yaitu 27,50%;
- uu. Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh dari anggaran sebesar Rp98.792.524.327,00 direalisasikan sebesar Rp25.373.414.217,00, yaitu 25,68%.

### **3.4. Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19**

Realisasi Belanja covid adalah pengeluaran yang digunakan dalam masa pandemi untuk penanganan wabah Covid, Belanja Covid-19 terdiri dari Belanja Bidang Kesehatan, Belanja Penyediaan Jaring Pengaman Sosial dan Belanja Bidang Ekonomi. Realisasi Belanja Covid Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp254.711.188.167,44 atau 68,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp371.725.164.356,00.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid -19) dilingkungan Pemerintah Daerah, antara lain. Dengan melakukan percepatan pengutamaan penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan pengembangan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dengan membangun bangunan isolasi sebanyak 15 unit atau 15 beds, bangunan observasi 14 unit atau 70 beds, serta bangunan lainnya yang dibutuhkan seperti bangunan satelit operasional, bangunan satelit bersih, bangunan gas medis, rumah pompa, *power house*, dan gardu PLN. Dalam pemanfaatannya sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal delapan Maret tahun dua ribu dua puluh satu tentang pemanfaatan rumah sakit rujukan Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin telah mengoperasikan rumah sakit rujukan tersebut untuk menampung dan merawat pasien Covid-19.

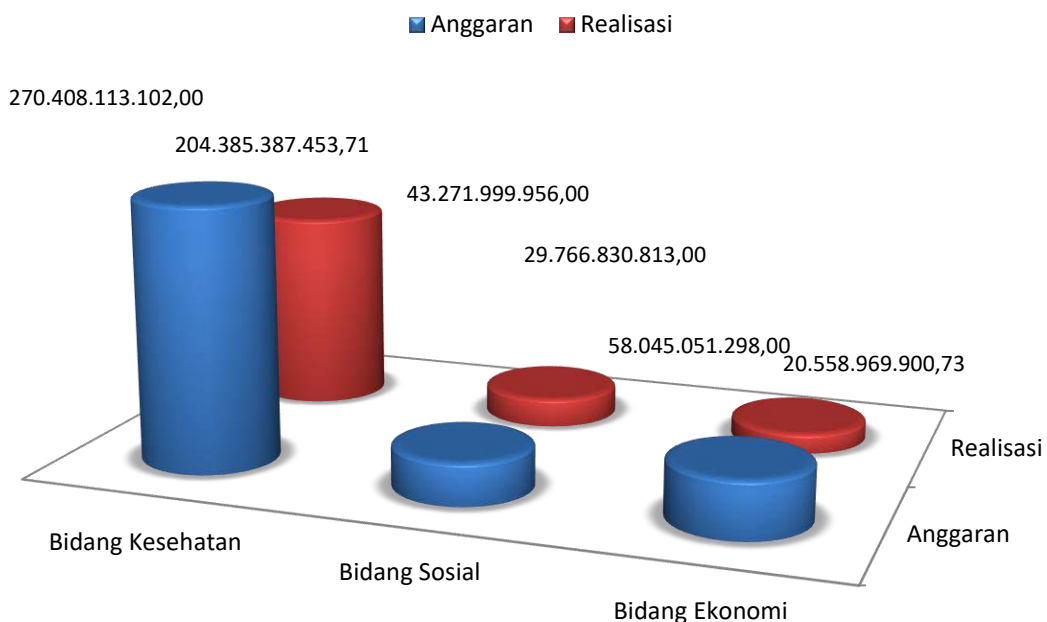


Sebagaimana diketahui pengembangan RSUZA menjadi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dilakukan di atas tanah milik Pemerintah Aceh. Namun demikian aset yang diperoleh atas hasil pengembangan tersebut belum diakui sebagai Pendapatan Hibah dalam Laporan Operasional dan belum menambah pencatatan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Aceh. Hal tersebut dikarenakan sampai 31 Desember 2021 belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dari BNPB ke Pemerintah Aceh/RSUZA. Namun dapat BAST pemanfaatan barang antara *Project Manager* PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (rekanan pengembang) dengan RSUZA tanggal 8 Maret 2021.

Lebih lanjut, meskipun penguasaan aset tersebut telah berada pada Pemerintah Aceh/RSUZA, pengakuan hibah LO dan pencatatan aset dalam neraca Pemerintah Aceh belum dilakukan untuk menghindari dobel pencatatan aset. Hasil koordinasi dan konfirmasi dengan BNPB diketahui bahwa pengembangan RSUZA menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang ada pada BNPB yang dianggarkan melalui Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanganan Bencana dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi Covid-19. Dengan demikian barang milik negara yang dianggarkan pada DIPA BNPB dan diperoleh dari hasil pengadaan pada BNPB dicatat pada Neraca BNPB, yakni barang persediaan yang akan diserahkan. Hasil konfirmasi juga disampaikan bahwa serah terima barang/aset hasil pengembangan RSUZA antara BNPB dan Pemerintah Aceh sedang diproses oleh BNPB.

Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini:

**Gambar 3.5. Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Tahun Anggaran 2021**



### 3.4.1. Belanja Penanganan Kesehatan

Belanja Covid-19 penanganan kesehatan digunakan antara lain untuk penyediaan pemberian sarana dan prasarana kesehatan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan *mobile biosafety level 2*, penyediaan Alat



Pelindung Diri (APD), peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan, pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat serta penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19. dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3. 4. Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Penanganan Kesehatan**

No	SKPA	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Aceh	9.998.995.114,00	-	-
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	8.714.727,00	4.500.800,00	51,65
3	Dinas Kesehatan Aceh	88.685.194.809,00	80.547.272.615,00	90,82
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	169.620.980.631,00	123.007.459.661,71	72,52
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	74.412.500,00	9.940.000,00	13,36
6	Dinas Pengairan Aceh	97.822.292,00	87.821.800,00	89,78
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	168.561.250,00	-	-
8	Dinas Pangan Aceh	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
9	Dinas Pertanahan Aceh	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67
10	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	9.510.000,00	8.875.000,00	93,32
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	28.752.500,00	28.395.000,00	98,76
12	Dinas Perhubungan Aceh	230.000.000,00	173.303.000,00	75,35
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	14.337.000,00	13.923.000,00	97,11
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	61.868.750,00	57.508.000,00	92,95
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	50.000.000,00	16.600.000,00	33,20
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	41.280.000,00	30.720.000,00	74,42
17	Dinas Peternakan Aceh	185.730.000,00	-	-
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	28.257.500,00	13.250.000,00	46,89
19	Sekretariat Daerah Aceh	616.316.920,00	-	-
20	Sekretariat DPRA	51.889.189,00	50.969.000,00	98,23
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	78.970.000,00	25.105.000,00	31,79
22	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	274.730.000,00	230.979.657,00	84,08
23	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	32.569.920,00	31.786.920,00	97,60
24	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	24.920.000,00	24.178.000,00	97,02
	<b>Jumlah</b>	<b>270.408.113.102,00</b>	<b>204.385.387.453,71</b>	<b>75,58</b>

### 3.4.2. Belanja Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

Belanja Covid-19 bidang sosial digunakan antara lain untuk verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau hibah, percepatan penyaluran pemberian hibah/ bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai kepada antara lain individu atau masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19. dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini:

**Tabel 3. 5. Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Penyediaan Jaring Pengaman Sosial**

No	SKPA	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Aceh	232.107.800,00	-	-
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	270.000.000,00	263.800.000,00	97,70
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	9.495.600.000,00	9.495.600.000,00	100,00
5	Dinas Sosial Aceh	10.000.000.001,00	8.095.201.000,00	80,95
6	Dinas Pangan Aceh	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
7	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	40.000.000,00	-	-
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	112.800.000,00	25.400.000,00	22,52
9	Dinas Peternakan Aceh	100.418.770,00	-	-
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	103.374.648,00	85.076.500,00	82,30
11	Sekretariat Daerah Aceh	14.668.953.937,00	4.929.015.183,00	33,60
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	591.304.800,00	471.524.130,00	79,74
13	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	6.582.240.000,00	5.804.514.000,00	88,18
14	Sekretariat Baitul Mal Aceh	655.200.000,00	176.700.000,00	26,97
<b>Jumlah</b>		<b>43.271.999.956,00</b>	<b>29.766.830.813,00</b>	<b>68,79</b>

### 3.4.3. Belanja Penanganan Dampak Ekonomi

Belanja Covid-19 penanganan dampak ekonomi digunakan antara lain untuk pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga barang, program padat karya dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Pemberian subsidi kepada pelaku UMKM dan Koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta perluasan target atau sasaran kegiatan kelompok usaha bersama, promosi investasi domestik maupun internasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini.

**Tabel 3. 6. Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Penanganan Dampak Ekonomi**

No	SKPA	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	16.418.102,00	16.418.102,00	100,00
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
3	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Aceh	10.000.737.500,00	7.746.922.998,40	77,46
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	11.880.000,00	11.460.000,00	96,46
5	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.101.309,00	1.020.000,00	92,62
6	Sekretariat Daerah Aceh	40.120.007.476,00	11.384.796.993,00	28,38
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	6.214.478.966,00	25.513.000,00	0,41
8	Badan Kepegawaian Aceh	1.660.427.945,00	1.367.838.807,33	82,38
<b>Jumlah</b>		<b>58.045.051.298,00</b>	<b>20.558.969.900,73</b>	<b>35,42</b>

### 3.5. Pencapaian Realisasi Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.

Pada tahun ini 2021, zakat dan infak sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang terkumpul sebesar Rp86.426.618.364,02 terdiri dari zakat sebesar Rp59.169.323.476,55 dan infak sebesar Rp27.257.294.887,47. Nilai ini menurun 77,79% dari yang ditargetkan sebesar



Rp111.100.000.000,00 hal ini dikarenakan adanya kenaikan nishab zakat, namun masih dikatakan meningkat dibandingkan pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp82.538.693.511,08.

Tahun 2021 dialokasikan penyaluran zakat sebesar Rp122.174.155.585,00 dan realisasi penyalurannya sebesar Rp92.442.187.683,00 (75,66%). Adapun penyalurannya sesuai senif sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 7. Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2021**

No	Nama	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Rp	%
1	Fakir	15.120.000.000,00	8.581.000.000,00	56.75	6.539.000.000,00	43.25
2	Miskin	68.196.000.000,00	54.029.854.846,00	79.23	1.758.012.159,00	20.77
3	Amil	800.000.000,00	709.630.350,00	88.70	90.369.650,00	11.3
4	Muallaf	4.666.455.585,00	3.589.910.200,00	76.93	1.076.545.385,00	23.07
5	Gharimin	4.600.000.000,00	1.888.000.000,00	41.04	2.712.000.000,00	58.96
6	Fisabilillah	5.050.000.000,00	1.073.965.000,00	21.27	3.976.035.000,00	78.73
7	Ibnu Sabil	23.741.700.000,00	22.569.827.287,00	95.06	3.242.144.000,00	4.94
	<b>Jumlah</b>	<b>122.174.155.585,00</b>	<b>92.442.187.683,00</b>	<b>75.66</b>	<b>29.731.967.902,00</b>	<b>24.34</b>

Sumber: Set. Baitul Mal Aceh 2021

Terdapat penggunaan Silpa zakat pada tahun 2021 sebesar Rp5.236.595.452,38 sehingga silpa zakat dan infaq per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp270.235.890.453,22 terdiri dari silpa zakat sebesar Rp57.189.759.266,51 dan silpa infaq sebesar Rp213.046.131.186,71 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 8. Rincian Silpa Zakat dan Infaq**

NO	TAHUN	REALISASI PENDAPATAN ZAKAT	REALISASI PENYALURAN ZAKAT	SILPA ZAKAT	REALISASI PENDAPATAN INFAQ	REALISASI PENYALURAN INFAQ	SILPA INFAQ
		3	4	6=Σ(4-5)	7	8	9=Σ(7-8)
1	2006	2.547.439.399,00	-	2.547.439.399,00	-	-	-
2	2007	-	116.114.560,00	2.431.324.839,00	3.768.310.011,00	2.680.450.677,00	1.087.859.334,00
3	2008	-	-	2.431.324.839,00	14.314.166.205,00	-	15.402.025.539,00
4	2009	3.554.736.230,00	-	5.986.061.069,00	19.094.618.693,00	-	34.496.644.232,00
5	2010	18.820.427.111,02	3.000.000.000,00	21.806.488.180,02	11.827.648.628,00	-	46.324.292.860,00
6	2011	8.474.907.584,63	5.000.000.000,00	25.281.395.764,65	-	60.000.000.000,00	(13.675.707.140,00)
7	2012	10.277.631.819,82	8.961.710.458,00	26.597.317.126,47	643.800,00	6.850.000.000,00	(20.525.063.340,00)
8	2013	13.299.410.378,29	10.000.000.000,00	29.896.727.504,76	-	8.000.000.000,00	(28.525.063.340,00)
9	2014	25.176.003.088,25	8.546.570.940,38	46.526.159.652,63	-	-	(28.525.063.340,00)
10	2015	27.805.237.046,74	21.273.480.000,00	53.057.916.699,37	-	-	(28.525.063.340,00)
11	2016	35.780.632.814,11	36.653.237.943,00	52.185.311.570,48	-	-	(28.525.063.340,00)
12	2017	52.180.580.303,10	33.184.641.500,00	71.181.250.373,58	-	-	(28.525.063.340,00)
13	2018	53.928.676.345,25	41.736.365.693,00	83.373.561.025,83	-	-	(28.525.063.340,00)
14	2019	59.551.675.959,85	47.226.018.060,34	95.699.218.925,34	189.420.532.704,78	88.986.260,00	160.806.483.104,78
15	2020	57.556.340.316,62	62.792.935.769,00	90.462.623.472,96	24.982.353.194,46	-	185.788.836.299,24
16	2021	59.169.323.476,55	92.442.187.683,00	57.189.759.266,51	27.257.294.887,47	-	213.046.131.186,71

Pencapaian indikator target penyaluran zakat yang dapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021 dapat diklasifikasikan kepada 7 (tujuh) senif, sebagai berikut:

### 3.5.1. Fakir

Termasuk kategori Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, uzur (berusia diatas 60 tahun yang tidak sanggup bekerja), cacat yang tidak produktif, sakit berat yang



menahun, tidak menerima pensiun/penghasilan tetap, tidak menerima bantuan yang berkelanjutan dari pihak lain dan tidak dalam tanggungan anak yang berpenghasilan lebih dari 2/3 nishab zakat serta berdomisili di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Mustahik yang dikategorikan fakir ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh setelah melewati proses pendataan, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh bidang pengawasan.

Alokasi dana senif fakir untuk santunan fakir uzur sesuai Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat TA 2021 dan dituangkan dalam DPA Sekretariat Baitul Mal Aceh TA 2021 sebesar Rp500.000,- per bulan.

Di tahun ini, dana yang dialokasikan sebesar Rp15.120.000.000,00 untuk 2.520 orang. Terealisasi sebesar Rp8.581.000.000,00 (lebih kurang ada 2.423 orang). Terdapat sisa sejumlah Rp6.539.000.000,00 dikarenakan adanya mustahik yang meninggal dunia dalam tahap pendistribusian Januari s.d Juni 2021, jumlah mustahik pada pembayaran Januari s.d Juni sebanyak 2.423 mustahik, setelah money mustahik fakir uzur menjadi 828 dan sisa menjadi mustahik Lansia miskin.

Dibandingkan TA 2020, persentase realisasi dana zakat senif fakir TA 2021 menurun 42,96% dari 99,71% menjadi 56,75%. Alokasi dana zakat senif fakir TA 2020 Rp15.120.000.000,00 dan terealisasi Rp15.076.000.000,00 (99,71%).

### **3.5.2. Miskin**

Termasuk kategori miskin, yaitu orang yang berpenghasilan kurang dari 2/3 nishab zakat per bulan, menjalankan usaha sendiri, tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain, maksimal 1 (satu) orang per Kartu Keluarga, berdomisili di seluruh Aceh dan bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh. Mustahik ini kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh setelah melewati proses pendataan, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh bidang pengawasan. Kategori senif miskin ini memiliki beberapa sub kegiatan yaitu:

- a. Pengembalian/Pendistribusian 15% dana zakat kepada UPZ-UPZ sebesar Rp6.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.294.188.648,00. Sisa sejumlah Rp2.605.811.352,00 dikarenakan selisih antara pagu yang ditetapkan diawal tahun dengan jumlah pagu UPZ ditahun berjalan. dan sebagian yang lain terdapat beberapa UPZ yang tidak menyerahkan permintaan pengembalian zakat kepada BMA sehingga BMA tidak dapat menyalurkannya;
- b. Bantuan dana untuk pembelian alat-alat/peralatan kerja bagi masyarakat miskin dengan pagu Rp13.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.719.062.000,00 untuk 1.996 orang mustahik. Sisa sejumlah Rp3.280.938.000,00 dikarenakan kebutuhan alat dan harga alat yg di butuhkan mustahiq tidak sampai harga maksimal dari anggaran yg tersedia. Sebenarnya Untuk jumlah mustahiq sudah melebihi target yg di DPA, dan dari 9000 pendaftar banyak mustahiq yg tidak layak secara kriteria.
- c. Bantuan dana untuk Pemberdayaan Gampong Zakat Produktif dengan pagu Rp4.600.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp3.087200.000,00 untuk 32 BMG (Baitul Mal Gampong). Sisa sejumlah Rp1.512.800.000,00 dikarenakan jumlah BMG yang dibutuhkan tidak terpenuhi karena dari 60 data yang diverifikasi oleh tim hanya 32 saja yang memenuhi kriteria, sedangkan 28 data lagi tidak memenuhi kriteria. Karena kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme 2 tahap assesmen sehingga tidak memungkinkan



lagi untuk penambahan data calon penerima karena mempertimbangkan waktu yang tidak memungkinkan lagi.

- d. Santunan Ramadhan untuk keluarga miskin dengan pagu Rp10.000.000.000,00 terealisasi 100 % untuk 10.000 orang mustahik;
- e. Bantuan bagi penderita kanker, *thalassemia* dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin dengan pagu sebesar Rp1.800.000.000,00 dan terealisasi Rp1.771.500.000,00 untuk 300 orang mustahik. Sisa sejumlah Rp28.500.000,00 dikarenakan mustahik pengganti tidak dibayarkan mundur dari bulan Januari;
- f. Bantuan insidentil untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan pagu Rp2.821.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.430.644.000,00 untuk 1.783 orang mustahik. Sisa sejumlah Rp390.856.000,00 dikarenakan penyaluran bantuan insidentil bersifat situasional, jumlah dan besaran bantuan untuk masing-masing mustahik tidak dapat direncanakan secara mendetail;
- g. Bantuan Zakat Berbasis Keluarga (*Zakat Family Development/ ZFD*) dengan pagu Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp921.950.000,00 untuk 30 mustahik. Sisa sejumlah Rp4.078.050.000,00 dikarenakan ZFD merupakan program baru, sehingga dalam pelaksanaan masih mencari format yang ideal;
- h. Bantuan dana untuk penanggulangan *Stunting* dengan pagu Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp178.000.000,00 untuk 50 mustahik. Sisa sejumlah Rp122.000.000,00 dikarenakan bantuan di salurkan terhitung data masuk dan tidak dihitung mundur;
- i. Bantuan dana untuk perbaikan sanitasi dan air bersih bagi keluarga miskin dengan pagu Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi 100% untuk 200 mustahik;
- j. Bantuan dana untuk kelompok usaha bersama (KUBE) bagi keluarga miskin dengan pagu Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.051.419.000,00 untuk 26 mustahik. Sisa sejumlah Rp948.581.000,00 dikarenakan jumlah kelompok usaha yang dibutuhkan tidak terpenuhi karena sebanyak 66 data yang diverifikasi tim hanya 26 yang memenuhi kriteria, verifikasi tahap pertama sebanyak 52 kelompok yang memenuhi kriteria sebanyak 24, sedangkan tahap 2 diterima data untuk diverifikasi tambahan sebanyak 15 data baru dan hanya memenuhi kriteria sebanyak 2 data;
- k. Bantuan untuk korban kekerasan/KDRT dan anak terlantar dengan pagu Rp1.196.000.000,00 terealisasi 100% untuk 237 mustahik;
- l. Bantuan bulanan lansia miskin dan Disabilitas Produktif dengan pagu Rp5.078.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.829.500.000,00 untuk 1.373 mustahik. Sisa sejumlah Rp249.000.000,00 dikarenakan jumlah mustahik yang diusulkan pindah ke Bantuan Lansia Miskin dan Disabilitas Produktif merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan Santunan Bulanan Fakir Uzur (Senif Fakir) pada periode Mei, sehingga penyaluran dana zakat pada kegiatan ini baru dapat dilaksanakan setelah Revisi SK DPS yang diusulkan pada bulan Agustus 2022, dan ada beberapa dari data yang dialihkan sudah meninggal dunia;
- m. Pendistribusian Zakat Guru SMA/SMK sederajat ke Kabupaten/Kota dengan pagu Rp14.000.000.000,00 dan terealisasi Rp13.050.391.198,00 untuk 11.969 mustahik di





23 Kabupaten/ Kota. Sisa sejumlah Rp949.608.802,00 dikarenakan selisih dari pagu yang ditetapkan diawal tahun dengan jumlah pagu pengembalian zakat guru kab/kota ditahun berjalan.

Dibandingkan Tahun 2020, persentase realisasi dana zakat senif miskin Tahun 2020 menurun 15.31% dari 94.54% menjadi 79.23%. akan tetapi ada peningkatan dari segi jumlah bantuan yang disalurkan dimana alokasi dana zakat senif miskin tahun 2021 sebesar Rp68.196.000.000,00 dan terealisasi Rp54.029.854.846,00 (79.23%) sedangkan alokasi dana zakat senif miskin Tahun 2020 Rp32.171.160.000,00 dan terealisasi Rp30.413.147.841,00 (94,54%).

### 3.5.3. Amil

Hak amil diberikan kepada Amil UPZ Non Pemerintah/Instansi Vertikal dan amil relawan Baitul Mal Aceh.

- a. Amil UPZ lembaga/Instansi non pemerintah dengan pagu Rp50.000.000,00 dan terealisasi Rp8.704.163,00 untuk empat upz. Sisa sejumlah Rp41.295.837,00 hal ini dikarenakan ada sejumlah UPZ Lembaga Vertikal yang tidak mengajukan pengembalian.
- b. Amil relawan Baitul Mal dengan pagu Rp750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp700.926.187,00 untuk 25 orang Amil. Sisa sejumlah Rp49.073.813,00 hal ini karena ada relawan diangkat diawal tahun sebanyak 24 orang sesuai kebutuhan, baru ada penambahan di akhir tahun satu orang. Sedangkan dibandingkan TA 2020, persentase realisasi dana zakat senif amil TA 2021 meningkat 38.42% dari 49.98% menjadi 88.40%. Alokasi dana zakat senif amil TA 2020 Rp1.114.480.000,00 dan terealisasi Rp557.025.128,00 (49.98%).

### 3.5.4. Muallaf

Senif muallaf dialokasikan pagu sebesar Rp4.666.455.585,00. Muallaf disini kategorinya antara lain berasal dari keluarga muallaf (dibuktikan dengan surat keterangan muallaf), berdomisili di Aceh, mempunyai usaha sendiri dalam kategori mikro, dan bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh. Untuk bantuan Muallaf dibagi untuk empat kategori:

- a. Beasiswa penuh bagi anak muallaf jenjang SMP/MTs dan SMA/MA dengan pagu sebesar Rp1.874.730.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.747.477.200,00 untuk 121 mustahik. Sisa sejumlah Rp127.252.800,00 dikarenakan terdapat perbedaan/selisih jumlah SPP dimasing-masing Dayah/Pesantren dengan nominal harga komponen yang ditetapkan dan Ada sejumlah siswa/santri yang disebabkan berbagai alasan, telah dikeluarkan oleh pihak Dayah/Pesantren atau mengundurkan diri dari program beasiswa sehingga biaya SPP, uang saku atau biaya lainnya dari santri tersebut tidak disalurkan;
- b. Beasiswa penuh bagi anak muallaf jenjang D3/ S1 dengan pagu Rp1.036.000.000,00 dan terealisasi Rp659.233.000,00 untuk 45 mustahik. Sisa sejumlah Rp376.767.000,00 dikarenakan ada selisih antara biaya SPP/UKT tiap semester yang dibayarkan mahasiswa dengan biaya komponen yang ditetapkan dalam dokumen DPA/SK DPS. Hal ini karena biaya SPP/UKT berbeda pada masing-masing program studi, Ada beberapa mahasiswa/mustahik yang mengundurkan diri sehingga biaya SPP/UKT dan uang saku tidak disalurkan dan pada penerimaan baru TA 2021, dari kuota 20 orang, hanya sebelas



orang yang lulus seleksi dan verifikasi, sehingga sisa anggaran untuk sembilan orang tidak disalurkan.

- c. Beasiswa berkelanjutan bagi anak Muallaf jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dengan pagu Rp489.600.000,00 dan terealisasi Rp487.200.000,00 untuk 105 mustahik. Sisa sejumlah Rp2.400.000,00 dikarenakan ada sejumlah siswa/santri yang telah dikeluarkan dari program beasiswa sehingga uang saku pada bulan berjalan tidak disalurkan dan sejumlah siswa/santri yang berada pada jenjang SMA/MA kelas 3 telah tamat pada Bulan Juni 2021 dinyatakan selesai program beasiswa dan kepada yang bersangkutan uang saku tidak disalurkan lagi.
- d. Bantuan dana untuk Muallaf baru dengan pagu Rp120.000.000,00 terealisasi 100% untuk 40 mustahik;
- e. Pemberdayaan Muallaf dengan pagu Rp1.145.125.585,00 dan terealisasi Rp576.000.000,00 untuk 82 mustahik. Sisa dana sejumlah Rp570.125.585,00 dikarenakan program baru disetujui pada saat revisi perubahan anggaran di Bulan Oktober, maka penyerapan anggaran hanya mampu mengakomodir permohonan kepada 52 orang mustahik saja.

Dibandingkan TA 2020, persentase realisasi dana zakat senif muallaf TA 2021 menurun 3,08% dari 80,01% menjadi 76,93%. Alokasi dana zakat senif muallaf TA 2020 Rp4.691.400.000,00 dan terealisasi Rp3.753.551.800,00 (80,01%).

### **3.5.5. Gharimin**

Pagu untuk senif gharimin sebesar Rp4.600.000.000,00, dialokasikan untuk bantuan dana untuk korban musibah bencana alam, bencana kemanusiaan dan bencana lainnya dan terealisasi sebesar Rp1.888.000.000,00 untuk 572 mustahik. Sisa dana dikarenakan program bersifat insidental. Waktu dan tempat kejadian tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Dibandingkan TA 2020, persentase realisasi dana zakat senif gharimin TA 2021 menurun 62,60% dari 98,48% menjadi 41,04%. Alokasi dana zakat senif gharimin TA 2020 Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi Rp2.461.945.000,00 (98,48%).

### **3.5.6. Fisabilillah**

Kategori mustahik ini termasuk personal dan/atau lembaga/organisasi yang berbasis keislaman yang secara ekonomi tidak mampu dalam memenuhi akomodasi kegiatan yang dimaksud.

- a. Bantuan dana untuk kegiatan pengembangan dakwah dan syiar Islam dengan pagu Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi Rp480.665.000,00 untuk 76 mustahik. Sisa dana Rp1.019.335.000,00 dikarenakan program bersifat insidental berdasarkan proposal yang masuk dan penyeleksian proposal yang sesuai dengan kriteria BMA;
- b. Bantuan insidental untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pagu Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi Rp370.300.000,00 untuk 94 mustahik. Sisa dana Rp2.629.700.000,00 dikarenakan program bersifat insidental berdasarkan proposal yang masuk dan penyeleksian proposal yang sesuai dengan kriteria BMA;



- c. Bantuan dana untuk solidaritas dunia Islam dengan pagu Rp550.000.000,00 dan terealisasi Rp223.000.000,00 untuk satu mustahik. Sisa dana Rp327.000.000,00 dikarenakan sisa bantuan tidak dapat direalisasikan di sisa tahun berjalan.

Dibandingkan TA 2020, persentase realisasi dana zakat senif fisabilillah TA 2021 menurun 15.89% dari 37.16% menjadi 21.27%. Alokasi dana zakat senif fisabilillah TA 2020 Rp1.400.000.000,00 dan terealisasi Rp520.260.000,00 (37,16%).

### **3.5.7. Ibnu Sabil**

Senif ibnu sabil diperuntukkan penyaluran zakatnya bagi kelangsungan biaya pendidikan berupa beasiswa yang disalurkan kepada pelajar mulai tingkat SD/MI hingga mahasiswa S1 yang berdomisili di kota Banda Aceh dan kabupaen Aceh Besar atau yang sedang menjalani studinya di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dengan Pagu Rp23.741.700.000,00 dan terealisasikan Rp22.569.827.287,00 (95.06%) untuk 6.011 mustahik.

Dibandingkan TA 2020, persentase realisasi dana zakat senif ibnu sabil TA 2021 meningkat 19,52% dari 75.54% menjadi 95.06%. Alokasi dana zakat senif ibnu sabil TA 2020 Rp13.253.150.000,00 dan terealisasi Rp10.011.006.000,00 (75.54%).

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Aceh meliputi Kebijakan Konseptual, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi BLUD, serta Bagan Akun Standar dan konversi.

#### **4.1. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh**

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Aceh berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

- a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
- b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
- c. Pengaruh proses politik; dan
- d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Aceh.

Ciri keuangan Pemerintah Aceh yang penting bagi pengendalian:

- a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
- b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
- c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
- d. Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.

#### **4.2. Entitas Pelaporan Keuangan**

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

**Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

**Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2021, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh memberi wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) untuk mengelola administrasi keuangan Pemerintah Aceh beserta pelaporan keuangannya.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan SKPA, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, baik badan, dinas, kantor dan biro, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.3. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

#### **4.4. Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

**Pengakuan** dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan

pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Aceh, maupun kas telah diterima di rekening Bendahara Penerimaan.

Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

#### **4.5. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan

menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Calk. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d. Persediaan dicatat sebesar:
  - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Aceh karena Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non Pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

## 4.6. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

### Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi:

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.





- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1. Klasifikasi Kas dan Setara Kas**

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.1.1	Kas dan Setara Kas		
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		
	Kas di Kas Daerah	-	√
	Potongan Pajak dan Lainnya	-	√
	Kas Transitoris	-	√
	Kas Lainnya	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
	Uang Titipan	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
	Pajak di SKPA yang Belum Disetor	√	-
	Uang Titipan	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD		
	Kas Tunai BLUD	√	-
	Kas di Bank BLUD	√	-
	Pajak yang Belum Disetor BLUD	√	-
	Uang Muka Pasien RSUD/BLUD	√	-
	Uang Titipan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Lainnya		
	Kas Lainnya	√	-
1.1.1.06	Setara Kas		
	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√	√
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
  - a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengakuan:

- Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca;
- Kas SKPA terdiri atas dua yaitu Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran;
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang digunakan untuk menampung pendapatan/penerimaan SKPA;
- Kas di Bendahara Penerimaan bersumber dari pendapatan/penerimaan aktivitas operasional dan aktivitas transitoris/non anggaran;



- Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Aceh;
- Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Aceh;
- Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Aceh, dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Aceh;
- Pendapatan yang diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUA dan pendapatan terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUA untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh;
- Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran;
- Kas di Bendahara Pengeluaran mencerminkan saldo rekening kas di Bendahara Pengeluaran dan normalnya bersaldo nol pada akhir periode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pengukuran:**

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya;
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Kas dan setara kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas;
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas;
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah: Rincian kas dan setara kas, Kebijakan manajemen setara kas; dan Informasi lainnya yang dianggap penting

**Akuntansi Piutang**

**Definisi:**

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh;
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

**Klasifikasi:**

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4. 2. Klasifikasi Piutang

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan			
		SKPA	PPKA		
1.1.3	Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Aceh	√*	√	
		Piutang Retribusi	√	-	
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	√	-	
		Piutang Lain-lain PAA yang Sah	√	-	
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	√	
		Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	-	√	
		Piutang Transfer Pemerintah Aceh Lainnya			
		Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah			
	1.1.4	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	√
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			√*	√	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			-	√	
Piutang Lain-lain					
1.1.5	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-	
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-	
1.1.6	Beban Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-	
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-	
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-	
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-	
		Beban Lainnya	√	-	

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
  - a. Pungutan
    - Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
      - 1) Piutang Pajak Aceh;
      - 2) Piutang Retribusi Aceh;
      - 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.
  - b. Perikatan
    - Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
      - 1) Pemberian Pinjaman;
      - 2) Penjualan;
      - 3) Kemitraan;
      - 4) Pemberian fasilitas;
      - 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
  - c. Transfer antar Pemerintahan
    - Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
      - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
      - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
      - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
      - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
      - 5) Piutang Transfer Lainnya;
      - 6) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca;
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi;
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP), disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh

Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan;

- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

**Tabel 4. 3. Perhitungan penyisihan Piutang**

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar ( 0,5% )	Kurang Lancar ( 10% )	Diragukan ( 50% )	Macet (100%)
1	Piutang Pajak ( <i>self assessment</i> )	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak ( <i>official assessment</i> )	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.
- Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstracomptabel*.
- Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

### **Akuntansi Penyisihan Piutang**

Definisi:

- Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain;
- Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan;
- Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realisasi bersih.

Kriteria Kualitas Piutang:

- Penentuan besaran penyisihan Dana Bergulir



- Pencatatan Akuntansi: Pencatatan penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir, Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir, Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*bruto*).
- Pelaporan: beban penyisihan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih;
- Penghapusan Dana Bergulir : Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup *ekstracomptabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

### **Akuntansi Persediaan**

#### Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dapat diperoleh melalui:
  - a. Pembelian/Pengadaan
  - b. Donasi/Hibah

#### Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 4. Klasifikasi Persediaan**

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.12	Persediaan		
	Bahan	√	-
	Suku cadang	√	-
	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	√	-
	Obat-obatan	√	-
1.1.12.01	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Persediaan untuk dijual/diserahkan	√	-
	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	√	-
	Natura dan Pakan	√	-
	Persediaan Penelitian	√	-
	Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tidak habis Pakai		
	Komponen	√	-
	Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai		
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Suatu aset dapat diklasifikasi sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Aceh;
  - b. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Aceh.
- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- Dalam hal Pemerintah Aceh memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
- Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman;
- Persediaan dapat terdiri dari:
  - a. Barang Konsumsi;
  - b. Amunisi;
  - c. Bahan untuk pemeliharaan;
  - d. Suku cadang;
  - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
  - f. Pita cukai dan leges;
  - g. Bahan baku;
  - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
  - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat;
  - j. Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat; dan
  - k. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat

#### Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock*

*opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam LO serta diungkapkan dalam CaLK.

#### Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional;
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);
- Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu:
  - a. Pendekatan aset  
Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
  - b. Pendekatan beban  
Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

#### Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock *opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 3 alternatif metode penilaian, yaitu:

- a. Metode First In First Out/FIFO atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP);
  - b. Rata-rata Tertimbang; dan
  - c. Harga Pembelian Terakhir.
- Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh : jumlah unit persediaan tidak sama dengan hasil perhitungan fisik (Berita Acara Stock *Opname*/BASO) maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (BASO).



### Penyajian dan Pengungkapan:

Pencatatan atas pemakaian persediaan tergantung pada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan terdiri atas dua metode yaitu:

- Metode Perpetual, dalam metode ini setiap transaksi yang mengakibatkan bertambah atau berkurang persediaan, dicatat dengan dengan mendebit persediaan (bertambah) dan dicatat dengan mengkredit persediaan (berkurang) sehingga saldo persediaan menunjukkan nilai terkini.
- Metode Periodik, dalam metode ini pencatatan atas transaksi persediaan hanya dilakukan untuk transaksi bertambah persediaan dan pencatatan dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dalam metode periodik ini, transaksi pemakaian persediaan tidak dicatat.
- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan persediaan adalah:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### Akuntansi Dana Bergulir

#### Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

#### Klasifikasi:

##### a. Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan SKPA SKPKA	
1.2.1		Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.04		Dana Bergulir	√*	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

##### b. Piutang Pendapatan akibat Investasi Dana Bergulir.

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan SKPA SKPKA	
1.1.3		Piutang Pendapatan		
1.1.3.04		Piutang Lain-lain PAD yang sah	√*	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

##### c. Pendapatan Hasil Dana Bergulir.

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan SKPA SKPKA	
LRA	LO			
4.1.4	8.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	√*	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	√*	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

#### Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

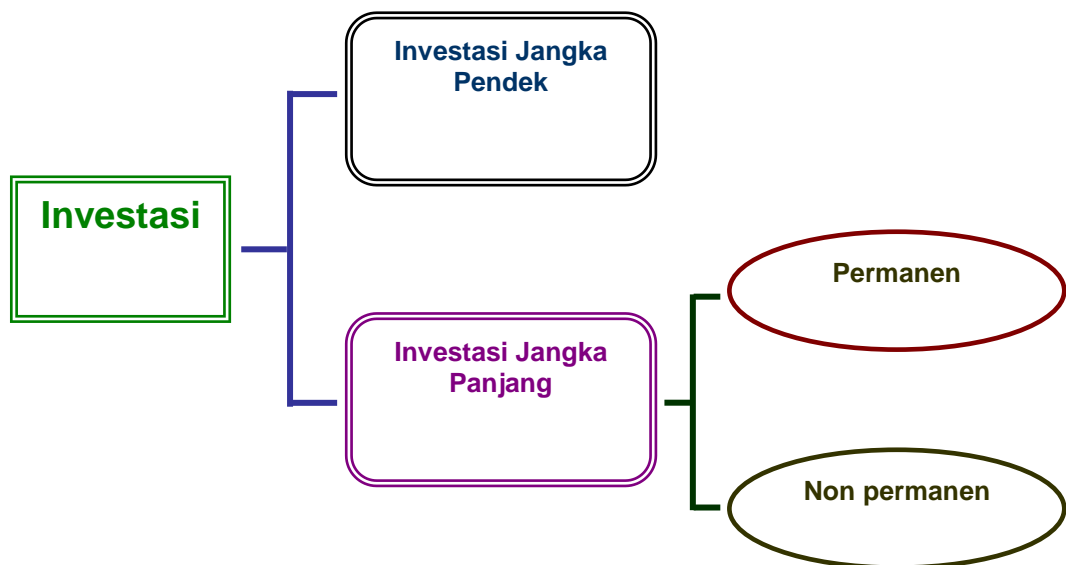
#### Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.
- Pengungkapkan informasi lain dalam CaLK antara lain: Dasar penilaian dana bergulir, Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, Besarnya suku bunga yang dikenakan, Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir, Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir, dan Informasi lain yang dianggap perlu

**Akuntansi Investasi**



Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.



## Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam SUN	-	√
		Investasi dalam SBI	-	√
		Investasi dalam SPN	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Deposito Jangka Panjang	-	√
		Penyertaan Modal Kepada BUMN	-	√
		Penyertaan Modal Kepada BUMA	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

## 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

### Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

### Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

### Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi non permanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.
- Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, Jenis-jenis investasi, Investasi Permanen dan Nonpermanen, Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, Perubahan pos investasi.

## **Akuntansi Aset Tetap**

### Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Aset tetap dapat diperoleh melalui:
  - a. Pembelian/Pengadaan
  - b. Donasi/Hibah/Wakaf/Sumbangan
  - c. Pembangunan
  - d. Pertukaran



## Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persis	√	-
		Lapangan	√	-
1.3.2	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst...	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst...	√	-
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air Irigasi	√	-
		Instalasi	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak	√	-
		Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
		Hewan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	√	-
		Dst...	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.

- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

**Pengakuan:**

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
  - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
  - h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi	
1.3.1	Tanah	unit	Rp.	1,-
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
1.3.2.01	Alat-alat Besar			
	- Alat Besar Darat	unit	Rp	20.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp	20.000.000,00



No.	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi
	- Alat Bantu	unit	Rp 500.000,00
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan		
	- Kendaraan roda enam/lebih	unit	Rp 30.000.000,00
	- Kendaraan roda empat	Unit	Rp 15.000.000,00
	- Kendaraan roda dua	unit	Rp 3.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp 300.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Alat Pemancar	Unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.11	Alat eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp 500.000,00
1.3.2.16	Alat Praga	unit	Rp 500.000,00
1.3.2.17	Alat Proses/Produksi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp 500.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	unit	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	unit	Rp 25.000.000,00
1.3.3.02	Bangunan Monumen	unit	Rp 25.000.000,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	unit	Rp 5.000.000,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp 5.000.000,00
1.3.4	Jalan, jaringan dan irigasi, yg terdiri atas:		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp 50.000.000,00
1.3.4.02	Bangunan Air	unit	Rp 100.000.000,00
1.3.4.03	Instalasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.04	Jaringan	unit	Rp 50.000.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	<b>Tidak dikapitalisasi</b>
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-	<b>Tidak dikapitalisasi</b>
1.3.5.03	Hewan		<b>Tidak dikapitalisasi</b>
1.3.5.04	Biota Perairan		<b>Tidak dikapitalisasi</b>
1.3.5.05	Tanaman	-	<b>Tidak dikapitalisasi</b>
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya		<b>Tidak dikapitalisasi</b>

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extra comptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extra comptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
- Catatan dalam *extra comptable* berfungsi sebagai media pengendali.

Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.



- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.

#### Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

#### Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
- Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. *Air conditioning* dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

#### Jalan, Jaringan dan Irigasi:

- Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Jaringan dan Irigasi diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

- Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan di maksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap
  - b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan
  - c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a) dan b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan yang bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya
- Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.</li><li>• Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.</li></ul>

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.</li><li>• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.</li></ul>
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.</li><li>• Biaya Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.</li></ul>

Sumber: Kebijakan Akuntansi

#### Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

#### Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

#### Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

#### Jalan, Jaringan dan Irigasi:

- Pengukuran Jalan, jaringan dan irigasi berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, jaringan dan irigasi dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, jaringan dan irigasi didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi.

#### Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

#### Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

#### Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal

terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

#### Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.
- Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset

#### Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

#### Penyusutan:

penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena asset digunakan dalam operasional suatu entitas.

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang

memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.

- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.
- Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Aceh, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Aceh
- Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (*idle asset*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap
- Dokumen yang digunakan : Bukti Memorial, Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.
- Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

	Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat
1	3			<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2		<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01	Alat Besar	
1	3	2	01 01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01 02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01 03	Alat Bantu	7
1	3	2	02	Alat Angkutan	
1	3	2	02 01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	02 02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	5
1	3	2	02 03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02 04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02 05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03 01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03 02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03 03	Alat Ukur	5
1	3	2	04	Alat Pertanian	
1	3	2	04 01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05 01	Alat Kantor	5
1	3	2	05 02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05 03	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06 01	Alat Studio	5
1	3	2	06 02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06 03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06 04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07	Alat Kodekteran dan Kesehatan	
1	3	2	07 01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07 02	Alat Kesehatan Umum	5



Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	08	Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01 Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03 Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	08	05 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	2	09	Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01 Senjata Api	10
1	3	2	09	02 Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03 Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04 Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10	Komputer	
1	3	2	10	01 Komputer Unit	4
1	3	2	10	02 Peralatan Komputer	4
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01 Alat Eksplorasi Topografii	5
1	3	2	11	02 Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12	Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01 Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02 Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01 Sumur	5
1	3	2	13	02 Produksi	5
1	3	2	13	03 Pengolahan dan Permurnian	5
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01 Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	01 Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01 Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02 Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03 Alat SAR	4
1	3	2	15	04 Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	2	16	Alat Peraga	
1	3	2	16	01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01 Unit Peralatan Proses Produksi	5
1	3	2	18	Rambu-rambu	
1	3	2	18	01 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2
1	3	2	18	02 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	2
1	3	2	18	03 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	2
1	3	2	19	Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01 Peralatan Olahraga	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01 Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02	Monumen	
1	3	3	02	01 Candi/Tugu Peringatan/Tugu Prasasti	50



Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	3	03	Bangunan Menara	
1	3	3	03	01 Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01 Tugu/Tanda Batas	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	
1	3	4	01	Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01 Jalan	10
1	3	4	01	02 Jembatan	50
1	3	4	02	Bangunan Air	
1	3	4	02	01 Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02 Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06 Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07 Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03	Instalasi	
1	3	4	03	01 Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02 Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03 Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05 Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06 Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07 Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08 Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09 Instalasi Pengaman	20
1	3	4	04	Jaringan	
1	3	4	04	01 Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02 Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03 Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04 Jaringan Gas	30

Sumber: Kebijakan Akuntansi

#### Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*):

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku.

#### Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Aceh untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca. namun aset misalnya diungkapkan jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.



#### Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAA yang sah
- Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan Surat Keputusan Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Aceh, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal)

#### Akuntansi Reklasifikasi Aset Tetap

- Reklasifikasi aset tetap terdiri atas:
  - a. Reklasifikasi Aset Tetap ke *Extracomptable*
  - b. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya – Usulan Penghapusan dan Penjualan
  - c. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
  - d. Reklasifikasi KDP ke Aset Lain-lain – Mangkrak
  - e. Reklasifikasi KDP-Biaya Perencanaan X-1 ke Aset Lain-lain

#### Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

### **Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	√	-
	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

## Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
  - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
  - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
  - a. asuransi;
  - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak

diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
  - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
  - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
  - d. Uang muka kerja yang diberikan;
  - e. Retensi.
  - f. Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

**Akuntansi Dana Cadangan**

**Definisi:**

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

**Klasifikasi:**

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Dana Cadangan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan	-	√
		Dst		

- b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
4.1.4.03	8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	√	√
		Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....		

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga Pendapatan Bagi Hasil Deposito .....	√	√

**Pengakuan:**

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
  - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
  - d. Sumber dana cadangan; dan
  - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

**Pengukuran:**

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset, Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah- jasa giro/bunga dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan - LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa giro/bunga dana cadangan.
- dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan: (1) dasar hukum (Qanun) pembentukan dana cadangan, (2) Tujuan pembentukan dana cadangan, (3)Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, (4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,(5)Sumber dana cadangan, (6)Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

**Akuntansi Aset Lainnya**

## Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

## Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	√	√
	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
1.5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	√	√
	Sewa	√	√
	Kerjasama Pemanfaatan BGS/BSG	√	√
1.5.3	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	√	√
	Aset Tidak Berwujud	√	-
	Goodwill	√	-
	Lisensi dan Frenchise	√	-
	Hak Cipta	√	-
	Paten	√	-
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
1.5.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
	Aset Lain-lain	√	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

## Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

## a. Tagihan Jangka Panjang

## 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

## 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

## b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

3) Bangun Guna Serah

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Aceh setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Aceh untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut

4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Tetap yang pemanfaatannya dalam bentuk KSPI harus direklasifikasikan ke Aset Lain-lain - Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Aceh akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

## 2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Aceh. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

## 3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

## 4) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

## 5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

## 6) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

## 7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

## 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

## d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

## Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga





a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerja sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Aceh ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

- Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.

- Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
- Aset Tak Berwujud berupa Software dihitung amortisasinya dengan masa manfaat 4 (empat) tahun.
- Aset Tak Berwujud berupa Kajian dihitung amortisasinya berdasarkan periode manfaat pada dokumen kajian tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
  - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;

- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
  - d. Informasi lainnya yang penting.
- Pelepasan/Penghentian Aset Tetap
- Aktivitas pelepasan/penghentian aset tetap terdiri atas:
- a. Penjualan
  - b. Pemusnahan
  - c. Hibah
  - d. Penyertaan Modal

### **Akuntansi Kewajiban**

#### Definisi:

- Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Aceh juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Aceh, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari peraturan perundang-undangan atau kontrak yang mengikat.

#### Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
<b>2.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
<b>2.2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**Pengakuan:**

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketentuan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketentuan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

**Pengukuran:**

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
    - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
    - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
  - b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

- Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Aceh dijabarkan dalam 2 (dua) karakteristik sebagai berikut:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
- b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

- Perubahan Valuta Asing

- Tunggakan

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.

- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

### **Akuntansi Pendapatan**

Definisi:

- Pendapatan-LRA dicatat saat adanya pendapatan secara tunai dan non tunai. Pendapatan-LO pada umumnya terjadi karena adanya penerimaan pendapatan secara tunai dan non tunai, adanya tunggakan pungutan pendapatan, pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Aceh

- Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

- Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**Klasifikasi:**

- Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.1	Pendapatan Asli Aceh-LRA	√	-
4.1.1	Pajak Aceh-LRA	√	-
4.1.2	Retribusi Aceh-LRA	√	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LRA	√	-
4.1.4	Lain-lain PAA yang Sah-LRA	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.2	Pendapatan Transfer-LRA	-	√
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	-	√
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	-	√
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	-	√
4.3.1	Pendapatan Hibah-LRA	-	√
4.3.2	Dana Darurat-LRA	-	√
4.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

**Pengakuan:**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat:
  - a. Diterima pada Rekening Kas Umum Aceh
  - b. Diterima oleh SKPA
  - c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Aceh atas nama Bendahara Umum AcehPendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut
  - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
  - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Aceh dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Aceh, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Aceh.

- c. Pendapatan kas yang diterima SKPA dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Aceh, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Aceh untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Aceh.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Aceh untuk diakui sebagai pendapatan Aceh.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Aceh berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Aceh, dan Bendahara Umum Aceh mengakuinya sebagai pendapatan.

- Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah
- Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA
- Koreksi kesalahan pencatatan pendapatan ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:
  - a. Koreksi kesalahan pendapatan pada periode berjalan; dan
  - b. Koreksi kesalahan pendapatan pada periode sebelumnya.

Jika terjadi pengembalian pendapatan yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

- Koreksi kesalahan pencatatan pendapatan ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:
  - a. Koreksi kesalahan pendapatan bersifat normal dan berulang; dan
  - b. Koreksi kesalahan pendapatan yang bersifat tidak normal dan tidak berulang
- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah pada SKPA terkait
- Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKA akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan
- Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Aceh
- Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi
- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBA Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan.
- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada SKPKA.

- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
- Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

### **Akuntansi Belanja**

Definisi:

- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
<b>5.1</b>	-	<b>Belanja Operasi</b>		
5.1.01	-	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	-	Belanja Barang	√	-
5.1.03	-	Bunga	-	√
5.1.04	-	Subsidi	-	√
5.1.05	-	Hibah (berupa uang)	-	√
5.1.05	-	Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√
5.1.06	-	Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
5.1.06	-	Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
<b>5.2</b>	-	<b>Belanja Modal</b>		
5.2.01	-	Belanja Tanah	√	-
5.2.02	-	Belanja Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	-	Belanja Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	-	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	√	-
5.2.05	-	Belanja Aset tetap lainnya	√	-
<b>5.3</b>	-	<b>Belanja Tak Terduga</b>		



Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.3.01		Belanja Tak Terduga	-	√
<b>5.4</b>	-	<b>Belanja Transfer</b>		
5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	-	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

#### Pengakuan:

- Belanja diakui pada saat:
  - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
  - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### Pengukuran:

- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### Penyajian dan Pengungkapan:

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

### Akuntansi Transfer

#### Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Beban Transfer
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Beban Transfer Keuangan Lainnya





---

**Klasifikasi**

---

Transfer/Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota  
Bagi Hasil Pajak  
Bagi Hasil Retribusi  
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya  
Transfer Bantuan Keuangan  
Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya  
Bantuan Keuangan Lainnya

---

*Sumber: Kebijakan Akuntansi*

**Pengakuan:**

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

**Pengukuran:**

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
  - a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - b. Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

**Penyajian Dan Pengungkapan:**

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.
- Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
- Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
- Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.

**Akuntansi Pembiayaan**

**Definisi:**

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh pada bank yang ditetapkan.
- Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
- Penerimaan Pembiayaan
  - a. Penggunaan SILPA
  - b. Pencairan Dana Cadangan
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
  - d. Pinjaman Dalam Negeri
  - e. Penerimaan Kembali Piutang
  - f. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
  - g. Pinjaman Luar Negeri
  - h. Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
- Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Pembentukan Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh
  - c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah
  - e. Pengeluaran Investasi Non Permanen
  - f. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
  - g. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

**Pengukuran:**

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah: Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran(2), Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Aceh,(3) Informasi lainnya yang dianggap perlu

**Akuntansi Pendapatan-LO****Definisi:**

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

**Klasifikasi:**

- Pendapatan Asli Aceh (PAA):
  - Pajak Aceh
  - Retribusi Aceh
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
  - Lain-lain PAA yang Sah
- Pendapatan Transfer:
  - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - Pendapatan Transfer Antar Daerah
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah:
  - Pendapatan Hibah
  - Dana Darurat
  - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangans

**Pengakuan:**

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
    - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
- pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
  - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pengakuan Pendapatan Pajak-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*
  - Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak-LO, Pemerintah Aceh memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan
  - Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional
  - Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas
  - Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan
  - Pendapatan Bantuan Keuangan-LO baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, diakui berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Aceh yang menjadi hak Pemerintah Aceh selaku penerima
  - Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut
  - Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Aceh, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO

**Pengukuran:**

- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud
- Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Aceh
- Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi

**Penyajian dan Pengungkapan:**

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah, (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Aceh, (4) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

### **Akuntansi Beban**

#### Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

#### Klasifikasi:

Beban diklasifikasi sebagai berikut:

- Beban Operasi-Lo
- Beban Transfer
- Beban Non Operasional
- Beban Luar Biasa

#### Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh.
  - b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
  - a. Metode pendekatan Beban
  - b. Metode pendekatan Aset
- Beban Pegawai Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Aceh yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan

- Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Aceh untuk memberikan subsidi telah timbul
- Beban Hibah diakui pada saat NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah
- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial
- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun
- Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Aceh kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga
- Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*)
- Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku
- Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga
- Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku
- Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer
- Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus
- Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya

tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute atau (perselisihan) dikemudian hari

- Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item)
- Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban
- Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

### **Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan**

Definisi:

- Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Perusahaan Daerah Aceh, Masyarakat, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan.
- Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Aceh kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Aceh kepada pemerintah daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik

Klasifikasi:

- Jenis belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari sisi bentuknya terdiri dari
  - a. Dalam bentuk uang
  - b. Dalam bentuk barang
- Belanja hibah, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah
  - a. Pemerintah
  - b. Pemerintah daerah
  - c. Perusahaan daerah Aceh
  - d. Masyarakat
  - e. Organisasi kemasyarakatan

- Belanja bantuan sosial, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima bantuan sosial
  - a. Belanja bantuan sosial kepada individu
  - b. Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintahan
- Seluruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bersifat terencana. Belanja yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBA dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBA

Pengakuan:

- Pengakuan pendapatan hibah terjadi pada saat hak Pemerintah Aceh timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun berjalan serta tidak perlu dibayar kembali
- Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional
- Hibah dalam bentuk uang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sejumlah nominal yang diterima
- Hibah dalam bentuk barang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar nilai yang tertuang pada berita acara apabila termasuk dalam hibah terencana dan telah dianggarkan dalam APBA
- Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutory report. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPA dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPA penerima
- Hibah dari aset yang tidak ada nilainya, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) jenis dan jumlah barang yang dihibahkan
- Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah Aceh dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat

Pengukuran:

- Belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah

Penyajian dan Pengungkapan:

- Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi bank sentral pada tanggal transaksi. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional
- Jenis informasi atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain



- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan terhadap target yang ditetapkan dalam qanun daerah tentang APBA, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan
- c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
- d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- e. Jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga

### **Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

#### Definisi:

- Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

#### Pengakuan:

- Pendapatan BLUD - LO diakui dengan kriteria
  - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
  - b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan.
  - d. Pada saat realisasi pendapatan BLUD yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan
- Pendapatan BLUD – LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan Pendapatan BLUD oleh fungsi BUA
- Piutang BLUD diakui dengan kriteria
  - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
  - b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas BLUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Belanja BLUD-LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan atas belanja operasional BLUD oleh fungsi BUA
- Kas Uang Muka Pelayanan BLUD dan Pendapatan Diterima Di Muka diakui pada saat uang diterima di BLUD
- Potongan/Penyesuaian Klaim Pendapatan diakui pada saat dokumen hasil verifikasi diterbitkan oleh pihak ketiga
- Kas transitoris pendapatan-BLUD diakui pada saat uang diterima di BLUD atas jasa layanan yang telah diberikan dan belum dilakukan pengesahan pendapatan
- Kas transitoris belanja-BLUD diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari dana BLUD dan belum dilakukan pengesahan belanja

Pengukuran:

- Pengukuran pendapatan BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD, Pendapatan Diterima Di Muka diidentifikasi sebesar jumlah nominal yang tertera pada dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD atau yang dipersamakan
- Pengukuran Piutang Jasa Layanan BLUD dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir periode

Penyajian dan Pengungkapan:

- Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
- Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun
- Laporan Keuangan BLUD disajikan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.
- Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

## BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

### 5.1. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5. 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2021 dan TA 2020**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Pendapatan	13.864.978.453.942,00	13.948.388.273.436,12	100,60	14.439.920.557.021,15
2	Belanja	13.521.881.163.765,00	10.849.062.582.676,68	80,23	9.899.914.199.649,57
3	Transfer	2.960.457.145.733,00	2.834.519.544.755,00	95,75	3.342.298.602.245,00
4	Pembiayaan	2.617.359.855.556,00	3.668.874.466.385,95	140,17	2.771.909.599.655,71
	<b>SILPA</b>	-	<b>3.933.680.612.390,39</b>	-	<b>3.969.617.354.782,29</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

#### 5.1.1. Pendapatan

Pendapatan Aceh terdiri dari Pendapatan Asli Aceh, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp491.532.283.585,03 atau 3,40%. Realisasi dan anggaran masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5. 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan TA 2020**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Pendapatan Asli Aceh	2.401.682.455.965,00	2.505.887.909.031,12	104,34	2.570.775.877.183,15
2	Pendapatan Transfer	11.435.885.996.400,00	11.431.169.265.498,00	99,96	11.826.017.687.067,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	27.410.001.577,00	11.331.098.907,00	41,34	43.126.992.771,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>13.864.978.453.942,00</b>	<b>13.948.388.273.436,12</b>	<b>100,60</b>	<b>14.439.920.557.021,15</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

##### 5.1.1.1. Pendapatan Asli Aceh

**Realisasi 2021**                      **Realisasi 2020**  
**Rp2.505.887.909.031,12**           **Rp2.570.775.877.183,15**

Pendapatan Asli Aceh merupakan Pendapatan Aceh yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Pajak Aceh	1.374.555.532.889,00	1.529.610.318.107,63	111,28	1.477.991.066.969,65
2	Retribusi Aceh	12.133.554.700,00	8.307.103.680,00	68,46	8.159.969.910,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan dan	182.385.550.448,00	152.434.096.229,00	83,58	181.700.799.036,00

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
4	Hasil Penyertaan Modal Lain-lain PAA yang Sah	832.607.817.928,00	815.536.391.014,49	97,95	902.924.041.267,50
<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>		<b>2.401.682.455.965,00</b>	<b>2.505.887.909.031,12</b>	<b>104,34</b>	<b>2.570.775.877.183,15</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

#### 5.1.1.1.1. Pajak Aceh

**Realisasi 2021**  
**Rp1.529.610.318.107,63**

**Realisasi 2020**  
**Rp1.477.991.066.969,65**

Pajak Aceh merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Aceh tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman, serta dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	433.680.500.000,00	496.878.691.912,00	114,57	484.694.888.039,50
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	277.507.310.499,00	315.373.023.780,00	113,64	290.706.133.250,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	318.285.069.211,00	349.120.764.433,00	109,69	319.325.065.709,00
4.	Pajak Air Permukaan	1.680.000.000,00	2.730.279.025,63	162,52	1.897.658.782,15
5.	Pajak Rokok	343.402.653.179,00	365.507.558.957,00	106,44	381.367.321.189,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.374.555.532.889,00</b>	<b>1.529.610.318.107,63</b>	<b>111,28</b>	<b>1.477.991.066.969,65</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

#### 5.1.1.1.2. Retribusi Aceh

**Realisasi 2021**  
**Rp8.307.103.680,00**

**Realisasi 2020**  
**Rp8.159.969.910,00**

Retribusi Aceh merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi**

Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	804.280.200,00	1.024.697.000,00	127,41	930.267.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	240.000.000,00	1.000.588.030,00	416,91	832.394.030,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	554.000.000,00	-	523.000.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	63.200.000,00	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	265.000.000,00	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.372.480.200,00</b>	<b>2.579.285.030,00</b>	<b>187,93</b>	<b>2.285.661.030,00</b>



Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.561.579.500,00	2.017.921.850,00	44,24	1.756.239.880,00
Retribusi Tempat Pelelangan	150.000.000,00	203.156.000,00	135,44	-
Retribusi Terminal	1.944.973.000,00	-	-	2.500.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.500.000,00	36.142.000,00	101,81	32.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	827.900.000,00	497.765.000,00	60,12	466.813.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	386.000.000,00	310.386.500,00	80,41	225.650.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.983.722.000,00	471.850.000,00	23,79	285.792.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	125.750.000,00	1.316.570.000,00	1.046,97	2.478.979.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.015.424.500,00</b>	<b>4.853.791.350,00</b>	<b>48,46</b>	<b>5.216.005.880,00</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.350.000,00	27.178.000,00	89,55	45.828.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	439.300.000,00	632.265.000,00	143,93	612.475.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	276.000.000,00	214.584.300,00	77,75	-
<b>Jumlah</b>	<b>745.650.000,00</b>	<b>874.027.300,00</b>	<b>117,22</b>	<b>658.303.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.133.554.700,00</b>	<b>8.307.103.680,00</b>	<b>68,46</b>	<b>8.159.969.910,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup capaian realisasi sebesar 416,91 % merupakan realisasi atas pendapatan dari bulan September sampai dengan Desember TA 2020 baru di setor pada TA 2021. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha untuk retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah pada Dinas Peternakan Aceh capaian realisasi sebesar Rp1.188.230.500,00 merupakan realisasi atas pendapatan retribusi yang tidak dianggarkan. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu untuk retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan capaian realisasi sebesar 143,93% merupakan kelebihan pendapatan dari target yang ditetapkan.

**5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyerahan Modal**

**Realisasi 2021**  
**Rp152.434.096.229,00**

**Realisasi 2020**  
**Rp181.700.799.036,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyerahan Modal TA 2021 sebesar Rp152.434.096.229,00 atau 83,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp182.385.550.448,00 dan TA 2020 sebesar Rp181.700.799.036,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyerahan Modal**

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Bank Aceh		
	-Setoran Deviden	132.444.587.380,00	158.284.954.748,00
	-Dana Pembangunan	19.989.508.849,00	23.415.844.288,00
2	BPR Mustaqim	-	-
3	PT Pembangunan Aceh	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>152.434.096.229,00</b>	<b>181.700.799.036,00</b>

Sumber : sipkd.acehprov.go.id

**5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah****Realisasi 2021**  
**Rp815.536.391.014,49****Realisasi 2020**  
**Rp902.924.041.267,50**

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah TA 2021 sebesar Rp815.536.391.014,49 atau 97,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp832.607.817.928,00 dan TA 2020 sebesar Rp902.924.041.267,50, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 7. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	13.700.000.000,00	13.067.589.205,05	95,38	205.000.000,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	-	4.471.257.706,00	-	5.672.681.263,60
3	Jasa Giro	20.000.000.000,00	21.867.510.208,30	109,34	85.238.348.370,02
4	Pendapatan Bunga	136.028.000.000,00	147.090.438.861,74	108,13	76.187.421.357,82
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	1.493.983.776,08	-	518.570.811,47
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	13.000.000.000,00	13.700.737.110,72	105,39	7.417.052.203,24
7	Pendapatan dari Pengembalian	-	8.911.378.129,13	-	27.129.902.811,74
8	Pendapatan BLUD	538.779.817.928,00	518.506.877.653,45	96,24	618.016.370.938,53
9	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	111.100.000.000,00	86.426.618.364,02	77,79	82.538.693.511,08
<b>Jumlah</b>		<b>832.607.817.928,00</b>	<b>815.536.391.014,49</b>	<b>97,95</b>	<b>902.924.041.267,50</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp815.536.391.014,49, pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan BLUD sebesar Rp518.506.877.653,45 atau 96,24%. Pendapatan BLUD dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5. 8. Pendapatan BLUD**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin	474.000.000.000,00	458.545.979.953,58	96,74	557.540.343.266,24
2	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa	26.229.653.600	24.035.300.295,96	91,63	29.303.169.132,14
3	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	22.273.164.328,00	19.904.100.243,73	89,36	23.695.265.826,02
4	Pendapatan BLUD UPTD Mekanika Pertanian	2.000.000.000,00	683.370.224,22	34,17	1.330.139.185,41
5	Pendapatan BLUD UPTD BTNR Dinas Peternakan	12.577.000.000,00	13.501.176.000,00	107,35	4.234.592.710,00
6	Pendapatan BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman	1.700.000.000,00	1.836.950.935,96	108,06	1.912.860.818,72
<b>Total</b>		<b>538.779.817.928,00</b>	<b>518.506.877.653,45</b>	<b>96,24</b>	<b>618.016.370.938,53</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.1.1.2. Pendapatan Transfer****Realisasi 2021**  
**Rp11.431.169.265.498,00****Realisasi 2020**  
**Rp11.826.017.687.067,00**

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>					
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	153.487.130.400,00	202.310.251.468,00	131,81	127.272.935.167,00
2	Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan SDA lainnya	-	-	-	39.867.057.258,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.945.980.616.000,00	1.945.980.616.000,00	100,00	1.956.492.796.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	318.460.490.000,00	288.201.609.176,00	90,50	252.931.846.782,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.455.401.754.000,00	1.432.120.782.854,00	98,40	1.509.338.554.784,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.873.329.990.400,00</b>	<b>3.868.613.259.498,00</b>	<b>99,88</b>	<b>3.885.903.189.991,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>					
1	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh	7.555.827.806.000,00	7.555.827.806.000,00	100,00	7.555.278.348.000,00
2	Dana Penyesuaian	-	-	-	384.836.149.076,00
3	Dana Insentif Daerah (DID)	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	100,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.940.114.497.076,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>11.435.885.996.400,00</b>	<b>11.431.169.265.498,00</b>	<b>99,96</b>	<b>11.826.017.687.067,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp3.868.613.259.498,00 atau sebesar 99,88% dari target yang direncanakan sebesar Rp3.873.329.990.400,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 10. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak**

No	Rincian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	45.730.278.000,00	62.408.514.827,00	136,47	42.169.041.997,00
2	DBH PPh Pasal 21	-	102.883.344.800,00	-	-
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	84.412.316.000,00	1.095.421.000,00	1,30	75.568.737.953,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	-	-	-	2.111.495.600,00
5	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.893.912.400,00	4.507.958.519,00	115,77	5.299.261.920,00
6	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	-	-	-	236.774.264,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.836.562.000,00	10.596.720.500,00	181,56	-
8	Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	1.887.623.433,00

No	Rincian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	464.035.525,00	-	-
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	170.054.000,00	494.487.308,00	290,78	-
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	761.652.275,00	-	-
12	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	13.356.513.000,00	17.959.631.184,00	134,46	-
13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	87.495.000,00	335.683.792,00	383,66	-
14	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	802.801.738,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>153.487.130.400,00</b>	<b>202.310.251.468,00</b>	<b>131,81</b>	<b>127.272.935.167,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak menjadi bagian Dana Bagi Hasil.

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2021 sebesar Rp1.945.980.616.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan sebesar Rp1.945.980.616.000,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021 sebesar Rp288.201.609.176,00 atau 90,50% dari target yang direncanakan sebesar Rp318.460.490.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 11. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus**

No	Rincian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	204.050.963.000,00	185.210.407.809,00	90,77	103.868.257.517,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	3.864.765.000,00	3.455.321.867,00	89,41	5.990.294.500,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	-	-	-	2.825.570.107,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	-	-	-	121.753.749.570,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.886.882.000,00	3.366.395.800,00	68,89	-
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	14.689.559.000,00	13.281.057.776,00	90,41	13.906.934.888,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan	2.157.908.000,00	1.284.496.000,00	59,53	3.567.371.200,00



No	Rincian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
	Intervensi Stunting				
8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.902.661.000,00	4.693.206.574,00	95,73	1.019.669.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.478.800.000,00	9.267.892.147,00	88,44	-
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.000.563.000,00	13.886.913.915,00	92,58	-
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	49.363.737.000,00	45.536.366.000,00	92,25	-
12	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.664.652.000,00	5.819.551.288,00	87,32	-
13	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>318.460.490.000,00</b>	<b>288.201.609.176,00</b>	<b>90,50</b>	<b>252.931.846.782,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA dan Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK menjadi bagian Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2021 sebesar Rp1.432.120.782.854,00 atau 98,40% dari target yang direncanakan sebesar Rp1.455.401.754.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 12. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

No	Rincian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.016.592.370.000,00	1.009.312.963.000,00	99,28	1.101.261.800.000,00
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	100,00	-
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	13.440.000.000,00	6.950.000.000,00	51,71	-
4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	403.092.407.000,00	403.092.407.000,00	100,00	370.669.169.000,00
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.265.000.000,00	2.265.000.000,00	100,00	2.806.407.000,00
6	DAK Non Fisik-TKG PNSD	996.934.000,00	299.080.000,00	30,00	10.967.941.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.186.400.000,00	2.752.033.519,00	86,37	2.656.034.229,00
8	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.750.000.000,00	1.740.813.288,00	99,48	1.750.000.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.000.423.000,00	-	-	16.902.983.545,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	921.199.000,00	-	-	-
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.352.080.000,00	998.801.979,00	42,46	2.109.572.116,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.584.941.000,00	1.568.485.068,00	98,96	214.647.894,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	507.467.000,00	-	-
14	DAK Non Fisik-Dana	-	413.732.000,00	-	-

No	Rincian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	<b>Jumlah</b>	<b>1.455.401.754.000,00</b>	<b>1.432.120.782.854,00</b>	<b>98,40</b>	<b>1.509.338.554.784,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021 sebesar Rp6.728.200.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.728.200.000,00 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2021 sebesar Rp7.555.827.806.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp549.458.000,00 atau 0,73% dari TA 2020 sebesar Rp7.555.278.348.000,00.

**5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah** **Realisasi 2021**  
**Rp11.331.098.907,00** **Realisasi 2020**  
**Rp43.126.992.771,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp11.331.098.907,00 atau 41,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.410.001.577,00 dan TA 2020 sebesar Rp43.126.992.771,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 13. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	41.322.992.771,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	11.622,00	-	-
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	27.410.001.577,00	8.458.796.038,00	30,86	1.804.000.000,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	1.356.845.765,00	-	-
5	Lain-lain Pendapatan	-	1.515.445.482,00	-	-
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		<b>27.410.001.577,00</b>	<b>11.331.098.907,00</b>	<b>41,34</b>	<b>43.126.992.771,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp8.458.796.038,00 terdiri dari: Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp1.317.976.000,00 dan Hibah IPDMIP sebesar Rp7.140.820.038,00 yaitu Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)-Asean Infrastructure Fund (AIF) merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia, IPDMIP-Asean Development Bank (ADB) dan IPDMIP-IFAD

**5.1.2. Belanja dan Transfer** **Realisasi 2021**  
**Rp13.683.582.127.431,68** **Realisasi 2020**  
**Rp13.242.212.801.894,57**

Realisasi belanja TA 2021 mencapai Rp13.683.582.127.431,68 atau 83,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.482.338.309.498,00 dan TA 2020 sebesar Rp13.242.212.801.894,57 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 14. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Operasi	10.058.436.337.426,00	8.649.317.139.857,74	85,99	7.985.982.044.904,10
2	Belanja Modal	3.315.459.457.224,00	2.199.333.370.928,94	66,34	1.755.472.079.286,47
3	Belanja Tak Terduga	147.985.369.115,00	412.071.890,00	0,28	158.460.075.459,00
4	Belanja Transfer	2.960.457.145.733,00	2.834.519.544.755,00	95,75	3.342.298.602.245,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>16.482.338.309.498,00</b>	<b>13.683.582.127.431,68</b>	<b>83,02</b>	<b>13.242.212.801.894,60</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.1.2.1. Belanja Operasi**

**Realisasi 2021**  
**Rp8.649.317.139.857,74**

**Realisasi 2020**  
**Rp7.985.982.044.904,10**

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi TA 2021 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang direalisasikan sebesar Rp8.649.317.139.857,74 atau 85,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.058.436.337.426,00 dan TA 2020 sebesar Rp7.985.982.044.904,10 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Pegawai	2.829.428.312.694,00	2.631.227.115.328,00	93,00	2.483.284.443.746,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.936.917.132.917,00	5.125.955.152.315,14	86,34	3.702.404.761.736,99
3	Belanja Hibah	907.787.487.926,00	758.581.422.107,25	83,56	1.422.789.246.408,91
4	Belanja Bantuan Sosial	384.303.403.889,00	133.553.450.107,35	34,75	377.503.593.012,20
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>10.058.436.337.426,00</b>	<b>8.649.317.139.857,74</b>	<b>85,99</b>	<b>7.985.982.044.904,10</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.1.2.1.1. Belanja Pegawai**

**Realisasi 2021**  
**Rp2.631.227.115.328,00**

**Realisasi 2020**  
**Rp2.483.284.443.746,00**

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRA serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mencapai Rp2.631.227.115.328,00 atau 93,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.829.428.312.694,00 dan TA 2020 sebesar Rp2.483.284.443.746,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 16. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

No	Rincian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.538.489.918.698,00	1.468.835.368.553,00	95,47	1.849.689.045.177,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	564.061.243.016,00	513.955.123.138,00	91,12	509.636.409.221,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	602.194.516.748,00	539.721.820.614,00	89,63	-
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	20.571.952.638,00

No	Rincian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	29.934.335.769,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	38.030.000,00
7	Honorarium PNS, Non PNS dan Lembur	-	-	-	9.649.869.916,00
8	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	50.403.206.960,00	50.147.422.958,00	99,49	-
9	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	4.172.300.000,00	3.182.700.502,00	76,28	-
10	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.962.523.672,00	2.521.514.208,00	63,63	-
11	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	-	-	172.800.000,00
12	Belanja Pegawai BOS	25.865.480.000,00	15.790.766.153,00	61,05	20.985.402.625,00
13	Belanja Pegawai BLUD	40.279.123.600,00	37.072.399.202,00	92,04	42.606.598.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.829.428.312.694,00</b>	<b>2.631.227.115.328,00</b>	<b>93,00</b>	<b>2.483.284.443.746,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tambahan Penghasilan PNS TA 2021 direalisasikan sebesar Rp513.955.123.138,00 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada setiap PNS berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Pertimbangan Objektif Lainnya dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang dinilai dengan tingkat eselonering, tingkat kedisiplinan dan kinerja sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 840/269/2008 tanggal 03 Juli 2008.

Belanja Pegawai terkait penanganan *Covid-19* pada Bidang Kesehatan, TA 2021 direalisasikan sebesar Rp683.700.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp683.700.000,00 terdapat pada Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin yaitu Belanja Pegawai BLUD.

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

**Realisasi 2021**  
**Rp5.125.955.152.315,14**

**Realisasi 2020**  
**Rp3.702.404.761.736,99**

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu Tahun Anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 mencapai Rp5.125.955.152.315,14 atau 86,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.936.917.132.917,00, dan TA 2020 sebesar Rp3.702.404.761.736,99. dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**.

Dari total Belanja Barang dan Jasa, terdapat Barang Jasa BLUD TA 2021 sebesar Rp508.261.215.628,10 atau 98,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp517.509.638.118,00 dan TA 2020 sebesar Rp493.513.447.898,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 17. Realisasi Belanja BLUD**

No	Rincian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
1	Belanja Bahan Pakan Ayam Ras Petelur	-	2.157.557.800,00
2	Belanja Bahan Habis Pakai	180.534.646.499,00	142.746.038.367,00
3	Belanja Bahan/Material	93.266.095.884,00	121.599.576.898,00

No	Rincian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
4	Belanja Jasa Kantor	180.702.324.388,05	178.366.727.006,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.136.125,00	-
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	-	10.317.821.688,00
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	155.132.500,00	381.290.012,00
8	Belanja Bahan Obat dan Disinfektan	74.897.000,00	-
9	Belanja Kelengkapan Lapangan	8.611.500,00	-
10	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.581.653.757,00	5.427.304.710,00
11	Belanja Sewa Tanah	14.000.000,00	-
12	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.230.000,00	4.042.500,00
13	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.598.235.207,00	1.471.437.040,00
14	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	65.190.000,00	-
15	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	184.875.000,00	163.020.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman	16.869.054.595,00	15.629.036.920,00
17	Petugas Pelayanan Galeri BLUD MRB	31.483.358,00	-
18	Belanja Pakaian Kerja	-	35.242.000,00
19	Belanja Pakaian Dinas	595.480.500,00	-
20	Belanja Perjalanan Dinas	2.299.513.856,00	2.807.528.101,00
21	Belanja Pemeliharaan	23.229.427.397,00	10.790.719.455,00
22	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	583.899.862,00	829.798.900,00
23	Belanja Jasa Konsultansi	1.162.833.950,00	-
24	Petugas Parkir BLUD MRB	309.600.000,00	-
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	130.320.000,00	-
26	Jasa Koordinator Pengamanan MRB	83.000.000,00	-
27	Jasa Petugas Pengatur Shaf Shalat MRB	281.790.000,00	-
28	Petugas Pelayanan Penitipan BLUD MRB	153.600.000,00	-
29	Belanja Bansos kepada organisasi masyarakat	-	20.000.000,00
30	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti	1.310.184.250,00	742.506.501,00
31	Honorarium PNS	-	16.800.000,00
32	Honorarium Non PNS	-	7.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>508.261.215.628,05</b>	<b>493.513.447.898,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Belanja Barang dan Jasa untuk penanganan Covid-19 TA 2021 direalisasikan sebesar Rp160.479.264.153,71 atau 72,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp221.079.215.699,00, dengan rincian berikut.

**Tabel 5. 18. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%
<b>A</b>	<b>Penanganan Kesehatan</b>			
1	Belanja Barang Pakai Habis	44.590.298.019,00	33.472.654.912,00	75,07
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	50.000.000,00	16.600.000,00	33,20
3	Belanja Jasa Kantor	60.561.034.782,00	52.350.153.354,71	86,44
4	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	204.000.000,00	7.500.000,00	3,68
5	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	751.382.500,00	683.075.000,00	90,91
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168.561.250,00	-	-

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.772.272.600,00	2.712.979.640,00	47,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.500.000,00	2.175.000,00	8,53
9	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	5.000.000,00	4,17
10	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.614.480.843,00	43.009.658.167,00	58,43
	<b>Jumlah</b>	<b>185.857.529.994,00</b>	<b>132.259.796.073,71</b>	<b>71,16</b>
<b>B Penyediaan Jaring Pengaman Sosial</b>				
1	Belanja Barang Pakai Habis	240.029.449,00	108.051.630,00	45,02
2	Belanja Jasa Kantor	27.061.577.800,00	21.593.279.183,00	79,79
	<b>Jumlah</b>	<b>27.301.607.249,00</b>	<b>21.701.330.813,00</b>	<b>79,49</b>
<b>C Penanganan Dampak Ekonomi</b>				
1	Belanja Barang Pakai Habis	81.573.809,00	53.627.500,00	65,74
2	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000.000,00	5.932.387.115,00	84,75
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	448.072.945,00	422.914.550,00	94,39
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	354.013.600,00	87.790.000,00	24,80
6	Belanja Pemeliharaan Tanah	16.418.102,00	16.418.102,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.920.078.456,00</b>	<b>6.518.137.267,00</b>	<b>82,30</b>
	<b>Total</b>	<b>221.079.215.699,00</b>	<b>160.479.264.153,71</b>	<b>72,59</b>

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

### 5.1.2.1.3. Belanja Hibah

**Realisasi 2021**  
**Rp758.581.422.107,25**

**Realisasi 2020**  
**Rp1.422.789.246.408,91**

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 mencapai Rp758.581.422.107,25 atau 83,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp907.787.487.926,00 dan TA 2020 sebesar Rp1.422.789.246.408,91.

Belanja Hibah dalam bentuk uang Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp70.032.095.000,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan hibah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 19. Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Uang**

No	SKPA	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	PPKA	-	-	-	856.293.338.368,00
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4.475.720.000,00	3.315.720.000,00	74,08	-
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	62.500.000.000,00	57.500.000.000,00	92,00	-
4	Dinas Sosial Aceh	8.322.250.000,00	8.116.375.000,00	97,53	-
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	-
6	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.650.000.000,00	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>78.047.970.000,00</b>	<b>70.032.095.000,00</b>	<b>89,73</b>	<b>856.293.338.368,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Pada tahun 2020 belanja hibah dalam bentuk uang direalisasikan pada PPKA, untuk tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada masing-masing SKPA terkait.

Rincian dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 5. 20. Belanja Hibah Keputusan Gubernur Aceh**

No	SKPA	Uraian	Keputusan
1	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Hibah Kepada PWRI Aceh Hibah Kepada Parpol	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/909 / 2021 Tanggal 24 Maret 2021 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 210/973 / 2021 Tanggal 31 Maret 2021
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah Kepada PRAMUKA Hibah Kepada KONI Hibah Kepada KNPI	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/769 / 2021 Tanggal 9 Maret 2021
3	Dinas Sosial Aceh	Hibah Permakanaan Panti Lansia Hibah Permakanaan Panti Asuhan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 463/863 / 2021 Tanggal 12 Maret 2021
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Bantuan Hibah kepada Komisi Penyiaran dan Informasi Aceh (KPIA)	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/217 / 2021 Tanggal 26 Februari 2021

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Belanja Hibah dalam bentuk Barang Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp688.549.327.107,25. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan hibah dalam bentuk barang/uang adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 21. Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Barang**

No	SKPA	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Dinas Pendidikan Aceh	13.892.592.166,00	12.464.978.214,00	89,72	599.535.200,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	511.308.967.092,00	475.538.745.622,00	93,00	248.916.948.336,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	4.520.000.000,00	2.932.700.700,00	64,88	7.411.068.300,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	116.525.511.512,00	89.754.485.400,00	77,03	258.206.198.327,93
5	Dinas Pengairan Aceh	-	-	-	7.241.583.000,00
6	Dinas Sosial Aceh	-	-	-	335.461.800,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	-	-	15.803.711.288,51
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	-	-	-	1.777.796.912,55
9	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	-	-	-	2.669.620.879,49
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-	-	-	6.160.677.500,00
11	Dinas Pangan Aceh	10.476.000.000,00	10.187.031.863,96	97,24	-
12	Dinas Pertanahan Aceh	1.050.000.000,00	974.820.000,00	92,84	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh	5.960.526.000,00	-	-	2.841.572.100,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	-	-	1.122.000.000,00
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	-	-	-	309.681.000,00
16	Sekretariat Majelis Adat Aceh	750.000.000,00	748.600.000,00	99,81	-
17	Dinas Perpustakaan Dan	550.000.000,00	537.963.700,00	97,81	2.361.052.920,00

No	SKPA	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
	Kearsipan Aceh				
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	-	-	-	886.394.324,00
19	Dinas Peternakan Aceh	137.650.678.529,00	74.959.925.544,03	54,46	-
20	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh	10.678.609.600,00	10.353.223.420,86	96,95	-
21	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh	610.000.000,00	375.474.000,00	61,55	9.852.606.152,43
22	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	5.394.332.625,00	1.394.885.000,00	25,86	-
23	Dinas Syariat Islam Aceh	10.372.300.402,00	8.326.493.642,40	80,28	-
	<b>Jumlah</b>	<b>829.739.517.926,00</b>	<b>688.549.327.107,25</b>	<b>82,98</b>	<b>566.495.908.040,91</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Kenaikan realisasi belanja hibah barang pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp11.865.443.014,00 merupakan belanja hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta yang pada tahun 2020 belanja hibah tersebut direalisasikan pada PPKA.

Dalam Realisasi Belanja Hibah barang sebesar Rp688.549.327.107,25 termasuk juga untuk penanganan Covid-19 pada Bidang Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp2.434.000.000,00 atau 75,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.220.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Aceh.

#### 5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

**Realisasi 2021**  
**Rp133.553.450.107,35**

**Realisasi 2020**  
**Rp377.503.593.012,20**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 mencapai Rp133.553.450.107,35 atau 34,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp384.303.403.889,00 dan TA 2020 mencapai Rp377.503.593.012,20. Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakat antara lain anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak yatim korban kebakaran rumah.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Uang Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp103.432.587.683,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk uang adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 22. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang**

No	SKPA	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Dinas Sosial Aceh	9.969.900.000,00	8.000.400.000,00	80,25	-
2	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	63.000.000,00	-	-	-
3	PPKA	-	-	-	17.901.460.000,00
4	Sekretariat Daerah Aceh	20.000.000.000,00	-	-	-
5	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	3.460.487.026,00	2.990.000.000,00	86,40	-
6	Sekretariat Baitul Mal Aceh	313.069.624.949,00	92.442.187.683,00	29,53	-
	<b>Jumlah</b>	<b>346.563.011.975,00</b>	<b>103.432.587.683,00</b>	<b>29,85</b>	<b>17.901.460.000,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



Pada tahun 2020 belanja bantuan sosial dalam bentuk uang direalisasikan pada PPKA, untuk tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan pada masing-masing SKPA terkait.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Dinas Sosial merupakan Bantuan Uang kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 di Kabupaten/Kota se-Aceh sebesar Rp8.000.400.000,00 sebanyak 26.668 Kepala Keluarga sesuai dengan SK Gubernur yang salurkan dalam 5 Tahap.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh sebesar Rp2.990.000.000,00 merupakan bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Sekretariat Baitul Mal sebesar Rp92.442.187.682,00 merupakan penyaluran Zakat TA 2021 pada beberapa Senif, terdiri dari :

1. Fakir sebesar Rp8.581.000.000,00
2. Miskin sebesar Rp54.029.854.846,00
3. Amil sebesar Rp709.630.350,00
4. Muallaf sebesar Rp3.589.910.200,00
5. Gharimin sebesar Rp1.888.000.000,00
6. Fisabilillah sebesar Rp1.073.965.000
7. Ibnu Sabul sebesar Rp22.569.827.287,00

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp30.120.862.424,35. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk barang adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 23. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang**

No	SKPA	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	-	-	358.884.133.012,20
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-	-	-	688.202.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh	28.010.628.900,00	22.817.455.456,35	81,46	-
4	Sekretariat Daerah Aceh	147.500.000,00	127.902.500,00	86,71	-
5	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	9.582.263.014,00	7.175.504.468,00	74,88	-
6	Dinas Sosial Aceh	-	-	-	29.798.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.740.391.914,00</b>	<b>30.120.862.424,35</b>	<b>79,81</b>	<b>359.602.133.012,20</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Dalam realisasi belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar Rp30.120.862.424,35 termasuk juga untuk penanganan Covid-19 pada Penyediaan Jaring Pengaman Sosial dan Penanganan Dampak Ekonomi TA 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp15.811.685.498,40

atau 61,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.869.973.937,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 24. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%
<b>A</b>	<b>Penyediaan Jaring Pengaman Sosial</b>			
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	147.500.000,00	-	-
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.752.573.937,00	-	-
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	9.969.900.000,00	8.065.500.000,00	80,90
	<b>Jumlah</b>	<b>15.869.973.937,00</b>	<b>8.065.500.000,00</b>	<b>50,82</b>
<b>B</b>	<b>Penanganan Dampak Ekonomi</b>			
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000.000,00	7.746.185.498,40	77,46
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>7.746.185.498,40</b>	<b>77,46</b>
	<b>Total</b>	<b>25.869.973.937,00</b>	<b>15.811.685.498,40</b>	<b>61,12</b>

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

#### 5.1.2.2. Belanja Modal

**Realisasi 2021**  
**Rp2.199.333.370.928,94**

**Realisasi 2020**  
**Rp1.755.472.079.286,47**

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Aceh yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Tanah	98.508.019.284,00	24.732.040.448,00	25,11	71.123.465.326,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	366.162.644.235,00	259.171.614.346,38	70,78	421.332.296.912,80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.053.964.400.810,00	734.555.768.109,80	69,69	567.190.383.202,63
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.595.091.662.803,00	1.055.849.598.983,31	66,19	572.579.779.264,78
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	201.732.730.092,00	125.024.349.041,45	61,98	123.246.154.580,26
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>3.315.459.457.224,00</b>	<b>2.199.333.370.928,94</b>	<b>66,34</b>	<b>1.755.472.079.286,47</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

#### 5.1.2.2.1. Belanja Tanah

**Realisasi 2021**  
**Rp24.732.040.448,00**

**Realisasi 2020**  
**Rp71.123.465.326,00**

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Belanja Tanah TA 2021 digunakan untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Modal Tanah Persil	16.985.000.000,00	9.356.549.120,00	55,09	42.132.916.073,00
2	Belanja Modal Lapangan	81.303.769.284,00	15.177.603.328,00	18,67	28.990.549.253,00
3	Belanja Modal Tanah BLUD	219.250.000,00	197.888.000,00	90,26	-
<b>Jumlah</b>		<b>98.508.019.284,00</b>	<b>24.732.040.448,00</b>	<b>25,11</b>	<b>71.123.465.326,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin**

**Realisasi 2021**  
**Rp259.171.614.346,38**

**Realisasi 2020**  
**Rp421.332.296.912,80**

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 mencapai Rp259.171.614.346,38 atau 70,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp366.162.644.235,00 dan TA 2020 mencapai Rp421.332.296.912,80, dengan rincian sebagaimana terdapat pada *Lampiran 2*.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk penanganan *Covid-19* TA 2021 direalisasikan sebesar Rp13.023.017.680,00 atau 90,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.375.672.058,00, dengan rincian berikut.

**Tabel 5. 27. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan Covid-19**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%
<b>A Penanganan Kesehatan</b>				
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.200.000.000,00	997.163.800,00	83,10
2	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.296.063.088,00	6.412.502.600,00	87,89
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.133.090.200,00	5.073.056.280,00	98,83
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	74.100.000,00	-	-
5	Belanja Modal Komputer Unit	572.000.000,00	540.295.000,00	94,46
<b>Jumlah</b>		<b>14.275.253.288,00</b>	<b>13.023.017.680,00</b>	<b>91,23</b>
<b>B Penyediaan Jaring Pengaman Sosial</b>				
1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	100.418.770,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>100.418.770,00</b>	-	-
<b>Total</b>		<b>14.375.672.058,00</b>	<b>13.023.017.680,00</b>	<b>90,59</b>

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

**5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan**

**Realisasi 2021**  
**Rp734.555.768.109,80**

**Realisasi 2020**  
**Rp567.190.383.202,63**

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 28. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.042.733.166.389,00	726.950.254.659,81	69,72	544.924.420.396,11
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.295.701.222,00	6.736.764.355,00	65,43	21.846.317.538,56
3	Belanja Modal Bangunan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	99.983.199,00	98.948.261,00	98,96	-
4	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	-	-	-	419.645.267,96
5	Belanja Modal Bangunan Tugu/Tanda Batas	835.550.000,00	769.800.833,99	92,13	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.053.964.400.810,00</b>	<b>734.555.768.109,80</b>	<b>69,69</b>	<b>567.190.383.202,63</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk penanganan Covid-19 TA 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp62.279.520.835,33 atau 60,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp103.699.637.296,00, dengan rincian berikut.

**Tabel 5. 29. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan Covid-19**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%
<b>A Penanganan Kesehatan</b>				
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.371.629.820,00	55.984.873.700,00	84,35
<b>Jumlah</b>		<b>66.371.629.820,00</b>	<b>55.984.873.700,00</b>	<b>84,35</b>
<b>B Penanganan Dampak Ekonomi</b>				
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.328.007.476,00	6.294.647.135,33	16,86
<b>Jumlah</b>		<b>37.328.007.476,00</b>	<b>6.294.647.135,33</b>	<b>16,86</b>
<b>Total</b>		<b>103.699.637.296,00</b>	<b>62.279.520.835,33</b>	<b>60,06</b>

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

#### 5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

**Realisasi 2021**  
**Rp1.055.849.598.983,31**

**Realisasi 2020**  
**Rp572.579.779.264,78**

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telepon, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 30. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Modal Jalan	1.203.429.345.800,00	820.244.813.460,31	68,16	256.467.965.463,83
2	Belanja Modal Jembatan	68.137.473.437,00	28.435.550.114,00	41,73	88.140.588.558,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	133.255.131.852,00	67.334.198.033,91	50,53	176.061.098.687,08
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	172.976.470.852,00	126.869.613.731,00	73,35	36.677.449.900,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	7.650.340.000,00	5.851.004.623,00	76,48	6.798.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	-	256.685.645,52
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	9.337.900.862,00	6.911.858.521,09	74,02	7.452.481.860,05
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	-	-	-	4.660.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	20.800.000,00	-	-	-
10	Belanja Modal Instalasi	202.800.000,00	202.560.500,00	99,88	-

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
	Pengolahan Bahan Bangunan				
11	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	697.961.704,40
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	81.400.000,00	-	-	6.814.089.445,90
	<b>Jumlah</b>	<b>1.595.091.662.803,00</b>	<b>1.055.849.598.983,31</b>	<b>66,19</b>	<b>572.579.779.264,78</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

#### 5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

**Realisasi 2021**  
**Rp125.024.349.041,45**

**Realisasi 2020**  
**Rp123.246.154.580,26**

Belanja Aset Tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan, dan tanaman, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 31. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	89.808.407.257,00	56.382.615.317,45	62,78	1.947.238.065,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	2.944.999.762,00	1.614.470.000,00	54,82	543.746.082,36
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
4	Belanja Modal Musik	90.000.000,00	-	-	-
5	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	14.500.000,00	14.450.000,00	99,66	1.360.420.000,00
6	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	186.300.000,00	16.374.820,00	8,79	362.780.000,00
7	Belanja Modal Tanda Penghargaan	43.900.000,00	3.900.000,00	8,88	68.671.000,00
8	Belanja Modal Hewan Piaraan	-	-	-	117.210.000,00
9	Belanja Modal Ternak	3.229.310.966,00	-	-	-
10	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	200.000.000,00	-	-	-
11	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	10.473.412.156,00	3.501.087.586,00	33,43	-
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	77.596.440.000,00	48.250.510.716,00	62,18	99.247.288.170,00
13	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	17.095.459.951,00	15.190.940.602,00	88,86	19.548.801.262,90
	<b>Jumlah</b>	<b>201.732.730.092,00</b>	<b>125.024.349.041,45</b>	<b>61,98</b>	<b>123.246.154.580,26</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk penanganan *Covid-19* pada Penanganan Dampak Ekonomi TA 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.796.965.366,00 untuk Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan.

#### 5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

**Realisasi 2021**  
**Rp412.071.890,00**

**Realisasi 2020**  
**Rp158.460.075.459,00**

Belanja Tidak Terduga TA 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp412.071.890,00 atau 0,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp147.985.369.115,00 dan TA 2020 sebesar Rp158.460.075.459,00, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 atas Penerimaan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pidie Jaya yang

disetor kembali ke Rekening Kas Negara akibat sisa kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari penggunaan Dana Hibah tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/741/2021 tanggal 5 Maret 2021 Tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp409.571.890,00.

- b. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Tahun Anggaran 2020 kepada SMP Negeri 7 Banda Aceh atas penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh/Gedung Utama Taman Seni dan Budaya yang akan digunakan untuk acara perpisahan sekolah dan tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid-19, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1742/2021 Tanggal 29 November 2021 sebesar Rp2.500.000,00.

**5.1.2.4. Belanja Transfer** **Realisasi 2021**  
**Rp2.834.519.544.755,00** **Realisasi 2020**  
**Rp3.342.298.602.245,00**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 32. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	811.201.817.610,00	715.264.216.632,00	88,17	802.937.015.414,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.149.255.328.123,00	2.119.255.328.123,00	98,60	2.539.361.586.831,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.960.457.145.733,00</b>	<b>2.834.519.544.755,00</b>	<b>95,75</b>	<b>3.342.298.602.245,00</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.1.2.4.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah** **Realisasi 2021**  
**Rp715.264.216.632,00** **Realisasi 2020**  
**Rp802.937.015.414,00**

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan transfer Pemerintah Aceh kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 33. Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Kabupaten Aceh Selatan	36.805.966.894,00	32.627.905.431,00	88,65	36.339.198.618,00
2	Kabupaten Aceh Tenggara	35.409.219.818,00	31.217.492.723,00	88,16	34.624.379.245,00
3	Kabupaten Aceh Timur	45.571.241.966,00	45.039.371.302,00	98,83	50.958.851.523,00
4	Kabupaten Tengah	36.635.950.882,00	31.936.283.593,00	87,17	35.802.166.982,00
5	Kabupaten Aceh Barat	37.136.402.621,00	33.753.889.331,00	90,89	37.337.990.754,00
6	Kabupaten Aceh Besar	47.155.680.114,00	42.185.653.254,00	89,46	47.994.421.047,00
7	Kabupaten Pidie	45.850.846.244,00	41.601.905.758,00	90,73	46.932.133.521,00
8	Kabupaten Aceh Utara	53.520.930.845,00	49.131.517.927,00	91,80	55.720.833.568,00
9	Kabupaten Simeulue	26.954.936.165,00	22.518.900.992,00	83,54	25.233.078.092,00
10	Kabupaten Aceh Singkil	28.926.466.870,00	24.775.457.338,00	85,65	27.566.803.419,00
11	Kabupaten Bireuen	46.339.850.327,00	41.187.061.956,00	88,88	47.395.819.220,00
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	30.616.909.675,00	25.052.639.920,00	81,83	27.993.917.223,00
13	Kabupaten Gayo Lues	29.711.123.566,00	27.726.948.603,00	93,32	30.792.926.101,00
14	Kabupaten Aceh Jaya	29.949.643.282,00	25.650.819.477,00	85,65	28.599.318.691,00

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
15	Kabupaten Nagan Raya	33.252.689.197,00	29.233.056.629,00	87,91	32.432.076.903,00
16	Kabupaten Aceh Tamiang	37.801.969.485,00	33.408.228.555,00	88,38	37.565.670.620,00
17	Kabupaten Bener Meriah	29.372.860.553,00	25.544.179.931,00	86,97	28.027.625.854,00
18	Kabupaten Pidie Jaya	29.231.883.125,00	24.922.205.099,00	85,26	27.981.071.725,00
19	Kota Banda Aceh	40.071.853.578,00	34.256.571.353,00	85,49	39.183.527.017,00
20	Kota Sabang	22.261.219.745,00	17.978.966.929,00	80,76	19.952.260.407,00
21	Kota Lhokseumawe	32.172.219.973,00	27.269.583.603,00	84,76	31.220.106.455,00
22	Kota Langsa	30.365.828.055,00	26.147.613.842,00	86,11	28.991.428.763,00
23	Kota Subulussalam	26.086.124.630,00	22.097.963.086,00	84,71	24.291.409.666,00
<b>Jumlah</b>		<b>811.201.817.610,00</b>	<b>715.264.216.632,00</b>	<b>88,17</b>	<b>802.937.015.414,00</b>

Sumber: Bidang Keuangan BPKA

#### 5.1.2.4.2. Bantuan Keuangan

**Realisasi 2021**  
**Rp2.119.255.328.123,00**

**Realisasi 2020**  
**Rp2.539.361.586.831,00**

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 34. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kePemerintah Daerah Lainnya**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%
1	Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie dalam rangka Sarana dan Prasarana Persiapan pelaksanaan Pora Ke-XIV di Kabupaten Pidie melalui Pergub Nomor 42 Tahun 2021 ttg Penetapan dan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	100,00
2	-	30.000.000.000,00	-	-
3	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembagian Dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021	2.029.255.328.123,00	2.029.255.328.123,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.149.255.328.123,00</b>	<b>2.119.255.328.123,00</b>	<b>98,60</b>

Sumber: Bidang Keuangan BPKA

Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00 tidak terealisasi dikarenakan tidak ada SK penetapan untuk pembayaran atas bantuan keuangan dimaksud yang merupakan kompensasi pengalihan Aset ke Kabupaten Aceh Utara.

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh TA 2021 sebesar Rp2.029.255.328.123,00 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

#### 5.1.3. Surplus/Defisit

**Realisasi 2021**  
**Rp264.806.146.004,44**

**Realisasi 2020**  
**Rp1.197.707.755.126,58**

Berdasarkan realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp13.948.388.273.436,12 dan realisasi Belanja dan Transfer TA 2021 sebesar Rp13.683.582.127.431,68, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Aceh mengalami Surplus sebesar Rp264.806.146.004,44 dan TA 2020 mengalami Defisit sebesar Rp1.197.707.755.126,58.

**5.1.4. Pembiayaan** **Realisasi 2021**  
**Rp3.668.874.466.385,95** **Realisasi 2020**  
**Rp2.771.909.599.655,68**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan Netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.668.874.466.385,95 atau 140,17% dari anggaran sebesar Rp2.617.359.855.556,00 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp3.969.606.675.281,21, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) sebesar Rp496.500.313,38, terdiri dari penerimaan kembali Dana PER pada BPR Mustaqim sebesar Rp 301.740.020,38 dan Pengembalian Dana Bergulir LUEP pada Dinas Pangan sebesar Rp 194.760.293,00. Sementara Pengeluaran Pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp59.791.509.208,64 dan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh sebesar Rp241.437.200.000,00, terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Aceh Syariah sebesar Rp 200.000.000.000,00, Penyertaan Modal pada BPR Mustaqim sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Aceh sebesar Rp21.437.200.000,00, sehingga Realisasi Pembiayaan Netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.771.909.599.655,68.

**5.1.5. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)** **Realisasi 2021**  
**Rp3.933.680.612.390,39** **Realisasi 2020**  
**Rp3.969.617.354.782,29**

SiLPA merupakan selisih lebih antara Surplus/Defisit dibandingkan dengan Pembiayaan Netto. SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp3.933.680.612.390,39 merupakan Kas di Kas Daerah sebesar Rp3.897.918.544.146,27, Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp144.615.039,60, Kas di BOS sebesar Rp151.089.484,12, Kas Lainnya sebesar Rp84.000.000,00, Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp35.382.363.720,40 dan SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp3.969.617.354.782,29.

Rincian SiLPA sebesar Rp3.933.680.612.390,39 berdasarkan sumber dana dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5. 35. SiLPA Berdasarkan Sumber Dana**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Dana Otonomi Khusus	2.553.334.089.993,63	2.561.628.971.555,23
2	Dana Alokasi Khusus	51.285.648.015,71	51.212.252.312,74
3	Dana Migas	236.407.094.827,00	309.234.087.709,91
4	Pendapatan Asli Aceh	787.036.495.380,43	712.525.417.115,99
5	Zakat dan Infak	270.235.890.453,22	257.057.900.699,37
6	Kas BLUD	35.381.393.720,40	77.958.725.389,05
<b>Jumlah</b>		<b>3.933.680.612.390,39</b>	<b>3.969.617.354.782,29</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

**5.2. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan SAL Akhir.



**5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2020**  
**Rp3.969.617.354.782,29 Rp2.846.141.906.063,38**

Saldo anggaran lebih awal Pemerintah Aceh sebesar Rp3.969.617.354.782,29 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 yang terdiri dari:

**Tabel 5. 36. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Kas di Kas Daerah	3.890.482.972.914,89	2.804.283.964.778,60
2	Kas di Bendahara Penerimaan	258.029.046,35	346.880.461,36
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	423.207.633,00	25.899.858.812,00
4	Kas di Bendahara BLUD	77.958.725.389,05	15.611.202.011,42
5	Kas di BOS	494.419.799,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.969.617.354.782,29</b>	<b>2.846.141.906.063,38</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2020**  
**Rp3.969.606.675.281,21 Rp2.846.141.906.063,38**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp3.969.606.675.281,21 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2021. Nilai SiLPA Tahun 2021 tidak seluruhnya digunakan sebagai pembiayaan tahun berjalan dikarenakan terdapat penyesuaian saldo awal Nihil.

**5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2020**  
**Rp3.933.680.612.390,39 Rp3.969.617.354.782,29**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.933.680.612.390,39 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5. 37. Perhitungan SiLPA**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pendapatan	13.948.388.273.436,12	14.439.920.557.021,10
2	Belanja	(10.849.062.582.676,68)	(9.899.914.199.649,57)
3	Transfer	(2.834.519.544.755,00)	(3.342.298.602.245,00)
4	Penerimaan Pembiayaan	3.970.103.175.594,59	2.848.097.021.013,53
5	Pengeluaran Pembiayaan	(301.228.709.208,64)	(76.187.421.357,82)
<b>Jumlah</b>		<b>3.933.680.612.390,39</b>	<b>3.969.617.354.782,24</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2020**  
**Rp10.679.501,08 Rp 0,00**

Koreksi Kesalahan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp10.679.501,08) merupakan rekening Jasa Giro pada Dinas Pendidikan Aceh yang diakui sebelumnya sebagai kas bendahara penerimaan.

**5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2020**  
**Rp3.933.680.612.390,39 Rp3.969.617.354.782,29**

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.933.680.612.390,39 mengalami penurunan sebesar Rp35.936.742.391,90 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.969.617.354.782,29

### 5.3. Penjelasan atas Akun dalam Neraca

#### 5.3.1. Aset Lancar Per 31 Desember 2021 Rp4.845.944.935.312,66 Per 31 Desember 2020 Rp4.703.174.170.476,40

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu Tahun Anggaran.

Aset Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 terdiri dari :

**Tabel 5. 38. Rincian Aset Lancar**

Uraian	Tahun2021	Tahun2020
Kas di Kas Daerah	3.897.918.544.146,27	3.890.482.972.914,89
Kas di Bendahara Penerimaan	144.615.039,60	258.029.046,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	423.207.633,00
Kas di Bendahara BLUD	35.382.363.720,40	77.958.725.389,05
Kas di BOS	151.089.484,12	494.419.799,00
Kas Lainnya	84.000.000,00	3.507.442.717,00
Piutang Pajak	33.344.415.021,00	29.259.361.601,00
Penyisihan Piutang Pajak	(1.164.333.522,70)	(539.560.617,15)
Piutang Retribusi	479.595.070,00	453.327.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(5.141.575,35)	(2.266.635,00)
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	231.278.306.591,00	88.951.032.532,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	(13.878.268.769,01)	(1.465.360.554,63)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	8.869.168.610,86	9.203.679.282,48
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(1.718.374.311,09)	(1.586.478.764,45)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31.223.992.221,00	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	57.884.934,53	83.165.150,58
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(21.983.262,24)	(29.339.528,79)
Belanja Dibayar Di Muka	6.151.108.897,29	3.440.814.702,92
Persediaan	617.647.953.016,98	602.280.998.808,15
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>4.845.944.935.312,66</b>	<b>4.703.174.170.476,40</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

#### 5.3.1.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021 Rp3.897.918.544.146,27 Per 31 Desember 2020 Rp3.890.482.972.914,89

Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Bank Umum yang digunakan atas nama rekening Kas Umum Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1329/2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh; sebagaimana telah diubah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1757/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1329/2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh. Rekonsiliasi dilakukan dengan melakukan koreksi saldo Buku dan Saldo Bank dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi Saldo Bank

- a. SP2D OC TA. 2021 sebesar Rp0,00.
- b. Retur SP2D 2021 sebesar (Rp38.256.453,00)
- c. Koreksi Retur (dibayar kembali Tanggal 10 Maret 2022 Dinas Sosial) sebesar (Rp16.200.000,00)

Sehingga diperoleh saldo Kas Daerah setelah rekonsiliasi sebesar Rp3.897.918.544.146,27 Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum dengan saldo Kas dan Bank adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 39. Rekonsiliasi Bank**

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total(Rp)
<b>a. Saldo Buku Kas Umum per 31 Desember 2020</b>			
1) Saldo Awal		3.890.482.972.914,81	
2) Penerimaan		12.368.694.088.346,80	
3) Pengeluaran		(12.361.258.517.115,40)	
<b>Saldo Buku Kas Umum</b>			<b><u>3.897.918.544.146,21</u></b>
<b>b. Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2020</b>			
Bank Aceh (Pemerintah Aceh)	01.02.610030.3	3.565.854.342.833,40	
Bank Aceh (PAD)	01.02.120003.4	1.474.932.885,85	
Bank Aceh (Zakat)	01.02.121285.2	117.474.671.352,71	
Bank Aceh (INFAK)		213.048.373.186,79	
Rekening Retur		120.680.340,52	
<b>Saldo Kas dan Bank</b>			<b><u>3.897.973.000.599,27</u></b>
<b>Koreksi Saldo Kas dan Bank :</b>			
Retur SP2D 2021		(38.256.453,00)	
Koreksi Retur (dibayar kembali tgl 10 mar 2022 Dinsos)		(16.200.000,00)	
<b>Jumlah koreksi kas dan bank</b>			<b><u>(54.456.453,00)</u></b>
<b>Saldo Kas dan Bank Setelah Koreksi</b>			<b><u>3.897.918.544.146,27</u></b>

**5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp144.615.039,60 Rp258.029.046,35**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa kas tunai maupun kas di bank yang merupakan pendapatan Pemerintah Aceh yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Aceh.

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp144.615.039,60 mengalami penurunan sebesar Rp113.414.006,75 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp258.029.046,35, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 40. Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	bertambah/berkurang
1	Dinas Pendidikan Aceh	8.700.000,00	10.679.501,08	(1.979.501,08)
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.161.000,00	3.873.000,00	(712.000,00)
3	Dinas Pangan Aceh	8.000.000,00	-	8.000.000,00
4	Sekretariat Baitul Mal Aceh	117.898.236,94	238.136.545,27	(120.238.308,33)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	bertambah/berkurang
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	5.340.000,00	(5.340.000,00)
6	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	6.855.802,66	-	6.855.802,66
<b>Jumlah</b>		<b>144.615.039,60</b>	<b>258.029.046,35</b>	<b>(113.414.006,75)</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke kasda sebesar Rp144.615.039,60 melalui rekening PAD (01.02.120003-4) pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 41. Kas Di Bendahara Penerimaan Yang Telah Disetor**

Kas di Bendahara Penerimaan	Jumlah	Keterangan
Dinas Pendidikan Aceh	8.700.000,00	Penerimaan dari penginapan Cabang Dinas Lamlagang Banda Aceh. Disetor Rp7.700.000,00 Tanggal 11 Januari 2022 dan Rp1.000.000 Tanggal 12 Januari 2022
Dinas Pangan Aceh	8.000.000,00	Dana LUEP tahun 2021 yang disetor tanggal 7 Januari 2022
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	3.161.000,00	Retribusi Tiket Museum Tsunami. Disetor Tahun 2021 yang disetor tanggal 4 Januari 2022
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	45.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Jempol Lhokseumawe
	300,00	Pajak Kendaraan Bermotor Aceh Selatan
	6.162,83	Jasa Giro Dinas Pangan telah disetor tanggal 07 Januari 2022
	242,15	Jasa Giro Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh telah disetor tanggal 21 April 2022
	2.586,59	Jasa Giro Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah disetor tanggal 21 April 2022
Sekretariat Baitul Mal Aceh	6.801.511,09	Jasa Giro atas Dana BOS pada Sekolah
	5.519.331,48	Setoran Zakat di Rekening Bank Aceh Syariah telah disetor tanggal 07 dan 27 Januari 2022
	20.198.929,00	Setoran Zakat di Rekening BSI telah disetor tanggal 06 Januari 2022
	17.971.882,00	Setoran Zakat di Rekening BSI telah disetor tanggal 06 Januari 2022
	6.645.200,00	Setoran Zakat di Rekening Bank Muamalat telah disetor tanggal 07 dan 27 Januari 2022
	47.566.475,46	Setoran Zakat di Rekening Bank Aceh Syariah telah disetor tanggal 07 Januari 2022
	19.996.419,00	Setoran Zakat di Rekening BSI telah disetor tanggal 05 Januari 2022
<b>Jumlah</b>	<b>144.615.039,60</b>	

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Selain Kas di Bendahara Penerimaan tersebut diatas masih terdapat Kas di Bendahara Penerimaan pada:

1. Dinas Pendidikan Aceh, merupakan potongan pajak atas belanja Dana BOS yang belum disetor ke rekening kas negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.547.677.484,01 terdiri dari 383 satdikmen/satdiksus yang masih berada di Bendahara BOS.
2. Sekretariat Baitul Mal Aceh, merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Baitul Mal atas dana bergulir yang telah di kembalikan oleh mustahik sebesar Rp1.672.250.257,70 dan

pendapatan infaq sukarela dari mustahik sebesar Rp208.404.367,00 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Daerah.

**5.3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp0,00 Rp423.207.633,00**

Kas di bendahara pengeluaran berupa kas tunai (*cash on hand*), kas di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Aceh, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Jasa Giro di SKPA yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran TA 2021 sebesar Rp0,00.

**5.3.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp35.382.363.720,40 Rp77.958.725.389,05**

Kas di BLUD Tahun 2021 sebesar Rp35.382.363.720,40 mengalami penurunan sebesar Rp42.576.361.668,65 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp77.958.725.389,05, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 42. Rincian Kas di BLUD**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	bertambah/berkurang
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	15.420.723.965,51	64.100.607.662,95	(48.679.883.697,44)
2	BLUD Rumah Sakit Jiwa	7.318.003.821,01	4.056.106.982,08	3.261.896.838,93
3	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	1.212.858.907,62	497.339.869,89	715.519.037,73
4	BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturahman (Dinas Syariat Islam)	429.330.606,63	412.938.278,72	16.392.327,91
5	BLUD UPTD Mekanisasi Alat Pertanian (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh)	8.294.762.909,63	7.611.392.685,41	683.370.224,22
6	BLUD Balai Ternak Non Ruminansia (Dinas Peternakan Aceh)	2.706.683.510,00	1.280.339.910,00	1.426.343.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.382.363.720,40</b>	<b>77.958.725.389,05</b>	<b>(42.576.361.668,65)</b>

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Kas BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin mengalami penurunan disebabkan karena adanya penggunaan Silpa di TA 2021 atas kekurangan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp37.284.096.361,73.

Rekonsiliasi Saldo Buku Kas BLUD dengan Saldo Kas dan Bank pada masing-masing BLUD adalah sebagai berikut.



**5.3.1.4.1. BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp15.420.723.965,51** **Rp64.100.607.662,95**

**Tabel 5. 43. Rekonsiliasi Bank Pada BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin**

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total (Rp)
<b>a. Saldo Buku Per 01 Januari 2021 - 31 Desember 2021</b>			
1) Saldo Awal		64.100.607.662,95	
2) Penerimaan		458.545.979.953,58	
3) Pengeluaran		(507.225.863.651,02)	
<b>Saldo Buku</b>			<b>15.420.723.965,51</b>
<b>b. Saldo Bank Per 31 Desember 2021</b>			
BSI (Exs. BRIS BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin)	1055001959	3.913.078.318,67	
BSI (Exs. BSM BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin)	7070557074	1.157.193.865,45	
Bank Aceh (Rekening Kas BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin)	010.01.02.630044-4	2.763.129.607,98	
BSI (BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin)	0991961997	6.661.259.665,10	
BSI Eksekutif (BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin)	2810196837	825.033.815,96	
Bank BTN Syariah (BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin)	7521001043	99.634.889,00	
<b>Saldo Kas dan Bank sebelum koreksi</b>			<b>15.419.330.162,16</b>
<b>Koreksi saldo kas dan bank :</b>			
<b>Tambah</b>			
Kas dan Bank di Bendahara Pengeluaran (BNI Syariah)	0991961205	1.393.803,35	
<b>Jumlah koreksi kas dan bank</b>			<b>1.393.803,35</b>
<b>Saldo Kas dan Bank setelah koreksi</b>			<b>15.420.723.965,51</b>
<b>Selisih antara Saldo buku dengan saldo kas dan bank</b>			<b>-</b>

Sumber: Laporan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin

**5.3.1.4.2. BLUD Rumah Sakit Jiwa** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp7.318.003.821,01** **Rp4.056.106.982,08**

**Tabel 5. 44. Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Jiwa**

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total (Rp)
<b>a. Saldo Buku Per 01 Januari 2021 - 31 Desember 2021</b>			
1) Saldo Awal		4.056.106.982,08	
2) Penerimaan		24.035.300.295,96	
3) Pengeluaran		(20.773.403.457,03)	
<b>Saldo Buku</b>			<b>7.318.003.821,01</b>
<b>b. Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2021</b>			
Bank Syariah Indonesia	7140008243	7.318.003.821,01	
Bank Syariah Indonesia	7140008284	-	
Tunai		-	
<b>Saldo Kas dan Bank Setelah Koreksi</b>			<b>7.318.003.821,01</b>
<b>Selisih antara saldo buku dengan saldo kas dan bank</b>			<b>-</b>

Sumber: Laporan BLUD Rumah Sakit Jiwa

**5.3.1.4.3. BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp1.212.858.907,62** **Rp497.339.869,89**

**Tabel 5. 45. Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak**

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total (Rp)
<b>a. Saldo Buku Per 01 Januari 2021 - 31 Desember 2021</b>			
1) Saldo Awal		497.339.869,89	
2) Penerimaan		19.904.100.243,73	
3) Pengeluaran		(19.188.581.206,00)	
<b>Surplus/Defisit BLUD</b>			<b>715.519.037,73</b>
<b>Saldo Buku</b>			<b>1.212.858.907,62</b>
<b>b. Saldo Bank Per 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020</b>			
Bank Aceh Syariah	013-01.88.000123-6	1.211.418.084,62	
Bank Aceh Syariah Pengeluaran	013-01.02.000003-3	-	
Kas Bendahara Penerimaan		1.440.823,00	
<b>Total Saldo</b>			<b>1.212.858.907,62</b>
<b>Selisih Saldo</b>			<b>-</b>

Sumber: Laporan BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak

**5.3.1.4.4. BLUD UPTD Pengelola Mesjid Raya Baiturahman (Dinas Syariat Islam)** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp429.330.606,63** **Rp412.938.278,72**

**Tabel 5. 46. Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Syariat Islam**

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total (Rp)
<b>a. Saldo Buku Kas Umum (BKU) per 31Des 2021</b>			
1) Saldo Awal		412.938.278,72	
2) Penerimaan		1.836.950.935,96	
3) Pengeluaran		(1.820.558.608,05)	
<b>Saldo Buku Kas Umum</b>			<b>429.330.606,63</b>
<b>b. Saldo Bank per 31 Des 2021</b>			
Rek Koran		421.929.096,63	
Rekening Koran BSI 7166948497		970.000,00	
Kas Tunai Di Bendahara Penerimaan		5.786.000,00	
Kas Tunai Di Bendahara Pengeluaran		654.510,00	
<b>Saldo Kas dan Bank sebelum koreksi</b>			<b>429.339.606,63</b>
<b>Koreksi saldo kas dan bank :</b>			
Kelebihan catat bank		(9.000,00)	
<b>Jumlah koreksi kas dan bank</b>			<b>(9.000,00)</b>
<b>Saldo Kas dan Bank setelah koreksi</b>			<b>429.330.606,63</b>
<b>Selisih antara Saldo buku dengan saldo kas dan bank</b>			<b>-</b>

Sumber: Laporan BLUD Dinas Syariat Islam Aceh

**5.3.1.4.5. BLUD UPTD Mekanisasi Alat Pertanian (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh)** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp8.294.762.909,63** **Rp7.611.392.685,41**

**Tabel 5. 47. Rekonsiliasi Bank pada BLUD Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh**

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total
<b>a. Saldo Buku Per 31 Desember 2021</b>			
1) Saldo Awal		7.611.392.685,41	
2) Realisasi Pendapatan BLUD		683.370.224,22	

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total
3) Realisasi Belanja BLUD		-	
<b>Saldo Buku</b>			<b>8.294.762.909,63</b>
<b>b. Saldo Bank Per 31 Desember 2021</b>			
Bank Aceh Syariah	514.01.88.000004-6	8.294.762.909,63	
Bank Aceh Syariah	514.01.02.000004-6	-	
<b>Saldo Bank</b>			<b>8.294.762.909,63</b>
<b>Koreksi Saldo Kas dan Bank</b>			
<b>Jumlah Koreksi</b>			<b>-</b>
<b>Saldo Kas Bank setelah Koreksi</b>			<b>8.294.762.909,63</b>
<b>Selisih Saldo BKU dan Bank</b>			<b>-</b>

Sumber: Laporan BLUD Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

**5.3.1.4.6. BLUD Balai Ternak Non Ruminansia (Dinas Peternakan Aceh) Per 31 Desember 2021 Rp2.706.683.510,00 Per 31 Desember 2020 Rp1.280.339.910,00**

**Tabel 5. 48. Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Peternakan Aceh**

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total (Rp)
<b>a. Saldo Buku Per 31 Desember 2021</b>			
1) Saldo Awal		1.280.339.910,00	
2) Penerimaan		13.501.176.000,00	
3) Pengeluaran		(12.074.832.400,00)	
<b>Saldo Buku</b>			<b>2.706.683.510,00</b>
<b>b. Saldo Bank Per 31 Desember 2021</b>			
Bank Aceh (BLUD UPTD BTNR)	010.01.02.000029-3	2.706.683.510,00	
<b>Saldo Bank</b>			<b>2.706.683.510,00</b>
<b>Koreksi Saldo Kas dan Bank</b>			
<b>Jumlah Koreksi</b>			<b>-</b>
<b>Saldo Kas Bank setelah Koreksi</b>			<b>2.706.683.510,00</b>
<b>Selisih Saldo BKU dan Bank</b>			<b>-</b>

Sumber: Laporan BLUD Dinas Peternakan Aceh

**5.3.1.5. Kas di BOS Per 31 Desember 2021 Rp151.089.484,12 Per 31 Desember 2020 Rp494.419.799,00**

Kas di BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.089.484,12 adalah sisa dana BOS Tahun 2021 merupakan kas pada Dinas Pendidikan Aceh yang terdiri dari:

**Tabel 5. 49. Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2021**

No	Nama Sekolah	Nilai	Keterangan
1	SMAN 1 PASIE RAJA	99.000,00	Reguler
2	SMAN 2 KEJURUAN MUDA	8.109.752,00	Reguler
3	SMA Negeri 1 Bandar Pusaka	1.048.150,00	Reguler
4	SMA Negeri 1 Tenggulun	4.622.406,00	Reguler
5	SMAN 1 TAMIANG HULU	19.881.686,00	Reguler
6	SMAN 2 TAMIANG HULU	1.422.800,00	Reguler
7	SMA NEGERI 2 BUKIT	45.000,00	Reguler
8	SMA NEGERI 2 PEUSANGAN	101.713.000,00	Reguler
9	SMAN 2 SABANG	2.314.800,00	Reguler
10	SMK NEGERI 1 MESJID RAYA	234.000,00	Reguler
11	SMK NEGERI PENERBANGAN ACEH	3.000,00	Reguler





No	Nama Sekolah	Nilai	Keterangan
12	SMKN 1 PASIE RAJA	3.906.000,00	Reguler
13	SMKN BEUNGGGA	20.000,00	Reguler
14	SMKN 1 TEUPAH TENGAH	583.100,00	Reguler
15	SMAN 1 Woyla Barat	310.052,02	Reguler
16	SMAN 1 ARONGAN LAMBALEK	91.844,10	Reguler
17	SMA NEGERI 2 KUTA MAKMUR	20.000,00	Reguler
18	SMK NEGERI 1 BAKTIYA BARAT	6.393.118,00	Reguler
19	SMK NEGERI 1 LAPANG	128.776,00	Reguler
20	SMA 2 Beutong	143.000,00	Reguler
<b>Jumlah</b>		<b>151.089.484,12</b>	

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Aceh

**5.3.1.6. Kas Lainnya** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp84.000.000,00** **Rp3.507.442.717,00**

Kas Lainnya adalah kas yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris.

Kas Lainnya tahun 2021 sebesar Rp84.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.423.442.717,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.507.442.717,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 50. Kas Lainnya**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	bertambah/berkurang
1	Dinas Pendidikan Aceh	84.000.000,00	310.839.653,00	(226.839.653,00)
2	Dinas Kesehatan Aceh	-	169.717.459,00	(169.717.459,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
4	Dinas Syariah Islam	-	26.885.605,00	(26.885.605,00)
<b>Jumlah</b>		<b>84.000.000,00</b>	<b>3.507.442.717,00</b>	<b>(3.423.442.717,00)</b>

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Aceh

Adapun rincian Kas Lainnya yang terdiri dari :

**Tabel 5. 51. Rincian Kas Lainnya**

Kas Lainnya	Jumlah	Keterangan
Dinas Pendidikan Aceh	84.000.000,00	Pengembalian Dana BOS akibat penutupan sekolah ke Kas Negara yang disetor pada tanggal 2 Februari 2022
<b>Jumlah</b>	<b>84.000.000,00</b>	

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Aceh

**5.3.1.7. Piutang Pajak** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp33.344.415.021,00** **Rp29.259.361.601,00**

Piutang Pajak adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran Pajak dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Piutang Pajak tahun 2021 sebesar Rp33.344.415.021,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.085.053.420,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.259.361.601,00. Piutang

Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp32.194.076.665,00 dan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp1.150.338.356,00, dengan rincian sebagai berikut.

**5.3.1.7.1. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**      **Per 31 Desember 2021**      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp32.194.076.665,00**      **Rp27.981.873.463,00**

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diakui pada saat telah diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar.

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp32.194.076.665,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 52. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

No	Wajib Pajak	Masa Pajak Terutang	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	PT. Pertamina (Persero)	Desember-2021	-	25.999.572.109,00
2	PT. AKR. Corporindo Tbk	Desember-2021	1.504.092,00	3.053.600,00
3	PT. Pertamina Patra Niaga	Desember-2021	29.682.900.238,00	131.310.184,00
4	PT. Sumatera petro niaga	Desember-2021	5.422.434,00	852.078,00
5	PT. Elnusa Petrofin	Desember-2021	5.853.338,00	52.364.998,00
6	PT. Prima Wiraguna Parama	Desember-2021	2.494.079.795,00	1.789.912.184,00
7	PT. Petro Andalan Nusantara	Desember-2021	4.316.768,00	4.808.310,00
<b>Jumlah</b>			<b>32.194.076.665,00</b>	<b>27.981.873.463,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

Kenaikan Piutang PBB-KB pada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp29.551.590,054 karena adanya penggabungan perusahaan PT.Pertamina MOR I dengan PT Pertamina Patra Niaga, sehingga penjualannya tergabung menjadi 2 kuantitas BBM.

Kenaikan Piutang PBB-KB pada PT Prima Wiraguna Parama sebesar Rp704.167.611,00 karena adanya peningkatan permintaan kuantitas BBM di akhir tahun.

**5.3.1.7.2. Piutang Pajak Air Permukaan**      **Per 31 Desember 2021**      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp1.150.338.356,00**      **Rp1.277.488.138,00**

Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp1.150.338.356,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 53. Piutang Pajak Air Permukaan**

No.	Wajib Pajak	Masa pajak terutang	Nilai
1	PDAM TirtaDaroy	Desember 2021	12.247.120,00
2	PDAM TirtaMontala	Desember 2021	5.137.660,00
3	PT. Solusi Bangun Andalas	Desember 2021	2.209.140,00
4	PDAM Tirta Mon Kreueng Baro	Desember 2021	1.143.950,00
5	PDAM Krueng Peusangan	Desember 2021	4.340.420,00
6	PT. Perta Arun Gas	Desember 2021	15.479.400,00
7	PT. Pertamina EP Hulu Migas	Januari 19 - Desember 19	370.010,00
8	PDAM Tirta Mon Pasee	2007-Juni 2014	551.715.625,00
9	PT. PIM	Desember 2021	37.787.664,00
10	PTPN-I Kb. Cot Girek	Desember 2021	719.900,00
11	PDAM Tirta Peusada	2012-Agustus 2017	93.563.030,00
12	PDAM Tirta Peusada	Desember 2021	2.332.870,00



No.	Wajib Pajak	Masa pajak terutang	Nilai
13	Koperasi Prima Jasa	Desember 2021	274.080,00
14	PT. Perkasa Subur Sakti	Desember 2021	1.027.140,00
15	PT. Anugerah Fajar Rezeki	Desember 2021	165.780,00
16	PT Teupin Lada	Desember 2021	625.200,00
17	PDAM Tirta Keumuneung	2012-Agustus 2017	121.841.200,00
18	PDAM Tirta Keumuneung	Agustus 2018-November 2018	10.019.020,00
19	PDAM Tirta Keumuneung	Desember 2021	2.695.210,00
20	Bahari Dwi Kencana Lestari	Mei 2016-Februari 2017	9.090.360,00
21	PT PP Pati Sari	Desember 2021	1.890.000,00
22	Socfin Indonesia Sei Liput	Desember 2021	497.520,00
23	PT. Sp. Kiri Plant Indonesia	Desember 2021	237.720,00
24	PT. Parasawita	Desember 2021	912.720,00
25	PT. Tri Agro Palma Tamiang	Desember 2021	443.160,00
26	PDAM Tirta	Desember 2021	7.851.770,00
27	PT. Sisirau	Desember 2021	728.400,00
28	PT Bumi Sama Ganda	Desember 2021	676.560,00
29	PLTA Peusangan I & II	Desember 2021	177.780,00
30	PDAM Tirta Tawar	Desember 2021	1.103.690,00
31	Hotel Grand Renggali	Juni 2021-Desember 2021	557.820,00
32	Bie Homestay	Desember 2021	20.160,00
33	PDAM Tirta Meulaboh	2009-2012	176.814.075,00
34	PDAM Tirta Meulaboh	Desember 2021	436.120,00
35	PT. Karya Tanah Subur	Desember 2021	1.122.060,00
36	PT. Agro Sinergi Nusantara	Desember 2021	1.368.960,00
37	Socfin Seumanyam	Agustus 2018-November 2018	598.400,00
38	PT. Energi Alam Raya Semesta	Mei 2016-Desember 2018	2.646.000,00
39	PT Enseml Lestari	Desember 2021	414.000,00
40	PDAM Tirta Naga	Desember 2021	19.830,00
41	PDAM Tirta Krueng	Januari 18 -Desember 18	8.076.680,00
42	PDAM Tirta Krueng	Januari 19 -Desember 19	9.363.230,00
43	PDAM Tirta Krueng	Januari 2020- September 2020	7.832.090,00
44	PDAM Tirta Krueng	Desember 2021	428.660,00
45	PDAM Tirta Aneuk Laot	Desember 2021	1.420.480,00
46	PDAM Tirta Mon Mata	Januari 18 -Desember 18	12.957.880,00
47	PDAM Tirta Mon Mata	Januari 19 -Desember 19	10.329.130,00
48	PDAM Tirta Mon Mata	Desember 2021	1.439.000,00
49	PT. Global Sawit Semesta	Desember 2021	517.800,00
50	PT. Sawit Samudera Nabati	Nov-Des 2021	2.268.540,00
51	PT. Bangun Sempurna Lestari	Desember 2021	595.080,00
52	PT. Budidaya Agritamas	Desember 2021	988.980,00
53	PT. Perkebunan Lembah Bhakti I	April 2018 - September 2018	3.358.452,00
54	PT Perkebunan Lembah Bhakti I (PMKS)	Desember 2021	1.452.240,00
55	PT Perkebunan Lembah Bhakti II (PMKS)	Desember 2021	912.000,00
56	PT Nafasindo	Desember 2021	148.740,00
57	PT. Runding Putra Persada	Desember 2021	292.920,00
58	PT Socfindo (PMKS)	Desember 2021	738.780,00
59	PT Delima Makmur (PMKS)	Desember 2021	1.056.120,00
60	PDAM Tirta Niaga	Desember 2021	994.710,00
61	PT Singkil Sejahtera Makmur (PMKS)	Desember 2021	630.270,00
62	PDAM Tirta Sejuk	Desember 2021	261.870,00
63	PDAM Tirta	Desember 2019- September 2020	12.728.500,00
64	PDAM Tirta Fulawan	Desember 2021	244.680,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.150.338.356,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

**5.3.1.8. Penyisihan Piutang Pajak** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**(Rp1.164.333.522,70)** **(Rp539.560.617,15)**

Penyisihan piutang Pajak tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.164.333.522,70) terdiri dari:

**5.3.1.8.1. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**(Rp160.970.383,33)** **(Rp139.909.367,32)**

Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar (Rp160.970.383,33),terdiri dari:

**Tabel 5. 54. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

No.	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan
					Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	PT. Pertamina (Persero)	-	Lancar	0,5%	-
2	PT. AKR. Corporindo Tbk	1.504.092,00	Lancar	0,5%	(7.520,46)
3	PT. Pertamina Patra Niaga	29.682.900.238,00	Lancar	0,5%	(148.414.501,19)
4	PT. Sumatera petro niaga	5.422.434,00	Lancar	0,5%	(27.112,17)
5	PT. Elnusa Petrofin	5.853.338,00	Lancar	0,5%	(29.266,69)
6	PT. Prima Wiraguna Parama	2.494.079.795,00	Lancar	0,5%	(12.470.398,98)
7	PT. Petro Andalan Nusantara	4.316.768,00	Lancar	0,5%	(21.583,84)
<b>Jumlah</b>		<b>32.194.076.665,00</b>			<b>(160.970.383,33)</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

**5.3.1.8.2. Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**(Rp1.003.363.139,37)** **(Rp399.651.249,83)**

Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar (Rp1.003.363.139,37) rincian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Sehingga nilai Piutang Pajak Netto sebesar Rp32.687.339.198,68 yang diperoleh dari nilai Piutang sebesar Rp33.240.505.127,00 dikurangi dengan nilai penyisihan sebesar (Rp553.165.928,33).

**5.3.1.9. Piutang Retribusi** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp479.595.070,00** **Rp453.327.000,00**

Piutang retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi.

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp479.595.070,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh berupa Retribusi Sampah Kota Banda Aceh sebesar Rp450.715.070,00 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupa Penyewaan Kios Nelayan Idi di Aceh Timur dan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja sebesar Rp28.880.000,00.

**5.3.1.10. Penyisihan Piutang Retribusi** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**(Rp5.141.575,35)** **(Rp2.266.635,00)**

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp5.141.575,35) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 55. Penyisihan Piutang Retribusi**

Jenis Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh</b>				
Retribusi Sampah Kota Banda Aceh	450.715.070,00	Lancar	0,5%	(2.253.575,35)
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh</b>				
Penyewaan Kios Nelayan Idi di Aceh Timur dan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	28.880.000,00	Kurang Lancar	10%	(2.888.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>479.595.070,00</b>			<b>(5.141.575,35)</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Sehingga nilai Piutang Retribusi Netto sebesar Rp474.453.494,65 yang diperoleh dari nilai Piutang Retribusi sebesar Rp479.595.070,00 dikurangi dengan nilai penyisihan sebesar (Rp5.141.575,35).

**5.3.1.11. Piutang Lain-lain PAA yang Sah** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp231.278.306.591,00** **Rp88.428.762.532,00**

Piutang lain-lain PAA Yang Sah timbul akibat adanya pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Saldo piutang lain-lain PAA yang sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp231.278.306.591,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 56. Piutang Lain-lain PAA yang Sah**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Piutang Hasil Sewa BMD</b>			
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	168.721.370,00	150.000.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	3.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>168.721.370,00</b>	<b>153.000.000,00</b>
<b>Piutang Pendapatan BLUD</b>			
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	224.941.599.594,00	82.936.520.375,00
2	Rumah Sakit Jiwa	3.139.076.744,00	3.564.429.425,00
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	3.028.908.883,00	1.774.812.732,00
	<b>Jumlah</b>	<b>231.109.585.221,00</b>	<b>88.275.762.532,00</b>
	<b>Total</b>	<b>231.278.306.591,00</b>	<b>88.428.762.532,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan SKPA

Piutang lain-Lain PAA Yang Sah terdiri dari sewa parkir kerjasama sebesar Rp168.721.370,00 dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp231.278.306.591,00 terdiri dari:

1. Piutang Hasil Sewa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin merupakan kerjasama sewa parkir dengan CV. Metro Karya sebesar Rp18.721.370,00 atas piutang bulan Desember 2021 dan telah dibayar tanggal 20 Januari 2022, sedangkan piutang sebesar Rp150.000.000,00 kerjasama dengan CV. Rahmat Citra Karja pada Tahun 2017 dan sampai dengan Tahun 2021 belum melunasi piutang tersebut.

2. Piutang Pendapatan BLUD terdiri dari:

- a. Piutang pada Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin sebesar Rp224.941.599.594,00 berasal antara lain dari BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, Fakultas Kedokteran USK dan perusahaan-perusahaan.
- b. Piutang pada Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp3.139.076.744 berasal dari Piutang Pasien Umum, IPWL bulan September s.d Desember 2021 dan BPJS Kesehatan.
- c. Piutang pada Rumah Ibu dan Anak sebesar Rp3.028.908.883,00 berasal dari klaim BPJS bulan September dan Desember 2021, Klaim Jasa Raharja bulan Desember 2021, Klaim Obat Kemo dan Kronis dan Klaim Ambulance bulan Desember 2021.

**5.3.1.12. Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**(Rp13.878.268.769,01) (Rp1.329.166.104,63)**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp13.878.268.769,01) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 57. Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Piutang Hasil Sewa BMD</b>			
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	(15.093.606,85)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(15.093.606,85)</b>	-
<b>Piutang Pendapatan BLUD</b>			
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	(13.390.140.972,97)	(897.819.953,13)
2	Rumah Sakit Jiwa	(457.889.644,77)	(422.472.087,84)
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	(15.144.544,42)	(8.874.063,66)
	<b>Jumlah</b>	<b>(13.863.175.162,16)</b>	<b>(1.329.166.104,63)</b>
	<b>Total</b>	<b>(13.878.268.769,01)</b>	<b>(1.329.166.104,63)</b>

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

**5.3.1.13. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp8.869.168.610,86 Rp9.725.949.282,48**

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.869.168.610,86 terdiri dari:

**Tabel 5. 58. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**

Jenis Piutang	Jumlah Piutang Tahun 2021 (Rp)
<b>Badan Pengelolaan Keuangan Aceh</b>	
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2015	2.501.000.000,00
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2016	2.501.000.000,00
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	2.501.000.000,00
Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	690.898.610,86
Masa denda 2015	225.090.000,00
Masa denda 2016	225.090.000,00
Masa denda 2017	225.090.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.869.168.610,86</b>

**5.3.1.14. Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2021 (Rp1.718.374.311,09) Per 31 Desember 2020 (Rp1.722.673.214,45)**

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.718.374.311,09) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 59. Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah**

Jenis Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>Badan Pengelolaan Keuangan Aceh</b>				
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2015	2.501.000.000,00	Diragukan	50%	(1.250.500.000,00)
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2016	2.501.000.000,00	Kurang Lancar	10%	(250.100.000,00)
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	2.501.000.000,00	Lancar	0,5%	(12.505.000,00)
Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	690.898.610,86	Lancar	10%	(69.089.861,09)
Masa denda 2015	225.090.000,00	Diragukan	50%	(112.545.000,00)
Masa denda 2016	225.090.000,00	Kurang Lancar	10%	(22.509.000,00)
Masa denda 2017	225.090.000,00	Lancar	0,5%	(1.125.450,00)
<b>Jumlah</b>	<b>8.869.168.610,86</b>			<b>(1.718.374.311,09)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Sehingga nilai Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto sebesar Rp7.150.794.299,77 yang diperoleh dari nilai Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp8.869.168.610,86 dikurangi dengan Penyisihan Piutang sebesar (Rp1.718.374.311,09).

**5.3.1.15. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2021 Rp31.223.992.221,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp31.223.992.221,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.223.992.221,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 60. Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	18.205.297.267,00	-
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	7.027.567.761,00	-
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	170.561.697,00	-
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	18.318.125,00	-
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	138.106.480,00	-
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	5.015.034.109,00	-
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	649.106.782,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>31.223.992.221,00</b>	<b>-</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.3.1.16. Bagian Lancar Tagihan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Penjualan Angsuran Rp57.884.934,53 Rp83.165.150,58**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp57.884.934,53 merupakan bagian lancar dari sisa tagihan ganti rugi rumah dan tanah milik Pemerintah Aceh yang timbul akibat penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 61. Tagihan Penjualan Barang Milik Daerah**

No	Nama	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Fahri	1.375.351,45	1.853.556,50
2	Suriani	-	17.320.000,00
3	T.BahromUmri	20.206.526,93	20.206.526,93
4	Syamsuddin Ibrahim	-	3.638.700,00
5	Umami Kalsum	15.696.015,15	15.696.015,15
6	Suwarno Amin	-	4.561.062,00
7	SirtuHadi	20.607.041,00	19.889.290,00
<b>Jumlah</b>		<b>57.884.934,53</b>	<b>83.165.150,58</b>

**5.3.1.17. Penyisihan Bagian Lancar Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Tagihan Penjualan Angsuran (Rp21.983.262,25) (Rp29.339.528,79)**

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar (Rp21.983.262,25) terdiri dari:

**Tabel 5. 62. Penyisihan Piutang Penjualan Barang Milik Daerah**

No	Nama	Nilai (Rp)	Kualitas piutang (%)	Jumlah (Rp)
1	Fahri	1.375.351,45	0,5%	(6.876,75)
2	T.Bahrom Umri	20.206.526,93	50%	(10.103.263,47)
3	Umami Kalsum	15.696.015,15	10%	(1.569.601,52)
4	SirtuHadi	20.607.041,00	50%	(10.303.520,50)
<b>Jumlah</b>		<b>57.884.934,53</b>		<b>(21.983.262,24)</b>

Sumber : Laporan Keuangan BPKA

Sehingga nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto sebesar Rp35.901.672,29 yang diperoleh dari nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp57.884.934,53 dikurangi dengan nilai Penyisihan Bagian Lancar sebesar (Rp21.983.262,24).

**5.3.1.18. Belanja Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp6.151.108.897,29 Rp3.440.814.702,92**

Beban Dibayar Dimuka merupakan pembayaran beberapa SKPA atas Pajak Kendaraan dan sewa gedung melewati Tahun 2021 sebesar Rp6.151.108.897,29 dengan rincian sebagai berikut.

**5.3.1.18.1. Sewa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp5.673.554.878,16 Rp2.688.703.606,41**

Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.673.554.878,16 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5. 63. Sewa Dibayar Di Muka

Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
<b>Sewa Dibayar Dimuka</b>				
<b>I. Dinas Pendidikan Aceh</b>				
Sewa Menyewa Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Nagan Raya	87.a/Z.1/2021	98.000.000,00	27.654.794,52	70.345.205,48
Sewa Menyewa Bangunan Toko untuk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Raya	10/A.Jaya/2021	119.284.550,00	34.968.347,53	84.316.202,47
Sewa Menyewa Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Timur	001/SPS.GDG/L.1/ATIM/2021	100.000.000,00	50.410.958,90	49.589.041,10
Sewa Menyewa Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tamiang	011/N/329/2021	162.000.000,00	108.739.726,03	53.260.273,97
Sewa Menyewa Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Sabang	09/SP/X.I/2021	99.000.000,00	4.204.109,59	94.795.890,41
<b>Jumlah I</b>		<b>578.284.550,00</b>	<b>225.977.936,57</b>	<b>352.306.613,43</b>
<b>II. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh</b>				
Sewa Gudang tempat Penyimpanan Buku Perpustakaan	602.1/027/2021	150.000.000,00	62.054.794,52	87.945.205,48
Sewa Gedung Layanan Perpustakaan	602.1/024/2021	385.000.000,00	197.246.575,34	187.753.424,66
<b>Jumlah II</b>		<b>535.000.000,00</b>	<b>259.301.369,86</b>	<b>275.698.630,14</b>
<b>III. Dinas Pangan Aceh</b>				
Sewa Bangunan Pasar Mitra Tani/Toko Tani Center	050/850/04/2021	100.000.000,00	75.342.465,75	24.657.534,25
<b>Jumlah III</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>75.342.465,75</b>	<b>24.657.534,25</b>
<b>IV. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh</b>				
Sewa Kantor Samsat Pidie Jaya	602.1/76/SPK/2021	83.650.000,00	34.949.657,53	48.700.342,47
Sewa Kantor Samsat Subulussalam	602.1/330/SPK/2020	60.000.000,00	41.835.616,44	18.164.383,56
Sewa Kantor Samsat Aceh Jaya	602.1/107/SPK/2021	28.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
<b>Jumlah IV</b>		<b>171.650.000,00</b>	<b>90.785.273,97</b>	<b>80.864.726,03</b>
<b>V. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh</b>				
Jasa Penyediaan Bandwidth Pemerintah Aceh	13.SPK.TIK.X.2021	2.310.000.000,00	240.493.150,68	2.069.506.849,32
Penyediaan Metro-E untuk Pemerintah Aceh di Jakarta	14.SPK.TIK.XI.2021	197.340.000,00	18.382.356,16	178.957.643,84
Backup Link P to P DC ke DRC				
Jasa Penyediaan Metro-E Kebutuhan E-Government Pemerintah Aceh	02.SPK.TIK.V.2021	1.295.988.000,00	731.434.323,29	564.553.676,71
Pembayaran Jasa Penyediaan VPN-IP Integrasi Layanan Kesehatan dan Kependudukan	07.SPK.TIK.V.2021	875.640.000,00	443.817.534,25	431.822.465,75
Penyediaan Collocation Server Pemerintah Aceh	03.SPK.TIK.V.2021	199.012.000,00	182.766.122,45	16.245.877,55
Penyediaan Wifi Akses Publik	15.SPK.TIK.XI.2021	1.099.999.980,00	93.424.655,84	1.006.575.324,16
Penyediaan Bandwidth Untuk Backup IP Transit Pemerintah Aceh	22.SPK.TIK.XI.2021	199.584.000,00	17.497.775,34	182.086.224,66
Layanan VSAT NOMADIC	23.SPK.TIK.XI.2021	198.000.000,00	12.476.712,33	185.523.287,67
<b>Jumlah V</b>		<b>6.375.563.980,00</b>	<b>1.740.292.630,34</b>	<b>4.635.271.349,66</b>
<b>VI. Badan Penghubung Pemerintah Aceh</b>				
Sewa Akses Internet	027/065/SPK/PL/	84.000.000,00	5.063.013,70	78.936.986,30

Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
Dedicated Fiber Optik Indramayu	2021			
Sewa Akses Internet Dedicated Fiber Optik Mess Aceh	027/064/SPK/PL/2021	169.200.000,00	14.370.410,96	154.829.589,04
<b>Jumlah VI</b>		<b>253.200.000,00</b>	<b>19.433.424,66</b>	<b>233.766.575,34</b>
<b>VII. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh</b>				
Sewa Lisensi Software Vidio Editing dan Multi Media	020/BAP/3001/D PMG/XI/2021	10.053.000,00	881.358,90	9.171.641,10
<b>Jumlah VII</b>		<b>10.053.000,00</b>	<b>881.358,90</b>	<b>9.171.641,10</b>
<b>VIII. Sekretariat Daerah</b>				
Sewa Rumah Kepala Perwakilan Aceh di Medan	-	50.000.000,00	25.205.479,45	24.794.520,55
<b>Jumlah VIII</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>25.205.479,45</b>	<b>24.794.520,55</b>
<b>IX. Dinas Kesehatan Aceh</b>				
Sewa Menyewa Toko Penyimpanan Kursi Roda	-	49.500.000,00	12.476.712,33	37.023.287,67
<b>Jumlah VIII</b>		<b>49.500.000,00</b>	<b>12.476.712,33</b>	<b>37.023.287,67</b>
<b>Total</b>		<b>8.123.251.530,00</b>	<b>2.449.696.651,83</b>	<b>5.673.554.878,17</b>

### 5.3.1.18.2. Asuransi Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2021  
Rp477.554.019,13

Per 31 Desember 2020  
Rp752.111.096,51

Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp477.554.019,13 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 64. Asuransi Dibayar Di Muka

Uraian	Nomor Polis Periode Asuransi/Presentasi	Nilai Presentasi	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
<b>Asuransi Dibayar Dimuka</b>				
<b>I. Sekretariat DPRA</b>				
Asuransi Mobil Pimpinan DPRA	027/262/XII/KPA1/2021	86.406.200,00	2.840.751,78	83.565.448,22
<b>Jumlah I</b>		<b>86.406.200,00</b>	<b>2.840.751,78</b>	<b>83.565.448,22</b>
<b>II. Sekretariat Daerah</b>				
Belanja Premi Mobil Dinas Gub/Wagub	2981/SPK/2021	199.952.042,00	86.554.582,56	113.397.459,44
Belanja Premi Mobil Dinas VIP SETDA	2791/SPK/2021	199.982.000,00	96.977.572,60	103.004.427,40
Belanja Premi Mobil Dinas Perwakilan Medan (Toyota Fortuner BK 1664 K dan Pajero Sport BL 204 JB)	024/089/VII/SPK/2021	13.402.309,00	6.352.327,28	7.049.981,72
Belanja Premi Mobil Dinas Perwakilan Medan (Pajero Sport)	024/015/III/SPK/2021	11.694.270,00	9.547.650,58	2.146.619,42
<b>Jumlah II</b>		<b>425.030.621,00</b>	<b>199.432.133,02</b>	<b>225.598.487,98</b>
<b>III. Badan Penghubung Pemerintah Aceh</b>				
Asuransi Mobil Dinas	588/018/SPK/PL/2021	195.428.100,00	125.823.571,23	69.604.528,77
<b>Jumlah III</b>		<b>195.428.100,00</b>	<b>125.823.571,23</b>	<b>69.604.528,77</b>
<b>IV. Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin</b>				
Asuransi Mobil Ambulance	445/07521	110.265.221,00	11.479.666,84	98.785.554,16
<b>Jumlah IV</b>		<b>110.265.221,00</b>	<b>11.479.666,84</b>	<b>98.785.554,16</b>
<b>Jumlah I + II + III + IV</b>		<b>817.130.142,00</b>	<b>339.576.122,87</b>	<b>477.554.019,13</b>

Sumber : Laporan Keuangan SKPA

Asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp477.554.019,13 dengan jumlah kendaraan yang di asuransikan sebanyak 104 (seratus empat) unit kendaraan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Sekretariat DPRA sebanyak 4 (empat) unit kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) kendaraan Ketua dan 3 (tiga) kendaraan Wakil Ketua.
2. Sekretariat Daerah sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit kendaraan roda empat.
3. Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta sebanyak 18 (delapan belas) unit kendaraan roda empat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan roda empat.

**5.3.1.19. Persediaan** **Per 31 Desember 2021**  
**Rp617.647.953.016,98** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp602.280.998.808,15**

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional serta barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari persediaan bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan barang untuk dijual/diserahkan, serta persediaan natura dan pakan. Persediaan Pemerintah Aceh sebesar Rp617.647.953.016,98 merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2021 yaitu barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 65. Persediaan Barang Pakai Habis**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.174.091,67	32.994.021,67
2	Bahan Kimia	2.411.200.990,00	2.776.113.463,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	269.256.898,90	508.119.194,90
4	Bahan/Bibit Tanaman	175.196.450,00	746.368.774,00
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	564.199.937,00	473.849.026,00
6	Isi Tabung Gas	7.764.240,00	8.489.800,00
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.628.973.326,00	5.655.785.506,00
8	Bahan Lainnya	37.076.342.261,27	31.226.585.306,60
9	Suku Cadang Alat Kedokteran	13.280.000,00	23.400.000,00
10	Suku Cadang Alat Laboratorium	408.563.610,00	734.970.523,00
11	Suku Cadang Lainnya	11.298.086.082,95	13.853.313.855,95
12	Alat Tulis Kantor	2.342.076.646,70	3.044.356.494,04
13	Kertas dan Cover	11.889.280,00	-
14	Bahan Cetak	1.921.318.137,13	2.889.534.573,00
15	Benda Pos	7.300.000,00	10.815.000,00
16	Bahan Komputer	48.259.350,00	-
17	Perabot Kantor	124.008.002,56	120.786.779,56
18	Alat Listrik	528.724.649,36	517.353.577,21
19	Perlengkapan Dinas	347.349.595,00	431.219.822,00
20	Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.858.415.480,00	4.107.080.082,00
21	Suvenir/Cendera Mata	-	77.803.890,00
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.455.747.363,43	3.826.453.230,35
23	Obat	64.145.501.592,32	44.452.179.550,42
24	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	474.851.880.330,30	470.745.141.133,06
25	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	9.523.333.298,39	10.010.527.781,39
26	Pakan	603.111.404,00	6.007.757.424,00
<b>Jumlah</b>		<b>617.647.953.016,98</b>	<b>602.280.998.808,15</b>

Sumber : sipkd.acehprov.go.id

Rincian persediaan barang habis pakai pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada **Lampiran 6 dan 6a**

Saldo persediaan di atas tidak termasuk bahan habis pakai yang telah kadaluarsa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin.

Obat yang kadaluarsa sebesar Rp3.915.747.279,35, terdapat pada Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp3.830.058.833,00 Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp19.424.538,00, Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp19.148.251,35 dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin sebesar Rp47.115.657,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 6b**.

Bahan medis habis pakai sebesar Rp36.848.499,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin sebesar Rp36.708.664,00 dan Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp139.835,00 Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 6c**

### 5.3.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang yaitu investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari:

<b>5.3.2.1. Investasi Non Permanen</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>
	<b>Rp89.609.733.099,52</b>	<b>Rp90.081.023.084,90</b>

Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.609.733.099,52 merupakan Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Bagian dari investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Aceh adalah Dana Bergulir yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

#### 5.3.2.1.1. Investasi Dana Bergulir

Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut diatas, dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat di realisasikan diperoleh dari saldo dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Perhitungan nilai bersih dana bergulir sebagai berikut.

**Tabel 5. 66. Dana Bergulir**

No	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengeurangan	Saldo Akhir
1	Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	42.251.461.000,00	-	-	42.251.461.000,00
2	Investasi Dana Bergulir PER	36.699.185.016,90	-	301.740.020,38	36.397.444.996,52
3	Investasi Dana Bergulir PINBUK	554.000.000,00	-	-	554.000.000,00
4	Investasi Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)	10.576.377.068,00	-	169.549.965,00	10.406.827.103,00
	<b>Jumlah</b>	<b>90.081.023.084,90</b>	<b>-</b>	<b>471.289.985,38</b>	<b>89.609.733.099,52</b>



- a. Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan bantuan untuk koperasi/usaha kecil menengah dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat yang disalurkan pada tahun 2007 s.d 2009. Dana bergulir tersebut disisihkan sebesar 100% dengan kualitas macet disebabkan karena beberapa hal diantaranya penerima dana tidak diketahui keberadaannya, penerima dana mengalami kesulitan bangkrut, meninggal dunia dan beberapa mengalami musibah (*Force Majeure*).
- b. Dana Bergulir PER merupakan program Pemerintah Aceh yang dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2003 yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan pemberdayaan ekonomi rakyat berupa penyaluran kredit untuk Usaha Kecil dan Rumah Tangga serta Koperasi melalui beberapa Bank Umum, Perusahaan Daerah serta Koperasi. Pengelolaan dana PER pada lembaga-lembaga ekonomi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 518/368/2001 tentang Penunjukan Bank dan Kopkaga untuk Penyaluran Dana Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Perbankan dan Kopkaga. Tahun 2021 terjadi pengurangan sebesar Rp301.740.020,38 dari setoran BPR Bank Mustaqim Suka Makmur tanggal 05 November 2021 sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 518/17249 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Pengembalian Dana PER. terdiri dari:

Tabel 5. 67. Rincian Setoran PER

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Keterangan
1	Setoran Nasabah Bank BRI	-	3.000.000,00	Disetor pada tanggal 30 Maret 2020
2	Setoran dari PT Bank BRI Aceh	-	505.401.963,00	Disetor pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 580/10921 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengembalian Dana PER dan
3	Setoran PT Bank Aceh	-	1.247.156.124,15	Disetor pada tanggal 30 November 2020 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 518/16814 tanggal 25 November 2020 tentang Pengembalian Dana PER
4	Setoran dari BPR Mustaqim Suka Makmur	301.740.020,38	-	Disetor pada Tanggal 05 November 2021 sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 518/17249 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Pengembalian Dana PER
<b>Jumlah</b>		<b>301.740.020,38</b>	<b>1.755.558.087,15</b>	

Tabel 5. 68. Rekening Dana PER

No.	Nama Rekening	Nomor
<b>PT. Bank BRI</b>		
1.	Giro Khusus Penempatan Dana Pemerintah Aceh	0037.01.000192.30.5
2.	Giro Penampungan Jasa/Fee Pemerintah Aceh	0037.01.000200.30.2
3.	Giro Penampungan Fee Tim Teknis PMUKRT	0037.01.000202.30.4
<b>PT. Bank Aceh</b>		
1.	Dana PER Aceh Barat	01.02.801001.1
2.	Dana PER Aceh Jaya	01.02.801002.0
3.	Dana PER Nagan Raya	01.02.801003.7
4.	Titipan Dana PER NAD	010.202.03.15

No.	Nama Rekening	Nomor
5.	Set. Bunga Kredit PER Provinsi	010.202.03.09
6.	Set. Pokok Kredit PER Propinsi	010.201.03.08
7.	Tim Teknis PMUKRTK	010.01.02.570779.2
8.	Rekening Khusus	01.02.121.200.0
<b>PT. BUKOPIN</b>		
1.	PKPMUKRT & KOP	1002000136
2.	PKPMUKRT & KOP	1001999130

Saldo Dana PER yang belum dikembalikan terdapat pada Bank penyalur sebagai berikut.

**Tabel 5. 69. Saldo Dana PER**

No	Lembaga Bank Penyalur	Saldo Awal	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
1	PT. Bank BRI	6.494.598.037,00	-	6.494.598.037,00
2	PT. Bank Aceh	14.894.508.064,90	-	14.894.508.064,90
3	PT. Bank Bukopin	6.169.000.000,00	-	6.169.000.000,00
4	KPRI Kopkaga	1.538.034.847,00	-	1.538.034.847,00
5	PT BPR Mustaqim	7.606.044.068,00	301.740.020,38	7.304.304.047,62
<b>Jumlah</b>		<b>36.702.185.016,90</b>	<b>301.740.020,38</b>	<b>36.400.444.996,52</b>

- c. Dana Bergulir PINBUK disalurkan masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 kepada 11 (sebelas) Baitul Qiradh, dikelola selama lima tahun dan telah berakhir atau jatuh tempo pada 31 Desember 2014.

**Tabel 5. 70. Saldo Dana PINBUK**

No.	Nama BQ	Alamat	Penyertaan Modal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Amanah Nanggroe	Banda Aceh	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.	Cut Nyak Dhien	Banda Aceh	100.000.000,00	-	100.000.000,00
3.	BIMA	Banda Aceh	100.000.000,00	15.000.000,00	85.000.000,00
4.	Surya Madinah	Banda Aceh	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
5.	Abu Indrapuri	Aceh Besar	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
6.	Ar-Rahmah	Pidie Jaya	100.000.000,00	-	100.000.000,00
7.	Dewantara	Aceh Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8.	Surya Melati	Lhokseumawe	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
9.	Arafah	Aceh Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
10.	Al-Muslim	Aceh Tamiang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
11.	Al-Ikhwah	Meulaboh	100.000.000,00	21.000.000,00	79.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.100.000.000,00</b>	<b>546.000.000,00</b>	<b>554.000.000,00</b>

BQ Amanah Nanggroe, BQ Dewantara, BQ Arafah, dan BQ Al-Muslim telah mengembalikan dana masing-masing sebesar Rp100.000.000,00. Saldo dana pada BQ Bina Insan Mandiri dan BQ Abu Indrapuri masih dalam pembiayaan UKM masing-masing sebesar Rp85.000.000,00 dan Rp75.000.000,00. BQ Surya Madinah dan BQ Surya Melati mengalami musibah tercurinya angunan nasabah dan belum dapat mengembalikan sisa dana masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp75.000.000,00. BQ Cut Nyak Dhien dan BQ Ar-Rahmah dilaporkan telah tutup dan



belum mengembalikan seluruh dana yang diterima masing-masing sebesar Rp100.000.000,00, demikian pula BQ LKMS Al-Ikhwah yang telah tutup dengan sisa dana yang belum dikembalikan Rp79.000.000,00.

Dana PINBUK telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp546.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 71. Pengembalian Dana PINBUK

No.	Nama BQ	Jumlah Pengembalian	Penyetor	Keterangan
1	Amanah Nanggroe	100.000.000,00		
2	BIMA	15.000.000,00		
3	Surya Madinah	60.000.000,00		
4	Abu Indrapuri	25.000.000,00		
5	Dewantara	100.000.000,00	PINBUK Aceh	Telah disetor ke Rekening Kas Daerah tanggal 03 Juni 2015
6	Surya Melati	25.000.000,00		
7	Arafah	100.000.000,00		
8	Al-Muslim	100.000.000,00		
9	Al-Ikhwah	21.000.000,00		
<b>Jumlah</b>		<b>546.000.000,00</b>		

- d. Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebesar Rp10.406.827.103,00 merupakan pinjaman Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam rangka mendanai Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan. Penagihan dana bergulir LUEP sudah diserahkan kepada KPKNL sebanyak 62 orang penerima bantuan. Dana Bergulir tahun 2021 berkurang sebesar Rp169.549.965,00 terdiri dari pengurangan dari setoran nasabah sebesar Rp194.760.293,00, Koreksi tambah saldo awal tahun 2020 sebesar Rp25.360.728,00 dan pembebanan biaya transaksi keuangan administrasi bank sebesar Rp150.400,00 dengan rincian pada *Lampiran 7 dan 7a*.

## 5.3.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Per 31 Desember 2021  
(Rp89.609.733.099,52)Per 31 Desember 2020  
(Rp90.081.023.084,90)

Penyisihan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp89.609.733.099,52) mengalami penurunan sebesar Rp471.289.985,38 atau 0,52% dari Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp90.081.023.084,90) terdiri dari:

Tabel 5. 72. Penyisihan Dana Bergulir

No	Keterangan	Saldo Awal	Kualitas dan Persentasi Penyisihan	Beban Penyisihan	Saldo Akhir
1	Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	(42.251.461.000,00)	100% macet	-	(42.251.461.000,00)
2	Investasi Dana Bergulir PER	(36.699.185.016,90)	100% macet	301.740.020,38	(36.397.444.996,52)
3	Investasi Dana Bergulir PINBUK	(554.000.000,00)	100% macet	-	(554.000.000,00)
4	Investasi Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)	(10.576.377.068,00)	100% macet	169.549.965,00	(10.406.827.103,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(90.081.023.084,90)</b>		<b>471.289.985,38</b>	<b>(89.609.733.099,52)</b>

**5.3.2.2. Investasi Permanen** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp1.965.004.767.319,77** **Rp1.592.869.162.510,55**

Investasi permanen Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.965.004.767.319,77 mengalami kenaikan sebesar Rp372.135.604.809,22 atau 23,36% dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.592.869.162.510,55 terdiri dari:

**Tabel 5. 73. Investasi Permanen**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	PT Bank Aceh	1.808.187.947.235,79	1.522.404.936.513,55
2	PD. BPR Mustaqim	88.681.580.486,98	67.600.198.407,00
3	PD Pembangunan Aceh	68.135.239.597,00	2.864.027.590,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.965.004.767.319,77</b>	<b>1.592.869.162.510,55</b>

Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada perusahaan daerah yaitu sebagai berikut.

**5.3.2.2.1. PT Bank Aceh Syariah** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp1.808.187.947.235,79** **Rp1.522.404.936.513,55**

Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 74. Penyertaan Modal Bank Aceh**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2020</b>	<b>1.522.404.936.513,55</b>	<b>1.512.459.633.181,74</b>
<b>Penambahan Tahun 2021 :</b>		
Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	200.000.000.000,00	-
Pengumuman - Laba/Rugi Bank Aceh Tahun 2021 (58,89% x Rp404.511.983.276,00)	238.217.106.951,24	191.646.102.367,81
Pembagian Deviden Tahun Anggaran 2021	(132.444.587.380,00)	(158.284.954.748,00)
Dana Pembangunan Tahun Anggaran 2021	(19.989.508.849,00)	(23.415.844.288,00)
<b>Jumlah Tahun 2021</b>	<b>285.783.010.722,24</b>	<b>9.945.303.331,81</b>
<b>Jumlah Investasi s.d. Tahun 2021</b>	<b>1.808.187.947.235,79</b>	<b>1.522.404.936.513,55</b>

Nilai Ekuitas Awal sebesar Rp1.522.404.936.513,55. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Aceh Tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Tanggal 28 Januari 2022, Nilai Ekuitas sebesar Rp2.843.681.595.492,00, Penghasilan Komprehensif Rp404.511.983.276,00, persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 58,89 persen dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Aceh Tanggal 29 Juni 2021, Pembagian Deviden kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp132.444.587.380,00, Dana Pembangunan Daerah sebesar Rp19.989.508.849,00 dengan jumlah saham 63.577.594 lembar saham.

Menindaklanjuti ketentuan pasal 4 Qanun 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh Tanggal 18 Oktober 2019 bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh diantaranya bertujuan untuk memenuhi modal dasar BUMA. Tahun 2021, Pemerintah Aceh menambah penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp200.000.000.000,00 melalui SP2D Nomor 0028735/LS/2021 Tanggal 6 Desember 2021. Sehingga nilai Investasi Akhir sebesar Rp1.808.187.947.235,79.



**5.3.2.2.2. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim Aceh Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp88.681.580.486,98 Rp67.600.198.407,00**

Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 75. Penyertaan Modal BPR Mustaqim Sukamakmur**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2020</b>	<b>67.600.198.407,00</b>	<b>69.554.374.298,00</b>
<b>Penambahan Tahun 2021 :</b>		
Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	20.000.000.000,00	-
Pengumuman - Laba/Rugi PT BPRS Mustaqim Aceh Tahun 2021 (99,99% x Rp1.081.490.229,00)	1.081.382.079,98	-
Penambahan Ekuitas PD BPR Mustaqim Per 31 Desember 2020	-	(1.954.175.891,00)
<b>Jumlah s.d. Tahun 2021</b>	<b>21.081.382.079,98</b>	<b>(1.954.175.891,00)</b>
<b>Jumlah Investasi s.d. Tahun 2021</b>	<b>88.681.580.486,98</b>	<b>67.600.198.407,00</b>

Nilai Ekuitas Awal sebesar Rp67.600.198.407,00. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh Tahun 2021 (*audited*), Nilai Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp67.127.490.229,00, Pemerintah Aceh menambah penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh sebesar Rp20.000.000.000,00 melalui SP2D Nomor 0033754/LS/2021 Tanggal 17 Desember 2021. Persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 99,99% dan jumlah saham 71.734.504 lembar saham. Sehingga nilai investasi akhir PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh sebesar Rp88.681.580.486,98. Perbedaan ekuitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan Laporan Keuangan PT BPRS Mustaqim Aceh disebabkan tambahan modal disetor sebesar Rp20.000.000.000,00 belum diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan BPR Mustaqim karena belum adanya persetujuan modal disetor dari OJK. Persetujuan penambahan modal baru diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana Surat OJK Nomor S-110/KO.0501/2022 perihal Persetujuan Penambahan Modal disetor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh.

**5.3.2.2.3. PT Pembangunan Aceh Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp68.135.239.597,00 Rp2.864.027.590,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada PT Pembangunan Aceh dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 76. Penyertaan Modal PT Pembangunan Aceh**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2020</b>	<b>2.864.027.590,00</b>	<b>6.237.019.439,00</b>
<b>Penambahan Tahun 2021 :</b>		
Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	21.437.200.000,00	(845.585.451,00)
Laba Tahun Berjalan Tahun 2021	43.319.866.553,00	(2.527.406.398,00)
Koreksi Laba Tahun 2021	514.145.454,00	-
<b>Jumlah s.d. Tahun 2021</b>	<b>65.271.212.007,00</b>	<b>(3.372.991.849,00)</b>
<b>Jumlah Investasi s.d. Tahun 2021</b>	<b>68.135.239.597,00</b>	<b>2.864.027.590,00</b>

Nilai Ekuitas Awal sebesar Rp2.864.027.590,00. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pembangunan Aceh Tahun 2021 (*audited*), Nilai Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp68.135.239.597,00, persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 100%. Pemerintah

Aceh menambah penyertaan modal pada PT. Pembangunan Aceh sebesar Rp21.437.200.000,00 melalui SP2D Nomor 0036090/LS/2021 Tanggal 23 Desember 2021 Sehingga nilai Investasi Akhir PT Pembangunan Aceh sebesar Rp68.135.239.597,00.

**5.3.3. Aset Tetap** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp32.101.868.028.175,37** **Rp29.726.684.476.673,30**

Saldo Aset Tetap pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.101.868.028.175,37 mengalami kenaikan sebesar Rp2.375.183.551.502,00 atau 7,99% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.726.684.476.673,30 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 77. Mutasi Aset Tetap**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah	2.936.185.931.752,79	690.320.708.312,00	30.525.985.042,00	3.595.980.655.022,79
2	Peralatan Dan Mesin	4.337.215.141.059,02	552.620.651.036,52	420.549.463.962,69	4.469.286.328.132,85
3	Gedung Dan Bangunan	6.789.986.126.555,35	1.186.896.535.454,82	683.972.978.674,33	7.292.909.683.335,84
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	13.459.106.691.222,50	1.152.444.813.982,68	1.125.534.823.273,50	13.486.016.681.931,70
5	Aset Tetap Lainnya	839.875.057.814,71	224.018.362.113,67	152.513.064.566,41	911.380.355.361,97
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.364.315.528.268,97	1.437.214.024.842,25	455.235.228.721,00	2.346.294.324.390,22
<b>Jumlah</b>		<b>29.726.684.476.673,34</b>	<b>5.243.515.095.741,94</b>	<b>2.868.331.544.239,93</b>	<b>32.101.868.028.175,37</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut.

**5.3.3.1. Tanah** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp3.595.980.655.022,79** **Rp2.936.185.931.752,79**

Saldo Aset Tanah pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.595.980.655.022,79 mengalami kenaikan sebesar Rp659.794.723.270,00 atau 22,47% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.936.185.931.752,79 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 78. Mutasi Aset Tetap Tanah**

Uraian	Nilai
Saldo Awal	2.936.185.931.752,79
<b>BERTAMBAH</b>	<b>690.320.708.312,00</b>
Belanja Modal	24.732.040.448,00
Hibah	43.488.782.002,00
Belanja Barang dan Jasa	125.119.380,00
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	548.254.641.004,00
Mutasi Antar SKPA	18.064.611.751,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	199.705.621,50
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.973.766.944,00
Revaluasi	53.482.041.161,50
<b>BERKURANG</b>	<b>30.525.985.042,00</b>
Hibah	627.000.000,00



Uraian	Nilai
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	47,00
Mutasi Antar SKPA	18.064.611.751,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	197.888.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	11.636.485.244,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.595.980.655.022,79</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Penambahan saldo Tanah berasal dari:

- a. Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari kegiatan belanja modal sebesar Rp24.732.040.448,00 merupakan pembelian tanah sebagai berikut.
  - 1) Tanah Dinas Pendidikan Aceh yang berlokasi di Aceh Timur dan Bireuen senilai Rp9.356.549.120;
  - 2) Tanah Dinas PUPR yang berlokasi di Banda Aceh senilai Rp9.222.177.328;
  - 3) Tanah Dinas Pengairan yang berlokasi di Aceh Utara senilai Rp5.955.426.000,00; dan
  - 4) Tanah Dinas Syariat Islam Aceh yang berlokasi di Banda Aceh senilai Rp197.888.000,00.
- b. Penerimaan Hibah Tanah sebesar Rp43.488.782.002,00, terdiri dari:
  - 1) Hibah dari Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp4.309.000,00 yang digunakan untuk kantor Samsat Kota Langsa;
  - 2) Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp1.945.532.000,00 yang digunakan untuk kantor Samsat Kabupaten Bener Meriah;
  - 3) Hibah dari Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp37.158.750.000,00 atas tanah Pelabuhan Ulee Lheue yang merupakan bagian dari proses P3D; dan
  - 4) Hibah dari Pemerintah Aceh Singkil sebesar Rp75.000.000,00 atas tanah Pulau Banyak yang merupakan bagian dari proses P3D.
- c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp125.119.380,00 yang merupakan pengeluaran setelah perolehan atas aset tanah yang terdiri dari:
  - 1) Biaya operasional dan penilaian atas tanah Pembebasan Tanah D.I Jamuan Kabupaten Aceh Utara pada Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp. 111.185.380,00; dan
  - 2) Penimbunan tanah Kantor BBPMP pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp13.934.000,00 yang berlokasi di Jl. Teuku Iskandar Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
- d. Koreksi nilai Aset Tetap tanah sebesar Rp548.254.641.004,00 yang merupakan:
  - 1) Tanah dibawah jalan atas sembilan ruas jalan senilai Rp548.254.641.000,00 yang baru dicatat dan telah dilakukan penaksiran serta ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 028/2254/2021; dan
  - 2) Empat persil tanah yang baru dicatat pada empat SKPA yaitu Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Atas keempat tanah tersebut dicatat bernilai Rp4,00.



- e. Mutasi Antar SKPA Aset Tetap Tanah sebesar Rp18.064.611.751,00 merupakan perpindahan aset dikarenakan tidak sesuai tugas dan fungsi SKPA bersangkutan yang terdiri dari:
- 1) Perpindahan aset tanah dari Dinas Kelautan dan Perikanan ke Dinas Perhubungan sebesar Rp3.397.000.000,00 dikarenakan Hibah sesuai BAST Nomor 020/0318/1.2/2021 tanggal 3 Febuari 2021;
  - 2) Perpindahan aset tanah dari Dinas PUPR ke BPKA sebesar Rp10.379.798.000,00; dan
  - 3) Perpindahan aset tanah dari BPSDM ke Badan Penghubung sebesar Rp4.287.813.751,00 dikarenakan Pengalihan Status dengan BAST Nomor 028/007/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- f. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp199.705.621,50 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang merupakan reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke tanah yaitu penimbunan lahan yang sudah tercatat pada aset gedung dan bangunan.
- g. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.973.766.944,00 merupakan aset yang sebelumnya dicatat pada pengelola dan kemudian digunakan oleh SKPA terkait yaitu:
- 1) Tanah pemakaman senilai Rp792.676.114,00 yang digunakan oleh RSUDZA untuk Tanah Pemakaman sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 030/996/2020 tanggal 27 Maret 2020; dan
  - 2) Tanah Kota Satelit senilai Rp1.181.090.830,00 yang digunakan untuk Perencanaan Pembangunan Rumah Perlindungan Propinsi pada Dinas DP3A.
- h. Revaluasi Nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp53.482.041.161,50 yang merupakan penilaian kembali atas aset tanah yang tidak bernilai wajar pada empat SKPA dengan uraian sebagai berikut.
- 1) Tanah pada Dinas Pendidikan senilai Rp39.290.778.161,50 atas tanah pada sekolah sebanyak 36 persil yang berlokasi di Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan Pidie Jaya;
  - 2) Tanah pada Dinas PUPR sebanyak dua persil senilai Rp278.800.000,00 pada UPTD Sabang;
  - 3) Tanah pada Dinas DLHK sebanyak sembilan persil senilai Rp224.063.000,00 yang berlokasi di Aceh Utara, Sabang, Pidie Jaya, dan Aceh Barat; dan
  - 4) Tanah pada Dispora sebanyak satu persil senilai Rp13.688.400.000,00 berupa tanah kolam renang tirta raya.

Pengurangan saldo Tanah berasal dari:

- a. Mutasi Hibah Keluar Aset Tetap Tanah sebesar Rp627.000.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh merupakan hibah kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Sekda Nomor 030/1286/2021. Pemberian hibah tersebut dilakukan terkait pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D).



- b. Koreksi Pencatatan/ Pengurangan catat aset / baru ditemukan Aset Tetap Tanah sebesar Rp47,00 dikarenakan adanya penilaian ulang atas aset tanah yang tidak bernilai wajar yang terdiri dari:
- 1) Tanah pada Dinas Pendidikan atas tanah pada sekolah sebanyak 36 persil yang berlokasi di Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan Pidie Jaya;
  - 2) Tanah pada Dinas PUPR sebanyak dua persil pada UPTD Sabang; dan
  - 3) Tanah pada Dinas DLHK sebanyak Sembilan persil yang berlokasi di Aceh Utara, Sabang, Pidie Jaya, dan Aceh barat.
- c. Mutasi Antar SKPA Aset Tetap Tanah sebesar Rp18.064.611.751,00 merupakan perpindahan aset dikarenakan tidak sesuai tugas dan fungsi SKPA bersangkutan yang terdiri dari:
- 1) Perpindahan aset tanah dari Dinas Perhubungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.397.000.000,00 dikarenakan Hibah sesuai BAST Nomor 020/0318/1.2/2021 tanggal 3 Febuari 2021;
  - 2) Perpindahan aset tanah dari BPKA/Pengelola ke Dinas PUPR sebesar Rp10.379.798.000,00; dan
  - 3) Perpindahan aset tanah dari Badan Penghubung ke BPSDM sebesar Rp4.287.813.751.00 dikarenakan Pengalihan Status dengan BAST Nomor 028/007/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- d. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp197.888.000,00 pada Dinas Syariat Islam Aceh merupakan reklasifikasi dari aset tanah ke Peralatan dan Mesin karena Salah Penganggaran;
- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya sebesar Rp11.636.485.244,00 merupakan reklasifikasi karena aset tanah tidak dioperasikan oleh Pemerintah Aceh dan akan dihibahkan. Rekasifikasi aset tanah tersebut terdiri dari:
- 1) Tanah pada Dinas Perhubungan senilai Rp65.640.000,00 berlokasi di kabupaten Aceh Utara yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - 2) Tanah pada Sekretariat Majelis Adat Aceh senilai Rp1.191.047.244,00 berlokasi di Banda Aceh yang akan dihibahkan kepada Yayasan IPHI; dan
  - 3) Tanah pada BPKA senilai Rp10.379.798.000,00 berlokasi di Banda Aceh yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh.

**5.3.3.2. Peralatan dan Mesin** **Per 31 Desember 2021**      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp4.469.286.328.132,84**      **Rp4.337.215.141.059,01**

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.469.286.328.132,84 mengalami kenaikan sebesar Rp132.071.187.073,83 atau 3,05% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.337.215.141.059,01 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 79. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Uraian	Tahun 2021
Saldo Awal	4.337.215.141.059,01
<b>BERTAMBAH</b>	<b>552.620.651.036,52</b>



Uraian	Tahun 2021
Belanja Modal	259.171.614.346,38
Hibah	10.481.533.578,00
Belanja Barang dan Jasa	1.217.424.364,00
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	37.183.427.902,00
Mutasi Antar SKPA	12.601.996.998,11
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	231.159.418.900,03
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	555.000.000,00
Revaluasi	250.234.948,00
<b>BERKURANG</b>	<b>420.549.463.962,70</b>
Utang Belanja Modal	3.913.787.293,00
Hibah	4.513.292.800,00
Beban Barang dan Jasa	21.957.726.820,74
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	78.001.000,00
Mutasi Antar SKPA	12.601.996.998,11
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan	6.133.734.274,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	125.183.686.799,07
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	245.096.818.232,77
Extracom	1.070.419.745,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.469.286.328.132,84</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berasal dari:

- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp259.171.614.346,38 dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5. 80. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	31 Desember 2021
Realisasi Belanja Modal (LRA)	259.171.614.346,38
<b>Dikurangi :</b>	-
-	-
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259.171.614.346,38

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.481.533.578,00 terdiri:

**Tabel 5. 81. Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	5.847.324.816,00	Terima Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi ke SMK unggul Pemerintah Aceh
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.030.427.000,00	Terima hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8 unit, Pemerintah Kab. Aceh Selatan 6 Unit berupa Alat Angkutan
3	Dinas Perhubungan Aceh	2.030.600.412,00	Terima hibah dari Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemkab Simeulu dan Pemkab Aceh Singkil sebanyak 200 unit
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.573.181.350,00	Terima Hibah dari BNN, Kementerian Pertanian berupa Alat Angkutan sebanyak 42 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>10.481.533.578,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.217.424.364,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 82. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa**

NO	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pengairan Aceh	42.250.000,00	Pengadaan 10 unit Alat Bengkel dan Ukur (Gergaji)
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	175.960.400,00	Pengadaan 30 unit Printer
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	29.564.000,00	Pengadaan 1 unit Alat Kantor Rumah Tangga (30 unit)
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	32.400.000,00	Pengadaan 4 unit Komputer
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	52.390.000,00	Pengadaan 2 unit Alat Studio dan Komunikasi (Drone)
6	Sekretariat Daerah Aceh	603.668.800,00	Pengadaan 15 unit Alat Kantor Rumah Tangga
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	40.351.300,00	Instalasi 2 unit UPS
8	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	11.915.400,00	Pengadaan 4 unit Alat Kedokteran dan Kesehatan (thermo gun)
9	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	228.924.464,00	Pengadaan 6 unit Alat Kantor Rumah Tangga, 1 unit Alat Studio dan Komunikasi dan 6 unit Alat Kedokteran dan Kesehatan
<b>Jumlah</b>		<b>1.217.424.364,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- d. Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset/baru ditemukan Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.183.427.902,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 83. Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1,00	Alat Angkutan 1 unit baru ditemukan
2	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1.285.750.000,00	Koreksi dari bangunan gedung ke Peralatan dan Mesin (hydrant dan elevator/lift)
3	Dinas Perhubungan Aceh	49.800.000,00	Koreksi dari Bahan Pustaka ke Peralatan dan Mesin yang merupakan Perencanaan penggantian mesin kapal
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	22.933.657.674,00	Koreksi Pencatatan terima hibah tahun 2019 dari kementerian dan hasil temuan BPK Tahun 2020
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.933.753.500,00	Terima Hibah 90 unit Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat perolehan sebelum tahun 2021
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	487.297.637,00	Terima Hibah 19 unit Alat Angkutan berdasarkan Surat Pernyataan Dinas Perindustrian No. 028/3269/SEK/2021 dan 8 Unit Alat Komputer dari Kementerian Perdagangan tahun 2020
7	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	5.419.305.000,00	Aset baru ditemukan 259 unit Kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda empat
8	Dinas Pendidikan Aceh	3.557.184.090,00	Koreksi pencatatan aset yang semula tercatat pada Gedung dan Bangunan berpindah ke Peralatan dan Mesin sebanyak 4.407 unit
9	Dinas Kesehatan Aceh	1.516.680.000,00	Koreksi pencatatan aset yang semula tercatat pada Kontruksi Dalam Pekerjaan berpindah Peralatan dan Mesin sebanyak 7 unit
<b>Jumlah</b>		<b>37.183.427.902,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- e. Mutasi Antar SKPA Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.601.996.998,11, terdiri dari :

**Tabel 5. 84. Mutasi Antar SKPA Aset Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	29.000.000,00	Pindah Catat dari BPKA berupa Alat Angkutan
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	9.745.566.375,00	Pindah Catat dari BPKA dan Dinas Kesehatan berupa Alat Lab dan Alat Angkutan
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	772.933.000,00	Pindah Catat dari Dinas Kesehatan berupa Alat Angkutan, Alat Kantor Rumah tangga dan Komputer
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	131.162.000,00	Pindah Catat dari BPKA berupa Alat Angkutan
5	Dinas Perhubungan Aceh	602.818.703,89	Pindah Catat dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan Perikanan berupa Alat Besar, Alat Kantor Rumah Tangga, Alat Kedokteran dan Kesehatan dan Alat Laboratorium
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	119.500.000,00	Pindah Catat dari BAPPEDA berupa Alat Bengkel dan Ukur dan Komputer
7	Sekretariat Majelis Adat Aceh	543.825.000,00	Pindah Catat dari KKW berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga
8	Sekretariat DPR	5.191.919,22	Pindah Catat dari Dinas Kesehatan berupa Alat Kedokteran
9	Inspektorat Aceh	455.800.000,00	Pindah Catat dari BPKA berupa Alat Angkutan
10	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	196.200.000,00	Pindah Catat dari BPKA berupa Alat Angkutan
<b>Jumlah</b>		<b>12.601.996.998,11</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- f. Reklasifikasi Antar Aset Tetap ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp231.159.418.900,03 terdiri dari:

**Tabel 5. 85. Reklasifikasi Antar Aset Tetap**

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	115.847.623.805,38
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	32.760.000,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	6.819.013.394,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	86.457.515.135,37
5	Rumah Sakit Jiwa	929.285.200,00
6	Rumah Sakit Ibu dan Anak	388.166.556,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	66.750.000,00
8	Dinas Pengairan Aceh	47.500.000,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	204.723.274,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	70.650.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	2.283.364.000,00
12	Dinas Sosial Aceh	211.601.500,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	120.257.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	8.000.000,00
15	Dinas Pangan Aceh	760.903.990,00
16	Dinas Pertanahan Aceh	325.215.000,00





No	SKPA	Nilai
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	563.815.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	222.700.000,00
19	Dinas Perhubungan Aceh	3.907.528.632,28
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	333.502.800,00
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	28.360.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	21.381.327,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	2.669.465.265,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	34.970.000,00
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	198.398.740,00
26	Dinas Peternakan Aceh	126.258.200,00
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	1.505.707.000,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	107.085.000,00
29	Sekretariat Daerah Aceh	2.024.584.900,00
30	Sekretariat DPR	2.053.977.800,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	172.596.000,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	846.045.100,00
33	Badan Kepegawaian Aceh	163.157.600,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	912.316.000,00
35	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	169.698.192,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	14.970.879,00
37	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	39.250.000,00
38	Dinas Syariat Islam Aceh	273.120.960,00
39	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	44.483.750,00
40	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	68.034.000,00
41	Sekretariat Baitul Mal Aceh	84.682.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>231.159.418.900,03</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- g. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp555.000.000,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 86. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	543.000.000,00	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain Rusak Berat ke Aset Tetap Alat Angkutan sebanyak 3 unit
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	12.000.000,00	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain Rusak Berat ke Aset Tetap Alat Angkutan sebanyak 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>555.000.000,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- h. Revaluasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp250.234.948,00 pada Sekretariat Daerah Aceh berupa Alat Angkutan, Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Komputer berdasarkan Berita Acara verifikasi penaksiran harga nomor um.032.

Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin berasal dari:

- a. Mutasi Kurang dari Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.913.787.293,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 87. Mutasi Kurang dari Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	3.881.675.293,00	Aset Peralatan dan Mesin yang sudah diakui di pencatatan tahun 2020 dan pelunasan pada tahun 2021
2	Rumah Sakit Jiwa	32.112.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>3.913.787.293,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (*diolah*)

- b. Mutasi Hibah Keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.513.292.800,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 88. Mutasi Hibah Keluar Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	350.000.000,00	Hibah Alat Angkutan ke Pemerintah Kabupaten Bireuen
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	4.163.292.800,00	Hibah Peralatan dan Mesin ke Pemerintah Kota Banda Aceh
<b>Jumlah</b>		<b>4.513.292.800,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (*diolah*)

- c. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan beban Tahun 2021 sebesar Rp21.957.726.820,74, terdiri dari:

**Tabel 5. 89. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan beban tahun 2021**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Aceh	23.859.000,00	Alat Kedokteran dan Kesehatan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebanyak 3 unit
2	Dinas Pengairan Aceh	36.000.000,00	Alat Ukur yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebanyak 60 unit
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	87.162.822,00	Alat Lab, Komputer dan Alat Keselamatan Kerja yang tidak memenuhi kriteria aset sebanyak 220 unit
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	580.000,00	Alat Kedokteran yang tidak memenuhi kriteria aset sebanyak 1 unit
5	Dinas Pangan Aceh	30.360.000,00	Alat besar yang tidak memenuhi kriteria aset sebanyak 1 unit
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	30.000,00	Komputer yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan merupakan biaya pekerjaan
	Dinas Perhubungan Aceh	19.283.614.198,74	Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria aset tetap (salah penganggaran)
7			
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	120.274.000,00	Alat besar dan Komputer yang tidak memenuhi kriteria aset tetap
9	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	2.288.077.900,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria aset tetap (salah penganggaran)
10	Inspektorat Aceh	12.420.000,00	Alat Bengkel dan Ukur yang tidak memenuhi kriteria aset tetap
11	Dinas Syariah Islam Aceh	75.348.900,00	Alat besar yang tidak memenuhi kriteria aset tetap
<b>Jumlah</b>		<b>21.957.726.820,74</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (*diolah*)

- d. Koreksi Pencatatan/ Pengurangan catat aset / baru ditemukan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp78.001.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dikarenakan penyesuaian nilai aset.
- e. Mutasi Antar SKPA Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.601.996.998,11, terdiri dari:

**Tabel 5. 90. Mutasi Antar SKPA Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Aceh	10.348.258.971,11	Mutasi peralatan dan mesin ke RS. Zainoel Abidin, Dinas Perhubungan, Sek. DPRA dan RS. Ibu Anak sebanyak 130 unit
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	582.051.027,00	Mutasi Peralatan dan Mesin ke Dinas Perhubungan sebanyak 47 unit
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	119.500.000,00	Mutasi Peralatan dan Mesin Ke Dinas Komunikasi dan Persandian sebanyak 4 unit
4	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.008.362.000,00	Mutasi Alat Angkutan ke RS. Zainal Abidin, Stpol PP, Dinas Pendidikan, Inspektorat dan Kerukon Katibul Wali sebanyak 4 unit
5	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	543.825.000,00	Mutasi Alat Kantor Rumah Tangga ke Sekretariat Majelis Adat Aceh sebanyak 121 unit
<b>Jumlah</b>		<b>12.601.996.998,11</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- f. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan sebesar Rp6.133.734.274,00, terdiri dari :

**Tabel 5. 91. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	4.982.820.589,00	Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan Bahan Lainnya sebanyak 99.442 unit
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	1.536.000,00	Bahan Pustaka yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi sebanyak 3 unit
4	Rumah Sakit Jiwa	5.435.500,00	Bahan Pustaka yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebanyak 3 unit
5	Dinas Sosial Aceh	242.646.300,00	Alat Kedokteran, Alat Laboratorium dan Komputer yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya sebanyak 1182
3	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	158.147.825,00	Alat Peraga yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan sebanyak 1949
6	Dinas Pangan Aceh	134.804.010,00	Alat Pertanian yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke Persediaan sebanyak 285 unit
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	90.357.300,00	Alat Laboratorium yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke



No	SKPA	Nilai	Keterangan
			Persediaan sebanyak 1 unit
9	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	82.558.300,00	Alat Studio dan Komputer yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke Persediaan sebanyak 99 unit
10	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.200.000,00	Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan sebanyak 1 unit
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	5.507.000,00	Alat Kedokteran dan Kesehatan yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan sebanyak 103 unit
12	Dinas Peternakan Aceh	5.100.000,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan sebanyak 19 unit
13	Sekretariat Daerah Aceh	190.104.200,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
14	Sekretariat DPRA	231.000,00	Alat Kedokteran dan Kesehatan yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan sebanyak 1 unit
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	231.858.000,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan sebanyak 483 unit
16	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	1.428.250,00	Komputer yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan sebanyak 8 unit
<b>Jumlah</b>		<b>6.133.734.274,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- g. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp125.183.686.799,08, terdiri dari:

**Tabel 5. 92. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

NO	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	96.492.566.884,01
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	169.435.000,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	2.554.140.400,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	10.877.738.809,00
5	Rumah Sakit Jiwa	633.180.600,00
6	Rumah Sakit Ibu dan Anak	439.602.446,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	66.750.000,00
8	Dinas Pengairan Aceh	47.500.000,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	157.311.250,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	70.650.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	2.168.364.000,00
12	Dinas Sosial Aceh	102.096.500,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	120.257.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	8.000.000,00
15	Dinas Pangan Aceh	763.078.690,00
16	Dinas Pertanahan Aceh	325.215.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	563.815.000,00



NO	SKPA	Nilai
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	222.700.000,00
19	Dinas Perhubungan Aceh	1.426.659.072,06
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	334.866.800,00
21	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	28.360.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	21.381.327,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	6.150.000,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	560.420.000,00
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	98.958.740,00
26	Dinas Peternakan Aceh	21.175.800,00
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	1.505.707.000,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	107.085.000,00
29	Sekretariat Daerah Aceh	2.082.391.700,00
30	Sekretariat DPRA	460.146.800,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	137.396.000,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	846.045.100,00
33	Badan Kepegawaian Aceh	163.157.600,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	912.316.000,00
35	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	220.694.192,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	14.970.879,00
37	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	39.250.000,00
38	Dinas Syariat Islam Aceh	133.884.960,00
39	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	44.483.750,00
40	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	235.784.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>125.183.686.799,07</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- h. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp245.096.818.232,77, terdiri dari:

**Tabel 5. 93. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	245.666.000,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah Tangga, Komputer ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 85 unit
2	Dinas Kesehatan Aceh	612.382.733,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah Tangga, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 70 unit
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	5.537.160.000,00	Reklasifikasi Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Kantor Rumah Tangga dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 12 unit
4	Dinas Pengairan Aceh	1.124.818.238,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah Tangga dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 443 unit
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	254.493.216,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah Tangga ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 104 unit
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh	336.385.494,00	Reklasifikasi Alat Angkutan, Alat Kantor Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi dan



No	SKPA	Nilai	Keterangan
7	Dinas Sosial Aceh	9.790.845.190,97	Komputer ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 63 unit Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 1529 unit dan ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 187 unit
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	243.794.238,80	Reklasifikasi Alat Angkutan, Alat Kantor Rumah Tangga dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 32 unit
9	Dinas Pangan Aceh	618.737.300,00	Reklasifikasi Alat Angkutan, Alat Kantor Rumah Tangga dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 102 unit
10	Dinas Pertanahan Aceh	36.968.652,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah Tangga ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 22 unit
11	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	223.450.000,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah Tangga dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 21 unit
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.914.040.420,00	Reklasifikasi Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Kantor Rumah Tangga ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 2 unit dan ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 747 unit
13	Dinas Perhubungan Aceh	207.748.911.840,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 167 unit
14	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	4.024.032.772,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak berat sebanyak 105 unit
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	358.590.018,00	Reklasifikasi Komputer ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 43 unit
16	Sekretariat Majelis Adat Aceh	464.219.000,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah Tangga dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 210 unit
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	4.816.037.437,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 196 unit
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.220.111.450,00	Reklasifikasi Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 174 unit
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.584.243.681,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 224 unit
20	Sekretariat DPR A	728.784.400,00	Reklasifikasi Alat Kantor Rumah tangga dan Komputer ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 98 unit dan ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 16 unit
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	2.082.540.969,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 908 unit
22	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	340.675.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 49 unit
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	31.780.588,00	Reklasifikasi Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 16 unit
24	Dinas Syariah Islam Aceh	278.303.383,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Rusak Berat

No	SKPA	Nilai	Keterangan
25	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	323.063.395,00	sebanyak 97 unit Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 37 unit dan ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 2 unit
26	Sekretariat Baitul Mal Aceh	156.782.817,00	Reklasifikasi Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 44 unit
<b>Jumlah</b>		<b>245.096.818.232,77</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- i. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan extracomtable sebesar Rp1.070.419.745,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 94. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Merupakan Extracomtable**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	983.643.395,00	Peralatan dan Mesin yang merupakan Extracomtable
2	Dinas Kesehatan Aceh	1.035.000,00	Alat Kedokteran dan Kesehatan yang merupakan Extracomtable sebanyak 3 unit
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	52.266.180,00	Alat Alat Angkutan dan Alat Bengkel dan Ukur yang merupakan Extracomtable sebanyak 4 unit
4	Rumah Sakit Jiwa	11.479.000,00	Alat Kedokteran dan Kesehatan yang merupakan Extracomtable sebanyak 38 unit
5	Rumah Sakit Ibu dan Anak	300.000,00	Alat Studio dan Komunikasi yang merupakan Extracomtable sebanyak 1 unit
6	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	3.072.300,00	Alat Studio dan Komunikasi dan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang merupakan Extracomtable sebanyak 5 unit
7	Dinas Perhubungan Aceh	5.194.000,00	Peralatan dan Mesin yang merupakan Extracomtable sebanyak 16 unit
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	972.000,00	Komputer yang merupakan Extracomtable sebanyak 3 unit
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	2.627.020,00	Alat Laboratorium yang merupakan Extracomtable sebanyak 15 unit
10	Sekretariat Daerah Aceh	1.288.850,00	Alat Kantor Rumah Tangga sebanyak 3 unit dan Alat Studio dan Komunikasi sebanyak 1 unit yang merupakan Extracomtable
11	Sekretariat DPRA	2.692.000,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga yang merupakan Extracomtable sebanyak 4 unit
12	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	5.850.000,00	Alat Kedokteran dan Kesehatan yang merupakan Extracomtable sebanyak 6 unit
<b>Jumlah</b>		<b>1.070.419.745,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

**5.3.3.3. Gedung dan Bangunan** **Per 31 Desember 2021**      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp7.292.909.683.335,83**      **Rp6.789.986.126.555,35**

Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.292.909.683.335,83 mengalami kenaikan sebesar Rp502.923.556.780,49 atau 7,41% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.789.986.126.555,35 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 95. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Uraian	Tahun 2021
Saldo Awal	6.789.986.126.555,36
<b>BERTAMBAH</b>	<b>1.186.896.535.454,82</b>
Belanja Modal	734.555.768.109,80
Utang Belanja Modal	16.885.000,00
Hibah	40.595.011.962,00
Belanja Barang dan Jasa	10.341.284.732,58
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	100.455.623.931,65
Mutasi Antar SKPA	18.161.223.753,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	260.002.230.572,79
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	22.763.202.423,00
Extracom	5.304.970,00
<b>BERKURANG</b>	<b>683.972.978.674,33</b>
Hibah	4.320.700.000,00
Beban Barang dan Jasa	891.927.500,02
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	48.631.368.046,49
Mutasi Antar SKPA	18.161.223.753,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan	18.315.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	490.035.971.434,82
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	110.085.663.564,00
Hapus	11.303.898.000,00
Extracom	523.911.376,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.292.909.683.335,83</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berasal dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp734.555.768.109,80 dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5. 96. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Uraian	31 Desember 2021
Realisasi Belanja Modal (LRA)	734.555.768.109,80
<b>Dikurangi :</b>	-
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	734.555.768.109,80

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- b. Penambahan dari Utang Belanja Modal sebesar Rp16.885.000,00 pada Dinas Pendidikan merupakan Perencanaan Pembangunan Mushalla SMA Negeri 1 Sawang;
- c. Mutasi Hibah masuk sebesar Rp40.595.011.962,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 97. Mutasi Terima Hibah Gedung dan Bangunan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	14.054.121.800,00	Terima Hibah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk SMK Unggul
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	675.600.000,00	Terima Hibah Bangunan Gedung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebanyak 4 unit





No	SKPA	Nilai	Keterangan
3	Dinas Perhubungan Aceh	21.967.350.900,00	Terima Hibah Bangunan Gedung Pelabuhan Ulee Lheu dari Pemko Banda Aceh sebanyak 1 unit
4	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.513.210.000,00	Terima Hibah Bangunan Gedung dari Pemkab Aceh Timur dan Pemko Langsa sebanyak 17 unit
5	Sekretariat Baitul Mal Aceh	2.384.729.262,00	Terima Hibah Bangunan Gedung dari PT. PJB sebanyak 3 unit
<b>Jumlah</b>		<b>40.595.011.962,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- d. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.341.284.732,58 terdiri dari:

**Tabel 5. 98. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Aceh	186.616.000,00	Pembangunan Gedung Parkir
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	3.154.725.449,00	Pembuatan Pagar Kantor UPTD dan Rehab Kantor Induk
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	82.043.500,00	Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan Parkir dan Bangunan Gedung Kantor
4	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	77.423.350,00	Perencanaan dan Pengawasan tempat parkir, gudang logistik, tempat uduk, dan kanopi.
5	Dinas Sosial Aceh	50.800.000,00	Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan rehab bangunan gedung KIA Ladong dan rumah dinas
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	6.000.000,00	Pengawasan pekerjaan pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi
7	Dinas Pangan Aceh	301.129.647,30	Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan Bangunan Gedung Kantor dan Parkir terbuka permanen
8	Dinas Pertanahan Aceh	9.878.000,00	Pengawasan pekerjaan bangunan gedung kantor induk
9	Dinas Perhubungan Aceh	613.033.000,00	Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan Bandara SIM, terminal tipe B, Pelabuhan labuhan haji dan Ulee lheu
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	497.271.500,00	Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan lanjutan Bangunan Gedung Kantor
11	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.133.566.600,00	Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan bangunan gedung kantor permanen dan bangunan olah raga permanen untuk SMK dan SMA
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	782.913.433,93	Perencanaan dan Pengawasan Rehab Bangunan Gedung Kantor
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	452.218.603,49	Rehab Bangunan Gedung Kantor
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	134.669.750,00	Jasa Konsultansi Pengawasan dan Rehab Bangunan GedungKantor
15	Dinas Peternakan Aceh	97.382.000,00	Rehab Bangunan Gedung Kantor dan Pengawasan rehab Pagar
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	450.143.232,86	Perencanaan dan Rehab Bangunan Gedung Kantor
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	79.995.300,00	Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan Bangunan Gedung Kantor
18	Sekretariat Daerah Aceh	415.307.700,00	Perencanaan, rehab, instalasi pipa dan rumal panel (genset)
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	480.406.000,00	Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan rehab Bangunan Gedung Kantor



No	SKPA	Nilai	Keterangan
20	Badan Kepegawaian Aceh	33.379.500,00	Pengawasan rehab interior dan fasad Bangunan Gedung Kantor
21	Inspektorat Aceh	191.514.000,00	Pekerjaan Rehab bangunan gedung kantor
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	79.790.000,00	Pembangunan selasar
23	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	142.153.000,00	Pengawasan dan Rehab Bangunan Gedung Kantor
24	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	671.961.360,00	Perencanaan, pengawasan dan Kapitalisasi bangun gedung kantor
25	Sekretariat Baitul Mal Aceh	216.963.806,00	Perencanaan dan Pengawasan rehab bangunan gedung kantor
<b>Jumlah</b>		<b>10.341.284.732,58</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- e. Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.455.623.931,65, terdiri dari:

**Tabel 5. 99. Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Gedung dan Bangunan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	17.262.714.978,00	Reviu Inspektorat tahun 2020 dan penambahan catat dari Badan Arpus tahun 2020
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	5.304.970,00	Penambahan catat Bangunan Rumah Dinas perolehan tahun 1974 sebanyak 1 unit
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	1,00	Penambahan bangunan Gedung BKOW sesuai SK No. 030/1848/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 1 unit
4	Dinas Pertanahan Aceh	1,00	Penambahan catat Pagar sebanyak 1 unit
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.698.920.000,00	Penambahan catat Bangunan Bengkel dan Bangunan Gedung Kantor baru ditemukan dari persediaan PRKP sebanyak 2 unit
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	2,00	Penambahan catat bangunan gedung kantor dan Mess/Wisma kantor TP PKK Aceh sebanyak 2 unit
7	Dinas Perhubungan Aceh	14.735.000,00	Penambahan Bangunan Gedung dari Aset Extracomtable sebanyak 1 unit
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	684.690.000,65	Revitalisasi Makam Sultan Iskandar Muda yang awalnya tercatat pada Persediaan sebanyak 1 unit
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1,00	Penambahan catat Bangunan Kantin sebanyak 1 unit
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	2.119.166.000,00	Penambahan catat Bangunan Gedung dari Kementerian Pertanian sebanyak 2 unit
11	Sekretariat Daerah Aceh	78.652.092.977,00	Penambahan catat Bangunan Gedung berdasarkan SK Penetapan Status Nomor 030/1645/2021 sebanyak 6 unit
12	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	1,00	Penambahan catat Bangunan Gudang sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Sekretariat BRA sebanyak 1 unit
13	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	18.000.000,00	Penambahan catat Bangunan Gedung dari Barang dan Jasa Tahun 2020
<b>Jumlah</b>		<b>100.455.623.931,65</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)



- f. Mutasi Antar SKPA Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.161.223.753,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 100. Mutasi Antar SKPA Gedung dan Bangunan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Perhubungan Aceh	4.500.652.925,00	Mutasi Bangunan Gedung dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Monumen sebanyak 2 unit
2	BPKA	497.677.000,00	Mutasi Bangunan Gedung dari Dinas Perkim sebanyak 1 unit
3	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	13.162.893.828,00	Mutasi Asrama dari BPSDM sebanyak 7 unit
<b>Jumlah</b>		<b>18.161.223.753,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- g. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp260.002.230.572,79, terdiri dari:

**Tabel 5. 101. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	20.697.940.808,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	586.382.058,13
3	Dinas Kesehatan Aceh	49.967.808.804,68
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	168.296.461.074,20
5	Rumah Sakit Ibu dan Anak	51.435.890,00
6	Dinas Pengairan Aceh	2.524.832.000,00
7	Dinas Sosial Aceh	9.840.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	305.340.696,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	216.160.000,00
10	Dinas Perhubungan Aceh	624.397.220,59
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	611.270.000,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	706.325.000,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	375.400.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	3.332.433.664,49
15	Dinas Peternakan Aceh	303.030.000,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	445.595.800,00
17	Sekretariat Daerah Aceh	34.745.000,00
18	Sekretariat DPRA	185.792.200,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	234.961.356,70
20	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.652.798.000,00
21	Dinas Syariah Islam Aceh	8.839.281.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>260.002.230.572,79</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- h. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.763.202.423,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 102. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Jiwa	2.228.200.423,00	Reklasifikasi dari Aset Lainnya tidak digunakan dalam operasional ke Bangunan Gedung sebanyak 14 unit sesuai Surat Pernyataan Pengguna Barang No: 028/779 tanggal 19 Maret 2021
2	Dinas Perhubungan Aceh	69.800.000,00	Reklasifikasi dari Aset Lainnya tidak digunakan dalam operasional ke Bangunan Gedung sebanyak 1 unit
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	199.700.000,00	Reklasifikasi dari Aset Lainnya tidak digunakan dalam operasional ke Monumen sebanyak 1 unit
4	Sekretariat Daerah Aceh	20.265.502.000,00	Reklasifikasi dari Aset Lainnya tidak digunakan dalam operasional ke Bangunan Gedung sebanyak 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>22.763.202.423,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- i. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan extracomtable sebesar Rp5.304.970,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh merupakan aset dari extracomtable menjadi Intracomtable dikarenakan penambahan nilai kapitalisasi ke bangunan rumah negara.

Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan berasal dari:

- a. Mutasi Hibah Keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.320.700.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh ke Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 3 unit Bangunan Gedung berdasarkan SK Penghapusan Nomor 030/1100/2021 tanggal 19 April 2021.
- b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan beban tahun 2021 sebesar Rp891.927.500,02, terdiri dari:

**Tabel 5. 103. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan beban tahun 2021**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	4.550.000,00	Pekerjaan pengecatan Gedung PKK
2	Dinas Perhubungan Aceh	101.174.521,02	Bangunan Gedung yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi menjadi Beban tahun 2021 sebanyak 56 unit
3	Sekretariat Daerah Aceh	786.202.979,00	Pekerjaan pengecatan Bangunan Gedung Kantor
<b>Jumlah</b>		<b>891.927.500,02</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- c. Koreksi Pencatatan / Pengurangan catat aset / baru ditemukan Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.631.368.046,49 terdiri dari:

**Tabel 5. 104. Koreksi Pencatatan / Pengurangan catat aset / baru ditemukan Gedung dan Bangunan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	3.877.771.990,00	Koreksi Pencatatan karena terdapat barang peralatan dan mesin sebanyak 4407 unit
2	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1.285.750.000,00	Koreksi nilai Bangunan Gedung Kantor yang masih tergabung nilai Aset Hydrant dan Lift/Elavator.
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	40.778.234.592,00	Koreksi Pencatatan karena terdapat barang peralatan dan mesin sebanyak 98 unit dan instalasi sebanyak 6 unit
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	2.689.611.464,49	Koreksi Pencatatan karena dilakukan kapitalisasi
<b>Jumlah</b>		<b>48.631.368.046,49</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- d. Mutasi Antar SKPA Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.161.223.753,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 105. Mutasi Antar SKPA Gedung dan Bangunan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	497.677.000,00	Mutasi keluar Bangunan Rumah keturunan Malahayati ke BPKA (Pengelola) sebanyak 1 unit
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	4.500.652.925,00	Mutasi Keluar Bangunan Gedung Kantor dan Tugu Papan Reklame ke Dinas Perhubungan Aceh masing-masing sebanyak 1 unit
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	13.162.893.828,00	Mutasi Keluar Asrama Mahasiswa ke Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebanyak 7 unit
<b>Jumlah</b>		<b>18.161.223.753,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Persediaan sebesar Rp18.315.000,00, pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh berupa cermin sebanyak 45 unit.
- f. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp490.035.971.434,82, terdiri dari:

**Tabel 5. 106. Reklasifikasi Antar Aset Tetap**

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	49.371.396.802,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	860.329.971,13
3	Dinas Kesehatan Aceh	178.339.740.577,50
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	170.293.471.015,00
5	Dinas Pengairan Aceh	192.700.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	22.683.308.009,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	150.845.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	188.421.000,00
9	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	119.860.000,00
10	Dinas Perhubungan Aceh	2.427.058.538,89
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	19.805.500,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	21.886.468.266,24
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	8.444.962.258,99
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	2.319.865.468,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	911.025.877,36
16	Dinas Peternakan Aceh	74.665.000,00
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	445.595.800,00



No	SKPA	Nilai
18	Sekretariat Daerah Aceh	232.976.000,00
19	Sekretariat DPRA	1.042.397.000,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	507.994.056,70
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	331.632.341,75
22	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	74.580.000,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	27.879.600,00
20	Dinas Syariat Islam Aceh	29.004.310.952,26
24	Sekretariat Baitul Mal Aceh	84.682.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>490.035.971.434,82</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- g. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya sebesar Rp110.085.663.564,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 107. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	8.318.290.900,00	Reklasifikasi Bangunan Gedung ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 61 unit
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	509.034.000,00	Reklasifikasi Bangunan Gedung ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 3 unit
3	Dinas Perhubungan Aceh	91.831.015.866,00	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 129 unit
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	163.750.000,00	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 2 unit
5	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	8.270.636.885,00	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional
6	Sekretariat Majelis Adat Aceh	98.915.663,00	Reklasifikasi Bangunan Gedung ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 1 unit
7	BPKA (Pengelola)	497.677.000,00	Reklasifikasi Bangunan Rumah keturunan Malahayati ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional sebanyak 1 unit
8	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	396.343.250,00	Reklasifikasi Bangunan Gedung ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>110.085.663.564,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- h. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.303.898.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sesuai dengan SK Penghapusan No 030/199/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- i. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan Extracomtable sebesar Rp523.911.376,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 108. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan Extracomtable**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	154.549.200,00	Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	11.000.000,00	Bangunan Gedung yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasisebanyak 1 unit



No	SKPA	Nilai	Keterangan
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	73.920.000,00	Bangunan Gedung yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sebanyak 2 unit
4	Dinas Perhubungan Aceh	190.442.176,00	Bangunan Gedung yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi
5	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	94.000.000,00	Bangunan Rumah Panel yang awalnya tercatat Intracomtable karena penguraian barang sehingga menjadi aset extracomtable
<b>Jumlah</b>		<b>523.911.376,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

**5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp13.486.016.681.931,70** **Rp13.459.106.691.222,50**

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.486.016.681.931,70 mengalami kenaikan sebesar Rp26.909.990.709,18 atau 0,20% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.459.106.691.222,50 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 109. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Tahun 2021
Saldo Awal	13.459.106.691.222,50
<b>BERTAMBAH</b>	<b>1.152.444.813.982,68</b>
Belanja Modal	1.055.849.598.983,31
Utang Belanja Modal	14.507.409.530,00
Hibah	18.187.512.510,00
Belanja Barang dan Jasa	2.883.165.138,61
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	1.855.472.950,03
Mutasi Antar SKPA	8.334.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	57.836.662.420,73
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	854.190.000,00
Revaluasi	-
Extracom	462.468.450,00
<b>BERKURANG</b>	<b>1.125.534.823.273,50</b>
Belanja Modal	-
Utang Belanja Modal	43.280.399.051,00
Hibah	-
Beban Barang dan Jasa	13.415.884.712,00
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	23.698.772.878,24
Mutasi Antar SKPA	8.334.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan	9.988.880,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.003.037.585.213,26
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	41.648.127.122,00
Hapus	-
Extracom	435.731.417,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.486.016.681.931,70</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)



Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.055.849.598.983,31 dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5. 110. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	31 Desember 2021
Realisasi Belanja Modal (LRA)	1.055.849.598.983,31
<b>Dikurangi :</b>	
-	-
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.055.849.598.983,31

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- b. Penambahan dari Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.507.409.530,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh merupakan Perencanaan Pembangunan Mushalla SMA Negeri 1 Sawang;
- c. Mutasi Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.187.512.510,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 111. Mutasi Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	257.000.000,00	Terima Hibah dari Kemendikbud ke SMK Unggul sebanyak 3 unit
2	Dinas Perhubungan Aceh	17.930.512.510,00	Aset P3D dari Pemko Banda Aceh dan Pemkab Simeulu sebanyak 17 unit
<b>Jumlah</b>		<b>18.187.512.510,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- d. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.883.165.138,61, terdiri dari:

**Tabel 5. 112. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pengairan Aceh	1.795.856.600,00	Supervisi Bangunan air (telah dikapitalisasi ke Bangunan Induk)
2	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	2.641.100,00	Perencanaan dan Pengawasan Pembuatan plat beton gedung Pusdapol
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	175.634.400,00	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan jalan dalam lingkungan UPTD BPSR dan Pengawasan Drainase
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	111.865.600,00	Pengawasan Sheetphile dan Pengawasan Sumur Bor
5	Dinas Peternakan Aceh	11.867.900,00	Perencanaan dan Pengawasan Tower Air
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	785.299.538,61	Instalasi Air Bersih, jaringan Internet dan Rehab Bangunan Air Bersih sebanyak 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>2.883.165.138,61</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- e. Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.855.472.950,03, terdiri dari:



**Tabel 5. 113. Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	570.563.200,00	Penambahan catat atas tindak lanjut hasil reuiu Inspektorat tahun 2020
2	Dinas Kesehatan Aceh	483.740.627,55	Penambahan catat atas tindak lanjut hasil Hasil Koreksi BPK Tahun 2021 sebanyak 54 Unit
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	225.636.122,48	Penambahan catat atas tindak lanjut temuan BPK-RI tahun 2020 berupa Instalasi AC dan Instalasi Lain-lain sebanyak 9 unit
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	224.697.000,00	Kapitalisasi ke Bangunan Air atas tindak lanjut Hasil Koreksi BPK Tahun 2021
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	286.705.000,00	Kapitalisasi ke Jalan Jembatan dan Jaringan atas tindak lanjut Hasil Koreksi BPK Tahun 2021
6	Sekretariat DPRA	44.341.000,00	Koreksi aset Extracomtable ke Aset Intracomtable sebanyak 1 unit
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	19.790.000,00	Koreksi aset Extracomtable ke Aset Intracomtable sebanyak 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>1.855.472.950,03</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- f. Mutasi Antar SKPA Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.334.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin dari Dinas Kesehatan berupa Instalasi sebanyak 1 unit.
- g. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp57.836.662.420,73 terdiri dari:

**Tabel 5. 114. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	28.578.226.469,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	395.002.913,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	385.231.514,80
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	19.041.003.529,43
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	1.057.570.797,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	35.845.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	723.252.026,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	649.995.325,44
9	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	119.860.000,00
10	Dinas Perhubungan Aceh	378.973.600,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	4.490.996.218,00
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	421.144.216,81
13	Dinas Peternakan Aceh	74.665.000,00
14	Sekretariat Daerah Aceh	231.067.800,00
15	Sekretariat DPRA	610.397.666,00
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	323.824.745,25
17	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	123.976.000,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	27.879.600,00
19	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	167.750.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>57.836.662.420,73</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- h. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp854.190.000,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 115. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Jiwa	31.700.000,00	Reklasifikasi dari Aset Lainnya tidak Digunakan dalam Operasional (TDF) ke Instalasi sebanyak 1 unit
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	822.490.000,00	Reklas dari Aset Lainnya yang tidak digunakan dalam operasional sebanyak 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>854.190.000,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- i. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan Extracomtable sebesar Rp462.468.450,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh merupakan aset dari Extracomtable menjadi Intracomtable dikarenakan penambahan nilai kapitalisasi ke Jalan dan Jembatan.

Pengurangan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari:

- a. Mutasi kurang dari utang belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp43.280.399.051,00 pada Dinas Pengairan Aceh.

Tahun 2021 terdapat realisasi belanja modal untuk pembayaran aset tahun 2020 (aset tersebut telah tercatat) sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pengurangan pencatatan aset atas realisasi belanja modal tersebut. Pencatatan dilakukan dengan mengurangi nilai aset sebesar Rp43.280.399.051,00 dan nilai utang sebesar Rp27.845.889.902,41 dan melakukan penambahan beban lain-lain (extracomtable) sebesar Rp15.434.509.148,59.

- b. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang menjadi Beban tahun 2021 sebesar Rp13.415.884.712,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 116. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang menjadi Beban**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	12.538.985.962,00	Biaya Swakelola pada UPTD PUPR
2	Dinas Pertanahan Aceh	4.098.800,00	Biaya PDAM
3	Dinas Perhubungan Aceh	872.799.950,00	Speed Bump 827 unit
<b>Jumlah</b>		<b>13.415.884.712,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- c. Koreksi Pencatatan/ Pengurangan catat aset / baru ditemukan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp23.698.772.878,24 terdiri dari:

**Tabel 5. 117. Koreksi Pencatatan/ Pengurangan catat aset / baru ditemukan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	21.767.371.128,24	Koreksi Pengurangan akibat lebih catat utang tahun 2020
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.657.911.750,00	Koreksi Pengurangan Pencatatan hasil temua BPK tahun 2021 berupa Bangunan Air sebanyak 7 Unit
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	273.490.000,00	Koreksi Pengurangan Pencatatan hasil temua BPK tahun 2021 berupa Kapitalisasi Bangunan Air dan Jaringan sebanyak
<b>Jumlah</b>		<b>23.698.772.878,24</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)



- d. Mutasi kurang Antar SKPA Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.334.000,00 pada Dinas Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Instalasi sebanyak 1 unit.
- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Persediaan sebesar Rp9.988.880,00 pada Sekretariat DPRA yang merupakan Speed Bump 10 Unit.
- f. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.003.037.585.213,26, terdiri dari:

**Tabel 5. 118. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	SKPA	Nilai	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	786.698.905.137,00	Reklafikasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan ke Bangunan Air, Bahan Perpustakaan, Aset Tetap Renovasi dan Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penyesuaian Catat Nilai Hutang,
2	Dinas Pengairan Aceh	206.979.072.424,00	Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Air Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	5.230.175.257,65	Reklasifikasi Aset Tetap Instalasi ke Aset Tetap Renovasi
4	Dinas Sosial Aceh	119.345.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Instalasi ke Bangunan Gedung dan Bangunan Air ke Alat Produksi
5	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	840.171.722,00	Reklasifikasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan ke Bangunan Gedung dan Bangunan Air
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	649.995.325,44	Reklasifikasi Aset Tetap Instalasi ke Bangunan Air
7	Dinas Perhubungan Aceh	957.530.641,91	Reklasifikasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan ke Rambu-rambu
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	737.465.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Air ke Buku Perpustakaan, Instalasi ke Jaringan dan Bangunan Air, dan Bangunan Air ke Instalasi
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	149.892.105,26	Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Air ke Jaringan
10	Dinas Peternakan Aceh	107.030.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Instalasi ke Bangunan Gedung
		568.002.600,00	Reklasifikasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan ke Alat Bengkel, Komputer, Rambu-rambu, Alat Kantor Rumah Tangga, dan ke Komputer. Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Air ke Bangunan Gedung, dan Instalasi
11	Sekretariat DPRA		
<b>Jumlah</b>		<b>1.003.037.585.213,26</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- g. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya sebesar Rp41.648.127.122,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 119. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	1.860.559.000,00	Reklasifikasi Bangunan Air ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional (Rencana Hibah) sebanyak 10 unit
2	Dinas Perhubungan Aceh	39.785.568.122,00	Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional (Rencana Hibah, Rusak Berat)



No	SKPA	Nilai	Keterangan
3	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2.000.000,00	sebanyak 25 unit Reklasifikasi Instalasi ke Aset Lainnya Tidak Digunakan dalam Operasional (Rencana Hibah) sebanyak 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>41.648.127.122,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- h. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan Extracomtable Tahun 2021 sebesar Rp 435.731.417,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 120. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan Extracomtable**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	142.447.000,00	Bangunan Air dan Instalasi yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sebanyak 15 unit
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	136.528.000,00	Bangunan Air yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sebanyak 4 unit
3	Dinas Perhubungan Aceh	42.343.917,00	Bangunan Air yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sebanyak 2 unit
4	Dinas Peternakan Aceh	86.532.900,00	Bangunan Air yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sebanyak 2 unit
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	27.879.600,00	Bangunan Air yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sebanyak 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>435.731.417,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

**5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya** **Per 31 Desember 2021**      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp911.380.355.361,97**      **Rp839.875.057.814,71**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp911.380.355.361,97 mengalami kenaikan sebesar Rp71.505.297.547,26 atau 8,51% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp839.875.057.814,71 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 121. Mutasi Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Tahun 2021
Saldo Awal	839.875.057.814,71
<b>BERTAMBAH</b>	<b>224.018.362.113,67</b>
Belanja Modal	121.523.261.455,45
Hibah	611.989.500,00
Belanja Barang dan Jasa	13.887.276.285,00
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	6.678.884.350,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	78.992.669.223,22
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.324.281.300,00
<b>BERKURANG</b>	<b>152.513.064.566,41</b>
Beban Barang dan Jasa	3.900.000,00
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	990.669.000,00
Mutasi Antar SKPA	12.113.850.500,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan	2.453.950.502,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	80.528.970.049,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	56.421.724.515,41
<b>Jumlah</b>	<b>911.380.355.361,97</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp121.523.261.455,45 dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5. 122. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Uraian	31 Desember 2021
Realisasi Belanja Modal (LRA)	121.523.261.455,45
<b>Dikurangi :</b>	
-	-
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.523.261.455,45

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- b. Mutasi Terima Hibah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp611.989.500,00 pada Dinas Perhubungan Aceh yang merupakan Terima Hibah Bahan Pustaka dari Pemko Banda Aceh sebanyak 2 unit dan Pemkab Aceh Singkil sebanyak 1 unit.
- c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.887.276.285,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 123. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Jiwa	242.991.100,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit
2	Dinas Pengairan Aceh	2.510.259.000,00	Perencanaan rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	6.245.829.500,00	Pengawasan dan Pembangunan Aset Tetap Renovasi (Asrama Mahasiswa di Yogyakarta) sebanyak 2 unit Rp1.841.877.500,00 dan DED dan AMDAL Pembangunan Kantor BPKA Rp4.403.952.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	98.439.000,00	Perencanaan Penataan Landscape dan Perencanaan renovasi Gudang
5	Dinas Sosial Aceh	39.820.000,00	Perencanaan Sarana dan Prasarana Lapangan Olah Raga Tuna Netra sebanyak 1 unit
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	35.338.000,00	Perencanaan Pembuatan Doorsmeer, Perencanaan Rehab Kantor DLHK. Instalasi Air Bersih, Hanggar Parkir sebanyak 5 unit
7	Dinas Perhubungan Aceh	866.072.000,00	Buku Laporan Penelitian sebanyak 5 unit dan Perencanaan pembangunan sebanyak 5 unit
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	1.149.467.285,00	Perencanaan dan Pengawasan Bagunan/monumen/cagar budaya yang ada pada Kawasan Wisata Rp772.824.635,00 (ATR) sebanyak 22 unit, Perencanaan Mushalla dan Reviu design objek wisata Gurah Rp176.892.650,00 sebanyak 2 unit dan Seni Gambar Rp199.750.000,00 sebanyak 1 unit
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	199.656.000,00	Perencanaan Pembuatan Mushalla PPS Kuta Raja, Gedung Record, Kios PPS kuta Raja dan Pengemasan Ikan
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	520.289.900,00	Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Lantai Gedung Keuangan dan Gedung Serba Guna
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	495.000.000,00	Penyusunan FS DED PLTS Rooftop pada beberapa Kab./Kota sebanyak 5 unit



No	SKPA	Nilai	Keterangan
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.098.553.500,00	Perencanaan Pembangunan Terminal, DED TPS, Pembangunan Gedum IKM, Recervoil dan Damkar, Pembangunan Jaringan Hydrant, DED Jalan Poros 2 Jalur KIA Ladong, DED WTP air dan Pembangunan Jaringan Pembuangan Terpadu
13	Sekretariat Daerah Aceh	99.990.000,00	Perencanaan Revitalisasi Gedung Setda Aceh
14	Sekretariat DPRA	38.357.000,00	Perencanaan Toilet Gedung Utama DPRA sebanyak 1 unit
15	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	247.214.000,00	Perencanaan Penyusunan Dokumen Rehabilitasi Ruang Rapat, Komplek LWN, Ruang Rapat Aula Utama, Ruang Taman dan Perencanaan Landscape Kediaman Wali Nanggroe
<b>Jumlah</b>		<b>13.887.276.285,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- d. Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.678.884.350,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 124. Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Aset Tetap Lainnya**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	329.599.000,00	Mutasi antar SKPA dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sesuai BAST tahun 2020 berupa Buku Perpustakaan sebanyak 1.540 unit dan Koreksi Nilai dikarenakan tidak tercatat sebanyak
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	3.518.932.775,00	merupakan hibah dari Kementerian pada tahun 2019 berupa Bahan Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian sebanyak 1.842 unit
3	Dinas Peternakan Aceh	2.830.232.500,00	Koreksi tambah pencatatan hasil tindak lanjut BPK tahun 2021 berupa hewan sebanyak 33.895
<b>Jumlah</b>		<b>6.678.764.275,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- e. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp78.992.669.223,22, terdiri dari:

**Tabel 5. 125. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya**

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	28.467.625.839,00
2	Rumah Sakit Jiwa	28.803.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	14.138.076.818,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	19.722.614.612,65
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	19.805.500,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	14.772.816.878,76
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	10.005.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	199.199.000,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	544.579.344,31
10	Sekretariat Daerah Aceh	33.000.000,00



No	SKPA	Nilai
11	Sekretariat DPRA	775.302.434,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	273.032.700,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	7.807.596,50
<b>Jumlah</b>		<b>78.992.669.223,22</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- f. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.324.281.300,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh merupakan Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Bahan Perpustakaan sebanyak 2 unit

Pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari:

- a. Aset Tetap Lainnya yang merupakan Beban Tahun 2021 sebesar Rp3.900.000,00, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh merupakan Biaya Tropi.
- b. Koreksi Pencatatan/ Pengurangan catat aset / baru ditemukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp990.669.000,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 126. Koreksi Pencatatan/ Pengurangan catat aset / baru ditemukan Aset Tetap Lainnya**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Perhubungan Aceh	49.800.000,00	Reklasifikasi dari Bahan Perpustakaan ke Alat Angkutan merupakan perencanaan tahun sebelumnya penggantian mesin kapal KM. Pulo Rondo(kapitalisasi)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	611.270.000,00	Pengurangan Bahan Perencanaan DED Pembangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung sebanyak 1 unit
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	329.599.000,00	Mutasi antar SKPA ke Dinas Pendidikan Aceh sesuai BAST tahun 2020 berupa Buku Perpustakaan sebanyak 1.540 unit
<b>Jumlah</b>		<b>990.669.000,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- c. Mutasi antar SKPA Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.113.850.500,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh ke Pengelola sebanyak 2 unit, ke Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebanyak 3 unit dan Dinas Syariat Islam sebanyak 1 unit hasil dari tindak lanjut BPK tahun 2021.
- d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Persediaan sebesar Rp2.453.950.502,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 127. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Persediaan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	2.437.575.682,00	Bahan Perpustakaan yang tidak memenuhi minimum kapitalisasi ke persediaan Bahan Lainnya sebanyak 9.945 unit
2	Sekretariat DPRA	16.374.820,00	Kotak Tissue ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebanyak 84 unit
<b>Jumlah</b>		<b>2.453.950.502,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- e. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya sebesar Rp80.528.970.049,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 128. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya**

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	47.144.475.759,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	14.760.950.102,00
3	Rumah Sakit Jiwa	324.908.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	13.362.502.788,00
5	Dinas Pengairan Aceh	2.524.832.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	10.005.000,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	619.729.900,00
8	Dinas Peternakan Aceh	105.082.400,00
9	Sekretariat Daerah Aceh	8.030.000,00
10	Sekretariat DPRA	1.471.800.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	35.200.000,00
12	Dinas Syariah Islam Aceh	161.454.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.528.970.049,00</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- f. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebesar Rp56.421.724.515,41, terdiri dari:

**Tabel 5. 129. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	5.230.175.257,65	Reklasifikasi Aset Tetap Renovasi ke Aset Lainnya tidak digunakan dalam operasional (rencana hibah) sebanyak 1 Unit
2	Dinas Pertanahan Aceh	10.772.478,00	Reklasifikasi Bahan Perpustakaan ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 80 unit
3	Dinas Perhubungan Aceh	5.907.595.000,00	Reklasifikasi Bahan Perpustakaan ke Aset Lainnya tidak Digunakan Dalam Operasional (Rencana Hibah) sebanyak 1 unit
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	173.432.000,00	Reklasifikasi Tanaman ke Aset Lainnya Rusak Berat sebanyak 8.511 unit
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	14.225.280.913,76	Reklasifikasi Aset tetap renovasi ke Aset Lainnya tidak digunakan Operasional (rencana hibah) sebanyak 34 unit
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	30.870.219.366,00	Reklasifikasi Bahan Pustaka ke Aset tidak berwujud sebanyak 395.779 unit
7	Sekretariat Baitul Mal Aceh	4.249.500,00	Reklasifikasi Bahan Perpustakaan ke Aset Lainnya tidak Digunakan Dalam Operasional (Rencana Hibah) sebanyak 81 unit
<b>Jumlah</b>		<b>56.421.724.515,41</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

**5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020**  
**Rp2.346.294.324.390,22 Rp1.364.315.528.268,97**

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.346.294.324.390,22 mengalami kenaikan sebesar Rp981.978.796.121,25 atau 71,98% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.364.315.528.268,97 dengan rincian sebagai berikut.





Tabel 5. 130. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	TOTAL
Saldo Awal	1.364.315.528.268,97
<b>BERTAMBAH</b>	<b>1.437.214.024.842,25</b>
Utang Belanja Modal	15.538.914.044,00
Belanja Barang dan Jasa	9.064.367.288,50
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	75.883.379.779,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.328.583.907.100,75
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	8.143.456.630,00
<b>BERKURANG</b>	<b>455.235.228.721,00</b>
Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan	206.662.030.193,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	248.573.198.528,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.346.294.324.390,22</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- Mutasi Utang Belanja Modal sebesar Rp15.538.914.044,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yaitu Penambahan Utang Belanja Modal yang pembayaran belum 100%
- Mutasi Barang dan Jasa sebesar Rp9.064.367.288,50 Terdiri dari :

Tabel 5. 131. Mutasi Barang dan Jasa

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Aceh	5.168.571.319,50	Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan rumah sakit rujukan Regional
2	Dinas Pengairan Aceh	1.986.415.919,00	Pekerjaan supervisi
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	478.820.650,00	Ded dan penyusunan UKL-UPL pembangunan Gedung A
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	99.946.000,00	Pekerjaan bangunan gedung koni (Stadion Lhong Raya)
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	172.051.000,00	Pengawasan Gedung Layanan Perpustakaan
6	Dinas Syariat Islam Aceh	1.158.562.400,00	Pengawasan pembangunan gedung bener meriah konvensen center
<b>Jumlah</b>		<b>9.064.367.288,50</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset / baru ditemukan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp75.883.379.779,00 pada Dinas Pengairan Aceh dikarenakan Koreksi reklas dari bangunan air ke konstruksi dalam pengerjaan dan dikapitalisasi induknya.
- Mutasi Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.328.583.907.100,75 terdiri dari :

Tabel 5. 132. Mutasi Reklasifikasi Antar Aset Tetap

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Aceh	178.339.740.577,50	Reklas dari bangunan gedung, Rumah sakit rujukan regional
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	170.293.471.015,00	Pekerjaan Pembangunan Gedung Oncology Centre Multi Year Contract (MYC)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	770.358.350.780,00	Reklas dari Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan pada ruas Provinsi dan Kapitalisasi
4	Dinas Pengairan Aceh	131.364.836.925,00	Reklas dari bangunan air dan



No	SKPA	Nilai	Keterangan
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	40.778.234.592,00	Kapitalisasi Reklas dari Bangunan Gedung Kantor DPMTSP yang sampai tahun anggaran berakhir pekerjaan tersebut belum selesai 100%
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	8.444.962.258,99	Reklas dari bangunan gedung, gedung pustaka
7	Dinas Syariah Islam Aceh	29.004.310.952,26	Reklas dari bangunan gedung, Gedung Utama Bener Meriah Confention Center
<b>Jumlah</b>		<b>1.328.583.907.100,75</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Pengurangan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- a. Mutasi Koreksi Pencatatan/ Penambahan catat aset/baru ditemukan sebesar Rp206.662.030.193,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 133. Mutasi Koreksi Pencatatan/Pengurangan catat aset/baru ditemukan**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Aceh	206.035.235.923,24	Reklasifikasi ke Bangunan Gedung BAPELKES yang telah selesai pekerjaannya
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	626.794.269,76	Kelebihan catat nilai utang pada tahun 2020
<b>Jumlah</b>		<b>206.662.030.193,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

- b. Mutasi Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp248.573.198.528,00 terdiri dari:

**Tabel 5. 134. Mutasi Reklasifikasi Antar Aset Tetap**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	248.156.290.828,00	Reklasifikasi ke Bangunan Gedung Ongkologi yang telah selesai pekerjaannya
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	216.160.000,00	Pembangunan fisik Bangunan gedung telah selesai
3	Dinas Peternakan Aceh	114.720.000,00	Koreksi Reklasifikasi dari KDP ke Bangunan Gedung dan dikapitalisasi
4	Sekretariat DPRA	86.027.700,00	Koreksi Reklasifikasi dari KDP ke Tugu Titik Kontrol Pasti
<b>Jumlah</b>		<b>248.573.198.528,00</b>	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Dari total nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp32.101.868.028.175,40 terdiri dari Aset Tetap dalam kondisi baik sebesar Rp32.094.151.132.458,40; Aset Tetap yang belum memiliki nilai sebanyak 51.774 unit dan Aset Tetap yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp7.716.843.943,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Aset *Extracomtable* Aset Tetap adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tetap namun masih dicatat dalam Laporan Barang Milik Aceh sampai dengan akhir Tahun 2021 tercatat sebesar Rp194.239.435.897,76. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

**5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan** **Per 31 Desember 2021**      **Per 31 Desember 2020**  
**Rp12.802.734.057.897,63**      **Rp11.280.179.473.953,50**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.802.734.057.897,63, mengalami kenaikan sebesar Rp1.522.554.583.944,14 atau

13,50% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.280.179.473.953,50 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 135. Akumulasi Penyusutan**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.972.532.349.833,55)	(629.037.024.199,34)	(227.102.013.967,72)	(3.374.467.360.065,24)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.280.465.045.944,69)	(238.613.667.802,66)	(143.361.853.642,23)	(1.375.716.860.105,13)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(7.026.395.183.256,01)	(1.511.855.194.695,68)	(486.983.652.973,46)	(8.051.266.724.978,11)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(786.894.919,23)	(2.986.787.161,51)	(2.490.569.331,64)	(1.283.112.749,10)
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>		<b>(11.280.179.473.953,50)</b>	<b>(2.382.492.673.859,19)</b>	<b>(859.938.089.915,05)</b>	<b>(12.802.734.057.897,63)</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKA

## Catatan Penting Aset

### 1. Aset yang bersinggungan dengan TNI

#### a. Tanah Lapangan Blang Padang

##### Latar Belakang

- 1) Masa Pemerintahan Kesultanan Iskandar Muda Tanah Lapangan Blang Padang berfungsi sebagai alun-alun keraton dan Sebagian digunakan untuk sawah (umong sara) yang hasilnya berupa padi dan kelapa diserahkan ke masjid raya untuk membiayai pemeliharaan masjid, insentif imam serta bilal.
- 2) Berdasarkan peta Blad Nomor 310 tahun 1906 dan peta Koetaradja tahun 1915 yang tertulis "Aloen-Aloen" Kesultanan Aceh, maka Tanah Blang Padang tidak pernah dikuasai oleh Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL), bahkan sampai dengan saat ini pun dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kota Banda Aceh, Blang Padang telah ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau.
- 3) Tanah Blang Padang telah terdaftar sebagai aset Pemerintah Aceh pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Registrasi 0001 dan Kode Barang 01.01.13.01.12 atau dengan perkataan lain sudah terdaftar pada Inventaris Kekayaan Daerah (IKD)

##### Upaya-upaya yang sudah dilakukan

- 1) Surat Gubernur Aceh No 06/SPRINT/2010, tgl. 16 Sep 2010, telah meminta kakanwil BPN Aceh utk segera mengeluarkan sertipikat Hak Pakai an. Pemerintah Aceh terhadap tanah Blang Padang seluas 89.802 m2.
- 2) Surat BPN No 1097/18-11.600/XI/2010, tgl. 19 Nov 2010, menyampaikan bahwa permohonan hak pakai atas nama Pemerintah Aceh secara yuridis formal, telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan per UU, namun ditemukan bukti fisik dan simbol diindikasikan dipasang oleh Kodam IM
- 3) Surat Gubernur Aceh No 590/44699 tgl 30 Sep 2013 kepada Presiden RI terkait permohonan penyelesaian sengketa tanah Blang Padang

##### Kondisi Saat ini

Sejak peresmian Kodam Iskandar Muda Tahun 2002, Lapangan Blang Padang diklaim sebagai tanah milik TNI-AD yang ditandai dengan adanya pemasangan plang yang berbunyi "Tanah Ini Milik TNI-AD" pada beberapa sudut lapangan, dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Pihak TNI



## **b. Tanah Anjong Mon Mata**

### **Latar Belakang**

Gubernur DI. Aceh dengan Surat No.451.1/15846 tgl. 14 Oktober 1980 mengajukan permintaan kepada Pangdam I/IM untuk menggunakan tanah Ki Angmor seluas 13.000 m<sup>2</sup> sebagai Wisma Tamu dan arena terbuka penunjang MTQ Tingkat Nasional Ke 12 Tahun 1981.

### **Permasalahan**

- 1) Status tanah hingga saat ini masih Pinjam Pakai sampai dengan penyelesaian ruislagh berdasarkan Surat Pangdam I/IM No. B/772/XI/1980, tgl. 20 November 1980
- 2) Sejak tahun 1980 rencana pengalihan kepemilikan dari Kodam I/IM kepada Pemerintah Aceh dengan cara Ruislag belum terealisasi

### **Kondisi saat ini**

Di atas Tanah Anjong Mon Mata tersebut berdiri bangunan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi pemerintah Aceh

## **c. Tanah dan Bangunan Kolam Renang Tirta Raya**

### **Latar Belakang**

- 1) Berdasarkan surat Pangdam IM No.B/79/II/1981 tgl. 9 Februari 1981, melaporkan kepada Kepala Staf TNI-AD di Jakarta terkait telah diberikan izin sementara kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh untuk menggunakan tanah HMAD.
- 2) Bangunan Kolam Renang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Aceh.

### **Permasalahan**

Pemerintah Aceh tidak bisa mengoperasikan Kolam Renang tersebut sehingga menjadi terbengkalai

### **Kondisi saat ini**

Saat ini sudah digunakan pihak TNI dengan dijadikan tempat parkir kendaraan-kendaraan milik TNI AD dan kegiatan-kegiatan TNI.

## **d. Kantor & GOR Koni Aceh**

Saat ini digunakan oleh KONI Aceh sebagai Kantor Sekretariat dan Pusat Latihan Olahraga, Tanah belum memiliki sertivikat.

## **2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh**

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.137 Gampong Persiapan Musara Alun / Desa Blang Kolak II Kab. Aceh Tengah dengan luas 7.393, sudah memiliki sertipikat dengan nomor 01.09.02.09.2.00005, permasalahan saat ini ditempati secara paksa oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanah, an. Ucok Morgan, upaya yang sudah dilakukan yaitu dengan bekerjasama pihak Kejati Aceh sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 21/PKS/2021 – B-09/L.1/GS/3/2021.



### **3. Tanah Milik Pemerintah Aceh yang digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Provinsi Aceh**

Pemerintah Aceh memiliki sebidang tanah yang terletak di Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh seluas 2.005 m<sup>2</sup> yang bersertifikat hak pakai nomor 17 tahun 2000 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Berkedudukan di Banda Aceh, di atas tanah tersebut kini sudah dibangun gudang dan kantor PT. Telekomunikasi Indonesia Provinsi Aceh tanpa ada suatu perjanjian apapun.

Dalam rangka mewujudkan penertiban Aset Pemerintah Aceh telah menyurati pihak Telkom dengan surat Sekretaris Daerah Aceh nomor 540/1238 tanggal 25 Januari 2019 perihal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Aceh oleh PT. Telkom dan surat nomor 590/5570 tanggal 31 Maret 2020 perihal Teguran atas Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Aceh oleh PT. Telkom. Kemudian pada bulan agustus 2021 Pemerintah Aceh melalui Bidang PBMA pada BPKA melakukan kembali upaya penertiban aset tersebut dengan cara *soft* yaitu dengan cara melakukan diskusi dan mediasi. Proses diskusi dan pembuktian bukti kepemilikan menghasilkan satu kesimpulan yaitu tanah tersebut benar milik Pemerintah Aceh dan pihak Telkom selanjutnya sepakat akan melakukan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Aceh dalam bentuk sewa.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Pemerintah Aceh melalui surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 028/22454 tanggal 29 Desember 2021 telah meminta pihak DJKN untuk melakukan penilaian Tanah dimaksud guna mendapatkan besaran nilai sewa yang harus dibayar oleh pihak Telkom dan pihak DJKN telah melakukan penilaian dan hasilnya telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh Nomor: S-25/WKN.01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dengan besaran sewa sebesar Rp59.695.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per tahun.

Berdasarkan laporan hasil penilaian di atas Pemerintah Aceh telah menyurati pihak PT. Telkom dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 028/2161 tanggal 14 Februari 2022 yang meminta pihak Telkom untuk segera melakukan proses pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan atas BMA dimaksud. Namun pihak PT. Telkom pada tanggal 22 April 2022 berkunjung ke Bidang PBMA pada BPKA dengan belum memberikan kepastian jawaban pengikatan diri dalam perjanjian pemanfaatan tanah dimaksud sehingga bidang PBMA mengultimatum jika sampai dengan tanggal 27 April 2022 pihak PT. Telkom belum memberikan kepastian maka Pemerintah Aceh akan mengambil sikap penindakan Penertiban Aset atas Tanah dimaksud.

### **4. Tanah milik Pemerintah Aceh yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura II**

Pemerintah Aceh memiliki tanah ± 46 Ha di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang berada dalam komplek Bandara Sultan Iskandar Muda dan saat ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura II dalam rangka penyelenggaraan Operasional dan Penerbangan *domestic* dan internasional. Tanah tersebut telah bersertifikat hak pakai dengan nomor 01.03.11.07.4.00013; 01.03.11.07.4.00012; 01.03.11.07.4.00005; 01.03.11.07.4.00010; 01.03.23.13.4.00001; 01.03.23.17.4.00003; 01.03.23.15.4.00003; 01.03.23.18.4.00007; 01.03.11.29.4.00003; 01.03.11.53.4.00005; 01.03.11.53.4.00006; 01.03.11.53.4.00004.

Pengelolaan tanah milik Pemerintah Aceh oleh PT. Angkasa Pura II dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Aceh dengan PT. Angkasa Pura II (persero) tentang



Pemanfaatan Barang Milik Aceh untuk Operasional dan Penerbangan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Nomor  $\frac{7/\text{MoU}/2016}{\text{MoU}.04.04/00.02/05/2016}$  tanggal 6 Mei 2016 yang berlaku selama dua tahun, nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman persiapan pelaksanaan pemanfaatan BMA.

Selanjutnya Pemerintah Aceh pada bulan Januari 2022 melakukan koordinasi lebih lanjut terhadap penggunaan tanah milik Pemerintah Aceh tersebut oleh pihak Angkasa Pura guna memastikan bagaimana tindak lanjut penggunaannya dan kita bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk KSP. Berdasarkan kesepakatan tersebut Pemerintah Aceh melalui Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 028/1616 tanggal 7 Februari 2022 meminta pihak DJKN Provinsi Aceh untuk melakukan penilaian sebagai dasar menentukan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

Atas surat Sekretaris Daerah Aceh di atas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh menugaskan tim penilai untuk melakukan *survey* lapangan dalam rangka kegiatan penilaian pada tanggal 11 s.d. 14 April 2022 dan kegiatan tersebut telah dilakukan dengan didampingi oleh pihak BPKA dan pihak PT Angkasa Pura II, dan saat ini Pemerintah Aceh sedang menunggu diterbitkannya laporan hasil penilaian.

#### **5. Tanah milik Pemerintah Aceh Eks. PT Pelindo**

Pemerintah Aceh memperoleh Aset eks PT. Pelindo berupa pelabuhan sabang beserta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya dengan nilai buku sebesar RP16.310.501.056,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berupa Pelabuhan Sabang kepada Pemerintah Aceh nomor  $\frac{\text{KU}.61/1/15/\text{P.I}-09}{17/\text{BA}/2009}$  tanggal 13 November 2009.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Sabang dengan suratnya Nomor 032/BPKS/239 tanggal 13 Juni 2013 menyurati Gubernur Aceh untuk mempercepat hibah aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS, berdasarkan surat tersebut Gubernur Aceh meminta Persetujuan Hibah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) dengan surat Nomor 032/43153 tanggal 13 Agustus 2013, namun saat itu belum ditanggapi.

Kemudian kepala BPKS Sabang dengan suratnya nomor 028/BPKS/241 tanggal 14 Juli 2014 menyurati kembali Gubernur Aceh untuk dapat segera menindaklanjuti percepatan hibah aset aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS dan Gubernur Aceh menindaklanjutinya dengan meminta kembali persetujuan Ketua DPR dengan surat Nomor 030/37726. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 dengan surat nomor 019.3/BPKS/133 kepala BPKS Sabang menyurati Ketua DPR untuk meminta kesediaan Audiensi tentang percepatan hibah aset aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS, kemudian Ketua DPR dengan suratnya nomor 160/2141 tanggal 13 Desember 2016 mengundang Gubernur Aceh dalam rangka pembahasan dan penjelasan terhadap salah satu aset yang dikelola oleh BPKS adalah pelabuhan CT-1 eks PT. Pelindo 1 yang telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh. Namun sampai saat ini persetujuan tersebut belum diterbitkan.

#### **6. Tanah milik Pemerintah Aceh di Pegasing Kab Aceh Tengah**

Pemerintah Aceh memiliki tanah di daerah kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah seluas 122 Ha berdasarkan sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 yang diperoleh dari hibah Departemen Perindustrian Republik Indonesia Tahun 1983 serta pencatatan atas nama Pemerintah Aceh tahun 1989.

Diatas tanah tersebut diantaranya terdapat bangunan milik Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab Aceh Tengah, Institusi Vertikal, Perguruan Tinggi Swasta dan sebagian digunakan oleh masyarakat setempat. Pemerintah Kab Aceh Tengah melalui surat Nomor 590/4007/DPKAT Tanggal 30 Oktober 2019 yang memohon untuk dihibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Aceh Tengah dengan konsekuensi semua permasalahan yang ada di atas tanah tersebut akan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dan Kemudian Pemerintah Aceh telah melakukan verifikasi dan proses hibah dengan menyurati Ketua DPRA untuk memberikan rekomendasi hibah kepada Pemerintah kab Aceh Tengah seluas 119 Ha Yang tidak digunakan oleh Pemerintah Aceh dengan surat Gubernur Nomor 028/14917 Tanggal 19 Oktober 2020 perihal Permohonan Pertimbangan atau Rekomendasi Hibah Barang Milik Aceh.

Berdasarkan surat Gubernur tersebut Pihak DPRA mengundang Pihak Pemerintah Aceh dan Pihak Pemerintah Kab Aceh Tengah untuk melakukan pembahasan dan kajian atas permohonan hibah dimaksud sebanyak dua kali, namun sampai saat ini rekomendasi tersebut belum diterbitkan.

#### 7. Aset Helicopter M1-2

Helicopter M1-2 semula merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang pengadaannya dilakukan pada masa Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Aset tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Aceh ketika Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si., menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena disita menjadi barang bukti. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tidak disebutkan secara jelas mengenai status Helicopter M1-2 tersebut. Saat ini aset tersebut berada di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda.

#### 5.3.4. Dana Cadangan Per 31 Desember 2021      Per 31 Desember 2020 Rp1.304.152.498.489,66      Rp1.244.360.989.281,02

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Dalam TA 2021 tidak dilakukan penyesuaian Dana Cadangan.

Nilai Dana Cadangan adalah saldo awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp1.244.360.989.281,02 setelah ditambah Jasa Giro dan Bunga Deposito sebesar Rp59.791.509.208,64 sehingga saldo akhir Dana Cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.304.152.498.489,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 136. Rincian Dana Cadangan

No	Jenis Dana Cadangan	Nama Bank	Bentuk Penempatan	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dana Cadangan Umum	Bank Aceh Syariah	Giro	010.01.02.570482-0	16.601.972.019,57	42.039.620.769,93
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640035-2	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	610-04.02.000001-0	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650045-1	26.492.376.242,00	26.492.376.242,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000043-3	29.360.000.000,00	29.360.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000065-4	15.677.228.025,00	15.677.228.025,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.04.000186-0	20.641.284.392,00	20.641.284.392,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.02.000436-3	42.039.000.000,00	-
2	Dana	Bank Aceh Syariah	Giro	010 01. 02 571159-1	23.756.683.830,83	58.794.796.924,24



No	Jenis Dana Cadangan	Nama Bank	Bentuk Penempatan	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
3	Abadi Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650035-8	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640036-4	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650047-4	39.113.895.337,00	39.113.895.337,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000041-1	41.675.000.000,00	41.675.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000067-6	22.918.394.032,00	22.918.394.032,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.04.000184-5	29.483.528.146,00	29.483.528.146,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.02.000437-4	58.794.000.000,00	-
		Bank Aceh Syariah	Giro	010 01.02.571160-6	19.434.435.831,26	49.581.164.778,85
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640034-1	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
	Dana Cadangan Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650046-2	29.065.352.992,00	29.065.352.992,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000042-2	34.195.000.000,00	34.195.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000066-5	18.047.253.823,00	18.047.253.823,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.04.000187-1	24.276.093.819,00	24.276.093.819,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.02.000438-5	49.581.000.000,00	-
<b>JUMLAH</b>					<b>1.304.152.498.489,66</b>	<b>1.244.360.989.281,02</b>

**5.3.4.1. Dana Cadangan Umum****Per 31 Desember 2021****Per 31 Desember 2020****Rp363.811.860.678,57****Rp347.210.509.428,93**

Dana Cadangan Umum per 31 Desember 2021 sebesar Rp363.811.860.678,57 bertambah dari saldo awal sebesar Rp347.210.509.428,93. Penambahan saldo sebesar Rp16.601.351.249,64 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Cadangan Umum yang ditempatkan pada Bank Aceh Syariah.

**5.3.4.2. Dana Abadi Pendidikan****Per 31 Desember 2021****Per 31 Desember 2020****Rp515.741.501.345,83****Rp491.985.614.439,24**

Dana Abadi Pendidikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp515.741.501.345,83, bertambah dari saldo awal sebesar Rp491.985.614.439,24. Penambahan saldo sebesar Rp23.755.886.906,59 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Abadi Pendidikan yang ditempatkan pada Bank Aceh.

Dana Abadi Pendidikan dibentuk pada Tahun 2004 yang berasal dari penyisihan Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat yang terakumulasi dalam SiLPA. Pada Tahun 2005 dan 2006 dilakukan penambahan terhadap Dana Cadangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/068/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/079/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2006.

**5.3.4.3. Dana Cadangan Pendidikan****Per 31 Desember 2021****Per 31 Desember 2020****Rp424.599.136.465,26****Rp405.164.865.412,85**

Dana Cadangan Pendidikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp424.599.136.465,26, bertambah dari saldo awal sebesar Rp405.164.865.412,85. Penambahan saldo sebesar Rp19.434.271.052,41 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke



Rekening Dana Cadangan Pendidikan yang ditempatkan pada Bank Aceh. Dana Cadangan Pendidikan dibentuk pada tahun 2005 yang berasal dari sisa Dana Pendidikan atas SiLPA TA 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/057/2005 tanggal 1 September 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Khusus Dana Cadangan Pendidikan Tahun 2005.

<b>5.3.5.</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>
		<b>Rp4.436.554.173.224,45</b>	<b>Rp4.306.927.702.335,42</b>

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.436.554.173.224,45 bertambah dari saldo awal sebesar Rp4.306.927.702.335,42. Penambahan saldo sebesar Rp129.626.470.889,03 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain, dengan rincian sebagai berikut.

<b>5.3.5.1.</b>	<b>Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>
		<b>Rp0,00</b>	<b>Rp717.751,00</b>

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, berkurang dari saldo awal sebesar Rp717.751,00. Pengurangan Tagihan Penjualan Angsuran karena sudah reklas ke Aset Lancar-Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp717.751,00 atas nama Sirtu Hadi.

<b>5.3.5.2.</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>Per 31 Desember 2020</b>
		<b>Rp25.582.204.954,43</b>	<b>Rp25.601.678.307,43</b>

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.582.204.954,43 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp24.945.748.329,43 terdiri dari:
  - 1) Kepada Sdr. H, selaku Kuasa Bendahara Umum Aceh sebesar Rp24.749.248.329,43. Terhadap Kerugian Daerah, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pembebanan Sementara Kerugian Keuangan Daerah (SKPS) sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 951/633/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Atas kerugian tersebut telah dilakukan penelusuran oleh Inspektorat Aceh.
  - 2) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp196.500.000,00 oleh Sdr. IHS selaku bendahara BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak, pada Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp19.473.353,00. Sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2021 sebesar Rp177.026.647,00.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara an. Sfw per 31 Desember 2021 sebesar Rp655.929.978,00 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

**5.3.5.3. Kerjasama Pemanfaatan** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp363.881.861.600,00** **Rp188.012.963.600,00**

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp363.881.861.600,00 terdiri dari Sewa sebesar Rp119.086.633.747,00 dan Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp244.795.227.853,00.

**5.3.5.3.1. Kemitraan – Sewa** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp119.086.633.747,00** **Rp0,00**

Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

Kemitraan - Sewa per 31 Desember 2021 sebesar Rp119.086.633.747,00, terdapat pada SKPA sebagai berikut.

1. Dinas Perhubungan Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.678.248.200,00 merupakan Sewa antara Pemerintah Aceh dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang terdiri dari:

**Tabel 5. 137. Aset Kemitraan-sewa dengan PT. ASDP Indonesia Ferry**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Kapal Motor Penumpang BRR untuk Lintasan Ulhee Lheue – Balohan Sabang	26.426.603.700,00	-
2	Kapal Motor Penumpang Aceh Hebat 2 untuk Lintasan Ulhee Lheue - Balohan Sabang	61.251.644.500,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>87.678.248.200,00</b>	<b>-</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Aceh

- a. Perjanjian Sewa Nomor 49/PKS/2021 dan Nomor Sperj.307/HK.102/ASDP-2021 tanggal 11 Oktober 2021 yaitu sewa Kapal KMP. BRR 1000 GT dengan nilai aset kapal sebesar Rp26.426.603.700,00 rute Lintasan Ulhee Lheue- Balohan Sabang dan sebaliknya dengan nilai perjanjian sewa sebesar Rp8.000.850.000,00 selama 5 tahun dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan nomor STS 00024/STS/2.15.0.00.0.00.01/A01/IV/2021.
  - b. Perjanjian Sewa Nomor 02/PKS/2021 dan Nomor SPerj.02/HK.107/ASDP-BNA/2021 tanggal 29 Januari 2021 yaitu Sewa KMP Aceh Hebat 2 dengan nilai aset kapal sebesar Rp61.251.644.500,00 rute Lintasan Ulhee Lheue- Balohan Sabang dan sebaliknya dengan nilai perjanjian sewa sebesar Rp1.582.000.000,00 selama 1 tahun dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 27 Januari 2021 dengan nomor STS 00009/STS/2.15.0.00.0.00.01/A02/I/2021.
2. Aset Kemitraan Sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai Pengelola per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.408.385.547,00 yaitu Perjanjian Sewa antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Tgk. Fakinah berupa sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Aceh untuk Rumah Sakit Swasta yang beralamat di Jl. Sudirman Geuceu Kayee Jato Banda Aceh, berdasarkan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Tgk. Fakinah No.15/PKS/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 138. Aset Kemitraan-sewa dengan Yayasan Tgk. Fakinah**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah seluas 11.337 M <sup>2</sup>	11.337.000.000,00	-
2	Bangunan bidang permanen seluas 7.280,86 M <sup>2</sup>	19.027.856.046,00	-
3	Bangunan Gudang Sampah B3	37.273.000,00	-
4	Bangunan Semi Permanen (Kantin)	1,00	-
5	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	521.698.500,00	-
6	Ramp/Jalan Pasien	484.558.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>31.408.385.547,00</b>	<b>-</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Besaran sewa dalam Perjanjian sebesar Rp670.475.000,00 per tahun dengan total besaran sewa untuk 5 (lima) tahun dihitung sejak 3 Oktober 2020 sampai 2 Oktober 2025 sebesar Rp3.352.375.000,00. Penyetoran uang sewa tahap pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 disetor ke kas daerah tanggal 15 Januari 2021 dengan nomor STS 04175/STS/5.02.0.00.0.00.01/A01/I/2021 dan sisanya sebesar Rp1.352.375.000,00 disetor ke kas daerah tanggal 22 November 2021 dengan nomor STS 16468/STS/5.02.0.00.0.00.01/A01/IV/2021.

#### 5.3.5.3.2. Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan

**Per 31 Desember 2021**  
**Rp244.795.227.853,00**

**Per 31 Desember 2020**  
**Rp188.012.963.600,00**

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Aceh dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

Kemitraan - Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp244.795.227.853,00, terdapat pada SKPA sebagai berikut.

1. Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp114.617.253.500,00 adalah kerjasama atas pemanfaatan Aset Kapal Pemerintah Aceh sebesar Rp114.617.253.500,00 yang terdiri dari:

a. Kerjasama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat 1

Berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil Nomor 552/220/HK.102/04/01/ASDP.SKL/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Kerjasama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Aceh Hebat 1, jangka waktu kerja sama sampai tanggal 31 Desember 2021.

b. Kerjasama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat 3

Berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil Nomor 552/221/HK.102/04/02/ASDP.SKL/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang



Kerjasama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Aceh Hebat 3, jangka waktu kerja sama sampai tanggal 31 Desember 2021.

**Tabel 5. 139. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Kapal Ferry Ro-Ro untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue	-	26.426.603.700,00
2	Kapal Motor Penumpang Aceh Hebat 1 untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue	75.664.301.000,00	-
3	Kapal Kapal Motor Penumpang Aceh Hebat 3 untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak	38.952.952.500,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>114.617.253.500,00</b>	<b>26.426.603.700,00</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Aceh

Kapal Aceh Hebat 1 dan kapal Aceh Hebat 3 Milik Pemerintah Aceh yang dioperasikan oleh PT. ASDP merupakan kapal yang berlayar di jalur perintis Lintasan Meulaboh - Sinabang dan Lintasan Singkil – Pulau Banyak yang mendapat subsidi operasional dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 552.3/05/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Aceh.

- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp59.816.234.353,00 adalah kerjasama atas pemanfaatan Barang Milik Aceh dengan PT. Pembangunan Aceh berupa Tanah dan Bangunan beserta fasilitas pendukung di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, yang terletak di kampung Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. Pembangunan Aceh (PEMA) No.47/PKS/2020 tanggal 12 Maret 2020 dengan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 140. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT. Pembangunan Aceh – KIA Ladong**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah seluas 656.800 M <sup>2</sup>	47.469.239.553,00	47.469.239.553,00
2	Peralatan dan Mesin	90.615.000,00	90.615.000,00
3	Gedung dan Bangunan	7.553.687.072,00	7.553.687.072,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.646.362.477,00	4.646.362.477,00
5	Aset Tetap Lainnya	56.330.251,00	56.330.251,00
<b>Jumlah</b>		<b>59.816.234.353,00</b>	<b>59.816.234.353,00</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Perjanjian kerjasama berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dihitung sejak perjanjian kerjasama di tandatangani. PT. Pembangunan Aceh (PEMA) berkewajiban memberikan pembagian laba hasil keuntungan atau laba bersih sebesar 15% (lima



belas perseratus) dan /atau deviden setelah dipotong pajak berdasarkan hasil Audit dari Akuntan Publik.

Keterlambatan pembagian hasil keuntungan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam perjanjian kerjasama akan dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) perhari maksimal 90 hari kalender, kecuali dalam keadaan kahar.

- d. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp70.361.740.000,00 adalah kerjasama atas pemanfaatan Barang Milik Aceh dengan PT. Pembangunan Aceh-KEK Arun berupa Lahan seluas 66.400 m<sup>2</sup> dan *Gas Turbine Generator (GTG)* beserta aksesoris yang terletak di Komplek Eks PT. Arun Lhokseumawe sesuai Perjanjian sewa Nomor 73/PKS/2020/-/006/PEMA-PKS/V/2020 Tanggal 4 Mei 2020 sebanyak 1 (unit) Tanah sebesar Rp6.115.440.000,00 dan tiga unit Peralatan Mesin dengan nilai Rp64.246.300.000, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 141. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT. Pembangunan Aceh – KEK Arun**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah seluas 11.337 M <sup>2</sup>	-	11.337.000.000,00
2	Bangunan bidang permanen seluas 7.280,86 M <sup>2</sup>	-	19.027.856.046,00
3	Bangunan Gudang Sampah B3	-	37.273.000,00
4	Bangunan Semi Permanen (Kantin)	-	1,00
5	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	-	521.698.500,00
6	Ramp/Jalan Pasien	-	484.558.000,00
7	Tanah seluas 66.400 M <sup>2</sup>	6.115.440.000,00	6.115.440.000,00
8	<i>Gas Turbine Generator (GTG)</i>	21.415.433.334,00	21.415.433.333,33
9	<i>Gas Turbine Generator (GTG)</i>	21.415.433.333,00	21.415.433.333,33
10	<i>Gas Turbine Generator (GTG)</i>	21.415.433.333,00	21.415.433.333,33
<b>Jumlah</b>		<b>70.361.740.000,00</b>	<b>101.770.125.547,00</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan Tahun 2020 sebesar Rp31.408.385.547,00 yaitu Aset Tanah sebesar Rp11.337.000.000,00, Bangunan Bidang Permanen sebesar Rp19.027.856.046,00, Bangunan Gudang Sampah B3 sebesar Rp37.273.000,00, Bangunan Semi Permanen sebesar Rp1,00, Instalasi Pengolahan Air Limbah sebesar Rp521.698.500,00 dan Jalan Pasien sebesar Rp484.558.000,00, telah direklas ke Kemitraan-Sewa pada Yayasan Tgk. Fakinah TA 2021.

Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan Tahun 2021 sebesar Rp70.361.740.000,00 terdiri dari:

- Tanah seluas 66.400 m<sup>2</sup> beralamat di Jl. Batuphat Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe Rp6.115.440.000,00, Tahun Perolehan 2009.
- Gas Turbine Generator (GTG)* 3x22 MW beserta aksesoris, lokasi di PT. Arun Lhokseumawe senilai Rp21.415.433.334,00, Tahun Perolehan 2009.
- Gas Turbine Generator (GTG)* 3x22 MW beserta aksesoris, lokasi di PT. Arun Lhokseumawe senilai Rp21.415.433.333,00, Tahun Perolehan 2009.

- d. *Gas Turbine Generator* (GTG) 3x22 MW beserta aksesories, terima hibah, lokasi di PT. Arun Lhokseumawe senilai Rp21.415.433.333,00, Tahun Perolehan 2009.

Kerjasama pemanfaatan dilakukan dengan pembagian laba hasil keuntungan atau laba bersih kepada Pemerintah Aceh sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan/atau deviden setelah di potong pajak berdasarkan dari akuntan publik. Jangka waktu kerjasama berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian di tanda tangani.

**5.3.5.4. Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**(Rp135.551.276.525,89)** **(Rp78.536.124.236,20)**

Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp135.551.276.525,89) merupakan perhitungan Penyusutan kerjasama pemanfaatan Pemerintah Aceh dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 142. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<b>Akumulasi Sewa</b>		<b>(32.965.157.241,80)</b>	
1	PT. ASDP INDONESIA FERRY	(26.303.474.460,00)	-
2	Yayasan Tgk. Fakinah	(6.661.682.781,80)	-
<b>Akumulasi Kerja Sama Pemanfaatan</b>		<b>(102.586.119.284,09)</b>	<b>(78.536.124.236,20)</b>
1	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) Ladong	(3.954.643.234,09)	(2.777.446.807,75)
3	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) KEK ARUN	(64.246.300.000,00)	(70.473.356.688,45)
4	PT. ASDP INDONESIA FERRY	(34.385.176.050,00)	(5.285.320.740,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(135.551.276.525,89)</b>	<b>(78.536.124.236,20)</b>

**5.3.5.5. Aset Tak Berwujud** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp64.093.897.987,00** **Rp30.397.239.283,00**

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini merupakan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan sumber daya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, rancangan dan implementasi suatu sistem atau proses yang baru, dan kekayaan intelektual. Entitas berupaya untuk melakukan riset dan pengembangan. Terlebih bagi entitas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan riset dan pengembangan. Namun tidak semua hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut merupakan Aset Tak Berwujud.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.093.897.987,00 merupakan *software*, dokumen rancangan pembangunan, kajian-kajian survei dan tata ruang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 143. Rincian Aset Tak Berwujud**

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<b>Lisensi dan frenchise</b>			
1	Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin	24.750.000,00	24.750.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandian Aceh	104.450.000,00	104.450.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	4.000.000,00	-
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	30.870.219.366,00	-
<b>Software</b>			
1	Dinas Pendidikan Aceh	1.465.685.760,00	1.265.775.610,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	243.349.000,00	243.349.000,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	48.480.000,00	48.480.000,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	632.498.000,00	632.498.000,00
5	Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	3.943.403.379,00	3.943.403.379,00
6	Rumah Sakit Jiwa	1.422.259.725,00	1.422.259.725,00
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	308.204.245,00	308.204.245,00
8	Dinas Pengairan Aceh	106.607.600,00	106.607.600,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	76.500.000,00	76.500.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	5.575.185,00	5.575.185,00
11	Dinas Sosial Aceh	211.980.000,00	211.980.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	25.850.000,00	25.850.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	47.480.000,00	47.480.000,00
14	Dinas Pangan Aceh	101.500.000,00	101.500.000,00
15	Dinas Pertanahan Aceh	61.325.000,00	61.325.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	8.830.001,00	8.830.001,00
17	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	647.866.000,00	647.866.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	59.705.000,00	59.705.000,00
19	Dinas Perhubungan Aceh	4.874.803.000,00	4.727.472.900,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	2.772.174.700,00	2.772.174.700,00
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	38.280.000,00	38.280.000,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	430.415.625,00	434.415.625,00
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	283.925.000,00	283.925.000,00
24	Sekretariat Majelis Adat Aceh	44.500.000,00	44.500.000,00
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	452.620.988,00	4.980.000,00
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	438.744.400,00	388.844.000,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	176.505.000,00	285.295.000,00
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	634.731.000,00	634.731.000,00
29	Dinas Peternakan Aceh	84.250.000,00	84.250.000,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	183.015.000,00	183.015.000,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	73.926.700,00	55.449.000,00
32	Sekretariat Daerah Aceh	860.258.700,00	860.258.700,00
33	Sekretariat DPR	273.281.000,00	273.281.000,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.109.935.000,00	1.109.935.000,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	5.932.247.000,00	5.651.857.000,00
36	Badan Kepegawaian Aceh	406.301.113,00	406.301.113,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	103.580.000,00	103.580.000,00
38	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	60.500.000,00	60.500.000,00
39	Inspektorat Aceh	21.000.000,00	21.000.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	-	59.310.000,00
41	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	314.167.000,00	114.567.000,00
42	Dinas Syariah Islam Aceh	39.160.000,00	39.160.000,00
43	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	146.800.000,00	146.800.000,00
44	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	172.535.000,00	172.535.000,00
45	Sekretariat Baitul Mal Aceh	263.350.000,00	263.350.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<b>Kajian</b>			
1	Dinas Perhubungan Aceh	268.400.000,00	268.400.000,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandian Aceh	674.660.000,00	674.660.000,00
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	910.000.000,00	-
<b>Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya</b>			
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	57.650.000,00	57.650.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	730.873.500,00	730.873.500,00
<b>Hak Cipta</b>			
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	632.500.000,00	-
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	99.500.000,00	99.500.000,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	108.790.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>64.093.897.987,00</b>	<b>30.397.239.283,00</b>

**5.3.5.6. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud** **Per 31 Desember 2021** **Per 31 Desember 2020**  
**(Rp36.013.087.961,50)** **(Rp26.280.429.623,50)**

Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 144. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise</b>			
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	(7.717.554.841,50)	-
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software</b>			
1	Dinas Pendidikan Aceh	(1.312.346.997,50)	(1.210.613.310,00)
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	(216.159.750,00)	(188.970.500,00)
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	(48.480.000,00)	(48.480.000,00)
4	Dinas Kesehatan Aceh	(607.803.000,00)	(519.363.000,00)
5	Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	(3.760.818.340,50)	(2.872.483.302,00)
6	Rumah Sakit Jiwa	(1.422.259.725,00)	(1.373.634.725,00)
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	(308.204.245,00)	(306.801.183,75)
8	Dinas Pengairan Aceh	(81.830.100,00)	(57.052.600,00)
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	(76.500.000,00)	(76.500.000,00)
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	(5.575.185,00)	(4.181.388,75)
11	Dinas Sosial Aceh	(211.980.000,00)	(199.555.000,00)
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	(25.850.000,00)	(25.850.000,00)
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	(47.480.000,00)	(47.480.000,00)
14	Dinas Pangan Aceh	(101.500.000,00)	(79.375.000,00)
15	Dinas Pertanahan Aceh	(45.993.750,00)	(30.662.500,00)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	(8.830.001,00)	(8.830.001,00)
17	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	(628.341.000,00)	(579.769.900,00)
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	(59.705.000,00)	(59.705.000,00)
19	Dinas Perhubungan Aceh	(4.662.415.700,00)	(4.792.093.450,00)
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	(2.772.174.700,00)	(2.772.174.700,00)
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	(38.280.000,00)	(38.280.000,00)
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	(430.415.625,00)	(415.915.625,00)
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	(283.925.000,00)	(227.918.750,00)



No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
24	Sekretariat Majelis Adat Aceh	(44.500.000,00)	(44.500.000,00)
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	(452.620.988,00)	(4.980.000,00)
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	(401.319.100,00)	(356.435.250,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	(132.367.500,00)	(127.926.250,00)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	(634.731.000,00)	(634.731.000,00)
29	Dinas Peternakan Aceh	(84.250.000,00)	(75.562.500,00)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	(183.015.000,00)	(170.992.500,00)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	(67.913.600,00)	(55.449.000,00)
32	Sekretariat Daerah Aceh	(835.343.700,00)	(801.766.200,00)
33	Sekretariat DPRA	(273.281.000,00)	(273.281.000,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	(1.100.903.750,00)	(1.091.872.500,00)
35	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	(5.581.751.250,00)	(5.391.802.125,00)
36	Badan Kepegawaian Aceh	(406.301.113,00)	(406.301.113,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	(103.580.000,00)	(92.635.000,00)
38	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	(60.500.000,00)	(60.500.000,00)
39	Inspektorat Aceh	(21.000.000,00)	(21.000.000,00)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	-	(59.310.000,00)
41	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	(155.717.000,00)	(98.400.250,00)
42	Dinas Syariat Islam Aceh	(39.160.000,00)	(39.160.000,00)
43	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	(146.800.000,00)	(146.800.000,00)
44	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	(172.535.000,00)	(172.535.000,00)
45	Sekretariat Baitul Mal Aceh	(241.075.000,00)	(218.800.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(36.013.087.961,50)</b>	<b>(26.280.429.623,50)</b>

Sumber : sipkd.acehprov.go.id

Sehingga nilai Aset Tak Berwujud Netto sebesar Rp28.080.810.025,50 yang diperoleh dari nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp64.093.897.987,00 dikurangi nilai Amortisasi sebesar (Rp36.013.087.961,50). Rincian Aset Tak Berwujud dan Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

**5.3.5.7. Aset Lain-lain** **Per 31 Desember 2021**  
**Rp4.154.560.573.170,41** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp4.167.731.657.253,69**

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.154.560.573.170,41 dengan nilai perolehan sebesar Rp5.464.614.806.888,43 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp4.167.731.657.253,69 dengan nilai perolehan sebesar Rp5.583.111.841.331,70 yang terbagi atas Aset rusak berat/usang dan Aset Tetap yg tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.

**5.3.5.7.1. Aset Rusak Berat/Usang** **Per 31 Desember 2021**  
**Rp462.569.180.513,60** **Per 31 Desember 2020**  
**Rp419.634.085.663,08**

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp462.569.180.513,60 tidak dilakukannya perhitungan penyusutan terdiri dari:

**Tabel 5. 145. Rincian Rusak Berat/Usang**

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	307.676.993.255,44	56.041.963.723,34	23.736.774.817,82	339.982.182.160,95
2	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	95.904.028.104,07	4.865.074.250,00	396.343.253,00	100.372.759.101,07

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	6.745.704.342,00	6.064.570.470,00	90.600.000,00	12.719.674.812,00
4	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	9.307.359.961,57	187.204.478,00	-	9.494.564.439,57
<b>Jumlah</b>		<b>419.634.085.663,08</b>	<b>67.158.812.921,34</b>	<b>24.223.718.070,82</b>	<b>462.569.180.513,59</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Berdasarkan tabel diatas terjadinya penambahan dan pengurangan pada aset rusak berat/usang disebabkan oleh:

Penambahan Saldo Aset Rusak Berat/Usang di sebabkan oleh:

- Koreksi pencatatan aset lain lain sebesar Rp2.420.440.304,57.
- Reklasifikasi sebesar Rp64.738.372.616,77 terdiri dari Antar Aset Lainnya sebesar Rp21.524.785.564,00 dan Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp 43.213.587.052,77.

Pengurangan Saldo Aset Rusak Berat/Usang di sebabkan oleh:

- Penghapusan barang milik aceh dikarenakan musnah sebesar Rp20.221.809.951,00.
- Penghapusan barang milik aceh dikarenakan Hibah sebesar Rp1.427.946.900,00.
- Koreksi pencatatan aset lain lain sebesar Rp1.461.137.219,82.
- Reklasifikasi sebesar Rp1.112.824.000,00 terdiri dari Antar Aset Lainnya sebesar Rp557.824.000,00 dan Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp555.000.000,00.

Rincian Aset Rusak Berat pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

#### 5.3.5.7.2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah. Per 31 Desember 2021 Rp3.691.991.392.656,81 Per 31 Desember 2020 Rp3.748.097.571.590,61

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Aceh per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.691.991.392.656,81 yang terdiri dari: Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang Sebesar Rp104.473.092.652,53, Aset Lain-lain Akan Dihilangkan sebesar Rp1.411.470.092.965,31 dan Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp2.176.048.207.038,97, sedangkan nilai perolehannya sebesar Rp5.002.045.626.374,84 terdiri dari: Aset Tidak Ditemukan Fisiknya (TDF)/Hilang sebesar Rp104.473.092.652,53, Rencana Hibah sebesar Rp2.688.611.157.449,31 dan Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp2.208.961.376.273,00, untuk nilai akumulasi penyusutan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 5. 146. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang/TDF	104.473.092.652,53	-	104.473.092.652,53
2	Aset Lain-lain Akan Dihilangkan/Rencana Hibah	2.688.611.157.449,31	(1.277.141.064.484,00)	1.411.470.092.965,31
3	Aset Lain-lain Lainnya	2.208.961.376.273,00	(32.913.169.234,03)	2.176.048.207.038,97
<b>Jumlah</b>		<b>5.002.045.626.374,84</b>	<b>(1.310.054.233.718,03)</b>	<b>3.691.991.392.656,81</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

1. Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang/TDF per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.473.092.652,53 rincian SKPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. 147. Rincian Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang/TDF**

NO	SKPA	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Dinas Pendidikan Aceh	5.561.504.644,00	5.557.484.644,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	5.481.069.049,00	5.856.430.049,00
3	BLUD Rumah Sakit Jiwa	475.000.000,00	4.277.633.643,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	949.188.440,00	949.188.440,00
5	Dinas Pengairan Aceh	92.020.000,00	92.020.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	3.114.370.000,00	3.114.370.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	16.850.000,00	16.850.000,00
8	Dinas Sosial Aceh	256.800.000,00	1.973.496.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	329.895.697,00	309.980.177,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	128.515.000,00	128.515.000,00
11	Dinas Perhubungan Aceh	4.911.469.353,00	12.056.056.543,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	288.000.000,00	288.000.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	232.800.000,00	302.220.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.537.433.286,00	1.537.433.286,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	749.536.514,00	749.536.514,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	10.066.237.588,00	10.066.237.588,00
17	Dinas Syariah Islam Aceh	1.315.584.560,00	1.315.584.560,00
18	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	188.306.000,00	188.306.000,00
19	Sekretariat Baitul Mal Aceh	-	11.000.000,00
20	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	17.240.000,00	17.240.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	6.689.896.100,00	4.827.611.100,00
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.322.321.253,00	1.909.754.403,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	251.465.400,00	251.465.400,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.066.280.455,00	1.066.280.455,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	341.950.000,00	341.950.000,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	660.642.641,00	660.642.641,00
27	Badan Kepegawaian Aceh	1.678.226.400,00	1.678.226.400,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	52.000.000,00	52.000.000,00
29	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	14.790.698,00	-
30	Sekretariat Daerah Aceh	55.636.262.519,53	69.649.120.123,53
31	Sekretariat DPRA	564.195.040,00	283.837.840,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	483.242.015,00	483.242.015,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>104.473.092.652,53</b>	<b>130.011.712.821,53</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

2. Aset Lain-lain Akan Dihilangkan/Rencana Hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.411.470.092.965,31 dari hasil verifikasi bidang penatausahaan aset terhadap 20 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan nilai perolehan sebesar Rp2.688.611.157.449,31 rincian SKPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. 148. Rincian Aset Lain-lain Akan Dihilangkan/Rencana Hibah**

No	SKPA	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Dinas Pendidikan Aceh	364.500.218.423,60	(197.504.801.613,53)	166.995.416.810,07
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	41.540.977.000,00	-	41.540.977.000,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	187.897.250.384,21	(13.342.621.435,39)	174.554.628.948,82
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	6.912.732.917,00	(6.912.732.917,00)	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan	465.375.106.587,00	(432.392.723.805,90)	32.982.382.781,10



No	SKPA	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	Penataan Ruang Aceh			
6	Dinas Pengairan Aceh	344.971.983.865,41	(254.059.956.418,21)	90.912.027.447,20
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	642.054.745.099,65	(215.268.708.298,43)	426.786.036.801,22
8	Dinas Sosial Aceh	1.698.026.000,00	(373.565.720,00)	1.324.460.280,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	118.990.304.513,00	(33.520.302.851,96)	85.470.001.661,04
10	Dinas Pangan Aceh	1.329.787.400,00	(1.329.787.400,00)	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	32.277.541.220,00	(5.494.395.083,33)	26.783.146.136,67
12	Dinas Perhubungan Aceh	171.766.622.408,00	(74.184.171.795,52)	97.582.450.612,48
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	60.322.213.403,00	(7.507.085.585,86)	52.815.127.817,14
14	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.291.962.907,00	(32.719.678,83)	1.259.243.228,17
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	43.940.077.223,44	(2.965.421.177,01)	40.974.656.046,43
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.064.250.000,00	(212.850.000,00)	851.400.000,00
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	58.772.144.244,00	(21.325.377.626,98)	37.446.766.617,02
18	Sekretariat Daerah Aceh	567.344.000,00	(567.344.000,00)	-
19	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	143.333.620.354,00	(10.146.499.076,05)	133.187.121.277,95
20	Sekretariat Baitul Mal Aceh	4.249.500,00	-	4.249.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.688.611.157.449,31</b>	<b>(1.277.141.064.484,00)</b>	<b>1.411.470.092.965,31</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

3. Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.159.259.449.678,97 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.192.172.618.913,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp32.913.169.234,03 rincian SKPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. 149. Rincian Aset Lain-lain**

No	SKPA	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	89.297.654.279,00	(19.720.513.325,08)	69.577.140.953,92
2	Dinas Sosial Aceh	2.704.537.000,00	(497.352.900,00)	2.207.184.100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.526.954.000,00	(50.506.800,00)	1.476.447.200,00
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	26.298.861.500,00	(2.232.013.340,00)	24.066.848.160,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	776.460.000,00	(453.522.000,00)	322.938.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2.070.330.752.134,00	(9.216.820.868,95)	2.061.113.931.265,05
7	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.237.400.000,00	(742.440.000,00)	494.960.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.192.172.618.913,00</b>	<b>(32.913.169.234,03)</b>	<b>2.159.259.449.678,97</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Dari Total Aset Lain-lain sebesar Rp2.176.048.207.038,97 pada BPKA diantaranya merupakan Aset Lain-lain pada Komisi Independen Pemilu (KIP), Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS) dan Badan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BPKapet) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 150. Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BPKapet**

NO	SKPA	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan,, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	KIP	717.800.000,00	3.818.367.160,00	2.120.895.000,00	-	441.705.000,00	7.098.767.160,00
2	BPKS	-	3.316.940.000,00	5.526.431.000,00	74.445.000,00	-	8.917.816.000,00
3	BPKapet	-	757.357.000,00	-	14.817.200,00	-	772.174.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>717.800.000,00</b>	<b>7.892.664.160,00</b>	<b>7.647.326.000,00</b>	<b>89.262.200,00</b>	<b>441.705.000,00</b>	<b>16.788.757.360,00</b>

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Aset *Extracomtable* Aset Lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tetap namun masih dicatat dalam Laporan Barang Milik Aceh sampai dengan akhir Tahun 2021 tercatat sebesar Rp46.674.046.458,91. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

### 5.3.6. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu dan muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dapat diklasifikasikan kedalam:

- Kewajiban jangka pendek diharapkan dapat dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.
- Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

#### 5.3.6.1. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 **Rp519.675.649.403,62** Per 31 Desember 2020 **Rp3.037.487.998.856,06**

Kewajiban Jangka Pendek tahun 2021 sebesar Rp519.675.649.403,62 mengalami penurunan sebesar Rp2.517.812.349.452,44 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.037.487.998.856,06, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 151. Kewajiban Jangka Pendek**

No	URAIAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Bertambah/ Berkurang
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	84.000.000,00	337.725.258,00	(253.725.258,00)
2	Pendapatan di terima dimuka	11.473.298.011,00	2.595.633.905.910,65	(2.584.160.607.899,65)
3	Utang Belanja	200.715.107.973,62	435.662.487.189,41	(234.947.379.215,79)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	307.403.243.419,00	5.853.880.498,00	301.549.362.921,00
<b>Jumlah</b>		<b>519.675.649.403,62</b>	<b>3.037.487.998.856,06</b>	<b>(2.517.812.349.452,44)</b>

Sumber : sipkd.acehprov.go.id

#### 5.3.6.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2021 sebesar Rp84.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.293.952.226,01 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp337.725.258,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 152. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

No	SKPA	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/ berkurang
1	Dinas Pendidikan Aceh	84.000.000,00	310.839.653,00	(226.839.653,00)
2	Dinas Syariat Islam Aceh	-	26.885.605,00	(26.885.605,00)
<b>Jumlah</b>		<b>84.000.000,00</b>	<b>337.725.258,00</b>	<b>(253.725.258,00)</b>

Sumber : sipkd.acehprov.go.id

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Pendidikan Aceh berupa Pengembalian uang dana BOS pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kabupaten Aceh Barat yang sudah tutup dan disetor ke Kas Negara oleh bendahara BOS Sekolah pada tanggal 2 Februari 2022.

### 5.3.6.1.2. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp11.473.298.011,00 mengalami Penurunan sebesar Rp2.584.160.607.899,65 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.595.633.905.910,65, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 153. Pendapatan diterima dimuka**

No	SKPA	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/ Berkurang
<b>Pendapatan Diterima Dimuka SKPA</b>				
1	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh	10.424.657,53	-	10.424.657,53
2	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	3.268.219,18	-	3.268.219,18
3	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	386.301,37	398.087,43	(11.786,06)
4	Dinas Pertanahan Aceh	2.047.506,85	2.047.506,85	-
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.454.794,52	1.454.794,52	-
6	Dinas Perhubungan Aceh	7.517.544.446,28	1.440.875.513,00	6.076.668.933,28
7	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	2.479.452,05	-	2.479.452,05
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	2.943.561,64	2.959.809,26	(16.247,62)
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	639.165.769,00	843.023.892,15	(203.858.123,15)
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	13.484.931,51	11.726.027,40	1.758.904,11
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	4.541.095,89	4.541.096,00	(0,11)
12	Sekretariat Daerah	22.652.054,79	24.763.149,18	(2.111.094,39)
13	Sekretariat DPRA	1.138.138,69	5.753.923,36	(4.615.784,67)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.890.410,96	3.904.109,59	(13.698,63)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	10.158.904,11	10.158.904,11	-
16	Dinas Syariat Islam Aceh	68.000.000,00	-	68.000.000,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2.685.737.875,94	16.151.456,72	2.669.586.419,22
<b>18</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Aceh :</b>	<b>-</b>	<b>2.576.713.297.982,61</b>	<b>(2.576.713.297.982,61)</b>
	- Sisa Otsus s.d 2019	-	1.382.904.617.657,00	(1.382.904.617.657,00)
	- Otsus s.d 2020	-	1.178.724.353.898,23	(1.178.724.353.898,23)
	- Otsus 2021	-	-	-
	- Sisa Dana DAK Fisik	-	15.084.326.427,38	(15.084.326.427,38)
	<b>Sisa Dana DAK Non Fisik</b>	<b>-</b>	<b>15.184.893.503,36</b>	<b>(15.184.893.503,36)</b>
	- Bantuan Operasional Kesehatan	-	13.371.606.357,00	(13.371.606.357,00)
	- Peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah	-	1.353.278.021,00	(1.353.278.021,00)
	- Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	16.455.932,00	(16.455.932,00)
	- DAK Non Fisik Bidang Pariwisata	-	443.553.193,36	(443.553.193,36)
<b>Jumlah I</b>		<b>10.989.318.120,31</b>	<b>2.594.265.949.755,54</b>	<b>(2.583.276.631.635,23)</b>

No	SKPA	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/ Berkurang
<b>Pendapatan Diterima DimukaBLUD</b>				
1	Rumah Sakit Umum DR. ZainoelAbidin	461.678.520,83	1.323.515.059,22	(861.836.538,39)
2	Rumah Sakit Ibu dan Anak	22.301.369,86	44.441.095,89	(22.139.726,03)
	<b>Jumlah II</b>	<b>483.979.890,69</b>	<b>1.367.956.155,11</b>	<b>(883.976.264,42)</b>
	<b>Jumlah I + II</b>	<b>11.473.298.011,00</b>	<b>2.595.633.905.910,65</b>	<b>(2.584.160.607.899,65)</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

### 5.3.6.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja tahun 2021 sebesar Rp200.715.107.973,62 mengalami penurunan sebesar Rp234.947.379.215,79 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp435.662.487.189,41, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 154. Rincian Utang Belanja**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/ Berkurang
1	Utang Belanja Pegawai	40.975.294.986,86	196.628.061,00	40.778.666.925,86
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	112.825.000.553,00	124.692.711.111,00	(11.867.710.558,00)
3	Utang Belanja Hibah	21.601.112.000,00	179.870.000,00	21.421.242.000,00
4	Utang Belanja Bantuan Sosial	-	399.848.950,00	(399.848.950,00)
5	Utang Belanja Modal	25.313.700.433,76	63.063.174.747,41	(37.749.474.313,65)
6	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak	-	114.932.144.968,00	(114.932.144.968,00)
7	Utang transfer Dana Otonomi Khusus	-	111.255.076.970,00	(111.255.076.970,00)
8	Utang Dana Sertifikasi	-	20.943.032.382,00	(20.943.032.382,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>200.715.107.973,62</b>	<b>435.662.487.189,41</b>	<b>(234.947.379.215,79)</b>

Sumber : sipkd.acehprov.go.id

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Utang Dana Sertifikasi menjadi bagian Utang Belanja Pegawai, Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Utang transfer Dana Otonomi Khusus menjadi bagian Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rincian Utang Belanja dapat dilihat sebagai berikut.

- a. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp40.975.294.986,86 yang terdiri dari:

**Tabel 5. 155. Rincian Utang Belanja Pegawai**

SKPA	Nilai	Uraian
Dinas Pendidikan Dayah Aceh	128.672,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Bulan Desember 2021 telah dilunasi dengan SP2D Nomor 0000263/LS-BL/2022 tanggal 4 Februari 2022
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	2.369.879.456,00	Utang Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah berdasarkan surat tagihan kekurangan pembayaran dari BPJS kesehatan Kantor cabang Banda Aceh Nomor 482/I.06/0322 tanggal 17 Maret 2022
	23.700.000.000,00	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Jiwa	301.040.135,00	Utang Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah berdasarkan surat tagihan kekurangan pembayaran dari BPJS kesehatan Kantor cabang Banda Aceh Nomor 481/I.06/0322 tanggal 17 Maret 2022
Dinas Pendidikan Aceh	14.439.061.149,00	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS
Rumah Sakit Ibu dan Anak	165.185.574,86	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS
<b>Jumlah</b>	<b>40.975.294.986,86</b>	

Sumber : sipkd.acehprov.go.id



- b. Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp112.825.000.553,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.867.710.558,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp124.692.711.111,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 156. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Bertambah/ Berkurang
1	Utang Belanja Barang	62.346.381.627,00	-	62.346.381.627,00
2	Utang Belanja Jasa	48.746.944.227,00	9.178.719.402,00	39.568.224.825,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	1.454.227.506,00	1.012.764.386,00	441.463.120,00
4	Utang Belanja Perjalanan Dinas	52.456.573,00	-	52.456.573,00
5	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	224.990.620,00	-	224.990.620,00
6	Utang Belanja Barang Hibah	-	229.635.450,00	(229.635.450,00)
7	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	109.975.636.218,00	(109.975.636.218,00)
8	Utang Belanja Telepon	-	271.536.226,00	(271.536.226,00)
9	Utang Belanja Air	-	517.235.324,00	(517.235.324,00)
10	Utang Belanja Listrik	-	3.256.414.344,00	(3.256.414.344,00)
11	Utang Belanja Kawat/Internet	-	153.201.287,00	(153.201.287,00)
12	Utang Sewa Gedung Kantor/Tempat	-	97.568.474,00	(97.568.474,00)
<b>Jumlah</b>		<b>112.825.000.553,00</b>	<b>124.692.711.111,00</b>	<b>(11.867.710.558,00)</b>

Sumber : sipkd.acehprov.go.id

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Utang Belanja Barang Hibah dan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD menjadi bagian Utang Belanja Barang dan Utang Belanja Telepon, Utang Belanja Air, Utang Belanja Listrik, Utang Belanja Kawat/Internet dan Utang Sewa Gedung Kantor/Tempat menjadi bagian Utang Belanja Jasa.

- 1) Utang Belanja Barang sebesar Rp62.346.381.627,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 157. Utang Belanja Barang**

No	Uraian	2021	2020
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku	130.232.000,00	-
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	37.000.000,00	-
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	32.496.365.822,00	-
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.769.000,00	-
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	74.161.400,00	-
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	480.608.197,00	-
7	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	77.706.500,00	-
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	27.337.351.368,00	-
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.430.070,00	-
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	427.204.200,00	-
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.414.000,00	-



No	Uraian	2021	2020
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.174.139.070,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>62.346.381.627,00</b>	<b>-</b>

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

- 2) Utang Belanja Jasa sebesar Rp48.746.944.227,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 158. Utang Belanja Jasa**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.250.000,00	-
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	4.252.470.724,00	8.859.841.340,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	28.525.733,00	-
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	293.786.182,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi	14.400.000,00	-
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	208.442.781,00	-
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	541.063.440,00	-
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.526.204.173,00	-
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	221.260.926,00	-
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	-	25.091.880,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan	1.200.000,00	-
12	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	39.449.984.700,00	-
13	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.500.000,00	-
14	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.125.000,00	-
15	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	5.328.750,00	-
16	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak	226.512.000,00	-
17	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	236.676.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>48.746.944.227,00</b>	<b>9.178.719.402,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan SKPA

- 3) Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.454.227.506,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang pada Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp1,012.764.386,00, Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin sebesar Rp317.449.000,00, dan Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin dan Rumah Sakit Ibu dan Anak masing-masing sebesar Rp90.346.200,00 dan Rp33.667.920,00.
- 4) Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp52.456.573,00 merupakan utang atas biaya perjalanan dinas supir mobil ambulance pengantar pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin.



- 5) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp224.990.620,00. merupakan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat yaitu biaya tiket pesawat pasien dan pedamping yang berobat ke luar Aceh pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin.
- 6) Utang Belanja Hibah sebesar Rp21.601.112.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 159. Utang Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Dinas Peternakan Aceh</b>			
1	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.034.872.000,00	-
<b>Badan Pengelolaan Keuangan Aceh</b>			
1	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	5.566.240.000,00	-
<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh</b>			
1	Utang Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	179.870.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.601.112.000,00</b>	<b>179.870.000,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan SKPA

- c. Utang Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp25.313.700.433,76 yang terdiri dari Utang Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.562.872.499,00, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.794.566.218,00 dan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp17.956.261.716,76, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 160. Utang Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>			
1	Dinas Perhubungan Aceh Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya yaitu Kapal Aceh Hebat 1 Lintas Pantai Barat-Simeulue.	4.562.872.499,00	4.562.872.499,00
<b>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>			
1	Dinas Kesehatan Aceh Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Bapelkes Aceh)	2.777.681.218,00	2.777.681.218,00
2	Dinas Pendidikan Aceh Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (perencanaan dan pengawasan)	16.885.000,00	-
<b>Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>			
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	16.387.483.279,76 1.568.778.437,00	20.025.470.398,00 3.937.473.437,00
2	Dinas Pengairan Aceh Utang Belanja Modal bangunan Pengaman Sungai/pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	-	27.845.889.902,41

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Utang Belanja Modal BLUD</b>			
1	Rumah Sakit Umum Zainal Abidin		
	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa	-	22.000.000,00
	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	-	3.400.000,00
	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	2.573.633.700,00
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-alat rumah tangga lainnya (Home use)	-	196.100.000,00
	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	937.641.593,00
	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer jaringan	-	148.900.000,00
2	Rumah Sakit Jiwa		
	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	22.412.000,00
	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	-	9.700.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.313.700.433,76</b>	<b>63.063.174.747,41</b>

Sumber : Laporan Keuangan SKPA

#### 5.3.6.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp307.403.243.419,00 terdiri dari:

- a. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp177.137.287.960,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berupa utang lebih bayar Dana Bagi Hasil tahun 2020 terdiri dari PPH sebesar Rp9.970.325.635,00, Sumber Daya Migas sebesar Rp166.744.889.976,00, Sumber Daya Mineral Batu Bara sebesar Rp324.390.549,00 dan Sumber Daya Panas Bumi sebesar Rp97.681.800,00.
- b. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak yang sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 973/139/2022 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan bulan Oktober s.d Desember 2021 sebesar Rp130.265.955.459,00. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

#### 5.3.7. Ekuitas Per 31 Desember 2021      Per 31 Desember 2020 **Rp31.331.114.695.220,64    Rp27.256.349.028.467,20**

Ekuitas Pemerintah Aceh merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp27.256.349.028.467,20, Surplus/Defisit-LO sebesar Rp1.040.137.445.090,11, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp3.034.628.221.663,33, sehingga jumlah ekuitas akhir sebesar Rp31.331.114.695.220,64. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### 5.4. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Laporan Operasional disusun dengan basis

akrual dengan pengakuan pendapatan dan beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah tanpa memperhatikan kas/ setara kas telah diterima atau dikeluarkan dari kas daerah, dengan rincian sebagai berikut.

**5.4.1. Pendapatan - LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp14.710.892.858.258,06** **Rp14.187.497.367.536,20**

Pendapatan – LO Tahun 2021 sebesar Rp14.710.892.858.258,06 mengalami kenaikan sebesar Rp523.395.490.721,86 dibanding saldo tahun sebelumnya sebesar Rp14.187.497.367.536,20 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 161. Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Aceh-LO	2.774.877.528.389,15	2.537.786.848.666,90	237.090.679.722,25	9,34
2.	Pendapatan Transfer-LO	11.490.400.289.309,90	11.457.448.444.405,30	32.951.844.904,61	0,29
3.	Pendapatan Lain-lain yang sah-LO	445.615.040.559,00	192.262.074.464,00	253.352.966.095,00	131,77
	<b>Jumlah</b>	<b>14.710.892.858.258,10</b>	<b>14.187.497.367.536,20</b>	<b>523.395.490.721,86</b>	<b>3,69</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.1. Pendapatan Asli Aceh-LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp2.774.877.528.389,15** **Rp2.537.786.848.666,90**

Pendapatan Asli Aceh-LO Pemerintah Aceh Tahun 2021 sebesar Rp2.774.877.528.389,15 merupakan pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 162. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Asli Aceh-LO**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Aceh	1.533.695.371.527,63	1.477.180.062.811,65	56.515.308.715,98	3,83
2	Pendapatan Retribusi Aceh	9.084.721.125,36	8.551.442.364,80	533.278.760,56	6,24
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	282.618.355.584,23	249.290.944.300,35	33.327.411.283,88	13,37
4	Lain-lain PAA yang Sah	949.479.080.151,93	802.764.399.190,10	146.714.680.961,83	18,28
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>	<b>2.774.877.528.389,15</b>	<b>2.537.786.848.666,90</b>	<b>237.090.679.722,25</b>	<b>9,34</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Aceh – LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp1.533.695.371.527,63** **Rp1.477.180.062.811,65**

Pendapatan Pajak Aceh – LO Tahun 2021 sebesar Rp1.533.695.371.527,63 mengalami kenaikan sebesar Rp56.515.308.715,98 dibanding saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.477.180.062.811,65, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 163. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO**

NO	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	496.878.691.912,00	484.694.888.039,50	12.183.803.872,50	2,51

NO	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	315.373.023.780,00	290.706.133.250,00	24.666.890.530,00	8,49
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	353.332.967.635,00	318.492.714.032,00	34.840.253.603,00	10,94
4	Pajak Air Permukaan-LO	2.603.129.243,63	1.919.006.301,15	684.122.942,48	35,65
5	Pajak Rokok-LO	365.507.558.957,00	381.367.321.189,00	(15.859.762.232,00)	(4,16)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.533.695.371.527,63</b>	<b>1.477.180.062.811,65</b>	<b>56.515.308.715,98</b>	<b>3,83</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Aceh – LO** **Saldo Tahun 2021**  
**Rp9.084.721.125,36** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp8.551.442.364,80**

Pendapatan Retribusi Aceh – LO Tahun 2021 sebesar Rp9.084.721.125,36 mengalami kenaikan sebesar Rp533.278.760,56 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.551.442.364,80, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 164. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO**

No	Rincian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
<b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.024.697.000,00	930.267.000,00	94.430.000,00	10,15
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.153.304.100,00	1.130.393.030	22.911.070,00	2,03
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	554.000.000,00	523.000.000	31.000.000,00	5,93
	<b>Jumlah</b>	<b>2.732.001.100,00</b>	<b>2.583.660.030,00</b>	<b>148.341.070,00</b>	<b>5,74</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.649.497.225,36	1.849.713.334,80	799.783.890,56	43,24
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	203.156.000,00	-	203.156.000,00	-
3	Retribusi Terminal-LO	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	36.142.000,00	32.000,00	36.110.000,00	112.843,75
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	497.765.000,00	466.813.000,00	30.952.000,00	6,63
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	310.386.500,00	225.650.000,00	84.736.500,00	37,55
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	465.176.000,00	285.792.000,00	179.384.000,00	62,77
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.316.570.000,00	2.478.979.000,00	(1.162.409.000,00)	(46,89)
	<b>Jumlah</b>	<b>5.478.692.725,36</b>	<b>5.309.479.334,80</b>	<b>169.213.390,56</b>	<b>3,19</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>					
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	27.178.000,00	45.828.000,00	(18.650.000,00)	(40,70)
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	632.265.000,00	612.475.000,00	19.790.000,00	3,23
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	214.584.300,00	-	214.584.300,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>874.027.300,00</b>	<b>658.303.000,00</b>	<b>215.724.300,00</b>	<b>32,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.084.721.125,36</b>	<b>8.551.442.364,80</b>	<b>533.278.760,56</b>	<b>6,24</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp282.618.355.584,23** **Rp249.290.944.300,35**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO Tahun 2021 sebesar Rp282.618.355.584,23 mengalami kenaikan sebesar Rp33.327.411.283,88 atau 13,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp249.290.944.300,35.

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (Deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari:

**Tabel 5. 165. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Setoran Deviden PT.Bank Aceh Syariah	132.444.587.380,00	158.284.954.748,00
2	Setoran Dana Pembangunan PT.Bank Aceh Syariah	19.989.508.849,00	23.415.844.288,00
3	Kenaikan Nilai Investasi pada PT.Bank Aceh Syariah	85.783.010.722,25	67.590.145.264,35
4	Kenaikan Nilai Investasi pada PT BPR Mustaqim Aceh	1.081.382.080,98	-
5	Kenaikan Nilai Investasi pada PT. PEMA	43.319.866.553,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>282.618.355.584,23</b>	<b>249.290.944.300,35</b>

**5.4.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah - LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp949.479.080.151,93** **Rp802.764.399.190,10**

Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO Tahun 2021 sebesar Rp949.479.080.151,93 mengalami kenaikan sebesar Rp146.714.680.961,83 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp802.764.399.190,10, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 166. Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO**

No	Rincian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	4.508.852.617,46	9.452.813.818,35	(4.943.961.200,89)	(52,30)
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.786.383.099,00	-	3.786.383.099,00	-
3	Jasa Giro-LO	21.867.510.208,30	24.292.087.607,39	(2.424.577.399,09)	(9,98)
4	Pendapatan Bunga-LO	147.090.438.861,74	137.133.682.120,45	9.956.756.741,29	7,26
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.493.983.776,08	518.570.811,47	975.412.964,61	188,10
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	13.700.737.110,72	7.417.052.203,24	6.283.684.907,48	84,72
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	8.911.378.129,13	13.372.335.759,74	(4.460.957.630,61)	(33,36)
8	Pendapatan dari BLUD-LO	661.693.177.985,48	528.039.163.358,38	133.654.014.627,10	25,31
9	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	86.426.618.364,02	82.538.693.511,08	3.887.924.852,94	4,71
<b>Jumlah</b>		<b>949.479.080.151,93</b>	<b>802.764.399.190,10</b>	<b>146.714.680.961,83</b>	<b>18,28</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp11.490.400.289.309,91** **Rp11.457.448.444.405,30**

Pendapatan Transfer - LO Tahun 2021 sebesar Rp11.490.400.289.309,91 mengalami kenaikan sebesar Rp32.951.844.904,61 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.457.448.444.405,30, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 167. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO**

No	Rincian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>					
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	233.534.243.689,00	127.272.935.167,00	106.261.308.522,00	83,49
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	39.867.057.258,00	(39.867.057.258,00)	(100,00)
3	Dana Alokasi Umum(DAU)	1.945.980.616.000,00	1.956.492.796.000,00	(10.512.180.000,00)	(0,54)
4	Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	303.560.249.603,38	248.193.047.721,00	55.367.201.882,38	22,31
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.444.769.174.017,53	1.482.653.755.202,64	(37.884.581.185,11)	(2,56)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.927.844.283.309,91</b>	<b>3.854.479.591.348,64</b>	<b>73.364.691.961,27</b>	<b>1,90</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>					
1	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh-LO	7.555.827.806.000,00	7.228.523.338.980,66	327.304.467.019,34	4,53
2	Dana Penyesuaian	-	374.445.514.076,00	(374.445.514.076,00)	(100,00)
3	Dana Insentif Daerah (DID)	6.728.200.000,00	-	6.728.200.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.562.556.006.000,00</b>	<b>7.602.968.853.056,66</b>	<b>(40.412.847.056,66)</b>	<b>(0,53)</b>
	<b>Total</b>	<b>11.490.400.289.309,91</b>	<b>11.457.448.444.405,30</b>	<b>32.951.844.904,61</b>	<b>(0,29)</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak– LO**

**Saldo Tahun 2021  
Rp233.534.243.689,00**

**Saldo Tahun 2020  
Rp127.272.935.167,00**

Dana Bagi Hasil Pajak– LO TA 2021 sebesar Rp233.534.243.689,00 mengalami kenaikan sebesar Rp106.261.308.522,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp127.272.935.167,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 168. Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil –LO**

No	Rincian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH PBB-LO	80.613.812.094,00	42.169.041.997,00	38.444.770.097,00	91,17
2	DBH PPh Pasal 21-LO	109.910.912.561,00	-	109.910.912.561,00	-
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND-LO	1.095.421.000,00	75.568.737.953,00	(74.473.316.953,00)	(98,55)
4	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO	-	2.111.495.600,00	(2.111.495.600,00)	(100,00)
5	DBH CHT-LO	4.678.520.216,00	5.299.261.920,00	(620.741.704,00)	(11,71)
6	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO	-	236.774.264,00	(236.774.264,00)	(100,00)
7	Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	-	1.887.623.433,00	(1.887.623.433,00)	(100,00)
8	DBH SDA Minyak Bumi-LO	10.615.038.625,00	-	10.615.038.625,00	-
9	DBH SDA Gas Bumi-LO	464.035.525,00	-	464.035.525,00	-
10	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	632.593.788,00	-	632.593.788,00	-
11	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	5.776.686.384,00	-	5.776.686.384,00	-
12	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	17.959.631.184,00	-	17.959.631.184,00	-

No	Rincian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan	%
13	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	984.790.574,00	-	984.790.574,00	-
14	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	802.801.738,00	-	802.801.738,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>233.534.243.689,00</b>	<b>127.272.935.167,00</b>	<b>106.261.308.522,00</b>	<b>83,49</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.2.2. Dana Alokasi Umum-LO** **Saldo Tahun 2021**  
**Rp1.945.980.616.000,00** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp1.956.492.796.000,00**

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.945.980.616.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.512.180.000,00 atau 0,54% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.956.492.796.000,00.

**5.4.1.2.3. Dana Alokasi Khusus Fisik-LO** **Saldo Tahun 2021**  
**Rp303.560.249.603,38** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp248.193.047.721,00**

Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Tahun 2021 sebesar Rp303.560.249.603,38 mengalami kenaikan sebesar Rp55.367.201.882,38 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp248.193.047.721,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 169. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO**

No	Rincian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	187.207.388.667,00	232.458.387.594,00	(45.250.998.927,00)	(19,47)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	3.628.874.367,00	-	3.628.874.367,00	-
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA-LO	427.591.125,00	-	427.591.125,00	-
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	101.503.696,00	-	101.503.696,00	-
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	5.853.449.222,33	14.714.991.127,00	(8.861.541.904,67)	(60,22)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	13.281.057.776,00	-	13.281.057.776,00	-
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	4.135.404.559,29	-	4.135.404.559,29	-
8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	4.439.130.762,34	1.019.669.000,00	3.419.461.762,34	335,35
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	10.476.613.281,00	-	10.476.613.281,00	-
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	14.412.865.265,00	-	14.412.865.265,00	-
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	45.536.366.000,00	-	45.536.366.000,00	-
12	DAK Fisik-Bidang Irigasi-	6.263.792.288,00	-	6.263.792.288,00	-



No	Rincian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
13	Penugasan-LO DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Lingkungan Hidup-LO	7.602.829.000,00	-	7.602.829.000,00	-
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Kehutanan-LO	193.383.594,42	-	193.383.594,42	-
<b>Jumlah</b>		<b>303.560.249.603,38</b>	<b>248.193.047.721,00</b>	<b>55.367.201.882,38</b>	<b>22,31</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.2.4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp1.444.769.174.017,53** **Rp1.482.653.755.202,64**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.444.769.174.017,53 mengalami penurunan sebesar Rp37.884.581.185,11 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.482.653.755.202,64, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 170. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO**

No	Rincian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	1.018.482.963.000,00	1.101.261.800.000,00	(82.778.837.000,00)	(7,52)
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD- LO	403.092.407.000,00	353.087.276.260,00	50.005.130.740,00	14,16
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.265.000.000,00	9.061.110.625,00	(6.796.110.625,00)	(75,00)
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD- LO	299.080.000,00	8.697.690.858,00	(8.398.610.858,00)	(96,56)
5	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	2.477.719.519,00	-	2.477.719.519,00	-
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.740.813.288,00	-	1.740.813.288,00	-
7	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK-LO	12.906.249.233,00	5.438.482.483,00	7.467.766.750,00	137,31
8	DAK Non Fisik-PK2UKM- LO	998.801.979,00	946.721.979,00	52.080.000,00	5,50
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan- LO	1.584.940.998,53	198.191.962,00	1.386.749.036,53	699,70
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata- LO	-	3.962.481.035,64	(3.962.481.035,64)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	507.467.000,00	-	507.467.000,00	-
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	413.732.000,00	-	413.732.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.444.769.174.017,53</b>	<b>1.482.653.755.202,64</b>	<b>(37.884.581.185,11)</b>	<b>(2,56)</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.2.5. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp7.555.827.806.000,00** **Rp7.228.523.338.980,66**

Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO Tahun 2021 sebesar Rp7.555.827.806.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp327.304.467.019,34 atau 4,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.228.523.338.980,66.

**5.4.1.2.6. Dana Insentif Daerah (DID)** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp6.728.200.000,00** **Rp0,00**

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 sebesar Rp6.728.200.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.728.200.000,00 atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

**5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp445.615.040.559,00** **Rp192.262.074.464,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2021 sebesar Rp445.615.040.559,00 mengalami kenaikan sebesar Rp253.352.966.095,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp192.262.074.464,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 171. Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	351.644.027.066,00	171.382.752.373,00	180.261.274.693,00	105,18
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	80.255.196.946,00	5.254.405.208,00	75.000.791.738,00	1.427,39
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	-	1.295.152.383,00	(1.295.152.383,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	10.843.525.300,00	3.939.129.500,00	6.904.395.800,00	175,28
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.356.845.765,00	-	1.356.845.765,00	-
6	Pendapatan Lainnya - LO	-	10.390.635.000,00	(10.390.635.000,00)	(100,00)
7	Lain-lain Pendapatan-LO	1.515.445.482,00	-	1.515.445.482,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>445.615.040.559,00</b>	<b>192.262.074.464,00</b>	<b>253.352.966.095,00</b>	<b>131,77</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2. Beban Operasi – LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp13.389.487.700.242,59** **Rp12.980.594.096.287,48**

Beban Operasi Tahun 2021 mencapai Rp13.389.487.700.242,59 mengalami kenaikan sebesar Rp408.893.603.955,11 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.980.594.096.287,48, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 172. Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Pegawai	2.742.283.882.520,86	2.437.166.511.656,00	305.117.370.864,86	12,52
2	Beban Persediaan	1.661.907.541.870,17	818.172.618.627,15	843.734.923.243,02	103,12
3	Beban Jasa	2.749.921.291.868,12	2.837.727.089.270,71	(87.805.797.402,59)	(3,09)
4	Beban Pemeliharaan	196.900.067.946,01	115.090.923.976,51	81.809.143.969,50	71,08
5	Beban Perjalanan Dinas	255.667.716.027,26	165.634.702.617,00	90.033.013.410,26	54,36
6	Beban Hibah	1.460.518.339.477,25	1.917.738.076.850,38	(457.219.737.373,13)	(23,84)
7	Beban Bantuan Sosial	133.553.450.107,35	17.921.460.000,00	115.631.990.107,35	645,22
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.303.615.764.292,30	1.321.286.298.304,52	(17.670.534.012,22)	(1,34)
9	Beban Penyisihan Piutang	13.740.561.024,68	741.186.030,09	12.999.374.994,59	1.753,86
10	Beban Transfer	2.849.853.355.246,00	3.280.202.492.984,00	(430.349.137.738,00)	(13,12)
11	Beban Lain-lain	21.113.657.972,59	68.912.735.971,12	(47.799.077.998,53)	(69,36)

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
12	Beban Tak Terduga	412.071.890,00	-	412.071.890,00	-
<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>13.389.487.700.242,59</b>	<b>12.980.594.096.287,48</b>	<b>408.893.603.955,11</b>	<b>3,15</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2.1. Beban Pegawai – LO** **Saldo Tahun 2021**  
**Rp2.742.283.882.520,86** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp2.437.166.511.656,00**

Beban Pegawai - LO merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Beban Pegawai - LO Tahun 2021 sebesar Rp2.742.283.882.520,86 mengalami kenaikan sebesar Rp305.117.370.864,86 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.437.166.511.656,00.

**Tabel 5. 173. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.483.733.549.571,86	1.849.323.597.586,00	(365.590.048.014,14)	(19,77)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	514.025.407.138,00	513.687.671.221,00	337.735.917,00	0,07
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	688.673.288.143,00	-	688.673.288.143,00	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	29.934.335.769,00	(29.934.335.769,00)	(100,00)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	38.030.000,00	(38.030.000,00)	(100,00)
6	Uang Lembur - LO	-	9.791.655.916,00	(9.791.655.916,00)	(100,00)
7	Beban Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	-	172.800.000,00	(172.800.000,00)	(100,00)
8	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	50.147.422.958,00	-	50.147.422.958,00	-
9	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.182.700.502,00	-	3.182.700.502,00	-
10	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.521.514.208,00	20.571.952.638,00	(18.050.438.430,00)	(87,74)
11	Belanja Pegawai BOS	-	13.643.968.526,00	(13.643.968.526,00)	(100,00)
12	Belanja Pegawai BLUD	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>2.742.283.882.520,86</b>	<b>2.437.166.511.656,00</b>	<b>305.117.370.864,86</b>	<b>12,52</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2.2. Beban Persediaan – LO** **Saldo Tahun 2021**  
**Rp1.661.907.541.870,17** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp818.172.618.627,15**

Beban Persediaan adalah pengeluaran Pemerintah Aceh atas penggunaan barang-barang persediaan dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp1.661.907.541.870,17 mengalami kenaikan sebesar Rp843.734.923.243,02 atau 103,12 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp818.172.618.627,15 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.4.2.3. **Beban Jasa**

**Saldo Tahun 2021**  
**Rp2.749.921.291.868,12**

**Saldo Tahun 2020**  
**Rp2.837.727.089.270,71**

Beban Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan jasa yang digunakan dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Jasa Tahun 2021 sebesar Rp2.749.921.291.868,12 mengalami penurunan sebesar Rp87.805.797.402,59 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.837.727.089.270,71, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 174. Kenaikan/Penurunan Beban Jasa**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	1.014.677.332.131,66	447.335.267.263,72	567.342.064.867,94	126,83
2	Beban Jaminan/Asuransi	1.058.159.088.139,82	879.158.283.084,71	179.000.805.055,11	20,36
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	-	46.024.474.650,00	(46.024.474.650,00)	(100,00)
4	Beban Cetak dan Penggandaan	-	44.789.384.453,00	(44.789.384.453,00)	(100,00)
5	Beban Sewa Tanah	3.543.120.522,26	-	3.543.120.522,26	-
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	13.713.778.005,00	15.456.901.167,00	(1.743.123.162,00)	(11,28)
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	55.258.685.212,88	35.815.308.454,30	19.443.376.758,58	54,29
8	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	62.750.000,00	-	62.750.000,00	-
9	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	315.214.000,00	-	315.214.000,00	-
10	Beban Makanan dan Minuman	-	86.571.529.026,00	(86.571.529.026,00)	(100,00)
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	8.543.157.307,00	(8.543.157.307,00)	(100,00)
12	Belanja Pakaian Kerja	-	4.053.786.028,00	(4.053.786.028,00)	(100,00)
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	4.160.573.000,00	(4.160.573.000,00)	(100,00)
14	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.829.125.617,50	32.980.480.722,30	(22.151.355.104,80)	(67,17)
15	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.001.667.000,00	-	1.001.667.000,00	-
16	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.132.213.600,00	-	1.132.213.600,00	-
17	Beban Honorarium Non Pegawai	-	39.531.184.277,00	(39.531.184.277,00)	(100,00)
18	Beban Honorarium PNS	-	181.700.041.603,50	(181.700.041.603,50)	(100,00)
19	Beban Honorarium Non PNS	-	550.039.416.654,00	(550.039.416.654,00)	(100,00)
20	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	8.931.969.459,00	3.442.097.464,00	5.489.871.995,00	159,49
21	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	40.732.543.246,00	3.765.782.036,00	36.966.761.210,00	981,65
22	Beban Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq	-	62.792.935.769,00	(62.792.935.769,00)	(100,00)
23	Beban Jasa Pelayanan Medical Check Up	-	222.239.000,00	(222.239.000,00)	(100,00)
24	Beban Beasiswa Anak Yatim Piatu (OTSUS)	-	215.488.800.000,00	(215.488.800.000,00)	(100,00)
25	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.347.136,00	-	2.347.136,00	-
26	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	25.011.000,00	-	25.011.000,00	-

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
27	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	533.250.050.971,00	175.855.447.311,18	357.394.603.659,82	203,23
28	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.286.395.827,00	-	8.286.395.827,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.749.921.291.868,12</b>	<b>2.837.727.089.270,71</b>	<b>(87.805.797.402,59)</b>	<b>(3,09)</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2.4. Beban Pemeliharaan** **Saldo Tahun 2021**  
**Rp196.900.067.946,01** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp115.090.923.976,51**

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pemeliharaan aset tetap yang digunakan dalam masa satu Tahun operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp196.900.067.946,01 mengalami kenaikan sebesar Rp81.809.143.969,50 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp115.090.923.976,51 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 175. Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	797.377.080,00	4.980.000,00	792.397.080,00	15.911,59
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.251.925.191,64	26.184.767.889,00	63.067.157.302,64	240,85
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.532.377.740,59	62.705.307.319,51	(5.172.929.578,92)	(8,25)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.729.160.697,00	18.874.425.262,00	22.854.735.435,00	121,09
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.589.227.236,78	2.910.256.501,00	4.678.970.735,78	160,78
6	Beban Pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	4.411.187.005,00	(4.411.187.005,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>196.900.067.946,01</b>	<b>115.090.923.976,51</b>	<b>81.809.143.969,50</b>	<b>71,08</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas** **Saldo Tahun 2021**  
**Rp255.667.716.027,26** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp165.634.702.617,00**

Beban Perjalanan Dinas adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk perjalanan dinas dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp255.667.716.027,26 mengalami kenaikan sebesar Rp90.033.013.410,26 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp165.634.702.617,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 176. Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	252.785.425.106,00	164.362.963.583,00	88.422.461.523,00	53,80

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.882.290.921,26	1.271.739.034,00	1.610.551.887,26	126,64
	<b>Jumlah</b>	<b>255.667.716.027,26</b>	<b>165.634.702.617,00</b>	<b>90.033.013.410,26</b>	<b>54,36</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2.6. Beban Hibah** **Saldo Tahun 2021**  
**Rp1.460.518.339.477,25** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp1.917.738.076.850,38**

Beban Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/Organisasi, kelompok/anggota masyarakat dandalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp1.460.518.339.477,25 mengalami penurunan sebesar Rp457.219.737.373,13 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.917.738.076.850,38 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 177. Kenaikan/Penurunan Beban Hibah**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	18.770.369.770,00	-	18.770.369.770,00	-
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	63.340.106.968,00	(63.340.106.968,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	226.277.383,00	(226.277.383,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	533.856.683.115,84	(533.856.683.115,84)	(100,00)
5	Beban bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	384.677.907.042,20	(384.677.907.042,20)	(100,00)
6	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)	-	7.413.028.929,36	(7.413.028.929,36)	(100,00)
7	Beban Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari DOKA	-	8.956.016.165,91	(8.956.016.165,91)	(100,00)
8	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota	-	42.462.595.937,07	(42.462.595.937,07)	(100,00)
9	Belanja Bangunan Tempat Tinggal Transmigrasi	-	1.752.952.135,00	(1.752.952.135,00)	(100,00)
10	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari Otsus Aceh	-	37.998.663.746,00	(37.998.663.746,00)	(100,00)
11	Beban Hibah Barang	20.117.382.363,26	-	20.117.382.363,26	-

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
12	kepada Pemerintah Daerah Lainnya Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	63.078.213.700,00	-	63.078.213.700,00	-
13	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	578.730.934.029,99	-	578.730.934.029,99	-
14	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	23.799.808.614,00	-	23.799.808.614,00	-
15	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	702.748.259.000,00	532.569.030.000,00	170.179.229.000,00	31,95
16	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	40.301.283.000,00	301.567.481.028,00	(261.266.198.028,00)	(86,64)
17	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	9.896.369.000,00	-	9.896.369.000,00	-
18	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.075.720.000,00	2.917.334.400,00	158.385.600,00	5,43
<b>Jumlah</b>		<b>1.460.518.339.477,25</b>	<b>1.917.738.076.850,38</b>	<b>(457.219.737.373,13)</b>	<b>(23,84)</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

#### 5.4.2.7. Beban Bantuan Sosial

**Saldo Tahun 2021**  
**Rp133.553.450.107,35**

**Saldo Tahun 2020**  
**Rp17.921.460.000,00**

Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2021 sebesar Rp133.553.450.107,35 mengalami kenaikan sebesar Rp115.631.990.107,35 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.921.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 178. Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	116.092.537.308,35	-	116.092.537.308,35	-
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	8.000.400.000,00	-	8.000.400.000,00	-
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	9.460.512.799,00	17.921.460.000,00	(8.460.947.201,00)	(47,21)
<b>Jumlah</b>		<b>133.553.450.107,35</b>	<b>17.921.460.000,00</b>	<b>115.631.990.107,35</b>	<b>645,22</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Saldo Tahun 2021 Rp1.303.615.764.292,30 Saldo Tahun 2020 Rp1.321.286.298.304,52**

Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2021 sebesar Rp1.303.615.764.292,30 mengalami penurunan sebesar Rp17.670.534.012,22 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.321.286.298.304,52, dengan rincikan sebagai berikut.

**Tabel 5. 179. Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	460.034.536.623,87	487.507.613.662,07	(27.473.077.038,20)	(5,64)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	148.122.881.655,42	140.009.409.559,17	8.113.472.096,25	5,79
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	597.327.021.677,25	639.902.979.334,77	(42.575.957.657,52)	(6,65)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	750.879.423,68	276.715.627,47	474.163.796,21	171,35
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	21.255.756.316,52	-	21.255.756.316,52	-
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.643.829.675,00	2.155.409.877,25	7.488.419.797,75	347,42
7	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	66.480.858.920,56	51.434.170.243,79	15.046.688.676,77	29,25
<b>Jumlah</b>		<b>1.303.615.764.292,30</b>	<b>1.321.286.298.304,52</b>	<b>(17.670.534.012,22)</b>	<b>(1,34)</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2.9. Beban Penyisihan piutang Saldo Tahun 2021 Rp13.740.561.024,68 Saldo Tahun 2020 Rp741.186.030,09**

Beban Penyisihan piutang dalam Tahun 2021 sebesar Rp13.740.561.024,68 mengalami kenaikan sebesar Rp12.999.374.994,59 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp741.186.030,09, dengan rincikan sebagai berikut.

**Tabel 5. 180. Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	539.560.617,15	(539.560.617,15)	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	160.970.383,33	-	160.970.383,33	-
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	1.003.363.139,37	-	1.003.363.139,37	-
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	2.253.575,35	1.523.365,00	730.210,35	47,93
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.888.000,00	776.640,00	2.111.360,00	271,86
6	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	4.265.533,35	(4.265.533,35)	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	12.549.102.664,39	165.720.345,80	12.383.382.318,59	7.472,46
8	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	21.983.262,24	29.339.528,79	(7.356.266,55)	(25,07)
<b>Jumlah</b>		<b>13.740.561.024,68</b>	<b>741.186.030,09</b>	<b>12.999.374.994,59</b>	<b>1.753,86</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



**5.4.2.10. Beban Transfer**

**Saldo Tahun 2021**  
**Rp2.849.853.355.246,00**

**Saldo Tahun 2020**  
**Rp3.280.202.492.984,00**

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Beban Transfer Tahun 2021 sebesar Rp2.849.853.355.246,00 mengalami penurunan sebesar Rp430.349.137.738,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.280.202.492.984,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 181. Kenaikan/Penurunan Beban Transfer**

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	730.598.027.123,00	710.340.906.153,00	20.257.120.970,00	2,85
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.119.255.328.123,00	2.539.361.586.831,00	(420.106.258.708,00)	(16,54)
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	-	30.500.000.000,00	(30.500.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>2.849.853.355.246,00</b>	<b>3.280.202.492.984,00</b>	<b>(430.349.137.738,00)</b>	<b>(13,12)</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2.11. Beban Lain-lain**

**Saldo Tahun 2021**  
**Rp21.113.657.972,59**

**Saldo Tahun 2020**  
**Rp68.912.735.971,12**

Beban Lain-lain dalam Tahun 2021 sebesar Rp21.113.657.972,59 mengalami penurunan sebesar Rp47.799.077.998,53 atau 69,36% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp68.912.735.971,12 yang terdiri dari :

1. Aset Tetap yang berasal dari Hibah P3D yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp58.354.217,00;
2. Aset Tetap yang berasal dari Hibah P3D Kabupaten Simeulue yang tidak memenuhi Batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp400.000,00;
3. Aset Tetap Alat Kedokteran yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp11.479.000,00;
4. Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp155.338.000,00;
5. Aset Tetap Alat Studio dan Komunikasi tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebesar Rp44.456.180,00;
6. Aset Tetap Alat Kedokteran yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp115.135.000,00;
7. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Bapelkes yang direklas dari KDP Ke Aset Tetap sebesar Rp146.054.150,00;
8. Aset Tetap Alat Rumah Tangga dan Jalan yang tidak memenuhi Batasan minimal kapitalisasi pada Sekretariat DPRA sebesar Rp5.596.000,00;



9. Aset Lain-lain yang akan dihibahkan atas pengurangan aset dari utang belanja modal pada Dinas Pengairan Aceh yang telah Inkrah sebesar Rp2.932.230.000,00;
10. Pelunasan Utang Belanja Modal TA. 2020 pada Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp15.434.509.148,59
11. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari belanja BOS yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp732.467.373,00;
12. Aset Tetap Alat Pertanian yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pangan sebesar Rp2.174.700,00;
13. Aset Tetap Bangunan Air yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp63.847.000,00;
14. Aset Tetap Alat Laboratorium yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp840.000,00;
15. Aset Tetap Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Badan Penghubung Jakarta sebesar Rp1.600.000,00;
16. Aset Tetap Alat Laboratorium yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp2,627.020,00;
17. Aset Tetap Alat Olahraga yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp3.454.000,00;
18. Aset Tetap Komputer yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp972.000,00;
19. Aset Tetap Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp688.850,00;
20. Aset Tetap Peralatan dan Mesin bersumber dari hibah kemendikbud yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp106.110.465,00;
21. Aset Tetap Alat Studio yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pendidikan Dayah sebesar Rp1.320.000,00;
22. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp371.163.857,00;
23. Aset Bangunan Gedung Kantor yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Kesbangpol Aceh sebesar Rp27.879.600,00;
24. Aset Alat Kedokteran yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Sekretariat Wali Nanggroe sebesar Rp5.850.000,00;
25. Aset Lainnya Kajian yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp187.024.436,00;
26. Aset Lain-lain Hibah yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp87.425.000,00;
27. Aset Tetap Peralatan Mobil Extracomtable yang direklas dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp240.360.000,00 pada Dinas Pendidikan Aceh;
28. Aset Tetap Kib B gerobak dorong yang yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.850.900,00;

29. Aset Tetap Alat Angkutanyang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh sebesar Rp1.364.000,00;
30. Aset Tetap Tanah dan Bangunan Gedung yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp174.931.876,00;
31. Aset Tetap Peralatan mainframe yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebesar Rp30.000,00;
32. Aset Tetap Bangunan Gedung yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebesar Rp73.920.000,00
33. Aset Tetap Bangunan Air yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Peternakan Aceh sebesar Rp86.532.900,00;
34. Aset Tetap Alat Studio yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp300.000,00;
35. Aset Tetap Alat Besar ke bangunan Gedung tidak memenuhi batasan Kapitalisasi pada Dinas Pendidikan Dayah sebesar Rp14.300.000,00;
36. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebesar Rp3.072.300,00.

Beban Lain-lain ini terdiri dari beban atas realisasi belanja modal tahun 2021 yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi atau aset extracomtable sebesar Rp17.115.756.946,59, beban lain-lain dari Aset Tetap yang bersumber dari Hibah P3D Rp58.754.217,00, Beban Lain-lain dari Aset Lain-lain Hibah sebesar Rp3.019.655.000,00, Beban Lain-lain atas BOS sebesar Rp732.467.373,00 dan beban lain-lain dari Aset tak berwujud sebesar Rp187.024.436,00.

<b>5.4.2.12. Beban Tak Terduga</b>	<b>Saldo Tahun 2021</b>	<b>Saldo Tahun 2020</b>
	<b>Rp412.071.890,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Beban Tak Terduga dalam Tahun 2021 sebesar Rp412.071.890,00 mengalami kenaikan sebesar Rp412.071.890,00 atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

<b>5.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi</b>	<b>Saldo Tahun 2021</b>	<b>Saldo Tahun 2020</b>
	<b>Rp1.321.405.158.015,47</b>	<b>Rp1.206.903.271.248,72</b>

Berdasarkan Pendapatan - LO sebesar Rp14.710.892.858.258,06 dan Beban - LO sebesar Rp13.389.487.700.242,59 maka Laporan Operasional mengalami surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp1.321.405.158.015,47.

<b>5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Saldo Tahun 2021</b>	<b>Saldo Tahun 2020</b>
	<b>Rp281.267.712.925,36</b>	<b>Rp132.361.566.706,83</b>

Pada Tahun 2021 Pemerintah Aceh mengalami defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp281.267.712.925,36 mengalami kenaikan sebesar Rp148.906.146.218,53 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp132.361.566.706,83.

**5.4.5. Surplus/Defisit-LO** **Saldo Tahun 2021** **Saldo Tahun 2020**  
**Rp1.040.137.445.090,11** **Rp1.074.541.704.541,89**

Berdasarkan Surplus dari Operasi sebesar Rp1.321.405.158.015,47, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp281.267.712.925,36 maka Laporan Operasional mengalami surplus sebesar Rp1.040.137.445.090,11.

**5.5. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.

**5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Aceh selama tahun 2021 sebesar Rp2.443.077.808.214,58 dengan rincian sebagai berikut.

**5.5.1.1. Arus Kas Masuk** **Tahun 2021** **Tahun 2020**  
**Rp12.411.501.167.288,34** **Rp12.720.731.147.497,63**

Arus masuk kas Tahun 2021 sebesar Rp12.411.501.167.288,34 mengalami penurunan sebesar Rp309.229.980.209,30 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.720.731.147.497,63, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 182. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pendapatan Pajak Aceh	1.529.610.272.807,63	1.477.991.066.969,65
2	Pendapatan Retibusi Aceh	8.296.455.680,00	8.271.131.958,92
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	152.434.096.229,00	181.700.799.036,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	297.142.941.166,71	284.885.269.695,06
5	Dana Bagi Hasil Pajak	202.310.251.468,00	541.585.506.501,00
7	Dana Alokasi Umum	1.945.980.616.000,00	1.956.492.796.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	701.839.429.030,00	661.008.601.566,00
10	Dana Otonomi Khusus	7.555.827.806.000,00	7.555.278.348.000,00
11	Dana Insentif Daerah	6.728.200.000,00	10.390.635.000,00
12	Hibah	11.331.098.907,00	43.126.992.771,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>12.411.501.167.288,34</b>	<b>12.720.731.147.497,63</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2021 dari Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah berbeda dengan realisasi Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah pada LRA sebesar Rp518.506.877.653,45 yang merupakan Pendapatan BLUD yang tidak mempengaruhi aktivitas operasi secara langsung.

**5.5.1.2. Arus Kas Keluar** **Tahun 2021**  
**Rp9.968.423.359.073,76** **Tahun 2020**  
**Rp9.923.648.744.214,10**

Arus keluar kas Tahun 2021 sebesar Rp9.968.423.359.073,76 mengalami kenaikan sebesar Rp44.774.614.859,66 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.923.648.744.214,10, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 183. Arus Kas Dari Keluar Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Belanja Pegawai	2.578.363.949.973,00	2.419.712.419.221,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.662.992.920.241,16	2.992.920.704.867,99
3	Belanja Hibah	758.581.422.107,25	632.753.349.408,91
4	Belanja Bantuan Sosial	133.553.450.107,35	377.503.593.012,20
5	Belanja Tidak Terduga	412.071.890,00	158.460.075.459,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	2.119.255.328.123,00	2.539.361.586.831,00
7	Belanja Transfer ke Kab/Kota	715.264.216.632,00	802.937.015.414,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>9.968.423.359.073,76</b>	<b>9.923.648.744.214,10</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2021 pada arus kas keluar Belanja Pegawai berbeda dengan realisasi Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp37.072.399.202,00 dan Belanja Barang dan Jasa berbeda dengan realisasi Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp508.262.185.628,10. Perbedaan tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

**5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**

Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasional pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Aceh selama Tahun 2021 sebesar (Rp2.436.561.944.929,58).

**5.5.2.1. Arus Kas Keluar** **Tahun 2021**  
**Rp2.436.561.944.929,58** **Tahun 2020**  
**Rp1.738.315.161.276,39**

Arus keluar kas Tahun 2021 sebesar Rp2.436.561.944.929,58 mengalami kenaikan sebesar Rp698.246.783.653,19 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.738.315.161.276,39, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 184. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pembentukan Dana Cadangan	59.791.509.208,64	76.187.421.357,82
2	Belanja Modal Tanah	24.534.152.448,00	71.123.465.326,00
3	Peralatan dan Mesin	258.810.818.456,38	421.332.296.912,80
4	Belanja Gedung dan Bangunan	734.555.768.109,80	567.190.383.202,63
5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.055.849.598.983,31	572.579.779.264,78
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	61.582.897.723,45	29.901.815.212,36
7	Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	241.437.200.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.436.561.944.929,58</b>	<b>1.738.315.161.276,39</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2021 pada arus kas keluar Belanja Aset Tetap Lainnya berbeda dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada LRA sebesar Rp15.190.940.602,00 yang merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD.

### 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto sehubungan dengan surplus/defisit anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Aceh tahun 2021 sebesar Rp496.500.313,38.

### 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBA. Pada tahun 2021, arus kas masuk dari penerimaan perhitungan fihak ketiga sebesar Rp744.173.732.916,72 dan arus kas keluar dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga sebesar Rp744.173.732.916,72 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah nihil.

#### 5.5.4.1. Arus Kas Masuk

**Tahun 2021**  
**Rp744.173.732.916,72**

**Tahun 2020**  
**Rp610.822.205.136,06**

Arus masuk kas Tahun 2021 sebesar Rp744.173.732.916,72 mengalami kenaikan sebesar Rp133.351.527.780,66 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp610.822.205.136,06, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 185. Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	PPN	280.774.881.101,64	218.822.504.010,00
2	PPh Pasal 21	118.089.002.326,00	100.361.988.806,00
3	PPh Pasal 22 , 23, 26, 4 (2)	77.966.828.942,00	53.793.380.236,00
4	IWP	101.718.351.205,00	84.140.478.253,00
5	Taperum/Taspen	-	12.985.984.428,00
6	Infaq	24.967.848.401,00	19.594.959.142,00
7	Zakat	55.333.839.123,00	52.516.566.183,00
8	JKK	2.279.762.795,00	2.327.397.428,00
9	JKM	6.844.297.549,00	7.008.634.706,00
10	Sewa Rumah	217.200,00	1.222.110,00
11	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	74.664.121.242,00	58.764.264.692,00
12	Denda	1.484.097.786,08	472.979.818,06
13	Lain-lain	50.485.246,00	31.845.324,00
<b>Jumlah</b>		<b>744.173.732.916,72</b>	<b>610.822.205.136,06</b>

Sumber: Database Bidang lab BPKA

#### 5.5.4.2. Arus Kas Keluar

**Tahun 2021**  
**Rp744.173.732.916,72**

**Tahun 2020**  
**Rp610.822.205.136,06**

Arus keluar kas Tahun 2021 sebesar Rp744.173.732.916,72 mengalami kenaikan sebesar Rp133.351.527.780,66 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp610.822.205.136,06, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 186. Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	PPN	280.774.881.101,64	218.822.504.010,00
2	PPh Pasal 21	118.089.002.326,00	100.361.988.806,00

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
3	PPH Pasal 22 , 23, 26, 4 (2)	77.966.828.942,00	53.793.380.236,00
4	IWP	101.718.351.205,00	84.140.478.253,00
5	Taperum/Taspen	-	12.985.984.428,00
6	Infaq	24.967.848.401,00	19.594.959.142,00
7	Zakat	55.333.839.123,00	52.516.566.183,00
8	JKK	2.279.762.795,00	2.327.397.428,00
9	JKM	6.844.297.549,00	7.008.634.706,00
10	Sewa Rumah	217.200,00	1.222.110,00
11	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	74.664.121.242,00	58.764.264.692,00
12	Denda	1.484.097.786,08	472.979.818,06
13	Lain-lain	50.485.246,00	31.845.324,00
<b>Jumlah</b>		<b>744.173.732.916,72</b>	<b>610.822.205.136,06</b>

Sumber: Database Bidang lab BPKA

**5.5.5. Saldo Akhir Kas** **Tahun 2021**  
**Rp3.933.680.612.390,39** **Tahun 2020**  
**Rp3.969.617.354.782,29**

Dari arus kas bersih keempat aktivitas di atas terjadi Kenaikan Kas sebesar Rp7.012.363.598,38 ditambah dengan Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.890.906.180.547,89 maka Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp3.897.918.544.146,27. Selanjutnya ditambah dengan Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp144.615.039,60, Saldo Akhir Kas BLUD sebesar Rp35.382.363.720,40, Saldo Akhir Kas di BOS sebesar Rp151.089.484,12 dan Saldo Akhir Kas Lainnya sebesar Rp84.000.000,00 maka Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.933.680.612.390,39.

**5.6. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**5.6.1. Ekuitas Awal** **Tahun 2021**  
**Rp27.256.349.028.467,20** **Tahun 2020**  
**Rp25.709.483.208.840,60**

Ekuitas Awal per 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp27.256.349.028.467,20. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2020 di Neraca (*Audited*).

**5.6.2. Surplus/Defisit – LO** **Tahun 2021**  
**Rp1.040.137.445.090,11** **Tahun 2020**  
**Rp1.074.541.704.541,89**

Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.040.137.445.090,11. Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

**5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** **Tahun 2021**  
**Rp3.034.628.221.663,33** **Tahun 2020**  
**Rp472.324.115.084,73**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp3.034.628.221.663,33 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

**Tabel 5. 187. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Koreksi/Penyesuaian Piutang	(451.549.762,00)	(69.992.800.220,55)
Koreksi/Penyesuaian Persediaan	14.666.467.222,73	(38.755.472.221,00)
Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	25.360.728,00	-
Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	471.289.985,38	-
Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	514.145.454,00	(845.585.451,00)
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	662.564.518.061,68	240.555.245.249,91
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(352.732.121.153,93)	55.621.320.815,67
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	(43.218.151.289,07)	(16.831.239.537,64)
Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	(148.138.663,00)	5.838.053.434,46
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	57.549.434.867,59	270.455.312.318,83
Koreksi Utang	2.697.822.180.028,74	23.837.286.846,22
Koreksi Penyisihan Piutang	575.465.684,29	3.004.450.049,83
Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	(3.010.679.501,08)	(562.456.200,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.034.628.221.663,33</b>	<b>472.324.115.084,73</b>

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2021 sebesar Rp3.034.628.221.663,33 yang signifikan akibat dari koreksi atas utang jangka pendek lainnya yang seharusnya bagian dari SiLPA tetapi diakui sebagai pendapatan diterima dimuka atas Dana Otonomi Khusus sebesar Rp2.561.628.971.556,70, Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun 2017 sebesar Rp111.255.076.970,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan DAK Non Fisik Koperasi dan Pariwisata sebesar Rp2.262.188.338,36, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Kinerja Guru (TKG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru sebesar Rp20.943.032.382,00.

#### 5.6.4. Ekuitas Akhir

**Tahun 2021**                      **Tahun 2020**  
**Rp31.331.114.695.220,64**    **Rp27.256.349.028.467,20**

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Aceh untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.331.114.695.220,64 yang terdiri dari penambahan Ekuitas Awal atau Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp27.256.349.028.467,20, Surplus/Defisit-LO sebesar Rp1.040.137.445.090,11. dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp3.034.628.221.663,33.



## BAB VI INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian laporan keuangan, Pemerintah Aceh berupaya mengungkapkan seluruh informasi penting yang diperlukan. Banyak peristiwa yang terjadi serta kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang, peristiwa tersebut meliputi:

### 6.1. Penetapan APBA Tahun Anggaran 2021

Salah satu peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan adalah penetapan APBA. Penetapan APBA Tahun Anggaran 2021 ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2021, dengan tahapan yang dilakukan sebagaimana Tabel 6.1 di bawah ini.

**Tabel 6. 1. Tahapan Penetapan APBA 2021**

No	Uraian	Tanggal Penetapan	Dasar Pendukung
1.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS dari Kepala Daerah kepada DPRA	22 Juli 2021	Surat Gubernur Aceh Nomor 903/12724 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS-APBA Tahun Anggaran 2021
2.	KUA disepakati antara Gubernur Aceh dengan DPRA	20 November 2020	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA Nomor 903/16552 /2020 dan 930/02/2020 tentang Kebijakan Umum APBA Tahun Anggaran 2021
3.	PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRA	20 November 2020	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA Nomor 903/16551/2020 dan 930/ 03/ 2020 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021
4.	Penetapan Pedoman penyusunan RKA-SKPA oleh Kepala Daerah	03 September 2021	Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 570/ 1381/ 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA Tahun Anggaran 2021
5.	Pengambilan keputusan bersama DPRA dan Kepala Daerah terhadap RAPBA	22 Juli 2021	Berita Acara Nomor 814/ 1581/ 2021 Tentang Persetujuan Bersama Gubernur Aceh dan DPRA tentang Rancangan Qanun Aceh tentang Penjabaran TA 2021
6.	Penetapan Qanun APBA	13 Januari 2021	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2021

*Sumber : Bidang Anggaran BPKA*

## 6.2. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Undang-Undang tersebut selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Dana Otsus diterima sejak Tahun Anggaran 2008, dan sampai dengan Tahun Anggaran 2021 jumlah dana yang telah diterima adalah sebesar Rp88.437.338.903.500,00 dengan rincian sebagaimana Tabel 6.2.

**Tabel 6. 2. Penerimaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2008-2021**

Tahun Anggaran	PMK Nomor	Tanggal	Alokasi Anggaran Dana Otsus (Rp)	Realisasi Penerimaan Dana Otsus (Rp)
2008	56/PMK.07/2008	22 April 2008	3.590.142.897.000,00	3.590.142.897.000,00
2009	204/PMK.07/2008	10 Desember 2008	3.728.282.000.000,00	3.728.282.000.000,00
2010	160/PMK.07/2009	04 Nopember 2009	3.849.806.840.000,00	3.849.806.840.000,00
2011	231/PMK.07/2010	20 Desember 2010	4.510.656.496.500,00	4.510.656.496.500,00
2012	239/PMK.07/2011	27 Desember 2011	5.476.288.764.000,00	5.476.288.764.000,00
2013	195/PMK.07/2012	10 Desember 2012	6.222.785.783.000,00	6.222.785.783.000,00
2014	195/PMK.07/2013	17 Desember 2013	6.824.386.514.000,00	6.824.386.514.000,00
2015	PP Nomor 36 Tahun 2015	17 April 2015	7.057.756.971.000,00	7.057.756.971.000,00
2016	PP Nomor 137 Tahun 2015	27 Nopember 2015	7.707.216.942.000,00	7.707.216.942.000,00
2017	PP Nomor 86 Tahun 2017	30 Agustus 2017	7.971.646.295.000,00	7.971.646.295.000,00
2018	PMK 50 Tahun 2017	04 April 2017	8.029.791.593.000,00	8.029.791.593.000,00
2019	139/PMK.07/2019	08 Oktober 2019	8.357.471.654.000,00	8.357.471.654.000,00
2020	233/PMK.07/2020	30 Desember 2020	7.555.278.348.000,00	7.555.278.348.000,00
2021	94/PMK.07/2021	19 Juli 2021	7.555.827.806.000,00	7.555.827.806.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>88.437.338.903.500,00</b>	<b>88.437.338.903.500,00</b>

Sumber : Bidang Pendapatan BPKA

Pelaksanaan Otsus di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan Otsus dialokasikan sebagaimana *Lampiran 15*.

Pada Tahun 2021 diterbitkan PMK No. 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya. Dalam PMK tersebut ditetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.555.827.806.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp549.458.000,00 dari alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp7.555.278.348.000,00. Berdasarkan PMK tersebut juga mengatur bahwa jumlah alokasi sebesar Rp7.555.827.806.000,00 akan disalurkan dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi Khusus di RKUD pada akhir tahun anggaran sebelumnya.

**Tabel 6. 3. Rincian Pengelolaan Dana Otsus Provinsi dan Kab/Kota 2008-2021**

NO	TAHUN	ALOKASI PROVINSI (Rp)	ALOKASI KAB/KOTA	ALOKASI IBU KOTA PROVINSI (1% DARI ALOKASI PROVINSI)	KEGIATAN BERSAMA	TOTAL
1	2008	1.472.132.897.000,00	2.118.010.000.000,00	-	-	3.590.142.897.000,00
2	2009	1.610.272.000.000,00	2.118.010.000.000,00	-	-	3.728.282.000.000,00
3	2010	1.612.837.640.000,00	2.236.969.200.000,00	-	-	3.849.806.840.000,00
4	2011	2.200.772.392.499,00	2.309.884.104.001,00	-	-	4.510.656.496.500,00
5	2012	2.769.894.866.100,00	2.706.393.897.900,00	-	-	5.476.288.764.000,00
6	2013	2.937.012.524.600,00	3.285.773.258.400,00	-	-	6.222.785.783.000,00
7	2014	3.811.536.901.955,00	2.974.349.239.298,00	38.500.372.747,00	-	6.824.386.514.000,00
8	2015	4.005.951.596.377,00	3.011.341.217.084,00	40.464.157.539,00	-	7.057.756.971.000,00
9	2016	4.702.599.680.968,00	2.958.797.424.800,00	45.819.836.232,00	-	7.707.216.942.000,00
10	2017	4.536.904.818.351,00	3.388.914.155.252,00	45.827.321.397,00	-	7.971.646.295.000,00
11	2018	4.361.174.501.868,00	2.675.841.166.012,00	-	992.775.925.100,00	8.029.791.592.980,00
12	2019	4.274.191.114.497,00	2.559.003.693.059,00	42.741.911.145,00	1.481.534.935.299,00	8.357.471.654.000,00
13	2020	3.283.392.714.129,00	2.211.387.355.580,00	32.833.927.141,00	2.027.664.351.150,00	7.555.278.348.000,00
14	2021	3.164.243.692.818,00	2.130.747.898.654,00	31.642.436.928,00	2.229.193.777.600,00	7.555.827.806.000,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA (diolah)

Sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasiannya paling banyak sebesar 40% untuk Program dan Pembangunan Aceh dan paling sedikit 60% untuk Program dan Kegiatan Kab/Kota. Pada Tahun 2013 terbit Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasiannya berubah yaitu sebesar 60% untuk Program dan Pembangunan Aceh dan 40% untuk Program dan Kegiatan Kab/Kota. Selain diperuntukan untuk program dan Pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga dialokasikan paling banyak 1% untuk Pembangunan Ibu Kota Aceh. Kemudian pada Tahun 2016 Qanun tersebut diubah kembali melalui Qanun 10 tahun 2016 yaitu Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk program dan kegiatan bersama Aceh dan Kab/Kota kemudian dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan aceh dan paling banyak 40% dianggarkan untuk program dan kegiatan Kab/Kota.

Pada Tahun 2018 terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasian Dana Otonomi Khusus dengan perimbangan untuk program bersama pemerintah aceh dana Kabupaten/Kota serta paling sedikit sebesar 60% untuk program kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak 40% untuk program kegiatan dan pembangunan Kabupaten/Kota. Selain diperuntukan untuk program kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dialokasikan sebesar 1% untuk Pembangunan Ibukota Aceh.

**Tabel 6.4. Alokasi Dana Otsus Aceh Per Bidang Berdasarkan UU No. 11/2006 dan Qanun No.2/2008**

Tahun	BIDANG							Total
	INFRASTRUKTUR	PEMBERDAYAAN EKONOMI	PENGENTASAN KEMISKINAN	PENDIDIKAN	SOSIAL	KESEHATAN	KEISTIMEWAAN ACEH	
2008	1.901	860	12	418	66	171	162	<b>3.590</b>
2009	2.399	466	4	267	107	440	46	<b>3.729</b>
2010	1.982	1.108	64	371	17	290	18	<b>3.850</b>
2011	2.524	621	501	33	59	401	372	<b>4.511</b>
2012	1.565	987	610	1.357	159	667	132	<b>5.477</b>
2013	2.836	938	953	764	131	560	41	<b>6.223</b>
2014	3.521	549	166	1.570	166	807	46	<b>6.825</b>
2015	3.206	778	169	1.684	214	893	113	<b>7.057</b>
2016	3.678	992	210	1.582	117	967	161	<b>7.707</b>
2017	2.867	942	412	2.014	215	1.280	241	<b>7.971</b>
2018	3.683	836	462	1.624	177	1.179	67	<b>8.028</b>
2019	3.169	751	859	2.184	104	1.142	149	<b>8.358</b>
2020	2.574	441	518	1.431	1.052	1.418	118	<b>7.552</b>
2021	3.097	460	241	1.656	297	1.632	169	<b>7.552</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>39.002</b>	<b>10.729</b>	<b>5.181</b>	<b>16.955</b>	<b>2.881</b>	<b>11.847</b>	<b>1.835</b>	<b>88.430</b>
%	44,10	12,13	5,86	19,17	3,26	13,40	2,08	<b>100,00</b>

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA (diolah)

### 6.3. Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

Pelaksanaan JKRA didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Peserta JKRA adalah seluruh penduduk Aceh, tidak termasuk peserta Askes Sosial, pejabat negara yang iurannya dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Pelayanan kesehatan yang ditanggung meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan tambahan yang difasilitasi dalam program JKRA untuk penduduk Aceh berupa pelayanan Transportasi. Pelayanan kesehatan tersebut disediakan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero)/BPJS.

Realisasi penggunaan dana JKA/JKRA sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 yang telah disalurkan kepada PT Askes/BPJS sebagaimana Tabel 6.5.

**Tabel 6.5. Realisasi JKRA Tahun 2010-2021**

Tahun Anggaran	Realisasi JKRA
	(Rp)
2010	241.965.073.000,00
2011	399.530.559.122,00
2012	419.000.000.000,00
2013	419.124.502.998,00
2014	364.327.519.598,00
2015	438.308.664.518,00



Tahun Anggaran	Realisasi JKRA
	(Rp)
2016	532.511.267.125,00
2017	555.692.673.000,00
2018	515.747.055.000,00
2019	611.557.484.950,00
2020	888.634.436.616,00
2021	1.012.476.276.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.398.875.511.927,00</b>

Sumber : sipkd.acehprov.go.id

#### 6.4. Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang belum dibayarkan sampai dengan TA 2021

Pada TA 2020 dilakukan inventarisasi ulang oleh Dinas Pengairan Aceh terhadap paket pekerjaan penanganan darurat bencana alam dengan hasil 48 paket yang belum dilakukan pembayaran. Pembayaran paket pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2019 terdiri:

- Pada TA 2010 satu paket sebesar Rp4.940.525.000,00;
- Pada TA 2011 satu paket sebesar Rp731.250.000,00;
- Pada TA 2013 empat belas paket sebesar Rp17.159.782.000,00;
- Pada TA 2018 satu paket sebesar Rp1.200.000.000,00; dan
- Pada TA 2021 12 paket sebesar Rp47.962.862.000,00.

Sedangkan sisanya sebanyak 19 paket pekerjaan berupa:

- Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi dan Akta Perdamaian sebanyak 15 paket dengan nilai pokok utang sebesar Rp42.018.284.792,19 dan bunga sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp52.090.215.573,57 sehingga total kewajiban sebesar Rp94.108.500.365,76, dengan rincian pada **Lampiran 16a**.
- Tanpa Gugatan Hukum sebanyak empat paket dengan nilai pokok utang sebesar Rp6.262.021.000, dengan rincian pada **Lampiran 16b**.

#### 6.5. Pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang belum dibayarkan sampai dengan TA 2021

Paket pekerjaan yang belum terbayar atas putusan *inkracht* terdiri dari:

- Pekerjaan Penanganan Darurat Banjir Bandang Tangse, SMPK No.350/015.1/2011 tgl. 11 Maret 2011 an. PT. Kuala Makmur (Inkrah = Putusan PN Banda Aceh 16 Okt.2014, PT Banda Aceh tgl.14 Sep.2015, dan MA RI tgl.17 Mai 2016) dengan nilai kontrak Rp568.462.000,00, Denda Rp665.100.540,00 sehingga total bayar Rp1.233.562.540,00.
- Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah-Aron Patah Kec. Pangga Aceh Jaya, SMPK No.192.8/611.51/2010 tgl. 13 Des 2010 an. CV. Barona Ilham ( Inkrah = Putusan PN Banda Aceh tgl.24 Sep.2019, PT Banda Aceh tgl.20 Peb.2015, dan MA RI tgl.19 Juli 2016) dengan Nilai kontrak sebesar Rp173.886.000,00.

**6.6. Pengadaan pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp95.347.907.960,00 belum dibayarkan sampai dengan TA 2021**

Dinas Pendidikan Aceh belum menyajikan kewajiban pada Laporan Keuangan terkait adanya paket pekerjaan TA 2019 yang belum dilakukan pembayaran atas 378 paket pekerjaan dengan nilai sebesar Rp95.347.907.960,00. Terhadap paket pekerjaan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Aceh yang di tuangkan dalam Laporan Nomor 900/A.I/039/IA tanggal 14 Januari 2021.

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh tanggal 24 Februari 2021, mengajukan permintaan pembayaran terhadap paket pekerjaan TA 2019 sebesar Rp34.157.968.000,00 atas pekerjaan:

- Pengadaan Alat Media Publikasi dan Sosialisasi Informasi Digital SMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp12.478.470.000,00.
- Pengadaan Alat Media Pembelajaran Multimedia Interaktif SMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp12.408.770.000,00.
- Pengadaan Alat Media Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.970.728.000,00.
- Pengadaan Server UNBK SMA / SMK Rp1.300.000.000,00.

**6.7. Utang Pemerintah Aceh pada Pemerintah Pusat**

**Tabel 6. 6. Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang**

Penarikan (Rp)	Pembayaran Pokok (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Non Pokok (Rp)	Belum Jatuh Tempo (Rp)	Hak Tagih (Rp)
*16.915.000.000,00	*6.343.125.000,00	10.571.875.000,00	*13.626.051.048,22	0,00	23.833.926.048,22
**0,00	**10.571.875.000,00		***0,00		
***0,00	***0,00				
*Penarikan Kas	*Pembayaran		*Non Pokok		
**Penarikan	**Reorganisasi		**Lainnya Prorata		
Reorganisasi	***Mutasi Kurang				
***Penarikan	Lainnya				
Kapitalis					

Sumber: Rekonsiliasi dengan DJKN

Kewajiban ini timbul dalam rangka pembiayaan tambahan penyertaan modal Pemerintah Aceh ke dalam modal PT. Bank BPD Aceh pada tahun 1999, dengan perjanjian pinjaman Nomor RDI-352/DP3/1999 tanggal 7 Mei 1999. Pinjaman berasal dari Rekening Dana Investasi sebesar Rp16.915.000.000,00 yang selanjutnya dilakukan amandemen terhadap naskah pinjaman tersebut dengan Nomor Amandemen: AMA-171/RDI-352/DSMI/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

Terhadap seluruh kewajiban pinjaman tersebut telah dilakukan penghapusan melalui mekanisme *Debt Swap* dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat). Rencana pelaksanaan *Debt Swap* telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Manajemen Investasi untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6. 7. Rencana Debt Swap**

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	3.560.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	439.991.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	23.908.900.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh	3.605.205.000,00	-	11.060.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.448.809.000,00</b>	<b>13.279.939.000,00</b>	<b>38.528.900.000,00</b>
<b>Total Usulan</b>				<b>58.257.648.000,00</b>

Sumber: DPA SKPA

Sedangkan Realisasi kegiatan *Debt Swap* adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. 8. Realisasi Kegiatan Debt Swap**

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	2.421.786.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	439.991.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	21.219.525.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komitel Aceh	3.605.205.000,00	-	9.889.747.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.448.809.000,00</b>	<b>13.279.939.000,00</b>	<b>33.531.058.000,00</b>
<b>Total Realisasi</b>				<b>53.259.806.000,00</b>

Sumber: DPA SKPA

Terhadap usulan realisasi kegiatan *debt swap* pada tahun 2014, setelah dilakukan verifikasi ulang pada tahun 2017, realisasi kegiatan *debt swap* adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. 9. Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan Debt Swap**

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	2.929.719.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	430.921.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	21.186.445.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komitel Aceh	3.605.182.040,00	-	9.946.412.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.439.716.040,00</b>	<b>13.279.939.000,00</b>	<b>34.062.576.000,00</b>
<b>Total Realisasi</b>				<b>53.782.231.040,00</b>

Sumber: DPA SKPA

Tindak lanjut dari pelaksanaan *debt swap*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, membentuk Tim Verifikasi pelaksanaan *debt swap* dengan Surat Tugas Nomor ST-158/D3-01/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan suratnya Nomor S/202/PB/2018 perihal Tindaklanjut Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi *debt swap* Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa hasil verifikasi atas pelaksanaan *debt swap* pada Pemerintah Aceh telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 176/PMK.05/2016, disampaikan bahwa penyelesaian

restrukturisasi pinjaman akan diproses lebih lanjut. Rincian hasil verifikasi pelaksanaan *debt swap* sebagai berikut.

**Tabel 6. 10. Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan Debt Swap**

No	Nama Pemerintah Daerah	Kewajiban Pelaksanaan Debt Swap (Rp)	Realisasi Kegiatan			Pemenuhan Debt Swap (Rp)	Sisa Tunggakan akan Debt Swap (Rp)
			Sesuai Kriteria Debt Swap (Rp)	Tidak Sesuai Kriteria Debt Swap (Rp)	Total (Rp)		
1	Aceh	23.833.926.048,23	48.507.301.040,00	5.274.930.000,00	53.782.231.040,00	23.833.926.048,23	-
<b>Jumlah</b>		<b>23.833.926.048,23</b>	<b>48.507.301.040,00</b>	<b>5.274.930.000,00</b>	<b>53.782.231.040,00</b>	<b>23.833.926.048,23</b>	<b>-</b>

Sumber: DPA SKPA

Pada TA 2021, telah dilakukan rekonsiliasi antara Kantor wilayah Direktorat Jenderal *Perbendaharaan* Provinsi Aceh dengan Pemerintah Aceh. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pemprop. NAD Nomor: AMA-17/RDI-352/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 Nomor Berita Acara:BAR/04/2-2021/WPB.01/2022 bahwa Hak Tagih Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dihitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

Terhadap Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat tersebut sudah mendapat persetujuan presiden atas permohonan penghapusan piutang negara secara bertahap, hal ini sesuai dengan penyampaian Tindaklanjut pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2019 BA 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Pemerintah Daerah yang telah memperoleh penghapusan bersyarat dimaksud masih memiliki hak tagih kepada negara hingga terbitnya penghapusan mutlak yang ditetapkan Menteri Keuangan atau Presiden sesuai kewenangan dalam PP Nomor 14 Tahun 2005.

## 6.8. Belanja TA 2021 yang belum terbayarkan pada beberapa SKPA per 31 Desember 2021:

### 1. Dinas Peternakan Aceh

Terdapat empat paket pekerjaan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang belum dibayar s/d 31 Desember 2021 dengan nilai bayar sebesar Rp365.108.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan ternak sapi untuk Kelompok Ternak Saree Tabina Desa Cot Punti Kec. Woyla Timur Kab. Aceh Barat sebesar Rp99.279.000,00;
2. Pengemukan kerbau kelompok Gampong Palak Kerambil, Kab. Aceh Barat Daya, Susoh, Kedai Palak Kerambil sebesar Rp78.185.000,00;
3. Penggemukan Kerbau untuk Kelompok Gampong Hulu Pisang, Gampong Hulu Pisang, Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Hulu Pisang sebesar Rp93.822.000,00;
4. Pengemukan Kerbau untuk Kelompok Padang Jaya Gampong Kuta Trieng Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan sebesar Rp93.822.000,00.

### 2. Dinas Koperasi dan UKM Aceh

Terdapat enam paket pekerjaan berupa barang untuk pihak ketiga TA 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.936.546.378,00.





### 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Terdapat sisa kontrak pekerjaan penataan Kawasan Wisata Gapang Sabang dengan nilai sebesar Rp503.124.830,28

### 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh

- a. Terdapat 13 paket pekerjaan yg tidak terbayar sampai akhir tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp1.718.844.142,43; dan
- b. Terdapat empat paket kontrak melampaui akhir tahun dengan denda keterlambatan dengan nilai kontrak Rp772.743.864,41.

### 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh

Belanja modal Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) dengan nilai kontrak sebesar Rp18.719.055.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp2.180.769.909,00.

### 6. Dinas Kesehatan Aceh

Pembangunan RS Rujukan Regional dr. Fauziah Bireuen dengan nilai kontrak sebesar Rp24.353.127.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp5.296.805.122,50.

### 7. Dinas Syariat Islam Aceh

Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Utama Bener Meriah Confention Center) dengan nilai kontrak sebesar Rp41.158.380.803,54 dan sisa pembayaran sebesar Rp2.769.959.028,07

### 8. Dinas Pengairan Aceh

- a) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Samalanga Kab. Bireuen, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.949.887.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp282.733.615,00;
- b) Pembangunan Jetty Kuala Krueng Sabee Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp17.340.000.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp1.272.235.800,00; dan
- c) Normalisasi dan Perkuatan Tebing Lampahan KM. 76 Kab. Bener Meriah dengan nilai kontrak sebesar Rp3.994.580.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp798.916.000,00.

### 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Pembangunan Jalan Trienggadeng-Batas Bireun dengan nilai kontrak sebesar Rp10.459.450.421,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp3.414.487.591,00;
- b) Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan - Rundeng (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp13.886.913.916,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp3.683.781.656,00;
- c) Pembangunan Jalan Dua Jalur Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong Kab. Aceh Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp22.551.504.475,01 dan sisa pembayaran sebesar Rp9.727.140.696,01;
- d) Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh selatan - Rundeng dengan nilai kontrak sebesar Rp8.447.452.500,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp768.253.568,00;
- e) Pemeliharaan Berkala Jalan Subulussalam - Rundeng dengan nilai kontrak sebesar Rp8.406.278.600,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp1.258.840.220,00;



- f) Pembangunan Box Culvert II Ruas Jalan Gunung Kapur - Trumon - Pulo Paya dengan nilai kontrak sebesar Rp500.680.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp79.354.391,00;
- g) Pembangunan Box Culvert I Ruas Jalan Gunung Kapur - Trumon - Pulo Paya dengan nilai kontrak sebesar Rp480.031.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp33.875.052,00;
- h) Pembangunan Jembatan Luan Linggi Ruas Jalan Sinabang-Sibigo dengan nilai kontrak sebesar Rp8.817.957.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp3.120.719.072,00;
- i) Pembangunan Jembatan Suak Linggi Ruas Jalan Sinabang - Sibigo dengan nilai kontrak sebesar Rp4.800.000.000,00 dan sisa pembayaran sebesar Rp3.776.280.000,00. Rincian dapat di lihat pada **Lampiran 17**.

## **BAB VII**

### **PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **7.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh**

Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01o58'37,2"- 06o04'33,6" Lintang Utara dan 94o57'57,6"- 98o17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sumatera Utara dan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia

Aceh memiliki luas wilayah darat 58.880,87 km<sup>2</sup>, wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada tahun 2011, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 805 mukim dan 6.497 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor: 140/632/2017).

Aceh memiliki mekanisme dan aturan adat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme dan aturan itu tertuang dalam aturan Lembaga Adat, sesuai Pasal 98 ayat (3) UUPA antara lain seperti Panglima Laot, Pawang Glee, dan Kejreun Blang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Untuk mengurangi perubahan fungsi baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya perlu dilakukan penegasan dan penataan batas masing-masing kawasan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan konversi lahan yang menyalahi aturan ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dengan permohonan pemanfaatan ruang oleh pihak ketiga.

##### **7.1.1. Wilayah Rawan Bencana**

Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami bencana gempa dan tsunami yang cukup besar pada tahun 1797, 1891, 1907 dan 2004. Bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan 126.915 jiwa meninggal, 37.063 jiwa hilang, lebih kurang 100.000 jiwa luka berat maupun ringan serta 517.000 unit rumah rusak terutama di wilayah pesisir pantai barat Aceh. Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Aceh juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit.

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran lahan dan hutan. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dilaporkan sebanyak 682 kejadian bencana atau rata-rata 136 kejadian bencana per tahun.

Terdapat dua tipe gunung api di Aceh, yaitu gunung api tipe A dan tipe C. Gunung api tipe A yaitu Gunung Api Seulawah Agam di Aceh Besar, Gunung Api Puet Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, dan Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah, sedangkan gunung api tipe C yaitu Gunung Api Jaboi di Sabang.

### 7.1.2. Demografi

Berdasarkan data BPS Provinsi Aceh Tahun 2021, jumlah penduduk Aceh 5,33 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,52 juta jiwa (66,2%) penduduk di Serambi Mekkah merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun). 1,8 juta jiwa (33,8%) penduduk Aceh merupakan kelompok usia tidak produktif. Dengan rincian, ada 1,54 juta jiwa (29,4%) merupakan penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan 255,81 ribu (4,8%) penduduk usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Adapun dilihat dari Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Wilayah Provinsi Aceh terdiri atas: 1) Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas), 2) Penduduk Angkatan Kerja, 3) Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas), dan 4) Pengangguran (Mencari Kerja). Pada Tahun 2021 jumlah angkatan kerja mencapai 2.520.157 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebanyak 59,76 persen, atau sebanyak 2.361.300 orang bekerja dan sisanya adalah pengangguran atau sebesar 6.30 persen.

Kabupaten Aceh Utara mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 608,11 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Bireuen 439,79 ribu jiwa dan Kabupaten Pidie 439,40 ribu jiwa. (Tabel 3.1.1). Kepadatan penduduk Aceh tahun 2021 adalah 92 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di kota, umumnya lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk di kabupaten. Kota Banda Aceh mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.156 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah di Kabupaten Gayo Lues dengan 18 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 7.1.3. Sosiologi

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam

pembangunan, ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesehajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangan.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggung jawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu “Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana”. Dalam konteks kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otorianisme.

Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laut yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumber daya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

#### **7.1.4. Pemerintahan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi DPRD sebagai lembaga legeslatif dan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan seorang Wakil Gubernur.

Selanjutnya berdasarkan MoU Helsinki telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengharuskan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Dan terbitnya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh membentuk perangkat daerah Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh, Dinas, Badan dan Kantor yang masing-masing disebut sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Aceh dan 3 (tiga) orang Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Keistimewaan Aceh,

Pembangunan dan Ekonomi, serta Asisten Administrasi Umum. Pemerintah Aceh menyusun dan menata kembali SOTK yang baru perangkat Aceh.

Beberapa SKPA yang berubah adalah Dinas Keuangan dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang kemudian menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Sementara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh dipecah menjadi Badan Kepegawaian Aceh serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Aceh. Selanjutnya adalah Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yang menjadi Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Dinas Bina Marga Aceh menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Sementara Dinas Cipta Karya Aceh menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh.

Selanjutnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh yang kemudian menjadi Dinas Pangan Aceh. Sementara itu Dinas Kehutanan Aceh dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Untuk selanjutnya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dipecah menjadi Dinas Perhubungan serta Dinas Informatika dan Persandian Aceh. Sementara Badan Investasi dan Promosi Aceh dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dilebur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh untuk kemudian menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan dilebur menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Sementara Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan Aceh berubah menjadi Dinas Peternakan Aceh. Selanjutnya adalah Dinas Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah kemudian menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Aceh berubah untuk kemudian Dinas Pertanahan Aceh. Pemerintah kemudian juga membentuk Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan meniadakan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Aceh. Selanjutnya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh yang menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

**Tabel 7. 1. Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN
1	Dinas Pendidikan Aceh
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
4	Dinas Kesehatan Aceh
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin
6	Rumah Sakit Jiwa
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
9	Dinas Pengairan Aceh
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh



---

<b>NO.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
13	Dinas Sosial Aceh
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
16	Dinas Pangan Aceh
17	Dinas Pertanahan Aceh
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
21	Dinas Perhubungan Aceh
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
31	Dinas Peternakan Aceh
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
34	Sekretariat Daerah Aceh
35	Sekretariat DPRA
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
37	PPKA
38	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
39	Badan Kepegawaian Aceh
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
41	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
42	Inspektorat Aceh
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
44	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
45	Dinas Syariah Islam Aceh
46	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
47	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
48	Sekretariat Baitul Mal Aceh

---

## 7.2. Visi dan Misi Pemerintah Aceh

Visi Aceh Hebat tahun 2017-2022 adalah terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Berdasarkan kondisi kekinian Aceh, Prioritas pembangunan untuk Provinsi Aceh dijabarkan dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Visi Misi tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, kesepuluh prioritas pembangunan tersebut yaitu:

- a. Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang adil, bersih dan melayani
- b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan itikad Ahlulsunnah WalJamaah yang bersumber hukum mazhab Syafiiyah dengan tetap menghormati mazhab lainnya
- c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan Perdamaian berdasarkan Mou Helsingki
- d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional maupun regional
- e. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi
- f. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan
- g. Menyediakan sumber listrik yang bersih dan terbarukan
- h. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif
- i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan
- j. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Langkah Pemerintah Aceh, guna mewujudkan prioritas pembangunan diatas di jabarkan dalam capaian-capaian 15 Unggulan Aceh Hebat periode tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

#### **1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)**

Untuk menyukseskan program Aceh Seujahtera (JKA Plus) pemerintah Aceh telah membuat beberapa terobosan, yaitu dengan menyederhanakan proses administrasi berobat bagi pasien, melakukan integrasi sistem pendaftaran dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

Saat ini, sebagian besar Rumah Sakit di Aceh telah menggunakan Sistem Informasi Rumah Sakit. Dengan sistem ini, pasien dan keluarga pasien akan mengetahui ketersediaan tempat tidur dan ruang berobat, sehingga akan mempermudah keluarga pasien menentukan rujukan bagi pasien. Para petugas medis pun akan membantu dengan memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan.

#### **2. Aceh SIAT**

SIAT, adalah singkatan dari Sistem Informasi Aceh Terpadu. Untuk mendukung program ini, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Aceh tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh nomor 29 tahun 2017 . dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 Tentang





Sistem Informasi Aceh Terpadu yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis pelayanan prima kepada masyarakat Aceh.

### **3. Aceh Caroeng**

Aceh Carong yang digulirkan Pemerintah Aceh untuk anak kurang mampu, yatim piatu dan korban konflik dari tahun ke tahun. Untuk program Diploma 3 pada tahun 2019 adalah 115 orang, tahun 2020 adalah 115 orang dan tahun 2021 adalah 370 orang. Sedangkan untuk Beasiswa S1 Aceh Carong, pada tahun 2019 adalah 700 orang dan pada tahun 2021 adalah 1200 orang.

### **4. Aceh Energi**

mewujudkan ketersediaan energi bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral telah melakukan pemasangan instalasi listrik rumah sederhana pada tahun 2017 sebanyak (1.109) unit, 2018 (1.903) unit, 2019 (5.683) unit, 2020 (844) unit dan 2021 sebanyak(1.215)unit. Total sebanyak 10.574 unit instalasi listrik telah terpasang untuk masyarakat Aceh selama kurun waktu lima tahun.

### **5. Aceh Meugo dan Meulaot**

Program Aceh Meugoe dan Meulaot fokus pada pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, peningkatan nilai tambah produksi perikanan, dengan mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Aceh telah membangun 17 cluster budidaya perikanan, BLU PPS di Lampulo dan Idi. Budidaya Perikanan Air Tawar dan Laut di 23 kabupaten/kota.

Sebagai bentuk pengawasan, Pemerintah Aceh juga dilaksanakan patroli Marine Control System (MCS) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 di Bireuen dan Aceh Utara, patroli MCS WPP 572 di Meulaboh dan Singkil.

### **6. Aceh Troe**

Aceh dikenal dengan negeri yang kaya. Hasil bumi melimpah khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan. Kedua sektor ini merupakan sektor sangat besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya Aceh Troe dan sejahtera. Aceh memiliki hamparan lahan perkebunan, lahan tanaman pangan, dan palawija.

### **7. Aceh Kreatif**

Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gencar mengampanyekan pariwisata halal. Aceh sebagai salah satu daerah kepariwisataan halal usai meraih peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal unggulan Indonesia tahun 2019. Selain itu juga Aceh dengan giatnya membangun brand wisata halal dengan terus menerus melakukan event yang bernuansa keislaman, salah satunya dengan pelaksanaan Festival Ramadhan. Selain itu Aceh juga terus berinovasi dan meningkatkan pariwisata di Aceh khususnya pada Agro Wisata dengan memperkuat infrastruktur dan pengembangan agro



wisata di Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah yang merupakan wilayah dataran tinggi di Aceh.

#### **8. Aceh Kaya**

Program Aceh Kaya adalah program khusus yang disiapkan Pemerintah Aceh dengan tujuannya untuk memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bersama dengan sektor industri perdagangan, koperasi, dan pariwisata. Salah satunya dengan mempermudah akses modal Bank Aceh dan BPR Mustaqim untuk UMKM dan IKM.

#### **9. Aceh Peumulia**

Program Aceh pemulia adalah program unggulan untuk pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) yang dijalankan dengan pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja untuk peningkatan disiplin dan etos kerja ASN Aceh. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan Tata kelola pemerintah semakin baik. Hasilnya Aceh berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI enam kali berturut-turut. Penempatan aparatur yang berkualitas tersebut tak lain tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan bagi masyarakat.

#### **10. Aceh Dame**

Program Aceh Dame merupakan program penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Artinya seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai. Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah upaya pemerintah dengan cara memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah.

#### **11. Aceh Meudadab**

Membentuk perilaku masyarakat Aceh yang meudadab, dilakukan melalui tempat pendidikan. Setiap jenjang pendidikan sekolah di seluruh Aceh, baik SD, SMP maupun SMA, telah menerapkan kurikulum Islami. Dengan demikian, Aceh akan mencetak masyarakat yang berakhlakul karimah, karena telah dibina semenjak dalam masa pendidikan. Penerapan kurikulum tersebut, sesuai dengan perintah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan.

#### **12. Aceh Teuga**

Aceh terus membina dan melatih atlet usia muda. Salah satunya di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Aceh. Sejumlah kejuaraan nasional yang diikuti oleh atlet Aceh. Mereka berhasil meraih prestasi di berbagai cabang olahraga. Untuk terus menjaga dan meningkatkan prestasi bidang olahraga Aceh, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, menghadirkan pelatih dari luar negeri untuk membina atlet sepakbola U-16 dalam kurun waktu 2018-2019. Kemudian, pembinaan atlet usia 16-18 dengan jumlah 150 orang setiap tahun diasramakan di PPLP daerah di Lhong Raya, Banda Aceh.

### 13. Aceh Green

Program Aceh Green merupakan salah satu bukti kuatnya komitmen Pemerintah Aceh untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup di Bumi Serambi Mekah. Salah satu upaya pemerintah adalah melanjutkan moratorium penebangan hutan.

Semenjak berakhirnya moratorium tambang setahun silam, pemerintah tidak mengeluarkan lagi izin tambang baru untuk logam maupun batubara. Hal tersebut dilakukan guna melestarikan hutan Aceh. Sampai April 2019, moratorium tersebut membuktikan bahwa sudah 98 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh dicabut, atau disebut dengan Surat Keputusan pengakhiran. Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, pemerintah Aceh lebih fokus kepada pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

### 14. Aceh Seuninya

Aceh Seuninya adalah program untuk mewujudkan seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

### 15. Aceh Seumeugot

Pemerintah telah berhasil membangun sarana infrastruktur baik konektivitas maupun sebagai penunjang aktivitas masyarakat, seperti jalan, jembatan, waduk dan irigasi. Selanjutnya, pemerintah Aceh telah melakukan penyelesaian sarana prasarana perlindungan pemukiman, pertanian dan pusat kegiatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Mengacu pada beberapa indikator sosial ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan Aceh diarahkan kepada sektor investasi dan produksi dengan penguatan pada fungsi ekonomi. Maka penetapan prioritas pada pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, reformasi birokrasi dan sistem informasi yang terintegrasi dengan sumber APBN, APBA, APBK, Pendanaan Luar Negeri, dan Investasi merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Aceh menuju Aceh Hebat.

Disamping prioritas di atas, dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah terus memprioritaskan pembangunan dalam bidang keagamaan, baik program-program penguatan akidah maupun program-program penguatan kapasitas keilmuan syariah. Hal tersebut juga melanjutkan keberlangsungan perdamaian pasca konflik dengan mengimplementasikan amanat MoU Helsinki.



## **BAB VIII PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan bagi DPR Aceh sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021 atas pengelolaan keuangan daerah.

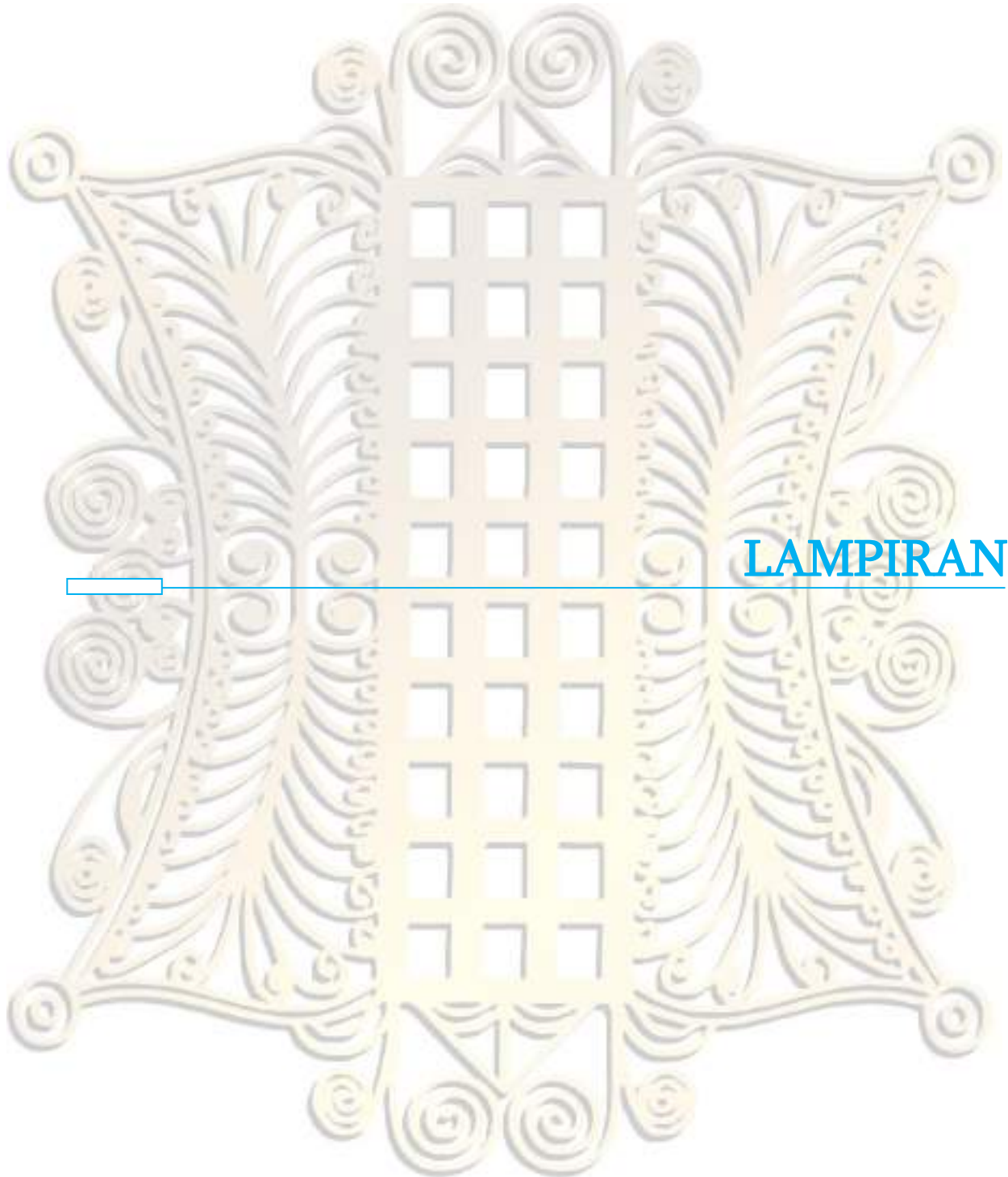
Banda Aceh, 27 April 2022

GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



LAMPIRAN

## Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.261.107.648.371,00	858.620.346.850,09	68,08	41.323.098.256,40
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	503.631.434,00	80.230.000,00	15,93	284.834.941.131,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	18.156.000,00	-	-	-
4	Belanja Jasa Kantor	1.060.910.690.551,00	899.026.717.432,01	84,74	213.583.542.455,73
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.019.600.827.100,00	1.015.700.713.104,00	99,62	879.272.835.091,00
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	42.995.411.685,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	22.964.845.890,00
8	Belanja Sewa Tanah	5.606.150.000,00	3.525.224.000,00	62,88	-
9	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.656.266.697,00	12.392.604.492,00	50,26	12.341.674.677,00
10	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	79.570.841.772,00	55.683.091.938,00	69,98	35.535.416.506,00
11	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.250.000,00	62.750.000,00	89,32	-
12	Belanja Makan dan Minum	-	-	-	66.372.029.801,00
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	8.537.157.307,00
14	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	3.271.556.528,00
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	4.160.573.000,00
16	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	567.434.000,00	315.214.000,00	55,55	-
17	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.363.554.864,00	36.559.549.787,00	60,57	79.774.801.949,00
18	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.630.247.500,00	2.396.054.200,00	42,56	32.943.541.150,00
19	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.971.327.000,00	1.132.213.600,00	57,43	-
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	11.660.000.000,00	8.931.969.459,00	76,60	3.442.097.464,00
21	Belanja Beasiswa Anak Yatim Piatu (OTSUS)	-	-	-	215.488.800.000,00
22	Honorarium PNS	-	-	-	169.422.278.603,50
23	Honorarium Non PNS	-	-	-	507.679.635.944,00
24	Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq	-	-	-	62.792.935.769,00
25	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26.542.374.054,00	15.297.855.183,00	57,64	2.675.125.776,00
26	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	28.116.040,00	2.347.136,00	8,35	-
27	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	36.000.000,00	25.011.000,00	69,48	-
28	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	66.528.061.108,36
29	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.624.300.923,00	667.451.080,00	41,09	-
30	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.746.305.442,00	71.308.445.139,24	83,16	-
31	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.017.058.900,00	36.891.318.156,78	70,92	-
32	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.819.468.216,00	24.736.922.465,00	67,18	-
33	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.034.969.449,00	8.417.579.236,78	76,28	-
34	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	341.924.021.524,00	245.286.588.050,00	71,74	159.262.589.187,00
35	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	24.348.575.622,00	2.882.290.921,26	11,84	-
36	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	368.761.076.840,00	356.308.613.011,00	96,62	61.737.064.342,00
37	Jasa Pelayanan Medical Check Up	-	-	-	222.239.000,00
38	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.497.752.500,00	6.741.820.000,00	70,98	-
39	Belanja Barang dan Jasa BOS	928.790.450.000,00	954.701.016.445,88	102,79	231.729.061.218,00
40	Belanja Barang dan Jasa BLUD	517.509.638.118,00	508.261.215.628,10	98,21	493.513.447.898,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.936.917.132.917,00</b>	<b>5.125.955.152.315,14</b>	<b>86,34</b>	<b>3.702.404.761.736,99</b>

**Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021  
dan Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	759.750.000,00	2.250.000,00	0,30	2.015.244.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	7.375.977.837,00	5.573.070.050,00	75,56	1.206.545.900,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	66.034.764.339,00	29.336.999.148,41	44,43	55.023.936.835,30
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	16.950.723,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	91.230.327.501,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	34.359.116,00	16.590.000,00	48,28	16.280.000,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	66.108.000,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	3.877.400.098,00	3.640.481.900,00	93,89	412.740.512,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.242.830.000,00	2.213.866.771,00	98,71	4.778.396.676,50
10	Belanja Modal Alat Kantor	15.897.532.563,00	13.102.632.280,59	82,42	16.362.955.163,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	53.673.735.643,00	28.790.976.535,15	53,64	74.762.500.628,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.862.348.550,00	6.192.168.280,00	90,23	3.548.199.295,00
13	Belanja Modal Alat Studio	7.096.971.499,00	6.281.970.775,00	88,52	12.677.242.186,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	327.344.500,00	316.779.000,00	96,77	1.115.940.700,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.073.000.000,00	988.460.000,00	92,12	-
16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	48.907.500,00	32.257.500,00	65,96	-
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.105.566.145,00	8.927.457.828,00	80,39	13.975.022.594,00
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	20.379.460.666,00	17.156.213.892,00	84,18	1.781.255.641,00
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.507.189.491,00	3.549.526.200,00	78,75	5.298.070.171,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	93.523.831.891,00	88.386.449.492,00	94,51	74.742.173.367,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	16.403.960,00	9.790.000,00	59,68	-
22	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-	-	3.500.000,00
23	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	-	-	-	763.642.000,00
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.389.219.000,00	2.670.886.800,00	78,81	59.818.000,00
25	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	92.400.000,00	86.900.000,00	94,05	250.289.380,00
26	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	-	-	-	429.600,00
27	Belanja Modal Komputer Unit	30.496.233.674,00	25.007.235.998,90	82,00	47.503.731.590,00
28	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.686.946.411,00	6.727.677.597,00	77,45	13.720.996.450,00
29	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	2.845.980.000,00	143.718.000,00	5,05	-
30	Belanja Modal Alat Pelindung	127.401.740,00	95.285.412,00	74,79	-
31	Belanja Modal Alat SAR	241.540.000,00	237.336.000,00	98,26	-
32	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	54.140.625,00	47.500.000,00	87,73	-
33	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	2.367.000.930,00	2.311.050.370,00	97,64	-
34	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	14.466.726.753,00	6.870.656.826,33	47,49	-
35	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.595.181.304,00	94.631.800,00	1,25	-
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	962.500.000,00	360.795.890,00	37,49	-
	<b>Jumlah</b>	<b>366.162.644.235,00</b>	<b>259.171.614.346,38</b>	<b>70,78</b>	<b>421.332.296.912,80</b>

**Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan  
Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus</b>			
1	Kabupaten Pidie	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00
2	Kabupaten Aceh Utara	30.000.000.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>120.000.000.000,00</b>	<b>90.000.000.000,00</b>
<b>Dana Otonomi Khusus Aceh</b>			
1	Kabupaten Aceh Selatan	98.537.681.998,00	98.537.681.998,00
2	Kabupaten Aceh Tenggara	97.549.792.615,00	97.549.792.615,00
3	Kabupaten Aceh Timur	120.083.664.279,00	120.083.664.279,00
4	Kabupaten Aceh Tengah	94.987.528.438,00	94.987.528.438,00
5	Kabupaten Aceh Barat	77.718.790.757,00	77.718.790.757,00
6	Kabupaten Aceh Besar	98.291.480.032,00	98.291.480.032,00
7	Kabupaten Pidie	101.375.635.457,00	101.375.635.457,00
8	Kabupaten Aceh Utara	122.195.023.703,00	122.195.023.703,00
9	Kabupaten Simeulue	67.763.188.129,00	67.763.188.129,00
10	Kabupaten Aceh Singkil	81.551.810.472,00	81.551.810.472,00
11	Kabupaten Bireuen	95.396.340.982,00	95.396.340.982,00
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	81.267.395.406,00	81.267.395.406,00
13	Kabupaten Gayo Lues	92.432.452.320,00	92.432.452.320,00
14	Kabupaten Aceh Jaya	88.509.842.593,00	88.509.842.593,00
15	Kabupaten Nagan Raya	90.948.227.681,00	90.948.227.681,00
16	Kabupaten Aceh Tamiang	95.078.431.399,00	95.078.431.399,00
17	Kabupaten Bener Meriah	79.455.522.251,00	79.455.522.251,00
18	Kabupaten Pidie Jaya	75.279.453.374,00	75.279.453.374,00
19	Kota Banda Aceh	102.253.413.355,00	102.253.413.355,00
20	Kota Sabang	56.314.935.397,00	56.314.935.397,00
21	Kota Lhokseumawe	71.693.169.795,00	71.693.169.795,00
22	Kota Langsa	72.762.884.864,00	72.762.884.864,00
23	Kota Subulussalam	67.808.662.826,00	67.808.662.826,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.029.255.328.123,00</b>	<b>2.029.255.328.123,00</b>
<b>Total</b>		<b>2.149.255.328.123,00</b>	<b>2.119.255.328.123,00</b>



## Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan

No.	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan
					Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	PDAM Tirta Daroy	12.247.120,00	Lancar	0,5%	(61.235,60)
2	PDAM Tirta Montala	5.137.660,00	Lancar	0,5%	(25.688,30)
3	PT. Solusi Bangun Andalas	2.209.140,00	Lancar	0,5%	(11.045,70)
4	PDAM Tirta Mon Kreueng Baro	1.143.950,00	Lancar	0,5%	(5.719,75)
5	PDAM Krueng Peusangan	4.340.420,00	Lancar	0,5%	(21.702,10)
6	PT. Perta Arun Gas	15.479.400,00	Lancar	0,5%	(77.397,00)
7	PT. Pertamina EP Hulu Migas	370.010,00	Diragukan	50%	(185.005,00)
8	PDAM Tirta Mon Pasee	551.715.625,00	Macet	100%	(551.715.625,00)
9	PT. PIM	37.787.664,00	Lancar	0,5%	(188.938,32)
10	PTPN-I Kb. Cot Girek	719.900,00	Lancar	0,5%	(3.599,50)
11	PDAM Tirta Peusada	93.563.030,00	Macet	100%	(93.563.030,00)
12	PDAM Tirta Peusada	2.332.870,00	Lancar	0,5%	(11.664,35)
13	Koperasi Prima Jasa	274.080,00	Lancar	0,5%	(1.370,40)
14	PT. Perkasa Subur Sakti	1.027.140,00	Lancar	0,5%	(5.135,70)
15	PT. Anugerah Fajar Rezeki	165.780,00	Lancar	0,5%	(828,90)
16	PT Teupin Lada	625.200,00	Lancar	0,5%	(3.126,00)
17	PDAM Tirta Keumuneung	121.841.200,00	Macet	100%	(121.841.200,00)
18	PDAM Tirta Keumuneung	10.019.020,00	Macet	100%	(10.019.020,00)
19	PDAM Tirta Keumuneung	2.695.210,00	Lancar	0,5%	(13.476,05)
20	Bahari Dwi Kencana Lestari	9.090.360,00	Macet	100%	(9.090.360,00)
21	PT PP Pati Sari	1.890.000,00	Lancar	0,5%	(9.450,00)
22	Socfin Indonesia Sei Liput	497.520,00	Lancar	0,5%	(2.487,60)
23	PT. Sp. Kiri Plant Indonesia	237.720,00	Lancar	0,5%	(1.188,60)
24	PT. Parasawita	912.720,00	Lancar	0,5%	(4.563,60)
25	PT. Tri Agro Palma Tamiang	443.160,00	Lancar	0,5%	(2.215,80)
26	PDAM Tirta	7.851.770,00	Lancar	0,5%	(39.258,85)
27	PT. Sisirau	728.400,00	Lancar	0,5%	(3.642,00)
28	PT Bumi Sama Ganda	676.560,00	Lancar	0,5%	(3.382,80)
29	PLTA Peusangan I & II	177.780,00	Lancar	0,5%	(888,90)
30	PDAM Tirta Tawar	1.103.690,00	Lancar	0,5%	(5.518,45)
31	Hotel Grand Renggali	557.820,00	Lancar	0,5%	(2.789,10)
32	Bie Homestay	20.160,00	Lancar	0,5%	(100,80)
33	PDAM Tirta Meulaboh	176.814.075,00	Macet	100%	(176.814.075,00)
34	PDAM Tirta Meulaboh	436.120,00	Lancar	0,5%	(2.180,60)
35	PT. Karya Tanah Subur	1.122.060,00	Lancar	0,5%	(5.610,30)
36	PT. Agro Sinergi Nusantara	1.368.960,00	Lancar	0,5%	(6.844,80)
37	Socfin Seumanyam	598.400,00	Macet	100%	(598.400,00)
38	PT. Energi Alam Raya Semesta	2.646.000,00	Macet	100%	(2.646.000,00)
39	PT Enseme Lestari	414.000,00	Lancar	0,5%	(2.070,00)
40	PDAM Tirta Naga	19.830,00	Lancar	0,5%	(99,15)
41	PDAM Tirta Krueng	8.076.680,00	Macet	100%	(8.076.680,00)
42	PDAM Tirta Krueng	9.363.230,00	Diragukan	50%	(4.681.615,00)
43	PDAM Tirta Krueng	7.832.090,00	Kurang Lancar	10%	(783.209,00)
44	PDAM Tirta Krueng	428.660,00	Lancar	0,5%	(2.143,30)
45	PDAM Tirta Aneuk Laot	1.420.480,00	Lancar	0,5%	(7.102,40)
46	PDAM Tirta Mon Mata	12.957.880,00	Macet	100%	(12.957.880,00)
47	PDAM Tirta Mon Mata	10.329.130,00	Diragukan	50%	(5.164.565,00)
48	PDAM Tirta Mon Mata	1.439.000,00	Lancar	0,5%	(7.195,00)

No.	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan
					Per 31 Desember 2021 (Rp)
49	PT. Global Sawit Semesta	517.800,00	Lancar	0,5%	(2.589,00)
50	PT. Sawit Samudera Nabati	2.268.540,00	Lancar	0,5%	(11.342,70)
51	PT. Bangun Sempurna Lestari	595.080,00	Lancar	0,5%	(2.975,40)
52	PT. Budidaya Agritamas	988.980,00	Lancar	0,5%	(4.944,90)
53	PT. Perkebunan Lembah Bhakti I	3.358.452,00	Macet	100%	(3.358.452,00)
54	PT Perkebunan Lembah Bhakti I(PMKS)	1.452.240,00	Lancar	0,5%	(7.261,20)
55	PT Perkebunan Lembah Bhakti II (PMKS)	912.000,00	Lancar	0,5%	(4.560,00)
56	PT Nafasindo	148.740,00	Lancar	0,5%	(743,70)
57	PT. Runding Putra Persada	292.920,00	Lancar	0,5%	(1.464,60)
58	PT Socfindo (PMKS)	738.780,00	Lancar	0,5%	(3.693,90)
59	PT Delima Makmur (PMKS)	1.056.120,00	Lancar	0,5%	(5.280,60)
60	PDAM Tirta Niaga	994.710,00	Lancar	0,5%	(4.973,55)
61	PT Singkil Sejahtera Makmur (PMKS)	630.270,00	Lancar	0,5%	(3.151,35)
62	PDAM Tirta Sejuk	261.870,00	Lancar	0,5%	(1.309,35)
63	PDAM Tirta	12.728.500,00	Kurang Lancar	10%	(1.272.850,00)
64	PDAM Tirta Fulawan	244.680,00	Lancar	0,5%	(1.223,40)
<b>Jumlah</b>		<b>1.150.338.356,00</b>			<b>(1.003.363.139,37)</b>

## Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah

Jenis Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2021
<b>Rumah Sakit Umum Zainal Abidin</b>				
Sewa Parkir	150.000.000,00	Kurang Lancar	10%	(15.000.000,00)
Sewa Parkir	18.721.370,00	Lancar	0,5%	(93.606,85)
<b>Jumlah</b>	<b>168.721.370,00</b>			<b>(15.093.606,85)</b>
<b>I. Rumah Sakit Umum Zainal Abidin</b>				
PIUTANG BPJS KESEHATAN	62.176.679.933,00	Lancar	0,5%	(310.883.399,67)
PIUTANG JASA RAHARJA	923.865.273,00	Lancar	0,5%	(4.619.326,37)
PIUTANG DINAS KESEHATAN ACEH	466.103.290,00	Lancar	0,5%	(2.330.516,45)
BPJS KETENAGAKERJAAN	103.916.430,00	Lancar	0,5%	(519.582,15)
PIUTANG PT. BI	65.742.260,00	Lancar	0,5%	(328.711,30)
PIUTANG NAYAKA	13.214.545,00	Lancar	0,5%	(66.072,73)
PIUTANG KESDAM	8.840.489,00	Lancar	0,5%	(44.202,45)
TELKOM	42.609.234,00	Lancar	0,5%	(213.046,17)
MIFA	36.482.073,00	Lancar	0,5%	(182.410,37)
PT. PLN	749.428.090,00	Lancar	0,5%	(3.747.140,45)
POLDA	83.371.514,00	Lancar	0,5%	(416.857,57)
PIUTANG UMUM	1.434.591.539,00	Lancar	0,5%	(7.172.957,70)
BRI LIFE	18.148.863,00	Lancar	0,5%	(90.744,32)
BRI GRUP	1.969.155,00	Lancar	0,5%	(9.845,78)
ANGKASA PURA	11.584.044,00	Lancar	0,5%	(57.920,22)
CAKRAWALA	996.000,00	Lancar	0,5%	(4.980,00)
YKKBI ADMEDIKA	18.634.663,00	Lancar	0,5%	(93.173,32)
MEDCO	4.268.470,00	Lancar	0,5%	(21.342,35)
EMLI	391.275,00	Lancar	0,5%	(1.956,38)
RAMAYANA	236.570.285,00	Lancar	0,5%	(1.182.851,43)
SURVEYOR	8.180.080,00	Lancar	0,5%	(40.900,40)
MANDIRI INHEALTH	70.647.339,00	Lancar	0,5%	(353.236,70)
KEMENKES	135.297.139.750,00	Lancar	0,5%	(676.485.698,75)
LPSK	6.285.000,00	Kurang Lancar	10%	(628.500,00)
FK UNSYIAH PERIODE 2014-2017	11.182.724.000,00	Macet	100%	(11.182.724.000,00)
FK UNSYIAH PERIODE 2018-2020	11.979.216.000,00	Kurang Lancar	10%	(1.197.921.600,00)
<b>Jumlah I</b>	<b>224.941.599.594,00</b>			<b>(13.390.140.972,97)</b>
<b>II. Rumah Sakit Jiwa</b>				
Piutang BRA (2008)	12.487.000,00	Kurang Lancar	10%	(1.248.700,00)
Piutang Pasien Umum (2010)	4.744.000,00	Macet	100%	(4.744.000,00)
Piutang Pasien Umum (2011)	8.925.000,00	Macet	100%	(8.925.000,00)
Piutang Pasien Umum (2012)	26.048.000,00	Macet	100%	(26.048.000,00)
Piutang Pasien Umum (2013)	31.741.500,00	Macet	100%	(31.741.500,00)
Piutang Pasien Umum (2014)	18.927.500,00	Macet	100%	(18.927.500,00)
Piutang Pasien Umum (2015)	3.030.000,00	Macet	100%	(3.030.000,00)
Piutang Pasien Umum (2016)	14.126.747,00	Macet	100%	(14.126.747,00)
Piutang Pasien Umum (2017)	138.250.822,00	Macet	100%	(138.250.822,00)
Piutang Pasien Umum (2018)	82.656.248,00	Macet	100%	(82.656.248,00)
Piutang Pasien Umum (2019)	9.303.982,00	Macet	100%	(9.303.982,00)
Piutang Pasien Umum (2020)	222.783.189,00	Lancar	0,5%	(1.113.915,95)
Piutang Pasien Umum (2020)	65.501.663,00	Kurang Lancar	10%	(6.550.166,30)
Piutang Pasien Umum (2020)	10.770.997,00	Diragukan	50%	(5.385.498,50)
Piutang Pasien Umum (2020)	56.306.456,00	Macet	100%	(56.306.456,00)
Piutang Pasien Umum (2021)	3.232.284,00	Kurang Lancar	10%	(323.228,40)
Piutang Pasien Umum (2021)	607.268.505,00	Lancar	0,5%	(3.036.342,53)
Klaim Pending BPJS 2021	31.407.100,00	Lancar	0,5%	(157.035,50)
Klaim IPWL September 2021	121.802.752,00	Kurang Lancar	10%	(12.180.275,20)
Klaim IPWL Oktober 2021	134.614.287,00	Kurang Lancar	10%	(13.461.428,70)
Klaim IPWL November 2021	133.653.212,00	Kurang Lancar	10%	(13.365.321,20)
Klaim BPJS Bulan Desember 2021	1.401.495.500,00	Lancar	0,5%	(7.007.477,50)
<b>Jumlah II</b>	<b>3.139.076.744,00</b>			<b>(457.889.644,77)</b>

Jenis Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2021
<b>III. Rumah Sakit Ibu dan Anak</b>				
Klaim BPJS Tahun 2021	2.983.065.400,00	Lancar	0,5%	(14.915.327,00)
Klaim pada PT. Jasa Raharja Desember 2021	16.907.061,00	Lancar	0,5%	(84.535,31)
Klaim Obat Kemo dan Kronis Desember 2021	9.350.422,00	Lancar	0,5%	(46.752,11)
Klaim Ambulance Bulan Desember 2021	19.586.000,00	Lancar	0,5%	(97.930,00)
<b>Jumlah III</b>	<b>3.028.908.883,00</b>			<b>(15.144.544,42)</b>
<b>Total</b>	<b>231.278.306.591,00</b>			<b>(13.878.268.769,01)</b>

**Rincian Persediaan Barang Habis Pakai  
Pemerintah Aceh**

No.	SKPA	Persediaan Barang Habis Pakai											Jumlah	
		Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Tanaman	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Isi Tabung Gas	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Suku Cadang Alat Kedokteran	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Lainnya		Alat Tulis Kantor
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	7.420.396.271,00	-	-	-	241.793.322,00	<b>7.662.189.593,00</b>
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	-	-	-	-	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	2.551.450,00	<b>4.251.450,00</b>
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-	-	-	-	1.380.000,00	-	-	-	-	-	-	4.642.095,00	<b>6.022.095,00</b>
4	Dinas Kesehatan Aceh	-	2.206.889.324,00	-	-	38.856.199,00	-	-	-	-	165.516.785,00	-	57.557.646,00	<b>2.468.819.954,00</b>
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	16.573.500,00	-	78.514.000,00	-	74.827.500,00	-	-	25.398.714.238,00	-	-	-	304.523.775,00	<b>25.873.153.013,00</b>
6	Rumah Sakit Jiwa	3.226.591,67	-	42.408.668,90	-	17.600.000,00	-	-	-	-	213.026.112,00	-	100.504.899,69	<b>376.766.272,26</b>
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	6.374.000,00	124.310.000,00	84.540.460,00	-	19.695.500,00	7.764.240,00	-	4.211.791.752,27	-	-	-	2.187.445,00	<b>4.456.663.397,27</b>
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.784.664,00	<b>8.784.664,00</b>
9	Dinas Pengairan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.483.502,00	<b>5.483.502,00</b>
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	-	-	-	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-	15.335.208,00	<b>19.235.208,00</b>
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602.532,00	<b>602.532,00</b>
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.276.282.893,00	529.884,00	<b>6.276.812.777,00</b>
13	Dinas Sosial Aceh	-	-	-	-	4.926.900,00	-	-	-	-	-	-	31.332.196,00	<b>36.259.096,00</b>
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	-	-	-	2.896.330,00	-	-	-	-	-	-	694.500,00	<b>3.590.830,00</b>
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.521.500,00	<b>14.521.500,00</b>
16	Dinas Pangan Aceh	-	57.541.616,00	-	-	4.700.000,00	-	-	-	-	-	5.021.803.189,95	-	<b>5.084.044.805,95</b>
17	Dinas Pertanahan Aceh	-	-	-	-	2.295.000,00	-	-	-	-	-	-	1.103.750,00	<b>3.398.750,00</b>
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	-	2.791.800,00	-	8.879.010,00	-	-	-	-	-	-	237.025,00	<b>11.907.835,00</b>
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	27.732.308,00	<b>34.732.308,00</b>
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-	-	-	-	10.667.000,00	-	-	-	-	-	-	13.719.518,00	<b>24.386.518,00</b>
21	Dinas Perhubungan Aceh	-	-	-	-	26.992.350,00	-	-	-	-	-	-	34.539.054,00	<b>61.531.404,00</b>
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	-	-	-	-	21.023.684,00	-	-	-	-	-	-	110.579.634,00	<b>131.603.318,00</b>
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	-	-	-	-	5.136.154,00	-	-	-	-	-	-	19.096.850,00	<b>24.233.004,00</b>
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	-	-	-	-	5.811.000,00	-	-	-	-	-	-	3.764.850,00	<b>9.575.850,00</b>
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.007.500,00	<b>3.007.500,00</b>
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	-	-	-	-	2.760.000,00	-	-	-	-	-	-	2.717.239,00	<b>5.477.239,00</b>
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	22.460.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.597.101,10	<b>60.057.151,10</b>

No.	SKPA	Persediaan Barang Habis Pakai											Jumlah	
		Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Tanaman	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Isi Tabung Gas	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Suku Cadang Alat Kedokteran	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Lainnya		Alat Tulis Kantor
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.937.165,00	<b>14.937.165,00</b>
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	-	-	-	5.830.000,00	-	-	-	-	-	-	912.700,00	<b>6.742.700,00</b>
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	-	-	-	175.196.450,00	15.900.000,00	-	-	-	-	-	-	4.007.100,00	<b>195.103.550,00</b>
31	Dinas Peternakan Aceh	-	-	-	-	-	-	4.628.973.326,00	-	-	26.180.000,00	-	9.897.487,91	<b>4.665.050.813,91</b>
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	-	-	-	-	17.330.000,00	-	-	-	-	-	-	52.845.330,00	<b>70.175.330,00</b>
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	-	-	-	-	6.840.300,00	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.840.300,00</b>
34	Sekretariat Daerah Aceh	-	-	57.320.000,00	-	136.657.000,00	-	-	-	-	-	-	84.953.188,00	<b>278.930.188,00</b>
35	Sekretariat DPRA	-	-	-	-	26.345.000,00	-	-	45.440.000,00	13.280.000,00	-	-	34.411.300,00	<b>119.476.300,00</b>
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	-	-	3.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.127.803,00	<b>28.277.803,00</b>
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.166.093,00	<b>817.166.093,00</b>
38	Badan Kepegawaian Aceh	-	-	-	-	14.256.000,00	-	-	-	-	-	-	34.749.000,00	<b>49.005.000,00</b>
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.513.660,00	<b>88.513.660,00</b>
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	-	-	-	-	37.020.000,00	-	-	-	-	-	-	2.285.500,00	<b>39.305.500,00</b>
41	Inspektorat Aceh	-	-	-	-	8.555.010,00	-	-	-	-	-	-	25.893.000,00	<b>34.448.010,00</b>
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	-	-	531.970,00	-	4.401.000,00	-	-	-	-	-	-	3.925.515,00	<b>8.858.485,00</b>
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059.307,00	<b>1.059.307,00</b>
44	Dinas Syariat Islam Aceh	-	-	-	-	6.619.000,00	-	-	-	-	-	-	75.410.500,00	<b>82.029.500,00</b>
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	-	-	-	-	8.400.000,00	-	-	-	-	3.840.713,00	-	-	<b>12.240.713,00</b>
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.013.000,00	<b>31.013.000,00</b>
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.829.550,00	<b>4.829.550,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>26.174.091,67</b>	<b>2.411.200.990,00</b>	<b>269.256.898,90</b>	<b>175.196.450,00</b>	<b>564.199.937,00</b>	<b>7.764.240,00</b>	<b>4.628.973.326,00</b>	<b>37.076.342.261,27</b>	<b>13.280.000,00</b>	<b>408.563.610,00</b>	<b>11.298.086.082,95</b>	<b>2.342.076.646,70</b>	<b>59.221.114.534,49</b>

**Rincian Persediaan Barang Habis Pakai  
Pemerintah Aceh**

No.	SKPA	Persediaan Barang Habis Pakai												Jumlah	
		Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya		Pakan
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	23.881.750,00	-	-	-	106.875.778,00	-	-	45.856.025,00	-	146.112.170.473,00	-	-	146.288.784.026,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	-	2.395.800,00	-	-	-	3.691.600,00	-	-	2.266.000,00	-	-	-	-	8.353.400,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-	1.379.800,00	-	-	-	1.725.952,00	-	-	-	-	-	-	-	3.105.752,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	-	45.503.919,13	1.210.000,00	-	-	8.880.459,86	-	-	-	33.638.134.406,80	22.716.540.711,45	-	-	56.410.269.497,24
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	-	336.411.290,00	-	-	-	173.748.000,00	-	-	1.319.594.800,00	25.834.282.865,00	-	-	-	27.664.036.955,00
6	Rumah Sakit Jiwa	-	15.081.000,00	-	-	78.554.952,56	8.189.654,00	-	-	417.049.543,33	1.215.484.853,81	-	-	-	1.734.360.003,70
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	-	3.440.000,00	-	-	-	4.123.077,00	-	-	9.023.900,00	739.396.467,75	-	-	-	755.983.444,75
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	3.851.280,00	-	-	16.870.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.721.630,00
9	Dinas Pengairan Aceh	-	1.538.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.209.752.825,00	-	-	5.211.311.425,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	2.477.500,00	275.000,00	-	-	2.320.635,00	-	-	-	-	252.900.165.924,00	-	-	252.905.239.059,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	-	221.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.000,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.067.558.240,00	-	-	7.067.558.240,00
13	Dinas Sosial Aceh	-	5.255.500,00	-	-	-	40.819.803,50	-	-	1.144.568.974,00	24.398.148,96	10.186.357.572,00	-	-	11.401.399.998,46
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	667.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.227.733.298,39	-	9.228.400.298,39
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	3.300.500,00	-	-	-	2.952.000,00	-	-	1.095.000,00	-	-	-	-	7.347.500,00
16	Dinas Pangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pertanahan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	570.000,00	-	-	-	-	570.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	-	300.000,00	-	-	929.800,00	-	-	1.480.000,00	-	-	-	-	2.709.800,00
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	-	173.544.942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.544.942,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-	5.501.830,00	700.000,00	-	-	4.164.650,00	-	-	13.517.588,00	-	74.119.000,00	-	-	98.003.068,00
21	Dinas Perhubungan Aceh	-	10.269.656,00	-	-	-	5.142.500,00	-	-	20.808.810,00	-	-	-	-	36.220.966,00
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	-	43.755.000,00	-	-	-	16.538.640,00	-	-	11.515.250,00	-	-	-	-	71.808.890,00
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	-	-	300.000,00	-	-	156.000,00	-	-	35.285.000,00	-	-	-	-	35.741.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	-	9.661.125,00	-	-	-	1.740.500,00	-	-	1.092.500,00	-	-	-	-	12.494.125,00
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	-	900.000,00	-	-	-	-	-	2.858.415.480,00	-	-	21.915.305.882,00	-	-	24.774.621.362,00
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	-	1.107.000,00	-	-	-	-	-	-	6.651.175,00	-	-	-	-	7.758.175,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	5.315.000,00	-	-	-	53.288.590,00	-	-	119.428.174,10	-	8.400.381.102,85	-	-	8.578.412.866,95
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	-	-	-	-	4.425.000,00	-	182.036.900,00	-	-	477.743.519,00	-	295.600.000,00	-	959.805.419,00
31	Dinas Peternakan Aceh	-	-	-	-	-	-	165.312.695,00	-	-	2.216.061.331,00	-	-	603.111.404,00	2.984.485.430,00
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sekretariat Daerah Aceh	-	11.750.500,00	2.255.000,00	-	-	13.266.950,00	-	-	197.466.800,00	-	-	-	-	224.739.250,00
35	Sekretariat DPR	-	55.180.700,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	11.617.950,00	-	-	-	-	67.998.650,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	-	1.135.000,00	-	-	-	13.778.000,00	-	-	4.818.800,00	-	-	-	-	19.731.800,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	1.103.525.935,00	660.000,00	-	-	5.039.060,00	-	-	4.926.224,00	-	-	-	-	1.114.151.219,00
38	Badan Kepegawaian Aceh	-	8.590.000,00	-	-	-	24.248.800,00	-	-	18.711.700,00	-	-	-	-	51.550.500,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	-	2.925.000,00	-	-	40.738.050,00	11.299.000,00	-	-	-	-	-	-	-	54.962.050,00
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	-	1.279.290,00	-	-	-	-	-	-	1.282.000,00	-	-	-	-	2.561.290,00
41	Inspektorat Aceh	7.538.000,00	-	-	31.389.000,00	290.000,00	1.584.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.801.000,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	582.900,00	-	-	-	-	1.082.900,00
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
44	Dinas Syariah Islam Aceh	-	4.603.500,00	400.000,00	-	-	-	-	-	10.920.000,00	-	269.528.600,00	-	-	285.452.100,00
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	-	40.200.000,00	-	-	-	-	-	-	55.393.250,00	-	-	-	-	95.593.250,00
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali	-	-	-	-	-	24.221.200,00	-	-	-	-	-	-	-	24.221.200,00
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.889.280,00</b>	<b>1.921.318.137,13</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>48.259.350,00</b>	<b>124.008.002,56</b>	<b>528.724.649,36</b>	<b>347.349.595,00</b>	<b>2.858.415.480,00</b>	<b>3.455.747.363,43</b>	<b>64.145.501.592,32</b>	<b>474.851.880.330,30</b>	<b>9.523.333.298,39</b>	<b>603.111.404,00</b>	<b>558.426.838.482,49</b>

## DAFTAR OBAT KADALUARSA TAHUN 2021

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluarsa	Harga	Total (Rp)
<b>1. RUMAH SAKIT JIWA</b>						<b>19.148.251,35</b>
-	Ibuprofen 200 mg	100	Tablet	Maret 2020	121,00	12.100,00
-	Salbutamol 4 mg	100	Tablet	Maret 2020	91,00	9.100,00
-	Allopurinol 100 mg	700	Tablet	April 2020	99,00	69.300,00
-	KSR 600 mg	200	Tablet	April 2020	3.492,50	698.500,00
-	Cotrimoxazole 480 mg	700	Tablet	Mei 2020	125,00	87.500,00
-	Asam Folat 1 mg	75.200	Tablet	Juni 2020	81,00	6.091.203,13
-	Haloperidol 0,5 mg	500	Tablet	Juni 2020	92,63	46.315,50
-	Carbamazepine 200 mg	8.400	Tablet	Juli 2020	234,00	1.965.624,97
-	Haloperidol 0,5 mg	3.800	Tablet	Juli 2020	278,03	1.056.495,00
-	Haloperidol 1.5 mg	1.100	Tablet	Juli 2020	65,00	71.498,90
-	Acyclovir 400 mg	400	Tablet	Agustus 2020	415,00	166.000,00
-	Bethahistin Mesylat 6 mg	390	Tablet	Agustus 2020	150,99	58.887,37
-	Chlorpheniramin 4 mg	100	Tablet	Agustus 2020	45,00	4.500,00
-	Eperisone 50 mg	250	Tablet	Februari 2021	1.232,00	308.000,00
-	Piroxicam 10 mg	600	Tablet	April 2021	147,40	88.440,00
-	Atorvastatin 20 mg	600	Tablet	November 2021	954,00	572.400,00
-	Levopar	3.800	Tablet	November 2021	1.035,00	3.933.003,80
-	Ceftriaxon 1 g Inj	168	Ampul	Februari 2020	8.662,50	1.455.300,00
-	Diazepam injeksi	1.090	Ampul	Agustus 2020	1.913,01	2.085.180,68
-	Epinephrine (Adreanalin) Injeksi	49	Ampul	September 2020	1.518,00	74.382,00
-	Dextrose 5% Infus	40	Botol	November 2020	7.363,00	294.520,00
<b>2. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK</b>						<b>19.424.538,00</b>
-	Diazepam Tab 5 mg	7.200	Tablet	Agustus 2021	134,00	964.800,00
-	Antasida Tab	162	Vial	Desember 2021	113.949,00	18.459.738,00
<b>3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN</b>						<b>47.115.657,00</b>
-	Otsu dex 5 %	1	botol	1-Jul-20	7.363,00	7.363,00
-	Aminoleban	7	fls	11-Aug-20	74.655,00	522.585,00
-	Cefuroxime 750	22	vial	1-Nov-20	10.900,00	239.800,00
-	Vitacid cream 0.025%	5	tube	1-Jan-21	20.691,00	103.455,00
-	Cendo Mydriatil 0.5%	28	botol	1-Nov-20	28.587,00	57.174,00
-	Otsu dex 40 %	8	fls	1-Dec-20	7.000,00	56.000,00
-	Citicholin 250 mg injeksi	17	amp	17-Nov-20	5.775,00	98.175,00
-	Stesolid 5 mg	1	tube	1-Nov-20	13.384,00	13.384,00
-	Benzatin benzil Penicillin	1	vial	1-Sep-20	8.200,00	8.200,00
-	Novomix flexpen	3	pen	1-Oct-20	110.000,00	330.000,00
-	Difenhidramin inj	1	amp	1-Sep-20	1.355,00	1.355,00
-	Ramipril 5 mg	34	tablet	1-Nov-20	700,00	23.800,00
-	Cotrimoxazole	3	tablet	1-Aug-20	344,00	1.032,00
-	Candesartan 8 mg	18	tablet	1-Nov-20	782,00	14.076,00
-	Meloxicam 7.5 mg	43	tablet	1-Dec-20	334,00	14.362,00
-	Herbesser CD 100 mg	49	kapsul	1-Jan-21	4.290,00	210.210,00
-	Synbio	9	kapsul	1-Nov-20	2.741,00	24.669,00
-	Nifedipin	33	tablet	1-Jan-21	100,00	3.300,00
-	Vitamin K	40	tablet	1-Aug-20	800,00	32.000,00
-	Hytroz 1 mg	165	tablet	1-Jan-21	713,00	117.645,00
-	Euthyrox 100 mg	63	tablet	1-Jan-21	1.021,00	64.323,00
-	Suvesco 10 mg	20	tablet	1-Jan-20	1.684,00	33.680,00
-	Methyl ergometrin	64	tablet	1-Jan-21	271,00	17.344,00
-	Lisinopril 5 mg	80	tablet	1-Jan-21	385,00	30.800,00
-	Hytroz 2 mg	39	tablet	1-Jan-21	1.100,00	42.900,00
-	Phytomenadion inj	4	amp	1-Jan-21	4.083,00	16.332,00
-	Risperidone 3 mg	3.000	tablet	1-Jan-21	259,00	777.000,00
-	Cefuroxime 750	8	vial	1-Jan-21	31.997,00	255.976,00
-	Otsu Dex 5 %	1	fls	1-Jul-20	6.899,00	6.899,00
-	Ambroxol 30 mg	273	tablet	1-Feb-21	120,00	32.760,00
-	Herbesser CD 100 mg	178	kapsul	1-Feb-21	4.290,00	763.620,00
-	Simvastatin 10 mg	52	tablet	1-Feb-21	200,00	10.400,00
-	Dorner	34	tablet	1-Feb-21	4.400,00	149.600,00
-	Isotic Adretor 0.25%	2	botol	1-Feb-21	10.665,00	21.330,00
-	Cendo Tropin 0.5% md	4	botol	1-Feb-21	11.137,00	44.548,00



No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluausa	Harga	Total (Rp)
-	Akilen tetes telinga	1	botol	1-Feb-21	35.237,00	35.237,00
-	Phytomenadion inj	34	amp	1-Jan-21	4.083,00	138.822,00
-	Flunarizin 10 mg	28	tablet	1-Feb-21	1.320,00	36.960,00
-	Cendo Tropin 0.5% md	15	botol	1-Feb-21	12.251,00	183.765,00
-	Otsu Dex 40 %	3	fls	1-Feb-21	8.690,00	26.070,00
-	Cefadroxil 500 mg	8	kapsul	1-Dec-20	492,00	3.936,00
-	Lidocain inj	2	amp	1-Feb-21	929,00	1.858,00
-	Citicholin 250 mg inj	2	amp	1-Feb-21	5.320,00	10.640,00
-	Humalog Kwikpen	1	pen	1-Feb-21	87.000,00	87.000,00
-	Norepinefrin	4	amp	1-Feb-21	46.002,00	184.008,00
-	Oxytocin inj	7	amp	1-Feb-21	1.232,00	8.624,00
-	Symbicort 80/4.5	2	botol	1-Jan-21	121.000,00	242.000,00
-	Dopamin Inj	3	amp	1-Oct-20	9.849,00	29.547,00
-	Methyletergometrin	72	tablet	1-Jan-21	271,00	19.512,00
-	Clozapin 100 mg	51	tablet	1-Feb-20	3.288,00	167.688,00
-	Inovad inj	4	vial	1-Feb-20	217.800,00	871.200,00
-	Miloz inj	2	amp	1-Mar-20	13.500,00	27.000,00
-	Durogesic patch 25	10	patch	1-Apr-20	101.100,00	1.011.000,00
-	Oxytocin inj	10	amp	1-Feb-21	1.232,00	12.320,00
-	Mediklin gel	4	tube	1-Mar-21	20.592,00	82.368,00
-	Hyaloph 0.1% tetes mata	1	botol	1-Feb-21	46.048,00	46.048,00
-	Flamicort 40 mg/ml	1	botol	1-Oct-20	99.275,00	99.275,00
-	Humulin Kwikpen	1	pen	1-Feb-21	79.800,00	79.800,00
-	Pradaxa 110 mg	12	tablet	1-Feb-21	14.800,00	177.600,00
-	Glauset	36	tablet	1-Feb-21	3.003,00	108.108,00
-	Glimepiride 3 mg	33	tablet	1-Feb-21	245,00	8.085,00
-	Sanbe Tears	1	botol	1-Mar-21	15.826,00	15.826,00
-	Ecosol Dex 5 %	2	fls	1-Mar-21	6.776,00	13.552,00
-	Clozapin 25 mg	7	tablet	1-Apr-21	1.550,00	10.850,00
-	Vblock 6.25 mg	11	tablet	1-Apr-21	1.914,00	21.054,00
-	Flunarizin 10 mg	49	tablet	1-Apr-21	1.320,00	64.680,00
-	Harnal D	122	tablet	1-Apr-21	7.788,00	950.136,00
-	Ambroxol syrup	8	botol	1-Apr-21	3.125,00	25.000,00
-	Ecosol Dex 5 %	7	botol	1-Mar-21	6.776,00	47.432,00
-	Phytomenadion	462	tablet	1-Mar-21	800,00	369.600,00
-	Amitriptilin 25 mg	21	tablet	1-Mar-21	120,00	2.520,00
-	Propranolol 40 mg	48	tablet	1-Apr-21	115,00	5.520,00
-	Atorvastatin 10 mg	14	tablet	1-Apr-21	1.150,00	16.100,00
-	Aminofluid	2	fls	1-Apr-21	64.990,00	129.980,00
-	Epinefrin inj	160	amp	1-Apr-21	1.848,00	295.680,00
-	Wida 4:1	1	fls	1-Apr-21	6.410,00	6.410,00
-	Futrolit inf	2	botol	1-Apr-21	39.402,00	78.804,00
-	Cefepime inj	10	vial	1-Apr-21	25.025,00	250.250,00
-	Plavix 300 mg	5	tablet	1-May-21	16.393,00	81.965,00
-	Isoniazid 300 mg	6.720	tablet	1-Feb-21	182,00	1.223.040,00
-	Pyrazinamide 500 mg	4.000	tablet	1-Feb-21	239,00	956.000,00
-	Ketorolac inj	8	amp	1-Mar-21	1.200,00	9.600,00
-	Humalog mix 25	2	pen	1-Feb-21	112.000,00	224.000,00
-	Phytomenadion tab	15	tablet	1-Apr-21	818,00	12.270,00
-	Naletal 100 mg	24	tablet	1-Sep-20	4.973,00	119.352,00
-	Piracetam 400 mg	99	tablet	1-Jan-21	348,00	34.452,00
-	Ambroxol	43	tablet	1-Feb-21	130,00	5.590,00
-	Simvastatin 10 mg	36	tablet	1-Feb-21	113,00	4.068,00
-	Desferal	2	vial	1-Sep-19	119.700,00	239.400,00
-	Epinefrin	78	amp	1-Apr-21	1.518,00	118.404,00
-	pioglitazone 30 mg	14	tablet	1-Apr-21	837,00	11.718,00
-	Akilen ED	4	botol	1-Mar-21	36.430,00	145.720,00
-	Apidra	1	pen	1-Jan-21	89.499,00	89.499,00
-	Erdomex	20	kapsul	1-Oct-20	2.682,00	53.640,00
-	Amiodaron inj	23	amp	1-May-21	6.117,00	140.691,00
-	Propranolol 40 mg	15	tablet	1-Apr-21	114,00	1.710,00
-	Flunarizin 10 mg	32	tablet	1-Apr-21	1.320,00	42.240,00
-	Aminofusin L 600	40	botol	1-May-21	46.000,00	1.840.000,00
-	Burnazin plus	2	tube	1-May-21	96.800,00	193.600,00
-	Levopar	17	tablet	1-May-21	904,00	15.368,00
-	Onbrez 150	11	box	1-Jun-21	352.500,00	3.877.500,00
-	Wida 4:1	5	fls	1-Jun-21	10.624,00	53.120,00
-	Digoksin	54	tablet	1-Jun-21	104,00	5.616,00

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluausa	Harga	Total (Rp)
-	Reco tetes mata	14	botol	1-Jun-21	7.428,00	103.992,00
-	Iliadin 0.025%	1	botol	1-Jun-21	34.500,00	34.500,00
-	Risperidone 2 mg	11	tablet	1-Jun-21	273,00	3.003,00
-	Otsu MgSo4 40%	3	fls	1-Jun-21	4.700,00	14.100,00
-	Otsu MgSo4 20%	16	fls	1-Jun-21	4.119,00	65.904,00
-	Pradaxa 110 mg	176	tablet	1-Jun-21	14.800,00	2.604.800,00
-	Dopamet	33	tablet	1-Apr-21	1.088,00	35.904,00
-	Piracetam 15 mg inj	20	ampul	1-Jun-21	7.900,00	158.000,00
-	Seretide diskus 500 mg	1	box	1-Jun-21	137.492,00	137.492,00
-	Ciprofloxacin inf	1	botol	1-Apr-21	10.708,00	10.708,00
-	Kendaron	30	tablet	1-Jun-21	1.027,00	30.810,00
-	Avelox	3	tablet	1-Jun-21	25.196,00	75.588,00
-	Methylergometrine inj	1	ampul	1-Jun-21	1.023,00	1.023,00
-	Otsu D5-1/4 NS	3	botol	1-Jun-21	10.405,00	31.215,00
-	Aminofusin Hepar	2	botol	1-Jun-21	80.000,00	160.000,00
-	Otsu dex 5%	1	botol	1-Jun-21	7.363,00	7.363,00
-	lidocain 2%	10	ampul	1-Jun-21	891,00	8.910,00
-	Seretide discus 250 mg	1	box	1-May-21	125.715,00	125.715,00
-	Phytomenadion tab	100	tablet	1-Apr-21	818,00	81.800,00
-	Difenhidramin inj	33	ampul	1-May-21	825,00	27.225,00
-	Lovenox 0.4	1	pen	1-May-21	90.703,00	90.703,00
-	Dobutamin inj	2	ampul	1-Jul-21	8.922,00	17.844,00
-	Fitbon	60	tablet	1-Jul-21	1.173,00	70.380,00
-	Aminofilin inj	39	ampul	1-Jul-21	3.959,00	154.401,00
-	Tanapres 10 mg	65	tablet	1-Jul-21	5.000,00	325.000,00
-	Cefuroxime inj	58	vial	1-Jul-21	10.900,00	632.200,00
-	Citicholin 1000 mg	6	tablet	1-Jul-21	7.535,00	45.210,00
-	Thyrozol 5 mg	40	tablet	1-Jul-21	678,00	27.120,00
-	Ursodeoxycholic acid	19	tablet	1-Jul-21	1.847,00	35.093,00
-	Isoniazid 300 mg	608	tablet	1-Jul-21	200,00	121.600,00
-	Combivent nebule	50	ampul	1-Jun-21	3.499,00	174.950,00
-	Pulmicort nebule	10	ampul	1-Jul-21	10.932,00	109.320,00
-	Atropin inj	11	ampul	1-Jul-21	1.718,00	18.898,00
-	Methylergometrin inj	10	ampul	1-May-21	1.023,00	10.230,00
-	Acylovir 200 mg	1.000	tablet	1-Jul-21	524,00	524.000,00
-	Isoniazid 300 mg	10	tablet	1-Jul-21	200,00	2.000,00
-	Wida dex 5%	1	botol	1-Jul-21	7.363,00	7.363,00
-	Wida dex 10 %	1	botol	1-Jul-21	7.200,00	7.200,00
-	Periokin	1	botol	1-Jul-21	187.000,00	187.000,00
-	Tutofusin Ops	1	botol	1-Jul-21	41.350,00	41.350,00
-	Cefazolin	1	vial	1-Jul-21	6.331,00	6.331,00
-	Ka En 4B	8	botol	1-Jul-21	24.200,00	193.600,00
-	Tracetat	107	tablet	1-Aug-21	21.945,00	2.348.115,00
-	Cefazolin inj	10	vial	1-Aug-21	6.331,00	63.310,00
-	Betamethason salap	16	tube	1-Aug-21	1.373,00	21.968,00
-	Otsu dex 5 %	1	botol	1-Aug-21	7.363,00	7.363,00
-	Liprolac	91	sachet	1-Aug-21	5.133,00	467.103,00
-	Ibuprofen	4	tablet	1-Aug-21	133,00	532,00
-	Farpresin inj	10	amp	1-Jul-21	79.279,00	792.790,00
-	Amoxycillin 500 mg	60	tablet	1-Sep-21	231,00	13.860,00
-	Vitamin A 100.000IU	100	tablet	1-Sep-21	637,00	63.700,00
-	Nimotop	28	tablet	1-Sep-21	3.842,00	107.576,00
-	Farpresin inj	10	ampul	1-Jul-21	79.279,00	792.790,00
-	Ephedrin inj	48	ampul	1-Sep-21	6.486,00	311.328,00
-	Pyrazinamide 500 mg	85	tablet	1-Sep-21	234,00	19.890,00
-	Gemfibrozil 300 mg	44	kapsul	1-Sep-21	317,00	13.948,00
-	Ibuprofen 400 mg	71	tablet	1-Sep-21	133,00	9.443,00
-	Dermanide cream	17	tube	1-Oct-21	22.572,00	383.724,00
-	Akilen ED	3	botol	1-Oct-21	36.430,00	109.290,00
-	Cefotaxime	60	vial	1-Oct-21	3.050,00	183.000,00
-	Atropin inj	10	amp	1-Oct-21	1.718,00	17.180,00
-	Ka en 4B	54	inf	1-Oct-21	24.200,00	1.306.800,00
-	Citicholin 1000 inj	5	amp	1-Oct-21	23.761,00	118.805,00
-	Ventolin nebule	1	nebule	1-Oct-21	4.000,00	4.000,00
-	Ibuprofen 400 mg	910	tablet	1-Oct-21	133,00	121.030,00
-	Citicholin 500 mg inj	10	amp	1-Oct-21	10.501,00	105.010,00
-	Cefepim inj	1	vial	1-Oct-21	15.983,00	15.983,00
-	Neo K	5	amp	1-Aug-21	11.594,00	57.970,00

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluaursa	Harga	Total (Rp)
-	Otsu Dex 5%	1	botol	1-Oct-21	7.363,00	7.363,00
-	Rosuvastatin	460	tablet	1-Mar-21	1.650,00	759.000,00
-	Gemfibrozil 300 mg	1.003	kapsul	1-Sep-21	317,00	317.951,00
-	Tablet tambah darah	854	tablet	1-Aug-21	255,00	217.770,00
-	Farnormin	1.415	tablet	1-Sep-21	297,00	420.255,00
-	Pyrazinamide	270	tablet	1-Sep-21	234,00	63.180,00
-	Vitamin A 100.000IU	385	tablet	1-Sep-21	637,00	245.245,00
-	Sulfasalazine	100	tablet	1-Jul-21	1.980,00	198.000,00
-	Ambroxol	210	tablet	1-Feb-21	130,00	27.300,00
-	Sifrol 0.75	53	tablet	1-Jun-21	13.200,00	699.600,00
-	Pamol supp 250 mg	16	supp	1-Jul-21	11.286,00	180.576,00
-	Terazosin 1 mg	381	tablet	1-Sep-21	580,00	220.980,00
-	Amoksisillin	100	tablet	1-Sep-21	231,00	23.100,00
-	Umaron	10	inj	1-Oct-21	182.875,00	1.828.750,00
-	Natacen	60	strip	1-Oct-21	41.209,00	2.472.540,00
-	Risperidone 1 mg	400	tablet	1-Jun-21	132,00	52.800,00
-	Onbrez 150 mg	2	botol	1-Jun-21	352.500,00	705.000,00
-	Onzapin 5 mg	124	tablet	1-Feb-21	3.614,00	448.136,00
-	Pradaxa 110 mg	30	tablet	1-Jun-21	14.800,00	444.000,00
-	Rifampicin 450 mg	89	tablet	1-Feb-21	923,00	82.147,00
-	Mydriatil 0.5	4	strip	1-Nov-20	28.587,00	114.348,00
-	Harnal D 0.2	166	tablet	1-Apr-21	7.788,00	1.292.808,00
-	Combiven	10	nebule	1-Jun-21	3.499,00	34.990,00
-	Euthyrox 50 mg	88	tablet	1-Mar-21	771,00	67.848,00
-	clarythromicin 500 mg	10	tablet	1-Nov-20	2.849,00	28.490,00
-	pioglitazone 30 mg	35	tablet	1-Aug-21	837,00	29.295,00
-	ezealin	1	inj	1-Jul-21	88.999,00	88.999,00
-	nasacort	2	botol	1-Jan-21	112.710,00	225.420,00
-	iliadin 0.025%	1	botol	1-Sep-21	34.500,00	34.500,00
-	cefadroxyl syrup	1	botol	1-Jan-21	3.890,00	3.890,00
-	pirotop cream 5 gr	1	tube	1-Oct-21	37.422,00	37.422,00
-	naletal 50 mg	30	tablet	1-Oct-21	4.158,00	124.740,00
-	otopain ed	2	botol	1-Jan-21	40.260,00	80.520,00
-	flunarizin 5 mg	40	tablet	1-Apr-21	825,00	33.000,00
-	adalat oros 30 mg	30	tablet	1-May-21	3.998,00	119.940,00
-	Metilergometrin inj	95	amp	1-Aug-21	1.023,00	97.185,00
-	Nore epinefrin	1	amp	1-Sep-21	6.612,00	6.612,00
-	Deksamethasone inj	3	amp	1-Aug-21	968,00	2.904,00
-	Cefazolin inj	4	vial	1-Aug-21	6.331,00	25.324,00
-	Ferlin syrup	11	botol	1-Oct-21	35.200,00	387.200,00
-	Tracetate	35	tablet	1-Aug-21	21.945,00	768.075,00
-	Risperidone 2 mg	54	tablet	1-Aug-21	273,00	14.742,00
-	Otsu Salin 3%	12	fls	28-Nov-21	30.334,00	364.008,00
-	Depakote 250 mg	70	tablet	28-Nov-21	1.200,00	84.000,00
-	Lisinopril	53	tablet	1-Nov-21	242,00	12.826,00

#### 4. DINAS KESEHATAN ACEH

**3.830.058.833,00**

-	Oxytocin Injeksi	19400	Box/100 ampul	Nov-20	1.232,00	23.900.800,00
-	Methilergometrin Injeksi	49900	Box/100 ampul	Jul-20	3.399,00	169.610.100,00
-	Ampicillin Injeksi 1000 mg	520	Box/100 ampul	Nov-20	9.473,00	4.925.960,00
-	Euthyrox tablet	77	Box/100 tablet	Jan-21	66.818,00	5.144.986,00
-	Fitomenadion injeksi	2091	Ampul	Apr-20	4.236,00	8.857.476,00
-	Evafirenz 600 mg	1192	Botol	Feb-20	228.750,00	272.670.000,00
-	Tenofovir 300 mg	210	Botol	Feb-20	290.640,00	61.034.400,00
-	Zidovudin 100 mg	17	Botol	Jun-20	102.000,00	1.734.000,00
-	Rilpivirine 25 mg (EDURANT)	12	Botol	May-20	92.730,00	1.112.760,00
-	Lamivudin, Nevirapin, Zidovudin (30 mg, 50 mg, 60 mg)	18	Botol	Nov-20	42.000,00	756.000,00
-	Tenofovir 300 mg + Emtricitabin 200 mg (EMTRIVA)	180	Botol	Nov-19	303.461,00	54.622.980,00
-	Evafirenz 600 mg + Lamivudine 300 mg + Tenofovir 300 mg (ATRIVIA)	2	Botol	Jul-17	366.300,00	732.600,00
-	Evafirenz 600 mg + Lamivudine 300 mg + Tenofovir 300 mg (ATRIVIA)	1	Botol	Aug-19	366.300,00	366.300,00
-	Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg (ALUVIA)	789	Botol	Mar-21	901.968,00	711.652.752,00
-	Lamivudin, Nevirapin, Zidovudin (30 mg, 50 mg, 60 mg)	216	Botol	Apr-21	41.383,00	8.938.728,00

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluausa	Harga	Total (Rp)
-	Carbamazepine 200 mg	99	100 Tablet / Kotak	Jul-20	23.400,00	2.316.600,00
-	Diazepam injeksi	611	10 Ampul / Kotak	Jul-20	19.130,00	11.688.430,00
-	Fenobarbital injeksi 50 mg/ml	38	30 Ampul / Kotak	Aug-20	57.750,00	2.194.500,00
-	Fitomenadion (vit. K1) injeksi 10 mg/ml	670	30 Ampul / Kotak	Oct-20	125.010,00	83.756.700,00
-	Antihemoroid	40	10 Supp / Kotak	Sep-20	36.420,00	1.456.800,00
-	Clindamycin 150 mg	1723	50 Tablet / Kotak	Aug-20	37.700,00	64.957.100,00
-	Furosemid tablet 40 mg	148	200 tablet / kotak	Apr-21	15.800,00	2.338.400,00
-	Nifedipin 20 mg	2754	30 tablet / kotak	May-21	107.250,00	295.366.500,00
-	Fitomenadion (Vit. K) 10 mg	321	100 tablet / kotak	Jun-21	81.800,00	26.257.800,00
-	Propranolol HCL 40 mg	39	100 tablet / kotak	Jul-21	9.400,00	366.600,00
-	Aminophyllin injeksi 24 mg/ml	42	30 Ampul / kotak	Jul-21	92.130,00	3.869.460,00
-	Klindamisin tablet 150 mg	6153	50 tablet / kotak	Jul-21	40.150,00	247.042.950,00
-	Vit B6 10 mg	7000	Tablet	Dec-20	123,00	861.000,00
-	Vit B6 10 mg	7000	Tablet	Apr-21	123,00	861.000,00
-	Pyrazinamide 400 mg	672	Tablet	Jun-20	319,00	214.368,00
-	Setirizin sirup	12	Botol	Jul-20	2.993,00	35.916,00
-	Fitomenadion inj	965	30 ampul/kotak	Aug-18	122.490,00	118.202.850,00
-	MgSO4 40%	7100	Vial	Oct-18	3.650,00	25.915.000,00
-	Fenoterol Hbr Aerosol (Berotec)	200	Kotak	Dec-19	83.190,00	16.638.000,00
-	Diazepam injeksi	408	10 ampul/kotak	Feb-20	19.130,00	7.805.040,00
-	Tablet Tambah Darah	3039	30 tablet/kotak	Mar-20	12.270,00	37.288.530,00
-	Azitromicin sirup	52	Botol	Sep-19	23.448,00	1.219.296,00
-	Metil Ergometrin inj	531	100 ampul/kotak	Aug-19	268.400,00	142.520.400,00
-	Oksitosin inj	91	100 ampul/kotak	Aug-19	190.000,00	17.290.000,00
-	Retinol (Vitamin A) kapsul 100.000IU	160	50 kapsul/botol	Mar-20	16.350,00	2.616.000,00
-	Kasa Hidrofil steril 16x16 cm	200	Kotak	5/1	6.800,00	1.360.000,00
-	Gloves M	143	100 pcs/kotak	Aug-22	53.130,00	7.597.590,00
-	Gloves L	41	100 pcs/kotak	Jul-22	53.130,00	2.178.330,00
-	Retinol (Vitamin A) kapsul 100.000IU	1981	50 kapsul/botol	Sep-20	16.550,00	32.785.550,00
-	Mineral Mix	174	40 saset/kotak	Sep-20	116.800,00	20.323.200,00
-	Retinol (Vitamin A) kapsul 200.000IU	2560	50 kapsul/botol	Aug-20	29.800,00	76.288.000,00
-	Klobazam 10 mg	5	Tablet	Feb-22	776,00	3.880,00
-	GLUKOSA 10 %	1980	BOTOL	Aug-20	6.270,00	12.414.600,00
-	Iodine Test	2939	Botol	Apr-20	5.833,00	17.143.187,00
-	Glass Ionomer Cement / Fuji IX	18	Botol	Oct-20	481.250,00	8.662.500,00
-	GC Gold Label 9 Extra 1-1 PKG a 3,5	8	Botol	Jan-21	720.500,00	5.764.000,00
-	Retinol (Vitamin A) kapsul 100.000IU	11497	50 kapsul/botol	Mar-20	16.350,00	187.975.950,00
-	IV Cath NP, Pen Type no.24	1000	PCS	Apr-21	6.862,90	6.862.900,00
-	Pehacain Inj	1084	20 Ampul/kotak	Oct-20	62.260,00	67.489.840,00
-	codein tab	2	100 Tablet / Kotak	Nov-21	149.400,00	298.800,00
-	Perio Kin Spray Chlorhexidine	6	Botol	Feb-21	124.355,00	746.130,00
-	Calcii Glukonas inj	270	24 ampul / kotak	Sep-20	238.920,00	64.508.400,00
-	Tablet Tambah Darah	19936	100 Tablet / Kotak	Aug-19	40.600,00	809.401.600,00
-	GC Gold Label 9 Extra 1-1 PKG A 3	1	Botol	Apr-20	720.500,00	720.500,00
-	Pyrazinamide	1	100 Tablet / Kotak	Jul-20	23.300,00	23.300,00
-	Berotec	4	Botol	Jan-19	167.000,00	668.000,00
-	Sefadroxil 500 Mg	18910	TABLET	May-19	557,00	10.532.870,00
-	Cefixime Sirup / Farmafis Sirup	192	Botol	Jul-19	13.500,00	2.592.000,00
-	Codein 20 Mg	22795	TABLET	Nov-19	1.390,00	31.685.050,00
-	Combivent 2.5 ML	40	Botol	Feb-19	12.500,00	500.000,00
-	Combivent 2.5 ML ( B )	300	Botol	Feb-19	14.850,00	4.455.000,00
-	Erphafillin ( Aminophilin Tab )	90	100 Tablet / Botol	Sep-20	18.500,00	1.665.000,00
-	Erithromicin tab 500 Mg	1676	TABLET	Oct-20	766,00	1.283.816,00
-	Eltazon / Prednison 5 mg	16115	TABLET	Oct-19	195,00	3.142.425,00
-	Ethambutol 500 Mg	70	TABLET	May-20	495,00	34.650,00
-	Isoniazid 100 MG	220	100 Tablet / Kotak	Jun-19	8.200,00	1.804.000,00
-	Neurodex B	400	TABLET	Feb-19	575,00	230.000,00
-	Pulmicort	95	BOTOL	Dec-18	9.725,00	923.875,00
-	Paracetamol 500 / Trimol	21567	TABLET	Feb-19	165,00	3.558.555,00
-	Pirazinamid 500 mg	5770	TABLET	Sep-19	248,00	1.430.960,00
-	Ranitidine 150 mg	27	100 Tablet / Kotak	Jul-19	11.900,00	321.300,00
-	Rifampisin 450 mg	2403	TABLET	May-20	1.031,00	2.477.493,00
-	Vektrim Sirup A	20	BOTOL	Aug-19	53.325,00	1.066.500,00
<b>TOTAL 1 + 2 + 3 + 4</b>						<b>3.915.747.279,35</b>

## DAFTAR BAHAN MEDIS HABIS PAKAI TAHUN 2021

NO	Nama Barang / Uraian Pemeriksaan / Jenis Menu	Volume	Satuan	Tahun Kadaluarsa	Harga Satuan	Total (Rp)
<b>1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN</b>						<b>36.708.664,00</b>
-	Skin traction dewasa	1	pcs	Oct-20	96.849,00	96.849,00
-	Gudel Merah	2	pcs	Dec-19	11.705,00	23.410,00
-	Spinocan 25	1	pcs	Mar-20	26.180,00	26.180,00
-	Spinocan 27	1	pcs	Sep-20	26.500,00	26.500,00
-	Haemonetic	6	fls	Jul-20	325.000,00	1.950.000,00
-	NGT 3.5	25	pcs	Jan-21	5.941,00	148.525,00
-	Tracheostomi 5.0	1	pcs	Jun-20	600.000,00	600.000,00
-	Infusomat Space line	2	pcs	Jul-05	31.197,00	62.394,00
-	ETT 5.5	1	pcs	Jun-20	37.800,00	37.800,00
-	ETT 8.0	1	pcs	Jun-20	37.800,00	37.800,00
-	Close suction no.6	1	pcs	May-20	272.833,00	272.833,00
-	NGT 18	16	pcs	Mar-21	12.429,00	198.864,00
-	LMA no2	1	pcs	Jun-20	283.025,00	283.025,00
-	Tracheostomi 8.0	1	pcs	Sep-19	616.165,00	616.165,00
-	Condom catheter	22	pcs	Feb-20	1.500,00	33.000,00
-	Wing G 27	82	pcs	Sep-20	6.716,00	550.712,00
-	Cathejel	1	pcs	Mar-21	41.601,00	41.601,00
-	Suction Catheter FR 6	1	pcs	Apr-21	5.188,00	5.188,00
-	NGT no.8	1	pcs	Mar-21	14.399,00	14.399,00
-	Endotracheal tube	1	pcs	Apr-21	37.800,00	37.800,00
-	Folley catheter FR 24	21	pcs	Apr-21	15.042,00	315.882,00
-	ETT 5.5	1	pcs	Jun-20	37.800,00	37.800,00
-	Introcane Safety G 20	50	pcs	May-21	22.000,00	1.100.000,00
-	Original perfusor	2	pcs	Jan-21	20.000,00	40.000,00
-	Folley catheter FR 22	8	pcs	May-21	10.120,00	80.960,00
-	Folley catheter FR 3way 22	6	pcs	May-21	25.575,00	153.450,00
-	Polysorb 4-0	28	pcs	Jan-21	93.500,00	2.618.000,00
-	Instoper	131	pcs	Feb-21	2.195,00	287.545,00
-	Folley Catheter 2 way No.24	1	pcs	May-21	15.042,00	15.042,00
-	NGT FR 8 100 cm	5	pcs	Jun-21	14.399,00	71.995,00
-	Gypsona 3"	1	pcs	Aug-21	21.500,00	21.500,00
-	Condom catheter	7	pcs	Aug-21	2.000,00	14.000,00
-	Abbocath G18	2	pcs	Aug-21	6.270,00	12.540,00
-	Catgut 4-0	1	pcs	Aug-21	41.163,00	41.163,00
-	Gypsona 3"	5	pcs	Sep-21	21.500,00	107.500,00
-	Gypsona 4"	8	pcs	Sep-21	28.000,00	224.000,00
-	Oxygen nasal canul	2	pcs	Oct-21	9.817,00	19.634,00
-	Blood set terumo	2	pcs	Jun-21	8.189,00	16.378,00
-	ETT no.7	1	pcs	Sep-21	37.800,00	37.800,00
-	NGT 16	1	pcs	Sep-21	12.429,00	12.429,00
-	Oxygen mask	1	pcs	Apr-21	18.266,00	18.266,00
-	Gudel no.2	1	pcs	Feb-19	13.125,00	13.125,00
-	Bisturi no.22	2	pcs	Aug-19	3.000,00	6.000,00
-	Abbocath G 20	2	pcs	Sep-21	6.270,00	12.540,00
-	Abbocath G 18	3	pcs	Sep-21	6.270,00	18.810,00
-	Wing G 25	2	pcs	Sep-21	5.562,00	11.124,00
-	Tegaderm	1	pcs	Apr-20	2.655,00	2.655,00
-	Bloodset Bbraun	2	pcs	Jun-21	13.976,00	27.952,00
-	ETT no.7.5	1	pcs	Jun-21	37.800,00	37.800,00
-	NGT no.14	1	pcs	Jun-21	12.429,00	12.429,00

NO	Nama Barang / Uraian Pemeriksaan / Jenis Menu	Volume	Satuan	Tahun Kadaluarsa	Harga Satuan	Total (Rp)
-	Abbocath G 14	1	pcs	Jun-21	22.000,00	22.000,00
-	ETT no.2.0	1	pcs	Oct-21	37.800,00	37.800,00
-	Guedel 4	1996	pcs	Jan-21	13.125,00	26.197.500,00
<b>2. RUMAH SAKIT JiWA</b>						<b>139.835,00</b>
-	Blood Set	10	Pcs	Oktober 2020	13.976,00	139.760,00
-	SD HIV 1/2 ( Rapid 1 )	75	Test	Oktober 2021	1,00	75,00
<b>TOTAL 1 + 2</b>						<b>36.848.499,00</b>

**REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN DANA LUEP APBA**  
**Periode 2021**

No	Nama LUEP	Saldo per 31 Desember 2020		Setoran Januari			Sisa Piutang		Jumlah Tunggalan
		Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	(Jumlah Pokok + Denda) (Rp)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	(Sisa Pinjaman + Denda) (Rp)
1	KP. Sulaiman Hamid	118.080.000,00	5.904.000,00	-	-	-	118.080.000,00	5.904.000,00	123.984.000,00
2	KP. Harap Beuna	39.920.000,00	3.496.000,00	-	-	-	39.920.000,00	3.496.000,00	43.416.000,00
3	KUD. Geutanyo	29.999.000,00	1.499.950,00	-	-	-	29.999.000,00	1.499.950,00	31.498.950,00
4	KP. Muka Blang Jaya	23.566.000,00	1.178.300,00	-	-	-	23.566.000,00	1.178.300,00	24.744.300,00
5	UD. Bersama	58.040.000,00	2.952.000,00	-	-	-	58.040.000,00	2.952.000,00	60.992.000,00
6	KP. Usaha Rajin	300.580.000,00	15.029.000,00	-	-	-	300.580.000,00	15.029.000,00	315.609.000,00
7	KP. Maha Terasa	201.420.000,00	11.571.000,00	-	-	-	226.420.000,00	11.571.000,00	237.991.000,00
8	KP. Meutuah Baro	806.360.038,00	49.999.500,00	79.062.707,00	-	79.062.707,00	727.262.731,00	49.999.500,00	777.262.231,00
9	KP. Beujaya	299.815.182,00	14.999.850,00	-	-	-	299.815.182,00	14.999.850,00	314.815.032,00
10	Koptan Putra Anak Bangsa	399.200.000,00	24.960.000,00	4.542.555,00	-	4.542.555,00	394.654.545,00	24.960.000,00	419.614.545,00
11	CV. Tabah Mandiri	378.411.991,00	24.375.000,00	-	-	-	378.411.991,00	24.375.000,00	402.786.991,00
12	UD. Rahmad Tani	226.409.091,00	16.875.000,00	1.815.282,00	-	1.815.282,00	224.590.909,00	16.875.000,00	241.465.909,00
13	KUD. Tupah	280.181.818,00	15.000.000,00	-	-	-	280.181.818,00	15.000.000,00	295.181.818,00
14	UD. Rizky	188.936.363,00	19.765.000,00	-	-	-	188.936.363,00	19.765.000,00	208.701.363,00
15	UD. Makmur Jaya	439.200.000,00	24.960.000,00	-	-	-	439.200.000,00	24.960.000,00	464.160.000,00
16	UD. Kawan Kita	443.690.909,00	22.230.000,00	-	-	-	443.690.909,00	22.230.000,00	465.920.909,00
17	UD. HMY Baru	327.600.000,00	16.380.000,00	-	-	-	327.600.000,00	16.380.000,00	343.980.000,00
18	UD. Mekar Tani	123.563.636,00	9.360.000,00	-	-	-	123.563.636,00	9.360.000,00	132.923.636,00
19	KP. Karya Warisan	90.909.090,00	5.000.000,00	-	-	-	90.909.090,00	5.000.000,00	95.909.090,00
20	KP. Hasrad Jaya	130.000.000,00	12.500.000,00	4.542.555,00	-	4.542.555,00	125.454.545,00	12.500.000,00	137.954.545,00
21	KP. Berkat Tani	291.367.136,00	15.000.000,00	-	-	-	291.367.136,00	15.000.000,00	306.367.136,00
22	UD. Berkat Baru	68.727.273,00	17.550.000,00	-	-	-	68.727.273,00	17.550.000,00	86.277.273,00
23	UD. Bina Tani	22.580.616,00	14.625.000,00	31.704.074,00	-	31.704.074,00	-	5.478.342,00	5.478.342,00
24	UD. Jasa Bersama	5.000.000,00	9.750.000,00	-	-	-	5.000.000,00	9.750.000,00	14.750.000,00
25	UD. Inti Tani	138.909.091,00	11.250.000,00	9.088.009,00	-	9.088.009,00	129.818.182,00	11.250.000,00	141.068.182,00
26	UD. Usaha Tani	25.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00
27	UD. Oya	105.454.545,00	9.750.000,00	-	-	-	105.454.545,00	9.750.000,00	115.204.545,00
28	UD. Makmur Tani	41.363.636,00	8.750.000,00	-	-	-	41.363.636,00	8.750.000,00	50.113.636,00
29	UD. Hamida Tani	241.022.727,00	12.187.500,00	-	-	-	241.022.727,00	12.187.500,00	253.210.227,00
30	UD. Tani Makmur	183.750.000,00	12.187.500,00	-	-	-	183.750.000,00	12.187.500,00	195.937.500,00
31	UD. Berkat	97.045.455,00	14.625.000,00	3.630.564,00	-	3.630.564,00	93.409.091,00	14.625.000,00	108.034.091,00
32	KP. Magfirah	48.186.819,00	5.000.000,00	-	-	-	48.181.819,00	5.000.000,00	53.181.819,00
33	KP. Kuta Sirong	96.128.809,00	5.000.000,00	-	-	-	96.090.909,00	5.000.000,00	101.090.909,00
34	CV. Babah Dua	222.780.766,00	15.000.000,00	-	-	-	222.727.265,00	15.000.000,00	237.727.265,00
35	Breeh Nanggroe	408.191.816,00	22.500.000,00	-	-	-	408.181.816,00	22.500.000,00	430.681.816,00
36	KP. Sinar Tani	96.933.590,00	10.000.000,00	4.532.404,00	-	4.532.404,00	92.371.736,00	10.000.000,00	102.371.736,00
37	KP. Kuta Jari	115.927.689,00	10.000.000,00	35.420.548,00	-	35.420.548,00	80.454.540,00	10.000.000,00	90.454.540,00
38	KP. Indah Burma	29.707.971,00	3.000.000,00	-	-	-	29.702.971,00	3.000.000,00	32.702.971,00
39	Usaha Baroe	19.707.971,00	3.500.000,00	-	-	-	19.702.971,00	3.500.000,00	23.202.971,00
40	KP. UD Sentosa	200.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	10.000.000,00	210.000.000,00

No	Nama LUEP	Saldo per 31 Desember 2020		Setoran Januari			Sisa Piutang		Jumlah Tunggalan
		Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	(Jumlah Pokok + Denda) (Rp)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	(Sisa Pinjaman + Denda) (Rp)
41	UD. Saboh Hate	258.636.364,00	13.750.000,00		-	-	258.636.364,00	13.750.000,00	272.386.364,00
42	KP. Usaha Tabina	116.754.545,00	9.240.000,00		-	-	116.754.545,00	9.240.000,00	125.994.545,00
43	KP. Setia	167.200.000,00	8.360.000,00		-	-	167.200.000,00	8.360.000,00	175.560.000,00
44	KP. Tiga H	106.999.999,00	8.250.000,00		-	-	106.999.999,00	8.250.000,00	115.249.999,00
45	KP. Karya Subur	40.954.544,00	9.680.000,00		-	-	40.954.544,00	9.680.000,00	50.634.544,00
46	KP. Irma	127.696.705,00	9.680.000,00	9.088.009,00	-	9.088.009,00	118.605.796,00	9.680.000,00	128.285.796,00
47	KP. Sumber Tani	166.909.091,00	8.800.000,00		-	-	166.909.091,00	8.800.000,00	175.709.091,00
48	KP. Sumber Rezeki	176.000.000,00	8.800.000,00		-	-	176.000.000,00	8.800.000,00	184.800.000,00
49	CV. Tunggal Mandiri	55.000.000,00	2.750.000,00		-	-	55.000.000,00	2.750.000,00	57.750.000,00
50	KP. Nida Makmur	70.325.202,00	3.740.000,00		-	-	70.257.020,00	3.740.000,00	73.997.020,00
51	KP. Oriza Sativa	5.800.561,00	4.510.000,00		-	-	6.797.661,00	4.510.000,00	11.307.661,00
52	KP. Takana Juo	61.502.134,00	3.740.000,00	1.347.285,00	-	1.347.285,00	59.805.772,00	3.740.000,00	63.545.772,00
53	UD. Hanafi	103.128.790,00	5.390.000,00		-	-	103.098.829,00	5.390.000,00	108.488.829,00
54	KP. Sumber Rezeki	264.000.000,00	13.200.000,00		-	-	264.000.000,00	13.200.000,00	277.200.000,00
55	KP. Sari Alam	-	9.900.000,00		-	-	-	9.900.000,00	9.900.000,00
56	KP. UD. Edi	40.700.000,00	2.035.000,00		-	-	40.700.000,00	2.035.000,00	42.735.000,00
57	KP. Syukri Yunus	168.605.058,00	15.300.000,00	906.591,00	-	906.591,00	167.665.167,00	15.300.000,00	182.965.167,00
58	KP. Sapeu Pakat	163.265.176,00	9.498.000,00	4.537.155,00	-	4.537.155,00	158.701.221,00	9.498.000,00	168.199.221,00
59	KP. UD Sumber Tani	115.763.636,00	6.720.000,00		-	-	115.763.636,00	6.720.000,00	122.483.636,00
60	KP. UD Dua Saudara	180.200.000,00	11.760.000,00		-	-	180.200.000,00	11.760.000,00	191.960.000,00
61	KP. Makmur Jaya	99.800.000,00	5.490.000,00		-	-	99.800.000,00	5.490.000,00	105.290.000,00
62	KP. Tunas Muda	37.363.636,00	7.800.000,00	4.542.555,00	-	4.542.555,00	32.821.081,00	7.800.000,00	40.621.081,00
	Setoran Jasa	(5.000.000,00)	(1,00)		-	-	(5.002.900,00)	(1,00)	(5.002.901,00)
	<b>T O T A L</b>	<b>9.885.274.469,00</b>	<b>691.102.599,00</b>	<b>194.760.293,00</b>	<b>-</b>	<b>194.760.293,00</b>	<b>9.724.871.162,00</b>	<b>681.955.941,00</b>	<b>10.406.827.103,00</b>



## RESUME PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG LUEP TAHUN 2021

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
1	Ir. Bahrul Walidin Pimpinan LUEP KP. Beujaya Desa Baro Jaman Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/37/2005	299.815.182,00	14.999.850,00	314.815.032,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  - No.521/724, 21 November 2005 - No.050/102, 21 Februari 2006 - No.050/138, 3 Maret 2006 - No.521/121/3/2011, 31 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No. 526/1833/12/2014, 15 Desember 2014	
2	Muslim Pimpinan LUEP Makmur Jaya Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Rava	Usaha Tidak Jelas	Nomor : 050/1095/2009	99.800.000,00	5.490.000,00	105.290.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  - No.256/536/2009, 15 Juni 2010 - No.526/807/3/2010, 28 September 2010 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1125/04/2015, 24 April 2015	
3	Abd. Majid Pimpinan LUEP KP. UD. Dua Saudara Desa Suak Bili, Kecamatan Suka Makmue, Kab. Nagan Raya	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/956/2009	180.200.000,00	11.760.000,00	191.960.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  - No.256/536/2009, 15 Juni 2010 - No.526/807/3/2010, 28 September 2010 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1125/04/2015, 24 April 2015	
4	Adam Sani Pimpinan LUEP KP. UD. Sumber Tani, Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur, Kab. Nagan Rava	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/955/2009	115.763.636	6.720.000	122.483.636,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  - No.256/534/2009, 15 Juni 2010 - No.526/805/3/2010, 28 September 2010 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1123/04/2015, 24 April 2015	
5	Mukhtar Saleh	Usaha Macet	Nomor : 050/1329/2009	40.700.000,00	2.035.000,00	42.735.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012.	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
	Pimpinan LUEP KP. UD. Edi Desa Blang Seuneung Kec. Beutong Kab. Nagan Raya						-Penagihan melalui surat :  -No.526/465.5/2009, 12 Juni 2009 -No.521/74/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013,26Nopember 2013 -No.526/1854/12/204, 15 Desember 2014	
6	Tamaniah Pimpinan LUEP KP. Sumber Rezeki, Desa Teruntung Payung Hilir Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/1295/2008	264.000.000	13.200.000	277.200.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/465.4/2009, 12 Juni 2009 -No.521/74/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013,26Nopember 2013 -No.526/1854/12/204, 15 Desember 2014	
7	H. Hanafi Pimpinan LUEP UD. Hanafi Desa Ujung Padang Kec. Labuhan Haji Barat Kab.Aceh Selatan	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1239/2008	103.098.829	5.390.000	108.488.829,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No.256/692/2009, 16 Juli 2009 -No.256/1467.6/2009, 28 Desember 2009 -No.521/82/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1120/04/2015, 24 April 2015	
8	Bakhtiar Aly Pimpinan LUEP KP. Takana Juo Desa Keumumu Hilir Kec Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1292/2008	59.805.772	3.740.000	63.545.772,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.256/692/2009, 16 Juli 2009 -No.256/1467.8/2009, 28 Desember 2009 -No.521/81/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1119/04/2015, 24 April 2015	
9	Muslimah Pimpinan LUEP KP. Oriza Sativa Desa Ie Dingen Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1290/2008	6.797.661	4.510.000	11.307.661,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
10	H. Mahyuddin Pimpinan LUEP KP. Nida Makmur Desa Limau Saring Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan	Usaha Macet	Nomor : 050/1287/2008	70.257.020	3.740.000	73.997.020,00	- No. 526/465.7/2009, 12 Juli 2009 - Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No.256/465.7/2009, 12 Juni 2009 -No.256/692/2009, 16 Juli 2009 -No.256/1467.4/2009, 28 Desember 2009 -No.521/77/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/1852/2014, 15 Desember 2014	
11	Hj. Mariam Pimpinan LUEP KP. Sumber Rezeki Gampong Kulam Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1278/2008	176.000.000,00	8.800.000,00	184.800.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.1/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/142/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1850/12/2014, 15 Desember 2014	
12	Izul Azhar Pimpinan LUEP KP. Sumber Tani Rumoh Blang Keude Simpang Jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/1277/2008	166.909.091	8.800.000	175.709.091,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.10/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/143/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1849/12/2014, 15 Desember 2014	
13	Ibnu Hasan Main Pimpinan LUEP KP. Irma Desa Kamban Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1276/2008	118.605.796	9.680.000	128.285.796,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No.256/1467.11/2009, 28 Desember 2009 -No.521/144/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
14	Baharuddin Pimpinan LUEP KP. Karya Subur Desa Kubu Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang lancar	Nomor : 050/1275/2008	40.954.544,00	9.680.000,00	50.634.544,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No.256/1467.12/2009,28 Deesember 2009 -No.521/145/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013	
15	Budiman Pimpinan LUEP KP. Tiga H Desa Tanjong Putih Kec. Nibong Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/1271/2008	106.999.999	8.250.000	115.249.999,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No.256/1467.19/2009, 28 Desember 2009 -No.521/146/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1116/04/2015, 24 April 2015	
16	M. Thaib. AR Pimpinan LUEP KP. Setia Desa Meunasah Panton Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/1270/2008	167.200.000,00	8.360.000,00	175.560.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.9/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/153.1/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1848/12/2014, 15 Desember 2014	
17	Saridin Hasan Pimpinan LUEP KP. Usaha Tabina Desa Blang Dalam Genteng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/1269/2008	116.754.545,00	9.240.000,00	125.994.545,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No.256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No.512/147/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1115/04/2015, 24 April 2015	
18	Nasir Nafi Pimpinan LUEP KP. Saboh Hate Desa Panigah Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/1268/2009	258.636.364,00	13.750.000,00	272.386.364,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.13/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/148/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1847/12/2014, 15 Desember 2014	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
19	Said Bustami Pimpinan LUEP UD. Sentosa Desa Gelanggang Gajah Keude Tanjong Kec. Peusangan Kab. Aceh Barat Dava	Usaha tidak jelas	Nomor : 050/733/2007	200.000.000,00	10.000.000,00	210.000.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/430/2008, 28 Juli 2008 -No. 521/844/2008, 13 Oktober 2008 -No. 521/350.1/2009, 1 September 2008 -No. 526/351/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/154/3/2009, 21 Februari 2010 -No. 521/65/3/2011, 27 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1846/12/2014, 15 Desember 2014	
20	Nazi Mudin. B Pimpinan LUEP KP. Usaha Baroe Desa Jambo Papeun Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh	Usaha Kurang lancar	Nomor : 050/735/2007	19.702.971,00	3.500.000,00	23.202.971,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No.526/329/2009, 13 Mei 2009 -No.256/156/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/76/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1138/04/2015, 24 April 2015	
21	Nazi Mudin. B Pimpinan LUEP KP. Indah Burma Desa Seuleukat Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/748/2007	29.702.971,00	3.000.000,00	32.702.971,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/330/2009, 13 Mei 2009 -No.256/155/3/2009, 21 Februari 2010 -No.521/75/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1114/4/2015, 24 April 2015	
22	Ahmad Yamani Pimpinan LUEP UD. Berkat Desa Peureupok Kec. Svamtalira Aron Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/860/2007	93.409.091,00	14.625.000,00	108.034.091,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/335/2009, 13 Mei 2009 -No.256/180/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/149/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1110/04/2015, 24 April 2015	
23	Saiful Bahri Pimpinan LUEP UD. Tani Makmur Keude Simpang Empat Kec. Simpang Keramat Kab. Aceh Utara	Usaha bangkrut	Nomor : 050/859/2007	183.750.000,00	12.187.500,00	195.937.500,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/331/2009, 13 Mei 2009 -No.256/176/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/99/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1109/04/2015, 24 April 2015	
24	Hamdani, HS Pimpinan LUEP UD. Hamida Tani Desa Teumpeun Kec. Svamtalira Bavy Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/858/2007	241.022.727,00	12.187.500,00	253.210.227,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/835/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/334/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/179/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/100/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1842/12/2014, 15 Desember 2014	
25	Saifuddin Pimpinan LUEP UD. Makmu Tani Desa Teupin Bania Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha bangkrut	Nomor : 050/857/2007	41.363.636,00	8.750.000,00	50.113.636,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/342/2009, 13 Mei 2009 -No.256/187/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/101/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1135/04/2015, 24 April 2015	
26	Syafruddin Pimpinan LUEP UD. Oya Desa Meunasah Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/856/2007	105.454.545,00	9.750.000,00	115.204.545,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/339/2009, 13 Mei 2009 -No.256/184/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/102/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1108/04/2015, 24 April 2015	
27	Abdul Munir Pimpinan LUEP Usaha Tani Jalan Pasan Inpres 3 Geudong Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/855/2007	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No.526/336/2009, 13 Mei 2009 -No.256/181/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/103/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1134/04/2015, 24 April 2015	
28	Zulfikar Pimpinan LUEP Inti Tani Desa Geulumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara	Usaha bangkrut	Nomor : 050/854/2007	129.818.182,00	11.250.000,00	141.068.182,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/337/2009, 13 Mei 2009 -No.256/182/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/104/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1107/04/2015, 24 April 2015	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
29	M. Yacob Ali Pimpinan LUEP UD. Jasa Bersama Desa Tanjung Dalam Selatan Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara	usaha kurang lancar	Nomor : 050/809/2007	5.000.000,00	9.750.000,00	14.750.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.256/175/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/105/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1133/04/2015, 24 April 2015	
30	Nurdin M. Ali Pimpinan LUEP UD. Bina Tani Desa Lagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara	Usaha Kurang lancar	Nomor : 050/808 /2007	-	5.478.342	5.478.342,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No.526/338/2009, 13 Mei 2009 -No.256/183/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/106/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1132/04/2015, 24 April 2015	
31	M. Nurdin Mahmud Pimpinan LUEP UD. Berkat Baru Desa Meunasah Kumbang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/807/2007	68.727.273,00	17.550.000,00	86.277.273,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/341/2009, 13 Mei 2009 -No.256/186/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/106.1/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1131/04/2015, 24 April 2015	
32	Saiful Muddin Pimpinan LUEP KP. Berkat Tani Gampong Mee Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/795/2007	291.367.136	15.000.000	306.367.136,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1841/12/2014, 15 Desember 2014	
33	H. Hasanuddin Pimpinan LUEP KP. Hasrat Jaya Desa Rangkileh Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/791/2007	125.454.545,00	12.500.000,00	137.954.545,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/332/2009, 13 Mei 2009 -No.256/177/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/108/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1106/04/2015, 24 April 2015	
34	Said Hamid Pimpinan LUEP KP. Karya Warisan Desa Pucok Alue Dua Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur	Usaha bangkrut	Nomor : 050/851/2007	90.909.090,00	5.000.000,00	95.909.090,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/952/2008, 30 Oktober 2008 -No. 526/326/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/191/3/2010, 21 Februari 2010	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No. 521/111/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1840/12/2014, 15 Desember 2014	
35	Dahlan ZA Pimpinan LUEP UD. Mekar Tani Desa Blang Me Timu Kec. Jeunib Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/995/2007	123.563.636,00	9.360.000,00	132.923.636,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/430/2008, 28 Juli 2008 -No. 521/832/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/310/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/171/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/124/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1839/12/2014, 15 Desember 2014	
36	Iskandar Pimpinan LUEP UD. MHY Baru Desa Cot Ara Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/987/2007	327.600.000,00	16.380.000,00	343.980.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/831/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/315/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/166/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/87/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1838/12/2014, 15 Desember 2014	
37	Ibrahim Ramli Pimpinan LUEP UD. Kawan Kita Jalan Tgk. Chik Ditiro Meunasah Capa Kota Juang Kabupaten Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/985/2007	443.690.909,00	22.230.000,00	465.920.909,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/829/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/365/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/164/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/98/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 November 2013 -No. 526/1836/12/2014,15 Desember 2014	
38	Mukhlis, ST Pimpinan LUEP UD. Makmur Jaya Desa Meunasah Dayah Kec. Glumpang Dua Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/791/2007	439.200.000,00	24.960.000,00	464.160.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 526/316/2009, 13 Mei 2009. -No. 521/828/2008, 13 Oktober 2008	



No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
39	Hasbi Yacob Pimpinan LUEP UD. Rizky Desa Meunasah Timur Kec. Peusangan Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/784/2007	188.936.363	19.765.000	208.701.363,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/306/2009, 13 Mei 2009 -No.256/174/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/30/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1102/04/2015, 24 April 2015	
40	Saifullah AB Pimpinan LUEP KUD. Tufah Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/783/2007	280.181.818	15.000.000	295.181.818,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/827/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/314/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/167/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/131/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1835/12/2014, 15 Desember 2014	
41	M. Yunus Ali Pimpinan LUEP UD. Rahmad Tani Desa Darul Aman Darussalam Kec. Samalanga Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/782/2007	224.590.909,00	16.875.000,00	241.465.909,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/307/2009, 13 Mei 2009 -No.256/173/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/135/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1101/04/2015, 24 April 2015	
42	Khalidin Ismail Pimpinan LUEP CV. Tabah Mandiri Desa Teuping Kupula Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen	Usaha KurangLancar	Nomor : 050/781/2007	378.411.991,00	24.375.000,00	402.786.991,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No. 521/826/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/308/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/172/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/93/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1834/12/2014, 15 Desember 2014	
43	Marzuki Ibrahim Pimpinan LUEP Koptan Putra Anak Bangsa Desa Juli Cot Meurak Kec. Kota Juang Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/779/2007	394.654.545,00	24.960.000,00	419.614.545,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/313/2009, 13 Mei 2009 -No.256/168/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/94/3/2011, 31 Januari 2011	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1100/04/2015, 24 April 2015	
44	Drs. Ibnu Sakdan Pimpinan LUEP KP. Maha Terasa Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	Usaha Macet	Nomor : 050/437/2005	226.420.000,00	11.571.000,00	237.991.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.050/102, 21 Februari 2006 -No.521/4971, 7 Maret 2007 -No.521/73/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1099/04/2015, 24 April 2015	
45	Zahrul Fudhni Pimpinan LUEP KP. Meutuah Baro Desa Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	Kurang Lancar	Nomor : 050/08/2005	727.262.731,00	49.999.500,00	777.262.231,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No.050/102, 21 Februari 2006 -No.050/138, 3 Maret 2006 -No.050/424, 6 Juli 2006 -No.521/4967, 7 Maret 2007 -No.Ku.900/355/2007, 18 Desember 2007 -No.521/60/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1098/04/2015, 24 April 2015	
46	T. Nyak Mawardi Pimpinan LUEP UD. Bersama Desa Tokoh Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya	Kurang Lancar	Nomor : 050/523/2004	58.040.000,00	2.952.000,00	60.992.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/91, 15 Maret 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	
47	Idrus Harun Pimpinan LUEP UD. Muka Blang Jaya Desa Muka Blang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya	Kurang Lancar	Nomor : 050/514/2004	23.566.000,00	1.178.300,00	24.744.300,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/91, 15 Maret 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
48	Ilyas Cut Ali Pimpinan LUEP KP. Geutanyo Desa Ulee Ateung Kec. Madat Kab. Aceh Timur	Usaha Macet	Nomor : 050/483/2004	29.999.000,00	1.499.950,00	31.498.950,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	
49	Herman Ahmad Pimpinan LUEP KP. Sulaiman Hamid Desa Lhok Awe-Awe Keamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/452/2003	118.080.000,00	5.904.000,00	123.984.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 518/22581, 8 September 2004 -No. 521/4968, 7 Maret 2007 -No. 521/136/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1831/12/2014,15 Desember 2014	
50	Zamzami Pimpinan LUEP KP. Sapeu Pakat Desa Data Makmur Kec. Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/950/2009	158.701.221	9.498.000	168.199.221,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :  -No.256/531/2010, 15 Juni 2010 -No.526/802/3/2010, 28 September 2010 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1122/4/2015. 24 April 2015	
51	Syukri Yunus Pimpinan LUEP KP. Syukri Yunus Desa Leupung Ulee Alue Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar	Masih Berjalan Lancar	Nomor : 050/949/2009	167.665.167	15.300.000	182.965.167,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.526/801/3/2010, 28 September 2010 -No.256/530/2009, 15 Juni 2010 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1121/04/2015, 24 April 2015	
52	H. Rusli Pimpinan LUEP KP. Usaha Rajin Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	Usaha Tidak Jelas	Nomor : 050/584/2005	300.580.000,00	15.029.000,00	315.609.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :	
							-No. 050/102, 21 Februari 2006 -No. 050/138, 3 Maret 2006	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No. 521/4967, 7 Maret 2007 -No. 521/69/3/2011, 27 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1832/12/2014, 15 Desember 2014	
53	Amiruddin Pimpinan LUEP KP. Sinar Tani Desa Lamnga Kec. Montasik Kab. Aceh Besar	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/950/2007	92.371.736	10.000.000	102.371.736,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat :  -No.521/430/2008, 28 Juli 2008 -No.521/1882/2008, 20 Oktober 2008 -No.526/320/2009, 13 Mei 2009 -No.256/197/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/67/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1112/4/2015, 24 April 2015	
54	Rusydi Pimpinan LUEP KP. Kuta Jari Desa Lambaro Samahani Kec. Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar	Masih berjalan lancar	Nomor : 050/954/2007	80.454.540	10.000.000	90.454.540,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat :  -No.521/843/2008, 13 Oktober 2008 -No.526/323/2009, 13 Mei 2009 -No.521/665/2009, 26 Agustus 2009 -No.256/194/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/64/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1113/04/2015, 24 April 2015	
55	Mauridatun RL Pimpinan LUEP CV. Tunggal Mandiri Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/1281/2008	55.000.000,00	2.750.000,00	57.750.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.256/465.6/2009, 12 Juni 2009 -No.256/1467.15/2009, 28 Desember 2009 -No.521/70/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1851/12/2014, 15 Desember 2014	
56	Sayid Chalid Pimpinan LUEP KP. Magfirah Desa Pulo Batee Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie	Usaha Macet	Nomor : 050/841/2007	48.181.819,00	5.000.000,00	53.181.819,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat :  -No.521/836/2008, 13 Oktober 2008 -No.521/933/2008, 29 Oktober 2008	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No.526/344/2009, 13 Mei 2009 -No.256/162/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/1210/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1111/4/2015, 24 April 2015	
57	Zakiah H. Manyak Pimpinan LUEP KP. Kuta Sirong Desa Lhok Keutapang Kec. Pidie Kab. Pidie	Usaha macet	Nomor : 050/844/2007	96.090.909	5.000.000	101.090.909,00	Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/838/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/345/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/16/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/120/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1843/12/2014, 15 Desember 2014	
58	Abdul Wahed Thaleb Pimpinan LUEP CV. Babah Dua Desa Karieng Kec. Grong-Grong Kab. Pidie	Usaha bangkrut	Nomor : 050/845/2007	222.727.265	15.000.000	237.727.265,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat :  -No. 521/839/2008, 13 Oktober 2008. -No. 526/346/2009, 13 Mei 2009. -No. 256/160/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/119/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1844/12/2014, 15 Desember 2014	
59	Munaidi Yasin Pimpinan LUEP UD. Breuh Nanggroe Desa Jeumpa Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie	Usaha tidak jelas	Nomor : 050/1087/2007	408.181.816	22.500.000	430.681.816,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat :  -No. 521/841/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/343/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/163/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/140/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1845/12/2014, 15 Desember 2014	
60	Ismail A. Rahman Pimpinan LUEP KP. Sari Alam Desa Meurah Dua Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya	Masih berjalan lancar	Nomor : 050/1296/2008	-	9.900.000,00	9.900.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan. -Penagihan melalui surat :  -No. 526/729/2009, 22 Juli 2009.	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
61	Afdhal M. Daud Pimpinan LUEP KP. Tunas Muda Desa Matang Mesjid Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen	Usaha macet	Nomor : 050/1329/2009	32.821.081,00	7.800.000,00	40.621.081,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat :  -No.256/527/2010, 15 Juni 2009 -No.526/799/3/2010, 28 September 2010 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013,26Nopember 2013 -No.526/1855/12/2014,15 Desember 2014	
62	Pimpinan LUEP KP. Harap Beuna	Usaha Cukup Lancar	-	39.920.000,00	3.496.000,00	43.416.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012	
	Setoran Jasa	-	-	(5.002.900)	(1)	(5.002.901,00)		
<b>TOTAL</b>				<b>9.724.871.162,00</b>	<b>681.955.941,00</b>	<b>10.406.827.103,00</b>		

## ASET TETAP BERDASARKAN KONDISI BARANG

URAIAN	BAIK	BELUM MEMILIKI NILAI	DIKUASAI PIHAK LAIN	TOTAL ASET TETAP
<b>ASET TETAP</b>				
<b>TANAH</b>	<b>3.589.771.602.156,79</b>	<b>110,00</b>	<b>6.209.052.756,00</b>	<b>3.595.980.655.022,79</b>
Tanah	3.589.771.602.157	110	6.209.052.756	3.595.980.655.022,79
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>4.467.858.648.475,84</b>	<b>7.807,00</b>	<b>1.427.671.850,00</b>	<b>4.469.286.328.132,84</b>
a. Alat Besar	169.528.674.471,26	11,00	4.400.000,00	169.533.074.482,26
b. Alat Angkutan	686.105.180.029,80	24,00	1.300.271.850,00	687.405.451.903,80
c. Alat Bengkel dan Ukur	65.563.068.851,43	310,00	-	65.563.069.161,43
d. Alat Pertanian	158.051.040.633,12	33,00	-	158.051.040.666,12
e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.081.278.734.546,34	5.134,00	-	1.081.278.739.680,34
f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	123.515.351.910,45	65,00	-	123.515.351.975,45
g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	691.546.871.154,20	138,00	-	691.546.871.292,20
h. Alat Laboratorium	473.398.988.195,19	1.699,00	-	473.398.989.894,19
i. Alat Persenjataan	5.044.149.908,00	-	-	5.044.149.908,00
j. Komputer	811.579.368.524,91	368,00	123.000.000,00	811.702.368.892,91
k. Alat Eksplorasi	668.667.800,00	4,00	-	668.667.804,00
l. Alat Pengeboran	22.150.000,00	1,00	-	22.150.001,00
m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.846.037.081,00	-	-	2.846.037.081,00
n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
o. Alat Keselamatan Kerja	9.956.592.638,00	9,00	-	9.956.592.647,00
p. Alat Peraga	3.526.896.700,00	-	-	3.526.896.700,00
q. Peralatan Proses/ Produksi	4.504.535.363,00	1,00	-	4.504.535.364,00
r. Rambu - Rambu	173.217.682.052,10	-	-	173.217.682.052,10
s. Peralatan Olah Raga	7.504.658.617,04	10,00	-	7.504.658.627,04
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>7.292.829.563.530,85</b>	<b>468,00</b>	<b>80.119.337,00</b>	<b>7.292.909.683.335,85</b>
a. Bangunan Gedung	6.996.703.967.932,14	456,00	80.119.337,00	6.996.784.087.725,14
b. Monumen	34.610.860.212,74	-	-	34.610.860.212,74
c. Bangunan Menara	13.702.150.537,94	-	-	13.702.150.537,94
d. Tugu Titik Kontrol / Pasti	247.812.584.848,03	12,00	-	247.812.584.860,03
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>13.486.016.681.873,70</b>	<b>58,00</b>	<b>-</b>	<b>13.486.016.681.931,70</b>
a. Jalan dan Jembatan	8.684.722.692.589,13	-	-	8.684.722.692.589,13

URAIAN	BAIK	BELUM MEMILIKI NILAI	DIKUASAI PIHAK LAIN	TOTAL ASET TETAP
b. Bangunan Air	4.663.452.739.785,72	29,00	-	4.663.452.739.814,72
c. Instalasi	113.363.169.875,11	21,00	-	113.363.169.896,11
d. Jaringan	24.478.079.623,76	8,00	-	24.478.079.631,76
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>911.380.312.030,97</b>	<b>43.331,00</b>	<b>-</b>	<b>911.380.355.361,97</b>
a. Bahan Perpustakaan	862.983.466.150,35	43.320,00	-	862.983.509.470,35
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	29.912.468.045,31	11,00	-	29.912.468.056,31
c. Hewan	7.933.238.500,00	-	-	7.933.238.500,00
d. Biota Perairan	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
e. Tanaman	1.296.328.736,00	-	-	1.296.328.736,00
f. Barang Koleksi Non Budaya	48.221.600,00	-	-	48.221.600,00
g. Aset Tetap dalam Renovasi	9.203.988.999,31	-	-	9.203.988.999,31
h. Belanja Modal BLUD	-	-	-	-
i. Belanja Modal BOS	-	-	-	-
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>2.346.294.324.390,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.346.294.324.390,22</b>
a. Kontruksi dalam Pengerjaan	2.346.294.324.390,22	-	-	2.346.294.324.390,22
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>32.094.151.132.458,40</b>	<b>51.774,00</b>	<b>7.716.843.943,00</b>	<b>32.101.868.028.175,40</b>



## EXTRACOMTABLE ASET TETAP

No	Nama	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
1	SEKRETARIAT DAERAH ACEH	2.006.172.394,56	46.370.273	53.936.423	1.998.606.244,56
2	SEKRETARIAT DPRA	1.581.984.777,00	22.163.500	60.331.000	1.543.817.277,00
3	INSPEKTORAT ACEH	57.003.200,00	-	-	57.003.200,00
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH	128.699.127,00	-	-	128.699.127,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH	1.921.368.220,00	151.900.000	20.000.000	2.053.268.220,00
6	BADAN KEPEGAWAIAN ACEH	261.556.303,00	-	-	261.556.303,00
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH	1.065.762.122,00	31.420.000	51.210.000	1.045.972.122,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH	609.269.000,00	-	-	609.269.000,00
9	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH	160.025.540,00	42.014.200	40.414.200	161.625.540,00
10	DINAS PENDIDIKAN ACEH	88.084.322.843,02	6.200.897.144	12.467.817.137	81.817.402.849,91
11	DINAS KESEHATAN ACEH	734.509.368,00	261.189.150	825.000	994.873.518,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	1.925.821.359,00	-	462.468.450	1.463.352.909,00
13	DINAS PENGAIRAN ACEH	50.843.332.864,00	3.149.157.092	81.204.280	53.911.285.676,00
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH	9.522.015.666,00	-	5.304.970	9.516.710.696,00
15	DINAS SOSIAL ACEH	1.777.106.473,00	18.670.000	-	1.795.776.473,00
16	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH	5.299.367.905,00	3.072.300	-	5.302.440.205,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH	98.415.400,00	200.000	200.000	98.415.400,00
18	DINAS PANGAN ACEH	1.390.218.150,00	2.174.700	-	1.392.392.850,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH	4.804.341.279,90	76.787.000	58.915.520	4.822.212.759,90
20	DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH	141.707.080,00	-	-	141.707.080,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMpong ACEH	171.544.000,00	84.900.000	84.900.000	171.544.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN ACEH	1.745.852.453,21	498.354.093	275.109.000	1.969.097.546,21
23	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH	817.449.991,00	99.934.750	98.570.750	818.813.991,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH	212.552.250,00	-	-	212.552.250,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	149.384.300,00	700.000	12.700.000	137.384.300,00
26	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH	1.328.725.300,00	50.372.000	49.400.000	1.329.697.300,00
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH	710.466.594,00	2.282.004	9.325.000	703.423.598,00
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH	1.134.339.024,00	6.000.000	6.000.000	1.134.339.024,00
29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	2.582.707.949,00	-	49.600.000	2.533.107.949,00
30	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	5.442.028.939,00	68.857.020	314.082.500	5.196.803.459,00
31	DINAS PETERNAKAN ACEH	2.088.281.742,91	86.532.900	81.280.000	2.093.534.642,91
32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH	2.535.294.322,00	14.000.000	14.000.000	2.535.294.322,00
33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH	664.550.877,00	30.961.000	103.241.000	592.270.877,00
34	KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	101.179.500,00	5.850.000	-	107.029.500,00
35	DINAS SYARIAH ISLAM ACEH	101.667.000,00	-	-	101.667.000,00

No	Nama	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
36	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH	1.217.253.186,80	15.620.000	-	1.232.873.186,80
37	DINAS PERTANAHAN ACEH	15.769.906,00	-	-	15.769.906,00
38	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH	124.071.000,00	-	-	124.071.000,00
39	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	110.658.000,00	2.790.000	2.790.000	110.658.000,00
40	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	78.877.000,00	-	-	78.877.000,00
41	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH	115.990.291,77	18.501.528	18.501.528	115.990.291,77
42	SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH	182.245.600,00	-	585.000	181.660.600,00
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH	192.653.559,00	-	-	192.653.559,00
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN	1.658.261.106,70	199.794.180	20.634.469	1.837.420.817,70
45	RUMAH SAKIT JIWA	478.366.250,00	11.479.000	-	489.845.250,00
46	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	669.385.517,00	1.125.000	-	670.510.517,00
47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH	146.775.200,00	32.279.600	4.400.000	174.654.800,00
48	PENGELOLA BARANG	261.503.760,00	-	-	261.503.760,00
	<b>Jumlah</b>	<b>197.450.833.690,87</b>	<b>11.236.348.433,97</b>	<b>14.447.746.227,08</b>	<b>194.239.435.897,76</b>

## Daftar Aset Tak Berwujud

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
<b>LISENSI DAN FRENCHISE</b>								
<b>1</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM dr ZAINOEL ABIDIN</b>			<b>24.750.000,00</b>	-	-	<b>24.750.000,00</b>	
1	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00	
2	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00	
3	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00	
4	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00	
5	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00	
<b>2</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH</b>			<b>104.450.000,00</b>	-	-	<b>104.450.000,00</b>	
1	Exchange CAL Hibah UNDP	2006		25.000.000,00			25.000.000,00	
2	Exchange CAL Hibah UNDP	2006		25.000.000,00			25.000.000,00	
3	Turbo Colding Lisensi For DMD	2009		27.225.000,00			27.225.000,00	
4	Turbo Colding Lisensi For DMD	2009		27.225.000,00			27.225.000,00	
<b>3</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b>			-	<b>4.000.000,00</b>	-	<b>4.000.000,00</b>	-
1	Lisensi Aplikasi	2018	4	-	4.000.000,00		4.000.000,00	
<b>4</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH</b>			-	<b>30.870.219.366,00</b>	-	<b>30.870.219.366,00</b>	<b>7.717.554.841,50</b>
1	Lisensi dan Franchise	2021	4		30.870.219.366,00		30.870.219.366,00	7.717.554.841,50
	<b>Jumlah</b>			<b>129.200.000,00</b>	<b>30.874.219.366,00</b>	-	<b>31.003.419.366,00</b>	<b>7.717.554.841,50</b>
<b>SOFTWARE</b>								
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN ACEH</b>			<b>1.265.775.610,00</b>	<b>199.910.150,00</b>	-	<b>1.465.685.760,00</b>	<b>1.312.346.997,50</b>
1	Software modernisasi sistem Kearsipan (akan dihibahkan)	2007	4	105.800.000,00			105.800.000,00	105.800.000,00
2	Software/Program	2008	4	78.500.000,00			78.500.000,00	78.500.000,00
3	Software Aplikasi Keuangan	2012	4	91.179.000,00			91.179.000,00	91.179.000,00
4	OSS e-Learning untuk SMP Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	44.100.000,00			44.100.000,00	44.100.000,00
5	Digital library SMP Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	75.555.000,00			75.555.000,00	75.555.000,00
6	OSS E-Learning SMA Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	66.200.000,00			66.200.000,00	66.200.000,00
7	Pembuatan Aplikasi Database	2012	4	39.457.000,00			39.457.000,00	39.457.000,00
8	Website Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe	2013	4	99.935.000,00			99.935.000,00	99.935.000,00
9	Software/program pengelolaan web.	2013	4	22.500.000,00			22.500.000,00	22.500.000,00
10	Software	2013	4	97.790.000,00			97.790.000,00	97.790.000,00
11	Pembuatan Aplikasi Monev Disdik Aceh	2014	4	99.440.000,00			99.440.000,00	99.440.000,00
12	System Aplikasi Pendataan	2014	4	36.850.000,00			36.850.000,00	36.850.000,00
13	Software	2018	4	193.400.000,00			193.400.000,00	193.400.000,00
14	Pembuatan Aplikasi ( Perangkat Radio Streaming )	2019	4	13.624.600,00			13.624.600,00	10.218.450,00
15	Software.....	2008	4	295.009,00			295.009,00	295.009,00
16	Software.....	2009	4	7.650.000,00			7.650.000,00	7.650.000,00
17	Software.....	2012	4	42.240.000,00			42.240.000,00	42.240.000,00
18	Software.....	2013	4	1.500.001,00			1.500.001,00	1.500.001,00
19	Software.....	2015	4	30.800.000,00			30.800.000,00	30.800.000,00
20	Software IDlearn / Software IDlearn (Indonesia Learning )SMA	2016	4	118.960.000,00			118.960.000,00	118.960.000,00
21	Aplikasi Receiver Radio Streaming berbasis Web Dinas dan Smartphone	2021	4		24.970.000,00		24.970.000,00	6.242.500,00
22	Aplikasi Receiver Video Streaming berbasis Web Dinas dan Smartphone	2021	4		24.970.000,00		24.970.000,00	6.242.500,00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
23	Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis Digital UPTD Tekkomdik	2021	4		49.990.050,00		49.990.050,00	12.497.512,50
24	Aplikasi Manajemen Labkom Tekkomdik	2021	4		49.990.050,00		49.990.050,00	12.497.512,50
25	Aplikasi E-Talenta UPTD Tekkomdik	2021	4		49.990.050,00		49.990.050,00	12.497.512,50
<b>2</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH</b>			<b>243.349.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243.349.000,00</b>	<b>216.159.750,00</b>
1	Alat Computing Lain-lain	2008	4	99.200.000,00			99.200.000,00	99.200.000,00
2	Software	2017	4	35.392.000,00			35.392.000,00	35.392.000,00
3	Aplikasi Lesson Organizer Bahasa untuk Dayah Perbatasan Minhajussalam	2019	4	23.626.166,67			23.626.166,67	17.719.625,00
4	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Safinatussalam	2019	4	23.626.166,67			23.626.166,67	17.719.625,00
5	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Darul Amin	2019	4	23.626.166,67			23.626.166,67	17.719.625,00
6	Aplikasi Lesson Organizer Bahasa untuk Dayah Perbatasan Minhajussalam	2019	4	12.626.166,67			12.626.166,67	9.469.625,00
7	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Safinatussalam	2019	4	12.626.166,67			12.626.166,67	9.469.625,00
8	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Darul Amin	2019	4	12.626.166,67			12.626.166,67	9.469.625,00
<b>3</b>	<b>SEKRETARIS MAJELIS PENDIDIKAN ACEH</b>			<b>48.480.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.480.000,00</b>	<b>48.480.000,00</b>
1	Software	2016	4	48.480.000,00			48.480.000,00	48.480.000,00
<b>4</b>	<b>DINAS KESEHATAN ACEH</b>			<b>632.498.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>632.498.000,00</b>	<b>607.803.000,00</b>
1	Operating System (CD+Box)	2010	4	12.000.000			12.000.000,00	12.000.000,00
2	Aplikasi Program (CD+Box)	2010	4	8.810.000			8.810.000,00	8.810.000,00
3	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000			955.000,00	955.000,00
4	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000			955.000,00	955.000,00
5	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000			955.000,00	955.000,00
6	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000			955.000,00	955.000,00
7	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000			955.000,00	955.000,00
8	CD Anti Virus Kaperski	2013	4	1.250.000			1.250.000,00	1.250.000,00
9	CD Anti Virus Kaperski	2013	4	1.250.000			1.250.000,00	1.250.000,00
10	CD Anti Virus Server 2008	2013	4	7.500.000			7.500.000,00	7.500.000,00
11	SOFTWARE SISITEM AKADEMIK DAN ABSENSI PEGAWAI PADA AKPER	2015	4	29.953.000,00			29.953.000,00	29.953.000,00
12	SOFTWARE PROGRAM/PROGRAM UNTUK PERALATAN PENUNJANG DATIN DINKES	2015	4	112.000.000,00			112.000.000,00	112.000.000,00
13	SOFTWARE APLIKASI ANDROID UPTD P2KK PSC 119	2017	4	69.520.000,00			69.520.000,00	69.520.000,00
14	APLIKASI PENDAFTARAN PELATIHAN ONLINE UPTD BAPELKES	2017	4	31.680.000,00			31.680.000,00	31.680.000,00
15	Software RS Kab/Kota	2018	4	199.980.000,00			199.980.000,00	199.980.000,00
16	Software Absensi 2018	2018	4	55.000.000,00			55.000.000,00	55.000.000,00
17	PENGEMBANGAN SIM RS PROVINSI & KAB/KOTA	2019	4	98.780.000,00			98.780.000,00	74.085.000,00
<b>5</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM dr ZAINOEL ABIDIN</b>			<b>3.943.403.379,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.943.403.379,00</b>	<b>3.760.818.340,50</b>
1	SOFTWARE CATATAN MEDIK	2006	4	193.098.225,00			193.098.225,00	193.098.225,00
2	SOFTWARE PROGRAM	2013	4	37.190.000,00			37.190.000,00	37.190.000,00
3	Software perencanaan	2014	4	55.000.000,00			55.000.000,00	55.000.000,00
4	Software / Program Microsoft visual Studio (4 Unit) IT (BLUD UTG)	2015	4	43.505.000,00			43.505.000,00	43.505.000,00
5	Software / Program Microsoft SQL Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	9.570.000,00			9.570.000,00	9.570.000,00
6	Software / Program Microsoft Windows Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	17.380.000,00			17.380.000,00	17.380.000,00
7	Software / Program Microsoft Windows Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	17.160.000,00			17.160.000,00	17.160.000,00
8	Software	2016	4	17.160.000,00			17.160.000,00	17.160.000,00
9	Software	2018	4	2.823.000.000,00			2.823.000.000,00	2.823.000.000,00
10	Software.....(Aplikasi Sistem Informasi Radiologi (Ris) Unlimited User)	2019	4	730.340.154,00			730.340.154,00	547.755.115,50
<b>6</b>	<b>RUMAH SAKIT JIWA</b>			<b>1.422.259.725,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.422.259.725,00</b>	<b>1.422.259.725,00</b>

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
1	PC Program MIMPI/Psikotes (APBN)...Pindahan dari KIB B Baik, Dst... (1.3.2.07.01.01.169) ke KIB ATB Thn.2019	2006	4	164.340.000,00			164.340.000,00	164.340.000,00
2	TDF Aplikasi Websete RSJ	2008	4	54.500.000,00			54.500.000,00	54.500.000,00
3	Software/Aplikasi Stock Obat	2009	4	14.900.000,00			14.900.000,00	14.900.000,00
4	TDF Sofwere MMPI (APBA)	2011	4	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
5	TDF Pendampingan Sofwer (BLUD) Program	2012	4	24.750.000,00			24.750.000,00	24.750.000,00
6	TDF Sofwere/Program (APBA)	2012	4	92.000.000,00			92.000.000,00	92.000.000,00
7	TDF Sofwere (APBA) Int.Catatan Medik	2013	4	180.000.000,00			180.000.000,00	180.000.000,00
8	Software Aplikasi Persediaan Gudang	2015	4	16.500.000,00			16.500.000,00	16.500.000,00
9	Software Sistem Informasi Rumah Sakit (BLUD)	2017	4	512.349.725,00			512.349.725,00	512.349.725,00
10	Software MMPI	2017	4	167.420.000,00			167.420.000,00	167.420.000,00
11	Pengadaan Aplikasi SIPKD BLUD	2018	4	194.500.000,00			194.500.000,00	194.500.000,00
<b>7</b>	<b>RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK</b>			<b>308.204.245,00</b>	-	-	<b>308.204.245,00</b>	<b>308.204.245,00</b>
1	software/program sim rs	2012	4	98.440.000,00			98.440.000,00	98.440.000,00
2	SOFTWARE REMUNERASI (BLUD)	2015	4	39.875.000,00			39.875.000,00	39.875.000,00
3	Software Program BLUD	2016	4	14.760.000,00			14.760.000,00	14.760.000,00
4	Software SIM BLUD	2017	4	149.517.000,00			149.517.000,00	149.517.000,00
5	Aplikasi SISMAADAK Versi Enterprise	2018	4	5.612.245,00			5.612.245,00	5.612.245,00
<b>8</b>	<b>PENGAIRAN</b>			<b>106.607.600,00</b>	-	-	<b>106.607.600,00</b>	<b>81.830.100,00</b>
1	Pembuatan Sistem Integrasi Data Monitoring Telemetry (Early Warning sistem Banjir)	2019	4	99.110.000,00			99.110.000,00	74.332.500,00
2	Software	2007	4	7.497.600,00			7.497.600,00	7.497.600,00
<b>9</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH</b>			<b>76.500.000,00</b>	-	-	<b>76.500.000,00</b>	<b>76.500.000,00</b>
1	Website SATPOL PP	2013	4	49.500.000,00			49.500.000,00	49.500.000,00
2	OS / Linux	2013	4	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
3	Software Barcode Register Barang	2017	4	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00
<b>10</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH</b>			<b>5.575.185,00</b>	-	-	<b>5.575.185,00</b>	<b>5.575.185,00</b>
1	Software Microsoft Office	2018	4	5.575.185,00			5.575.185,00	5.575.185,00
<b>11</b>	<b>DINAS SOSIAL ACEH</b>			<b>211.980.000,00</b>	-	-	<b>211.980.000,00</b>	<b>211.980.000,00</b>
1	Soft Ware Window Server 2003 - BRA Pusat	2008	4	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00
2	Program Website - Perencanaan & Pelaporan	2009	4	48.880.000,00			48.880.000,00	48.880.000,00
3	Software	2016	4	59.200.000,00			59.200.000,00	59.200.000,00
4	System Penerima Manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2018	4	49.700.000,00			49.700.000,00	49.700.000,00
5	Software	2017	4	49.700.000,00			49.700.000,00	49.700.000,00
<b>12</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK</b>			<b>25.850.000,00</b>	-	-	<b>25.850.000,00</b>	<b>25.850.000,00</b>
1	Program Aplikasi Perhitungan Upah Lembur	2012	4	9.850.000,00			9.850.000,00	9.850.000,00
2	Software Aplikasi	2013	4	16.000.000,00			16.000.000,00	16.000.000,00
<b>13</b>	<b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>			<b>47.480.000,00</b>	-	-	<b>47.480.000,00</b>	<b>47.480.000,00</b>
1	Software Sistem Aplikasi Data SIGA	2014	4	47.480.000,00			47.480.000,00	47.480.000,00
<b>14</b>	<b>DINAS PANGAN</b>			<b>101.500.000,00</b>	-	-	<b>101.500.000,00</b>	<b>101.500.000,00</b>
1	Software dan training	2014	4	13.000.000,00			13.000.000,00	13.000.000,00
2	Software	2018	4	88.500.000,00			88.500.000,00	88.500.000,00
<b>15</b>	<b>DINAS PERTANAHAN</b>			<b>61.325.000,00</b>	-	-	<b>61.325.000,00</b>	<b>45.993.750,00</b>
1	Software	2019	4	61.325.000,00			61.325.000,00	45.993.750,00
<b>16</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH</b>			<b>8.830.001,00</b>	-	-	<b>8.830.001,00</b>	<b>8.830.001,00</b>
1	Software	2010	4	8.830.001,00			8.830.001,00	8.830.001,00
<b>17</b>	<b>DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH</b>			<b>647.866.000,00</b>	-	-	<b>647.866.000,00</b>	<b>628.341.000,00</b>
1	Aplikasi Dokumen Surat	2012	4	30.066.000,00			30.066.000,00	30.066.000,00
2	Antivirus server	2012	4	11.330.000,00			11.330.000,00	11.330.000,00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
3	Antivirus server	2012	4	11.330.000,00			11.330.000,00	11.330.000,00
4	Anti Virus	2013	4	8.800.000,00			8.800.000,00	8.800.000,00
5	Aplikasi Database	2013	4	199.600.000,00			199.600.000,00	199.600.000,00
7	Software	2016	4	129.690.000,00			129.690.000,00	129.690.000,00
8	- Windows Server 2012 Standar R2 (bagian dari Server) - Microsoft Windows 10 Profesional (PC) - Anti Virus Kaspersky Small Office Security (PC & Server)	2017	4	62.765.600,00			62.765.600,00	62.765.600,00
9	Aplikasi Data Agregat (Aplikasi Sinergitas Data dan Informasi/SIDASI)	2018	4	49.500.000,00			49.500.000,00	49.500.000,00
10	Aplikasi E-Profil Kependudukan	2018	4	49.500.000,00			49.500.000,00	49.500.000,00
12	MICROSOFT Windows Server 2016 CAL-Gov Merk MICROSOFT	2018	4	16.733.900,00			16.733.900,00	16.733.900,00
13	Antivirus Client merk SYMANTEC	2018	4	450.500,00			450.500,00	450.500,00
14	Software	2019	4	78.100.000,00			78.100.000,00	58.575.000,00
<b>18</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH</b>			<b>59.705.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.705.000,00</b>	<b>59.705.000,00</b>
1	Software	2012	4	34.705.000,00			34.705.000,00	34.705.000,00
2	Software	2013	4	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00
<b>19</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN ACEH</b>			<b>4.727.472.900,00</b>	<b>147.330.100,00</b>	<b>-</b>	<b>4.874.803.000,00</b>	<b>4.662.415.700,00</b>
1	Pengembangan Aplikasi SIMDA	2011	4	97.000.000,00			97.000.000,00	97.000.000,00
2	Pembangunan Aplikasi Tiketing SIM Sarana Publik Perhubungan Komintel Aceh Berbasis GIS	2011	4	196.500.000,00			196.500.000,00	196.500.000,00
3	Pembangunan Aplikasi Tiketing Pengaduan Jaringan	2011	4	97.000.000,00			97.000.000,00	97.000.000,00
4	Pembangunan Website Bank Data Dishubkomintel	2011	4	49.841.000,00			49.841.000,00	49.841.000,00
5	Pengembangan Sistem Email berbasis LDAP	2011	4	96.000.000,00			96.000.000,00	96.000.000,00
6	Aplikasi Pengarsipan secara Digital	2011	4	193.900.000,00			193.900.000,00	193.900.000,00
7	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi	2011	4	193.000.000,00			193.000.000,00	193.000.000,00
8	Aplikasi Kepemerintahan	2012	4	297.000.000,00			297.000.000,00	297.000.000,00
9	Aplikasi Perizinan Terpadu (BP2T) Berbasis WEB dan SMS	2012	4	296.000.000,00			296.000.000,00	296.000.000,00
10	Aplikasi SIM Sarana Publik Hubkomintel Aceh Berbasis GIS	2012	4	147.000.000,00			147.000.000,00	147.000.000,00
11	Aplikasi Integrasi Autentifikasi Akses Internet	2012	4	98.000.000,00			98.000.000,00	98.000.000,00
12	Software / program	2007	4	58.410.000,00			58.410.000,00	58.410.000,00
13	Aplikasi Wabase Peternakan	2007	4	84.535.000,00			84.535.000,00	84.535.000,00
14	Aplikasi P2TSP Versi WEB	2007	4	84.725.000,00			84.725.000,00	84.725.000,00
15	Aplikasi P2TSP Versi LAN	2007	4	84.975.000,00			84.975.000,00	84.975.000,00
16	Aplikasi Database Transmigrasi	2007	4	84.000.000,00			84.000.000,00	84.000.000,00
17	Aplikasi Database Pendapatan Daerah	2007	4	84.122.000,00			84.122.000,00	84.122.000,00
18	Aplikasi Database Sosial	2007	4	84.700.000,00			84.700.000,00	84.700.000,00
19	Aplikasi Webbase Kependudukan	2007	4	84.700.000,00			84.700.000,00	84.700.000,00
20	Aplikasi Database Kehutanan	2007	4	84.150.000,00			84.150.000,00	84.150.000,00
21	Aplikasi Database Perkebunan	2007	4	84.150.000,00			84.150.000,00	84.150.000,00
22	Aplikasi Database Tenaga Kerja	2007	4	84.000.000,00			84.000.000,00	84.000.000,00
23	Aplikasi Persuratan	2008	4	48.488.000,00			48.488.000,00	48.488.000,00
24	Aplikasi Absensi	2013	4	7.260.000,00			7.260.000,00	7.260.000,00
25	Webcore (Aceh CMS)	2015	4	195.068.000,00			195.068.000,00	195.068.000,00
26	Pengembangan Aplikasi E-Perijinan Aceh	2015	4	187.330.000,00			187.330.000,00	187.330.000,00
27	Software	2016	4	17.500.000,00			17.500.000,00	17.500.000,00
28	Software	2016	4	1.192.560.000,00			1.192.560.000,00	1.192.560.000,00
29	Software	2017	4	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
30	Aplikasi Call Center	2019	4	19.800.000,00			19.800.000,00	14.850.000,00
31	Pek. Pengadaan Aplikasi Perkantoran	2019	4	39.847.000,00			39.847.000,00	29.885.250,00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
32	Pek. Peningkatan Web Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	24.970.000,00			24.970.000,00	18.727.500,00
33	Aplikasi Brodcasting, Pek. Display Sistem Informasi Intra Dinas (Pendukung Germas)	2019	4	47.898.900,00			47.898.900,00	35.924.175,00
34	Pek. Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Intra Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	129.379.000,00			129.379.000,00	97.034.250,00
35	Pek. Rancang Bangun Sistem Informasi Program dan Pelaporan kegiatan Intra Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	145.664.000,00			145.664.000,00	109.248.000,00
36	Aplikasi Multimedia dan Office	2021	4		13.261.000,00		13.261.000,00	3.315.250,00
37	Aplikasi Multimedia	2021	4		63.525.000,00		63.525.000,00	15.881.250,00
38	Software	2021	4		70.544.100,00		70.544.100,00	17.636.025,00
<b>20</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH</b>			<b>2.772.174.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.772.174.700,00</b>	<b>2.772.174.700,00</b>
1	Perangkat Lunak	2002	4	128.220.000,00			128.220.000,00	128.220.000,00
2	Aplikasi Data Base (SIPUP),SIMKAP On Line,Macromedia,Anti Virus untu	2005	4	166.030.000,00			166.030.000,00	166.030.000,00
3	Aplikasi Simpeg, Website/Hosting Dinas Infokom,Windows XP Profesional	2006	4	621.126.000,00			621.126.000,00	621.126.000,00
4	Blue Print 5 Tahunan BPDE	2007	4	49.445.000,00			49.445.000,00	49.445.000,00
5	Data Base RAPI Dan ORARI dan Setup dan Instalasi	2008	4	212.813.700,00			212.813.700,00	212.813.700,00
7	CD Aplikasi Untuk Penyusunan Program dan Aplikasi Network/Manajemen System	2010	4	82.925.000,00			82.925.000,00	82.925.000,00
8	Server Aplikasi Underweb	2011	4	29.480.000,00			29.480.000,00	29.480.000,00
9	Aplikasi Pengelolaan Dokumen Digital,Standar Web Engine,Aplikasi Menev dan Digital Library	2013	4	580.835.000,00			580.835.000,00	580.835.000,00
10	Traffic Analyzer dan Aplikasi Konfigurasi Sistem Log Managemen - Bid PSITT	2014	4	238.150.000,00			238.150.000,00	238.150.000,00
11	Software Audit Acunetix - Bid. PSITT	2014	4	173.800.000,00			173.800.000,00	173.800.000,00
12	Aplikasi Server Management Virtual dan Hypervisor - Bid. PSITT	2014	4	148.500.000,00			148.500.000,00	148.500.000,00
13	Web Core Engine - Bid. PSITT	2014	4	188.000.000,00			188.000.000,00	188.000.000,00
14	Pengembangan Aplikasi PPID - Bid. PSITT	2014	4	96.000.000,00			96.000.000,00	96.000.000,00
15	Software/Program - Bidang PSITT	2014	4	9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
16	Software	2017	4	47.850.000,00			47.850.000,00	47.850.000,00
<b>21</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH</b>			<b>38.280.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.280.000,00</b>	<b>38.280.000,00</b>
1	Aplikasi database monitoring evaluasi KUMKN	2014	4	38.280.000,00			38.280.000,00	38.280.000,00
<b>22</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b>			<b>434.415.625,00</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>430.415.625,00</b>	<b>430.415.625,00</b>
1	Software	2007	4	49.475.000,00			49.475.000,00	49.475.000,00
2	Shofware Multimedia Elektronik Investasi Aceh	2011	4	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00
3	Software Aplikasi Database Pusdatin Aceh	2013	4	199.940.625,00			199.940.625,00	199.940.625,00
4	Peralatan Jaringan Komputer (Software SMS)	2013	4	44.890.000,00			44.890.000,00	44.890.000,00
5	Software Website	2017	4	21.800.000,00			21.800.000,00	21.800.000,00
6	(Software) Pengembangan Database Informasi Penanaman modal dan Perizinan yang terintegrasi	2018	4	50.000.000,00			50.000.000,00	50.000.000,00
7	Lisensi Aplikasi	2018	4	4.000.000,00		4.000.000,00	-	-
8	Aplikasi SKM	2018	4	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00
9	Aplikasi pelayan data	2016	4	39.810.000,00			39.810.000,00	39.810.000,00
<b>23</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>			<b>283.925.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>283.925.000,00</b>	<b>283.925.000,00</b>
1	Web Hosting dan Pembuatan Website Dispora	2008	4	49.900.000,00			49.900.000,00	49.900.000,00
2	Software Lisensi Mcrotic	2008	4	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00
3	Software	2018	4	131.200.000,00			131.200.000,00	131.200.000,00
4	Software	2018	4	92.825.000,00			92.825.000,00	92.825.000,00
<b>24</b>	<b>SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH</b>			<b>44.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>44.500.000,00</b>
1	Software	2014	4	44.500.000,00			44.500.000,00	44.500.000,00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
<b>25</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			<b>4.980.000,00</b>	<b>447.640.988,00</b>	-	<b>452.620.988,00</b>	<b>452.620.988,00</b>
1	Pengadaan Software	2008	4	4.980.000,00			4.980.000,00	4.980.000,00
2	Software Komputer	2010	4		5.413.716,00		5.413.716,00	5.413.716,00
3	Software Komputer	2010	4		5.413.716,00		5.413.716,00	5.413.716,00
4	Software Komputer	2010	4		436.813.556,00		436.813.556,00	436.813.556,00
<b>26</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH</b>			<b>388.844.000,00</b>	<b>889.963.900,00</b>	<b>840.063.500,00</b>	<b>438.744.400,00</b>	<b>401.319.100,00</b>
1	Website Badan Perpustakaan	2008	4	49.725.000,00			49.725.000,00	49.725.000,00
2	jaringan internet	2013	4	9.100.000,00			9.100.000,00	9.100.000,00
3	Software middleware integrasi inliste dengan RFID	2015	4	118.800.000,00			118.800.000,00	118.800.000,00
4	Aplikasi + training	2015	4	7.084.000,00			7.084.000,00	7.084.000,00
5	Instalasi jaringan internet	2015	4	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00
6	Software	2015	4	49.500.000,00			49.500.000,00	49.500.000,00
7	Aplikasi dan Jaringan Absensi	2018	4	69.025.000,00			69.025.000,00	69.025.000,00
8	Instalasi Aplikasi dan Dashboard ipustaka	2018	4	60.610.000,00			60.610.000,00	60.610.000,00
9	Aplikasi Pengelolaan Arsip (E-Arsip)	2021	4		49.900.400,00		49.900.400,00	12.475.100,00
<b>27</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH</b>			<b>285.295.000,00</b>	-	<b>108.790.000,00</b>	<b>176.505.000,00</b>	<b>132.367.500,00</b>
1	Software	2016	4	49.950.000,00			49.950.000,00	49.950.000,00
2	Software	2019	4	76.560.000,00			76.560.000,00	57.420.000,00
3	Software	2020	4	108.790.000,00		108.790.000,00	-	-
4	Software	2020	4	49.995.000,00			49.995.000,00	24.997.500,00
<b>28</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH</b>			<b>634.731.000,00</b>	-	-	<b>634.731.000,00</b>	<b>634.731.000,00</b>
1	Software Komputer (1 Unit)	2005	4	2.376.000,00			2.376.000,00	2.376.000,00
2	Master Booth Bahan Multiplek dilapisi Melamin SPP SPMA Saree	2011	4	3.795.000,00			3.795.000,00	3.795.000,00
3	Both Channer Program SPP SPMA RAEE	2011	4	315.000,00			315.000,00	315.000,00
4	Both Channer Program SPP SPMA RAEE	2011	4	315.000,00			315.000,00	315.000,00
5	Both Channer Program SPP SPMA RAEE	2011	4	315.000,00			315.000,00	315.000,00
6	Both Channer Program SPP SPMA RAEE	2011	4	315.000,00			315.000,00	315.000,00
7	Win 7 Starter Orriginal (microcosolf)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00			575.000,00	575.000,00
8	Win 7 Starter Orriginal (microcosolf)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00			575.000,00	575.000,00
9	Win 7 Starter Orriginal (microcosolf)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00			575.000,00	575.000,00
10	Win 7 Starter Orriginal (microcosolf)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00			575.000,00	575.000,00
11	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamim SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
12	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamim SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
13	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamim SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
14	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamim SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
15	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00			750.000,00	750.000,00
16	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00			750.000,00	750.000,00
17	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00			750.000,00	750.000,00
18	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	650.000,00
19	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	650.000,00
20	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	650.000,00
21	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	650.000,00
22	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00			650.000,00	650.000,00



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
23	Software	2016	4	49.500.000,00			49.500.000,00	49.500.000,00
24	Software	2006	4	564.000.000,00			564.000.000,00	564.000.000,00
<b>29</b>	<b>DINAS PETERNAKAN ACEH</b>			<b>84.250.000,00</b>	-	-	<b>84.250.000,00</b>	<b>84.250.000,00</b>
1	Software Pemetaan Penyakit dan Produksi ternak	2012	4	49.500.000,00			49.500.000,00	49.500.000,00
2	Software Aplikasi Sistem Pengelolaan Telur	2018	4	34.750.000,00			34.750.000,00	34.750.000,00
<b>30</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH</b>			<b>183.015.000,00</b>	-	-	<b>183.015.000,00</b>	<b>183.015.000,00</b>
1	Software	2016	4	88.000.000,00			88.000.000,00	88.000.000,00
2	Aplikasi Website Dinas (Aset Tak Berwujud)	2018	4	48.090.000,00			48.090.000,00	48.090.000,00
3	Software	2013	4	46.175.000,00			46.175.000,00	46.175.000,00
4	Software	2008	4	750.000,00			750.000,00	750.000,00
<b>31</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			<b>55.449.000,00</b>	<b>18.477.700,00</b>	-	<b>73.926.700,00</b>	<b>67.913.600,00</b>
1	Software Batik Fraktal Jbatik, Hibah Kominfo	2013	4	5.929.000,00			5.929.000,00	5.929.000,00
2	Software	2015	4	49.520.000,00			49.520.000,00	49.520.000,00
3	Software	2019	4	-	6.451.500,00		6.451.500,00	4.838.625,00
4	Software	2019	4	-	6.451.500,00		6.451.500,00	4.838.625,00
5	Software	2020	4	-	5.574.700,00		5.574.700,00	2.787.350,00
<b>32</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH ACEH</b>			<b>860.258.700,00</b>	-	-	<b>860.258.700,00</b>	<b>835.343.700,00</b>
1	Software Program	2008	4	130.883.500,00			130.883.500,00	130.883.500,00
2	Software Aplikasi SIMAPA	2008	4	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00
3	Software Program Aplikasi Dana Kerja	2010	4	197.100.000,00			197.100.000,00	197.100.000,00
4	Design dan Rancangan Database Program Aplikasi Dana Kerja	2010	4	49.400.000,00			49.400.000,00	49.400.000,00
5	Software Aplikasi Arsip Digital	2011	4	19.909.200,00			19.909.200,00	19.909.200,00
6	Website Biro Ekonomi	2013	4	39.358.000,00			39.358.000,00	39.358.000,00
7	Website BPKapet	2013	4	39.358.000,00			39.358.000,00	39.358.000,00
8	Software Anti Virus	2016	4	4.950.000,00			4.950.000,00	4.950.000,00
9	Aplikasi Insilite Perpustakaan	2018	4	34.650.000,00			34.650.000,00	34.650.000,00
10	Software (BRR)	2006	4	29.040.000,00			29.040.000,00	29.040.000,00
11	Software (biro ekonomi)	2019	4	99.660.000,00			99.660.000,00	74.745.000,00
12	Software	2013	4	15.950.000,00			15.950.000,00	15.950.000,00
<b>33</b>	<b>SEKRETARIAT DPRA</b>			<b>273.281.000,00</b>	-	-	<b>273.281.000,00</b>	<b>273.281.000,00</b>
1	Software/ Program Sistem Informasi Kepustakaan pada Sekretariat DPRA	2011	4	59.884.000,00			59.884.000,00	59.884.000,00
2	Penambahan Modul pada Sistem Informasi Kepustakaan	2013	4	19.800.000,00			19.800.000,00	19.800.000,00
3	Aplikasi Pengendalian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	2013	4	40.000.000,00			40.000.000,00	40.000.000,00
4	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi	2013	4	46.475.000,00			46.475.000,00	46.475.000,00
5	Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan Record Center	2013	4	59.772.000,00			59.772.000,00	59.772.000,00
6	Penambahan Modul pada Sistem Informasi Perpustakaan	2015	4	19.200.000,00			19.200.000,00	19.200.000,00
7	Software Database Kearsipan	2017	4	7.950.000,00			7.950.000,00	7.950.000,00
8	Anti virus	2014	4	20.200.000,00			20.200.000,00	20.200.000,00
<b>34</b>	<b>BAPEDDA</b>			<b>1.109.935.000,00</b>	-	-	<b>1.109.935.000,00</b>	<b>1.109.935.000,00</b>
1	E-Office	2016	4	48.500.000,00			48.500.000,00	48.500.000,00
2	Aplikasi Integrasi E-Planning dan E-Budgetting	2014	4	483.615.000,00			483.615.000,00	483.615.000,00
3	Aplikasi Integrasi E-Planning dan E-Budgetting	2015	4	541.695.000,00			541.695.000,00	541.695.000,00
4	Software	2019	4	36.125.000,00			36.125.000,00	27.093.750,00
<b>35</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH</b>			<b>5.651.857.000,00</b>	<b>280.390.000,00</b>	-	<b>5.932.247.000,00</b>	<b>5.581.751.250,00</b>
1	software	2007	4	248.625.000,00			248.625.000,00	248.625.000,00
2	Software Finger Print ( masing-masing software Rp. 72.600.000 instalasi 6 titik Rp. 37.950.000 dan training Rp. 6.050.000)	2012	4	90.000.000,00			90.000.000,00	90.000.000,00
3	aplikasi sistem informasi penatausahaan keuangan Daerah	2013	4	82.500.000,00			82.500.000,00	82.500.000,00
4	Aplikasi Penatausahaan Surat Bagian Umum	2013	4	27.500.000,00			27.500.000,00	27.500.000,00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
5	Anti Virus	2013	4	33.000.000,00			33.000.000,00	33.000.000,00
6	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00			27.500.000,00	27.500.000,00
7	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00			27.500.000,00	27.500.000,00
8	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00			27.500.000,00	27.500.000,00
9	Aplikasi Report (Busines Intelegence) (Kepala Dinas Report dan Gubernur Report)	2014	4	29.920.000,00			29.920.000,00	29.920.000,00
10	Aplikasi Dispenda Pusat (Aplikasi Import Data PKB1)	2015	4	1.320.000,00			1.320.000,00	1.320.000,00
11	Aplikasi Dispenda Pusat (Aplikasi Administrator)	2015	4	236.027.000,00			236.027.000,00	236.027.000,00
12	Software	2016	4	373.046.000,00			373.046.000,00	373.046.000,00
13	Software	2016	4	116.600.000,00			116.600.000,00	116.600.000,00
14	Software	2018	4	199.000.000,00			199.000.000,00	199.000.000,00
15	QR Code	2020	4	132.000.000,00			132.000.000,00	66.000.000,00
16	Aplikasi Database Aset Berbasis Android	2020	4	148.406.500,00			148.406.500,00	74.203.250,00
17	Software	2010	4	93.912.500,00			93.912.500,00	93.912.500,00
18	Software	2013	4	3.712.500.000,00			3.712.500.000,00	3.712.500.000,00
19	Software	2014	4	45.000.000,00			45.000.000,00	45.000.000,00
20	Web Server Engine	2021	4		98.450.000,00		98.450.000,00	24.612.500,00
21	Database MySQL	2021	4		181.940.000,00		181.940.000,00	45.485.000,00
<b>36</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN ACEH</b>			<b>406.301.113,00</b>	-	-	<b>406.301.113,00</b>	<b>406.301.113,00</b>
1	WEB KORPRI	2012	4	29.150.000,00			29.150.000,00	29.150.000,00
2	Software	2017	4	109.367.500,00			109.367.500,00	109.367.500,00
3	Software	2007	4	64.932.263,00			64.932.263,00	64.932.263,00
4	Software	2013	4	97.700.000,00			97.700.000,00	97.700.000,00
5	Software	2014	4	25.393.450,00			25.393.450,00	25.393.450,00
6	Software	2015	4	30.115.000,00			30.115.000,00	30.115.000,00
7	Software	2016	4	44.650.000,00			44.650.000,00	44.650.000,00
8	software Mythware	2017	4	4.992.900,00			4.992.900,00	4.992.900,00
<b>37</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH</b>			<b>103.580.000,00</b>	-	-	<b>103.580.000,00</b>	<b>103.580.000,00</b>
1	Pengembangan Aplikasi Diklat	2017	4	44.300.000,00			44.300.000,00	44.300.000,00
2	Software Upgrade/ Expanded RT-Win Vers 3.00 Expanded Koneksi Software 2 to 3 Users Handkey II, Pengadaan dengan Mesin Absensi	2013	4	15.500.000,00			15.500.000,00	15.500.000,00
3	Aplikasi Beasiswa Aparatur dan Non Aparatur	2018	4	43.780.000,00			43.780.000,00	43.780.000,00
<b>38</b>	<b>KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH</b>			<b>60.500.000,00</b>	-	-	<b>60.500.000,00</b>	<b>60.500.000,00</b>
1	Website Kantor	2012	4	60.500.000,00			60.500.000,00	60.500.000,00
<b>39</b>	<b>INSPEKTORAT ACEH</b>			<b>21.000.000,00</b>	-	-	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>
1	Software Database Server	2011	4	21.000.000,00			21.000.000,00	21.000.000,00
<b>40</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH</b>			<b>59.310.000,00</b>	-	<b>59.310.000,00</b>	-	-
1	Software	2007	4	20.760.000,00	-	20.760.000,00	-	-
2	Software Office Professional 2003	2008	4	23.700.000,00	-	23.700.000,00	-	-
3	Software	2012	4	14.850.000,00	-	14.850.000,00	-	-
<b>41</b>	<b>SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH</b>			<b>114.567.000,00</b>	<b>199.600.000,00</b>	-	<b>314.167.000,00</b>	<b>155.717.000,00</b>
1	Software	2017	4	49.900.000,00			49.900.000,00	49.900.000,00
2	Software	2018	4	29.667.000,00			29.667.000,00	29.667.000,00
3	Software	2019	4	35.000.000,00			35.000.000,00	26.250.000,00
4	Aplikasi Analisis Pelanggaran HAM KKR	2021	4		99.800.000,00		99.800.000,00	24.950.000,00
5	Aplikasi Telaah Reparasi dan Rekonstruksi KKR	2021	4		49.900.000,00		49.900.000,00	12.475.000,00
6	Aplikasi Manajemen Arsip dan Dokumentasi Kesekretariatan KKR	2021	4		49.900.000,00		49.900.000,00	12.475.000,00
<b>42</b>	<b>DINAS SYARIAT ISLAM</b>			<b>39.160.000,00</b>	-	-	<b>39.160.000,00</b>	<b>39.160.000,00</b>
1	Pengadaan Website Dinas	2011	4	39.160.000,00			39.160.000,00	39.160.000,00
<b>43</b>	<b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH</b>			<b>146.800.000,00</b>	-	-	<b>146.800.000,00</b>	<b>146.800.000,00</b>

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
1	Website MPU	2011	4	44.800.000,00			44.800.000,00	44.800.000,00
2	Software/System informasi Perpustakaan	2011	4	95.000.000,00			95.000.000,00	95.000.000,00
3	Aplikasi	2013	4	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00
<b>44</b>	<b>KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA</b>			<b>172.535.000,00</b>	-	-	<b>172.535.000,00</b>	<b>172.535.000,00</b>
1	Software	2015	4	7.500.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00
2	Anti Virus, Microsoft	2017	4	97.495.000,00			97.495.000,00	97.495.000,00
3	Program Office	2014	4	67.540.000,00			67.540.000,00	67.540.000,00
<b>45</b>	<b>SEKRETARIS BAITUL MAL</b>			<b>263.350.000,00</b>	-	-	<b>263.350.000,00</b>	<b>241.075.000,00</b>
1	Program Software SIMZA, Bidang Sosbang	2008	4	99.500.000,00			99.500.000,00	99.500.000,00
2	Software	2014	4	49.750.000,00			49.750.000,00	49.750.000,00
3	Software	2017	4	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00
4	Software	2019	4	89.100.000,00			89.100.000,00	66.825.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>28.436.955.783,00</b>	<b>2.183.312.838,00</b>	<b>1.012.163.500,00</b>	<b>29.608.105.121,00</b>	<b>28.295.533.120,00</b>

**KAJIAN**

<b>1</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN ACEH</b>			<b>268.400.000,00</b>	-	-	<b>268.400.000,00</b>	-
1	Revitalisasi Operasional CIO (Chief Information Officer) Dishubkomintel Aceh	2010		268.400.000,00			268.400.000,00	
<b>2</b>	<b>BADAN REINTEGRASI ACEH</b>			-	-	-	-	
1	Kajian	2017	5					
<b>3</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH</b>			<b>674.660.000,00</b>	-	-	<b>674.660.000,00</b>	-
1	Kajian.....	2010		192.170.000,00			192.170.000,00	
2	Kajian.....	2010		98.590.000,00			98.590.000,00	
3	Kajian.....	2010		97.900.000,00			97.900.000,00	
4	Kajian.....	2010		94.600.000,00			94.600.000,00	
5	Kajian.....	2010		93.500.000,00			93.500.000,00	
6	Kajian.....	2010		97.900.000,00			97.900.000,00	
<b>4</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH</b>			-	<b>910.000.000,00</b>	-	<b>910.000.000,00</b>	-
1	Kajian IG Pala Tapaktuan				200.000.000,00		200.000.000,00	
2	Kajian Potensi Pengolahan Gula Sawit Aceh				60.000.000,00		60.000.000,00	
3	Kajian Produksi dan Rangkaian Pasok Kopi Arabika Aceh Tengah dan Gayo Lues				400.000.000,00		400.000.000,00	
4	Kajian Peningkatan Produksi Kopi Arabika Gayo dan Tingkat Kesejahteraan Petani				150.000.000,00		150.000.000,00	
5	Kajian Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Perkebunan Aceh				100.000.000,00		100.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>			<b>943.060.000,00</b>	<b>910.000.000,00</b>	-	<b>1.853.060.000,00</b>	-

**ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA**

<b>1</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH</b>			<b>57.650.000,00</b>	-	-	<b>57.650.000,00</b>	-
1	Karya Seni	2016	4	57.650.000,00			57.650.000,00	
<b>2</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH</b>			<b>730.873.500,00</b>	-	-	<b>730.873.500,00</b>	-
1	Karya Seni/ Budaya	2019	4	168.173.500,00			168.173.500,00	
2	Karya Seni/ Budaya	2019	4	403.700.000,00			403.700.000,00	
3	Karya Seni/ Budaya	2019	4	159.000.000,00			159.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>			<b>788.523.500,00</b>	-	-	<b>788.523.500,00</b>	-

**HAK CIPTA**

<b>1</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH</b>			<b>99.500.000,00</b>	-	-	<b>99.500.000,00</b>	-
1	Film Cetak			99.500.000,00			99.500.000,00	
<b>2</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH</b>			-	<b>632.500.000,00</b>	-	<b>632.500.000,00</b>	-
1	Video Mapping Gelombang Tsunami	2021			16.500.000,00		16.500.000,00	
2	Video Pariwisata Potensi Daerah Aceh	2021			16.500.000,00		16.500.000,00	

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Saldo Awal 2020	Bertambah	Berkurang	Nilai 2021	Akumulasi Amortisasi 2021
3	Video Informasi tentang Tsunami	2021		-	16.500.000,00		16.500.000,00	
4	Video Informasi masa Rehab Rekon	2021		-	16.500.000,00		16.500.000,00	
5	Peta Dunia dan Efek Tsunami Pada Wilayah Terdampak	2021		-	16.500.000,00		16.500.000,00	
6	Video Informasi Perubahan Pasca Tsunami	2021		-	16.500.000,00		16.500.000,00	
7	Video Informasi Perubahan Pasca Tsunami	2021		-	16.500.000,00		16.500.000,00	
8	Video Informasi Perubahan Pasca Tsunami	2021		-	16.500.000,00		16.500.000,00	
9	Hak Cipta Film 4 Dimensi Judul Kun Fayakun	2021		-	500.500.000,00		500.500.000,00	
<b>3</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH</b>			-	<b>108.790.000,00</b>	-	<b>108.790.000,00</b>	
1	Software	2020			108.790.000,00		108.790.000,00	
	<b>Jumlah</b>			<b>99.500.000,00</b>	<b>741.290.000,00</b>	-	<b>840.790.000,00</b>	-
	<b>Total</b>			<b>30.397.239.283,00</b>	<b>34.708.822.204,00</b>	<b>1.012.163.500,00</b>	<b>64.093.897.987,00</b>	<b>36.013.087.961,50</b>

## ASET RUSAK BERAT

NO	SKPA	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Dinas Pendidikan Aceh	163.506.582.665,33	162.621.101.080,58
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	219.950.000,00	219.950.000,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	245.666.000,00	-
4	Dinas Kesehatan Aceh	3.871.086.733,00	3.237.574.000,00
5	Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	145.608.980.950,80	145.608.980.950,80
6	Rumah Sakit Jiwa	3.301.055.220,00	1.758.322.000,00
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	920.696.150,00	5.635.536.917,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	13.639.160.000,00	8.102.000.000,00
9	Dinas Pengairan Aceh	6.393.689.438,00	5.269.606.200,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	5.394.331.216,00	4.797.970.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	635.651.349,00	842.265.855,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	-
13	Dinas Sosial Aceh	9.274.960.190,97	6.148.550.875,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	400.744.000,00	400.744.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	243.794.238,80	-
16	Dinas Pangan Aceh	618.737.300,00	-
17	Dinas Pertanahan Aceh	47.741.130,00	-
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	6.590.412.852,80	6.554.279.855,80
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	223.450.000,00	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.273.805.250,00	1.286.379.250,00
21	Dinas Perhubungan Aceh	32.809.450.610,00	24.881.512.360,00
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	14.562.499.022,00	10.538.466.250,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	685.933.681,00	327.343.663,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	245.170.000,00	-
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.138.777.469,00	965.345.469,00
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	464.219.000,00	25.010.000,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	5.242.337.437,00	426.300.000,00
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	2.744.689.150,00	1.524.577.700,00
29	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	351.718.697,00	43.446.000,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	79.100.000,00	79.100.000,00
31	Sekretariat Baitul Mal Aceh	156.782.817,00	612.515.900,00
32	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	4.502.000,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	6.543.013.076,00	6.543.013.076,00
34	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.641.347.082,00	1.641.347.082,00
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	2.100.605.031,00	516.361.350,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.067.056.566,00	1.067.056.566,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	415.429.949,00	415.429.949,00
38	Dinas Syariat Islam Aceh	278.303.383,00	-
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	2.222.540.969,00	140.000.000,00
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	340.675.000,00	-
41	Sekretariat Daerah Aceh	24.613.215.701,90	10.777.100.431,90
42	Sekretariat DPRA	2.346.039.600,00	6.240.649.700,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	109.781.588,00	381.747.182,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>462.569.180.513,60</b>	<b>419.634.085.663,08</b>

## EXTRACOMTABLE ASET LAIN-LAIN

No	Nama	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
1	SEKRETARIAT DAERAH ACEH	824.408.169,96	45.081.423	53.936.423	815.553.169,96
2	SEKRETARIAT DPRA	97.860.752,00	16.567.500	15.990.000	98.438.252,00
3	INSPEKTORAT ACEH	2.860.200,00	-	-	2.860.200,00
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH	87.474.400,00	-	-	87.474.400,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH	84.363.150,00	-	20.000.000	64.363.150,00
6	BADAN KEPEGAWAIAN ACEH	35.532.560,00	-	-	35.532.560,00
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH	199.528.122,00	31.420.000	-	230.948.122,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH	2.475.000,00	-	-	2.475.000,00
9	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH	44.237.700,00	40.414.200	39.164.200	45.487.700,00
10	DINAS PENDIDIKAN ACEH	20.258.193.477,10	2.572.061.960	7.638.830.655	15.191.424.782,35
11	DINAS KESEHATAN ACEH	114.249.680,00	-	-	114.249.680,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	242.495.120,00	-	-	242.495.120,00
13	DINAS PENGAIRAN ACEH	4.853.055.527,00	3.149.157.092	-	8.002.212.619,00
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH	9.303.730.536,00	-	-	9.303.730.536,00
15	DINAS SOSIAL ACEH	14.259.500,00	18.670.000	-	32.929.500,00
16	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH	4.699.798.306,00	-	-	4.699.798.306,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH	51.115.000,00	200.000	200.000	51.115.000,00
18	DINAS PANGAN ACEH	15.434.350,00	-	-	15.434.350,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH	695.542.819,60	2.867.000	58.915.520	639.494.299,60
20	DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH	121.835.000,00	-	-	121.835.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH	8.610.000,00	84.900.000	-	93.510.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN ACEH	805.487.919,00	260.374.000	82.965.000	982.896.919,00
23	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH	-	98.570.750	-	98.570.750,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH	23.091.962,00	-	-	23.091.962,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	16.279.000,00	700.000	12.700.000	4.279.000,00
26	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH	662.934.300,00	49.400.000	49.400.000	662.934.300,00
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH	135.443.000,00	-	-	135.443.000,00
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH	88.695.504,00	6.000.000	-	94.695.504,00
29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	109.431.590,00	-	-	109.431.590,00
30	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	2.624.410.494,00	-	-	2.624.410.494,00
31	DINAS PETERNAKAN ACEH	427.805.623,00	-	-	427.805.623,00
32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH	145.690.828,00	14.000.000	14.000.000	145.690.828,00
33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH	73.733.993,00	30.961.000	-	104.694.993,00
34	KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	-	-	-	-

No	Nama	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
35	DINAS SYARI'AT ISLAM ACEH	4.028.500,00	-	-	4.028.500,00
36	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00
37	DINAS PERTANAHAN ACEH	-	-	-	-
38	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH	19.660.000,00	-	-	19.660.000,00
39	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	9.959.000,00	2.790.000	-	12.749.000,00
40	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
41	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH	26.708.000,00	18.501.528	10.550.100	34.659.428,00
42	SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH	585.000,00	-	585.000	-
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH	29.565.779,00	-	-	29.565.779,00
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN	347.724.904,00	-	20.634.469	327.090.435,00
45	RUMAH SAKIT JIWA	320.879.600,00	-	-	320.879.600,00
46	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	275.561.347,00	-	-	275.561.347,00
47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH	68.641.900,00	-	4.400.000	64.241.900,00
48	PENGELOLA BARANG	261.503.760,00	-	-	261.503.760,00
<b>Jumlah</b>		<b>48.253.681.372,66</b>	<b>6.442.636.452,82</b>	<b>8.022.271.366,57</b>	<b>46.674.046.458,91</b>

## Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

No	Kab/Kota					JUMLAH (Rp)
		PKB (Rp)	BBN-KB (Rp)	PBB-KB (Rp)	PAP (Rp)	
<b>Kota</b>						
1	Banda Aceh	2.212.400.923,00	1.036.021.300,00	3.011.710.670,00	22.712.957,00	6.282.845.850,00
2	Sabang	1.039.837.716,00	603.327.102,00	1.578.543.522,00	12.149.429,00	3.233.857.769,00
3	Lhokseumawe	1.579.600.835,00	879.995.528,00	2.355.967.995,00	31.081.234,00	4.846.645.592,00
4	Langsa	1.420.073.353,00	848.617.015,00	2.333.530.379,00	13.180.240,00	4.615.400.987,00
5	Subulussalam	1.232.596.906,00	787.490.882,00	2.046.011.563,00	13.550.106,00	4.079.649.457,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.484.509.733,00</b>	<b>4.155.451.827,00</b>	<b>11.325.764.129,00</b>	<b>92.673.966,00</b>	<b>23.058.399.655,00</b>
<b>Kabupaten</b>						
1	Aceh Besar	2.486.919.568,00	1.387.582.428,00	3.560.484.072,00	16.211.267,00	7.451.197.335,00
2	Pidie	2.363.728.108,00	1.378.749.032,00	3.473.087.585,00	11.957.097,00	7.227.521.822,00
3	Aceh Jaya	1.555.616.886,00	952.832.334,00	2.538.919.040,00	11.696.281,00	5.059.064.541,00
4	Bireuen	2.328.770.114,00	1.352.814.193,00	3.394.434.295,00	17.670.649,00	7.093.689.251,00
5	Pidie Jaya	1.382.541.771,00	860.707.909,00	2.167.047.898,00	13.025.031,00	4.423.322.609,00
6	Bener meriah	1.422.361.328,00	831.681.595,00	2.264.727.329,00	12.124.112,00	4.530.894.364,00
7	Aceh Utara	2.635.583.512,00	1.652.247.703,00	3.844.965.554,00	46.479.723,00	8.179.276.492,00
8	Aceh Timur	2.564.713.497,00	1.701.032.283,00	4.093.189.443,00	17.085.715,00	8.376.020.938,00
9	Aceh Tengah	1.926.681.317,00	1.119.227.147,00	2.941.512.321,00	12.079.811,00	5.999.500.596,00
10	Gayo Lues	1.764.160.556,00	1.072.361.108,00	2.761.043.983,00	11.307.563,00	5.608.873.210,00
11	Aceh Tenggara	1.785.141.564,00	1.119.712.620,00	2.872.237.470,00	27.820.196,00	5.804.911.850,00
12	Aceh Tamiang	1.871.218.418,00	1.179.793.616,00	2.863.394.071,00	19.939.979,00	5.934.346.084,00
13	Aceh Selatan	1.874.888.099,00	1.172.132.954,00	2.660.989.761,00	11.514.229,00	5.719.525.043,00
14	Aceh Singkil	1.419.229.263,00	934.514.162,00	2.254.720.270,00	18.135.919,00	4.626.599.614,00
15	Simeulue	1.304.679.297,00	788.356.450,00	2.065.201.451,00	11.369.612,00	4.169.606.810,00
16	Aceh Barat	1.806.225.690,00	1.159.657.056,00	3.778.004.521,00	13.791.301,00	6.757.678.568,00
17	Nagan Raya	1.731.418.000,00	1.179.134.421,00	2.673.005.223,00	134.468.570,00	5.718.026.214,00
18	Aceh Barat Daya	1.424.088.907,00	901.072.350,00	2.190.176.181,00	12.163.025,00	4.527.500.463,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.647.965.895,00</b>	<b>20.743.609.361,00</b>	<b>52.397.140.468,00</b>	<b>418.840.080,00</b>	<b>107.207.555.804,00</b>
<b>Total</b>		<b>41.132.475.628,00</b>	<b>24.899.061.188,00</b>	<b>63.722.904.597,00</b>	<b>511.514.046,00</b>	<b>130.265.955.459,00</b>



## BEBAN PERSEDIAAN

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
<b>A.</b>	<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.654.711.235.991,84</b>	<b>818.172.618.627,15</b>	<b>830.680.880.324,71</b>	<b>101,53</b>
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.538.583.085,20	-	11.538.583.085,20	-
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	17.843.890.690,90	8.025.716.080,00	9.849.377.107,00	122,72
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.060.648.403,00	-	9.060.648.403,00	-
4	Beban Bahan-Bahan Baku	1.251.307.846,00	16.767.071.396,33	(15.515.763.550,33)	(92,54)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	64.851.745.359,00	81.007.752.041,00	(16.156.006.682,00)	(19,94)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	582.359.992,00	-	582.359.992,00	-
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	666.965.740,00	-	666.965.740,00	-
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.749.564.680,00	42.444.172.768,00	(40.802.032.588,00)	(96,13)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	204.249.050.307,33	-	204.245.003.851,23	-
10	Beban Persediaan dekorasi	-	3.606.142.241,00	(3.606.142.241,00)	(100,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	291.884.520,00	-	291.884.520,00	-
12	Beban Persediaan Publikasi	-	5.438.014.496,50	(5.438.014.496,50)	(100,00)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	19.734.000,00	-	19.734.000,00	-
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	73.970.500,00	-	73.970.500,00	-
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	482.017.413,00	-	482.017.413,00	-
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan	214.890.500,00	-	214.890.500,00	-
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	383.451.720,00	-	383.451.720,00	-
18	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-
19	Beban Persediaan Specimen	-	225.506.024,00	(225.506.024,00)	(100,00)
20	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan	75.029.000,00	-	75.029.000,00	-
21	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.913.265.218,00	-	1.913.265.218,00	-
22	Beban Persediaan bahan logistik rumah tangga	-	51.020.817.610,02	(51.020.817.610,02)	(100,00)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	50.721.997.208,34	-	50.722.125.984,34	-
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	8.047.287.681,00	-	8.047.287.681,00	-
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.865.750.473,87	-	47.865.750.473,87	-
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.602.560.340,00	-	1.602.560.340,00	-
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	779.420.808,00	-	779.420.808,00	-
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	5.849.108.690,90	-	5.849.108.690,90	-
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot	1.140.177.331,00	-	1.140.177.331,00	-
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.362.659.993,85	-	10.362.659.993,85	-
31	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	17.102.407.808,80	-	17.154.615.112,80	-
32	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	9.190.636.010,00	-	9.190.636.010,00	-
33	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.742.561.292,00	2.913.048.093,00	(1.170.486.801,00)	(40,18)
34	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan	62.630.828.255,52	6.077.317.120,00	56.479.986.405,54	929,36
35	Beban Obat-Obatan-Obat	359.222.505.864,93	124.364.942.899,29	234.063.675.206,64	188,21
36	Beban Persediaan dokumentasi	-	5.022.852.212,00	(5.022.852.212,00)	(100,00)
37	Beban Persediaan bahan arsip	-	370.208.900,00	(370.208.900,00)	(100,00)
38	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	383.660.986,00	-	383.660.986,00	-
39	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	581.340.037.668,20	-	580.387.978.617,20	-
40	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	3.608.566.883,00	-	3.608.566.883,00	-
41	Beban Natura dan Pakan-Natura	5.404.646.020,00	-	2.394.312.900,00	-
42	Beban Natura dan Pakan-Pakan	940.495.500,00	16.757.919.077,00	(15.817.423.577,00)	(94,39)
43	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	12.169.540.601,00	-	12.169.540.601,00	-
44	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian	421.008.500,00	-	421.008.500,00	-
45	Beban Makanan dan Minuman Rapat	82.962.289.028,00	21.566.796.413,00	61.395.492.615,00	284,68
46	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.315.792.865,00	-	3.315.792.865,00	-
47	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	4.338.945.400,00	-	4.338.945.400,00	-
48	Beban Persediaan bahan alat-alat kesehatan	-	18.799.301.893,00	(18.799.301.893,00)	(100,00)
49	Beban Persediaan bahan percontohan	-	29.415.138.503,00	(29.415.138.503,00)	(100,00)
50	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan	11.610.821.903,00	-	11.610.821.903,00	-
51	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan	23.765.798.560,00	-	23.765.798.560,00	-

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
52	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan	5.954.366.830,00	-	5.954.366.830,00	-
53	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.927.712.220,00	-	8.927.712.220,00	-
54	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	194.755.000,00	-	194.755.000,00	-
55	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	932.542.200,00	-	932.542.200,00	-
56	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	146.472.890,00	-	146.472.890,00	-
57	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.614.558.913,00	-	4.614.558.913,00	-
58	Beban Persediaan bahan pangan	-	741.834.255,00	(741.834.255,00)	(100,00)
59	Beban Persediaan bahan kelengkapan lapangan	-	80.781.049.682,13	(80.781.049.682,13)	(100,00)
60	Beban Persediaan bahan kelengkapan sarana	-	130.130.050,00	(130.130.050,00)	(100,00)
61	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	784.268.072,00	-	784.268.072,00	-
62	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	294.030.000,00	-	294.030.000,00	-
63	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	287.140.000,00	-	287.140.000,00	-
64	Beban Pakaian Siaga	7.350.000,00	-	7.350.000,00	-
65	Beban Pakaian Teknik	5.082.000,00	-	5.082.000,00	-
66	Beban Persediaan alat tulis kantor	-	48.361.497.441,86	(48.361.497.441,86)	(100,00)
67	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	-	35.804.000,00	(35.804.000,00)	(100,00)
68	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	-	10.187.144.341,29	(10.187.144.341,29)	(100,00)
69	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	-	1.802.807.264,00	(1.802.807.264,00)	(100,00)
70	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	17.919.255.368,50	(17.919.255.368,50)	(100,00)
71	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	-	2.886.205.815,00	(2.886.205.815,00)	(100,00)
72	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	-	512.728.593,00	(512.728.593,00)	(100,00)
73	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	-	498.515.200,00	(498.515.200,00)	(100,00)
74	Beban Persediaan perlengkapan/bahan keperluan pasien	-	189.064.027.901,23	(189.064.027.901,23)	(100,00)
75	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	437.323.250,00	-	437.323.250,00	-
76	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	10.326.500,00	22.399.419.576,00	(22.389.093.076,00)	(99,95)
77	Beban Pakaian KORPRI	104.834.000,00	-	104.834.000,00	-
78	Beban Pakaian Adat Daerah	2.256.926.200,00	-	2.256.926.200,00	-
79	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.855.386.800,00	-	1.855.386.800,00	-
80	Beban Pakaian Olahraga	4.959.161.470,00	9.029.481.372,00	(4.070.319.902,00)	(45,08)
81	Beban Pakaian Jas/Safari	135.135.000,00	-	135.135.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Beban Barang Tak Habis Pakai</b>	<b>7.196.305.878,33</b>	<b>-</b>	<b>7.196.305.878,33</b>	<b>-</b>
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	49.885.000,00	-	49.885.000,00	-
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	7.116.075.878,33	-	7.116.075.878,33	-
3	Beban Komponen-Komponen Lainnya	9.566.000,00	-	9.566.000,00	-
4	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	20.220.000,00	-	20.220.000,00	-
5	Beban Pipa-Pipa Lainnya	559.000,00	-	559.000,00	-
<b>Total Beban Persediaan</b>		<b>1.661.907.541.870,17</b>	<b>818.172.618.627,15</b>	<b>843.734.923.243,02</b>	<b>103,12</b>

## Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pergub No.50 Th. 2008	Pergub No.56 Th. 2009	SuratGub No. 903/45803 Th. 2009	SuratSekda an. Gub No. 903/25697 Th.2010	SuratGubNo. 902/2741 Th.2011	Pergub No.17 Th.2012	SuratGub No. 050/12841	Pergub No 10 Th 2015	Pergub No 19 Th 2016	Pergub No 19 Th 2017	Pergub No 19 Th 2017	Pergub No 26 Th 2019	Pergub No 33 Th 2020	Pergub No 21 Th 2021
	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>1.412.000.000.000</b>	<b>1.412.000.000.000</b>	<b>1.491.312.800.000</b>	<b>1.539.922.736.000</b>	<b>1.804.262.598.600</b>	<b>2.190.515.505.600</b>	<b>3.248.436.543.702</b>	<b>3.452.084.858.316</b>	<b>4.748.419.517.200</b>	<b>4.582.732.139.708</b>	<b>5.393.950.426.988</b>	<b>5.755.726.049.796</b>	<b>5.515.916.761.169</b>	<b>5.526.572.477.877</b>
1	Kab Aceh Barat	93.590.000.000	93.590.000.000	90.890.680.684	96.846.530.789	118.179.368.304	137.811.790.756	126.032.648.587	125.447.783.438	120.027.345.386	145.172.828.135	118.934.901.324	106.185.848.936	74.324.170.320	77.718.790.757
2	Kab Aceh Besar	98.300.000.000	98.300.000.000	107.457.631.142	111.973.712.433	138.327.928.623	164.966.802.758	148.676.787.678	147.914.490.241	145.490.688.294	165.687.091.725	127.872.986.102	120.317.507.813	94.558.733.789	98.291.480.032
3	Kab Aceh Selatan	115.930.000.000	115.930.000.000	119.481.737.962	122.201.007.290	141.107.340.336	180.662.375.651	158.151.037.413	156.731.647.778	154.994.777.928	176.920.357.212	135.950.816.958	122.218.179.195	104.510.075.485	98.537.681.998
4	Kab Aceh Singkil	89.390.000.000	89.390.000.000	97.756.143.949	102.341.111.565	116.767.957.062	130.744.005.985	113.747.315.554	116.337.845.137	116.375.954.770	118.138.819.332	110.202.509.182	110.346.584.240	78.183.315.384	81.551.810.472
5	Kab Aceh Tengah	114.210.000.000	114.210.000.000	115.338.384.798	119.349.261.789	135.798.267.712	171.801.124.648	151.548.782.608	153.029.242.798	155.580.425.460	166.831.320.459	-	120.601.436.421	97.310.057.913	94.987.528.438
6	Kab Aceh Tenggara	102.220.000.000	102.220.000.000	111.850.356.683	119.631.216.398	144.032.456.686	183.285.909.131	162.405.107.409	194.829.969.574	163.800.562.878	175.095.446.154	178.898.377.582	129.419.727.670	102.095.040.286	97.549.792.615
7	Kab Aceh Timur	157.520.000.000	157.520.000.000	161.031.019.908	168.908.398.282	203.315.357.760	229.572.089.071	204.540.812.409	203.304.448.098	204.299.783.417	252.512.203.750	190.863.331.706	201.436.674.638	127.030.171.761	120.083.664.279
8	Kab Aceh Utara	100.710.000.000	100.710.000.000	127.648.390.364	123.034.524.324	138.766.784.896	177.233.160.034	136.328.668.055	132.384.928.052	129.524.653.383	178.692.371.265	130.523.243.754	123.597.532.105	124.980.601.676	122.195.023.703
9	Kab Bireuen	91.790.000.000	91.790.000.000	100.114.996.299	101.218.489.429	124.063.252.755	148.549.131.596	132.235.242.030	126.659.178.409	126.203.414.910	144.746.630.857	119.274.158.548	104.606.550.438	102.211.815.035	95.396.340.982
10	Kab Pidie	93.330.000.000	93.330.000.000	112.185.859.190	118.712.301.061	134.413.543.284	176.071.888.941	160.629.520.329	154.825.046.044	152.724.360.707	174.184.090.318	140.548.593.645	152.919.486.547	101.314.840.707	101.375.635.457
11	Kab Simeulue	89.920.000.000	89.920.000.000	86.781.751.584	92.611.954.618	106.151.786.712	123.803.304.936	105.326.444.150	108.490.033.837	106.477.927.991	129.993.185.554	106.309.441.090	98.370.423.520	67.433.146.749	67.763.188.129
12	Kota Banda Aceh	52.080.000.000	52.080.000.000	59.428.775.408	62.042.094.276	71.225.644.829	85.552.246.792	112.551.355.724	117.110.295.941	117.584.585.309	128.838.661.682	71.879.025.895	67.737.433.703	104.640.232.516	102.253.413.355
13	Kota Sabang	45.690.000.000	45.690.000.000	47.333.129.085	49.197.705.502	57.420.816.610	68.856.877.380	60.213.985.770	62.331.350.724	61.348.336.627	74.736.894.410	78.118.798.574	73.928.138.452	61.410.740.324	56.314.935.397
14	Kota Langsa	62.260.000.000	62.260.000.000	60.514.791.364	63.137.675.665	76.623.404.861	90.176.414.847	81.666.286.361	81.926.615.347	80.680.341.059	92.168.291.565	87.281.275.681	78.040.783.301	72.649.287.349	72.762.884.864
15	Kota Lhokseumawe	61.930.000.000	61.930.000.000	57.477.087.601	61.483.395.522	71.691.684.220	84.158.429.359	73.732.980.017	73.902.055.739	73.736.159.755	87.941.476.679	86.605.166.240	79.402.072.351	72.678.056.143	71.693.169.795
16	Kab Nagan Raya	118.880.000.000	118.880.000.000	104.310.101.317	110.914.506.152	136.282.859.178	146.705.576.546	145.833.596.496	145.845.274.513	140.100.960.736	183.468.756.928	163.927.648.337	128.955.146.560	92.511.283.451	90.948.227.681
17	Kab Aceh Jaya	110.060.000.000	110.060.000.000	118.117.558.841	117.762.405.634	138.679.171.139	175.261.062.131	152.474.420.522	158.425.915.563	155.557.222.303	163.831.996.389	129.907.836.447	121.610.719.314	81.547.053.280	88.509.842.593
18	Kab Aceh Barat Daya	78.300.000.000	78.300.000.000	85.673.554.517	94.471.359.985	107.873.209.046	128.140.347.483	111.022.420.534	111.439.098.930	111.681.805.860	126.398.383.430	108.009.555.427	104.242.275.217	83.427.389.141	81.267.395.406
19	Kab Gayo Lues	151.300.000.000	151.300.000.000	144.551.971.679	147.604.949.042	168.055.431.561	187.734.858.157	195.021.178.231	200.855.367.107	198.087.218.142	212.139.540.027	161.556.797.794	161.929.893.441	92.360.343.077	92.432.452.320
20	Kab Aceh Tamiang	94.270.000.000	94.270.000.000	99.218.010.668	91.571.509.786	107.646.469.694	146.903.529.583	133.953.744.076	126.829.640.443	133.123.671.881	149.383.161.807	119.614.281.198	108.632.715.049	92.072.358.433	95.078.431.399
21	Kab Bener Meriah	77.390.000.000	77.390.000.000	80.388.355.393	80.658.387.499	95.558.173.264	125.676.693.791	109.243.670.794	111.916.310.575	111.031.402.802	127.365.365.951	109.224.375.090	102.535.527.609	80.400.273.677	79.455.522.251
22	Kab Pidie Jaya	55.090.000.000	55.090.000.000	70.535.242.951	72.799.090.971	83.710.613.753	106.853.327.339	94.216.152.766	96.640.402.805	94.651.839.282	98.263.717.918	94.243.412.907	87.319.493.982	76.830.499.781	75.279.453.374
23	Kota Subulussalam	63.850.000.000	63.850.000.000	78.883.668.613	81.412.515.989	90.702.375.615	115.252.311.485	104.797.081.782	104.164.275.991	105.713.985.920	116.403.563.705	106.094.632.531	97.391.453.702	54.882.100.554	67.808.662.826
	<b>Total Kab/Kota</b>	<b>2.118.010.000.000</b>	<b>2.118.010.000.000</b>	<b>2.236.969.200.000</b>	<b>2.309.884.104.001</b>	<b>2.706.393.897.900</b>	<b>3.285.773.258.400</b>	<b>2.974.349.239.295</b>	<b>3.011.341.217.084</b>	<b>2.958.797.424.800</b>	<b>3.388.914.155.252</b>	<b>2.675.841.166.012</b>	<b>2.601.745.604.204</b>	<b>2.039.361.586.831</b>	<b>2.029.255.328.123</b>
	<b>TOTAL ...</b>	<b>3.530.010.000.000</b>	<b>3.530.010.000.000</b>	<b>3.728.282.000.000</b>	<b>3.849.806.840.001</b>	<b>4.510.656.496.500</b>	<b>5.476.288.764.000</b>	<b>6.222.785.782.997</b>	<b>6.463.426.075.400</b>	<b>7.707.216.942.000</b>	<b>7.971.646.294.960</b>	<b>8.029.791.593.000</b>	<b>8.357.471.654.000</b>	<b>7.555.278.348.000</b>	<b>7.555.827.806.000</b>

**Daftar Kewajiban Pemerintah Aceh per tanggal 31 Desember 2021  
Atas Putusan Hukum Terhadap Pekerjaan Tanggap Darurat  
pada Dinas Pengairan Aceh**

NO.	NAMA PEKERJAAN	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	BESARAN BUNGA (%)	TERHITUNG MULAI	DURASI BUNGA (TAHUN)	BESARAN BUNGA (Rp.)	KEWAJIBAN s/d 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8 = 3 + 7
1	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kec. Tangse (Bencana Alam)	739.380.000,00	10	2014	8	591.504.000,00	1.330.884.000,00
2	Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Rerebe Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues (Bencana Alam)	561.239.700,00	13	2010	12	875.533.932,00	1.436.773.632,00
3	Pengaman Tebing Sungai dan Normalisasi Sungai Lawe Alas Desa Tualang Sembilar Kec. Bukit Tusan Kab. Aceh Tenggara (Bencana Alam)	944.022.847,70	13	2010	12	1.472.675.642,41	2.416.698.490,11
4	Pengaman Tebing Sungai Kr. Tripa Gampong Lamie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya (Bencana Alam)	4.058.987.000,00	13	2014	8	4.221.346.480,00	8.280.333.480,00
5	Pengaman Tebing Sunga Kr. Rundeng Kec. Rundeng Kota Subulussalam (Bencana Alam)	1.929.112.000,00	13	2014	8	2.006.276.480,00	3.935.388.480,00
6	Pengaman Pantai Sawang Ba'u Kec. Sawang (Paket I) Kab. Aceh Selatan (Bencana Alam)	3.656.919.378,00	10	2010	12	4.388.303.253,60	8.045.222.631,60
7	Pengaman Pantai Sawang Ba'u Kec. Sawang (Paket-IV) Kab. Aceh Selatan (Bencana Alam)	3.739.468.850,40	13	2010	12	5.833.571.406,62	9.573.040.257,02
8	Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peuto Kab. Aceh Utara (Bencana Alam)	3.120.839.178,00	10	2010	12	3.745.007.013,60	6.865.846.191,60
9	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Pase Desa Tanjong Baroh Kec. Samudera Kab. Aceh Utara (Bencana Alam)	1.504.319.000,00	10	2010	12	1.805.182.800,00	3.309.501.800,00
10	Perkuatan Tebing Kr. Leubu Kab. Bireuen (Bencana Alam)	3.330.414.829,51	13	2009	13	5.628.401.061,87	8.958.815.891,38
11	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peusangan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen (Bencana Alam)	348.419.638,33	13	2010	12	543.534.635,79	891.954.274,12
12	Pembangunan Jetty TPI Desa Lamteungoh Kab. Aceh Besar (Bencana Alam)	14.218.985.439,00	13	2010	8	14.787.744.856,56	29.006.730.295,56
13	Pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng Lhoong Kab. Aceh Besar (Bencana Alam)	1.834.451.943,90	13	2010	12	2.861.745.032,48	4.696.196.976,38
14	Pengaman Tebing Sungai Krueng Pase ( Bencana Alam )	1.614.819.987,35	13	2009	13	2.729.045.778,62	4.343.865.765,97
15	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kr. Peusangan Gp. Suwak Kec. Peusangan Kab. Bireuen (Bencana Alam)	416.905.000,00	12	2010	12	600.343.200,00	1.017.248.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.018.284.792,19</b>				<b>52.090.215.573,57</b>	<b>94.108.500.365,76</b>

**Daftar Kewajiban Pemerintah Aceh per tanggal 31 Desember 2021  
Tanpa Gugatan Hukum Terhadap Pekerjaan Tanggap Darurat  
pada Dinas Pengairan Aceh**

NO.	NAMA PEKERJAAN	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	BESARAN BUNGA (%)	TERHITUNG MULAI	DURASI BUNGA (TAHUN)	BESARAN BUNGA (Rp.)	KEWAJIBAN S/D 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8 = 3 + 7
1	Pengaman Tebing Sungai Kr. Ulim Kab. Pidie (Bencana Alam)	588.264.000	-	-	-	-	588.264.000
2	Perkuatan Tebing Sungai Bayeun Gampong Bayeum Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur (Bencana Alam)	1.029.077.000	-	-	-	-	1.029.077.000
3	Pengaman Tebing Sungai Kr. Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Bencana Alam)	4.519.097.000	-	-	-	-	4.519.097.000
4	Pengaman Tebing Sungai Kr. Nagan Gampong Panteuen Bayam Kec. Beutong Kab. Nagan Raya (Bencana Alam)	125.583.000	-	-	-	-	125.583.000
<b>Jumlah</b>		<b>6.262.021.000</b>				-	<b>6.262.021.000</b>

**POTENSI KEWAJIBAN BELUM BAYAR (100%)  
KEGIATAN APBA TAHUN 2021**

NO.	NAMA PAKET	NILAI KONTRAK	REALISASI s/d 31 DES			SISA PEMBAYARAN s/d 31 DES		KET
			FISIK (%)	KEU		(Rp)	(%)	
				(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6 = (5/3*100)	7	8 (100-6)	9
	<b>DINAS KESEHATAN ACEH</b>	<b>24.353.127.000,00</b>	<b>83,25</b>	<b>19.056.321.877,50</b>	<b>78,25</b>	<b>5.296.805.122,50</b>	<b>21,75</b>	
1	Pembangunan RS Rujukan Regional dr. Fauziah Bireuen	24.353.127.000,00	83,25	19.056.321.877,50	78,25	5.296.805.122,50	21,75	Pemberian Kesempatan (50 hari) kerja
	<b>DINAS SYARIAT ISLAM ACEH</b>	<b>41.158.380.803,54</b>	<b>77,20</b>	<b>29.004.310.952,26</b>	<b>70,47</b>	<b>2.769.959.028,07</b>	<b>29,53</b>	
1	Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Utama Bener Meriah Confention Center)	41.158.380.803,54	77,20	29.004.310.952,26	70,47	2.769.959.028,07	29,53	
	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH</b>	<b>5.031.248.302,82</b>	<b>100,00</b>	<b>4.528.123.472,54</b>	<b>90,00</b>	<b>503.124.830,28</b>	<b>10,00</b>	
1	Penataan Kawasan Wisata Gapang Kota Sabang	5.031.248.302,82	100,00	4.528.123.472,54	90,00	503.124.830,28	10,00	Pemberian kesempatan dalam denda
	<b>DINAS KOPERASI DAN UKM ACEH</b>	<b>9.682.731.874,00</b>	<b>88,55</b>	<b>7.746.185.498,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.936.546.378,00</b>	<b>20,00</b>	
1	Bantuan Peralatan Usaha untuk Pengembangan UMKM Akibat Dampak Covid-19 Zona-I (CV. Pilar Pratama)	1.974.911.250,00	88,49	1.579.929.000,00	80,00	394.982.250,00	20,00	Putus Kontrak, Jaminan Dicairkan
2	Bantuan Peralatan Usaha untuk Pengembangan UMKM Akibat Dampak Covid-19 Zona-II (CV. Pancacita Cakradonya Sakti)	1.436.109.103,00	81,68	1.148.887.282,00	80,00	287.221.821,00	20,00	Putus Kontrak, Jaminan Dicairkan
3	Bantuan Peralatan Usaha untuk Pengembangan UMKM Akibat Dampak Covid-19 Zona-III (CV. Dwi Mitra Utama Corporation)	1.557.748.821,00	80,14	1.246.199.057,00	80,00	311.549.764,00	20,00	Putus Kontrak, Jaminan Dicairkan
4	Bantuan Peralatan Usaha untuk Pengembangan UMKM Akibat Dampak Covid-19 Zona-IV (CV. Tiga Permata)	1.548.798.816,00	93,24	1.239.039.052,00	80,00	309.759.764,00	20,00	Putus Kontrak, Jaminan Dicairkan
5	Bantuan Peralatan Usaha untuk Pengembangan UMKM Akibat Dampak Covid-19 Zona-V (CV. Tiga Permata)	1.565.677.631,00	91,12	1.252.542.105,00	80,00	313.135.527,00	20,00	Denda Dari Bagian Kontrak
6	Bantuan Peralatan Usaha untuk Pengembangan UMKM Akibat Dampak Covid-19 Zona-VI (CV. Tiga Permata)	1.599.486.253,00	96,64	1.279.589.002,00	80,00	319.897.252,00	20,00	Denda Dari Bagian Kontrak
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH</b>	<b>18.719.055.000,00</b>	<b>93,00</b>	<b>16.538.285.092,00</b>	<b>88,35</b>	<b>2.180.769.908,00</b>	<b>11,65</b>	
1	Belanja Modal bangunan gedung kantor (lanjutan pembangunan gedung kantor DPMPPTSP Aceh)	18.719.055.000,00	93,00	16.538.285.092,00	88,35	2.180.769.908,00	11,65	Pemberian kesempatan dalam denda
	<b>DINAS PETERNAKAN ACEH</b>	<b>365.108.000,00</b>	<b>1,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365.108.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1	Pengadaan Ternak Sapi Untuk Kelompok Ternak Saree Tabina Desa Cot Pundi Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat	99.279.000,00	100	-	0	99.279.000,00	100	Blm input BAST
2	pengemukan kerbau kelompok gampong palak kerambil, Kab. Aceh Barat Daya, Susoh, Kedai Palak Kerambil	78.185.000,00	100	-	0	78.185.000,00	100	Blm input BAST
3	Penggemukan Kerbau untuk Kelompok Gampong Hulu Pisang, Gampong Hulu Pisang, Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Hulu Pisang	93.822.000,00	100	-	0	93.822.000,00	100	Blm input BAST
4	Penggemukan Kerbau untuk Kelompok padang jaya gampong Kuta Trieng Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan	93.822.000,00	100	-	0	93.822.000,00	100	Blm input BAST
	<b>DINAS PENGAIRAN ACEH</b>	<b>23.284.467.000,00</b>	<b>89,18</b>	<b>20.930.581.585,00</b>	<b>86,05</b>	<b>2.353.885.415,00</b>	<b>13,95</b>	
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Samalanga Kab. Bireuen	1.949.887.000,00	90,00	1.667.153.385,00	85,50	282.733.615,00	14,50	Mati Kontrak / Curah Hujan Tinggi
2	Pembangunan Jetty Kuala Krueng Sabee Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya	17.340.000.000,00	97,54	16.067.764.200,00	92,66	1.272.235.800,00	7,34	Mati Kontrak / Curah Hujan Tinggi
3	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Lampahan KM. 76 Kab. Bener Meriah	3.994.580.000,00	80,00	3.195.664.000,00	80,00	798.916.000,00	20,00	Mati Kontrak / Curah Hujan Tinggi

NO.	NAMA PAKET	NILAI KONTRAK	REALISASI s/d 31 DES		SISA PEMBAYARAN s/d 31 DES		KFT	
			FISIK (%)	KEU		(Rp)		(%)
				(Rp)	(%)			
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH</b>	<b>78.350.267.912,01</b>	<b>74,66</b>	<b>52.487.535.666,00</b>	<b>70,74</b>	<b>25.862.732.246,01</b>	<b>29,26</b>	
1	Pembangunan Jalan Trienggadeng - Batas Bireun	10.459.450.421,00	70,90	7.044.962.830,00	67,35	3.414.487.591,00	32,65	OA (Volume : AC-BC 1052 m ; Urpil 368 m (belum terbayar)
2	Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan - Rundeng (DAK)	13.886.913.916,00	77,34	10.203.132.260,00	73,47	3.683.781.656,00	26,53	DAK (Pemberian Kesempatan Bekerja dalam masa denda melewati tahun anggaran (Sesuai Pergub)
3	Pembangunan Jalan Dua Jalur Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong Kab. Aceh Besar	22.551.504.475,01	59,86	12.824.363.779,00	56,87	9.727.140.696,01	43,13	OA (Dalam masa denda 50 hari)
4	Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Aceh selatan - Rundeng	8.447.452.500,00	95,69	7.679.198.932,00	90,91	768.253.568,00	9,09	SILPA OTSUS (Pemberian Kesempatan bekerja dalam masa denda melewati tahun anggaran (Sesuai Pergub)
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Subulussalam - Rundeng	8.406.278.600,00	89,50	7.147.438.380,00	85,03	1.258.840.220,00	14,97	SILPA OTSUS (Pemberian Kesempatan bekerja dalam masa denda melewati tahun anggaran (Sesuai Pergub)
6	Pembangunan Box Culvert II Ruas Jalan Gunung Kapur - Trumon - Pulo Paya	500.680.000,00	94,39	421.325.609,00	84,15	79.354.391,00	15,85	SILPA OTSUS (Pemberian Kesempatan bekerja dalam masa denda melewati tahun anggaran (Sesuai Pergub)
7	Pembangunan Box Culvert I Ruas Jalan Gunung Kapur - Trumon - Pulo Paya	480.031.000,00	93,80	446.155.948,00	92,94	33.875.052,00	7,06	SILPA OTSUS (Pemberian Kesempatan bekerja dalam masa denda melewati tahun anggaran (Sesuai Pergub)
8	Pembangunan Jembatan Luan Linggi Ruas Jalan Sinabang - Sibigo	8.817.957.000,00	68,01	5.697.237.928,00	64,61	3.120.719.072,00	35,39	SILPA OTSUS Dalam masa denda 50 hari
9	Pembangunan Jembatan Suak Linggi Ruas Jalan Sinabang - Sibigo	4.800.000.000,00	22,45	1.023.720.000,00	21,33	3.776.280.000,00	78,67	SILPA OTSUS (Pengembalian belanja LS setoran Sisa Uang Muka An. CV. Era Kita Jaya, Rp.490.000.000)
	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH</b>	<b>4.408.941.547,06</b>	<b>46,53</b>	<b>1.917.353.540,58</b>	<b>29,12</b>	<b>2.491.588.006,48</b>	<b>70,88</b>	
1	Pembangunan Saluran Lingkungan Gampong Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	373.264.329,05	89,30	333.325.045,84	89,30	39.939.283,21	10,70	100%
2	Pembangunan Saluran Lingkungan Gampong Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh	385.952.132,00	76,00	293.323.621,00	76,00	92.628.511,00	24,00	100%
3	Pembangunan Saluran Lingkungan Lamreueung Meunasah Bak Trieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	364.358.552,34	89,70	326.833.593,48	89,70	37.524.958,86	10,30	100%
4	Pembangunan Saluran Lingkungan Gp. Jurong Puejera, Dsn. III Dan IV Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar	489.982.020,00	90,00	-	0,00	489.982.020,00	100,00	100%
5	Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Bor) Dusun Cot Baroh Gp. Sawang Kab. Aceh Utara	387.879.588,41	60,00	155.151.835,00	40,00	232.727.753,41	60,00	100%
6	Pembangunan Drainase Desa Satie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah	514.939.656,20	80,00	205.975.852,48	40,00	308.963.803,72	60,00	100%
7	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	373.373.000,00	79,52	149.349.200,00	40,00	224.023.800,00	60,00	100%
8	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Gampong Seuneubok. Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	372.273.000,00	76,57	148.909.200,00	40,00	223.363.800,00	60,00	100%
9	Peningkatan Jalan dan Box Culvert Gp. Krak Tampai Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya	380.696.284,46	60,81	152.278.513,78	40,00	228.417.770,68	60,00	100%

NO.	NAMA PAKET	NILAI KONTRAK	REALISASI s/d 31 DES			SISA PEMBAYARAN s/d 31 DES		KET
			FISIK (%)	KEU		(Rp)	(%)	
				(Rp)	(%)			
10	Pembangunan Drainase Dusun Binanga Kec. Rundeng Kota Subulussalam	380.516.696,60	89,13	152.206.679,00	40,00	228.310.017,60	60,00	100%
11	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur PLP Kab. A. Singkil	41.760.510,00	-	-	0,00	41.760.510,00	100,00	50%
12	Pengawasan Pembangunan Saluran Air Bersih dan SPAM Desa Melalang Jaya Kec. Terangon Kab. Gayo Lues	41.811.000,00	-	-	0,00	41.811.000,00	100,00	50%
13	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pipa dari Broncup Mata Air Kp. Rempelam - Kp. Kute Sange untuk PDAM Tirta Sejuk Kec. Terangun Kab. Gayo Lues	49.167.338,00	-	-	0,00	49.167.338,00	100,00	50%
14	Pengawasan Pembangunan MCK Kab. Aceh Besar	71.651.305,00	-	-	0,00	71.651.305,00	100,00	50%
15	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur PSU Kab. Aceh Singkil 2	37.900.500,00	-	-	0,00	37.900.500,00	100,00	50%
16	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur PLP Kota Subulussalam 3	83.714.400,00	-	-	0,00	83.714.400,00	100,00	50%
17	Pengawasan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Air Bersih Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar	59.701.235,00	-	-	0,00	59.701.235,00	100,00	50%
<b>J U M L A H</b>		<b>205.353.327.439,43</b>		<b>152.208.697.683,88</b>	<b>74,12</b>	<b>43.760.518.934,34</b>	<b>25,88</b>	





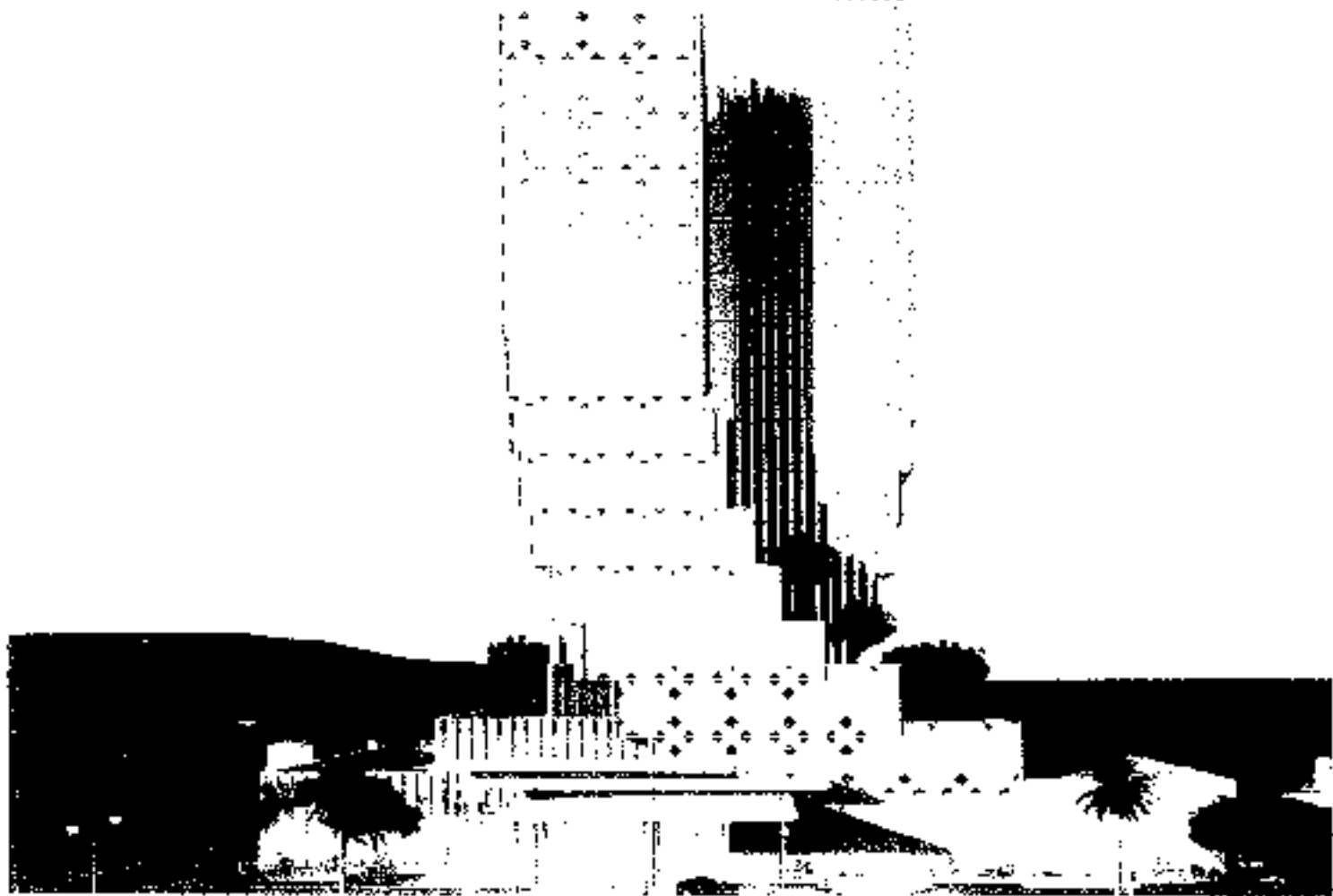
PEMERINTAH ACEH



## LAMPIRAN LAPORAN BUMD

1/12-2021

Bank Aceh



# PT BANK ACEH SYARIAH

## LAPORAN KEUANGAN The Financial Statements

Tanggal 31 Desember 2021  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir  
Pada Tanggal Tersebut  
Kesertaan  
Laporan Auditor Independen

As of December 31, 2021  
And For the Year Then Ended  
With  
Independent Auditor's Report

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PT BANK ACEH SYARIAH  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**BOARD OF DIRECTORS STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS OF PT BANK ACEH SYARIAH  
AS AT DECEMBER 31, 2021 AND 2020  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

Kami yang terhormat dengan dibawakan ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Hidayat Suman  
Yang Kemer : U. D. Mulya Hasan No. 89  
Banda Aceh

Jabatan : Kap. Menajer, Menyang PA,  
Kec. Lhok Jaya, Aceh Besar  
Telepon : (0653) 22956  
Alamat : Bank Aceh

2. Nama : Lutfandi  
Yang Kemer : U. D. Mulya Hasan No. 89,  
Banda Aceh

Jabatan : Lurah, Kantor, Kec. Darul Huda,  
Aceh Besar  
Telepon : (0653) 22956  
Alamat : Dir. Operasional

Nama : Hidayat Suman  
Yang Kemer : U. D. Mulya Hasan No. 89,  
Banda Aceh

Jabatan : Kap. Menajer, Menyang PA  
Kec. Lhok Jaya, Aceh Besar  
Telepon : (0653) 22956  
Jenis : President Director

2. Nama : Lutfandi  
Yang Kemer : U. D. Mulya Hasan No. 89,  
Banda Aceh

Jabatan : Lurah, Kantor, Kec. Darul Huda,  
Aceh Besar  
Telepon : (0653) 22956  
Jenis : Operational Director

Mengatakan bahwa:

We declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas pengisian dan  
persiapan laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah  
tanggal 31 Desember 2021;

2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan  
sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di  
Indonesia;

3. a) Semua informasi dalam Laporan Keuangan Bank  
adalah informasi yang relevan, akurat;

b) Laporan keuangan Bank tidak mengandung  
informasi atau fakta material yang tidak terungkap  
jika tidak ada pengungkapan yang faktual material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian  
intern Bank.

1. We are responsible for the preparation and presentation  
of the financial statements of PT Bank Aceh Syariah  
dated December 31, 2021;

2. The Bank's financial statements have been prepared and  
presented in accordance with Indonesian Financial  
Accounting Standards;

3. a) All information in the Bank's financial statements has  
been prepared and is relevant and accurate;

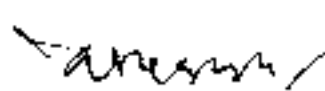
b) The Bank's financial statements do not contain any  
material misstatements or material facts that are not  
disclosed or material;

4. We are responsible for the Bank's internal control system.

Demikian Pernyataan Direksi dengan ini kami sampaikan.

Thus the statement is made available.

As a witness I have signed this statement in Banda Aceh, December 31, 2021.

  
Hidayat Suman  
President Director  
Bank Aceh

  
Lutfandi  
Operational Director

**DAFTAR ISI**Halaman/  
— Page —**TABLE OF CONTENTS**

1. SURAT PERNYATAAN DIREKSI		1. DIRECTOR'S STATEMENTS LETTER
2. DAFTAR ISI		2. TABLE OF CONTENTS
3. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		3. INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
4. LAPORAN KEUANGAN		4. FINANCIAL STATEMENT
- Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	- Statement of Financial Position
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	- Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
- Laporan Perubahan Ekuitas	4 - 5	- Statements of Changes in Equity
- Laporan Arus Kas	6 - 7	- Statement of Cash Flows
- Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	8	- Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing
- Laporan Sumber dan Penyalinan Dana Zakat	9	- Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds
- Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Keajaiban	10	- Statement of Sources and Uses of Qardhu Husum Funds
- Catatan atas Laporan Keuangan	11 - 97	- Notes to Financial Statements

\*\*\*\*\*



**Laporan Auditor Independen**

Laporan No. 000019/2.0459/AU.1/07/0672-  
 1/1/1/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**PT Bank Aceh Syariah**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisaf kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Independent Auditors' Report**

Report No. 000019/2.0459/AU.1/07/0672-  
 1/1/1/2022

Shareholders, Board of Commissioners, and Directors,  
**PT Bank Aceh Syariah**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Aceh Syariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of change in equity, statement of cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, source and distribution of zakat funds, and source and uses of qaradatul hasanah funds for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's responsibility for the financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditors' responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.



Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, acrite memperhatikan pengendalian internal yang relevan dengan penyajian dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk memastikan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas seringktyasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengungkapan atas ketepatan berbagai kebijakan yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengungkapan atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyatakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan reinter menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, PT Bank Aceh Syariah tanggal 31 Desember 2021 dan kinerja keuangan serta arus kas, rekonstruksi, pendapatan dan biaya hasil, sumber dan peyalanan dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana tabahkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Mati Izan**

Laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 11 Februari 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

*In making their risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of its financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Aceh Syariah as of December 31, 2021 and their financial performance and cash flows, reconstitution of income and revenue sharing, source and distribution of zakat funds for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Other Matter**

*The financial statements of the PT Bank Aceh Syariah for the year ended December 31, 2020 have been audited by another independent auditor who in his report dated February 11, 2021 expressed an unmodified opinion on the financial statements.*

Haijuntana dan Rekan

Padri Achjarsyah CA, CPA  
 Registrasi Akuntan Publik No. AP.0672  
 Public Accountant Registration No. AP.0672



Jakarta

28 Januari 2022 / Januari, 28, 2022

	Catatan Aneks	31 Desember/ December 31 2021	31 Desember/ December 31 2020	
<b>ASSET</b>				<b>ASSETS</b>
Kas	2a, 3	2.053.242.386.147	1.556.645.962.764	Cash
Uang pada Bank Indonesia	2a, 2b, 2c, 4	1.175.543.297.478	855.243.761.279	Current Account Bank Indonesia
Guru pada Bank Lain	2a, 2d, 5	42.646.269.655	10.287.355.650	Current Account other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2a, 2g, 6	2.407.265.000.000	2.255.671.000.000	Placement in Bank Indonesia and other Banks
Surat-surat berharga	2b, 7	5.394.689.659.036	5.043.630.083.581	Marketable securities
Piutang				Receivables:
Adambalah - setelah dikurangi margin ditangguhkan 2021 Rp 8.436.948.540.285 2020 Rp 8.621.074.654.201	2a, 2i, 8	44.873.771.319.148	53.527.912.714.109	Murabahah - after deducting a deferral Margin 2021 Rp 8.436.948.540.285 2020 Rp 8.621.074.654.201
Cadangan kerugian penurunan nilai	2c, 8	(171.980.225.631)	(171.308.666.878)	Allowance for impairment losses
		44.701.291.093.517	53.356.604.047.291	
Pembayaran Murabahah	2a, 2k, 9	2.359.571.250.624	1.681.185.020.575	Murabahah Financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	2a, 9	(52.719.297.142)	(63.745.502.566)	Allowance for impairment losses
		2.306.851.953.482	1.617.439.518.009	
Pinjaman Qardh	2a, 2j, 10	110.227.023.177	68.608.436.499	Qardh
Piutang Sewa	2a, 2l	-	7.241.924	Lease Receivables
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi depresiasi				Fixed assets - net of accumulated depreciation
2021 Rp 1.276.479.821 2020 Rp 901.689.815	2a, 2n, 11	2.673.229.179	1.540.510.152	2021 Rp 1.276.479.821 2020 Rp 901.689.815
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(380.806)	Allowance for impairment losses
		2.673.229.179	1.540.129.346	
Aset tetap - sudah dikurangi akumulasi penyusutan				Fixed assets - net of accumulated depreciation
2021 Rp 350.001.715.346 2020 Rp 321.146.131.898	2a, 3p, 12	275.246.502.643	281.162.357.761	2021 Rp 350.001.715.346 2020 Rp 321.146.131.898
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi amortisasi				Intangible assets net of amortization
2021 Rp 8.554.159.830 2020 Rp 7.218.562.191	2g, 13	1.069.345.182	2.404.642.587	2021 Rp 8.554.159.830 2020 Rp 7.218.562.191
Aset pajak tangguhan	2ab, 17d	210.328.843.510	231.991.872.057	Deferred tax assets
Aset lain-lain	2r, 14	289.440.705.352	241.131.274.635	Other assets
Jumlah Aset		<u>28.170.824.805.198</u>	<u>25.490.962.623.841</u>	Total Assets

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang  
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements  
 are an integral part of the financial statement

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali  
 dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)**  
**AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise  
 stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31 2021	31 Desember/ December 31 2020	
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas segera	2a, 2c, 15	136.252.049.429	226.768.941.227	<i>Current liabilities</i>
Bagi hasil dana syariah temporer dan bonus modal yang belum yang belum dibagikan	2a, 2c, 2e, 16	4.451.408.766	9.755.790.005	<i>Undistributed third parties' share on return of temporary syariah fund and modal bonus</i>
Simplesan nasabah				<i>Deposits customers</i>
Giro wadiah	2c, 18	5.082.242.055.128	828.542.644.269	<i>Wadiah demand deposit</i>
Tabungan wadiah	2c, 19	357.798.705.456	176.932.780.629	<i>Wadiah savings deposit</i>
Simplesan bank lain	2a, 2c, 20	22.228.218.402	21.583.709.252	<i>Deposits other banks</i>
Pembayaan yang diterima	2c, 21	199.644.158.518	121.036.816.741	<i>Received financing</i>
Surat berharga yang diterbitkan	22	300.000.000.000	50.000.000.000	<i>Securities issued</i>
Utang pajak	2a, 24a, 17b	31.356.169.595	36.483.184.007	<i>Taxes payables</i>
Liabilitas lain-lain	2a, 23	415.197.325.366	859.467.024.874	<i>Other liabilities</i>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>1.719.176.430.460</b>	<b>2.430.578.891.547</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>DANA SYARIAH TEMPORER</b>				<b>TEMPORARY SYARIAH FUND</b>
Giro Mudharabah	2c, 24	6.356.551.098.952	5.743.515.697.224	<i>Mudharabah current accounts</i>
Tabungan Mudharabah	2c, 25	10.217.173.561.899	9.021.457.691.509	<i>Mudharabah savings accounts</i>
Urahan Mudharabah	2c, 26	5.984.743.348.395	5.288.587.768.722	<i>Mudharabah time deposits</i>
<b>Jumlah Dana Syariah Temporer</b>		<b>22.558.468.009.146</b>	<b>20.053.561.127.455</b>	<b>Total Temporary Syariah Fund</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham	2a, 27	1.100.987.430.000	1.079.543.193.000	<i>Share capital</i>
Utang modal sebelum modal	28	223.865.000.000	21.444.260.000	<i>Liabilities for future stock subscription</i>
Tambahan seluran modal		4.438.748.546	4.438.748.546	<i>Additional paid in capital</i>
Penghasilan komprehensif lain saldo laba		(145.319.633.883)	(157.704.952.849)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Ditentukan pengembaliannya		1.145.429.027.526	1.079.797.321.303	<i>Retained earnings</i>
Belum ditentukan pengembaliannya		584.281.023.003	453.312.469.806	<i>Appropriated</i>
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>2.843.681.595.492</b>	<b>2.481.931.096.866</b>	<b>Total Equity</b>
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syariah Temporer, dan Ekuitas</b>		<b>28.178.825.805.198</b>	<b>25.488.962.623.808</b>	<b>Total Liabilities, Syariah Temporary Fund, and Equity</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements  
are an integral part of the financial statements



**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPRESIF LAINNYA**

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir  
 Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER**  
**COMPREHENSIVE INCOME**

For The Years Ended  
 December 31, 2021 and 2020  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise)

		31 Desember/ December 31 2021	31 Desember/ December 31 2020	
<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUTUABAH</b>				<b>REVENUE FROM FUND AS MUTUABAH</b>
Pendapatan Mutuabah	2a, 29	1.576.064.090.567	1.638.692.870.222	Mutuabah revenue
Berdasarkan lagi hasil penyertaan	2a, 29	451.711.519.933	160.536.541.470	Management revenue sharing
Pendapatan sewa ijazah	2a, 31	8.216.588.161	4.567.657.718	Diploma revenue
Pendapatan operasi lainnya	2b, 32	378.787.825.607	345.705.020.853	Other than operating revenue
Jumlah pendapatan pengelolaan dana sebagai pendistrib		2.265.690.044.268	2.529.869.140.063	Total revenues from fund as Mutuabah
Link tarik keajaiban				Draw part of share on
Link hasil data efektif temporer	2a, 33	(433.638.701.613)	(566.091.196.253)	return of temporary-effective funds
Link bagi hasil milik Bank		(1.732.041.336.655)	(1.565.766.941.812)	Bank's share in profit sharing
<b>PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>				<b>OTHER OPERATING INCOME</b>
Fondopasar operasional lainnya	34	157.586.096.959	325.446.156.553	Other operating income
Jumlah pendapatan usaha lainnya		157.586.096.959	325.446.156.553	Total other operating income
<b>BEBAN USAHA</b>				<b>OPERATING EXPENSES</b>
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	35	(39.385.722.617)	(50.194.183.477)	Allowance for impairment losses on productive financial assets
Beban gaji dan tunjangan	36	(817.022.821.575)	(715.113.801.706)	Salaries and benefits
Beban sewa dan administrasi	37	(568.617.705.597)	(338.926.245.823)	General and administrative
Beban bonus waliah/bonus	38	(1.538.439.325)	(1.333.688.794)	Bonus waliah/bonus
Beban lainnya	39	(129.990.291.352)	(168.634.662.143)	Other expenses
Jumlah beban operasional		(1.887.214.980.470)	(1.874.202.577.975)	Total operating expenses
<b>LABA USAHA</b>		<b>582.412.455.144</b>	<b>417.411.532.432</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
Pendapatan dari usaha - bersih	40	(240.198.185)	2.663.672.078	Non operating income - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>342.214.269.959</b>	<b>420.074.604.509</b>	<b>INCOME BEFORE TAX</b>
Beban pajak penghasilan				Tax expenses
Kini	2a, 17a	115.875.394.840	92.419.560.200	Current
Tangguhkan	2a, 17b	(1.810.162.931)	(5.507.586.513)	Deferred
Beban pajak penghasilan - bersih		(117.685.557.771)	86.911.973.687	Income tax expenses - net
Laba bersih tahun berjalan		<b>224.528.712.188</b>	<b>333.162.630.822</b>	Net income current year
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF LAINNYA</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pas-pas yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi				Items that will not be reclassified in profit or loss
Pengukuran kembali atas program investasi pensiun		14.199.072.825	(118.432.054.276)	Remeasurements for long-term benefits obligations
Pajak penghasilan tertunda		(1.123.736.079)	21.199.892.709	Income tax related
Pas-pas yang akan diklasifikasikan ke laba rugi				Items that will be reclassified in profit or loss
Aset keuangan tersedia untuk dijual		(1.215.474.754)	108.321.443.517	Financial Assets Available For Sale
Ajuste penghasilan terkait		367.404.646	(23.818.125.378)	Income tax related
Substansi keuangan terkait		-	-	Substance measured at fair value through other comprehensive income
Wajar terkait penghasilan komprehensif lain		2.384.541.638	-	Income tax related
Pajak penghasilan terkait		(636.796.159)	-	Income tax related
		<b>12.394.948.966</b>	<b>(7.927.841.438)</b>	
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF</b>		<b>444.511.910.376</b>	<b>325.438.637.486</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
Laba per saham	2a, 51	3,960	3,426	Earnings per share

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements

Catatan /Notes	31 Desember 2021/ December 31, 2021							
	Modal dasar/ Paid in capital	Uang muka saham/ mudab Share capital advance	Tambahan saham modal/ Addition of paid in capital	Labu komprehensif/ Comprehensive income	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah/ Total	
					Saldo dikembala/ penggunaannya/ Appropriated	Belum dikembala/ penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo awal 1 Januari 2021/ Beginning balance, January 1, 2021	27	1.679.561.175,000	23.444.260.000	4.423.748.540	(157.306.581.843)	1.078.790.331.263	456.512.469.806	2.481.833.399.866
Uang muka saham modal/ Share capital advance	28	-	223.855.000,000	-	-	-	-	223.861.000,000
Reklasifikasi ke modal dasar/ Reclassification to paid in capital	27	21.444.260,000	(21.444.260,000)	-	-	-	-	-
Peninggian laba tahun lalu/ Profit sharing last year	50	-	-	-	-	(339.758.480,813)	(339.758.480,813)	(339.758.480,813)
Tambahan cadangan umum/ Additional reserves	50	-	-	-	-	66.031.696,163	-	66.031.696,163
Aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak/ Financial assets available for sale, after tax	-	-	-	(948.070,306)	-	-	-	(948.070,306)
Sulut dikur pajak nilai wajib melebihi penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulut tersedia untuk nilai komprehensif pendapatan income, after tax	-	-	-	2.257.742,470	-	-	-	2.257.742,470
Pengukuran kembali dan penganti nilai dan pajak/ Revaluation surplus on defined benefit plan, after tax	-	-	-	-	11.075.276,806	-	-	11.075.276,806
Labu komprehensif tahun berjalan/ Net income current year	-	-	-	-	-	392.127.034,310	392.127.034,310	392.127.034,310
Saldo akhir 31 Desember 2021/ Ending balance, December 31, 2021		1.700.987.436,000	233.865,000,000	4,418,748,510	(445,319,633,783)	1.145,429,837,526	514,281,023,393	2,869,681,596,492

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statement

31 Desember 2020/ December 31, 2020								
Cicilan / Note	Modal disetor / Paid in capital	Utang modal ketoran modal / Share capital advance	Penyisihan saham modal / Additional paid in capital	Laba komprehensif / Comprehensive income	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah/ Total	
					Sudah dibebankan penggunaannya/ Appropriated	Belum dibebankan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo awal 1 Januari 2020/ Beginning balance January 1, 2020	27	1.051.795.550.000	17.745.820.000	1.438.748.546	(140.976.730.441)	938.682.017.067	578.450.580.469	2.447.167.756.641
Tuang modal seluruh modal/ Share capital advance	28	-	21.444.250.000	-	-	-	-	21.444.250.000
Reklasifikasi ke modal disetor/ Reclassification to paid in capital	27	17.147.620.000	(17.747.620.000)	-	-	-	-	-
Pembagian dividen tahun/ Profit sharing last year	30	-	-	-	-	-	(452.326.571.476)	(452.326.571.476)
Tambahan cadangan umum/ Additional reserve	30	-	-	-	-	140.115.314.295	-	140.115.314.295
Aset keuangan tersebut untuk dijual, setelah pajak/ Financial assets available for sale, after-tax	-	-	-	-	84.504.318.153	-	-	84.504.318.153
Pengakuan kembali atas program imbalan pensiun/ Reversal of net defined benefit plan	-	-	-	-	(92.232.161.567)	-	-	(92.232.161.567)
Laba bersih tahun berjalan/ Net income for the year	-	-	-	-	-	-	233.158.480.815	233.158.480.815
Laba bersih disesuaikan/ Adjusted net income	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo akhir 31 Desember 2020/ Ending balance, December 31, 2020	-	1.070.543.170.000	21.444.260.000	4.438.748.546	(157.784.882.840)	1.478.797.331.361	455.322.469.816	2.481.531.396.866

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

For accompanying Notes to Financial Statements  
 are an integral part of the financial statements

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**

31 Desember 2021 dan 2020

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**STATEMENTS OF CASH FLOW**

December 31, 2021 and 2020

And For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Nota	2021	2020	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan margin murabahah dan bagi hasil dari nasabah	2.165.680.044.268	2.752.229.634.360	Receipts of murabahah margin and profit sharing
Pembayaran margin murabahah dan bagi hasil kepada nasabah	(433.638.707.612)	(564.093.196.251)	Payments for murabahah margin and profit sharing
Penerimaan lainnya	(229.220.817.662)	101.434.314.917	Other receipts
Pembayaran tenaga kerja dan Pulutan	4837.722.821.579)	(666.618.562.179)	Payments for employee salary
Pembayaran administratif dan umum	(547.903.719.567)	(661.066.646.534)	Payments for general and administrative expenses
Penyaluran pembiayaan dan penempatan	(767.540.721.507)	(594.826.274.081)	Payments for financing distribution and placements
Penerimaan (Pencairan) dana nasabah	(274.192.464.711)	(659.415.846.901)	Receipts (Payments) for customer deposits
Penerimaan pihak ketiga	2.022.539.873.747	1.122.413.921.482	Receipts from third parties
Pembayaran pinjaman yang diterima	78.608.343.577	67.947.874.127	Payment for debts
Pembayaran pajak:			Payments for taxes:
Anggaran pajak tahun berjalan	(119.343.232.649)	(92.415.268.289)	Income tax installments
Arahan kas tahun diungkapkan dari aktivitas operasi	<u>1.446.542.769.804</u>	<u>25.589.148.721</u>	Cash receipts from (paid to) operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
pengurangan (penambahan) aset berharga	(351.069.575.355)	(790.884.916.160)	Reduction (addition) of intangible assets
pengurangan (Penambahan) aset tetap	6.115.855.118	(401.931.742.732)	Reduction (addition) of fixed assets
pengurangan (Penambahan) aset tak berwujud	<u>1.335.297.705</u>	<u>(1.533.132.151)</u>	Reduction (Addition) of intangible assets
Aset kas bersih dihimpun (dijunkikan) untuk aktivitas investasi	<u>(343.608.422.542)</u>	<u>(833.349.790.543)</u>	Net cash used from investing activities

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements  
are an Integral part of the financial statement

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023 dan 2022**  
**Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
*(Data dan deskripsi Rujukan, kecuali dinyatakan lain)*

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**STATEMENTS OF CASH FLOW**  
**December 31, 2023 and 2022**  
**And For The Year Then Ended**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	<b>Catatan/ Notes</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan uang muka, tambahan setoran modal dan penghasilan kompensasi lainnya		236.249.970.966	39.192.080.000	Receipt of advances, additional capital deposits and other compensation income
Perolehan (Pembayaran) dari surat berharga yang diterbitkan		150.000.000.000	(250.006.088.050)	Receipt (Payment) of securities issued
Dividen		(226.541.166.952)	(265.379.565.603)	Payments for dividends
Tanggungan Daerah		(19.989.508.849)	(73.415.844.288)	Payments to Regional Government
Keseluruhan Ekspansi Arus kas bersih		(19.989.508.849)	(73.415.844.288)	For employee welfare
ditransfer (dipinjamkan) untuk aktivitas pendanaan		119.723.186.326	(523.019.177.179)	Net cash flow generated (used) for financing activities
<b>Kenaikan pada Kas dan Setara Kas</b>		<b>1.222.637.534.587</b>	<b>(1.330.779.629.001)</b>	<b>Increase of Cash and Cash Equivalents</b>
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2c, 2f, 2g, 3, 4, 5, 6	4.656.248.029.693	5.987.027.658.694	Cash And Cash Equivalents Beginning Balance
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2e, 2f, 2g, 3, 4, 5, 6	5.878.905.553.280	4.656.248.019.693	Cash And Cash Equivalents Ending Balance
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				Cash and cash equivalents as end of year are as follows:
Kas	2b, 3	2.053.212.386.147	1.556.445.902.764	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b, 2e, 4	1.375.541.297.478	855.543.761.279	Current account Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2b, 2f, 5	42.846.869.635	10.387.355.650	Current account other banks
Perempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2d, 2e, 2g, 6	2.407.305.000.000	2.237.871.000.000	Placements at Bank Indonesia and other banks
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>		<b>5.878.905.553.280</b>	<b>4.656.248.019.693</b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements  
are an integral part of the financial statements

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**LAPORAN REKONSILIASI**  
**PENDALATAN DAN BAGI HASIL**  
**Utuk Tahun-tahun Yang Berakhir**  
**31 Desember 2021 dan 2020**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**STATEMENTS OF RECONCILIATION**  
**OF REVENUE AND PROFIT SHARING**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021 and 2020**  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	2021	2020	
Pendapatan Ilahia	29,30,31,		Share of profit sharing
Utama Penguang	32		Share of profit sharing
Pendapatan cabang			Share of profit sharing
bagian yang kas	2.165.680.044,208	2.129.802.140,063	Share of profit sharing
atau setara lainnya			Share of profit sharing
belanja lainnya			Share of profit sharing
Pendapatan margin			Share of profit sharing
monofundji			Share of profit sharing
Pendapatan lainnya	173.646.930,794	(73.077.900,185)	Share of profit sharing
Bagi Bagi Hasil	-	-	Share of profit sharing
- Pembinaan Akademi	-	-	Share of profit sharing
- Pembinaan Karyawan	-	-	Share of profit sharing
Pendapatan Joroh	(33.651,713)	(8.641,819)	Share of profit sharing
Lainnya	(53.617,670,430)	(48.159,483,216)	Share of profit sharing
Jumlah	(129.277,622,537)	(116.271,631,250)	Share of profit sharing
Penambahan			Share of profit sharing
Penjualan periode			Share of profit sharing
sebelumnya yang			Share of profit sharing
kannya diterima yaitu			Share of profit sharing
periode berjalan			Share of profit sharing
Pendapatan yang			Share of profit sharing
terjadi untuk bagi hasil	2.094.407.421,333	2.011.650.508,844	Share of profit sharing
Bagi Hasil yang diperoleh			Share of profit sharing
Duk Bank	1.732.281.336,655	1.565.768.943,812	Share of profit sharing
Bagi Hasil	432.638.707,613	524.092.196,281	Share of profit sharing
Dokter atau			Share of profit sharing
Bagi Hasil atau atau	429.581.298,927	434.337.406,246	Share of profit sharing
yang akan yang sudah			Share of profit sharing
didistribusikan			Share of profit sharing
Bagi Hasil atau atau	4.457.408.786	9.755.790.005	Share of profit sharing
didistribusikan	(43.638.707,613)	(64.993.196,281)	Share of profit sharing
Jumlah	4.413.770.078,173	9.690.796.808,724	Share of profit sharing

Salah satu Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

This accompanying Note is an integral part of the financial statements

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**LAPORAN SUMBER DAN**  
**PENYALURAN DANA ZAKAT**  
**Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**STATEMENTS OF SOURCES AND**  
**DISTRIBUTION OF ZAKAH FUNDS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021 and 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember/ December 31 2021	31 Desember/ December 31 2020	
<b>Sumber dana zakat</b>			<i>Sources of zakah funds</i>
Internal Bank	-	-	<i>Internal Bank</i>
Eksternal Bank	1.254.518.482	1.163.410.783	<i>External Bank</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.254.518.482</b>	<b>1.163.410.783</b>	<i>Total</i>
<b>Penyeluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat:</b>			<i>Distribution of zakah funds to zakat management entities:</i>
Lembaga Amil Zakat	(501.769.269)	(458.023.029)	<i>Amil Zakat Institutions</i>
<b>Jumlah</b>	<b>(501.769.269)</b>	<b>(458.023.029)</b>	<i>Total</i>
<b>Kenaikan</b>	<b>752.749.213</b>	<b>705.387.754</b>	<i>Increase</i>
<b>Saldo awal</b>	<b>1.220.268.459</b>	<b>514.880.705</b>	<i>Beginning balance</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.973.017.672</b>	<b>1.220.268.459</b>	<i>Ending balance</i>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan . 9 .

The accompanying Notes to Financial Statements are an Integral part of the financial statements.

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**LAPORAN SUMBER DANA DAN**  
**PENGUNAAN DANA KRAJIKAN**  
**Utang Jangka-tahap Yang Berakumulasi**  
**Per 31 Desember 31 Desember 2021 dan 2020**  
*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**STATEMENTS OF SOURCES AND**  
**USES OF QUANTUM HASAN FUNDS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021 and 2020**  
*(Expressed in Rupiah, unless otherwise noted)*

	31 Desember/ December 31 2021	31 Desember/ December 31 2020	
<b>Sumber dana</b>			<b>Sources of funds</b>
<b>Keuntungan</b>	22		<b>Income funds</b>
Jual	28.435.918	28.219.919	Profit
Demula	1.523.625.836	171.900.385	Penalties
Penjualan aset bulat	3.789.802.515	2.986.985.549	Non-voting securities
Lain-lain	429.799	21.499	Others
<b>Jumlah</b>	<b>5.342.894.068</b>	<b>3.187.116.952</b>	<b>Total</b>
<b>Penggunaan dana</b>			<b>Uses of funds</b>
<b>Kebijakan</b>			<b>Assure funds</b>
Dana Keluaran	(245.801.001)	(209.679.237)	General usage
Produktif	(1.034.414.700)	(852.526.700)	productive funds
Sumbangan	(2.835.802.689)	(1.069.075.145)	Donations
Kepanangan curuan	(4.115.023.309)	(2.131.281.072)	Public benefits
<b>Jumlah</b>	<b>(7.230.641.699)</b>	<b>(4.262.566.154)</b>	<b>Total</b>
<b>Keuntungan</b>	1.227.070.678	1.055.835.880	<b>Increase</b>
<b>Saldo awal</b>	19.806.002.106	18.846.166.216	<b>Regulatory balance</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>20.323.072.784</b>	<b>19.096.402.106</b>	<b>Ending balance</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the financial statements.



**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2021 and 2020**  
**And For The Year Then Ended**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

## 1. INFORMASI UMUM

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah sebagai salah satu prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 70/PRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah merundingi Muda Pangrehatan Tawakalan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan akta, PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV pada tanggal 2 Februari 1958 memperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No.12096/BCUM/5 dan Pengesahan Bentuk Badan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. JA 5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, yang saat itu dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Palom, Abdulah Bin Muhammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditemukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut diungkapkan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional secara berencana.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, S.H. No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh ("Bank"). Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor: C-8260/HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, S.H. No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditetapkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar.

## 1. GENERAL INFORMATION

The idea to establish a Regional Government Bank was initiated by the Transitional Regional Government Council of Aceh Province (now called Provincial Government of Aceh). After obtaining the approval from the Transitional Regional House of Representatives (DPRD) of Aceh Province in Kutaraja (now Banda Aceh) under decree Number 70/PRD/5 dated September 7, 1957, a group of individuals representing the Regional Government met Kuala Pangrehatan Tawakalan, deputy notary in Kutaraja, to establish a Bank named "PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV" with authorized capital of Rp 25,000,000.

After several amendments to the notarial deed, on February 2, 1960 PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV obtained license from the Ministry of Finance under his decree No.12096/BCUM/5 and approval of legal entity from the Minister of Justice under his decree No.JA 5/22/9 dated March 18, 1960, which at that time was led by Teuku Djafar as Director and the Commissioners consisted of Teuku Soelaiman Palom, Abdulah Bin Mohamad Hoesin and Moehammad Sanusi. With the enactment of Law No. 13/1962 regarding the Fundamentals Regulations of Regional Development Bank, all Regional Government owned banks must comply with the law.

To comply with the above regulation, the Regional Government of the Special Region of Aceh has issued the Regional Government Regulation No. 12 of 1963 as the legal basis for the establishment of Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. The regulation stated that the purpose of the establishment of Bank Pembangunan Daerah Aceh is to provide financing for the implementation of regional development efforts in the framework of national development plan.

The legal status transformation to a Limited Liability Company was issued under the notarial deed of Husni Usman, S.H., No. 55 dated April 21 1999 under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh abbreviated as PT Bank BPD Aceh ("The Bank"). The transformation was approved by the Minister of Justice under his Decision Letter No. C-8260/HT.01.01.TH.99 dated May 6, 1999.

According to the Deed of Establishment the authorized capital of PT Bank BPD Aceh amounted to Rp150 billion. According to the notarial deed of Husni Usman, S.H., No. 42 dated August 30, 2003, the authorized capital has been increased to Rp500 billion.

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

Bank tersebut Unit Usaha Syariah (ULUS) dimana Bank memiliki aktivitas perbankan syariah seluruh dimemayunya satu Bank Indonesia No.614/Dp/BNB tanggal 19 Oktober 2014 mengenai Trio Penilaian Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan syariahnya berdasarkan prinsip syariah berdimulai pada 5 November 2004.

Bank tersebut aktivitas pertukaran diakui konvensional menjadi Syariah yang terwujud dalam Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor Syariah Rahmat S.H. No. 47 tanggal 22 Juni 2016 tentang Perubahan Keputusan Rapat Tahun Penyelenggaraan Saluran Lahir Basis PT Bank Aceh. Perubahan tersebut, antara lain:

The Bank changed its banking activities from Conventional to Shariah as stated in the Amendment to the Articles of Association with the Notary Deed of Nurul Rahmat S.H., No. 47 dated 22 June 2016 concerning the Decision of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Aceh. These changes among others:

- a. "Perubahan nama Bank menjadi "PT Bank Aceh Syariah".
- b. Perubahan maksud dan tujuan usaha Bank dari "Bidang Usaha Perkantoran Konvensional menjadi usaha Perbankan Syariah".

- a The change of the Bank's name became PT Bank Aceh Syariah
- b. The amendment to the purpose and objective from conventional bank to sharia bank.

- c. Penambahan modal dasar Bank dari Rp. 5 triliun menjadi Rp. 3 triliun.

- c The increase of authorized capital from Rp. 5 trillion to Rp. 3 trillion.

Bank telah memperoleh izin Usaha Bank Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris OJK No KEP-44/D.01/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Perubahan Keputusan Tindakan Koordinasional Majelis Besar Ulama Syariah PT Bank Aceh. Hal ini efektif menulisi aktivitas perbankan syariah pada tanggal 17 September 2016. Hal ini sesuai Keputusan Bank untuk beroperasi secara penuh sebagai Bank Ulama Syariah.

The Bank has obtained the Sharia Bank Business License from the Financial Services Authority as stipulated in the Decree of the Commissioner of Financial Services Authority No. KEP-44/D.01/2016 dated September 1, 2016 concerning the Amendment to the Shariah Commercial Bank Business and Shariah Commercial Bank of PT Bank Aceh. The Bank commenced its activities of sharia banking on September 17, 2016. This is in line with the Bank's readiness to operate fully as a Sharia Commercial Bank.

Anggaran dasar Bank telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Nomor Dr. Zedra Akhmadikhan, SH, SpK, No. 4 Tanggal 14 Juli 2021 tentang perubahan susunan pengurus PT Bank Aceh. Akta tersebut telah menandatangani Penetapan Perantaraan dan Menteri Hukum dan HAM No A.11.14111.19-14.1104 tanggal 30 Juli 2021.

The Bank's Articles of Association have been amended several times and most recently by the Notary Deed of the Notary Akhmadikhan SH, SpK, No. 4 July 14, 2021 related to the changes in the composition of the management of PT Bank Aceh. The deed has received notification of acceptance from the Minister of Law and Human Rights No. 1171/11.03-043/2021 July 14, 2021.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan Kie Mohid Hasan No.99, Banda Aceh, Pada 31 Desember 2021 dan 2020, Bank memiliki kantor cabang dan perwakilan sebagai berikut:

The Bank's head office is located at Jalan Kie Mohid Hasan No. 99, Banda Aceh. As of December 31, 2020 and 2019, the Bank had the following branches and representative offices:

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2021 and 2020**  
**And For The Year Then Ended**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)**

**1. GENERAL INFORMATION (Continued)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Kantor Cabang	27	26	Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	95	90	Sub Branch Office
Kantor Kas	27	31	Cash Office
Payment Point	25	19	Payment Point
Mobil Kas Keliling	12	12	Mobile Cash Office
Anjungan Tuna Mandiri	316	301	Automatic Teller Machines
CRM	12	-	Cash Receipt Machines

Rincian Kantor cabang Bank Aceh Syariah, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Details of branch offices of Bank Aceh Syariah as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:*

- 1) KSO/Operational Head Office Banda Aceh
- 2) Cabang/Branch Jember
- 3) Cabang/Branch Sula Way
- 4) Cabang/Branch Merdeka Lhokseumawe
- 5) Cabang/Branch Langsa
- 6) Cabang/Branch Kuala Simpang
- 7) Cabang/Branch Takengon
- 8) Cabang/Branch Bener Meriah
- 9) Cabang/Branch Meulaboh
- 10) Cabang/Branch Calang
- 11) Cabang/Branch Laram
- 12) Cabang/Branch Kutacane
- 13) Cabang/Branch Blangkejeren

- 14) Cabang/Branch Sigi
- 15) Cabang/Branch Meunasie
- 16) Cabang/Branch Blangpintu
- 17) Cabang/Branch Huta
- 18) Cabang/Branch Sabang
- 19) Cabang/Branch Tapak Tuan
- 20) Cabang/Branch Simpit
- 21) Cabang/Branch Sibulussalam
- 22) Cabang/Branch Singapuranegara Medan
- 23) Cabang/Branch Idi
- 24) Cabang/Branch Banda Aceh
- 25) Cabang/Branch Sawadua Lhokseumawe
- 26) Cabang/Branch N. Parnesi Medan
- 27) Cabang Khusus/Special Branch Jakarta\*

\* Penetapan cabang pada tahun 2021. Adang November 2021

Busana Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2021 telah ditetapkan berdasarkan akta pernyataan Keputusan pemegang saham Nomor 3 tanggal 02 Agustus 2019 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/1778/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan pejabat komisaris utama PT Bank Aceh Syariah dan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Nomor 2 tanggal 13 Oktober 2018 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/1184/2018 tentang pengangkatan Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah periode 2018-2022, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/651/2020, 584/682/2020, 584/683/2020, 584/684/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang pengangkatan anggota Direksi PT Bank Aceh Syariah periode 2020-2024 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/1296/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan ketua dan anggota Dewan Pengawas PT Bank Aceh Syariah, sebagai berikut:

*The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2021 has been determined based on the deed of statement of shareholder's decision Number 3 dated August 2, 2019 and Decree of the Governor of Aceh Number 584/1778/2021 dated December 14, 2021 regarding the appointment of the main commissioner of PT Bank Aceh Syariah and the Deed statement of Decision of the Extraordinary (General) Meeting of Shareholders (EGMS LB) Number 2 dated October 13, 2018 and Decree of the Governor of Aceh Number 584/1184/2018 regarding the appointments of the President Director of PT Bank Aceh Syariah for the period 2018-2022, based on the Decree of the Governor of Aceh Number 584/681/2020, 584/682/2020, 584/683/2020, 584/684/2020 dated 31 January 2020 regarding the appointment of members of the Board of Directors of PT Bank Aceh Syariah for the 2020-2024 period and Aceh Governor Decree Number 584/1296/2020 dated 13 July 2020 regarding the determination chairman and members of the Supervisory Board of PT Bank Aceh Syariah as follows:*

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut**  
*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2021 and 2020**  
**And For The Year Then Ended**  
*(Expressed in English, unless otherwise stated)*

	1. GENERAL INFORMATION (Continued)	
	2021	2020
<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Board of Commissioners</b>
Komisaris Utama	Teguhaji	Mirza Taheri
Komisaris Independen	Musa Tahari	Abdussamad
Komisaris Independen	Abdussamad	Muslim A Djali
Komisaris Independen	Muslim A Djali	-
<b>Dewan Direksi</b>		<b>Board of Directors</b>
Direktur Utama	Esair Sulaiman	Fitri Subhana
Direktor Operasional	Lazuardi	Lazuardi
Direktor Bisnis	Bob Riandri	Bob Riandri
Direktur Dana dan Jasa	Anni Hassan	Amal Hassan
Direktur Koperasi	Yusni Dingsyah	Yusni Dingsyah
<b>Dewan Penyelia Syariah</b>		<b>Sharia Supervisory Board</b>
Ketua	Nyohrol Akbar	Syahrul Akbar
Anggota	Alysa' Abdulkar	Alysa' Abdulkar
Anggota	Muhaimad Yasi Yusuf	Muhaimad Yasi Yusuf
<b>Komite Audit</b>		<b>Audit Committee</b>
Ketua	Muslim A Djali	Muslim A Djali
Anggota	Teguhaji	Tasmin A Kabin
Anggota	Fitri An-Rahm	Syaridin
Anggota	Syahrudin	Fitri Yuzita
Anggota	Fitri Yuzita	-
<b>Komite Remerasi dan Yuridis</b>		<b>Remercession and Jurisprudence Committee</b>
Ketua	Mirza Taheri	Mirza Taheri
Anggota	Abdussamad	Abdussamad
Anggota	Salsun A Djali	Muslim A Djali
Anggota	Teguhaji	Pemimpin Div. SDF
Anggota	Participic Div. SDF	-
<b>Ketelle Pemulihan Risiko</b>		<b>Risk Monitoring Committee</b>
Ketua	Abdussamad	Abdussamad
Anggota	Faisal	Faisal
Anggota	Ruslan Ertadi	Ruslan Ertadi
		<b>Big Monitoring Committee</b>
		Chairman
		Member
		Member

Siswina Yulians Dewa Karisita dan Dinesa elbi adalah pegawai (Kerja Jasa Keluaran dan karyawan Hak Jala tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berjanjil masing masing 1,938 dan 1,969 orang.

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors were approved by the Financial Services Authority and the Regulator as of December 31, 2021 and 2020 amounted to 1,938 and 1,969 people, respectively.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

**a. Basis for preparation of financial statements**

Pernyataan Kepatuhan

Statement of compliance

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2019), "Pernyataan Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019), "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106, "Akuntansi Musyarabah", PSAK No. 107 (Revisi 2019), "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Penyesuaian 2020), "Akuntansi Sahuk", Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persewaan, ISAK No. 102: Peleburan Nilai Utang Murabahah dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSJ) (Revisi 2013).

The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia including Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 101 (Revised 2019), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2019), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 "Accounting for Musyarabah", SFAS No. 107 (Revised 2019), "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (2020 adjustment), "Accounting for Sahuk", Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) No. 101- Recognition of Deferred Mudharabah Revenue Without Significant Risk Related to Inventory Ownership, ISAK 102: Impairment of Murabahah Receivables and other SFAS as long as not contradicting with sharia principles and the Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSJ) (Revised 2013).

Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

The financial statements are presented using historical cost and accrual basis concepts with certain exceptions as follows:

- 1) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang disajikan menggunakan dasar kas.
- 2) Penyusunan laporan arus kas diakui menggunakan dasar kas.

- 1) Calculation of income available for profit sharing are presented using cash basis.
- 2) The preparation of the statement of cash flows is recognized using the cash basis.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

Based on SFAS No. 101 (Revised 2019), a sharia bank's financial statements consist of the following components:

- i. Laporan posisi keuangan;
- ii. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- iii. Laporan perubahan ekuitas;
- iv. Laporan arus kas;
- v. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- vi. Laporan sumber dan distribusi dana bank;
- vii. Laporan sukuks dan penggunaan dana kebajikan;
- viii. Catatan atas laporan keuangan.

- i. Statements of financial position;
- ii. Statement of profit or loss and other comprehensive income;
- iii. Statement of changes in equity;
- iv. Statement of cash flows;
- v. Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
- vi. Statement of sources and distribution of bank funds;
- vii. Statement of source and uses of zakat fund;
- viii. Notes to the financial statements.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows are the financial statements reflecting the commercial bank activities based on sharia principles.

**2. IKHTISAH KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (Tasjidan)**

**a. Basis for preparation of financial statements (Tasjidan)**

**Penyajian Koguliban (Lanjutan)**

**Statement of Financial Position**

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengalokasikan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Teknik penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan penyediaan pada Bank Indonesia dan prampayan pada Bank lain yang jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan, sedangkan nilai diberikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak khusus pengklasifikasi.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method with cash flows classified into cash flows from operating, investing and financing activities. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with home Indonesia and placements with other banks with maturity within 3 (three) months since the date of the report, which are not pledged as collateral and not restricted.

Laporan ekuitas/nilai pemegang dan bagi hasil merupakan rekonstruksi antara perhitungan Bank Syariah yang menggunakan dasar akrual dengan perhitungan yang dihasilkan berupa periodik dan yang menggunakan dasar kas.

The statement of recapitalization of income and shares showing shareholders between the Bank's income which is prepared under accrual basis and prepared showing by fund owner which is prepared under cash basis.

Laporan sumber dan penyediaan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana dan penyediaan ekuitas jangka waktu tertentu serta dasar zakat yang belum disalurkan pada tanggal laporan.

Statement of income and distribution of zakat represents a statement showing the sources and the use of zakat funds in a certain period and the undistributed funds on specific date.

Bank tidak segera langsung menyetorkan fungsi pekerjaan dan zakat, infag dan shalawat dari uang zakat.

The Bank is not directly involved in the management of zakat infag and shalawat funds and zakat has not been paid.

Nilai uang penyertaan dan tanggapan yang diberikan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (IDR). Angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut, nilai dinyatakan secara kaku, adalah diulaskan dalam ribuan Rupiah.

The presentation and financial currency used in the preparation of financial statements is the Indonesian Rupiah (IDR). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are stated in thousands of Rupiah.

Perhitungan Bank, diselaraskan dengan mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekuitas/nilai ekuitas 34.4 terungkap. Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan mata uang tersebut pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal penutupan, nilai dan nilai keuletah dikalikan mata uang asing disesuaikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai yang ditunjukkan oleh Bank Indonesia.

The books of accounts of the Bank are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the Bank operates. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the date the transactions are made. At financial reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Indonesian Rupiah using exchange rate set by Bank Indonesia (Central Bank).

Keuntungan atau kerugian dari yang tidak dikawatirkan dan diperbaiki dalam mata uang yang bersangkutan.

The resulting gain or losses are credited or charged to current operations.

Transaksi valuta asing pada bank syariah (in bar) telah lebih baik secara Bursa dapat dilakukan untuk kepentingan modal dan tidak dibebaskan untuk tujuan spekulatif. Bank tidak mempunyai transaksi hedging pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

The sharia bank is not allowed to enter into foreign currency transactions for speculative purposes except for hedging currency transactions for its activities. The Bank has no hedging transactions as of December 31, 2021 and 2020.

**2. KETENTUAN KEHILANGAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (Lanjutan)**

**a. Basis for preparation of financial statements (Continued)**

**Pengawasan Kepatuhan (Lanjutan)**

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Amandemen, 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

**Statement of compliance (Continued)**

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with PSAK No. 7 (Amendment, 2015) regarding "Related Party Disclosure".

**b. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

**b. Transactions with Related Parties**

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

A party is considered as a related party of the Bank if:

- (1) langsung atau tidak langsung yang memiliki saham atau lebih pemegang saham, atau pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- (2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- (3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai ventura;
- (4) suatu pihak adalah anggota dari personal dari manajemen kunci Bank;
- (5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- (6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau suatu pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- (7) suatu pihak adalah suatu program insentif pasca kerja untuk insentif kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

- (1) a party directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank, (ii) has substantial interest in the Bank that gives significant influence to the Bank; or (iii) has joint control on the Bank;
- (2) an entity is a member of the same group as the Bank;
- (3) a party is a joint venture in which the Bank acts as a venture;
- (4) a party is a member of the key management personnel of the Bank;
- (5) a party is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);
- (6) a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or have significant voting rights in several entities, directly or indirectly which are individuals described in point (4) or (5); and
- (7) a party is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or its related party.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes in the financial statements and the details are presented in Note 45 of the financial statements.

2. KEBIJAKAN KEUANGAN AKUNTANNI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Cadangan Kerugian Pemenuhan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Surat Harta yang dibeli dengan janji dijual kembali, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, giro yang ditawarkan, piutang jarah, piutang ijarah, pinjaman giro, pembelian surat berharga, pembelian asuransi, asuransi, aset yang diperoleh anak jarah, serta kompensasi dan kontingen; yang memiliki risiko penurunan seperti bank pribadi dan jenis of credit (IT) yang tidak dapat dipastikan dan stand-by letter of credit.

Earning assets consist of current deposits and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Syariah Certificates (SBI) and Bank Indonesia Syariah Deposit Facilities (FASBIS). Securities purchased under agreement to resell, current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, purchased receivables,jarah receivables, Islamic receivables, funds of profit, miscellaneous financing investments, assets acquired forjarah and compensation and contingencies which carry financing risk such as bank guarantee, irrevocable letter of credit and stand-by letter of credit.

Aset non-produktif adalah aset bank giro aset produktif yang secara nilai potensial bisa mengalami kerugian akibat suku bunga riak yang rendah atau karena, agunan yang diambil oleh dan sebagai receivable.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss consisting of inter-offer accounts, foreclosed assets and surplus receivables.

Aset produktif dan piutang merupakan aset yang diakui PSAK No. 112 (Revisi 2013) "Aset dan Liabilitas Keuangan Jarak Panjang pada PSAK No.107 "Aset dan Liabilitas Jarak Panjang" dan piutang merupakan aset yang diakui PSAK No. 106 "Aset dan Liabilitas Keuangan Jarak Panjang pada saat berakhirnya periode PSAK 110 (Pengawasan 2010) "Aksiologi Bank" dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga yang diakui pada PSAK 2013.

Earning assets for surmounting receivables are in accordance with SFAS No. 102 (Revised 2019), "Accounting for Receivables". Surplus receivables are in accordance with SFAS No. 107 "Accounting for Jarak", Receivables and Miscellaneous Financing are in accordance with SFAS No. 106 "Accounting for Receivables". SFAS No.108 "Accounting for Receivables" and Revisions in receivables are in accordance with SFAS No.110 (Revised 2010) "Accounting for Surplus". and surplus assets for current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and investments with other banks and investments in marketable securities are in accordance with SFAS 2013.

Bank menggunakan metode akrual untuk aset produktif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired on the date of statement of financial position.

Aset keuangan merupakan aset yang diakui jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang menunjukkan telah terjadi setelah pengakuan aset keuangan dan penilaian tersebut berdampak pada arus kas masa datang. Aset akan kehilangan yang dapat diestimasi secara wajar.

Financial assets are impaired when an objective evidence indicates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

(1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur atau pihak penjamin;

(1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (Lanjutan)

- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- (3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sekahurug, dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak penjamin, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak pemegang yang tidak mungkin diperoleh jika pihak penjamin tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (4) terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (5) Hilangnya masa aktif dari aset keuangan akibat kemilikan keuangan; atau
- (6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang; dan kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset keuangan, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - a. memburuknya status pembayaran pihak penjamin dalam kelompok tersebut; dan
  - b. memburuknya status pembayaran pihak penjamin dalam kelompok tersebut; dan

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

c. Allowance for Impairment Losses on Holding and non-Earning Assets (Continued)

- (1) Any breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
- (2) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;
- (3) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- (4) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties; or
- (5) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio, including:
  - a. adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
  - b. adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and

The estimated period between the occurrence of an event and loss identification is determined by the management for each identified portfolio. In general, the period varies from 3 (three) months to 12 (twelve) months. In exceptional cases, longer periods are necessary.

The Bank first determines whether there is an objective evidence of impairment on financial assets that are individually significant and individually or collectively on financial assets that are not individually significant.

2. URAIAN KEBERSIHAN AKUNTANSI (Lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Cajiangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Prubuktil dan Aset Non-Prubuktil (Lanjutan)

c. Allowance for Impairment Losses on Financing and non-Financing Assets (Continued)

Jika Baik dan/atau tidak dapat baik objektif terdapat penurunan nilai, aset keuangan yang dinilai secara individual, kelompok aset keuangan tersebut, individu atau edar, maka Baik menentukan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang sama dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk ke kerugian penurunan nilai telah diakui non reversibel tidak tersedia dalam pendauran perusahaan nilai secara kolektif.

If the Good determines that there is an objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assess them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognized is excluded in the collective assessment of impairment.

Untuk pencapaian penting, secara kolektif yang harus direvisi perhitungan nilai secara individual, jika memiliki salah satu kriteria di bawah ini:

The Good determines individual receivables to be included for impairment through individual evaluation if one of the following criteria exist:

1. Pihak yang memberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai
2. Pihak yang memberikan yang ditransaksikan yang secara individual memiliki nilai signifikan.

1. Karakteristik receivables which individually have significant value and objective evidence of impairment;
2. Receivables receivables receivables which individually have significant value

Berdasarkan kriteria di atas, Baik melakukan penilaian secara individual untuk piutang yang signifikan dengan platform nilai besar atau sama dengan Rp. 5.000.000.000 dengan pertimbangan kening faedah, dirapikan dan mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Based on the above criteria, the Good performs individual assessment for receivables receivables with limit greater than or equal to Rp. 5,000,000,000 with collectively consideration of substantial, overdue and loss as of December 31, 2021 and 2020.

Baik menetapkan piutang receivable yang harus direvisi perhitungan nilainya secara kolektif, jika memiliki salah satu kriteria di bawah ini:

The Good determines receivables receivables to be included for impairment through collective evaluation if one of the following criteria exist:

1. Piutang receivable yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Piutang receivable yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Piutang receivable yang ditransaksikan, yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

1. Receivables receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
2. Receivables receivables which individually have non significant value;
3. Receivables receivables receivables which individually have non significant value

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan untuk piutang dilakukan menggunakan ISAK 102: "Penentuan Nilai Piutang Receivable". Penilaian secara kolektif dilaksanakan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengelompokan kerugian atas (the provisiability of default).

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets for receivables receivables uses ISAK 102 "Impairment of Receivable Receivables". Collective assessments are grouped based on the same receivable risk characteristics by considering the segmentations of receivables based on past loss experience (provability of default).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (Lanjutan)

Bank menggunakan metode *migration analysis*, *net flow rate* dan *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar atas sisa masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Piutang dan penbiayaan bersifat *collateral dependent*, yaitu jika peminjam pembiayaan hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengalihan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset ketiangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset ketiangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset ketiangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset ketiangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset ketiangan yang diberikan yang telah dibayusbukakan, pada tahun berjalan diartifisial dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dibayusbukakan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain margin.

e. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets (Continued)

The Bank uses *migration analysis*, *net flow rate method* and *migration analysis* which is a statistical analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses at least 3 (three) years historical data to compute the *Probability of Default* (PD) and *Loss of Given Default* (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Loans and amount receivable are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;
2. Takeover of collateral is most likely to occur and be supported by legally binding collateral agreement.

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset original effective margin rate.

Losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operational income other than margin income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (Lanjutan)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets (Continued)

Terdapat aset produktif dan non-produktif sebagai pinjaman yang dinilai, penilaian, perhitungan, pembayarannya menggunakan aset yang diperoleh untuk gaji, serta kasidaman dan subinjeksi yang memiliki risiko penyalangan seperti bank garansi dan Letter of Credit (LC), Bank moneterikan Persewaan Otomatis Jasa Keuangan (PJJK) No.16/POJK.03/2018 tentang perubahan atas POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 8 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 20 September 2018 dan POJK No.17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang "Perubahan kembali atas perubahan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Standar Perencanaan Nasional sebagai kebijakan pengkreditasi yang berlaku efektif tanggal 20 Maret 2021.

For productive assets on Islamic receivable assets bank method financing, multiple financing asset obtained for loan, as well as consummate and contingencies that have financing risk such as bank guarantee and Letter of Credit (LC) for bank approval the Financial Services Authority Regulation (FGR) No.16/POJK.03/2018 regarding amendment to POJK No.16/POJK.03/2014 dated November 15, 2014 covering "Statement of Asset Quality for Islamic Commercial Bank and Shari'ah Business Unit" effective September 20, 2018 and POJK No. 17/POJK.03/2021 dated September 10, 2021 regarding "The second amendment to OJK regulation number 11/POJK.03/2020 covering National Economic Statistics or a vulnerability policy impacting the spread of consumption since 2019" which is valid until March 21, 2023.

Konjunktur untuk sementara penyediaan kerugian aset produktif milik bank syariah maupun untuk Manufaktur dan/atau adalah terhadap pelepasan nilai aset konjunktur untuk serta yang terdampak. Selain itu wajib dibentuk dan/atau berdasarkan atas aset yang dimiliki bank Manufaktur dan/atau.

The requirement to establish allowance for impairment losses for bank and Islamic Manufaktur financial contracts are agreed upon receivable on the provision obligation for overdue loan. Furthermore, it is required to depreciate/adjust the asset of bank and Islamic Manufaktur financial.

Khusus untuk kualitas aset berharga dan penempatan pada buku direvisi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk kualitas penyesuaian modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet.

For mortgage securities and placements with other bonds, the quality rating is classified into 3 (three) classifications: current, substandard, and loss. Quality rating of equity instrument is determined into 4 (four) categories: current, substandard, doubtful and loss.

Catatan penyediaan perdagangan untuk kemudian dan kontijensi yang dihasilkan disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun "Tasula Kerugian Kontinjensi dan Kreditansi".

The allowance for impairment losses on commitments and contingencies is presented as a liability in the statement of financial position under "Unrealized Losses on Commitments and Contingencies account".

Aset produktif merupakan berbagai-bagai bentuk aset produktif sudah tidak dapat dijamin kembali, untuk aset tersebut harus direvisi/ulaskan dengan cara saldo aset produktif diturunkan dari penyediaan kerugian. Perhitungan kembali aset produktif yang akan diharapkan kembali sesuai sebagai penjabaran penyediaan kerugian tahun berjalan.

If management believes that certain earning assets are not recoverable then they should be written off by deducting the balance of earning assets from their respective allowances. Reverses of earning assets that have been written off are recorded as additional allowance for impairment losses in the current year.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki risiko kerugian, antara lain tabung hantar rekening arus keluar, agunan yang diambil alih dan sumber account.

Non earning assets are the bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of cash-out account, proceeds of assets and unreverse account.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (Lanjutan)

Bank wajib menggunakan nilai yang rendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilaian independen atau penilaian internal Bank.

AYDA yang telah dilikuidasi upaya penyelesaian, merupakan memiliki kualitas:

1. lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
2. macet, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Suspense account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak dicatung dengan dokumen pendukung yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang sebenarnya.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan suspense account. Kualitas rekening antar kantor dan suspense account ditetapkan sebagai berikut:

1. lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
2. macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

g. Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah" dan PAPSI 2013, Bank menghitung penurunan nilai untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di PSAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah". Bank juga mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan dicatatkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara akurat.

v. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets (Continued)

The Bank is required to use the lowest price if there are several values prepared by the independent or internal appraiser.

The quality of foreclosed assets in settlement process is determined as follows:

- a) Current, if acquired within 1 (one) year;
- b) Loss, if acquired more than 1 (one) year.

Inter-branch account is the claims arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Suspense account is an account containing unidentified transactions or transactions which are unable to be classified to the proper account due to the lack of adequate supporting documents.

The Bank is required to settle its inter-branch account and suspense account. The quality of inter-branch account and suspense account is determined as follows:

- a) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
- b) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

d. Impairment of financial instruments

In accordance with SFAS No. 102 (Revised 2013): "Murabahah Accounting" and PAPSI 2013, the Bank calculates impairment for murabahah receivables in accordance with the provisions in SFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivables". The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired at each statement of financial position date. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired and the value is reduced if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred loss event), which has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

2. KEUTSAR KEBIAKAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Untuk objektif penilaian nilai likuidasi terdapat kondisi-kondisi khusus signifikan yang meliputi antara lain: adanya ketidakpastian nilai tunggakan receivable pada akhir periode pembukuan serta kemungkinan deflasi yang tidak dapat dihindari jika debitur tidak menyetor kewajiban keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan lainnya, dan lain-lain yang dapat diperkirakan secara objektif sebagai penurunan yang dapat diukur pada tanggal awal buku rekening. Nilai tunggakan debitur atau penerima ekuitas yang berkurang dengan menggunakan nilai aset dalam kelompok tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan ditentukan melalui akun penyelesaian dan jumlah kerugian yang terjadi dikurusi pada laporan laba rugi dan penyisihan kerugianbersifat

Perdapat nilai neto adalah nilai tercatat yang telah diturunkan setelah berdasarkan tingkat nilai basis efektif awal yang digunakan untuk menilai nilai aset pada tanggal dari aset tersebut. Jika pada periode berakhirnya, jumlah estimasi kerugian penunjam nilai disajikan akan menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penunjam nilai, maka kerugian penyisihan nilai yang sudah diikoni sebelumnya dikurusi dan diturunkan dengan menggunakan akun penyelesaian atas penyisihan nilai penyisihan yang terkait dengan jika tidak ada rekening yang relevan untuk pengembalian nilai selama dua tahun berjalan tahun berakhir atau sudah diteliti oleh Bank. Penentuan kembali aset keuangan yang telah diturunkan akan dilakukan sebagai pengurang cadangan kerugian penunjam nilai di laporan laba rugi dan penyelesaian kerugianbersifat

Untuk tujuan evaluasi penunjam nilai likuidasi atas penyelesaian yang diberikan, sebagaimana diungkapkan dalam PSAK No. 102, PSAK 102, Bank menerapkan ketentuan transit penyelesaian nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketahanan Bank Indonesia yang meliputi Penilaian Kualitas Aktiva Bersih. Lima yang dilaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Restrukturisasi atas debitur yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya pada Bank karena dampak dari usaha debitur berdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk penyelesaian dari kasus objektif penunjam nilai berdasarkan PSAK No. 17/PSAK.03/2021.

Evidence of impairment may include indications that the debtor's ability to pay or repay principal or interest is significantly affected or deteriorating in margin or principal payments, focusing restructuring with terms they may not be capable of the debtor's net operating financial difficulty, the probability that the debtor will enter bankruptcy or other financial reorganization, and whether data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows relating to a group of receivables or adverse changes in the payment status of the debtor or losses in the group or economic conditions that correlate with defaults in the group or such group.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Manajemen harus yakin bahwa nilai aset yang akan berkurang akan diukur menggunakan efektifitas awal yang digunakan untuk menilai nilai aset pada tanggal dari aset tersebut. Jika pada periode berakhirnya, jumlah estimasi kerugian penunjam nilai disajikan akan menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penunjam nilai, maka kerugian penyisihan nilai yang sudah diikoni sebelumnya dikurusi dan diturunkan dengan menggunakan akun penyelesaian atas penyisihan nilai penyisihan yang terkait dengan jika tidak ada rekening yang relevan untuk pengembalian nilai selama dua tahun berjalan tahun berakhir atau sudah diteliti oleh Bank. Penentuan kembali aset keuangan yang telah diturunkan akan dilakukan sebagai pengurang cadangan kerugian penunjam nilai di laporan laba rugi dan penyelesaian kerugianbersifat

For the purpose of evaluating the carrying amount of the financing provided, as is possible in PSAK No. 102/IFAS 102, Bank apply provisions for collective impairment transition using estimated based on applicable Bank Indonesia regulations, Assessment of Asset Quality for Commercial Banks Conducting Finance Activities Based on Sharia Principles

Restructuring of debtors who have difficulty fulfilling obligations to the Bank because the debtor or debtor's business is affected by the spread of Covid-19, either directly or indirectly, is an exception from objective evidence of impairment based on PSAK No. 17/PSAK.03/2021.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**d. Penurunan nilai instrument keuangan (Lanjutan)**

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (*Loss Given Default*).

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, *risk rate analysis method* dan *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

**e. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia**

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro wadiah pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

FASBIS dan SBIS merupakan serikim yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah wadiah dan ijarah. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

**f. Giro pada Bank lain**

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana ketajirah (*qardul hasan*). Prosekuensi jasa giro dari bank non-syariah tercatat sebagai aset lancar sebagai liabilitas Bank.

**g. Penempatan pada Bank lain**

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka mudharabah dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**d. Impairment of financial instruments (Continued)**

The allowance for impairment losses on impaired financial assets was assessed collectively, using statistical method of the historical data such as the probability of default, time of maturity, and the amount of loss incurred (*Loss Given Default*).

The Bank uses statistical model analysis method, risk rate analysis method and migration analysis method to assess financial assets impairment collectively.

**e. Current Account and Placements with Bank Indonesia**

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS).

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS).

**f. Current Account with Other Banks**

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses. Bonus received by the Bank from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognized as the Bank's income but are recorded as part of the *qardul hasan* fund. The proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks will be recorded as the Bank's liabilities before distributed.

**g. Placement with Other Banks**

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS).

Placements with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

2. KETENTUAN KERIAKAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Penempatan pada Bank Lain (Lanjutan)

g. Placement with Other Banks (Continued)

Investasi undah-dun merupakan perjanjian investasi berbasis wakafin dimana Bank akan mendapatkan tingkat keuntungannya lebih diutamakan. Dana yang diberikan Bank kemudian diinvestasikan pada produk yang hasil hasilnya kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil investasi berupa laba aktual lebih kecil dari laba dikonsolidasi, jika hasil investasi berupa laba aktual lebih besar dari laba dikonsolidasi maka yang diterima Bank setelah adalah sebesar laba dikonsolidasi dan selisihnya akan menjadi peninjauan ulang.

Relevant investment is placed fund based on wakafin that the bank will receive return in the form of anticipated profit. Funds given by the Bank will be invested in sharia products. Return distributed to the Bank is based on actual profit if the return from investment was lower than the anticipated profit from investment were higher than the anticipated profit, the investor will receive an amount based on anticipated profit while the difference will be recognized as income of the Bank.

h. Investasi pada Surat Berharga

h. Investment in Marketable Securities

Surat Berharga syariah adalah surat bukti peminjaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang harus dipertanggungjawabkan di pihak bank yang derasnya pasar modal syariah, antara lain meliputi syariah sukuk, sharia swap certificate (STC) dan sertifikat tabung tabung syariah.

Sharia marketable securities are proof of anticipated under sharia principles (mainly funded by sharia money market) under sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk), sukuk trust certificate (STC), and sharia mutual funds certificate.

Pada saat pengakuan awal, Bank menggunakan klasifikasi investasi yang sesuai dengan produk pada biaya pembelian. Untuk pada nilai wajar melalui pengisian kembali dengan nilai wajar pada nilai wajar melalui nilai wajar.

At initial recognition, the bank determines the classification of investment in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Investasi pada surat berharga, kecuali Retasidara, diklasifikasikan berdasarkan kategori sesuai yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No.110 "Pengukuran 2020" dengan "Akinadab: Sukuk" sebagai berikut:

Investment in securities, except for mutual fund, is classified by business model which is determined by the Bank based on SFAS No. 110 (Revisemen 2020) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1. Titik awal biaya pembelian:

1. Measured at acquisition cost:

- Investasi tersebut dimiliki dengan nilai awal sebesar yang dibutuhkan untuk mencapai target arus kas kontrol dan terdapat persyaratan komersial dalam memenuhkan kondisi tertentu atas pembayarannya pada saat pembelian.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual price in determining the specific date of payment received at the purchase.

- Biaya pembelian awal termasuk biaya transaksi:

- Such acquisition cost includes transaction cost.

- Selisih antara biaya pembelian dan nilai nominal dimutakhirkan secara garis lurus selama jangka waktu awal dan tidak diakui laba rugi.

- The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized as a straight line basis over the period of the sukuk and recognized in profit or loss.

2. Titik awal nilai wajar melalui pengisian komprehensif lain:

2. Measured at fair value through other comprehensive income:

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu kondisi yang bernilai, atau untuk memperoleh arus kas komersial dan memenuhi persyaratan sukuk, terdapat persyaratan komersial dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayarannya pada saat pembelian.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk and has contractual term in determining the specific date of fair-value payments and at the purchase.



**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**h. Investasi pada Surat Berkarya (Lanjutan)**

**A. Investasi in Marketable Securities (Continued)**

**2. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Lanjutan)**

**2. Measured at fair value through other comprehensive income (Continued)**

- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal dimortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

- Sukuk acquisition cost includes transaction cost.
- The difference between acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight line basis over the period of the sukuk and is recognized in profit and loss.

- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah mempertimbangkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum dimortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika revisasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi kerugian atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain diklasifikasi ke laba rugi sebagai penyertaan rekonsiliasi.

- Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering amortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, the accumulated gain or loss which was been previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.

**2. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi**

**2. Measured at fair value through profit or loss**

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi,

- Sukuk acquisition cost excludes transaction cost;

- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- The difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Investments in syariah mutual funds are stated at market value based on net asset value of mutual funds on the date of the statement of financial position.

**i. Piutang**

**i. Receivables**

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan sewa-menyewa berdasarkan akad murabahah, salam, dan ijarah serta tagihan pihak sewa yang ketunggak atas transaksi dengan akad ijarah.

Receivables are receivables arising from sale and purchase transactions and leases based on murabahah and ijarah contracts as well as principal rent receivables that are in arrears on transactions with ijarah contracts.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembelian ini dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finance the consumption, investment and working capital needs of the customer, sold at a principal price plus a certain margin, that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

2. KHITIS AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

1. Penjualan (Lanjutan)

i. Receivables

Penjualan merupakan pada awalnya dinilai pada nilai wajar ditambah dikurangkan dengan pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diukur pada saat ini yang dan terakumulasi pendapatan dan biaya transaksi untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah penjualan awal dilakukan pada biaya pembelian, nilai historis yang digunakan untuk menilai efek dari kerugian dengan selanjutnya penurunan nilai.

Receivables are initially measured at fair value plus/minus directly attributable transaction cost and income tax are additional income subject to when the respect financial assets, and after the initial recognition amountably receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less any allowance for impairment losses.

Selain adalah aset beli barang pesanan (order) yang dengan pengiraan eksekusinya dan oleh penjual (seller) (initial) dan pembeliannya dilakukan oleh pembeli pada saat awal terakumulasi dengan syarat-syarat tertentu

Salain is a contract for the sale and purchase of ordered goods (purchase bill) with delivery at a later date by the seller (supplier) and the payment is made by the buyer at the time the contract is agreed upon the accordance with certain conditions.

Penjualan Selain adalah pada saat penyelesaian yang terjadi pemasok sebagai penjual yang dibayar dan oleh pada saat perjanjian yang dan nasabah sebagai pembeli yang diterima.

Salain receivables are recognized when the money is delivered to the supplier in the amount paid and recognized when the money is received from the customer for the amount received.

Penjualan adalah soal penjualan antara di-antara: (pembeli) dan di-antara (pemasok) yang juga memiliki sebagai penjual. Penjualan akan terjadi pembeli dan penjual untuk menerima dan mengkonfirmasi atau menerima (barang) secara spesifik yang diterangkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang ditetapkan.

Salain is a sale and purchase contract between independent buyer and seller. Purchases are also using as the seller. Based on the contract, the buyer orders the merchandise in purchase or to supply at-seller goods (order) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Penjualan tersebut disajikan sebesar nilai neto kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin kotor yang ditunjukkan disajikan sebagai per-biaya pembelian.

Salain receivables are stated at the amount billed to final customer less allowance for impairment losses. Deferred value margin is presented as a contra account of Salain receivables.

Salain receivables are based on uncollected amount net income from purchase portion and Salain receivable representing portion of actual net income (gross) from the following month's installment of Salain purchase. Salain receivable is recognized accordingly.

Penjualan merupakan bagian dari nilai jual neto (kecuali sebesar nilai murni) dan nilai jual sebesar nilai murni pokok yang diterima dan disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu sebesar saldo piutang.

Salain income receivables are recognized at netting in the amount of gross portion of net and Salain receivable are recognized at actual portion of portion of net and presented at the net realizable value which is equal to the balance of the receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Pinjaman Qardh

Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam memansi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *Rahn*. Akad *hawalah* adalah akad perpindahan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Sedangkan *Rahn* adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan Bank. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan pemotongan dan pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan/*ujrah* pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

k. Pembiayaan

*Mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

*Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kegiatan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

j. Funds of Qardh

*Funds of Qardh* are the provision of funds or equivalent claims based on an agreement or agreement between the borrower and the lender that requires the borrower to repay the debt after a certain period of time.

*Funds of qardh* include *hawalah financing agreement*. *Hawalah* is transfer of debts from debtors (customer) to another party (Bank) which is obligated to assume the liability to pay. *Rahn* is a debt agreement by holding goods as collateral for a loan provided by the Bank. The bank will obtain a fee (*ujrah*) from this transaction, which is recognized as income when received.

*Qardh* receivables are recognized at the total amount of funds lent when incurred. Any excess amount paid by the borrower in repaying a *qardh* is recognized as revenue/*ujrah* when incurred. On the date of the statement of financial position, fund of *qardh* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

k. Financing

*Mudharabah financing* is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business manager (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (*pre-determined ratio*). On the date of the statement of financial position, *mudharabah financing* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

*Musyarakah* is a partnership among funds owners to contribute funds and conduct a business in a joint venture basis in a partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the date of the statement of financial position, *Musyarakah financing* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

2. KERTASAH KEBUKAAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

1. Surat-surat Berharga yang Tidak dengan Janji Kembali  
Kembali

1. Securities purchased under agreements to resell

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji kembali disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual kembali awal bertanggal yang bersangkutan. Surat-surat berharga yang dibeli tidak diakui sebagai surat berharga dalam laporan posisi keuangan karena secara substantif risiko dan manfaat surat-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

Securities purchased under "resale" agreement are presented as claim at the resale price of the securities. Securities purchased under resale agreement are not presented as securities in financial statement due to the fact that the risks and benefits of the securities substantially remain with the seller.

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali diakui sebagai surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada pengakhiran awal tahun pada nilai wajar diantarkan biaya transaksi yang dapat dikurangkan secara langsung jika ada, dan selanjutnya diakui sebesar harga pembelian diantarkan. Penyisihan kerugian penurunan nilai diberikan jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (lihat Bab 2).

Securities sold under repurchase agreement: securities purchased under resale agreement in the initial recognition are measured at fair value plus direct, attributable transaction cost, if any, and subsequently are measured at amortized acquisition cost. Allowance for impairment losses shall be established if there is objective evidence of impairment (note 2).

Transaksi Rupo dengan Bi menggunakan aset Riik dan Garah serta di Ber' di Rpu. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai kewajiban sebesar harga beli kembali secara bertahap utandai. Surat berharga yang dijual dengan syarat-syarat bahwa rupo ini secara substantif risiko dan manfaat awal-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

Rupo transactions with Riik Indonesia use Riik and Garah currency, as well as di Ber' di Rpu. Monetary securities sold under repurchase agreement are presented as liabilities at the repurchase price of the securities. Securities sold are recorded as zero carrying in the financial statements. With this zero mechanism the risks and benefits of securities substantially remain with the seller.

Transaksi Rupu antar bank menggunakan aset ri Riik diisual dengan Rpu dimana surat-surat berharga dijual secara di Ber' di Rpu atau jual beli, yaitu kemudian diisual dengan janji pembelian kembali (di Rpu) sebesar harga beli kembali yang ditetapkan atau harga pasar. di Rpu dengan cara-cara amat berbeda, dan kemudian janji pembelian kembali (di Rpu) pada off balance sheet. Secara substantif risiko dan manfaat surat-surat berharga kembali ke pihak penjual.

Rupo transactions between banks use the di Ber' currency denominated with Rpu where securities are sold to di Ber' di Rpu transaction or as market sale and purchase and accompanied with a repurchase agreement (di Rpu) of the agreed repurchase price or market price, presented by reversing the securities and recording the repurchase agreement (di Rpu) on the off balance sheet. Substantially, the risks and benefits of securities are transferred to the buyer.

20. Pengukuran Saham

20. Investment in Shares

Pemilikan saham tertentu merupakan ganungan dan diisual diisual saham pada pemilikan yang bersek di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan investasi jangka panjang.

Investment in shares of stock represents investments of funds in the form of shares of non public companies engaged in financing activities for long-term investment purposes.

**2. IKHTISAR KEDAJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**m. Penyertaan Saham (Lanjutan)**

**m. Investment in Shares (Continued)**

Investasi Bank pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Bank mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah untung bersih ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian Bank atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian Bank atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain. Keuntungan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Bank's investments in its associated companies are measured using the equity method. An associated entity is which Bank has significant influence or share ownership of more than 20% of the voting rights. The initial recognition of investments in associates are recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted to recognize the Bank's portion of profit or loss of associates after the acquisition date. Bank's portion of profit or loss of associates are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income. Receipt of distributions from subsidiaries reduce the carrying amount of the investment.

Dividen kas yang diterima atas penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

Cash dividends received from investment in shares of stocks are recognized as income.

**n. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah**

**n. Assets Acquired for Ijarah**

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost net of accumulated depreciation.

Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset tetap, sedangkan objek sewa dalam ijarah muntahiyah *hittamah* disusutkan sesuai masa sewa.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah *muntahiyah hittamah* transaction is depreciated based on lease term.

*Ijarah muntahiyah hittamah* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pembelian (*shahih*) pada saat berakhir semua akad sewa.

*Ijarah muntahiyah hittamah* is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease agreement.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah *muntahiyah hittamah* dapat dilakukan dengan cara:

The transfer of title of the leased object to the lessee in ijarah *muntahiyah hittamah* can be conducted through:

- (i) hibah;
- (ii) penjualan seluruh akad *hakkul* sebesar harga yang seländig dengan sisa cicilan sewa;
- (iii) pengalihan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

- (i) a grant;
- (ii) sale prior to the end of agreement for an amount equivalent to the remaining lease installment;
- (iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the agreement, and
- (iv) installment sales in a specific price as agreed in the agreement.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**a. Pinjaman yang diterima**

**a. Loan borrowings**

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman tersebut diakui sebesar biaya perolehannya.

Loan borrowings are funds received from other party with payments owed or borrowing agreement. Loan borrowings are recognized at cost.

**b. Aset Tetap**

**b. Premises and Equipments**

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehannya, yang terdiri atas harga pembelian dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap pakai seperti aset tersebut siap digunakan secara langsung untuk tujuanannya.

Premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran tidak moneter atau pertukaran aset moneter dan non-moneter diakui sebesar nilai aset yang diterima.

Items are the cost index for measurement after initial recognition. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses on assets.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran tidak moneter atau pertukaran aset moneter dan non-moneter diakui sebesar nilai aset yang diterima.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair value, unless:

(i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau

(i) the exchange transaction lacks commercial substance, or

(ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal

(ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.

Pengukuran aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis setiap tahun.

Depreciation of premises and equipment starts when it is available for its intended use and is computed using the straight line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:

**Tahun/Tears**

10 - 20

Buildings

4 - 8

Vehicle

4 - 8

Office equipment

4

Office equipment

Nilai manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dianalisa setiap akhir tahun dan perubahan dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each year with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Umur diperhitungkan sebesar biaya pembelian dan tidak disusutkan.

Land is stated at its amortized cost and is not depreciated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Aset Tetap (Lanjutan)

Konstruksi dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap hingga penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai.

Biaya-biaya setelah perolehan awal dimasukkan dalam nilai tercatat aset dan diakui secara terpisah, hanya jika terdapat kemungkinan besar biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dipaparkan sebagai

Beban pemeliharaan dan perbaikan dikehendaki pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk memelihara, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya pemeliharaan aset, jika dan hanya jika besar kebarangharian manfaat ekonomis di masa depan berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikehendaki dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

q. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan cakupan masa manfaat ekonomis selama 4 (empat) tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi dievaluasi kembali setiap akhir periode.

p. Fund borrowings (Continued)

Constructions in progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount and recognized as a separate asset, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced parts is written off.

The costs of maintenance and repairs are charged in statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Other costs incurred subsequently, to add to, replace parts of, or service an item of premises and equipment are recognized as cost of assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation, and any impairment loss are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in statement of profit or loss and other comprehensive income.

4. Intangible Assets

Intangible assets are assets that have no physical form which was acquired by the Bank and stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss and other comprehensive income using the straight line method based on the estimated useful lives of 4 (four) years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at the end of each period.

**2. IKHTISAR REVISI AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**1. Aset dan Liab**

**1. Other assets**

Aset lain - lain merupakan aset yang tidak dapat dicantumkan seperti piutang seluler yang jumlahnya tidak cukup material. Aset lain-lain tersebut terdiri dari biaya dibayar dimuka, persediaan yang masih akan diterima dan Aquran Yang Dimahkotai Alif (AYTA).

Other assets are assets that cannot be classified as current assets, generally the amount is not material enough. Other assets consist of prepaid expenses, income receivable and foreclosed mortgages.

Biaya dibayar dimuka dicatatasi selama masa berlaku dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method). Aquran yang dimahkotai alif seluler dengan penyelesaian piutangnya dan perjanjian syariah lainnya sebesar nilai cash yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tersebut dari piutang dan perjanjian syariah, termasuk sebesar nilai kewajiban mahkotai. Nilai cash yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya realisasi. Ketidulian saldo piutang dan perjanjian syariah, yang belum ditinjau oleh auditor adalah nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyediaan bermasalah piutang dan perjanjian syariah pada tahun berjalan.

Prepaid expenses are amortized over the useful life using the straight-line method. Foreclosed mortgages acquired in settlement of loans receivable and financing are recognized at net realizable value for loans receivable and financing carrying amount, the maximum amount which is customer liabilities. Net realizable value is the fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal. The excess in short receivable and financing liabilities which has not been paid by debtors over the value of foreclosed collateral is assigned to allowance for possible losses on loans receivable and financing in the current year.

**5. Tanah dan Bangunan**

**5. Land/Right of Use Intangible**

Liabilitas segera merupakan nilai-as riak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan selanjutnya. Liabilitas segera dicatatasi sebagai nilai liabilitas Brak kepada pemberi amanat.

Liabilities are immediately request obligations to third parties, based on contract or order by third having authority. Asset should be settled immediately. Liabilities are immediately are stated at the amount of the Brak's liabilities to the owner.

**4. Simpanan**

**4. Deposits**

Simpanan merupakan utang pihak lain berdasarkan prinsip manfaat yang akan dimilikinya dengan bentuk giro, tabung, tabung wadiah dan deposito wadiah.

Deposits represent third party funds placed based on benefit for withdrawal privilege in the form of wadiah demand deposits, wadiah saving deposits and wadiah deposit.

Giro adalah digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta dapat dipindahkan bentuk sesuai kebijakan Bank. Giro wadiah dipisahkan sebagai utpam pemegang giro di Bank.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slip, and may even be transferred on the Brak's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositor.

Tahap awal wadiah merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik setelah dengan kondisi tertentu yang ditetapkan. Tahap awal wadiah merupakan simpanan pihak lain yang disimpan sebagai simpanan di Bank.

Wadiah saving deposits represent third party funds that can be withdrawn under certain conditions. Brak's saving deposits are stated at the amount deposited by the holder.



2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

u. Simpanan dari Bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas Bank kepada bank lain dalam bentuk giro wadiah. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

u. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in the form of wadiah demand deposits. Deposits from other banks are stated at the amount payable to the other banks.

v. Dana Syariah Temporer

Dana syariah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kekuasaan kepada pengelola dana (mudharib/ Bank) dalam pengelolaan investasinya dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan. Dana syariah temporer terdiri dari tabungau mudharabah, deposito berjangka mudharabah, sertifikat investasi mudharabah surat bank dan sukuk mudharabah subordinasi.

v. Temporary Syariah Funds

Temporary syariah funds represent investments under mudharabah contracts in which the owners (shahibul maal) entrust the funds to the fund manager (mudharib/ Bank) in managing the investment, and will receive profit there based on the agreed predetermined ratio (nisbah). Temporary syariah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, mudharabah interbank investment certificates and subordinated mudharabah sukuk.

Tabungau mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan. Tabungau mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungau di Bank.

Mudharabah saving deposits represent third party funds that can be withdrawn under certain conditions. Mudharabah saving deposits are stated at the amount deposited by depositors.

Deposito berjangka mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka mudharabah dengan Bank. Deposito berjangka mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn at specific maturity dates based on the agreement between depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal values set forth in the agreement between the holder of the deposit and the Bank.

Sukuk mudharabah subordinasi merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah. Sukuk mudharabah dikelompokkan dalam dana syariah temporer karena bersifat investasi. Sukuk mudharabah subordinasi disajikan sebesar nilai nominal. Nilai-nilainya yang timbul dari pembelian sukuk mudharabah diautentikasi selama masa periode sukuk.

Subordinated mudharabah sukuk represents long-term bonds issued under a mudharabah contract. Mudharabah sukuk are classified as temporary syariah fund due to its nature as investment subordinated mudharabah sukuk are stated at their nominal value. The issuance costs for mudharabah sukuk are amortized based on the term of sukuk bonds.

Dana syariah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengelola keuangan, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana syariah temporer tidak dapat digolongkan sebagai equity karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Temporary syariah funds can not be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when the Bank has loss, unless there is negligence or default by the Bank. Temporary syariah funds cannot be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

**2. KEBIJAKAN KEUANGAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**v. Dana Syariahi Terapan (lanjutan)**

**v. Temporary Syariah Funds (Continued)**

Dana syariahi terapan merupakan salah satu tipe laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan mengelola asetnya dengan amanah untuk mencapai dan dimaksud dengan cara lainnya

Temporary syariah fund is an element of statement of financial position where it is in line with sharia principles, which enables the Bank to manage and invest funds, including to manage its one portfolio with other type of funds

Tujuan dana syariahi terapan terdapat sebagai bagian dari keuntungan sesuai kebijaksanaan dan metode ushululun beribatan jumlah dana dan masing-masing pihak Pengelola Jazali dari syariahi terapan terdapat sebagai bagian dari keuntungan

The purpose of temporary syariah fund can profit in accordance with the agreement and receive loss based on the amount of funds from each party. The return of temporary syariah fund are based on revenue sharing principle.

**vi. Pendapatan Pengelolaan Uang Aka Bank sebagai Mudharabah**

**vi. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharabah**

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharabah terdiri dari pendapatan dari transaksi penjualan dari transaksi pembelian dan lainnya, pendapatan hasil dari jual beli kembali dan masyarakat, pendapatan sewa dari jasa dan jasa mudharabah bilangan dan pendapatan usaha lainnya

Revenue from fund management or mudharabah consists of revenue from sales in mudharabah and other transactions, revenue from profit sharing of mudharabah and mudharabah financing, income from fund and other mudharabah bilangan and other operating revenue.

Pendapatan ini diperoleh melalui manajemen melalui sistem dengan hasil efektif (sistem efektif). Manfaat efektif adalah sebagai yang secara tepat mengalokasikan antara pembiayaan atau pembiayaan ke di mana dalam selama periode umur dari periode tersebut. Pada saat menghitung efektif, Bank menggunakan atau ke di mana dalam dengan mengutamakan seluruh pembiayaan komersial dan investasi keuangan tersebut, tetapi tidak terdapatnya keuangan di mana investasi. Pendapatan ini mencakup seluruh kembali, investasi dan hasil lain yang diterima oleh para pihak dalam investasi yang merupakan bagian dari pendapatan efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

income from mudharabah activities uses the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that results through the contractual law of investment or receipt through the expected life of the mudharabah receivables. When calculating the effective margin, Bank considers the future cash flow associated with contractual terms of the financing instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commission, provision fees and other fees assigned by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin transaction costs and all other premiums or discounts.

Bank melakukan perhitungan akrualisasi keuangannya dengan metode penyelesaian akrualisasi akrualisasi sebagai non-accrual. Perhitungan Bank dari transaksi usaha yang tidak dilaksanakan sebagai non-performing di awal sebagai margin dalam penyelesaian pada laporan keuangan dan lainnya.

The Bank provides the amortization of deferred income when the financing use classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as margin of non-performing receivables in the statement of comprehensive and earnings.

Pendapatan efektif dengan menggunakan metode penyelesaian penyelesaian atau metode akrualisasi. Akad keuangan kelas jika proses penutupan untuk penyelesaian dan dicatatkan kepada peserta.

Revenue from another is recognized using percentage of completion or contract completion method. The contract is defined as completed if the process of procedure is completed and the goods are delivered to the customer.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan (jarak diakui selama masa akad sesuai proporsional

Pendapatan usaha mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Pendapatan usaha musyarabah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar bakunya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarabah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan labilitas.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pinjaman gadaik, pendapatan dari penitipan pada Bank Indonesia, pendapatan dari giro dan penempatan pada bank syariah lain, pendapatan bagi hasil surat berharga syariah, pendapatan fee wasek ekspor, dan pendapatan fee akseptasi.

1. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syariah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syariah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah mawlaqah atas hasil pengelolan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (cash back)

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diherikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dibayar secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dicapai dalam pembiayaan yang diherikan dan aset produktif lainnya yang diherikan. Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah nasabah dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Bagi hasil sukuk mudharabah subordinasi dibagikan setiap 3 (tiga) bulan, dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk dengan pendapatan yang diterima Bank dalam triwulan terakhir sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan triwulanan Bank yang telah diaudit yang dipublikasikan oleh Bank.

n. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from (jarak is recognized proportionally during period of the contract.

Revenue from mudharabah is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed revenue sharing ratio. Loss incurred due to negligence of mudharib is charged to mudharib and will not reduce the mudharabah investment.

Revenue from musyarabah distributed to an active partner is recognized in accordance with the agreement on musyarabah revenue, whereas revenue distributed to passive partner is recognized as the right of the passive partner in revenue sharing and liability.

Other operating revenue consists of income derived from funds of gadaik, placement with Bank Indonesia, current account and placements with other sharia banks, revenue sharing from sharia securities, report bill fee, and acceptance fee revenue.

1. Third Parties Share on Returns of Temporary Syariah Funds

The share of third parties on the return of temporary syariah funds represents portion of income derived by Bank from managing funds under mudharabah mawlaqah principles. The profit sharing is distributed on the cash back.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets for distribution to fund owners and the Bank are computed proportionally based on the allocation of funds from owners and the Bank used in financing facilities and other earning assets distributed. The total available margin income and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined ratio.

Subordinated Mudharabah sukuk is paid every 3 (three) months, and calculated based on multiplication between the sukuk holder's ratio and revenue received by the Bank in the last quarter as contained in the audited quarterly financial statements of the Bank Publication.

**2. KHRISTISAR KERBAKAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**      **2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**1. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dima Syirkah  
Temporer**

Perhitungan pembagian bagi hasil kepada masing-masing pemegang saham akan dilakukan sesuai proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan yang dimiliki dibagikan dengan jumlah pokok saham masing-masing yang belum dicayai kembali.

Pendapatan dibagi dan bagi hasil atas pembagian yang diberikan dan aset produksi lainnya yang tercatat dan Bank, selanjutnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis syariah.

**1. Third Parties Share on Returns of Temporary Syirkah Funds**

The payment of revenue sharing to the respective shareholders will be proportional in accordance with the portion of ownership compared to the unpaid principal amount of the shareholders' shares.

Margin income and profit sharing from financing facilities and other banking assets distributed using the Bank's assets evenly because the right of the Bank including income from the Bank's fee-based transactions.

**3. Penetapan uang utama lainnya**

**Provisi dan Komisi**

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan jasa-jasa waktu tertentu, diungkapkan dan diujicobakan dengan menggunakan standar tingkat risiko hasil efektif sesuai dengan jangka waktunya. Provisi dan komisi selanjutnya dengan penyelesaian pendapatan sebelum jajah terpujilah sebagai pendapatan dari bank saat penyelesaian. Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan penyalangan dan risiko tidak untuk jangka waktu tertentu tidak pada cara regidilnya transaksi.

**3. Other main guarantee income**

**Fee and Commission**

Fee and commissions directly related to the lending activities and a specific period are disclosed and amortized using effective rate of return over the respective periods. The balance of fee and commission related to financing settled prior to maturity is recognized as revenue to separate upon settlement. Fee and commission, which are indirectly related to the lending activities and/or do not cover specific period, are recognized upon expiration of the transactions.

**Pendapatan Tambahan Jasa Perbankan**

Penjualan kembali jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima.

**Fee Based Income from Banking Services**

Fee based income from banking services is generally recognized when cash is received.

**Pendapatan dari penjualan aset keuangan**

Pendapatan dari hasil penjualan berbagai produk keuangan yang telah dilikuidasi diakui.

**Income from extra convertible financing**

Revenue from the collection of financing that has been written off.

**4. Dana Kebajikan**

Dana kebajikan diberikan kepada masjid yang mampu membantu, tetapi secara sukarela pemerintah. Kegiatan ini hanya jika dilakukan secara tidak sukarela yang harusnya tidak dirangsang atas dasar kewajiban dan tidak dibuat saat akad dilandungkan. Dana yang berasal dari penggunaan dicantumkan untuk dana sosial/kebaikan.

**4. Charitable Hassan Funds**

Charitable surpluses are charged to shirkah who are able to pay, but deliberately delay payments to the amount that are not agreed and not determined on the contract. The fund from philanthropic activities will be used for charity fund/charitable Hassan funds.

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/2013, Syariah Dima kembangkan daya berasal dari Uraan yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dima (TRDSP), yaitu:

- 1) Transaksi bank sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dirangsang dan transaksi pendapatan bunga (Shak).
- 2) Transaksi syariah yang tidak memenuhi ketentuan (Makhalat) dan lainnya dalam syariah.

- 1) The transaction that is not accordance with sharia principle and can not be awarded include interest revenue (riba).
- 2) The sharia transaction does not fulfilling the sharia condition principle and/or requirement.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**2. Dana Kebajikan (Lanjutan)**

Sebagi dengan Fatwa DSN-MUI No.123/DJN-MUI/XXI/2018, Sumber Dana Kebajikan dapat berasal dari Dana yang Tidak Bojoh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSF), yaitu (Lanjutan):

3) Dana sanksi (denda) karena tidak mematuhi kewajiban sesuai kesepakatan; dan

4) Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

**aa. Imbalan Kerja**

Effektif sejak tanggal 1 Januari 2019, Bank menerapkan PSAK No. 24 (Amendemen, 2018), "Imbalan Kerja". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Imbalan Kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

**Program pensiun iuran pasti**

Iuran berupa dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran didokumentasikan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pertanggungjawabannya ditanggung dari utang iuran badan berutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

**Program imbalan pasti**

Imbalan pasca kerja diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja dicatatkan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

**2. Qarawat Hasil Funds (Continued)**

Based on Fatwa USN-MUI No.123/DSN-MUI/XXI/2018 Source of Qarawat Hasil Funds is acquired from Funds that are Prohibited to be Recognized as Revenue (TBDSF Funds), as follows (Continued):

3) Penalty funds (punishment) because of not fulfilling the obligation on mutual contract; and

4) Unknown funds, the owner is known but not the fund or the owner is known but return cost is higher than the stated amount

**aa. Employee Benefits**

Effective since January 1, 2019, the Bank has implemented PSAK No. 24 (Amendments, 2018), "Employee Benefits". The application of this PSAK does not cause major changes to financial reporting and disclosures in financial statements.

**Short-term employee benefits**

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of *hari raya* are recognized during the period when services are rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

**Short-term employee benefits**

Contribution payable to the pension fund is equivalent to a certain percentage of salaries for eligible employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognized as expense when services have been rendered by eligible employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

**Defined benefit plan**

The post-employment benefits are recognized as expense when services have been rendered by eligible employees. The benefits are determined based on Bank regulations and the minimum requirements of Labor Law No.13/2003.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*.

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2021 and 2020  
 And For The Year Then Ended  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KERTIAKIAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**aa. Imbalan Kerja (Lanjutan)**

**aa. Employee Benefits (Continued)**

**Program imbalan pensi (Lanjutan)**

**Defined benefit plan (Continued)**

Pengukuran kewajiban masa pensiun (asas) adalah gaji neto yang diakumulasi sebagai penghitung kontribusif lain terdiri atas:

Reassessment of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:

(i) Keuntungan dan kerugian aktual.

(i) Actuarial gains and losses.

(ii) Nilai hasil atas aset pengukur, tidak termasuk jumlah yang dicatatkan dalam buku memo atas liabilitas (asas).

(ii) Result on plan assets, excluding an amount that is included in net defined benefit (assets).

(iii) Aset pertibahan manfaat bebas aset, tidak termasuk jumlah yang dicatatkan dalam buku memo atas liabilitas (asas).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pensi yang dilakukan sebagai penyelesaian kurangnya dana tidak didasarkan ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu ditukar sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika direvisi atau kurangnya prapayar, biaya, dan ketika biaya restitusi atau pengangsuran diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat dimungkikan dan diakui sebagai periode vesting masa depan.

Reassessment of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income is not reflected in profit or loss in the subsequent periods.  
 Past service costs are recognized as expense if the earlier date between the amendment or curtailment of contribution program and when the costs of restructuring or settlement is recognized. Hence, amended past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

**ab. Perputakan**

**ab. Provision**

Fiskalif wajib langgan : Januari 2019, Bank mengumumkan PSAK No. 45 (Amendemen, 2018), "Pajak Penghasilan". Perubahan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan data laporan keuangan.

Effective January 1, 2019, the Bank has implemented PSAK No 46 (Amendments, 2018), "Income Tax". The application of this PSAK does not cause major changes to financial reporting and disclosures in financial statements.

Beban pajak tahun berjalan ditanggung berdasarkan penghitungan kema pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak yang diakui atau pertobatan sepanjang aset dan liabilitas secara melaporan konsersial dari pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak yang belum diakui untuk perbedaan perlakuan temporer yang tidak dikompensasi dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasi, sehingga perbedaan temporer dari rugi fiskal yang belum dikompensasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Current tax expense is provided based on the taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.  
 Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unutilized tax losses to the extent that it is probable that temporary differences and carry forward of unutilized tax losses to be utilized in accordance with taxable profit.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**ab. Perpajakan**

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba nyata) yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak ditaksi pada saat saat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan saat banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan yang banding dan atau keberatan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas difasilitasi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah dibatalkan pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan pajak terkait dengan penyisihan untuk dasar atau pemajakan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berakuratan untuk untuk melakukan saling hapus.

**ac. Laba per Saham**

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Bank dengan jumlah saham yang beredar termasuk memperhitungkan jumlah tambahan saham pada tahun yang bersangkutan yang masih menunggu pengesahan RUPS ditahun depan.

**ad. Penggunaan Perkiraan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan**

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat perkiraan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

**ah. Employee Benefits**

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amortment to tax obligations is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the end of financial position reporting date. The related tax effects of the provisions for asset or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit (Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax are offset if there is a legal enforceable right to offset.

**ae. Earnings per Share**

Basic earnings per share is calculated by dividing net income attributable to owners of the Bank by the number of shares outstanding including calculating the number of additional shares in the relevant year which are still waiting for the approval of the General Meeting of Shareholders next year.

**af. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates**

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Due to inherent uncertainty in making economic activity results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

**2. IKHTISAR KERJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

a. Pengukuhan Perkiraan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

a. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (Continued)

**Perimbangan**

**Judgments**

Perimbangan yang ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank sebagai berikut:

The following judgments are made by management in the process of applying Bank's accounting policies that have the most significant effect on the amount recognized in Bank's financial statements as follows:

**Ukuran yang berwujud**

**Finite concepts**

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas ketertanggung-jawaban untuk memajukan kelangsungan usahanya dan keterkaitan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk mufidat, jika usahanya di masa mendatang. Setelah itu, manajemen tidak melakukan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melaksanakan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar asumsi yang tidak terduga.

The Bank's management has made an assessment of its ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

**Nilai wajar instrumen keuangan**

**Fair value of financial instruments**

Semua aset dan liabilitas dimiliki Bank diperlakukan secara netral dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level tingkat nilai wajar berdasarkan tingkat input kerendahan yang signifikan atas pengukurannya (lihat definisi).

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement.

Level 1: harga kuasaan (harga penyelesaian) di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang tidak yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.

Level 1: quoted prices (without adjustment) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date

Level 2: input selain harga kuasaan yang terdapat dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the asset and liability either directly or indirectly.

Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Level 3: inputs that are not observable for the asset and liability.

**Kontribusi**

**Conductivity**

Bank sedang terlibat dalam proses budaya. Perilaku budaya organisasi bagi penyediaan klien telah dikembangkan melalui komunikasi dengan berbagai kanal layanan Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

The Bank is currently involved in legal proceedings. The outcome of the probable cost for the resolution of claims has been developed by consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's dispute in this matter and it based upon an analysis of potential results.

Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari ini akan mempengaruhi hasil usaha. Pada kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations to a materiality, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating in these proceedings.



2. **KEBIJAKAN KEBUJUKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

2. **SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

ke. **Penggunaan Perkiraan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (Lanjutan)**

ke. **Use of Significant Accounting Judgments and Estimates (Continued)**

**Asumsi dan Anumsi**

**Estimates and Assumptions**

Asumsi masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diuraikan di bawah ini. Bank membuat asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Asumsi dan simpai mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**Cadangan kerugian bebudaya nilai dari piutang, pinjaman gadai dan pembiayaan**

**Allowance for impairment losses on receivables, funds of loans and financing**

Manajemen Bank meninjau portofolio piutang, pinjaman gadai dan pembiayaan setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang diberikan selama periode yang berakhir berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

The Bank's management reviews its receivables, funds of loans and financing portfolio to assess impairment in each period by updating the required allowance for impairment losses made during the period based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by the officers.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Such estimates are based on assumptions of several factors and actual results may differ, resulting in future changes in the amount of allowance for losses.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Existing circumstances and assumptions with regard to future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**Penurunan nilai keefektifan pada surat berharga**

**Impairment of investment in marketable securities**

Manajemen Bank menentukan bahwa aset berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan dikomisarisasi.

The Bank's management determines that the impairment of marketable securities are based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ke. Pengukuran Perimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

ke. Use of Significant Accounting Judgments and Estimates (Continued)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Estimates and Assumptions (Continued)

Umur ekonomis aset tetap

Useful lives of premises and equipment

Manajemen Bank memperkirakan nilai residual aset tetap berdasarkan metode linier dan diharapkan akan terdapat secara digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap dihitung secara berkala dan ditentukan jika memiliki depresiasi yang berasal dari perbaikan sebelumnya, karena berkalkulasi secara fisik dan labrak, atau keausan secara komersial dan legal serta masalah lainnya atau penggunaan aset tersebut. Setika hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada perhitungan secara kolektif dengan menggunakan metode linier, teknik analisis umur dan pengalangan dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa dapat dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan soal perubahan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dan faktor-faktor tersebut yang sebelumnya. Penggunaan dari taksiar masa manfaat dari aset tetap akan menggunakan beban sesuai.

Aset pajak tangguh

Deferred tax assets

Aset pajak tangguh diakui atas jumlah pajak penghasilan terakumulasi (recoverable) pada periode awal yang sebagai nilai pertukaran temporer yang telah ditransferkan. Identifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguh yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang dapat diakui jika tidak di masa mendatang sejalan dengan strategi tersebut yang akan be-  
danya.

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from deductible temporary differences. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing on level of future taxable profits together with strategic financial planning.

Pengukuran nilai aset dan liabilitas

Measurement of non-financial assets

Manajemen Bank menggunakan penilaian nilai aset non keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengakibatkan bahwa nilai tersebut aset non keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

PT Bank Aceh management assess impairment of non-financial assets whenever event or change in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**ac. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (Lanjutan)**

**ac. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (Continued)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

**Penurunan nilai aset non keuangan (Lanjutan)**

**Impairment of non financial assets (Continued)**

Faktor faktor penting yang dapat menyebabkan penurunan penilaian adalah sebagai berikut:

The factors that the Bank considers important which may lead to impairment assessment are the following:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) adanya satu atau beberapa yang secara signifikan bernilai negatif.

- a) significant underperformance related to historical expectation or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the assets or the overall business strategy; and
- c) significant negative industry or economic trends.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai terungkap aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (nilai unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan dnestimasi untuk aset individual atau jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher amount between fair value less costs of disposal using the asset value in use (or cash generating unit). Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if not possible, for the cash generating unit to which the asset belongs.

**Kewajibanabilitas Gembala Kerja**

**Estimated liabilities for employee benefits**

Estimasi liabilitas gembala kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaris. Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain lain.

Estimated liabilities for employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rate and others.

Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Due to the long term nature of this plan, such estimates are subject to significant uncertainty.

**ad. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan**

**ad. Changes in accounting policies and disclosures**

Per 1 Januari 2021 berlaku efektif beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berikut ini:

As of January 1, 2021, several Financial Accounting Standards (FAS), as follows

1. PSAK 110 (Penyesuaian 2020) "Akuntansi Sahuk" Penyesuaian ini menetapkan klarifikasi saat pengakuan awal dari investasi pada saham. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi pengakuan untuk pembelian saham.

1. PSAK 110 (Adjustment 2020): "Accounting for Sahuk" This adjustment provides clarification on the initial recognition of investments in saham. This adjustment aims to harmonize and maintain the consistency of the arrangement for the acquisition of saham.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**2d. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (Lanjutan)**

**2d. Changes in accounting policy and disclosures (Continued)**

Per 1 Januari 2021 berlaku efektif beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berikut ini:

As of January 1, 2021, several Financial Accounting Standards (FAS), as follows:

1. PSAK 111 (Revisi) 2020: "Akuntansi Pajak" Revisi yang merupakan dampak dari penyelesaian PSAK 110: "Akuntansi Pajak".

2. PSAK 111 (Amendment 2020) "Water Accounting": The amendment to the impact of the adjustment to PSAK 110 Accounting for Subst

1. PSAK 112: "Akuntansi Wakil". Penjelasan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyelesaian, dan pengungkapan transaksi wakil.

1. PSAK 112: "Accounting for Proxy" This adjustment aims in regulate the recognition, measurement, presentation, and disclosure of proxy transactions.

4. PSAK 22 (Amendemen 2019) : "Kombinasi Bisnis". Amendemen dilakukan atas definisi usaha independen dan definisi IFRS 3 Business Combination: Definition of a Business.

PSAK 22 (Amendment 2019) "Business Combination". The amendments made to the definition of business adopted the amendments to IFRS 3 Business Combination: Definition of a Business.

3. PSAK 55 (Amendemen 2020) : "Investasi Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 (Amendemen 2020): "Instrumen Keuangan Pengungkapan", PSAK 62 (Amendemen 2020): "Kontrol Asaswasi", PSAK 71 (Amendemen 2020): "Keuntungan Eksternal", PSAK 72 (Amendemen 2020): "Sewa", "Sewa", "Sewa", "Sewa" dan "Sewa" sebagai aset atau liabilitas kategori 2 dalam PSAK 112 IFRS tentang Interaksi Rate Movement Reform - Phase 2.

PSAK 55 (Amendment 2020): "Financial Instruments, Recognition and Measurement", PSAK 60 (Amendment 2020): "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 62 (Amendment 2020): "Financial Instruments", PSAK 71 (Amendment 2020): "Financial Instruments", PSAK 72 (Amendment 2020): "Leases", AS of these amendments concerning Leases Rule Benchmark Reform .. Phase 2 were adopted from IFRS regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

Perubahan dari standar dan interpretasi baru tersebut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap ketepatan dan kelengkapan informasi bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The adoption of these new standards and interpretations did not result in substantial changes to the bank's accounting policy and had an significant impact on the amounts reported for the current year or the previous year.

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut**  
**(Dijelaskan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2021 and 2020**  
**And For The Year Then Ended**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. KAS	2021	2020	
Akiva ini terdiri dari:			This account consists of:
Kas besar	1.850.065.736.147	1.378.612.952.764	Cash at Teller
Kas pada mesin ATM	187.034.959.000	177.657.350.000	Cash in ATMs
Kas CRM	5.204.700.000	108.600.000	Cash in CRMs
Kas kecil	7.000.000	17.000.000	Post Cash
<b>Jumlah</b>	<b>2.053.312.396.147</b>	<b>1.566.445.902.764</b>	<b>Total</b>

4. GIRO PADA BANK INDONESIA	2021	2020	
Akiva ini terdiri dari:			This account consists of:
Rupiah	1.375.541.297.478	855.543.761.279	Rupiah
<b>Jumlah</b>	<b>1.375.541.297.478</b>	<b>855.543.761.279</b>	<b>Total</b>

Sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang terakhir kali diubah dengan No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Bank sudah memenuhi kewajiban menyetor Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah (RGM) Syariah dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terdapat di atas, bank telah menyetor persentase Giro Wajib Minimum (GWM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 3,5% dan 4,5%.

Rasio Giro Wajib Minimum Syariah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 3,35% dan 3,97%.

This is in accordance with the Regulation of Members of the Board of Governors No. 20/10/PADG/2018 dated 31 May, 2018 which was last amended to No. 21/14/PADG/2019 dated 26 June 2019 concerning the Second Amendment in the Regulation of Members of the Board of Governors No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Bank has fulfilled the obligation to maintain a Sharia Macroeprudential Intermediation Ratio (RIM) Current Account and Sharia Macroeprudential Liquidity Support (PLM) in accordance with the provisions. As of December 31, 2020 and 2019, in accordance with the provisions of Bank Indonesia above, bank must meet the statutory reserve requirement (GWM) and Sharia Macroeprudential Intermediation (RIM) in Rupiah and foreign currencies of 3.5% and respectively 4.5%.

Bank's Minimum Reserve Requirement as of December 31, 2021 and 2020 is 3.35% and 3.97%.

5. GIRO PADA BANK LAIN	2021	2020	
Akiva ini terdiri dari:			This account consists of:
PT Bank Central Asia Tbk	39.277.136.451	10.225.690.523	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000.000	678.056	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	7.669.733.592	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	159.814.339	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	-	1.322.132	PT Bank Syariah Mandiri
<b>Jumlah</b>	<b>12.546.869.655</b>	<b>10.387.365.650</b>	<b>Total</b>

Giro Bank lain merupakan giro dalam mata uang Rupiah.

Current accounts in other banks are current accounts denominated in Rupiah.

PT BANK ACEH SYARIAH  
**LATIHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Ribu Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2021 and 2020  
 And For The Year Then Ended  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)**

**5. CURRENT ACCOUNT WITH OTHERS BANK (lanjutan)**

Setelah giro pada bank lain didaftarkan secara Manajemen  
 terhadap buku-jurnal cadangan kerugian penunjang nilai  
 tidak dipulihkan pada 31 Desember 2021 dan 2020, maka  
 manajemen beropini bahwa giro pada bank lain dapat terjual.

All current account with other bank are classified as SPVMA.  
 Management believe that the allowance for impairment losses are  
 not necessary as of December 31, 2021 and 2020, since  
 management always current account with other bank are fully  
 collateral.

**6. LENDIRIAN PADA BANK INDONESIA DAN  
 BANK LAIN**

**6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA, AND  
 OTHER BANKS**

	2021	2020	
a. Berdasarkan Jenis:			u. By Type
Bank Bank Terapan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)	1.587.495.000.000	1.587.071.000.000	Bank Indonesia Type Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)
Keperluan sehari-hari	1.300.000.000	640.390.000.000	Keperluan sehari-hari
Jumlah	2.487.305.000.000	1.500.000.000	Total
Ledungan Kredit Jumlah Bersih	2.487.305.000.000	2.233.871.000.000	Allowance for impairment losses Net
b. Berdasarkan Penerbit:			
Bank Indonesia	2.487.305.000.000	2.232.371.000.000	Bank Indonesia
PT BERSI Militeri Wanita	1.500.000.000	-	PT BERSI Militeri Wanita
PT BERSI Baiturrahman	300.000.000	1.000.000.000	PT BERSI Baiturrahman
PT BERSI Ismael Jambh Darussalam	-	500.000.000	PT BERSI Ismael Jambh Darussalam
Jumlah	2.487.305.000.000	2.233.871.000.000	Total
Cadangan kerugian penunjan nilai Jumlah Bersih	2.487.305.000.000	2.233.871.000.000	allowance for impairment losses Net

Sturth penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  
 diklasifikasikan secara:

All placements with Bank Indonesia and other banks are classified as  
 current.

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian  
 penunjan nilai penempatan pada bank lain tidak dipertahankan pada  
 31 Desember 2021, karena manajemen berkeyakinan penempatan  
 bank lain dapat terjual dan yang telah dibentok pada tanggal 31  
 Desember 2021 adalah cukup untuk menjamin kemampuan  
 kreditnya penempatan nilai.

Management believe that the allowance for impairment losses on  
 other banks are not required as of December 31, 2021, since  
 management believe that placement with other banks are fully  
 collateral and which was established as December 31, 2021, is  
 sufficient to cover possible impairment losses.

1. SURAT BERTAGIH		2. MARKETABLE SECURITIES				
a. Berdasarkan tujuan dan jenis		a. By purpose and type				
Tujuan dan Jenis/ purpose and type	Tingkat kepemilikan/holdings (%)	Nilai Tersebut/Carrying value		Peningkatan/Bonus		Tanggal jatuh tempo/ maturity date
		31 Des/Dec 31, 2021	31 Des/Dec 31, 2020	31 Des/Dec 31, 2021	31 Des/Dec 31, 2020	
<b>Valur diukur pada nilai wajar efektif/ pengalihan ke pengalihan efektif</b>						
<b>Valur measured at fair value through other comprehensive income</b>						
SBSN RI Seri PBS004	6,10	116.520.000.000	17.445.200.000	-	-	15-Feb-37
SBSN RI Seri PBS005	6,75	57.630.029.534	21.917.297.400	-	-	15-Apr-43
SBSN RI Seri PBSul	7,75	775.757.513.304	212.417.965.000	-	-	15-Aug-23
SBSN RI Seri PBS011	8,85	400.075.762.698	474.004.450.000	-	-	15-Nov-11
SBSN RI Seri PBS014	5,51	-	75.180.000.000	-	-	15-Apr-21
SBSN RI Seri PBS015	5,00	104.744.000.000	110.600.000.000	-	-	15-Jul-47
SBSN RI Seri PBS020	6,31	450.496.000.000	-	-	-	15-Mar-34
Jumlah Total		1.591.572.402.150	1.469.596.712.400			
<b>Reksadana tersedia untuk dijual</b>						
<b>Mutual fund Available for sale</b>						
RDEPQ PNV FAAZA	-	213.069.766.323	300.549.041.034	-	-	24-Jan-22
RDEPQ Aman Atas Kas Syariah LAMRIS	-	430.242.444.063	300.547.026.194	-	-	24-Jan-21
RDEPQ Indeks Dunia Syariah	-	330.112.514.631	300.061.767.932	-	-	24-Jan-22
RDEPQ Majors Pasar Uang Syariah Indonesia	-	350.180.515.992	47.872.492.511	-	-	24-Jan-22
RDEPQ Majors Saham Negara Indonesia	-	100.742.196.654	290.513.389.544	-	-	24-Mar-22
Reksadana Syariah Mipac	-	-	299.021.120.151	-	-	22-Jan-21
Jumlah Total		1.334.204.296.361	1.468.979.711.725			
<b>Valur diukur pada biaya perolehan/ Sahur measured at acquisition cost</b>						
SBSN RI Seri PBS004	6,10	143.058.510.174	-	RRB	-	15-Feb-37
SBSN RI Seri PBS011	6,75	703.555.405.341	215.747.104.917	RRR	99B-	15-Aug-23
SBSN RI Seri PBS012	6,28	549.667.051.956	211.476.166.532	RIBB	99B-	15-Nov-21
SBSN RI Seri PBS014	5,50	-	230.548.522.799	-	99B-	15-Aug-21
SBSN RI Seri PBS017	5,13	254.874.421.432	94.254.680.642	RRR-	99P-	15-Sep-25
SBSN RI Seri PBS020	5,50	191.057.452.131	99.891.757.665	RRR-	99B-	15-Aug-21
SBSN RI Seri PBS020	5,38	169.464.291.034	-	99B-	99B-	15-Mar-34
Sahur Madkaniik						
Sahur Madkaniik	11,30	91.000.030.000	50.000.000.000	id AAA (g)	id AAA (g)	27-Feb-23
Sahur Madkaniik						
Sahur Madkaniik	6,25	-	100.000.000.000	-	id AAA (g)	15-Nov-21
Sahur Madkaniik						
Sahur Madkaniik	5,50	9.000.000.000	9.000.000.000	id AAA	id AAA	5-Mar-24
Sahur Madkaniik						
Sahur Madkaniik	6,25	15.000.000.000	15.000.000.000	id AAA	id AAA	15-Aug-27
Sahur Madkaniik						
Sahur Madkaniik	11,10	500.000.000.000	40.000.000.000	id AAA (g)	id AAA (g)	7-Jul-23
Sahur Madkaniik						
Sahur Madkaniik	7,10	100.000.000.000	100.000.000.000	id AAA (g)	id AAA (g)	1-Jul-22
Sahur Madkaniik						
Sahur Madkaniik	6,50	50.000.000.000	50.000.000.000	id AAA (g)	id AAA (g)	23-Feb-23
Jumlah Total		1.411.512.000.000	1.295.435.639.561			





7. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

7. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

b. Berdasarkan Emisi:

b. By Issuer

	2021	2020	
Bank Indonesia	2.639.905.402.574	1.990.650.352.566	Bank Indonesia
GUS Bank Jatim	500.000.000.000	350.000.000.000	GUS Bank Jatim
PT Majaris Asset Management	400.308.712.016	358.187.695.355	PT Majaris Asset Management
PT Avrist Asset Management	400.242.844.063	300.347.926.194	PT Avrist Asset Management
GUS Bank Jateng	350.000.000.000	100.000.000.000	GUS Bank Jateng
PT Bahana TCW Investment Management	300.162.933.670	300.061.752.992	PT Bahana TCW Investment Management
PT PLN (Persero)	250.000.000.000	250.000.000.000	PT PLN (Persero)
PT PNM Investment Management	200.069.766.633	300.349.041.524	PT PNM Investment Management
PT Bank Jabar Banten Syariah	100.000.000.000	50.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah
GUS Bank Kaltim	50.000.000.000	80.000.000.000	GUS Bank Kaltim
Global Medicare	50.000.000.000	50.000.000.000	Global Medicare
PT Bank Syariah Mandiri	50.000.000.000	50.000.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
GUS Bank Kalsel	50.000.000.000	-	GUS Bank Kalsel
PT Bank Mitra Syariah	30.000.000.000	50.000.000.000	PT Bank Mitra Syariah
Indosat	24.000.000.000	24.000.000.000	Indosat
Erinibank	-	100.000.000.000	Erinibank
Bank CIMB Niaga	-	100.000.000.000	Bank CIMB Niaga
GUS Bank Riau	-	200.000.000.000	GUS Bank Riau
Astra Sudaya Finance	-	50.000.000.000	Astra Sudaya Finance
Bank Mega Syariah	-	100.000.000.000	Bank Mega Syariah
PT Mandiri Manajemen Investasi	-	300.053.000.550	PT Mandiri Manajemen Investasi
Medco Power Indonesia	-	10.000.000.000	Medco Power Indonesia
Jumlah	5.394.689.659.036	5.043.630.083.681	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Bersih	5.394.689.659.036	5.043.630.083.681	Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By term period

	2021	2020	
Sampai dengan 1 bulan	5.080.000.000.000	930.000.000.000	Up to 1 month
1 - 3 bulan	1.300.784.256.361	1.488.999.721.115	1 - 3 month
3 - 6 bulan	259.435.978.050	686.712.289.484	3 - 6 month
> 6 bulan	2.754.469.424.625	1.938.915.067.082	> 6 month
Jumlah	5.394.689.659.036	5.043.630.083.681	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Bersih	5.394.689.659.036	5.043.630.083.681	Net

d. Berdasarkan Jatuh Tempo

d. By remaining period

	2021	2020	
Sampai dengan 1 bulan	2.180.636.059.708	2.218.654.528.572	Up to 1 month
1 - 12 bulan	250.148.596.654	-	1 - 12 month
12 - 60 bulan	1.042.929.734.498	2.824.945.555.609	12 - 60 month
> 60 bulan	1.770.975.628.177	-	> 60 month
Jumlah	5.394.689.659.036	5.043.630.083.681	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Bersih	5.394.689.659.036	5.043.630.083.681	Net

PT BANK ACEH SYARIAH  
**CATATAN KEAS LAMORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2021 and 2020  
 And For The Year Then Ended  
 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated.

**1. SUKSES MELAKUKAKAN (Bantuan)**

Manajemen berpendapat bahwa jenis bantuan keuangan penerusannya tidak timbul dipertanian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, karena manajemen tidak yakin bahwa investasi pada surat berharga dapat terjual.

Management believes that the allowance for impairment losses are not necessary as of December 31, 2021 and 2020, since management believes that the investment in marketable securities are collectible.

**2. MARIYABLE SECURITIES (Gadai)**

Untuk tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.

As of December 31, 2021, there were no securities purchased with agreements to resell.

**3. PIUTAN**

**4. RECEIVABLES**

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

a. By Type and collectibility

Lemon Drona	31 Desember 2021 (December 31, 2021)		31 Desember 2020 (December 31, 2020)		Total
	Utang Usaha Kredit Penjualan	Utang Usaha Kredit Sementara	Utang Usaha Kredit Sementara	Utang Usaha Kredit Sementara	
Normal	10.663.463,76	11.661.000,11	17.754.850,94	16.272.020,91	34.026.871,85
Merusak	13.887.222,77	21.607.881,17	23.020.160	46.107.910	60.128.070
Jumlah	24.550.686,53	33.268.881,28	40.775.010,94	62.379.930,91	103.154.941,85

Lemon Drona	31 Desember 2021 (December 31, 2021)		31 Desember 2020 (December 31, 2020)		Total
	Utang Usaha Kredit Sementara	Utang Usaha Kredit Sementara	Utang Usaha Kredit Sementara	Utang Usaha Kredit Sementara	
Normal	10.663.463,76	11.661.000,11	17.754.850,94	16.272.020,91	34.026.871,85
Merusak	13.887.222,77	21.607.881,17	23.020.160	46.107.910	60.128.070
Jumlah	24.550.686,53	33.268.881,28	40.775.010,94	62.379.930,91	103.154.941,85

**5. Perusakan Hutang**

**6. By refunding**

Piutang Berbank	171.198.226,259	13.667.197,198	184.865.423,457
Piutang Kredit	13.856.075.782,889	23.814.251.516,973	37.670.677.040,432
Jumlah	13.873.274.009,148	23.827.818.714,171	37.701.092.723,320
Cadangan kerugian penurunan nilai	(171.080.222,831)	(171.301.666,878)	(342.381.889,709)
Jumlah Bersih	13.702.193.786,317	23.356.517.047,293	37.058.710,831

Piutang Berbank	13.667.197,198	184.865.423,457	198.532.620,655
Piutang Kredit	23.814.251,516,973	37.670.677,040,432	61.484.928,557
Jumlah	23.827.818,714,171	242.347.351,989	266.175.170,708
Cadangan kerugian penurunan nilai	(171.301,666,878)	(342.381,889,709)	(513.683,488,587)
Jumlah Bersih	23.356.517,047,293	242.004,962,199	237.361,684,405

**3. PIUTANG (Total)**

**A. RECEIVABLES (Continued)**

i. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan kolektabilitasnya

c. By economic sector and collectibility

31 December 2021 / Desember 31, 2021

	Laporan Curant	Saluran/Tempat Utang/ Sumber/Tempat	Klasifikasi Saluran/ Kategori/Tempat	Dibayarkan Dipertajam	Masa Tamat	Ases/ Risiko	
Pemasok	26.761.164,00	2.286.291,10		265.304,40		56.429.251,50	Supplier
Pembayar	12.743.071.344	-		-		12.743.071,344	Debtor
Pembayaran	85.090.988,40	3.339.461,33		592.861,19		90.023.349,60	Manufacturing
Pembelian	7.246.234,40	1.450.000,00		-		5.827.234,40	Trading
Uang gas, listrik dan air	1.730.979,90	169.817,80		-		1.899.797,70	Utilities, water, and gas
Kontribusi	222.320.000	899.351,00		24.644,00		223.443.351,00	Contribution
Pendapatan restitusi dan lain- lain	20.493.575,00	21.846.944,00		1.190.000,00		23.530.519,00	Recovery and other income
Penghasilan pengalihan dan lain-lain	29.129.807,60	591.751,77		16.557,00		30.718.116,37	Transfer income and other income
Jasa asuransi	2.784.430,11	236.904,10		4.170,10		3.025.404,31	Insurance services
Lain-lain	1.360.394,75	5.037.644,33		48.800,00		6.446.238,08	Other
Jumlah	11.001.220.526,60	171.075.195,10		7.794.630,60		12.877.626,30	Total
<b>Saluran/Tempat Pembayaran/Tempat Utang</b>	<b>11.001.220.526,60</b>	<b>171.075.195,10</b>	<b>11.001.220.526,60</b>	<b>7.794.630,60</b>	<b>-</b>	<b>12.877.626,30</b>	<b>Saluran/Tempat Pembayaran/Tempat Utang</b>

31 December 2020 / Desember 31, 2020

	Laporan Curant	Saluran/Tempat Utang/ Sumber/Tempat	Klasifikasi Saluran/ Kategori/Tempat	Dibayarkan Dipertajam	Masa Tamat	Ases/ Risiko	
Pemasok	25.829.743,80	4.246.295,24		196.810,40		30.272.849,44	Supplier
Pembayar	1.079.029,20	-		-		1.079.029,20	Debtor
Pembayaran	81.139.916,50	7.752.311,25		267.210,60		90.159.438,35	Manufacturing
Pembelian	5.071.509,20	937.881,30		-		6.009.390,50	Trading
Uang gas, listrik dan air	719.214,20	-		-		719.214,20	Utilities, water, and gas
Kontribusi	91.147.494,80	1.471.151,20		-		92.618.646,00	Contribution
Pendapatan restitusi dan lain- lain	12.413.847,20	23.081.964,00		1.689.382,00		37.185.193,20	Recovery and other income
Penghasilan pengalihan dan lain-lain	4.111.046,40	1.267.336,00		1.267,00		5.379.649,40	Transfer income and other income
Jasa asuransi	8.718.438,00	461.785,00		14,00		9.180.237,00	Insurance services
Lain-lain	18.766.881,40	4.470.195,00		166.416,70		23.393.493,10	Other
Jumlah	14.821.249.919,10	177.269.641,74		7.774.555,60		16.875.425,14	Total
<b>Saluran/Tempat Pembayaran/Tempat Utang</b>	<b>14.821.249.919,10</b>	<b>177.269.641,74</b>	<b>14.821.249.919,10</b>	<b>7.774.555,60</b>	<b>-</b>	<b>16.875.425,14</b>	<b>Saluran/Tempat Pembayaran/Tempat Utang</b>

ii. Piutang bermasalah

	2021
Pendapatan, restoran, dan hotel	111.582.754.290
Jasa Sosial/Masyarakat	1.250.861.866
Pengangkutan	
Pengangkutan, Pengiriman dan Komunikasi	522.511.443
Pertanian	1.286.506.930
	<u>114.643.634.529</u>

d. Non performing

	2020	
Pendapatan, restoran, dan hotel	476.595.411.624	Trading, restaurants, and hotel
Jasa Sosial/Masyarakat	5.651.516.591	Social Services
Pengangkutan	319.357.148	Shipping
Pengangkutan, Pengiriman dan Komunikasi	767.598.953	Transportation, van-house and communication
Pertanian	871.572.018	Agriculture
	<u>1.236.205.896.234</u>	

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2021 and 2020**  
**And For The Year Then Ended**  
**Presented in Rupiah, unless otherwise stated**

**8. PIUTANG (Lanjutan)**

**1. RECEIVABLES (Continued)**

**L. Piutang Semesta (Tuntutan)**

**d. Non performing**

	2021	2020	
Kecukupan Pembiayaan	144.464.405	766.571.342	Commercial
Perbaikan	1.872.530.215	1.737.033.041	Mortgage
-for Special Usaha	319.820.659	834.886.391	Retail
Lain-lain	92.360.280	32.677.856	Business segment
	31.914.560.150	42.260.936.665	Others
	13.813.538.674	45.572.127.715	
		169.577.616.999	Total Non performing
		(165.857.756.760)	Allowance for impairment losses
		4.824.860.239	Net

**e. Persekitaran jelek/waktu perjanjian**

**g. By terms of agreement**

	2021	2020	
Semua dengan 1 tahun	6.406.909.457	5.024.030.164	Up to 1 year
Lebih dari 1 s.d 2 tahun	76.324.509.438	506.113.616.075	Over 1 - 2 years
Lebih dari 2 s.d 3 tahun	302.319.289.250	1.964.557.092.845	Over 2 - 3 years
Lebih dari 3 s.d 4 tahun	275.987.603.003	311.081.846.004	Over 3 - 4 years
Lebih dari 4 s.d 5 tahun	609.910.676.805	495.374.384.529	Over 4 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	12.540.115.163.795	12.569.282.533.846	Over 5 years
Jumlah	13.875.373.373.148	12.827.912.714.169	Total
Costoan kerugian posnaman nilai	(171.900.323.211)	(171.308.666.876)	Allowance for impairment losses
Jumlah Bersih	13.703.473.050.937	13.656.604.847.293	Net

**f. Berdasarkan nilai jatuh tempo**

**h. By remaining period to maturity**

	2021	2020	
Sampai dengan 1 tahun	148.702.456.104	113.368.377.065	Up to 1 year
Lebih dari 1 s.d 2 tahun	457.343.049.492	308.053.859.482	Over 1 - 2 years
Lebih dari 2 s.d 3 tahun	721.822.629.463	612.348.614.007	Over 2 - 3 years
Lebih dari 3 s.d 4 tahun	792.759.560.801	835.791.156.983	Over 3 - 4 years
Lebih dari 4 s.d 5 tahun	807.861.681.231	457.683.656.741	Over 4 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	21.964.973.023.657	10.784.367.239.091	Over 5 years
Jumlah	33.873.733.319.148	18.527.913.714.169	Total
Liabilitas kerugian penunahan nilai	(171.900.323.211)	(171.308.666.876)	Allowance for impairment losses
Jumlah Bersih	33.701.833.095.937	18.356.604.847.293	Net

**g. Cadangan kerugian persaman nilai**

**g. Allowance for doubtful loan losses**

Menyemen berpedang bahwa jumlah cadangan kerugian persatuan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian persatuan nilai akibat tidak teragihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover impairment losses due uncertainties in receivables.

**h. Informasi penting lainnya**

**h. Other significant information**

Terdapat margin konservasi piutang dalam laporan keuangan selama 1%, 2%, dan 3% untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The margin margin for receivables is equal to around the amount of 1%, 2% and 3% for annum for December 31, 2021 and 2020.

Jumlah piutang yang direvaluasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp116.678.905.442 dan Rp242.615.273.089. Revaluasi piutang dilakukan dengan cara penyesuaian nilai dan penyediaan kembali persenyawaan.

Restructured receivables as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp106.678.905.442 and Rp242.615.273.089, respectively. Revaluations are measured by providing credit cushion and reevaluation of payment.

8. PIUTANG (Lanjutan)	8. RECEIVABLES (Continued)
<p>b. Informasi penting lainnya (Lanjutan)</p>	<p>b. Other significant information (Continued)</p>
<p>Bank telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021, "Sementara Perencanaan Nasional sebagai kebijakan countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019".</p>	<p>Bank has restructured credit for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 17/POJK.03/2021 dated 10 September 2021 "National Economic Stimulus as countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease 2019".</p>
<p>Selubungan dengan keputusan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang kemudian diubah dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 17/POJK.03/2020 tanggal 10 September 2021 untuk memenuhi perencanaan nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019.</p>	<p>In relation to compliance with the Financial Services Authority (OJK), the Bank applies OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 09, 2019 concerning "Assessment of Commercial Bank Asset Quality" which was later amended by OJK Regulation No. 17/POJK.03/2021 concerning the second amendment to the regulation of the financial services authority number 17/POJK.03/2020 on September 10, 2021 concerning the national economic stimulus or a countercyclical policy due to the impact of the spread of coronavirus disease 2019.</p>
<p>Pendapatan margin murabahah yang masih akan diterima oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp73.546.920.794 dan Rp73.073.500.185.</p>	<p>Accrued murabahah margin income as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp73,546,920,794 and Rp73,073,500,185, respectively.</p>
<p>Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp8.416.948.546,285 dan Rp8.521.074.651.201.</p>	<p>Deferred murabahah margin income as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp8,416,948,546,285 and Rp8,521,074,651,201, respectively.</p>
<p>Piutang murabahah kepada karyawan Bank merupakan piutang untuk tujuan membeli kendaraan, rumah dan pembiayaan pribadi lainnya. Piutang ini dilayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan tingkat margin keuntungan piutang berkisar antara 4% per tahun.</p>	<p>Murabahah receivables to employees of the Bank represent receivables for the purpose of buying vehicles, houses and other personal financing. This receivable is repaid through salary deduction every month with a profit margin of around 4% per annum.</p>
<p>Piutang murabahah dijamin dengan agunan yang abstrak seperti hak tanggungan atau surat kuasa memasaka, hak tanggungan dan sertifikat atas aset rumah untuk memortgagkan deposito murabahah atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito murabahah yang menjadi jaminan pembiayaan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.161.250.000 dan Rp2.850.000.000.</p>	<p>Murabahah receivables are collateralized by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, power attorney in liquidate time deposits, and other guarantees accepted by the Bank. Total murabahah deposits pledged as collateral as of December 31, 2021 and 2020 were Rp1,161,250,000 and Rp2,850,000,000, respectively.</p>
<p>Rasio piutang non performing gross dan net pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 1,31% dan 0,99%, dan 1,76% dan 0,93%.</p>	<p>Ratio of gross and net non performing receivables as of December 31, 2021 and 2020 is 1.31% and 0.99% and 1.76% and 0.93%, respectively.</p>

9. PENYERTAAN AKUSIBILANKAN

9. AKUSIBILANKAN PRANONIM

a. By type and collectibility

a. By Type and collectibility

Jenis Akun	31 Desember 2021/December 31, 2021		31 Desember 2020/December 31, 2020		Keterangan
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
Utang Piutang	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Rekening Korban
Utang	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Utang
Utang Bank	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Utang Bank
Utang Pihak Lain	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	

Jenis Akun	31 Desember 2021/December 31, 2021		31 Desember 2020/December 31, 2020		Keterangan
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
Utang Piutang	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Rekening Korban
Utang	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Utang
Utang Bank	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Utang Bank
Utang Pihak Lain	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	

b. By insurance

b. By insurance

Jenis Akun	31 Desember 2021/December 31, 2021		31 Desember 2020/December 31, 2020		Keterangan
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
Utang Piutang	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Rekening Korban
Utang	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Utang
Utang Bank	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Utang Bank
Utang Pihak Lain	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	

c. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas

c. By economic sector and collectibility

Jenis Akun	31 Desember 2021/December 31, 2021		31 Desember 2020/December 31, 2020		Keterangan
	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
Utang Piutang	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Rekening Korban
Utang	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Utang
Utang Bank	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	1.539.826.227	Utang Bank
Utang Pihak Lain	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	<b>1.539.826.227</b>	

**9. PEMBIAYAAN MUSTARAKAH (Lanjutan)**

**9. MUSTARAKAH FINANCING (Continued)**

**c. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan likuiditas (Lanjutan)**

**c. By economic sector and collectibility (Continued)**

31 Desember 2021 / December 31, 2021								
	Kategori Group	Ukuran portofolio Klasifikasi Special assets	Kelebihan/kekurangan Subsidiarisasi	Disgapan Dukungan	Pinjam Lain	Bank Terd		
	Arusana	14.919.237.173	2.675.697.517	13.243.539.656	-	17.644.116	11.981.821.824	Arusana
	Perdagangan	19.567.236.173	-	-	-	1.445.000.000	22.012.236.173	Perdagangan
	Perumahan	7.849.747.746	9.701.764	38.722.014	-	5.824.517.515	64.244.411.809	Perumahan
	Perikanan	1.948.844.818	-	-	-	176.375.843	1.772.468.975	Perikanan
	Tanah, bangunan dan Peralatan	48.237.147.581	-	-	-	-	65.107.147.581	Tanah, bangunan dan Peralatan
	Perdagangan perantara, asuransi dan lain-lain	2.675.697.517	-	1.427.806.806	-	572.764.264	4.676.268.587	Perdagangan perantara, asuransi dan lain-lain
	Pragangkulat, perdagangan dan lain-lain	251.479.018.321	2.804.827.471	4.451.938.911	1.427.806.806	27.487.147.135	266.249.638.753	Pragangkulat, perdagangan dan lain-lain
	Perdagangan perantara dan lain-lain	104.897.046.1	1.672.808.479	-	-	4.895.308.200	106.569.854.779	Perdagangan perantara dan lain-lain
	Lain-lain	184.784.216.209	-	-	-	9.888.838.935	194.673.055.144	Lain-lain
	Perumahan	7.849.747.746	48.428.230	-	-	761.361.866	79.141.577.842	Perumahan
	Perikanan	1.948.844.818	157.399.241	-	-	-	2.106.244.059	Perikanan
	Jumlah	1.404.108.999.494	7.081.561.735	4.879.795.568	1.427.806.806	34.017.230.135	1.441.185.026.915	Jumlah
	Kelebihan/kekurangan Subsidiarisasi N.L.	(141.891.147)	(211.075.519)	(429.320.674)	-	-	(882.287.340)	Kelebihan/kekurangan Subsidiarisasi N.L.
	Jumlah	1.262.217.852.347	6.870.486.216	4.450.474.894	-	34.017.230.135	1.432.292.739.575	Jumlah

**d. Berdasarkan permasalahan**

**d. Non performing**

	2021	2020	
Perdagangan, restoran dan hotel	20.267.560.764	40.313.764.282	Trading, restaurants and hotel
Konstruksi	27.460.184.141	7.650.781.564	Construction
Pragangkulat, perdagangan dan komunikasi	-	4.095.000.000	Transportation, warehousing and communication
Jasa sosial/masyarakat	1.397.500.974	3.721.153.898	Social services
Perindustrian	4.156.861.496	3.838.137.599	Manufacturing
Pertambangan	-	1.045.000.000	Mining
Pertanian	2.199.947.154	458.783.138	Agriculture
Pertanian	31.479.633	159.207.483	Railway
Listrik, gas dan air	-	-	Electricity, water and gas
Jasa dunia usaha	-	500.000.000	Business service
Lain-lain	1.045.000.000	357.916.672	Others
Jumlah	51.407.534.362	64.141.699.336	Total
Liabilitas kerugian penurunan nilai	(50.404.969.533)	(62.216.432.518)	Allowance for impairment losses
Jumlah Bersih	1.802.564.829	1.925.266.798	Net

**e. Berdasarkan jangka waktu perjanjian**

**e. By terms of agreement**

	2021	2020	
Selesai dalam 1 tahun	356.207.701.287	196.744.991.163	Up to 1 year
Lebih dari 1 s/d 2 tahun	56.411.734.668	78.547.423.170	Over 1 - 2 years
Lebih dari 2 s/d 3 tahun	270.371.261.394	105.747.952.649	Over 2 - 3 years
Lebih dari 3 s/d 4 tahun	2.271.476.548	239.385.843.528	Over 3 - 4 years
Lebih dari 4 s/d 5 tahun	173.094.721.221	91.264.325.401	Over 4 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	1.471.214.359.596	967.560.184.564	Over 5 years
Jumlah	2.359.571.254.634	1.683.185.820.575	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.719.397.142)	(63.743.502.566)	Allowance for impairment losses
Jumlah Bersih	2.306.851.857.492	1.619.442.318.009	Net

**9. PERHITUNGAN HESKARAKAR (Lanjutan)**

**9. METODE AKRIF PINJANGAN (Kanjutan)**

f. Berdasarkan usia umur jatuh tempo

f. By remaining period to maturity

	2021
Restoran dengan > tahun	931.070.343.706
Terdapat 1 s.d 3 tahun	206.228.543.709
Lebih dari 3 s.d 5 tahun	130.683.900.094
Lebih dari 5 s.d 7 tahun	74.000.030.072
Lebih dari 7 s.d 9 tahun	74.931.973.372
Lebih dari 9 tahun	1.188.376.983.291
Jumlah	<u>2.585.571.264.624</u>
Cadangan kerugian piutang	(57.710.397.143)
Jumlah bersih	<u>2.527.860.867.481</u>

	2020	Up to 1 year	Total
109.656.410.851	178.541.215.532	Over 1 - 1 years	
22.180.620.249	8.621.487.463	Over 2 - 3 years	
87.197.963.699	61.166.257.282	Over 3 - 4 years	
61.166.257.282	1.481.185.020.575	Over 5 years	
1.481.185.020.575	(53.745.570.566)	Total	
1.427.439.514.009	1.427.439.514.009	Allowance for impairment losses	
		Net	

g. Lendang kerugian pemenuhan nilai

g. Allowance for impairment losses

Mengingat besarnya cadangan kerugian pemenuhan nilai yang tersedia cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian pemenuhan nilai akibat tidak terwujudnya piutang

Management believes that the allow ance for impairment losses on receivable is adequate to cover likely real losses from uncollectible receivable

h. Lendang peringat lainnya

h. Other significant information

Tingkat biaya hasil pembiayaan merupakan sebesar antara 12,04% sampai dengan 13,50% per tahun pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Profit sharing rate for mudharabah financing ranged from approximately 12,00% to 13,50% per annum for December 31, 2021 and 2020.

Perbandingan merupakan yang dipersebutkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp533.083.335.176 dan Rp426.251.890.

Restructured mortgage financing as of December 31, 2021 and 2020 are Rp333,083,335,476 and Rp460,251,890, respectively.

Besik telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang melakukan penundaan Covid-19 sesuai dengan POJK No. 17/POJK.02/2021 tanggal 10 September 2021. Silakan Pivokominas Nasional sebagai kesjajaer concessional Bankjak Pevokominas Concessional Disease 2019.

Bank has restructured credit for debtor affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 17/POJK.02/2021 dated 10 September 2021. National Economic Stimulus or concessional; Policy Impact of Coronavirus Disease spread 2019.

Pembiayaan sukuk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing masing sebesar Rp336.069.613.475 dan Rp378.135.811.131 per tahun. Tidak berlaku pembiayaan sukuk, di mana Bank bertindak sebagai penerjemah sukuk. Partisipasi Bank dalam pembiayaan sukuk ini sebesar antara 5,74% sampai 11,25% per tanggal 31 Desember 2021 dan 4,49% sampai 17,78% per tanggal 31 Desember 2020.

Pembinaan merupakan elemen kunci aguar yang tidak dengan tak merupakan aset serta kuesi menasung kea tanggungan dan nilai jual yang tinggi untuk memastikan diproses dan tidak ada jmlaan lain yang dapat merugikan ekis Bank. Terlepas aspekto yang menjadi jaminan pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.710.000.000 dan Rp2.700.000.000.

Kurangnya asuransi dan collateralized by register of mortgage or power of attorney to mortgage and and, power attorney to liquidate asset depvite and other guarantees accepted by the Bank. Despite alleged as collateral is of December 31, 2021 and 2020 are amounting to Rp1,710,000,000 and Rp2,700,000,000, respectively).

Rasio penyalang merupakan non performing gross dan net pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing masing sebesar 2,18% dan 0,04%, dan 3,22% dan 0,11%.

Ratio of gross and net non performing mortgage financing as of December 31, 2021 and 2020 is 2,18% and 0,04% and 3,22% and 0,11% respectively.



9. PEMBIAYAAN MUSAHARAH (Lanjutan)

9. MUSAHARAH FINANCING (Continued)

a. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

a. Movement of allowance for impairment losses

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang musaharah dan pembiayaan musaharah adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses for musaharah receivables and musaharah financing are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	235.094.550.250	184.660.566.773	Beginning balance of the year
Pembentukan periode berjalan	39.385.922.617	50.194.181.477	Estimutable formation and recovery
Pemulihan periode berjalan	-	-	Recovery during the year
Penghapusan periode berjalan	(49.740.651.894)	-	Write off during the year
Saldo akhir tahun	224.699.620.973	235.094.550.251	Ending balance of the year

10. PINJAMAN QARDH

10. QARDH

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

a. By Type and collectibility

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Laporan Current	Daftar pemanggilan utang / Special collection	Kategori sangat tidak kolektibel	Daftar pemanggilan utang / Special collection	Manfaat / Total	
Musaharah	10.263.318	11.111.196	-	-	99.282.546	Portofolio Qardh
Musaharah	109.504.152.825	651.213.987	-	-	109.504.152.825	Portofolio Musaharah
Jumlah	119.767.471.143	662.325.183	-	-	110.276.695.371	Total
Keperluan Kewajiban Pemenuhan Qardh	-	-	-	-	-	Akumulasi keperluan pemenuhan Qardh
Resiko	109.767.471.143	662.325.183	-	-	110.276.695.371	Nilai

31 Desember 2020 / December 31, 2020

	Laporan Current	Daftar pemanggilan utang / Special collection	Kategori sangat tidak kolektibel	Daftar pemanggilan utang / Special collection	Manfaat / Total	
Musaharah	111.826.917	-	-	-	142.993.567	Portofolio Qardh
Musaharah	48.161.161.971	41.904.000	-	-	48.161.161.971	Portofolio Musaharah
Jumlah	48.273.031.888	41.904.000	-	-	48.273.031.888	Total
Keperluan Kewajiban Pemenuhan Qardh	-	-	-	-	-	Akumulasi keperluan pemenuhan Qardh
Resiko	48.273.031.888	41.904.000	-	-	48.273.031.888	Nilai

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan kolektibilitas

b. By economic sector and collectibility

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Laporan Current	Daftar pemanggilan utang / Special collection	Kategori sangat tidak kolektibel	Daftar pemanggilan utang / Special collection	Manfaat / Total	
Salah satu	109.646.274.847	284.648.335	-	-	110.276.695.371	Salah satu
Lain-lain	10.121.200.000	1.676.848	-	-	10.121.200.000	Lain-lain
Jumlah	119.767.471.143	286.325.183	-	-	120.397.895.371	Total
Keperluan Kewajiban Pemenuhan Qardh	-	-	-	-	-	Akumulasi keperluan pemenuhan Qardh
Resiko	119.767.471.143	286.325.183	-	-	120.397.895.371	Nilai

31 Desember 2020 / December 31, 2020

	Laporan Current	Daftar pemanggilan utang / Special collection	Kategori sangat tidak kolektibel	Daftar pemanggilan utang / Special collection	Manfaat / Total	
Salah satu	111.826.917	-	-	-	111.826.917	Salah satu
Lain-lain	47.334.144	4.069.800	-	-	47.334.144	Lain-lain
Jumlah	159.161.061	4.069.800	-	-	159.161.061	Total
Keperluan Kewajiban Pemenuhan Qardh	-	-	-	-	-	Akumulasi keperluan pemenuhan Qardh
Resiko	159.161.061	4.069.800	-	-	159.161.061	Nilai

**19. JINJALAN QADIM (Lanjutan)**

**19. QADIM (continued)**

	a. Terjadi pada jangka waktu berjalan		c. By term of repayment	
	2021	2020	2021	2020
Sampai dengan 1 tahun	110.253.467.629	68.503.390.944		Up to 1 year
Terdahului 1 s.d 2 tahun	73.533.546	93.033.533		From 1 - 2 years
Jumlah	183.787.013.177	68.608.436.489		Total
Saldo awal				Saldo awal
Tambahan	180.337.023.177	68.608.436.489		Provision for impairment losses
Jumlah Bersih	180.337.023.177	68.608.436.489		Net
d. By remaining period in maturity				
2021				
Sampai dengan 1 tahun	110.313.031.177	68.503.390.944		Up to 1 year
Lebih dari 1 s.d 2 tahun	14.020.000	105.033.533		From 1 - 2 years
Jumlah	130.337.023.177	68.608.436.489		Total
Saldo awal				Saldo awal
Tambahan	110.337.023.177	68.608.436.489		Provision for impairment losses
Jumlah Bersih	110.337.023.177	68.608.436.489		Net

**20. ASSET UJARAN**

**20. IMPAIRMENT ASSETS**

Aktiva ini merupakan objek dan investasi yang memiliki nilai yang rendah dan jumlah nilai yang akan diterima diperkirakan akan lebih sedikit dari nilai tercatatnya.

This account represents lease object impairment. The amount of impairment is available and good from multi server with details as follows:

	2021		2020	
		USD	USD	USD
Jumlah	2.809.700.000	1.057.000.000	3.440.200.000	1.540.510.183
Saldo awal	3.049.000.000	1.282.200.000	3.440.200.000	1.540.510.183
Tambahan	(739.300.000)	(225.200.000)	(739.300.000)	(225.200.000)
Jumlah Bersih	2.069.700.000	826.800.000	2.700.900.000	1.315.310.183

**21. ASSET TETAP**

**21. PROPERTIES AND EQUIPMENT**

11 Desember 2021/ December 11, 2021

Kategori	Saldo awal		Saldo akhir	
	2021	2020	2021	2020
Peralatan	2.314.870.239	4.140.000	2.314.870.239	4.140.000
	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000
	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
Jumlah	2.809.700.000	4.228.000	2.809.700.000	4.228.000
Aset Tetap Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jumlah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aset Tidak Berwujud	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jumlah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aset Intangible Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jumlah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aset Intangible Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jumlah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aset Intangible Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jumlah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PT BANK ACEH SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Dijajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2021 and 2020  
And For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. PREMISES AND EQUIPMENT (Continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Nilai yang Berjalan	Penambahan / Addition	Penyusutan / Depreciation	Saldo nilai Peninggalan	
<b>Stasiun pemancar</b>					<b>Fixed equipment</b>
Tanah	5.114.267.111	57.900.240.450	(40.183.76.704)	172.132.028.257	Land
Terbangun	174.744.048.877	657.850.190	-	175.401.900.372	Building
Kendaraan bermotor	-	-	-	-	Motor Vehicle
Kendaraan bermotor	34.438.554.154	4.164.201.000	-	44.602.755.154	Vehicle
Investasi tetap	309.958.844.818	15.210.441.190	(107.964.270)	327.205.011.738	Other equipment
Kumulatif	421.894.236	-	-	421.894.236	Accumulated depreciation
Jumlah	1.040.114.907	51.276.689.590	(148.148.037,00)	1.492.959.459,69	Total
<b>Stasiun pemancar</b>					<b>Communication equipment</b>
Perangko	(21.296.000,00)	1.420.900,00	-	19.864.900,00	Stamp
Perangkat lunak	-	-	-	-	Software
Kendaraan bermotor	(21.501.650.000)	15.003.391.120	-	(6.498.258.880)	Vehicle
Investasi tetap	112.170.000,00	(80.204.000,00)	-	31.966.000,00	Other equipment
Persediaan	501.214.000	-	-	501.214.000	Inventory
Jumlah	1.040.114.907	(11.475.698,98)	-	1.028.639.208	Total
<b>Nilai buku</b>	<b>1.040.114.907</b>			<b>1.492.959.459,69</b>	<b>Book value</b>

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah No.468/Dum.01/REG/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh dan Gubernur Aceh perihal pemberian status pertanahan tanah seluas 3.365m2 yang terletak di Jl. Tjk. H.M.Daud Beureueh No.24 Kuta Alam Banda Aceh, surat tersebut telah dijawab oleh Badan Pengkelola Keuangan Aceh Pemerintah Aceh sebagaimana terlampir dalam surat No.560/275/2017 tanggal 22 Februari 2017 dan surat dari Gubernur Aceh No. 590/513 tanggal 20 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa tanah yang dimaksud tidak terdapat di dalam Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Aceh.

Berdasarkan pemeriksaan manajemen Bank, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset yang dimiliki oleh Bank.

Based on the letter issued by PT Bank Aceh Syariah No.468/Dum.01/REG/2017 dated February 1, 2017 addressed to the Secretary and Governor of the Province of Aceh, regarding the confirmation of the status of land registration of 3,365m2 located at Jl. Tjk. H.M.Daud Beureueh No. 24 of Kuta Alam Banda Aceh which has been answered by the Aceh Financial Management Agency of the Regional Government of Aceh as stated in letter No.560/275/2017 dated February 22, 2017 and letter by the Governor of Aceh No.590/513 dated October 20, 2017 which explains that the land is no longer contained in the Book of inventory of assets belonging to the Government of Aceh.

Based on the Bank's management review, there are no indication of impairment in value of fixed assets owned by the Bank.

13. ASET TAK BERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Nilai yang Berjalan	Penambahan / Addition	Penyusutan / Depreciation	Saldo ASET Peninggalan	
<b>Asuransi premi</b>					<b>Life insurance</b>
Premi	8.000.000,00	7.000,00	-	8.007.000,00	Premium
Jumlah	8.000.000,00	7.000,00	-	8.007.000,00	Total
<b>Asuransi perjalanan</b>					<b>Travel insurance</b>
Premi	11.118.267,40	2.235.577,99	-	13.353.845,39	Premium
Jumlah	13.118.267,40	2.235.577,99	-	15.353.845,39	Total
<b>Nilai buku</b>	<b>1.401.642,60</b>			<b>1.401.642,60</b>	<b>Book value</b>

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2021 and 2020  
 And For The Year Then Ended  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. ASET TAK BERNILAI (Lanjutan)**

**13. INTANGIBLE ASSETS (Continued)**

	31 Desember 2021/December 31, 2021		31 Desember 2020/December 31, 2020	
	Saldo awal Beginning	Perubahan Aktual Actual Change	Perubahan Diperhal Actual Change	Saldo akhir Ending Balance
<b>2. Aset tak berwujud</b>				
Patent	4.018.000,00	11.000,00	4.027.000,00	Copyrights
Trade mark	1.270.000,00	11.000,00	1.281.000,00	Software
				Tools
<b>3. Hak atas kekayaan intelektual</b>				
Goodwill	16.510.000,00	1.384.000,00	17.894.000,00	Goodwill
Intangible assets	18.288.000,00	1.395.000,00	19.689.000,00	Intangible assets
<b>Total</b>				<b>Total</b>

**14. ASET LAIN-LAIN**

**14. OTHER ASSETS**

	30/21		20/20	
Akiva ini terdiri dari:				
Piutang Pemuliharaan yang akan diterima	129.271.622,906	136.211.671,920		Income receivable
Biaya yang dikapitalisasi	45.854.706,579	35.123.024,419		Deferred charges
ATM Bersama	50.612.911,171	59.284.217,717		ATM Bersama
Biaya lainnya di muka	53.274.982,482	42.706.271,971		Prepaid expense
Persediaan	7.347.065,053	4.106.686,176		Supplies
Ketertarikan jumlah	2.434.526,675	2.441.185,946		Customer receivables
Persediaan dana penyelesaian	316.845.661	399.757.330		Customer under settlement
Lain-lain	321.761.956	128.600.000		Others
Jumlah	<b>389.440.705,315</b>	<b>241.331.274,682</b>		<b>Total</b>

**15. LIABILITAS SINGKRA**

**15. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY**

	30/21		20/20	
Akiva ini terdiri dari:				
Liabilitas kepada pihak ketiga	78.774.217,810	152.971.359,333		This account consists of:
Sejumlah jaminan untuk gaji pegawai	9.893.627,411	9.079.800,732		Liability to third parties
Biaya lain yang masih harus dibayar	1.777.079,316	1.958.215,638		Deposit guarantee etc
Lain-lain	68.083.611,082	63.939.551,032		Accrued interest
Jumlah	<b>156.354.946,439</b>	<b>226.769.441,733</b>		<b>Total</b>

**16. HAK HASIL DAN STRUKTUR TEMPORER DAN BONUS WADIAH PEBAK KETIGA YANG BELUM DIBAYARKAN** **16. UNDISBURSED THIRD PARTIES SHARE ON RETURN OF TEMPORARY STRUKTUR FUND AND BONUS**

	20/21		20/20	
Akiva ini terdiri dari:				
Dukungan bank	20/21	20/20		This account consist of:
Deposito	3.854.744,137	9.225.105,613		Non - Bank
Tekungan	595.628,690	224.177,965		Trust Agency
Bank				Always
Deposito	1.606,113	4.416,525		Bank
Tekungan	7.457,056	2.107,612		Trust Agency
Jumlah	<b>4.457.408,786</b>	<b>9.755.790,695</b>		<b>Total</b>

PT BANK ACEH SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2021 and 2020  
And For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN

17. TAXATION

a. Manfaat (beban) pajak

a. Tax benefit (expenses)

	2021	2020
Pajak lalu	11.879.394.840	92.425.500.200
Pajak tanggungan	(9.830.162.191)	(5.507.336.515)
	<u>110.945.237.649</u>	<u>86.917.923.687</u>

Current tax  
Deferred tax

b. Utang Pajak

b. Tax payable

	2021	2020
Pajak penghasilan		
PPh pasal 4 (2)	5.710.600.590	6.202.724.812
PPh pasal 21	10.028.398.158	15.668.380.160
PPh pasal 25	15.453.884.617	21.999.357.805
PPh pasal 29	1.397.496.150	10.233.911
Pajak pertambahan nilai	208.601.286	289.164.072
PPh pasal 23	357.128.856	153.325.248
Jumlah	<u>31.356.109.595</u>	<u>36.483.184.007</u>

Income tax  
Income tax article 4 (2)  
Income tax article 21  
Income tax article 25  
Income tax article 29  
Value added tax  
Income tax article 23  
Total

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial dengan laba (rugi) fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Income (loss) before income tax reconciliation between commercial and fiscal statement on profit and loss for the year ended December 31, 2021 and 2020 is as follows:

Laba sebelum manfaat (beban) pajak menurut laporan laba rugi	502.172.266.959	420.076.394.500	Income before tax benefit (expense) as in the statement of profit and loss
<u>Beda temporer</u>			<u>Temporary difference</u>
Beban kerja	142.176.987.582	143.806.759.531	Employee benefit
Beban pensiun kerja THT	32.914.082.901	70.678.446.347	Employee benefits THT
	<u>175.091.069.793</u>	<u>214.485.205.878</u>	
<u>Beda tetap</u>			<u>Permanent difference</u>
Denda dan sanksi pajak	-	69.020.119	Tax penalties
Beban Kegiatan dan Olahraga Karyawan	1.101.221.000	752.847.400	Sports and recreation
Biaya perayaan	2.592.085.500	1.301.858.087	Celebration
Promosi	2.680.817.286	6.290.562.163	Promotion
Biaya sosial keagamaan	1.002.562.700	1.536.089.500	Religion social expense
Beban tamu	686.021.161	283.321.811	Guest expense
Belanja Paksiwa THT	6.726.115.214	146.290.005	Uniform
Perbaikan rumah tinggal	139.202.000	29.815.500	House and maintenance
Penyesuaian rumah tinggal	156.099.595	156.025.777	House depreciation
Sewa rumah kontrakan	59.583.334	45.000.000	House rent
CSR	1.236.681.000	(44.800.000)	CSR
Denda beban kerja	(148.985.537.428)	1165.383.000.385)	Employee benefit
Beban pensiun kerja THT	(17.786.609.313)	(24.020.924.345)	Employee benefits THT
Kerugian Investasi Reksadana	(20.357.251.790)	(26.209.591.173)	Mutual Fund Investments
	<u>(108.738.209.943)</u>	<u>(214.443.693.346)</u>	
Laba Kena Pajak	508.524.523.809	420.115.910.052	Taxable income
Pembulatan	508.524.523.000	420.115.910.000	Rounded-off

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2021 and 2020  
 And For The Year Then Ended  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. PEREKAMAN**

**15. TAKATON**

Relevansi Laminasi

Perbedaan dengan (Kategori)

Lembar plastik terdapat sesuai nilai pajak yang berlaku 2021: 22% x Rp 508.576.522.000 2020: 22% x Rp 420.159.000 Disurangi ampunan PBB pasal 25 (PPh badan kurang/ tidak layak)	111.874.304.840  (110.473.890.310)  1.397.496.118	924.25.500.700  (92.435.248.289)  10.291.991	Persepsi pajak ekspor according to applicable tax rate 2021: 22% x Rp 508.576.522.000 2020: 22% x Rp 420.159.000 Persepsi ampunan PBB pasal 25 (Geduk/ freely payment of corporate income tax)
---	---	--	--

**d. Aset Tetap Tanggungan**

**d. Depreciation assets**

31 Desember 2021 / December 31, 2021

Aset tetap yang dimiliki	Saldo awal per 31 Desember 2020	Saldo awal per 31 Desember 2021	Perubahan per 31 Desember 2021	Saldo akhir per 31 Desember 2021
Tanah Gedung Kendaraan bermotor Peralatan kantor Perlengkapan kantor Aset tetap lainnya	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000	-  -  -  -  -	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000

Kategori aset tetap	Saldo awal per 31 Desember 2020	Saldo awal per 31 Desember 2021	Perubahan per 31 Desember 2021	Saldo akhir per 31 Desember 2021
Tanah Gedung Kendaraan bermotor Peralatan kantor Perlengkapan kantor Aset tetap lainnya	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000	-  -  -  -  -	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000

Kategori aset tetap	Saldo awal per 31 Desember 2020	Saldo awal per 31 Desember 2021	Perubahan per 31 Desember 2021	Saldo akhir per 31 Desember 2021
Tanah Gedung Kendaraan bermotor Peralatan kantor Perlengkapan kantor Aset tetap lainnya	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000	-  -  -  -  -	1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000  1.030.433.000

**16. GIBOK WADUK**

**16. RYADAHU CUMENET ACCORDS**

Akun ini terdiri dari:	2021	2020	This account consists of:
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan	218.760.588.487 73.813.295.594 6.481.438.906 1.513.881.292 1.128.012.782	234.005.612.002 64.133.173.151 2.810.175.319 1.456.923.895 331.061.469	Rekening Giro Giro Giro Giro Giro
	<b>321.697.318.567</b>	<b>295.746.889.836</b>	Sifat umum/ umum/ umum/ umum/ umum

PT BANK ACEH SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2021 and 2020  
And For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. GIRO WADIAH (Lanjutan)

18. WADIAH CURRENT ACCOUNTS (Continued)

	2021	2020	
Pihak ketiga:			Third parties:
Perusahaan Umum	669.873.879.971	457.219.943.290	Company
Perusahaan/Badan Sosial/			Partnership/Social Entities/
Koperasi	46.605.863.197	49.304.014.997	Cooperatives
Perorangan (Fisikumi)	11.036.497.055	6.275.819.880	Individual (Local)
Badan Dayah	6.210.221.795	4.074.841.778	Dayah Body
PIKAS	618.115.041	325.005.950	PKK
Lain-lain	26.202.964.520	17.596.128.538	Others
	<u>768.544.839.661</u>	<u>534.795.754.433</u>	This deposits
Jumlah	<u>1.882.342.825.128</u>	<u>878.542.644.269</u>	Total
Giro wadiah merupakan simpanan giro dari bank lain dengan akad wadiah yang diutamakan yang akan memperoleh bonus sesuai kebijakan Bank		Wadiah demand deposits represent demand deposits from other banks in wadiah yang diutamakan principle which will earn bonus based on Bank's policy.	

19. TABUNGAN WADIAH

19. WADIAH SAVINGS

Akun ini terdiri dari:	2021	2020	This account consists of:
Angka Guna Wadiah	251.568.117.349	91.016.192.953	Angka Guna Wadiah
Wadiah tabung	47.127.852.039	46.257.967.386	Wadiah tabung
Wadiah Haji Akhla	39.361.358.055	39.499.695.748	Wadiah Haji Akhla
Wadiah lainnya	72.377.164	158.923.142	Others Wadiah
Jumlah	<u>337.795.705.436</u>	<u>176.932.780.629</u>	Total

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN

20. DEPOSIT FROM OTHER BANKS

Akun ini terdiri dari:	2021	2020	This account consists of:
Tabungan	11.681.320.515	6.977.436.199	Savings
Deposito	1.500.000.000	8.500.000.000	Time deposits
Utang	9.016.898.087	6.105.273.086	Current accounts
Jumlah	<u>22.208.218.492</u>	<u>21.582.709.285</u>	Total
Rata-rata tingkat bagi hasil tahunan penempatan Rupiah dari bank lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 berkisar antara 1,00% - 6,00%		Average annual profit sharing rates for placements in Rupiah from other banks for the years ended December 31, 2021 and 2020 are equivalent to 1.00% and 6.00%.	

21. PEMBIAYAAN YANG DITERIMA

21. RECEIVED FINANCING

Akun ini terdiri dari:	2021	2020	This account consists of:
Pembiayaan muspawak	199.644.358.313	121.036.016.741	Muspawak financing
Jumlah	<u>199.644.358.313</u>	<u>121.036.016.741</u>	Total

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 Dan Tanggal Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Terbilang dalam Ribuah, Kesatu, dua, dan Sembilan Ribu)

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2021 and 2020  
 And For The Year Then Ended  
 (Expressed in Rupaiah, unless otherwise stated)

**21. TERDAFTAR YANG DITERIMA (lanjutan)**

**21. RECEIVED FINANCING (lanjutan)**

PT Bank Aceh Syariah membuat Kesepakatan Bersama Nomor 44/PAK/2017 dan Nomor 192/BA/PAK/2017 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMKOTAN/PUR) melalui Peraturan Pelaksanaan Perbaikan Rencana Bisnis/Unit Kerja, untuk Penyelesaian Pembiayaan Perbaikan Rencana Bisnis/Unit Kerja, untuk Penyelesaian Rencana Kerja Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MKBK), Kesepakatan ini telah dibenarkan baik melalui perubahan melalui persetujuan Kementerian Bersama Nomor 21/BA/03/PT/PAK/2019 dan Nomor 294/BA/PAK/2019 tanggal 03 Desember 2019.

Peraturan Kesepakatan bersama tersebut, PT Bank Aceh Syariah melakukan Penyalangan Keagamaan Operasional dengan KEMKOTAN/PUR, Republik Indonesia Nomor HK.02.03/SK/DJ/39/2017 dan Nomor 192/BA/PAK/2017 untuk Penyelesaian Pembiayaan Rencana Bisnis/Unit Kerja, untuk Penyelesaian Rencana Kerja Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MKBK), Kesepakatan ini dibenarkan secara KEMKOTAN/PUR dan Bank.

Sebagai dasar penyelesaian dari TUPK, maka setiap tahun dilakukan penunda pinjaman PKK melalui penyalangan dana Rp 100 triliun melalui penyalangan eksternal untuk bagi MTR, PKK terakhir Rp. 150/PAK/2020 dan No. 265/BA/PAK/2020 tanggal 19 Desember 2020. Aktual perjanjian kerjasama ini menggunakan akad Penyalangan Kebayakwaan, pelaksanaan pensi dan untuk KEMKOTAN/PUR dengan Bank yaitu 75:25. Sesuai dengan perjanjian ini, saat ini yang diberikan kepada KEMKOTAN/PUR yaitu sebesar 25% dari nilai Fasilitas Laju/Revisi Penyalangan Penunahan.

Based on the mutual agreement, PT Bank Aceh Syariah made an Operational Collaboration Agreement with KEMKOTAN/PUR of the Republic of Indonesia No. HK.02.03/SK/DJ/39/2017 and No. 192/BA/PAK/2017 concerning a financing of financing of Subsidized House for Income Community Low (MKBK). This agreement has been approved several times, the latest being based on mutual agreement Number 21/BA/03/PT/PAK/2019 and Number 294/BA/PAK/2019 dated December 3, 2019.

As the basis for providing MLPK funds every year, the PKK is signed on the distribution of Rp. 100 trillion through housing financing for MKBK Unit MKC. No. 150/PAK/2020 and No. 265/BA/PAK/2020 dated December 19, 2020. This agreement is entered into the Memorandum of Understanding, the distribution of the portion of funds between the PURK Ministry and the Bank is 75:25. In accordance with this agreement, the amount given to KEMKOTAN/PUR is 25% of the value of the Housing Financing Laju/Revisi Facility.

**22. SIMPAN BERHARGA DITERTITKAN**

**22. SECURITIES ISSUED**

At the end of each year:

The account consists of:

	2021
STMA - Home Financing	100.000.000.000
Prinsipal	398.088.000.000

	100%
	150.000.000.000
	1.94.488.800.000
Total	344 - Government Bank

Dalam rangka penunahan likuiditas bank dan pengalihan dana pada awal bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2021 Bank menerbitkan sertifikat investasi Mx Syariah Akrif Bank (SIMMA) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Rp 398.088.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat miliar, empat ratus delapan puluh delapan ribu, delapan ratus delapan puluh dua) per tahun.

In order to fulfill liquidity and provide funds to Bank Insurance Current Accounts, on December 31, 2021, the Bank will issue Investment Mx Syariah Akrif Investment Certificate (SIMMA) on Bank Syariah Mandiri and Bank Mandiri in the amount of Rp. 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) and Rp. 398,088,000,000 (two hundred billion, eighty-eight thousand, eight hundred and eighty-two) per year.



23. LIABILITAS LAIN - LAIN

23. OTHER LIABILITIES

	2021		2020	
Akiva ini terdiri dari:				
Dana kesejahteraan pegawai			237.462.174.134	Employee welfare funds
Levulan पासو kerja - TET	298.634.353.425		345.420.486.613	Post employee benefit - TET
Jasa produksi	90.324.034.599		84.000.000.000	Rewards/bonuses
Tiupan CSR	25.852.944.900		54.950.250.450	Deposit CSR
Tarifem	25.500.000.000		34.000.000.000	Tarifem
Cadangan biaya lainnya	21.477.147.828		12.027.467.192	Other reserve expenses
Dana kebajikan	20.523.073.785		19.096.003.105	Charitable/Relief Funds
Pendapatan yang ditangguhkan	4.922.471.900		4.820.135.031	Account/Expenses
Selaran jaminan	2.724.106.795		1.526.657.682	Security deposits
lain-lain	125.443.042.217		121.273.851.497	Others
Jumlah	615.197.525.366		858.067.834.874	Total

24. GIRD MUDHARABAH

24. MUDHARABAH CURRENT ACCOUNTS

	2021		2020	
Akiva ini terdiri dari:				
Piutak berjangka	4.521.113.365.038		4.296.384.375.074	Related parties
Piutak ketiga	1.671.437.753.914		1.447.131.360.190	Third parties
Jumlah	6.192.551.118.952		5.743.515.735.264	Total

Uang mudharabah merupakan simpanan dari piutak lain yang meniadakan keahlian bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut berdasarkan rasio yang disetujui sebelumnya.

Mudharabah current deposits represent deposits from third parties which are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such fund based on a predetermined ratio.

Rasio hasil giro mudharabah untuk nasabah dengan rasio berkisar 3,65 % dan 14,01 % per tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Mudharabah current account profit sharing for customers with a ratio of around 3.65% and 14.01% per annum for December 31, 2021 and 2020.

25. TABUNGAN MUDHARABAH

25. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

	2021		2020	
Akiva ini terdiri dari:				
Piutak berjangka				
Finalis	6.827.704.012		5.894.107.987	Related parties Finalis
Sementara	13.897.240.014		10.901.015.050	Sementara
Tabungan Aneka Guna	1.609.499.743		1.051.874.664	Tabungan Aneka Guna
Simpeda	5.646.852.451		5.646.357.100	Simpeda
Tabungan Pensiun (A)	265.142.779		655.240	Tabungan Pensiun (A)
Tabungan Simpel (B)	100.000		-	Tabungan Simpel (B)
Tabunganku Syariah	11.581.053		5.245.184	Tabunganku Syariah
Tabunganku	7.028.414		573.728	Tabunganku
Jumlah	28.468.928.466		19.459.569.212	

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut**  
**(Dibaca Sahan: Rujukan: Konsolidasi)**

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2021 and 2020**  
**And For The Year Then Ended**  
**(Expression in English, unless otherwise stated)**

25. TABUNGAN MUDHARABAH (Tasawuf)		25. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (Compound)	
Piutang Berjangka		Total Savings Deposits	
Simpulada	3.432.921.075,379	A.Syariah	4.396.719.672,261
Pindus	2.985.772.085,257	Simpulada	2.262.595.291,865
Sawanga	2.805.678.580,520	Pindus	7.448.303.804,160
Tabungan Aneka Cemas	403.505.476,761	Sawanga	451.401.898,197
Tabungan Pensionis	271.464.417,682	Tabungan Aneka Cemas	790.364.061,038
Tabunganku	133.911.772,038	Tabunganku	340.481.845,087
Tabunganku Syariah	63.891.242,875	Tabunganku Syariah	57.331.346,208
Tabungan Simpel 36	50.702.194,091	Tabungan Simpel 36	19.750.190,482
	10.188.708.731,403		9.001.058.122,297
Jumlah Tabungan Mudharabah	10.217.173.661,895	Jumlah Tabungan Simpel 36	9.021.457.691,500

Takrifan mudharabah merupakan simpanan uang piutang lain yang disediakan untuk bagi hasil bagi pendapatan bank atas penguasaan dan control dengan nilai yang ditetapkan dan disertai sertifikasinya.

Mudharabah saving deposits originate from fund parties which are entitled to receive a share in the income derived by the bank from the use of each fund placed in a predetermined profit sharing ratio.

Bagi hasil tabungan mudharabah untuk nasabah dengan nisbat berkisar 0% s.d 24,11% dan 0% s.d 24,11% per tahun untuk 31 Desember 2021 dan 2020.

Profit sharing from mudharabah savings for customers with a para ranging from 0% to 24,11% and 0% to 24,11% per year for December 31, 2021 and 2020.

26. DEPOSITO MUDHARABAH		26. MUDHARABAH TIME DEPOSITS	
a. Berdasarkan waktunya		a. Berdasarkan	
	2021		2020
Piutang berjangka	1.112.580.406,808	1.200.215.406,808	Revised period
Piutang kredit	4.651.662.611,587	4.597.322.345,954	Three months
Jumlah	5.994.243.018,395	5.803.587.750,722	Total
b. Berdasarkan jangka waktu		b. By amount of agreement	
	2021		2020
1 bulan	2.714.900.443,567	3.078.654.243,382	1 month
3 bulan	518.737.090,000	1.540.096.630,975	3 months
6 bulan	1.567.251.359,771	2.292.414.125,890	6 months
12 bulan	1.254.170.363,757	1.020.967.687,579	12 months
24 bulan	9.203.052,100	13.053.045,000	24 months
Jumlah	5.994.243.018,395	5.803.587.750,722	Total
c. Berdasarkan tidak atau jumlah tempo		c. By remaining period to maturity	
	2021		2020
Berjangka dengan 1 bulan	3.176.561.036,542	2.037.315.666,376	Up to 1 month
1 - 3 bulan	1.741.466.403,132	1.688.079.611,117	1 - 3 months
3 - 6 bulan	303.846.637,110	2.179.004.850,050	3 - 6 months
6 - 12 bulan	801.843.923,911	868.159.641,163	6 - 12 months
Dryuk 12 bulan	1.535.042,000	10.227.982,000	Over 12 months
Jumlah	5.994.243.018,395	5.803.587.750,722	Total

**26. DEPOSITO MUDHARABAH (Lanjutan)**

**26. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (Continued)**

Deposito mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Riak atas penggunaan dana tersebut berdasarkan nisbah yang disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits represent other parties investment which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such fund based on a predetermined ratio.

Bagi hasil deposito mudharabah bank syariah dengan asumsi nisbah 29,72% per tahun untuk tahun 2021 dan 2020.

Profit sharing for mudharabah time deposits between the Customer and the Bank 29.72 % per annum for 2021 and 2020.

**27. MODAL SAHAM**

**27. SHARE CAPITAL**

Rusuhah pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's shareholders are as follows:

Pemegang Saham/Shareholder	31 Desember 2021 / December 31, 2021		
	Jumlah lembar saham diMendapatkan dan dibayar/ Number of shares owned and fully paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah
Pemerintah Provinsi Aceh/ Government of Aceh Province	63.177.394	57,70%	635.775.940.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara/ Government of Aceh Utara Region	8.493.405	7,44%	81.954.260.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah/ Government of Aceh Tengah Region	7.378.275	6,72%	73.785.750.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/ Government of Aceh Tenggara Region	7.152.780	6,47%	71.127.580.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan/ Government of Aceh Selatan Region	2.500.000	2,24%	25.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/ Government of Aceh Tenggara Region	2.401.521	2,14%	24.015.210.000
Pemerintah Kabupaten Bireuen/ Government of Bireuen Region	2.246.884	2,01%	22.468.840.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat/ Government of Aceh Barat Region	2.172.871	1,94%	21.678.710.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat/ Government of Aceh Barat Region	2.146.407	1,91%	21.464.070.000
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah/ Government of Bener Meriah Region	1.810.000	1,61%	18.100.000.000
Pemerintah Kabupaten Simeulue/ Government of Simeulue Region	2.413.482	2,19%	24.134.520.000
Pemerintah Kota Lhokseumawe/ Government of Lhokseumawe City	1.650.000	1,48%	16.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues/ Government of Gayo Lues Region	1.475.000	1,32%	14.750.000.000
Pemerintah Kabupaten Pidie/ Government of Pidie Region	1.200.000	1,07%	12.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya/ Government of Nagan Raya Region	1.175.000	1,03%	11.750.000.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Singgahi/ Government of Aceh Singgahi Region	1.304.475	1,18%	13.044.260.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/ Government of Aceh Tenggara Region	1.184.781	1,03%	11.847.910.000
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya/ Government of Pidie Jaya Region	1.100.000	0,96%	11.000.000.000
Pemerintah Kota Sabang/ Government of Sabang City	104.444	0,09%	1.044.440.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiel/ Government of Aceh Tamiel Region	794.978	0,71%	7.949.780.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar/ Government of Aceh Besar Region	853.000	0,73%	8.530.000.000
Pemerintah Kota Banda Aceh/ Government of Banda Aceh City	1.053.311	0,92%	10.533.110.000
Pemerintah Kota Langkat/ Government of Langkat City	400.000	0,32%	4.000.000.000
Pemerintah Kota Subulussalam/ Government of Subulussalam City	440.000	0,36%	4.400.000.000
Jumlah Total	110.888.743	100%	1.108.887.430.000

**PT BANK ACEH SVABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**  
**dan Lembar Tahun Yang Berhenti Pada Tanggal Terakhir**  
**(Ditulis dalam Bahasa, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ACEH SVABAR**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2023 and 2022**  
**And For The Year Then Ended**  
**(Prepared in English, unless otherwise noted)**

**21. MODAL SAHAM (lanjutan)**

**22. SHARE CAPITAL (Continued)**

Tipe/No. Saham/Shareholder	31 Desember 2023 / December 31, 2023		
	Total Lembar Saham Outstanding dan Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Persentase (%) (only in Rp)	Jumlah Saham Sahaja Amount in Share
Persahabat Asli/Shareholder of First Party	67.571.934	78,83%	68.935.946.500
Pemerintah Republik Aceh/Shareholder of Aceh State Region	1.282.493	1,21%	21.994.576.210
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya/Government of Aceh Jaya Regency	2.242.272	3,03%	33.232.730.520
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah/Government of Aceh Tengah Regency	2.551.700	2,20%	25.573.870.520
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan/Government of Aceh Selatan Regency	2.590.050	2,13%	25.070.280.520
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	2.257.521	2,09%	22.512.700.520
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat/Government of Aceh Barat Regency	1.956.884	1,84%	14.998.440.520
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar/Government of Aceh Besar Regency	3.457.571	5,21%	34.376.170.520
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya/Government of Aceh Barat Daya Regency	2.746.407	2,09%	22.494.560.520
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	- 810.000	1,05%	14.180.540.520
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	2.125.452	2,00%	21.574.520.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	2.550.000	1,57%	16.570.300.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	1.772.000	1,69%	17.751.300.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	1.290.000	2,14%	2.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	1.125.000	2,09%	11.730.000.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	1.100.000	1,07%	11.600.000.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	1.194.291	3,1%	11.942.910.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	1.200.000	1,17%	12.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	508.744	0,73%	8.064.440.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	794.079	0,44%	2.044.747.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	690.000	0,50%	8.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	1.005.514	1,40%	16.065.140.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	409.000	0,73%	4.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara/Government of Aceh Tenggara Regency	400.000	0,17%	4.000.000.000
	<b>107.854.517</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.079.544.130.000</b>

Modal dasar bank terdiri dari 100.000.000 (tiga juta) lembar saham dengan harga per lembar Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan telah ditempatkan sebanyak 110.094.244 lembar saham.

The authorized capital of the bank consists of 100,000,000 (three hundred million) shares with a price per share of Rp 10,000 (ten thousand Rupiah) and 110,094,244 shares have been issued.

Ditandatangani oleh ketua bank pada tanggal 29 Juni 2023, diwakili dan ditandatangani modal tahun 2023 sebesar Rp 21.444.260.000 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah)

Signed in the debt of minutes of the BMS dated 29 June 2023, it was approved and accepted the capital injection of Rp 21,444,260,000 (twenty one billion four hundred forty four million two hundred and four thousand Rupiah) in 2023.

24. UANG MUKA SETORAN MODAL

28. SHARE CAPITAL ADVANCES

	2021	2020	
Pemerintah Provinsi Aceh	200.000.000.000	-	Government of Aceh Province
Pemerintah Kabupaten Bireueh	4.000.000.000	2.900.000.000	Government of Bireueh Region
Pemerintah Kabupaten Simualua	3.000.000.000	2.500.000.000	Government of Simualua Region
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	7.500.000.000	3.500.000.000	Government of Aceh Jaya Region
Pemerintah Kota Subulussalam	2.000.000.000	-	Government of Subulussalam City
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	2.600.000.000	4.000.000.000	Government of North Aceh Region
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	1.500.000.000	2.000.000.000	Government of South-West Aceh Region
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	1.500.000.000	1.444.280.000	Government of Singkil Region
Pemerintah Kabupaten Aceh Tappak	1.365.000.000	-	Government of South-East Aceh Region
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	1.000.000.000	-	Government of West Aceh Region
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	1.000.000.000	1.000.000.000	Government of Pidie Jaya Region
Pemerintah Kota Langsa	1.000.000.000	-	Government of Langsa City
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	3.000.000.000	-	Government of Bener Meriah Region
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	1.000.000.000	-	Government of Nagan Raya Region
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	1.000.000.000	1.500.000.000	Government of Central Aceh Region
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	-	1.000.000.000	Government of Aceh Besar Region
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	-	7.000.000.000	Government of Gayo Lues Region
Jumlah	123.265.000.000	21.444.280.000	Total

Uang muka setoran modal merupakan modal yang disetor oleh pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh pada tahun berjalan. Sebagian modal tersebut akan menjadi modal pada tahun berikutnya.

Share capital advance is paid up capital by the regional government of Aceh in the current year. The share capital will become capital in the following year.

29. PENDAPATAN MERABAHAN

29. MERABAHAN REVENUES

Pendapatan *merabahan* merupakan pendapatan Bank yang diperoleh atas transaksi jual beli *merabahan* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.620.964.090,567 dan Rp1.638.692.820,622 di dalamnya termasuk pendapatan dari akrual *merabahan* masing-masing sebesar Rp73.645.920,794 dan Rp71.075.506,185.

*Merabahan* revenue represents Bank revenue earned from sale and purchase of *merabahan* for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp1,620,964,090,567, and Rp1,638,692,820,622, respectively, including accrual *merabahan* income amounting to Rp73,645,920,794, and Rp71,075,506,185, respectively.

30. PENDAPATAN MUSYARAKAH

30. MUSYARAKAN REVENUES

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* merupakan pendapatan bank yang diperoleh atas transaksi pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp151.711.539,933 dan Rp140.326.541,470 dan untuk tahun 2021 disajikan sebagai pengurang beban cadangan kerugian *musyarakah* nilai

*Musyarakah* revenue showing *musyarakah* Bank's revenue from *musyarakah* financing transaction to customer for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp151,711,539,933, and Rp140,326,541,470, respectively, and for the year 2021 served as allowance for impairment losses.

31. PENDAPATAN UJARAN

31. UJARAN REVENUES

Pendapatan ujarah merupakan pendapatan yang diperoleh atas transaksi sewa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.216.588,141 dan Rp4.567.697,718.

*Ujarah* revenue represent revenues from rent transactions for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp8,216,588,141 and Rp4,567,697,718, respectively.

**PT BANK ACRESYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACRESYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2021 and 2020  
 and For The Year Then Ended  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA	2021	2020	31. OTHER MAIN OPERATING REVENUES
Alasan ini terdiri dari:			This account consist of:
Pendapatan penalti/pungutan bank lain	197.650.422	196.443.528	Placement income from other banks
Pendapatan operasi valuta asing	378.590.175.185	346.168.187.326	Other operating main income
Jumlah	<u>378.787.826.607</u>	<u>346.364.837.854</u>	Total

33. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL, DANA SYRIFAH DAN TENGGOR	2021	2020	32. TERBUK PILEGE SHARE ON RETURN OF TEMPORARY STOCK FUND
Alasan ini terdiri dari:			This account consist of
Bagi hasil deposito	208.572.579.609	349.258.502.525	Profit sharing of time deposit withdrawal
Bagi hasil tabungan mudharabah	88.778.919.864	172.512.609.301	Profit sharing of saving mudharabah
Gumpalan nasabah	42.235.774.575	51.211.395.070	Deposit fund customer
Lain-lain	733.434.435	120.689.359	Other
Jumlah	<u>434.821.707.613</u>	<u>643.671.196.255</u>	Total

34. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA	2021	2020	33. OTHER OPERATING INCOME
Alasan ini terdiri dari:			This account consist of
Ecdadgalian provisi lainnya	115.210.202.120	105.509.696.207	Other provision income
Penjualan transaksi serta berbagai	-	-	Services transaction income
Perdagangan Risiko	-	-	Expense reimbursement
Berdasarkan likuidasi	22.273.896.819	70.336.466.378	Other income
Jumlah	<u>137.584.098.939</u>	<u>135.846.162.585</u>	Total

35. PEMBENTUKAN CADANGAN KEHILANGAN PERUBAHAN NILAI ASSET PRODUKTIF	2021	2020	34. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING ASSETS
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif untuk nilai yang terakumulasi 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp319.385.722.617 dan Rp20.394.183.472. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang disediakan karena penurunan kekhilangan untuk gresakan merupakan cadangan yang wajar.			Allowance for impairment losses are among others for the credit asset December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp319,385,722,617 and Rp20,394,183,472 respectively. In addition due to creditability deterioration of non-derivative receivables and other financial instruments.

Pada akhir 2021, cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif disajikan sesuai dengan nilai yang dianggap dapat direalisasikan.

In 2021, expense for impairment losses on earning asset is presented net of the recoverable value.

PT BANK ACEH SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Diungkapkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ACEH SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2021 and 2020  
And For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. BEBAN TENAGA KERJA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		36. SALARIES EXPENSES, EDUCATION AND TRAINING	
Akun ini terdiri dari:		This account consists of:	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Gaji dan tunjangan	569.552.232.561	476.186.322.161	Salaries and remuneration
Honor kepada pihak ketiga	22.123.049.914	8.966.892.990	Performance allowance
Pendidikan dan pelatihan	19.068.771.720	13.501.093.806	Holiday allowance
Tunjangan Kesejahteraan	149.961.107.513	156.620.539.544	welfare benefits
Lain-lain	77.017.659.871	59.839.043.596	Others
Jumlah	<u>837.722.811.579</u>	<u>715.113.801.706</u>	Total
37. BEBAN TIMBUL DAN ADMINISTRASI		37. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	
Akun ini terdiri dari:		This account consists of:	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban barang dan jasa	164.638.854.358	159.657.244.518	Goods and services expenses
Biaya premi asuransi	67.219.325.521	66.234.059.369	insurance expenses
Hilang penyusutan aset tetap	12.191.622.806	17.065.627.049	Fixed assets depreciation expenses
Hilang sewa	49.818.082.835	75.771.391.479	Rent expenses
Beban pemeliharaan dan perbaikan aset	24.156.293.180	22.748.300.061	Maintenance expenses
Beban pajak	13.221.600.622	9.101.930.014	Tax expenses
Beban promosi	14.033.479.664	10.591.265.795	Promotion expenses
Beban penyusutan aset tidak berwujud	1.338.425.613	1.585.522.151	Intangible assets amortization Expenses
Beban umum kantor	-	770.841.400	Office general expenses
Jumlah	<u>368.617.705.997</u>	<u>338.526.141.855</u>	Total
38. BEBAN BUNUK BAKAR (TANPA)		38. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	
Beban bunuk manfaat tidak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp1.588.410.325 dan Rp1.333.688.794.		Gift/benefit expenses for the years ended December 31, 2021 and 2020 are amounting to Rp1,588,410,325, and Rp1,333,688,794, respectively.	
39. BEBAN LAINNYA		39. OTHER EXPENSES	
Beban lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp1.19.900.791.352 dan Rp163.854.662.143.		Other expenses for the years ended December 31, 2021 and 2020 are amounting to Rp119,900,791,352, and Rp163,854,662,143, respectively.	
40. PENDAPATAN NON USaha - BERSIH		40. NON OPERATING REVENUES - NET	
Akun ini terdiri dari:		This account consists of:	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pendapatan non usaha	1.763.907.940	1.163.640.028	Non operating revenues
Beban non usaha	(2.004.156.225)	(4.499.767.950)	Non operating expenses
Jumlah	<u>(240.188.188)</u>	<u>2.663.872.078</u>	Total

**41. KOMITMEN DAN KONTINGENSI**

**41. COMMITMENT AND CONTINGENCIES**

Bank memiliki komitmen dan liabilitas keuangan dan kontingen-  
 sialnya, berikut:

The Bank's commitments and liabilities from commitments and  
 contingencies were as follows:

	2021	2020	
<b>Komitmen</b>			<b>Commitments</b>
<i>Fasilitas pembiayaan</i>			<i>Commitments payable</i>
<i>    - Fasilitas pembiayaan yang belum</i>			<i>    - Funded facilities</i>
<i>    diproses</i>	470.270.134.900	281.888.279.957	<i>    - unfunded</i>
<b>Kontingensi</b>			<b>Contingencies</b>
<i>Tanggihan kontingensi</i>			<i>Contingencies receivable</i>
<i>    - Kecelakaan dari NPF</i>	601.348.229.956	43.255.352.366	<i>    - Recoveries from NPF</i>
<i>    - Fasilitas Koperasi</i>			<i>Contingencies payable</i>
<i>    - Gagal yang dipertahankan</i>	1686.636.735.852	1624.295.730.543	<i>    - Fund guarantee issued</i>
	<b>1624.071.506.998</b>	<b>1623.540.488.579</b>	<i>Contingencies payable - net</i>

**42. LIABILITAS HARAPAN KEPADA KARYAWAN**

**42. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS**

**a. Pensiun dana pensiun**

**a. Pension fund**

Bank melakukan cakupan kerja penuh waktu dan masa kerja  
 lainnya kepada para karyawan yang memenuhi syarat yang terdiri  
 dari program pensiun mandatori pensiun, dan Program Dana Masa Kerja  
 (PMDK).

The Bank provides long term and other post employee benefits to its  
 eligible employees consisting of a defined benefit pension plan, and  
 Mandatory Contribution (PMDK).

Program pensiun mandatori dari Bank adalah bentuk program  
 karyawan Bank yang diadopsi sebagai pegawai tetap. Kewajiban  
 pegawai adalah sebesar 7,5% dari penghasilan dasar pensiun  
 karyawan dan size jumlah yang ditertarikan untuk memenuhi  
 program tersebut akan dibayui oleh Bank.

The Bank's defined benefit pension plan is provided for all employees  
 of the Bank employed as permanent employees. Employee  
 contribution is 7,5% of the employee's basic income and the  
 remaining amount required on behalf of the program is contributed by the  
 Bank.

Program dana pensiun mandatori dari Bank terakumulasi dan  
 berdasarkan Rencana Karyawan Detasé Bank No  
 069/DIR/BA/11/2019 tanggal 20 Maret 2019 untuk program  
 Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Aceh yang telah  
 disetujui dengan keputusan Dewan Komisiner OJK No. Rp  
 -43/KB.1/2020 tanggal 16 Agustus 2020 melalui pengesahan atas  
 Terapan Dana Pensiun PT Bank Aceh.

The plan defined benefit pension plan was determined based on the  
 Decision of the Board of Directors of the Bank No  
 069.210/BA/DIR/2019 dated March 20, 2019 regarding the regulation  
 of the Pension Fund from the Pension Fund of PT Bank Aceh which  
 has been ratified by the decision of the OJK Board of Commissioners  
 No. Reg 143/KB.1/2020 dated August 6 2020 concerning the  
 ratification of the PT Bank Aceh Pension Fund Regulation.

Program Penghayaan Masa Kerja berupa Tunjangan Hari Tua  
 (THT). Alasannya adalah Bank dan unsur dalam perusahaan  
 program PMK yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan  
 Direksi No. 25/DIR/BA/2017 tanggal 12 Oktober 2017,  
 melalui PMK melalui penunjukan yang jumlahnya sebesar masa  
 kerja aktif x pendapatan dari penghasilan dasar PMK, kepada  
 pegawai dengan masa kerja 15 tahun dan 25 tahun dengan sistem  
 hasil penilaian kinerja dan harga benefit berdasarkan hasil

The Employees Benefit Program in form of Retirement Benefit  
 Plan (THT) is regulated by the Board and regulated in the latest PMK  
 regulation regulation regulated under Letter of the Board of Directors  
 No. 25/01/DIR/BA/2017 dated October 12, 2017. PMK Amount is in  
 the form of payments according to the active working period x  
 basic income from basic income of PMK is equivalent with a working  
 period of 15 years and 25 years provided and the result of the  
 performance assessment of the last two years are well predicted.



41. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
 (Lanjutan)

42. LIABILITIES FOR EMPLOYER BENEFITS  
 (Continued)

a. Program dana pensiun (Lanjutan)

a. Pension fund program (Continued)

Status pendanaan atas program pensiun berdasarkan laporan akuntansi per 31 Desember 2021 dan akuntansi Muti Hitam Bank dan rekan No. 001/PSA-MIB/2021 tanggal 3 Januari 2022. Dan laporan akuntansi 31 Desember 2020 akuntansi Muti Hitam Bank dan rekan No. 014/PSA-MIB/2021 tanggal 5 Februari 2021 masing-masing disajikan sebagai berikut:

The funding status of the pension program is based on actuarial reports as of December 31, 2021, actuary Muti Hitam Bank and partner No. 001/PSA-MIB/2021 dated January 3, 2022. And actuarial report December 31, 2020 actuary Muti Hitam Bank and colleagues No. 014/PSA-MIB/2021 dated February 5, 2021, respectively, are presented as follows:

	2021	2020	
Nilai wajar aset dana pensiun	(691.201.078.191)	(629.675.950.232)	Fair value of assets
Nilai kini liabilitas manfaat pensiun yang diakui	756.117.186.746	722.723.983.940	Liability of employee benefit
Selisih lebih (kurang) pendanaan	65.216.108.595	92.948.033.708	(Over/under) funding
Penyesuaian aset	65.216.108.595	92.948.033.708	Adjustment of asset
Aset neto	-	-	Net of assets

Untuk tahun 2021 dan 2020, tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketidpatuhan pengukuran aset yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

For year 2021 and 2020, there are no asset recognized in the statement of financial position due to the assets recognition criteria do not met established criteria as stated in accounting standards.

Pencapaian liabilitas yang diakui Bank pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movement of the employee benefits liability recognized by Bank in the statement of financial position are as follows:

	2021	2020	
Kekayaan (keajiban) awal periode	722.723.983.940	698.274.567.357	Assets (liabilities) at the beginning of period
Biaya bunga	52.758.850.828	36.756.714.507	Interest expenses
Biaya selama tahun berjalan	30.829.341.768	30.926.166.413	Expenses recognized during current year
Jumlah yang diakui pada laba komprehensif lain	-	86.326.683.039	Total amount recognized in other comprehensive
Pembayaran manfaat	(93.777.318.317)	(21.966.894.695)	Actual benefits payments
Dampak perubahan manfaat yang belum diakui di awal periode	-	145.236.347.689	Impact of changes in benefits that have not been recognized at the beginning of the period
Kekayaan (keajiban) yang diakui bank	752.539.458.219	722.723.983.940	Assets (liabilities) recognized by Bank

Beban imbalan kerja dibebankan pada laporan laba rugi:

Employee benefit expenses charged to the statement of profit and loss:

	2021	2020	
Biaya jasa jasa	30.829.341.768	30.926.166.453	Current service expenses
Biaya bunga	52.758.850.828	36.766.714.507	Interest expenses
Labakan hasil ekspansi/akuisisi aset program	-	-	Returns on investment of asset program
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	83.587.992.596	67.692.880.960	Expenses recognized to profit or loss

**PT BANK ACEH SVARIAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ACEH SVARIAN**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2021 and 2020**  
**And For The Year Then Ended**  
**(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)**

**42. LIABILITAS JAMALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)**

**42. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (Continued)**

**a. Program TWT**

**b. TWT Program**

Madras kini memiliki manfaat pensi yang didanai dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Current movements on defined benefit obligation during the current year are as follows:

	2021	2020	
Saldo pada awal periode	212.573.452.904	147.900.691.550	Liability at the beginning of period
Tercatat selama tahun berjalan	12.914.082.905	70.678.449.207	Expenses recognized during current year
Jumlah yang dibayarkan pada tahun berakhir tahun	4.700.318.334	18.008.228.352	Total amount recognized in prior period
Pemayuan tambahan	(13.788.609.313)	(24.020.024.345)	Actual interest payments recognized by Bank
Kewajiban yang diulangi bank	<u>133.400.244.810</u>	<u>210.532.482.904</u>	Liabilities recognized by Bank

Setoran imbalan kerja diberikan Disk pada tahun ada tag:

Employer's benefit expenses charged to the provision of profit and loss:

	2021	2020	
Riwayat pensi kini	17.296.203.843	36.699.123.736	Current service expense
Biaya bunga	15.317.780.032	12.421.162.743	Cost of interest
Imbalan hari-tetap dikurangkan atas program:	-	41.261.165.846	Retain in liability of prior program
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	<u>32.613.983.875</u>	<u>70.678.449.207</u>	Expenses recognized in profit and loss
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Manfaat pensi (1%)			Benefit (1%)
Kredit dari kewajiban			The present value of the obligation
Renditas kini	263.090.309.872	239.545.140.627	Current interest for future cash
Biaya lainnya	19.910.251.179	19.126.624.824	
Sensitivitas (1%)			Sensitivity (1%)
Nilai kini kewajiban	282.998.145.965	189.487.071.405	The present value of the obligation
Risiko jasa kerja			Current service for interest costs
Risiko biaya	15.324.707.566	14.699.917.067	

**43. PEMBERIHAN NON BALAI**

**43. NON BALANCE REVENUES**

Penerimaan non balai merupakan pendapatan dari jasa giro bank umum konvensional, Deposito-konvensional, tabung simpanan dan simpanan non-syarat dan simpanan tetap-bank yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp2.799.602.515 dan Rp2.985.935.149

Non-balance revenue is income from current accounts services for conventional bank, non-savings deposits, current savings and others for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp2,799,602,515 and Rp2,985,935,149, respectively.

**44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PENYALSIAN BANK USTUN**

**44. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATION OF COMMERCIAL BANKS**

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No. 2 tanggal 25 November 2018, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan lain-lain.

Based on the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) Regulation No. 2 dated November 25, 2018, the deposits guaranteed includes demand deposits, time deposits, certificates of deposits, saving deposits, and deposits from other banks.

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**  
**Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK ACEH SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2021 and 2020**  
**And For The Year Then Ended**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS**  
**PEMBAYARAN BANK UMUM (Lanjutan)**

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-undang tersebut, LPS bertanggung jawab atas simpanan nasabah sampai dengan Rp1.000.000.000 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2004 dan sejak tanggal tersebut LPS mulai beroperasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

**44. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATION OF**  
**COMMERCIAL BANKS (Continued)**

On September 22, 2004, the President of the Republic of Indonesia enacted Law No. 24 regarding the "Indonesia Deposit Insurance Corporation" (LPS). Pursuant to the Law, LPS will guarantee customer's deposits up to Rp1,000,000,000 and actively participate in maintaining the stability of the banking system in accordance with the authority given. The Law became effective on September 22, 2004 and since that date, the LPS has been effectively operating.

As of December 31, 2021 and 2020, Bank is a participant of the guarantee program.

**45. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK**  
**BERELASI**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi dengan perjanjian dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga, kecuali untuk pinjaman yang diberikan kepada karyawan kunci. Saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**45. TRANSACTIONS AND BALANCE WITH**  
**RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties under similar terms and conditions as those with third parties, except for financing to key management personnel. The outstanding balances and significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2021 and 2020, are as follows:

	2021	2020	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
<b>Sifatnya Murabahah</b>			<b>Receivables</b>
Direksi dan pejabat eksekutif	13.944.553.267	33.661.197.198	Board of directors and executive officers
Pembayaran Musyarakat			Musyarakat Financing
Direksi dan pejabat eksekutif	6.041.103.013	2.519.350.148	Board of directors and executive officers
Jumlah aset untuk pihak berelasi	<u>19.985.656.280</u>	<u>36.180.547.346</u>	Total related parties assets
Persentase terhadap jumlah aset	0,97%	0,06%	Percentage to total assets
	2021	2020	
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
<b>Giro Wadiah</b>			<b>Wadiah Current Accounts</b>
Pemerintah	228.760.588.487	224.995.612.602	Government
Pemerintah daerah provinsi	73.810.293.594	64.133.117.151	Local Government provinces
Campting Kabupaten/ Kota	1.513.881.792	1.456.921.955	Mayor District/ City
Pemerintah pusat	6.481.438.906	2.810.175.319	Central government
BUMIL/ BUMD	1.128.012.788	351.061.469	State-owned/ Local Owned Enterprises
Jumlah liabilitas untuk pihak berelasi	<u>321.697.215.567</u>	<u>293.746.889.536</u>	Total related parties liabilities
Persentase terhadap jumlah liabilitas	91,99%	92,09%	Percentage to total liabilities

45. TRANSAKSI DAN BALIK DENGAN PELEK BERELASI (Lanjutan)

45. TRANSACTIONS AND BALANCE WITH RELATED PARTIES (Continued)

	2021	2020	
Dana giro/cek temporer Ciro modalisasi			Temporäre Giro/cek Klaim/klaim deposito
Decreasing current/postal Balances modalized	4.523.113.385.038	4.296.524.333.014	Local Government deposits
Kartawala modal	28.464.928.496	19.479.569.212	Member's saving deposits
Deposito mudharabah Kartawala modal	8.632.000.000	13.395.000.000	Key management personnel
'Pencucian darah' proporsi Jumlah dana giro/cek temporer untuk pelek terkait	1.222.929.405.808	153.005.060.000	Local Government deposits
Percentage related parties and related parties	9.884.139.730.342	4.484.184.902.246	Total related to the company's group bank
	20,04%	21,80%	Percentage to total deposits, credit funds

46. RASIO TINGKAT KESTABILAN RANAH

46. RATIO RATING OF BANK RATIO

	2021	2020	
a. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rasio Kestabilan Terdistribusi Modal Minimum (KSTMM) Bank dihitung berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia No. 24/POJK.03/2016 tanggal 19 November 2016 yang memuat peraturan perundang-undangan. Rasio KSTMM tersebut adalah sebagai berikut:			a. As of December 31, 2021 and 2020, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) are calculated based on Financial Services Authority (FSO) Regulation No. 24/POJK.03/2016 issued November 19, 2016, which describes minimum requirement. The CARs are as follows:
Modal inti	2.042.164.980.537	1.106.273.108.927	Core Capital
Modal pelengkap (maksudnya 100% dari modal inti)	76.225.674.961	285.651.658.500	Supplementary capital (minimum 100% over core capital)
	<u>2.721.379.655.500</u>	<u>2.391.924.767.427</u>	
Aset Terminusir, Minus Risiko (ATMR) Risiko Kredit	10.098.053.996.563	9.183.679.941.179	Risk Weighted Asset (RWA) for Financing Risk
ATMR Risiko Pasar	76.524.329.266	54.490.875.524	RWA for Market Risk
ATMR Risiko Operasional	2.417.792.303.443	3.428.369.539.228	RWA for Operational Risk
	<u>10.592.170.629.272</u>	<u>12.862.540.879.931</u>	
Rasio KestMM Bank untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Operasional	20,03%	18,60%	Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk
Rasio KestMM yang direvisi	0% - 10%	10% - 11%	Minimum CAR

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan  
dan 2020, CAR minimum pada tanggal 31 Desember 2021 dan  
2020, dihitung sebesar 9% - 10%.

Based on the risk profile as of December 31, 2020 and 2021, the  
minimum CAR as of December 31, 2020 and 2019 is 9% - 10%.

Sejak 1 Januari 2016, selain wajib memisahkan modal inti dan  
modal pelengkap, Bank wajib juga memenuhi Capabilitas  
Buklir yang ditetapkan dalam Ekstren 0% sampai dengan 2,5% dari  
ATMR sesuai dengan POJK No 21/POJK.03/2014 tentang  
Kerangka Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah.

Since January 1, 2016, in addition to providing core capital and  
supplementary capital, the Bank is required to provide  
Counter-cyclical buffer ranging between 0% to 2.5% of ATMR  
pertain to Financial Service Authority regulation (PSB),  
No. 21/POJK.03/2014 regarding the Minimum Required Capital  
Adequacy Ratio of Sharia Bank.

Hasil penilaian pemangku bahwa Bank mampu memenuhi  
kepatuhan sesuai dengan profil risiko dan memenuhi memenuhi  
keterlaksanaan modal. (bagian)

The assessment result shows that Bank has met the Minimum CAR as  
required in the risk profile, and the additional capital buffer  
requirements.

**46. RASIO TINGKAT KESEHATAN BANK (Lanjutan)**

**46. HEALTH RATING OF BANK RATIO (Continued)**

a. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Bank menyebutkan rasio rasio berikut:	2021	2020	b. As of December 31, 2021 and 2020, Bank forms the following ratios:
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	20,02%	19,60%	Minimum Capital Adequacy Requirements
Aset Produktif termasuk dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif	0,82%	0,96%	Non-performing earning assets and non-productive assets less problem with total productive assets and non-productive assets
Aset produktif termasuk dan aset non produktif	0,85%	1,06%	Productive assets less problem with total productive assets
Cadangan Ketugian Peraninan Nfbi (LRPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,68%	1,00%	Allowances for Impairment Losses (LRPN) for financial assets against earning assets
Pembiayaan bermasalah kotor	1,35%	1,53%	Non-performance financing - gross
Pembiayaan bermasalah bersih	0,03%	0,04%	Non-performance financing net
Tingkat pengembalian aset	1,87%	1,73%	Return On Asset (ROA)
Tingkat pengembalian modal	16,88%	15,72%	Return On Equity (ROE)
Batas modal	5,92%	6,94%	NI (Net Income)
Marjin laba bersih	1,38%	1,29%	NOM (Net Operating Margin)
Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPD)	78,37%	91,50%	Operational Cost to Operational Income (BOPD)
Susu badan terhadap pendapatan	71,30%	72,32%	Cost to Income Ratio (CIR)
Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan	14,44%	11,00%	Profit Sharing Financing to Total Financing
Pembiayaan terhadap dana pihak lainnya	66,06%	70,82%	Financing to Deposit Ratio (FDR)
GWM Harian	7,25%	1,30%	Daily GWM
GWM Rata-rata	6,90%	3,96%	Average GWM

**47. MANAJEMEN MODAL**

**47. CAPITAL MANAGEMENT**

Kebijakan pengelolaan modal Bank bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan untuk mempertahankan kemampuan usaha Bank di masa yang akan datang, serta untuk mematuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

The Bank's capital management policy aims to ensure that the Bank has an efficient capital structure, has a strong capital to support the Bank's current business development strategy and to maintain the continuity of the Bank's business in the foreseeable future, as well as to meet the capital adequacy set by the regulator.

Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Capital Plan is prepared by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and is approved by the Board of Commissioners.

Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang diperlukan, rencana pengembangan usaha dan ketentuan likuiditas Bank.

The Bank's capital plan is formulated based on the assessment of capital adequacy requirements, business expansion plan and the Bank's liquidity needs.

Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Capital Plan is prepared by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and is approved by the Board of Commissioners.

**PT BANK ACER SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 Dan Tabel-Tabel Yang Berhubungan Tanggal Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK ACER SYARIAH**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2021 and 2020  
 And For The Year Then Ended  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**48. PROFIT SISA UANG TEMPAK**

**48. MATURITY PROFILES**

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

31 Desember 2021/ December 31, 2021

	Salah satu		1-3		3-6		6-12		lebih dari 12	
	bulan	lebih dari 1 bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan
<b>Ases aset:</b>										
Kas dan setara kas	2.551.212	2.028.212	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman dengan jaminan	1.115.841	1.375.241	-	-	-	-	-	-	-	-
Dasar investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	42.847	47.853	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksternal pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekening giro pada Bank Indonesia	2.407.305	2.407.305	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekening giro pada bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa selangsur Akumulasi kerugian	530.890	2.280.036	200.749	1.580.000	-	-	-	-	2.607.900	-
Kontra rekening debit (kepada bank)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekening giro pada bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman pemerintah	13.829.274	1.1.213	10.204	25.105	97.657	18.511.915	-	-	-	-
Pinjaman korporasi	2.789.575	164.162	113.252	203.204	264.987	1.437.792	-	-	-	-
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	117.000	27.238	32.407	678	174	2.261	-	-	-	-
Pinjaman pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman pemerintah	276.247	-	-	-	-	-	-	-	-	25.841
Aset lainnya	200.819	-	-	-	-	-	-	-	-	291.339
Aset lainnya	23.285.828	1.413.564	200.207	4.299.024	402.202	14.025.810	-	-	-	-
Pinjaman dengan jaminan	12.264.269	256.259	12.529	2.827	5.417	13.512	-	-	-	-
Pinjaman pemerintah	284.012.026	1.158.200	257.761	436.212	417.207	1.446.241	-	-	-	-
<b>Tanggung Jawab:</b>										
Tanggung Jawab	136.232	14.152	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Jawab	7.042.242	1.082.242	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Jawab	205.209	217.790	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Jawab	33.323	52.228	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Jawab	158.244	-	-	-	-	-	-	-	-	158.244
Tanggung Jawab	228.800	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Jawab	31.356	31.356	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Jawab	521.238	-	-	-	-	-	-	-	-	428.208
Tanggung Jawab	2.126.076	1.294.234	-	-	-	-	-	-	-	131.442

48. PROFIL SISA UMUR ANJUT WAKTU (Lanjutan)

48. MATURITY PROFILES (Continued)

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Solusi Total	sd. 1 bulan / up to 1 month	1 - 3 bulan / 3 month	3 - 6 bulan / 6 month	6 - 12 bulan / 12 month	> 12 bulan / more than 12 month
Rasa Sisa Umur Temporer / Temporary maturity funds						
Cucu Mubarakah / Anak-anak dengan Aspek / Children with special aspects	6.196.551	6.196.551	-	-	-	-
Taruhan Mubarakah / Anak-anak dengan Aspek / Children with special aspects	11.217.174	10.717.174	-	-	-	-
Deposito Mubarakah / Anak-anak dengan Aspek / Children with special aspects	5.984.240	4.178.241	1.741.466	162.847	801.884	1.225
Jumlah / Total	22.597.965	19.798.266	1.741.466	162.847	801.884	1.225
Posisi Net / Net Position	2.843.492	(1.144.283)	(1.493.794)	179.303	(544.541)	(7.946.875)

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Solusi Total	sd. 1 bulan / up to 1 month	1 - 3 bulan / 3 month	3 - 6 bulan / 6 month	6 - 12 bulan / 12 month	> 12 bulan / more than 12 month
Akiva / Assets						
Kas / Cash	1.356.446	1.356.446	-	-	-	-
Ekstansi Bank Indonesia / Current accounts with Bank Indonesia	155.544	155.544	-	-	-	-
Rekening Giro / Giro / Current accounts with other banks	10.267	10.267	-	-	-	-
Pinjaman pada Bank Indonesia dan bank lain / Pinjaman pada Bank Indonesia dan bank lain / Loans from Bank Indonesia and other banks	2.258.671	2.258.671	-	-	-	-
Sisa barang / Inventaris / Inventory	5.043.631	2.211.695	290.315	355.825	212.030	2.058.605
Efektif yang dibeli dengan cara dijual kembali / Investasi yang dapat dijual kembali / Marketable securities	-	-	-	-	-	-
Pinjaman / Pembiayaan / Pembiayaan / Financing	15.277.911	12.612	11.689	22.681	34.366	15.993.579
Pembayaran Masyarakat / Masyarakat / Masyarakat / Community	3.647.185	156.689	104.611	213.987	240.696	976.444
Pembayaran kepada / Untuk / Masyarakat / Masyarakat / Community	35.151	44.769	23.627	144	71	1.189
Pembayaran kepada / Untuk / Masyarakat / Masyarakat / Community	-	-	-	-	-	-
Aksi / Saham / Saham / Shares	283.362	-	-	-	-	283.362
Aksi / Saham / Saham / Shares	455.519	-	-	-	-	455.519
Jumlah / Total	25.716.828	7.891.639	144.348	489.557	576.435	17.173.749
Saldo / Total	22.873.336	(67.445)	(1.350)	(1.612)	(6.537)	(7.966.101)
Jumlah / Total	25.446.365	7.824.194	143.032	487.945	569.898	16.207.648

**48. PROSTRIKSI A UNJUK JATUH TENGAH (lanjutan)**

**48. MATURITY PROFILES (Continued)**

(dalam jutaan Rupiah) for million Rupiah

31 Desember 2021, December 31, 2021

Kategori, Lini Item	31 Desember 2021, December 31, 2021		31 Desember 2020, December 31, 2020	
	Salah satu atau lebih tahun	1-12 bulan	1-12 bulan	13-24 bulan
1. Saluran Dana	228.708	228.708	-	-
2. Dana Pihak Lain	4.738	4.738	-	-
3. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	978.542	978.542	-	-
4. Piutang Usaha	176.835	176.835	-	-
5. Piutang Pembiayaan	21.881	21.881	-	-
6. Piutang Perseorangan	121.035	-	-	121.035
7. Piutang Pihak Lain	133.022	133.022	-	-
8. Piutang Bank	28.464	28.464	-	-
9. Piutang Lain-lain	835.457	-	-	835.457
<b>Jumlah Liabilitas Total Laba-laba</b>	<b>2.497.978</b>	<b>2.497.978</b>	<b>-</b>	<b>946.522</b>

Dana Pihak Lain  
 merupakan jumlah dari  
 Uang Muka dan Biaya Dibayar  
 Dimuka, Piutang Usaha,  
 Piutang Pembiayaan,  
 Piutang Perseorangan,  
 Piutang Pihak Lain,  
 dan Piutang Lain-lain.

Total Total Aktiva

2.497.978	2.497.978	1.200.442	693.289	1.483.115	1.961.412
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Liabilitas total yang dijabarkan Bank untuk menunjukkan maturity gap yang ada adalah sebagai berikut:

The following are the Bank's efforts to reduce the existing maturity gap:

1) Mempertimbangkan agar dana pihak ketiga diinjeksikan dalam bentuk giro dan penempatan dengan jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu penghimpunan dana. Dengan demikian dana jangka pendek siap-siaga disediakan ke dalam pelaksanaan jangka pendek. Demikian juga sebaliknya untuk pendanaan jangka panjang diupayakan disalurkan ke dalam pelaksanaan jangka panjang saja.

1) Maintaining the maturity gap to be decreased in the form of receivable and financing with period which shall not exceed the time period funding line period. The short term fund shall be disbursed into the short term receivable and financing. Similarly, long term fund shall be disbursed into the long term receivable and financing.

2) Mempertimbangkan agar dana pihak ketiga diinjeksikan dalam bentuk giro dan penempatan dengan penempatan imbal hasil yang lebih kompetitif.

2) Maintaining relationship and customer in deposit with fund for long term period by granting competitive yield.



#### 49. MANAJEMEN RISIKO

#### 49. RISK MANAGEMENT

Manajemen Risiko merupakan bagian penting dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. PT Bank Aceh Syariah menerapkan fungsi manajemen risiko secara independen sesuai dengan standar yang berlaku pada ketentuan Bank Indonesia serta best practices yang diterapkan oleh perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

Risk Management is an important aspect of any business activities of any Bank. PT Bank Aceh Syariah implements an independent risk management function in accordance with Bank Indonesia regulations as well as best practices for Shariah based banking.

##### Tata Kelola Manajemen Risiko

##### Risk Management Governance

Mula Bank dalam manajemen risiko adalah mempersiapkan kerangka dan metodologi yang sesuai untuk pengelolaan risiko secara efektif di Bank. Tujuan pengelolaan risiko mencakup pengembangan pedoman dan metodologi bank dalam mengelola risiko di Bank, mempernegas struktur tanggung jawab setiap bagian, peran dan tanggung jawab serta menumbuhkan budaya sadar akan risiko di Bank secara keseluruhan.

The Bank's mission on risk management is to provide the appropriate framework and methodologies for the effective risk management in the Bank. The objectives of managing risk are to establish standard approach and methodology in managing risk across the Bank, to clarify functional structure including objectives, roles and responsibilities and to cultivate a risk awareness culture throughout the Bank.

Prinsip-prinsip manajemen risiko mencakup pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Implementation of Risk Management involves active oversight by the Boards of Commissioners and Directors.

Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui strategi dan kebijakan manajemen risiko. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan risiko, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta eksposur risiko.

The Board of Commissioners is responsible for approving and evaluating risk management strategy and policy. To support effective oversight, the Board of Commissioners have formed the Oversight Risk Management Committee (ORMC) responsible for overseeing the implementation of risk management strategy, policies and risk exposure.

Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui strategi dan kebijakan manajemen risiko. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan risiko, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta eksposur risiko.

The Board of Commissioners delegates authority to the Board of Directors to implement the risk management strategy and policies. The Board of Directors are responsible for formulating risk management strategy and policy, developing a risk management culture, ensuring continuing competency enhancement of related risk personnel, and ensuring the independent function of risk management.

Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tingkat Direksi untuk memantau pengembangan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi masalah penting terkait risiko.

The Risk Management Committee is established in the Board of Directors level for overseeing the development of risk strategy, policy and reviewing the major risk issues.

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan risiko, Bank telah membentuk Unit Manajemen Risiko untuk memonitor risiko di Bank secara keseluruhan, terpisah dari Risk Taking Unit dan Audit Internal.

To undertake the risk management function, the Bank has formed the Risk Management Unit to monitor risks across the Bank. The Unit is an independent function set apart from Risk Taking Unit and Internal Audit.

Unit Bisnis merupakan Risk Taking Unit yang bertanggung jawab mengelola risiko sesuai ketentuan dalam ruang lingkup tanggung jawab mereka. Unit tersebut harus secara jelas mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan melaporkan masalah yang terpapar sebelum memulai setiap aktivitas yang mengandung risiko.

Business Unit is a risk taking unit which is responsible to manage the risk and in and within their areas of responsibility. They must clearly identify, measure, monitor, control and report mitigation to manage risk before embarking on any risk taking activity.

49. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Tata Kelola Manajemen Risiko (Lanjutan)

Asas internal akan memberikan panduan terhadap bimbingan konduktif internal, seluruh organisasi dan baik langsung, jauh, tidak langsung terhadap budaya, perilaku, dan kebijakan internal serta prinsip syariah.

Bank melakukan self assessment profil risiko secara berkala untuk risiko yang mempengaruhi proses risiko dan secara siklus yang dilakukan oleh Bank. Profil risiko Bank adalah sebagai berikut 1 dan 2 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Bank melakukan kegiatan utama, Bank melakukan pengabdian risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko berdasarkan Peraturan Finansial Jasa Keuangan (PFJK) Nomor 05/POJK.03/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Syariah Syariah dan Unit Usaha Syariah serta risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi, bahwa kegiatan utama perbankan syariah tidak meliputi cara risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Bank.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegiatan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang ikhtesab, termasuk risiko kredit akibat kegiatan defisien, risiko kompromi pembiayaan, solvabilitas, kemampuan, dan solvabilitas. Risiko kredit diklasifikasi berdasarkan tingkat proses yang meliputi seluruh perjalanan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, penyaluran pembiayaan dan manajemen portofolio.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko kredit, Bank telah melakukan pengujian ulang terhadap seluruh kebijakan risiko kredit, memperbaiki organisasi penyaliran, tingkat penyelesaian unit kerja yang bertanggung secara mandiri terhadap analisis risiko kredit serta marketing profil aset, serta manajemen portofolio yang ada dengan jadwal: tahun unit kerja yang telah diorganisir secara berkala. Untuk meningkatkan kualitas aset, Bank telah melakukan monitoring terhadap kinerja portofolio pembiayaan secara berkala berdasarkan indikator kinerja, dan analisis awal penyaliran, berrisiko.

Tabel berikut menyajikan deskripsi maksimum keadaan risiko kredit untuk asesmen keuangan pada laporan posisi keuangan *for statement of financial position* dan rekening administratif *off balance sheet*. Cara membandingkan dengan yang memiliki kemampuan pembiayaan lainnya.

49. RISK MANAGEMENT (Continued)

Risk Management Governance (Continued)

Internal Audit will provide reasonable assurance of appropriateness of internal controls, organization structure, and reporting lines and also management with providing law, regulation, internal policies of the Bank as well as Islamic principles.

The Bank conducts a risk profile self assessment on a regular basis, a risk profile that describes the risk position and risk exposure managed by the Bank. The Bank's risk profile is as follows 2 and 3 as of December 31, 2021 and 2020.

In conducting its business, the Bank has performed risk management for 10 (ten) different risks based on the regulation of the Financial Services Authority (PFJK) No.05/POJK.03/2014 dated December 23, 2014 regarding the implementation of risk management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit in credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategy risk, compliance risk, rate of return risk and investment risk, and the business activities of Islamic banking is responsible for the risk that can disrupt business continuity of the Bank.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk due to the failure of the client or other parties in meeting the obligations to the Bank is accordance with the agreed results, including credit risk due to the failure of the client, the financing counterparty risk, counterparty, financial risk and performance risk. Credit risk is managed at both the operational and portfolio level through the establishment of policies and processes which include criteria for granting financing, financing approval, financing management and portfolio management.

To increase the effectiveness of credit risk management, the Bank has taken action to review all credit risk management policies, to strengthen financing organization through the development of new working self responsible independently in perform credit risk analysis and monitor asset quality, as well as to strengthen the organization of assets and responsibilities between asset portfolio in credit process. To improve asset quality, Bank closely monitors financial metrics performance, determine in financing considerations which and early detection and management of unremediable financing.

The following table presents the maximum exposure to credit risk of an portfolio of financial position and off balance sheet financial items under, without taking into account, any collateral held or other financing provision.

49. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

49. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

	2021	2020	
Laporan Posisi Keuangan			<i>Statement of financial position:</i>
Cta pada Bank Indonesia	1.375.541.297.473	855.543.761.279	Current accounts with Bank Indonesia
Cta pada bank lain	42.846.869.665	10.587.325.650	Current accounts with other banks
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2.407.305.000.000	2.233.871.000.000	Placement with Bank Indonesia and other banks
Investasi Pada Surat Berharga	5.394.689.659.016	5.043.630.063.681	Investments in marketable securities
Piutang Movable	13.373.273.319.145	13.527.912.714.369	Moveable receivables
Pembayaran Musyarakah	2.359.571.254.624	1.681.385.020.575	Musyarakah financing
Pembayaran Lainnya	113.000.343.350	70.348.946.654	Other financing
Aset Lain-lain	2.617.899.594.182	2.678.939.535.710	Other assets
	<u>28.184.137.337.480</u>	<u>25.501.620.659.179</u>	
Dikurangi endangan	(224.699.620.973)	(235.054.556.250)	Less allowance for impairment losses
Kepiutang persentase nilai			
Sektoring Administrasi			Off balance sheet
Bank penana yang disediakan	606.639.735.952	616.395.710.943	Bank guarantee issued
Facilitas pembiayaan yang belum digunakan	417.270.133.900	281.888.279.957	Unused financing facility
Jumlah	<u>29.063.337.401.359</u>	<u>26.367.250.899.828</u>	Total

Analisis eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

*Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation are as follows:*

- The carrying amount of Bank's financial assets other than receivables and financing receivables represent the maximum exposure of credit risk.
- Untuk piutang dan pembiayaan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Agunan yang digunakan diantaranya berupa tanah dan bangunan, mesin, piutang, personal guarantee, dan corporate guarantee.

- The carrying amount of Bank's financial assets other than receivables and financing receivables represent the maximum exposure of credit risk.
- For financing and receivables, Bank uses collateral to minimize the credit risk. Collateral used includes land and building, machines receivables, personal guarantee and corporate guarantee.

Pengungkapan kadensitas risiko kredit maksimum berdasarkan kategori portafolio adalah sebagai berikut:

The disclosure of the maximum credit risk concentration by portfolio category is as follows:

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Pemerintah	Lembaga Keuangan	Jasa Usaha Bankers	Lainnya	Jumlah Total
	Government	Financial Institution	Services	Others	
Laporan Posisi Keuangan					
<i>Statement of financial position:</i>					
Cta pada Bank Indonesia	1.375.541	-	-	-	1.375.541
Current accounts with Bank Indonesia					
Cta pada bank lain	-	42.847	-	-	42.847
Current accounts with other banks					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.405.305	1.700	-	-	2.407.005
Placement with Bank Indonesia and other banks					
Investasi pada surat berharga	5.394.689	130.000	1.200.785	-	5.394.494
Investment in marketable securities					
	<u>5.345.031</u>	<u>1.170.947</u>	<u>1.200.785</u>	<u>-</u>	<u>9.220.363</u>

**49. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

**49. RISK MANAGEMENT (Continued)**

**a. Risiko Kredit (Lanjutan)**

**a. Credit Risk (Continued)**

(Salur: jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Kategori Risiko Kredit Credit Risk Category	31 Desember 2021/December 31, 2021		Lain-lain Others	Jumlah Total Total
	Persewaan Operating	Finansial Financial		
Pinjaman Loan	9.424	284.112	12.279.707	12.673.243
Pinjaman Loan	210.235	9.297.112	787.215	2.399.571
Pinjaman Loan	301	-	122.659	113.020
Pinjaman Loan	-	-	2.017.902	2.017.902
Pinjaman Loan	224.096	1.644.137	17.097.512	18.965.744
Pinjaman Loan	8.399.543	2.962.802	47.897.513	58.664.127
Pinjaman Loan	144	1142.779	(81.828)	(224.700)
Pinjaman Loan	-	-	686.642	686.642
Pinjaman Loan	-	417.220	-	417.220
Pinjaman Loan	6.745.651	1.390.494	3.042.195	17.915.592
Pinjaman Loan	-	-	17.915.592	17.915.592

31 Desember 2021/December 31, 2021

Kategori Risiko Kredit Credit Risk Category	31 Desember 2021/December 31, 2021		Lain-lain Others	Jumlah Total Total
	Persewaan Operating	Finansial Financial		
Pinjaman Loan	853.544	-	-	853.544
Pinjaman Loan	-	10.282	-	10.282
Pinjaman Loan	2.222.371	1.500	-	2.223.871
Pinjaman Loan	1.900.530	1.281.000	-	3.181.530
Pinjaman Loan	-	6.732	13.522.181	14.527.913
Pinjaman Loan	-	184.760	1.400.612	1.685.372
Pinjaman Loan	-	446	68.703	70.149
Pinjaman Loan	5.078.545	1.192.333	2.018.942	8.289.820
Pinjaman Loan	-	2.056.592	17.100.251	19.156.843

49. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

49. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Pemerintah/ Government	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Jasa/Jadwal Macet/ default	Lainnya/ Others	Jumlah Total
Ditanggung oleh aset keuangan pemerintah di luar aset off-balance for financial assets Assets	-	-	(500)	(234.555)	(235.055)
Akuning Administrasi/ Off balance sheet	-	-	-	-	-
Bank pencah yang dijamin/ Bank guarantee issued	-	-	6.876	-	6.876
Fasilitas pendanaan yang belum diproses/ Unprocessed funding facility	-	-	281.888	-	281.888
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.876.545</b>	<b>1.192.333</b>	<b>2.964.676</b>	<b>16.951.696</b>	<b>16.167.250</b>

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas. PT Bank Aceh Syariah melakukan manajemen manajemen risiko pasar khusus untuk risiko benchmark suku bunga (benchmark interest rate risk). Dalam menghitung Aset Tertimbang Menara Risiko (ATMR) untuk risiko pasar, PT Bank Aceh Syariah menggunakan metode standar (standard method) sesuai dengan SEQR No.39/SEQR.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Peraturan Aset Tertimbang Menara Risiko untuk Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar bagi Bank Umum Syariah

Market risk is a risk on balance sheet position and on administrative account due to changes in market prices, exchange rate risk, the risk of commodity and equity risks. PT Bank Aceh Syariah applies risk management market especially for the benchmark interest rates (benchmark interest rate risk). In calculating Risk Weighted Assets (ATMR) for market risk, PT Bank Aceh Syariah use standard method in accordance with Circular Letter of the Financial Services Authority No.39/SEQR.03/2015 dated December 21, 2015 Concerning Calculation of Weighted Asset by Risk for Market Risk by using standard methods for Sharia Commercial Banks

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan berbagai limit untuk mengukur dan memantau nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) oleh Bank.

Market risk is managed through a comprehensive policy and limit framework to estimate and monitor the amount of risk taken on risk appetite of the bank.

Tujuan utama mendukung bisnis dan mitigasi potensi dari aktivitas treasury pada risiko inheren, Bank telah melakukan langkah-langkah terkait penerapan kualitas manajemen risiko pasar, antara lain:

In order to support the business and mitigate the potential of treasury activities on inherent risk, the Bank has been conducting activities related to application of the quality management of market risk among others:

- 1) Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko pasar, Direksi telah memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko pasar yang akan diambil dan toleransi risiko pasar bank melalui Rencana Bisnis Bank dan Kebijakan Umum Direksi.
- 2) Komisaris dan Direksi secara berkala memonitoring efektivitas pengelolan risiko pasar melalui rapat kerja Direksi baik melalui rapat ALCO maupun KOMENKO.

- 1) In preparing the market risk management policy, the Board of Directors have provided clear guidance on the level of market risk to be taken and the Bank's market risk tolerance through the Bank's Business Plan and the General Policy of the Board of Directors.
- 2) Board of Commissioners and Board of Directors periodically monitor the effectiveness of market risk management through Board of Directors meetings either through ALCO meeting or KOMENKO meeting.

49. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

49. RISK MANAGEMENT (Continued)

3. Risiko Pasar (lanjutan)

A. Market Risk (Continued)

1) Manajemen telah menentukan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola pasar, termasuk serta menilai dengan tingkat coveragernya.

2) Bank telah menetapkan dan menerapkan pengendalian sistem untuk memastikan bahwa penyelesaian (settlement) terhadap kewajiban, pasifitas dan hasil tidak dipengaruhi oleh risiko kredit. Direksi akan bekerja untuk memastikan tindakan pencegahan.

3) Management has given authority to the Treasury Division to determine the market instruments and transactions with credit monitoring.

4) The Bank has established and implemented internal control to ensure that the resolution to liability, passivities and results have been reported on time in the Board of directors or officers without for the purpose of covering default.

Setelah pengakuan nilai pasar, Bank juga melakukan risiko pasar dan perubahan nilai pasar hasil pasar Risiko total hasil Bank terutama sebagai hasil investasi bank (note of cover in the banking book).

In addition to the movement of exchange rate, the Bank is also exposed to market risks from changes in the market value of assets. The role of return risk of the Bank mainly is in the banking book.

Bank menerapkan risiko lingkungan yang tinggi dengan menggunakan pendekatan gap negatif sebagai dasar untuk mengelola earnings at risk yang dapat memberikan kerugian dari dampak pemisahan nilai yang standar pendapatan bank dalam jangka pendek.

The Bank manages hedgement business risk with through the use of replicating gap as a basis to calculate Earning at Risk (EAR) that can provide insight on the impact of rate of return changes in the Bank's earnings in short term.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan yang tidak digunakan secara bertahap untuk jangka waktu tertentu, untuk menyediakan aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko Likuiditas merupakan risiko yang merupakan perubahan secara berkala/terbaca yang dapat terjadi dengan terjadinya risiko lainnya.

Liquidity risk or a risk due to the inability of the Bank to meet the matured liabilities of high quality cash flows and or liquid assets that can be managed, values determining the bank's financial activity and condition. Liquidity Risk is a risk regarding ongoing management, or will be when risk management.

Bank mengelola risiko likuiditasnya agar dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo dan berupaya untuk menyediakan yang optimal. Tujuan tersebut dicapai oleh Bank dengan memperhatikan dan mengkomunikasikan kebijakan cadangan likuiditas yang optimal, mengatur dan menetapkan limit untuk risiko likuiditas guna melindungi keberagamaan nasabah, kompartasi grup dan keberlanjutan lembaga keuangannya, melakukan atau market segment tertentu serta pelaksanaan manajemen plan. Bank mengelola Risiko Likuiditas, Risk Aceh Syariah memiliki Asset and Liability Committee (ALCO) yaitu Komite yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas pada Bank Aceh Syariah.

The Bank manages its liquidity risk in order to meet every due obligation and to maintain an adequate level of liquidity. This objective is achieved by the Bank by establishing and implementing an optimal liquidity reserve policy, managing and determining the limits for liquidity risk in order to avoid liquidity shortage, gap recognition and dependence on certain counterparties, insurance or market segment and continuing plan preparation. The manager Liquidty Risk Bank Aceh Syariah has an Asset and Liability Committee (ALCO) which is the Committee responsible for liquidity management of Bank Aceh Syariah.

Untuk memastikan transferi setiap hari, Risiko Likuiditas PT Bank Aceh Syariah dikelola oleh Divisi Dana dan Treasury.

To ensure daily transactions, the Liquidity Risk of PT Bank Aceh Syariah is managed by the Funds and Treasury Division.

49. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

49. RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Langkah langkah yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah untuk menjaga Likuiditas Bank adalah:

- 1) Mengaktifkan fungsi dan peran Asset and Liabilities Committee (ALCO)
- 2) Meningkatkan upaya penghimpunan dana dan mengoptimalkan penyaluran jenis tenor penyaluran Dana dengan waktu tempo Dana Pihak Ketiga.
- 3) Menjalin hubungan dengan bank lain dalam bentuk Money Market Line.
- 4) Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada Kantor Kantor Cabang Bank.

d. Risiko Operasional

Langkah langkah strategis yang digunakan dalam mengelola risiko operasional adalah melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap risiko Operasional, serta melakukan mapping terhadap aktivitas operasional berdasarkan tingkat risiko, sehingga Bank dapat meminimalkan kejadian risiko dan mencegah terulanginya kejadian risiko yang pernah dialami oleh Bank.

Risiko Operasional adalah Risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau ketidaktepatan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau secara kasarnya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional PT Bank Aceh Syariah secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian proses.

PT Bank Aceh Syariah mulai mengimplementasikan Risk Control Self Assessment (RCSA) ke seluruh Cabang/Wilayah dan ke beberapa Divisi atau Unit Kerja melalui sosialisasi risk culture (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan risk awareness (kesadaran dan risiko) yang merupakan syarat utama dalam penyetoran risiko.

Bank Accord II mewajibkan Bank untuk memasukkan Risiko Operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu Bank. PT Bank Aceh Syariah telah menghitung kewajiban penyaliran modal minimum Bank untuk Risiko Operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan masuknya Risiko Operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (CAR) selain untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar.

c. Liquidity Risk (Continued)

The steps taken by PT Bank Aceh Syariah to maintain its Bank's Liquidity are:

- 1) Enabling the functions and roles of the Asset and Liabilities Committee (ALCO).
- 2) Increasing fund raising efforts and streamlining the management of fund disbursement maturity with the maturity of Third Party Funds.
- 3) Establishing relationships with other banks in the form of Money Market Line.
- 4) Establishing a Cash Holding Limit policy on Bank Branch Offices.

d. Operational Risk

Strategic measures applied in managing operational risks are to identify and mitigate Operational risks, and to make operations mapping based on risk level, therefore, the Bank can minimize risk and prevent occurrence of risk occurrences experienced by the Bank.

Operational Risks are Risks associated with insufficiency and/or weakness of internal processes, human negligence, system failure, or any external problems affecting PT Bank Aceh Syariah's operations, which may directly or indirectly cause financial loss and potential loss.

PT Bank Aceh Syariah started implementing Risk Control Self Assessment (RCSA) to all Branches and to Divisions or Work Units through risk culture socialization and increasing risk awareness which are key requirements in risk management.

Bank Accord II requires the Bank to incorporate Operational Risk as one of the components in the calculation of a Bank's capital adequacy. PT Bank Aceh Syariah has calculated the minimum capital requirement of Bank for Operational Risk based on Basic Indicator Approach, in accordance with regulation of the Financial Services Authority related to the entry of Operational Risk in calculating Capital Adequacy Ratio (CAR) in addition to Credit Risk and Market Risk.

49. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

49. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Likuiditas

a. *Liquidity Risk*

PT Bank Aceh Syariah melaksanakan identifikasi Risiko Likuiditas berdasarkan faktor-faktor penyebab likuiditas yang meliputi jumlah hutang dan adanya kewajiban aspek jangka Di samping itu, Diolah Seguluhwa dan Corporate Secretary, semua bentuk perjanjian jangka pendek perubahan komitmen atau penarikan kembali terdapat eksposeur tersebut.

PT Bank Aceh Syariah carries out the identification of Liquidity Risk based on the factors causing the risk covering amounts and the existence of maturity of financial aspect. In addition, the Company Director and Corporate Secretary periodically analyze the impact of changes of certain provisions or regulations on legal risk exposure.

Bank melakukan pengentasan terhadap risiko likuiditas melalui perencanaan arus operasi, evaluasi dan pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik, dan strategi usaha; kemitraan melalui prosedur internal, kualitas layanan keuangan; efektivitas penanganan komitansi yang melibatkan layanan dan/atau Risiko Likuiditas seperti halnya pegawai pada setiap jenjang organisasi.

The Bank complete a current over legal risk through conformity between operational, organizational and internal controls with applicable legislation, codes of conduct, and business strategy, cooperation with external professional quality of financial statements, the effectiveness of commitment legalisation and related to the impact of Legal Risk to all employees at every level of the organization.

Keputusan dari manajemen Risiko Likuiditas dikomunikasikan oleh Lintas Manajemen Risiko. Penjelasan laporan hasil evaluasi ini melalui kanal-hubungan dan melalui hubungan yang terjadi dan manajemen dikehendaki semua bentuk-bentuk hubungan sesuai Risiko Likuiditas. Pihak ketiga yang terlibat pada Bank tidak signifikan secara signifikan seperti halnya Bank sentra tidak berdampak besar terhadap operasi Bank serta mampu dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank.

Management and monitoring of Legal Risk is implemented by the Risk Management Division based on an evaluation report on legal case analysis of financial exposure and provide monitoring of all Legal Risk indicators. The dialogue process occurred in the bank does not significantly interfere with Bank's financial condition and they not have a major impact on the Bank's reputation and can be managed as appropriate with the risk appetite established by the Bank.

Dalam rangka mendukung operasi risiko likuiditas Bank, seluruh produk yang ditawarkan oleh Bank telah dirancang pada prinsipnya untuk dapat diidentifikasi sebagai risiko yang terjadi dapat diukur dan pengukurannya tidak melebihi era atau standar pengujian yang biasa digunakan oleh Bank masih mengacu pada perjanjian-perjanjian Bank nasabah, termasuk perjanjian yang menggunakan kualitas pemenuhan yang berlaku dan seluruh perjanjian yang ada pada Bank wajib dilakukan uji kepatuhan sebelum perjanjian dilaksanakan.

In order to mitigate potential legal risks with the Bank, all products issued by the Bank have rigorous in applicable legislation, after the rights that may occur are measured and the use of legal practices as a standard of agreement commonly used by the Bank and refers to the current agreement. The Bank should elaborate the agreement in accordance with applicable regulations and all existing agreements with the Bank should be subjected to compliance test before the agreement is implemented.

Bank terus meningkatkan pengendalian risiko likuiditas melalui adanya layanan pemenuhan oleh Bank secara reguler yang terintegrasi secara sistematis. Risiko likuiditas terus dilakukan pemantauan dan pemenuhan yang baik-baik hubungan-hubungan sehingga upaya pemenuhan risiko likuiditas Bank.

The Bank continuously improve the management of legal risk by offering robust, highly-regulated activities that have the potential Legal Risk by increasing employee competence in the legal sector or an effort to mitigate the potential legal risk.

Bank akan melanjutkan proses kepatuhan dari Compliance to Sistem Operatif, dimana seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan aspek hukum ke-sistematis.

The Bank has made the conversion process from Conventional to Sharia System, where all operational systems are integrated under the standards to Sharia system.

Untuk pengendalian risiko secara lebih lanjut akan dipaparkan, namun Bank juga tidak dapat menghindari proses penyelesaian secara litigasi, dan sampai dengan akhir tahun, proses litigasi yang dilakukan oleh Bank terintegrasi dengan.

Settlement process of case litigation case remaining to be pursued, but the Bank also cannot avoid the litigation settlement process due until the end of the year, litigation process conducted by the Bank is integrated or less.



49. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

49. RISK MANAGEMENT (Continued)

f. Risiko Strategik

Risiko strategis meliputi risiko yang timbul dari ketidakmampuan instansi atau organisasi untuk mengimplementasikan dengan tepat strategi, rencana bisnis, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya serta ketidaksiapan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.

Rencana strategis disusun oleh Direksi dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan visi dan misi Bank. Sebelum diimplementasikan, rencana strategis ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan harus dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan seluruh karyawan.

Apabila dalam realisasinya terjadi deviasi yang disebabkan oleh kondisi eksternal menyikapi perubahan ekonomi, moneter dan peraturan cabang, kondisi internal yang sesuai untuk mempertahankan penyimpangan dari rencana yang ditetapkan sebelumnya, maka dilakukan pengkajian dan evaluasi atas terjadinya penyimpangan tersebut, kemudian dilakukan revisi guna penyempurnaan strategi yang ditetapkan.

Rencana komprehensif, terintegrasi dalam rencana strategis yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POLK.00/2016, serta telah terakui dengan proyeksi penyediaan likuiditas keuangan, proyeksi rasio-rasio lain pro-pes-tenent sesuai dengan SK OJK No.8/SF/OLK.03/2018

Selain itu, rencana strategis disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang mencakup penerapan Manajemen Risiko dan penerapan fungsi kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik.

Berbagai sarana pertemuan dan diskusi seperti Rapat Direksi, Rapat Komisaris dan Rapat Kerja Divisi dan Cabang serta rapat lainnya merupakan media yang sangat efektif dalam mengkoordinasikan pelaksanaan strategi dan memonitoring langkah strategis lainnya sebagai alternatif apabila terjadi perubahan lingkungan bisnis yang mempengaruhi strategi usaha Bank.

g. Risiko Kepatuhan

Penilaian terhadap Risiko Kepatuhan meliputi jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atas track record kepatuhan Bank dan Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu yang memiliki Predikat Low to Moderate.

f. Strategic Risk

Strategic risk is a risk arising from the inability of institutions or organizations to appropriately implement strategy, business plans, decision making, resource allocation and inability to adapt to the changes in business environment.

The strategic plan is prepared by the Board of Directors in the form of Corporate Plan and Bank Business Plan (RBB) in accordance with the Bank's vision and mission. Prior to the implementation, the strategic plan must be approved by the Board of Commissioners and discussed with the Shareholders and all employees.

If in the realization there is a deviation due to external conditions related to economic changes, monetary and banking changes and internal conditions which generally results in deviations from the pre determined plan, then an assessment and evaluation of the irregularities should be carried out, then a revision is made to improve the strategy system.

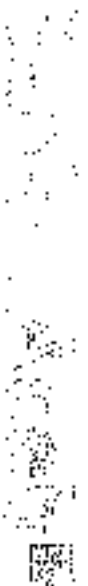
Comprehensively, the scope prepared in the strategic plan is in accordance with Regulation of the Financial Services Authority No.2/POLK.00/2016, and has been measured by projections of financial statements, ratios, and certain items in accordance with Circular Letter of the Financial Services Authority No.8/SF/OLK.03/2018.

In addition, the strategic plan is prepared by taking into account the prudential principles, which include the implementation of Risk Management and compliance functions, and good governance.

Various means of meetings and discussions such as Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings and Work Meetings of Divisions and Branches and other meetings are very effective medium in coordinating strategy implementation and in deciding other strategic steps or alternatives in case there is a change in the business environment that affects the Bank's business strategy.

g. Compliance Risk

Assessment of Compliance Risk covers the Type and significance of the violation committed, the frequency of the violation committed by the Bank's compliance track record, and Violation of the range of certain financial transactions having the Predicates of Low to Moderate.



Kantor Pusat: PT Bank Aceh Syariah

Jl. M. Miftah Husein No. 89 – Banda Aceh

Telp: (0651) 225000 Fax: (0651) 325998 390084

Email: [div@ptbankacehsyariah.com](mailto:div@ptbankacehsyariah.com)

Website: [www.bankaceh.com](http://www.bankaceh.com)



Izin Usaha KAP No. 765/KM.1/2015

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN**

Kantor Pusat : Jl. Kranji No. 90, Serang Baru, Mudal, Seripharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581

Telp. (0274) 4463648, Fax. (0274) 4463648

Email: kumalahadi@gmail.com

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (Perseroda)**

**Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2021  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
Beserta Laporan Auditor Independen**

---

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (Perseroda)**

**Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2021  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
Beserta Laporan Auditor Independen**

---

## DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	iii
<b>Laporan Keuangan</b>	
Neraca.....	1
Laporan Laba Rugi .....	2
Laporan Perubahan Ekuitas .....	3
Laporan Arus Kas .....	4
Laporan Komitmen dan Kontijensi .....	5
Catatan atas Laporan Keuangan .....	6-20
<b>Lampiran-Lampiran:</b>	
1. Perhitungan Kualitas Aktiva Produktif.....	21-22
2. Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	23
3. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.....	24
4. Perhitungan Financial to Deposit Ratio (LDR) .....	25
5. Perhitungan Rasio Efisiensi (BOPO).....	26-27
6. Perhitungan Cash Ratio.....	28
7. Perhitungan Return on Equity (ROE).....	29



# BANK MUSTAQIM ACEH

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MUSTAQIM ACEH (PERSERODA)  
MILIK PEMERINTAH ACEH

Kantor Pusat : Jl. Dr. Muhammad Hasan Batoh - Banda Aceh - Telp. 0651-43841

## SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT. BPRS MUSTAQIM ACEH (PERSERODA) UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHA ZALMI  
Alamat Kantor : Jl. Dr. Muhammad Hasan Batoh - Banda Aceh  
Alamat Rumah : Jl. Muhajirin II No. A11 Desa Punie Kecamatan Darul Imanah  
Kabupaten Aceh Besar.  
Jabatan : Plt. Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda);
2. Laporan Keuangan PT. BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda) tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) :
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan PT. BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
  - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT. BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan bagi PT. BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 28 Maret 2022

**DIREKSI**  
PT. BPRS MUSTAQIM ACEH (Perseroda)

**RIDHA ZALMI**  
Plt. Direktur Utama

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00020/2.1046/AU.4/07/0113-3/1/III/2022

Yth. Dewan Pengawas dan Direksi  
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh Perseroda  
di Aceh

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh Perseroda terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi, laporan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### *Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan*

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### *Tanggung Jawab Auditor*

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### *Opini*

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh Perseroda tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Head Office:

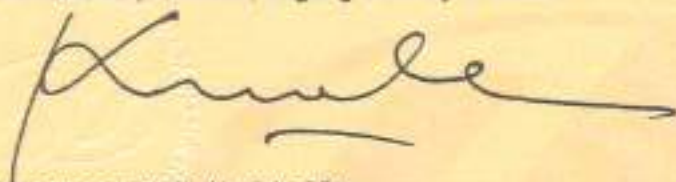
**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN - lanjutan**

No. 00020/2.1046/AU.4/07/0113-3/1/III/2022

**Hal Lain**

Informasi keuangan di dalam lampiran-lampiran yang disertakan pada laporan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh Perseroda untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Informasi keuangan tersebut merupakan tanggungjawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir. Informasi keuangan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut kami, informasi keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan



Dr. Kumalahadi, M.Si, Ak, CA, CPA  
Registrasi Akuntan Publik No: AP. 0113

Yogyakarta, 28 Maret 2022



00020



**PT SPRS MUSTAQIM ACEH (Persero)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	31 Desember 2021	01 September 2021
<b>ASET</b>			
Kas	2c, 3a	1.072.483.000	1.565.121.300
Penerimaan Pada Bank Lain	2d, 3b	80.410.327.300	55.717.204.504
Piutang Murabahah	2a,3c	76.551.845.882	61.284.939.434
Marginal Yang Akan Diterima			1.297.804.744
Pembayaran Masyarakat	2f, 3e	4.252.722.221	
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	2g, 3h	(3.517.139.791)	(3.406.988.188)
Totol		<u>160.079.245.552</u>	<u>139.478.054.302</u>
Agunan yang diambil alih	2h, 3i	397.406.050	327.490.060
Aset Tetap dan Inventaris	2f, 3j	10.407.003.993	13.850.679.003
Akumulasi penyusutan	3j	(9.170.084.055)	(6.650.208.032)
Totol		<u>9.034.418.988</u>	<u>9.227.937.011</u>
Aset Bermanfaat		<u>2.443.726.101</u>	<u>1.335.396.173</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>171.553.389.742</u></b>	<b><u>150.041.398.145</u></b>
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas Segera	2k, 3k	1.350.672.819	1.000.402.803
Tabungan Wadiah	2l, 3m	269.389.672	
Dana Investasi Pihak Terkait	2n, 3n	95.360.964.482	75.122.048.300
Liabilitas kepada bank lain	2n, 3o	3.450.000.000	3.450.000.000
Liabilitas lainnya	2o, 3p	3.636.876.600	2.057.617.131
Jumlah		<u>104.426.999.512</u>	<u>52.629.028.234</u>
<b>EKUITAS</b>			
Modal dasar	2a, 3r	50.000.000.000	50.000.000.000
Tambahan modal disetor	3s	45.000.000	45.000.000
Cadangan Tujuan	2p, 3q		1.170.201.832
Saldo laba	3t	1.031.490.229	-
Jumlah		<u>97.127.490.229</u>	<u>97.221.501.832</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b><u>171.553.389.742</u></b>	<b><u>150.041.398.145</u></b>

Direksi Aceh, 29 Maret 2022

Roga Zafri  
 CEO Direktur Utama

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (Perseroan)**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Periode 1 September s.d 31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		
- Pendapatan Operasional	2r, 3t	5.985.867.676
- Pendapatan Bagi Hasil	3t	1.070.377.952
Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana	3u	(1.140.058.424)
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<u>5.916.187.203</u>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	2r, 3t	365.775.364
<b>Jumlah Pendapatan Operasional:</b>		<u>6.281.962.567</u>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
- Beban Tenaga Kerja	2r, 3v	3.334.103.300
- Beban Administrasi dan Umum	2r, 3w	873.878.481
- Beban Penyisnhan dan Penghapusan	2r, 3x	62.554.105
- Beban Operasional Lainnya	2r, 3y	852.593.733
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<u>5.123.139.619</u>
<b>LABA OPERASIONAL</b>		<u>1.158.822.948</u>
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>		
- Pendapatan Non Operasional	2s, 3aa	1.481.977.050
- Beban Non Operasional	2s, 3z	(1.341.444.543)
<b>Pendapatan Non Operasional Bersih</b>		<u>140.532.507</u>
<b>LABA BERSIH SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK</b>		1.299.375.445
Zakat		-
<b>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</b>		1.299.375.445
Beban pajak penghasilan	2t, 3ab	(197.885.220)
<b>LABA BERSIH</b>		<u>1.081.490.229</u>

Banca Aceh, 28 Maret 2022

Ridha Zalmi  
 PLT Direktur Utama

PT DPRS MUSTAQIM ACEH (Perseroan Terbatas)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LINTAS PERIODE 31 AGUSTUS 2021 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

		Modal		Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi	Cadangan Utang	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
		Modal Dibayar	Modal Sumbangan			Cadangan Tujuan	Belum Ditransfer	
<b>SALDO 31 DESEMBER 2020</b>		71.735.504.000	45.000.000	(3.613.291.655)	1.113.481.950	(1.682.495.889)	67.500.198.406	
Pembayaran dividen	50%	-	-	1.982.455.989	-	1.212.195.098	-	
Pembentukan cadangan umum	10%	-	-	-	109.679.872	-	109.679.872	
Pembentukan cadangan tujuan	5%	-	-	-	(50.000.000)	-	(50.000.000)	
Penggunaan cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-	-	
Tercatat keuntungannya	10%	-	-	-	-	-	-	
Jasa produksi	8%	-	-	-	-	-	-	
Penjualan	4%	-	-	-	-	-	-	
CSRS (Corporate Social Responsibility)	3%	-	-	-	-	411.111.360	419.678.367	
Lain-lain	100%	-	-	(1.602.495.889)	59.879.902	2.102.134.276	419.678.367	
<b>SALDO 31 AGUSTUS 2021</b>		71.735.504.000	45.000.000	(5.295.787.544)	1.175.361.852	419.678.367	68.070.756.695	
Pemulihan rugi tahun lalu		(5.285.767.544)	-	5.295.787.544	-	-	(438.795.400)	
Tilpa Lainnya		(438.795.400)	-	-	-	(419.678.367)	(795.576.397)	
Tilpa Lainnya		-	-	-	-	-	-	
Penggunaan cadangan tujuan		-	-	-	-	-	-	
Dana konsep/lewat		-	-	-	-	-	-	
Jasa produksi		-	-	-	17.000.000	-	17.000.000	
Revisi Pelanggaran Perjanjian S DPR		-	-	-	(425.190.000)	-	(425.190.000)	
CSRS (Corporate Social Responsibility)		-	-	-	(500.000.000)	-	(500.000.000)	
Jasa Pengabdian Masyarakat		-	-	-	110.000.000	-	110.000.000	
Penjualan barang		-	-	-	176.753.252	-	176.753.252	
Penjualan barang		-	-	-	1.041.490.229	-	1.041.490.229	
Lain-lain		-	-	-	-	-	-	
Lain-lain barang tahun berjalan		-	-	-	1.041.490.229	-	1.041.490.229	
<b>SALDO 31 DESEMBER 2021</b>		66.449.736.456	45.000.000	(1.041.490.229)	1.041.490.229	0	67.127.496.210	

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (Perseroada)**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
**31 Desember 2021**  
 (Disajikan dalam Rupiah)

	<b>31 Desember 2021</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Laba bersih setelah pajak	1.081.490.228
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba menjadi kas bersih dari kegiatan operasi	
Penyesuaian aset tetap	219.878.023
Penyisnahan penghabusan aset produktif	110.151.605
<b>Jumlah</b>	<b>1.411.519.857</b>
Perubahan aktiva operasi:	
Penurunan (kenaikan) penempatan pada bank lain	(18.751.449.837)
Penurunan (kenaikan) piutang murabahah	4.730.093.593
Penurunan (kenaikan) Margin yang akan diterima	1.287.804.714
Penurunan (kenaikan) pembayaran	(4.352.722.221)
Penurunan (kenaikan) piutang transaksi multijasa	
Penurunan (kenaikan) aset ijarah	
Penurunan (kenaikan) rupa-rupa aset	(1.105.328.929)
Kenaikan (penurunan) kewajiban segera	60.270.016
Kenaikan (penurunan) tanggungan wadiah	289.599.872
Kenaikan (penurunan) dana investasi tidak terkait	20.243.945.162
Kenaikan (penurunan) kewajiban kepada bank lain	-
Kenaikan (penurunan) kewajiban lain-lain	(193.103.483)
Kenaikan (penurunan) rupa-rupa pasiva	
<b>Arus kas neto dari aktivitas operasi</b>	<b>1.248.998.863</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penjualan (perolehan) aset tetap dan investasi	(28.360.000)
<b>Arus kas neto untuk aktivitas investasi</b>	<b>(28.360.000)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penambahan (pengurangan) cadangan umum	
Koreksi laba	-
Pembagian laba tahun lalu	-
<b>Arus kas neto (untuk) dari aktivitas pendanaan</b>	<b>-</b>
Kas bersih yang tersedia (digunakan)	2.634.098.720
Saldo awal kas	4.060.189.008
<b>Saldo akhir kas</b>	<b>5.714.247.728</b>

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (Persero)**  
**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

31 Desember 2021

**KOMITMEN**

Tagihan Komitmen	
Facilities pinjaman yang diterima belum ditarik	-
Tagihan Komitmen lainnya	-
Kewajiban Komitmen	
Facilities kredit masalah yang belum ditarik	-
Kewajiban komitmen lainnya	-

**KONTIJENSI:**

Tagihan Kontijensi:	
Pendapatan yang akan dikorupsi	-
Pencabutan Margin Murabahah	4.475.372,531
Lainnya	-
Kewajiban Kontijensi	
Aset produktif yang dipasokukukan	9.486.457,350
Pencabutan bunga dalam penyelesaian	-

## 1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT BPR Syariah Mustaqim Aceh (Perseroa) menyatakan bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2021 dengan informasi komparatif pendakikan angka kesesuaian untuk per 30 Agustus 2021 yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akumulasi Pajak (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

BPRS menggunakan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan petunjuk pelaksanaan yang lebih terperinci terhadap ketentuan dan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS.

Bentuk laporan keuangan PT BPR Mustaqim Sukamaktur telah disesuaikan untuk sudah menjadi PT BHM Syariah Mustaqim Aceh (Perseroa). Perubahan bentuk laporan PT BPR Mustaqim Sukamaktur menjadi PT BPR Syariah Mustaqim Aceh (Perseroa) telah disesuaikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat No. SR/22/PS/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan selanjutnya dengan persetujuan tersebut PT BPR Mustaqim Sukamaktur diminta OJK untuk melakukan buku laporan keuangan PT BPR Mustaqim Sukamaktur sebagai penyertaan manajemen PT BPR Mustaqim Sukamaktur telah mengubah basis penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan dari basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis entitas. Ikudasi efektif tanggal 31 Agustus 2021.

Laporan keuangan BPRS terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan dana ZIS, laporan dana Cadah, dan catatan atas laporan keuangan. BPRS menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara terpisah.

Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar kas, hubungan dan konsep biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas BPRS yang meliputi jenis, bentuk, tujuan, dan lokasi yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas dan setara kas mencakup kas dan rekening giro pada bank lain. BPRS melaporkan arus kas berdasarkan operasi dengan menggunakan metode maks. langsung.

### b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi, dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah, sebagai satuan fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akan disajikan dalam Rupiah dengan keakuratan yang diperlukan.

Perhitungan BPRS dicatat/dilakukan dalam mata uang Rupiah, sedangkan transaksi dalam mata uang asing dicatatkan ke dalam Rupiah dengan kurs bank (apokrate) pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian seperti ini yang timbul dicatatkan atau direfleksikan pada laporan laba rugi/tahun berjalan.

### c. Kas

Kas mencakup kas besar, kas kecil, kas tunai, dan kas setara kas. Kas yang disajikan dalam laporan arus kas mencakup kas dan setoran pada bank lain, dan giro pada bank lain.

### d. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain terdiri dari penempatan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito pada bank, selain dari setoran giro dan tabungan pada bank konvensional. Bank harus melakukan penempatan pada bank lain yang Transaksi penempatan pada bank lain diakui sebesar nilai nominal.

### e. Piutang Murabahah

Piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembayaran (kumulatif) nasabah kepada bank.

Pembayaran murabahah adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menepatkan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) yang menyalahkannya dengan cara yang lain sebagai kredit/pembiayaan bank yang dibebaskan.

Piutang murabahah diakui pada saat akad transaksi Murabahah, sebesar harga pembelian uruturan keuntungan margin yang dibebaskan. Dalam hal Bank menggunakan metode akrual, piutang Murabahah yang diakui termasuk pendapatan dan margin yang belum direalisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - Lanjutan

f. Pembayaran Musyarakah

Pembayaran Musyarakah merupakan kerjasama antara bank dan nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan selagi-lagi kegiatan berdasarkan persentase dan cara pencairan kas masing-masing. Keuntungan berdasarkan pembayaran modal pada periode terjadinya hak tanggungan berdasarkan laporan laba. Usaha yang dibentangkan masalah sesuai dengan modal yang disepakati.

Pembayaran Musyarakah dibayarkan sebesar saldo pembayaran Musyarakah nasabah kepada bank.

g. Penyisihan, Penghapusan Aset Produktif

Penyisihan penghapusan aset produktif dilakukan berdasarkan perkembangan perkembangan yang ada di bank pada akhir tahun buku laporan keuangan yang tersedia. Saldo penyisihan kerugian pembayaran diayak sebagai pos pengurangan dari pembayaran. Penyisihan kerugian dibentuk berdasarkan perhitungan terhadap kualitas pembayaran dan nilai agunan yang tersedia. Saldo penyisihan kerugian pembayaran disajikan sebagai pos pengurangan dari

Penyisihan kerugian terhadap penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain dan pembayaran yang disediakan. Penyisihan kerugian dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul selubung dengan penempatan dana ke dalam pembayaran. Penghapusan pembayaran (tidak buku) merupakan tindakan administrasi BPRS untuk menghapus buku pembayaran modal tanpa menghapus hak tagih BPRS kepada debitur. Penghapusan hak tagih pembayaran harus sudah adalah tindakan BPRS menghapus

Kebijakan BPRS membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) untuk tahun 2021 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Kualitas Aset Produktif Bank Perkreditur Rakyat (Pasal 19)

BPRS pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset dengan kualitas aset tersebut. Aset dinilai mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya untuk menjual. Kerugian penempatan aset aset dinilai nilai wajar dikurangi biaya menjual telah terdapat di bandingkan dengan nilai tercatat. Penurunan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi baik boleh melalui "laba"

<u>Kualitas Aset Produktif Tahun 2021</u>	<u>Penyisihan Kerugian</u>
- Tidak ada	0%
- Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan	
- Berkas sejak 1 Desember 2019 s.d 31 Desember 2020	0%
- Berkas sejak 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021	1%
- Berkas sejak 1 Januari 2022	3%
- Kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan	10%
- Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan	50%
- Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan	100%

<u>Kualitas Aset Produktif Tahun 2020</u>	<u>Penyisihan Kerugian</u>
- Tidak ada	0,5%
- Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan	
- Berkas sejak 1 Desember 2019 s.d 31 Desember 2020	0,5%
- Berkas sejak 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021	1%
- Berkas sejak 1 Januari 2022	3%
- Kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan	10%
- Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan	50%
- Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan	100%

h. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih disajikan dari aset lainnya sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. Bank tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Apabila agunan yang diambil alih mengalami penurunan nilai maka BPRS mengakui penurunan nilai tersebut. Apabila agunan yang diambil alih mengalami kondisi nilai maka BPRS mengakui. Agunan yang diambil alih tidak dicatatkan. Apabila hasil penjualan lebih besar dari nilai tercatat AYDA, kelebihan nilai penjualan dikembalikan kepada nasabah pembayar. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari nilai tercatat AYDA maka kekurangan tersebut ditagih oleh Bank kepada nasabah pembayar. Bank tidak membentuk Penyisihan Penghapusan Aset atas agunan yang ditasorekan kepada nasabah setelah rdn dan AYDA disajikan secara terpisah dan nilai lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual mana yang lebih rendah.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - (lanjutan)

### i. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris dicatat atas dasar nilai berbeban dan diukur dalam rupiah sebesar nilai berbeban dikurangi akumulasi penyusutan dan nilai penuliran nilai jika ada. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus dengan cara memperhitungkan nilai manfaat ekonomis aset.

Penyusutan aset tetap dan inventaris dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

<u>Jenis</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Konstruksi	4 - 5 Tahun	25% - 20%
Mesin Kantor	4 - 5 Tahun	25% - 20%
Peralatan Peralatan	2 - 3 Tahun	10.5% - 50%
Komputer	2 - 4 Tahun	25% - 50%
Elektronik	2 - 4 Tahun	25% - 50%

### j. Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat secara fisik dipindahkan ke dalam kategori aset tetap yang ada dan tidak secara khusus untuk dijual, diperjualbelikan. Aset lain-lain dicatat pada saat perolehannya.

### k. Liabilitas Segera

Kewajiban Bank Koperasi priak lam yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman atau perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera terdiri dari pembayaran pajak-pajak potong pajak yang masih harus disetor, kewajiban yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar dan dana pihak ketiga. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank yang wajib segera.

### l. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabung priak ketiga priak bank yang harus disetor dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan mengkehendaki. Tabungan wadiah dapat sebesar nominal penyedoran atau kontributor yang dilakukan penarikan rekening. Saluran tabungan wadiah yang diterima sebagai dana disetor pada saat yang diterima. Saluran tabungan wadiah melalui rekening khusus setelah efektif diterima. Saluran tabungan wadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya.

### m. Dana Investasi Tidak Terikat

#### Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah dana priak ketiga priak bank yang harus disetor dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan mengkehendaki. Tabungan wadiah dapat sebesar nominal penyedoran atau kontributor yang dilakukan penarikan rekening. Saluran tabungan wadiah yang diterima sebagai dana disetor pada saat yang diterima. Saluran tabungan wadiah melalui rekening khusus setelah efektif diterima.

#### Deposito Mudharabah

Deposito disetor sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban Bank yang dipergunakan.

Deposito mudharabah adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengembalian besarnya akan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase.

### n. Liabilitas Pada Bank Lain

#### Deposito Mudharabah

Deposito disetor sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban Bank yang dipergunakan.

Deposito mudharabah adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengembalian besarnya akan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase.

### o. Liabilitas Lainnya

#### Rekening Bagi Hasil Yang Masih Harus Dibayar

Saluran tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank kepada pemilik tabungan.

#### Penyusutan dan Biaya Dimulai

Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban Bank yang dipergunakan.

#### Deposito

Deposito disetor sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban Bank yang dipergunakan.



2. IKHTISAR KEE JAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - lanjutan

**p. Modal**

Modal merupakan hak residual atas aset BPRS setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur modal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu modal disetor dan modal disetor ts'yalah.

Modal disetor adalah kontribusi nominal saham sesuai dengan anggaran dasar. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank setelah nilai nominal saham. Tambahan modal disetor (ag'ya saham) yaitu saham baru setoran modal yang diterima oleh BPRS akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Modal disetor ts'yalah adalah tambahan yang berasal dari pemilik BPRS dalam bentuk dana atau aset lainnya.

**q. Cadangan tujuan**

Cadangan tujuan adalah dana dipisahkan sesuai nas. Rapat Pemegang Saham Tahunan BPRS dan pengunaannya ditetapkan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Komisaris.

**r. Pendapatan dan Beban Operasional**

Pendapatan dan Beban Operasional adalah pendapatan dan beban dari kegiatan usaha BPRS.

**s. Pendapatan dan Beban Non - Operasional**

Pendapatan dan Beban Non Operasional adalah pendapatan dan beban diluar kegiatan usaha BPRS.

**t. Beban Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan bisa merupakan pajak penghasilan k'iri dan pajak penghasilan tanggungan. Pajak penghasilan yang digunakan adalah pajak penghasilan k'iri. Sehingga beban pajak penghasilan yang timbul merupakan beban pajak penghasilan k'iri. Beban pajak penghasilan diakumulasi saat terjadinya kerugian.



PT. BPRE MUSTAQIM ACEH (PERSEROAN)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE 1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

1. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN  
2. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

d. Piutang Istisna		<u>31 Desember 2021</u>	<u>1 September 2021</u>
Rincian piutang istisna terdiri dari:			
Piutang istisna			
Ketersediaan margin istisna yang dikurangkan			
Jumlah piutang istisna			
e. Pembiayaan Yang Di berikan		<u>31 Desember 2021</u>	<u>1 September 2021</u>
Rincian pembiayaan terdiri dari:			
Masyarakat		4.952.722.221	
Jumlah pembiayaan		<u>4.952.722.221</u>	
f. Akumulasi Yang Akan Ditransk		<u>31 Desember 2021</u>	<u>1 September 2021</u>
Rincian akumulasi yang akan ditransk terdiri dari:			
Akumulasi yang akan ditransk Murabahah			1.297.904.714
Jumlah transaksi mat(ijwa)			<u>1.297.904.714</u>
g. Aset Jarah		<u>31 Desember 2021</u>	<u>1 September 2021</u>
Rincian aset jarah terdiri dari:			
Aset jarah			
Akumulasi penurunan aset jarah			
Jumlah aset jarah			
h. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		<u>31 Desember 2021</u>	<u>1 September 2021</u>
Rincian penyisihan penghapusan aset produktif terdiri dari:			
<u>    Gedung dan RPAP</u>			
Penyisihan Murabahah		3.472.412.552	3.425.455.122
Penyisihan Masyarakat		24.441.532	
Penyisihan Mobilisasi		152.000	
<u>    Aset umum RPAP</u>			
Pembiayaan Murabahah		7.854.722	
Pembiayaan Masyarakat		2.046.000	
Jumlah penyisihan penghapusan aset produktif		<u>3.649.810.784</u>	<u>3.425.455.122</u>
i. Agunan Yang Diambil Oleh AYDA		<u>31 Desember 2021</u>	<u>1 September 2021</u>
Agunan yang diambil oleh:			
AYDA		387.456.050	387.456.050
Lain-lain		387.456.050	387.456.050
Rincian AYDA yang diambil oleh AYDA berikut:			

No	Nama Debitur	Sist. Agunan	Tanggal AYDA	Nominal AYDA (Rp)
1	Mulyadi	SHM No. 43	25/08/2012	3.212.188
2	Comber	SHM No. 1	14/03/2012	37.557.370
3	Arif Ghufr	SHM No. 76	16/05/2012	20.075.257
4	Ery Sardinia	SHM No. 10	14/03/2012	37.664.039
5	Fisadi	S. M No. 13	22/02/2012	11.574.073
6	Luhur Lu	AJF No. 002/2012	24-06-2012	7.268.722
7	Jadid	AJF No. 153/2012	24-06-2012	5.259.000
8	Amirul	AJF No. 352/2012	24/09/2012	21.667.617
9	Julaidi	AJF No. 374/2012	24-09-2012	18.255.474
10	Muhammad Jamhaz	GIB No. 99/0/2012	24-09-2012	22.513.001
11	Umi L. Rahman	10/0X/2012	24/09/2012	16.248.660
12	Ruslan Anri	10/0X/2012	24/09/2012	5.658.284
13	Muhammad Al Yaqo	101/002012	24/09/2012	13.076.200
14	Tarbiyah	SHM	18-04-2012	152.861.575
	Jumlah			<u>387.456.050</u>

3. INFORMASI YANG Mendukung POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. INFORMASI YANG Mendukung POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

i. Aset Tetap dan Inventaris

	31 Desember 2021			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
<b>Biaya Perolehan</b>				
Tanah	4.034.500.000	-	-	4.034.500.000
Gedung/Bangunan	3.921.329.187	-	-	3.921.329.187
Kendaraan	1.431.118.000	-	-	1.431.118.000
Mesin Kantor	399.866.000	500.000	-	399.866.000
Peralatan Furnitur	2.013.612.150	-	-	2.013.612.150
Komputer	2.082.110.990	11.000.000	-	2.093.110.990
Elektronik	1.265.516.087	8.660.000	-	1.274.176.087
<b>Jumlah</b>	<b>16.357.978.664</b>	<b>20.060.000</b>		<b>16.407.938.664</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Gedung/Bangunan	331.379.943	65.021.616	-	396.401.559
Kendaraan	1.287.250.430	12.784.717	-	1.300.035.147
Mesin Kantor	342.414.957	14.400.000	-	356.814.957
Peralatan Furnitur	1.058.782.044	56.093.808	-	1.114.875.852
Komputer	1.097.266.044	7.770.294	-	1.105.036.338
Elektronik	1.037.808.126	43.440.564	-	1.081.248.690
<b>Jumlah</b>	<b>6.153.299.544</b>	<b>138.678.021</b>		<b>6.291.977.565</b>
<b>Neto Buku</b>	<b>10.204.679.120</b>			<b>10.115.961.099</b>

	01 September 2021			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
<b>Biaya Perolehan</b>				
Tanah	4.034.500.000	-	-	4.034.500.000
Gedung/Bangunan	3.751.021.187	169.600.000	-	3.920.621.187
Kendaraan	1.431.118.000	-	-	1.431.118.000
Mesin Kantor	399.866.000	500.000	-	399.866.000
Peralatan Furnitur	1.742.681.400	270.820.750	100.500	2.013.401.650
Komputer	2.082.110.990	14.560.000	-	2.096.670.990
Elektronik	1.242.866.027	8.600.000	-	1.251.466.027
<b>Jumlah</b>	<b>14.045.574.244</b>	<b>454.950.750</b>	<b>100.500</b>	<b>14.399.974.494</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Gedung/Bangunan	110.025.000	178.045.906	-	288.070.906
Kendaraan	1.261.415.963	28.410.430	-	1.289.826.393
Mesin Kantor	307.481.400	34.900.621	-	342.382.021
Peralatan Furnitur	1.457.812.053	56.151.000	-	1.513.963.053
Komputer	1.092.460.201	44.731.757	-	1.137.191.958
Elektronik	881.521.344	26.888.483	-	908.409.827
<b>Jumlah</b>	<b>5.110.305.961</b>	<b>438.226.166</b>		<b>5.548.532.127</b>
<b>Neto Buku</b>	<b>8.935.268.283</b>			<b>8.851.442.367</b>

b. Aset Lainnya

	31 Desember 2021	1 September 2021
<b>Risiko Investasi</b>		
Mergi Investasi	1.297.804.714	-
Tidak dibayar dimasa	218.875.793	218.875.793
Bayar dibayar dimasa	304.126.900	1.071.021.408
Persediaan barang dagangan	29.918.837	19.567.165
Persediaan material dan ATK	-	479.000
Persediaan dalam penyelesaian	-	21.450.799
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>2.441.726.104</b>	<b>1.731.394.165</b>

c. Kewajiban Beryak

	31 Desember 2021	1 September 2021
<b>Pinjaman Kewajiban Segera Terdaftar</b>		
Tanah Paksi PMA Pasai 21	7.015.000	6.904.000
Pinjaman Paksi PMA Pasai 23 - Deponit	42.782.332	43.021.889
Kewajiban segera PMA 25	19.188.000	-
Tanah Aulana Uka	16.162.400	16.162.400
Tanah Aulana Kandaraan	11.991.875	11.125.895
Tanah Lada Nolen	108.008.821	107.507.508
Tanah Paksi Karsaerah	120.800.000	120.800.000
Tanah Paksi Sawa (sawit + Aya. 2)	-	3.800.000
Tanah Paksi Tebo - GERA	21.155.700	20.017.120

PT. SFRE MUSTAQIM ACEH (PERSEROAN)  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK PERIODE 1 SEPTEMBER 2021 SAMPA DENGAN 31 DESEMBER 2021

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN  
 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

<b>l. Kewajiban Segera - Jangka Panjang</b>		
Rincian kewajiban segera jangka panjang	<b>31 Desember 2021</b>	<b>1 September 2021</b>
Utang Jangka Panjang	1.152.372.421	1.371.000.000
Jumlah kewajiban segera	<b>1.152.372.421</b>	<b>1.371.000.000</b>
<b>m. Cadangan Wadiah</b>		
Rincian cadangan wadiah bank syariah	<b>31 Desember 2021</b>	<b>1 September 2021</b>
Cadangan Mustaqim	89.457.421	-
Cadangan Muqadim	306.000	-
Cadangan Mendirikan	129.395.273	-
Cadangan Jumaah	516.355	-
Cadangan Tabung	79.302.593	-
Jumlah Cadangan Wadiah	<b>209.068.672</b>	<b>-</b>
<b>n. Dana Investasi Tidak Terkat</b>		
Rincian dana investasi tidak terkat terdistribusi	<b>31 Desember 2021</b>	<b>1 September 2021</b>
<b>Tipe Dana Investasi</b>		
Cadangan Mustaqim	18.808.087.076	14.088.888.120
Cadangan Muqadim	52.616.489	78.203.640
Cadangan Mendirikan	7.454.804.332	6.619.705.464
Cadangan Jumaah	242.154.020	169.874.429
Tabung	9.119.214.593	5.861.001.565
Jumlah	<b>33.804.799.110</b>	<b>27.022.089.668</b>
<b>Tipe Dana Investasi</b>		
Deposito Mustaqim 12 B/N	15.202.102.344	10.139.968.000
Deposito Mustaqim 3 B/N	2.436.000.000	1.115.000.000
Deposito Mustaqim 6 B/N	3.655.000.000	3.780.000.000
Deposito Mustaqim 12 B/N	2.212.000.000	2.200.000.000
Jumlah	<b>23.505.102.344</b>	<b>17.234.968.000</b>
Tipe Dana Investasi Tidak Terkat	<b>95.355.861.458</b>	<b>75.122.010.300</b>
<b>o. Liabilitas Pada Bank Lain</b>		
Rincian liabilitas pada bank lain	<b>31 Desember 2021</b>	<b>1 September 2021</b>
Utang Pihak Ketiga	2.460.000.000	2.460.000.000
Utang APB K/N A/B	1.460.000.000	1.460.000.000
Jumlah Kewajiban Pada Bank Lain	<b>3.920.000.000</b>	<b>3.920.000.000</b>
Tingkat suku bunga deposito dan bank lain (Antar Bank Pasial) secara rangkai nilai dan bunga dengan to sebesar 6,11% (Agustus 2021 - 2020 sebesar 6,51%).		
<b>p. Rupa - Rupa Pasiva</b>		
Rincian rupa-rupa pasiva dan terdiri dari	<b>31 Desember 2021</b>	<b>1 September 2021</b>
<b>Rekening Bank yang Masih Harus Dibayar</b>		
Rek. Deposito Mustaqim 1 B/N yang masih harus dibayar	19.126.195	102.039.000
Rek. Deposito Mustaqim 3 B/N yang masih harus dibayar	12.271.224	19.385
Rek. Deposito Mustaqim 6 B/N yang masih harus dibayar	17.542.830	6.114.058
Rek. Deposito Mustaqim 12 B/N yang masih harus dibayar	12.627.170	1.114.811
Rek. Deposito APB Mustaqim 1 B/N yang masih harus dibayar	32.267.583	30.286.836
Rek. Cadangan Mendirikan	642.477	769.473
Rek. Cadangan Muqadim	4.18	4.181
Rek. Cadangan Jumaah & Tabung	570.642	173.542
Rek. Tabung	719.451	119.484
Subtotal	<b>80.591.559</b>	<b>140.807.779</b>
<b>Pencapaian Utang &amp; Jijeg</b>		
Utang Pihak Ketiga	317.000.144	317.000.144
Subtotal	<b>317.000.144</b>	<b>317.000.144</b>
<b>Saldo</b>		
Saldo Laba	560.724.777	601.046.094
Dana Sosial - Keptuhan	55.193.342	-
Cadangan Biaya Kerja	347.962.847	-
Cadangan Pendidikan	126.271.242	571.976.642
Cadangan I/P	119.157.640	5.990.240
Cadangan Bonus	56.253.010	63.200.015
Cadangan Kenaikan/rajaan Pegawai	400.470.433	478.570.454
Cadangan Lunasan Pendidikan	100.000.000	-
Cadangan Pajak Kerja	-	400.000.000
Dana DSA	428.190.000	-

PT. BPRS MUSTAQIM ACEH (PERSEROAN)  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK PERIODE 1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN  
 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

p. **Rupa - Rupa Pasiva**

	31 Desember 2021	1 September 2021
Rendahnya Laba ditahan di bawah		
2021		
Jasa Penghasilan Pengganti	555.002.600	-
dan Jasa Kredit	100.670.000	-
Jasa Tertentu	75.750.250	-
Sisa Laba	3.078.409.900	2.074.081.700
Jumlah Rupa - Rupa Pasiva	3.809.832.750	2.657.817.190

r. **Modal Saham**

	31 Desember 2021	1 September 2021
Modal Dasar	200.000.000.000	200.000.000.000
Modal Saham Ditahan	1.333.889.000.000	1.333.889.000.000
Modal Diserap	98.000.000.000	65.000.000.000

Berdasarkan agenda Bersama Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pertama (RUPST) PT BPRS Mustaqim Aceh pada tanggal 27 Mei 2021 yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2021, dan berdasarkan Keputusan Direksi BPRS Mustaqim Aceh pada tanggal 27 Mei 2021 yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2021, maka modal dasar PT BPRS Mustaqim Aceh (Perseroan) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, masing-masing saham memiliki nominal Rp1.000,00 (satu ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh investor 33.000.000 (tiga puluh tiga juta) saham pada tanggal 27 Mei 2021, jumlah Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah).

Pemegang Saham	Saham Seri A (100.000)	Nilai Perolehan Saham (Rp)	Jumlah %	Persentase (%)
M. Nur Hafid M. T. Sudharsono	96.000.000	100%	96.000.000.000	48,00%
Reza Nur Hafid A. W. SP. M. S. (Konsorsium)	1.000	100%	1.000.000	0,00%
Jumlah	96.000.000	100%	96.000.000.000	100,00%

s. **Modal Sumbangan**

	31 Desember 2021	1 September 2021
Dana Awa	45.000.000	45.000.000
Pendanaan	-	-
Sisa Awa	45.000.000	45.000.000

t. **Sediaan**

Sediaan			
Jasa Rupa yang Belum Dihasilkan			
Pembayaran			
Jumlah Sediaan	55%		
Dedagang	15%		
Uang dan Kas	5%		
Sisa Sediaan	15%		
Saldo Laba	8%		
Tertang	4%		
OST - Gengsi dan Sosial Responsibility	5%		
Jumlah Sediaan	1.278.370.445		
Sisa Sediaan	1.278.370.445		

u. **Cadangan Tujuan**

Adapun perubahan cadangan tujuan akan periode bersangkutan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	1 September 2021
Saldo awal	1.178.361.552	1.178.361.552
Pembentukan cadangan	-	100.670.000
Penggunaan cadangan	(1.178.361.552)	(50.000.000)
Saldo akhir	-	1.178.361.552

v. **PENDAPATAN OPERASIONAL**

Keuntungan dan kerugian operasional terdiri dari:

	31 Desember 2021
Pendapatan operasional (penghasilan) operasional	
Pendapatan Mutabakat Modal Kerja	4.438.001.000
Pendapatan Mutabakat Investasi	1.201.001.000
Pendapatan Mutabakat Konsumsi	287.000.000
Pendapatan Mutabakat Karyawan	100.112.100
Pendapatan Mutabakat Perbaikan	300.000.000
Pendapatan Dagi Hasil Masyarakat	122.889.227
Jumlah pendapatan operasional (penghasilan) operasional	5.998.007.377

PT. SPRUS MUSTAQIM ACEH (PERSEROAN)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE 1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

i. PENDAPATAN OPERASIONAL (lanjutan)

Pendapatan bagihitas	
Tabungan Bank Luar	1.716.310
Tabungan Bank Dalam	1.263.882.642
Jumlah pendapatan bagihitas	<u>1.265.598.952</u>
Pendapatan operasional lainnya	
Pendapatan Admin Pembelian	348.737.859
Pendapatan Admin Tabungan	14.362.205
Pendapatan Admin Giro Bank	11.607
Pendapatan Lend Lease Break Down	630.609
Fee Payment Point	<u>2.153.500</u>
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	<u>397.904.780</u>
Jumlah Pendapatan Operasional	<u>1.663.503.732</u>

ii. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA

Rincian biaya tenaga kepada pemilik dana terdapat	
	<u>31 Desember 2021</u>
Bagi hasil kepada bank terikat	
Bank kepada bank bank	
Tabungan Muharabah	
Tabungan Musadama	32.218.989
Tabungan Masygah	284.411
Tabungan Fardikah	321.403.388
Tabungan Jalinan	1.18.278
Tabungan S	<u>129.528.204</u>
Kasabat Muharabah	
Musadama 1 bulan	1.775.938.115
Musadama 3 bulan	1.51.524.424
Musadama 6 bulan	1.88.733.333
Musadama 12 bulan	<u>1.41.866.076</u>
Jumlah bagi hasil Investasi bank terikat	<u>1.974.999.042</u>
Bagi hasil kepada bank lain	
Deposito Muharabah	
Musadama 1 bulan	<u>35.088.012</u>
Jumlah Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana	<u>1.1.143.788.424</u>

iii. BEBAN TENAGA KERJA

	<u>31 Desember 2021</u>
Rincian biaya tenaga kerja terdapat	
Beban gaji dan upah	
Gaji Pokok	35.671.570
Gaji Karyawan	1.384.738.423
Gaji Karyawan Non PNS	214.912.348
Gaji Karyawan Local Finance	19.402.787
Tunjangan Jabatan	226.469.000
Tunjangan Operasional Direksi	68.571.600
Tunjangan Transport	217.536.000
Tunjangan Makan	143.800.000
Tunjangan Hari-Rasa 21	18.068.800
Tunjangan Kesehatan	9.400.000
Tunjangan Perumahan	60.833.333
Pesangon Hak Karyawan	200.000.000
Jalan Lainnya	<u>144.322.858</u>
Jumlah	<u>3.204.834.201</u>
Tunjangan pensiun	
Gaji Karyawan	1.035.581
Tunjangan karyawan	
Hutang Dana Pembiayaan Bank	166.010.000
Tunjangan Hari Raya	113.199.480
Tunjangan Pendidikan	<u>160.300.000</u>
Beban honorarium komisaris/dewan Pengawas/Komisitor	
Honorarium Dewan Komisaris	114.223.165
Tunjangan honorarium Dewan Komisaris	<u>1.856.300</u>
Jumlah beban tenaga kerja	<u>5.194.123.946</u>

PT. RPRS MUSTADIM ADEH (PERSERO) AKAH  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK PERIODE 1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

1. INFORMASI YANG MENUNJUK PDS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. INFORMASI YANG MENUNJUK PDS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

4. BEBAN ADMINISTRASI DAN UKUM

	<u>31 Desember 2021</u>
Beban beban administrasi dan umum (lanjutan)	
Beban sewa:	
Pembelian pada instansi pemerintah	
PDRD/UMK	89.143.338
PDRD/UMK dan BUMD	90.144.191
Pembelian pada Gedung Kantor	12.133.891
Pembelian pada Kantor	111.248.550
Pembelian Kesenjangan	38.784.558
Beban SPPO Dikelola dan Monev	
Beban SPPO Dikelola	28.891.200
Beban SPPO Jalur Operasi - Monev	7.088.100
Beban Sewa	
Beban Kantor	44.742.215
Beban Lain-lain	479.758.647

4. BEBAN ADMINISTRASI DAN UKUM (lanjutan)

Beban administrasi	<u>423.235.841</u>
Beban promosi	
Sponsorship	12.220.000
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	
Pemeliharaan Gedung Kantor	1.615.000
Pemeliharaan Kantor dan Kantor	50.236.650
Pemeliharaan Kantor Kantor	32.108.100
Pemeliharaan Lain-lain	2.447.100
Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	
Gedung Kantor	161.918.899
Kendaraan Bermotor	310.528.287
Jenis Lain	19.454.201
Peraturan Perusahaan dan Perencanaan	55.363.137
Perangkat Lunak	10.079.779
Peralatan Elektronik	43.046.722
Perengkapan Meubel	325.958
Amanisasi Beban yang Ditanggungjawabkan	
Tanggungjawab RPA Lainnya	211.525
Beban Penyusutan Periklanan	
Periklanan Mustadim ADEH	27.617.500
Lain-lain beban administrasi dan umum	<u>613.672.421</u>

5. BEBAN PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN

Revisi beban penyisihan dan penghapusan aset produktif

	<u>31 Desember 2021</u>
Beban penyisihan dan penghapusan	
Revisi beban penyisihan dan penghapusan aset produktif	82.664.176
Lain-lain beban penyisihan dan penghapusan aset produktif	<u>82.664.176</u>

6. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Revisi beban operasional lainnya (lanjutan)

	<u>31 Desember 2021</u>
Beban biaya operasi (lanjutan)	
Beban Biaya Lain-lain	155.000
Beban Biaya Lain-lain	2.691.100
Beban Biaya Lain-lain	167.114
Beban Lain-lain	709.000
Beban Lain-lain dan Jasa Pihak Ketiga	
Beban Lain-lain	33.256.360
Beban Lain-lain Lainnya dan Lain-lain	41.622.000
Lain-lain	2.433.250
Lain-lain	<u>137.329.014</u>



**PT. BPRS MUSTAQ MACEH (PFRSEROD)**  
**DAFTAR ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE 1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

**3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

**x. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - lanjut**

Jumlah dipisahkan	<u>127.325.215</u>
Beban Administrasi Bank	
Beban Transfer	369.160
Mata Uang Administrasi Bank	2.037.000
Beban Daku. Bnt	120.000
Taruhan Administrasi	162.000
Denda/Beban Non-Prod	102.449
Pajak Bagi Hasil Deposito/Tabung. dan ABA	97.321
Pelanggaran Dalaker	
Fasilitas	2.406.175
Beban Investasi	740.7334
Asuransi Risiko Pos/Pengiriman Surat	
Materi Pemrosesan	44.000
Pengiriman Dokumen	4.366.015
Biaya Rantai Tangga Risiko	
Biaya Harta/Kumulatif Tanpa Kantor	1.100.189
Fasilitas	1.466.850
Asuransi Deposit	1.352.400
Beban Konsumsi/Manajemen Dinas	22.440.900
Asuransi Lainnya	
Beban P. K.	22.159.810
Perangkat Lunak Komputer	4.092.000
ATM Lainnya	990.000
Transfer, Majalah dan Koran	
Langganan Majalah	1.076.400
Langganan Surat Kabar	6.264.000
Transmisi BSM dan Pihak	
Beban Lain	60.068.142
Beban	1.100.000
Denda	2.013.000
Kecelakaan	
Korupsi dan Keamiran	1.061.000
Printing Service	22.700.000
Accounting Consulting	260.390.000
Biaya Perjanjian Lain	
Perjanjian Bunga dan Kartu Kepan	410.000
Lampiran Lain	400.000
Masing-masing Lainnya	
Badan Hasil Pemrosesan	1.102.300
Kecelakaan Keamiran	57.070.000
Beban RST/TA Kantor	45.226.854
Rincian beban operasional lainnya terdiri dari	
Beban Survei/Agan Lainnya	3.820.000
Beban Another Handover Kantor	1.208.000
Beban Lainnya	32.328.234
Lainnya Kehilangan Kas	10.457
Jumlah beban operasional lainnya	<u>852.291.733</u>
Jumlah Beban Operasional	<u>5.140.730.918</u>

**2. BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Rincian beban non-operasional lainnya terdiri dari:

	<u>31 Desember 2021</u>
Beban Hibah Antar Kantor	1.141.438.896
Beban Hibah	6.290.000
Beban Non-Operasional Lainnya	6.770.664
Jumlah beban non-operasional lainnya	<u>1.344.444.544</u>

**3. PENYAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Rincian penyapatan non-operasional lainnya terdiri dari:

	<u>31 Desember 2021</u>
Penyapatan Bagi Hasil Antar Kantor	1.073.049.896
Lainnya/Kehilangan Kas	428.840
Penyapatan Fee Nuisance	65.018.817
Penyapatan Fee Asuransi	15.367.259

**PT. BRIS MUSTAQIM ACEH (PERSEROAN)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE 1 SEPTEMBER 2021 SAMPA DENGAN 31 DESEMBER 2021**

**3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN  
3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

<b>aa. PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA - (lanjutan)</b>	
Rincian pendapatan non operasional lainnya adalah:	<u>31 Desember 2021</u>
Lain-lain	3.191.165
Pendapatan Pinjaman Bebas Laba	25.181.200
Lain-lain pendapatan non operasional lainnya	<u>1.481.827.050</u>
<b>ab. BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	
Laba sebelum pajak	1.279.376.440
Korupsi Tindak	
Laba Dana Pensiun Bebas Bank	126.010.130
Penghasilan Bunga dan Kartu Jaminan	450.100
Jumlah Pajak	403.750
Denda Kewajiban Lain-lain	3.920.800
Beban Lain-lain	22.038.284
Jumlah Korupsi Tindak	176.237.254
Laba setelah Koreksi Pajak	1.466.517.730
Hendaklah atas PKF yang mendapat insentif	
4.500.000.000 x 1%	45.000.000
1.291.527.560	<u>1.436.527.560</u>
TP Hendaklah atas PKF yang mendapat insentif	
(1.112.188.823 x 50%) x 22%	122.541.002
Hendaklah atas PKF selebihnya	
Pendapatan atas PKF selebihnya	
343.370.810 x 22%	75.541.562
	<u>151.065.290</u>
Hendaklah PKF di	-
Beban pajak penghasilan akhir	<u>197.885.220</u>

**ac. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA**

Peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut: Pada tanggal 15 Januari 2022 dan Direksi atas nama PT. Factor Aceh, 22 September 2021 dan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Syiah Kuala Bank Aceh Nomor 554216/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Terbatas Dana Tabung Haji Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroan), mengabdikan dan Pintra Zuhri, Kepala PT Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BRBS) Mustaqim Aceh (Perseroan) dan telah diangkat sebagai Direktur Utama dan menjabat.

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Informasi Umum Perseroan

Pendirian dan Informasi Lainnya

Pendirian PT BPR Syariah Mustaqim Sukamakmur (Perseroan) diawali dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha melalui surat Nomor 214/D BPR/MS/XXI/2018 pada tanggal 23 November 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-1249/03/2021 pada tanggal 19 Agustus 2021 dan Surat No. SR-28/PB.10/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang "Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Menjadi Bank Pembiayaan Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroan) dan melakukan izin perubahan kegiatan usaha disempatkan oleh Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur sampai dengan surat Nomor CE9/DIR/BPR/MS/VIII/2021 pada tanggal 2 Agustus 2021.

Kantor Pusat PT BPRS Mustaqim Sukamakmur (Perseroan) berkedudukan di Jalan Dr. Moud. Hasan No. 45, Kelurahan Bateh, Kecamatan Lueng Sala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (23245).

Pada tanggal 31 Desember 2021, PT BPRS Mustaqim Sukamakmur (Perseroan) memiliki 23 kantor sebanyak 23 (dua puluh empat) kantor terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional (KPN/O), 14 (empat belas) Kantor Pusat Operasional (KPO), Kantor Cabang dan 8 (delapan) Kantor Kas yang tersebar merata di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Kantor Cabang

- 1 Kantor Cabang Meuraxa : Jln. Sultan Iskandar Muda No. 4 Desa Pungo Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
- 2 Kantor Cabang Seulimum : Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Seunibok, Simpang Jarho Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar
- 3 Kantor Cabang Lhoknga : Jln. Banda Aceh - Medan KM 10,5 Gampong Kuar Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar
- 4 Kantor Cabang Meulaboh : J. Imam Bonjo Desa Duen Hambak, Kecamatan Ujan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
- 5 Kantor Cabang Kuala : J. Nasional Meulaboh T. Tuan Simpang Peul Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya
- 6 Kantor Cabang Seunagan : Jl. Arhanjy No. 58 Pasar Jombang Desa Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya
- 7 Kantor Cabang Blangpidie : Jln. Persada No. 106 Kuala Siboh Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya
- 8 Kantor Cabang Manggeng : Desa Keda, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya
- 9 Kantor Cabang Kluet Utara : J. T. Mourah Adam Kelurahan Simpang Empat Kota Hajar Keo Kluet Utara Kab. Aceh Selatan
- 10 Kantor Cabang Kulacane : Ln. Ahmad Yani No. 1 Kelurahan Kota Kulacane, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- 11 Kantor Cabang Blangkejeren : Jln. Soekarno Hatta No. 34 Kcc. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
- 12 Kantor Cabang Beureuneh : Jln. Banda Aceh-Medan Kota Beureuneh Kecamatan Mutaqin Kabupaten Pidie
- 13 Kantor Cabang Bireuen : Jln. Lingsar/G. Syekh Johan Alamsyah Kelurahan Kota Bireuen Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
- 14 Kantor Cabang Rimo : Jln. Iskandar Muda No. 22 Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

## PT BPRS MUSTAQIM ACEH (PERSEROAN)

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

---

#### 4. PENGUNGKAPAN LAINNYA - lanjutan

##### a. Informasi Umum Perseroan - lanjutan

###### Kantor Kas

1. Kantor Kas Darussaem	: Jln Nyak Ariel No. 12 Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
2. Kantor Kas Pulo Aceh	: Desa Lempuyang, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar
3. Kantor Kas Lempunohul	: Jln Soekarno Hatta No. 48 Desa Lempunohul Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
4. Kantor Kas Panyong	: Jl. RA Kartini No. 44 Kelurahan Panyong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh
5. Kantor Kas Teunom	: J. Banda Aceh - Meulaboh: Gampong Keude Teunom Kecamatan Teunom Aceh Jaya
6. Kantor Kas Kuala Balee	: Pasar Kuta Bahagya Kecamatan Kuala Balee, Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Kantor Kas Tapak Tuan	: Gampong Lihak Kutapang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan
8. Kantor Kas Lawe Desky	: Jln Kutacane - Medan Desa Karo Kec. Babu Mahmud Kabupaten Aceh Tenggara

###### Modal Saham

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pertama (RUPSP) PT BPRS Mustaqim Sukamakmur (Perseroan) Nomor: 05 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Teuku Iwanayah S.H. SpN, MKn modal dasar PT BPRS Mustaqim Sukamakmur (Perseroan) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 92,0005% (tiga puluh dua koma nol nol lima per seratus) atau sejumlah Rp184.001.000 (enam puluh empat juta seribu delapan puluh empat miliar satu juta rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya Rp 184.001.000.000,- (enam puluh empat miliar satu juta rupiah).

Susunan pemegang saham PT BPRS Mustaqim Sukamakmur (Perseroan) pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan pada Catatan 3.1 (halaman 10).

###### Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan PSP, Dewan Komisaris, Direksi, DPS PT BPRS Mustaqim Sukamakmur (Perseroan) pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah disetujui oleh OJK adalah sebagai berikut:

###### Pemegang Saham Pengendali

PSP : Pemerintah Provinsi Aceh

###### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Th. Azhari S.S. M.Si  
Komisaris : Ridha Zein

###### Direksi

Direktur Utama : Ny. Sri Hartati  
Direktur Operasional : Th. Fachrud Rizal

###### Dewan Pengawas Syariah:

Ketua DPS : Hsifa Furqan  
Anggota DPS : Muhammad Yasir Yusuf

Jumlah karyawan PT BPRS Mustaqim Sukamakmur (Perseroan) pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 137 orang (2019: 153 Orang).

##### b. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang disusun dan diformasi pada tanggal 29 Maret 2022.

**PT BPRS MJS TAQIMAGEH (PERSHODAN)**  
**KUALITAS ALIWA PRODUKTIF**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 SEPTEMBER 2021**

Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan bank adalah dana yang tersedia untuk pembiayaan kualitas produk keuangan. Berdasarkan data laporan keuangan Bank MJS Taqimagedh (Pershoda) sebagai berikut:

**31 DESEMBER 2021**

No	Keterangan	Lancar (Rp)	Dalam Perhatian Khusus (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Musur (Rp)	Jumlah (Rp)
	<b>Perhitungan Aliwa Produk dan Risiko GP</b>						
A	Salah Risiko GP						
1	Perumahan	65.120.478.000	1.651.129.079,00	612.061.199,00	517.028.078,00	1.007.219.810,00	1.137.130.735,00
2	Suapukal Remaja						
3	Perumahan Jember 2000	20.715.000,000					20.715.000,000
4	Perumahan Jember 2000	146.675.570,000	3.561.162,000	112.162,000	519.238,000	1.007.219,000	147.170.000,000
5	Perumahan Bussu Kertawati						
6	Perumahan Jember 2000			450.410,000	300.000,000	1.007.219,000	1.757.629,000
7	Perumahan Jember 2000						
8	Perumahan Jember 2000						
	<b>Perhitungan Aliwa Risiko RPAP</b>						
A	Salah Risiko RPAP						
B	Perumahan Jember 2000						
1	Perumahan Jember 2000	146.647.508,000	3.561.162,000	112.162,000	519.238,000	1.007.219,000	147.170.000,000
2	Perumahan Jember 2000	1.000	1.000	100	500	1.000	1.000
3	Perumahan Jember 2000	1.000.000,000	25.000,000	51.200,000	277.000,000	1.007.219,000	1.000.000,000
4	Perumahan Jember 2000						
5	Perumahan Jember 2000						
6	Perumahan Jember 2000						
7	Perumahan Jember 2000						
8	Perumahan Jember 2000						
	<b>Jumlah</b>		<b>5.122.321,000</b>	<b>724.263,000</b>	<b>796.246,000</b>		<b>6.645.930,000</b>
	<b>Perhitungan Aliwa Risiko RPAP</b>						
1	Perumahan Jember 2000						
2	Perumahan Jember 2000						
3	Perumahan Jember 2000						
4	Perumahan Jember 2000						
5	Perumahan Jember 2000						
6	Perumahan Jember 2000						
7	Perumahan Jember 2000						
8	Perumahan Jember 2000						
	<b>Jumlah</b>						

Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan bank adalah dana yang tersedia untuk pembiayaan kualitas produk keuangan. Berdasarkan data laporan keuangan Bank MJS Taqimagedh (Pershoda) sebagai berikut:

**PT BPRS MUSTAG MADH (PERSEROGA)**  
**KLALITAS AKTIVA PRODUKTIF**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 1 SEPTEMBER 2021**

Di buat oleh tim audit yang beranggotakan oleh bapak/ibu tim audit yang dibenarkan oleh timungan kualitas Aktiva Produktif (GAR) Resiko Audit Tim Audit dan tim audit yang telah diberikan PRAP/AL sebagai berikut:

**1 SEPTEMBER 2021**

No	Keterangan	Lebih (Rp)	Dalam Perkiraan Khusus (Rp)	Kurang Lebih (Rp)	Di-nyatakan (Rp)	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Perhitungan Aktiva Produktif						
A	Modal Tetap						
1	Peralatan	60.381.050.000	60.381.050.000	60.381.050.000	60.381.050.000	60.381.050.000	60.381.050.000
2	Peralatan, alat, Software						
3	Pembelian dan Biaya	25.111.237.500					
4	Perbaikan dan P.2021	24.328.038.415	62.540.897.915	38.212.847.500	38.212.847.500	38.212.847.500	38.212.847.500
B	Reservasi Biaya Modal	1.000.000.000	9.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
C	Saldo Aktiva Produktif yang			349.770.499	349.770.499	349.770.499	349.770.499
D	Saldo Aktiva Produktif yang			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
E	Perhitungan Modal Tetap						
F	Modal Tetap						
G	Saldo Aktiva Produktif	24.328.038.415	7.016.438.977	17.311.599.438	17.311.599.438	17.311.599.438	17.311.599.438
H	Saldo Aktiva Produktif	1.000.000.000	9.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
I	Saldo Aktiva Produktif	62.540.897.915	62.540.897.915	62.540.897.915	62.540.897.915	62.540.897.915	62.540.897.915
J	Saldo Aktiva Produktif						
K	Saldo Aktiva Produktif						
L	Saldo Aktiva Produktif						
M	Saldo Aktiva Produktif						
N	Saldo Aktiva Produktif						
O	Saldo Aktiva Produktif						
P	Saldo Aktiva Produktif						
Q	Saldo Aktiva Produktif						
R	Saldo Aktiva Produktif						
S	Saldo Aktiva Produktif						
T	Saldo Aktiva Produktif						
U	Saldo Aktiva Produktif						
V	Saldo Aktiva Produktif						
W	Saldo Aktiva Produktif						
X	Saldo Aktiva Produktif						
Y	Saldo Aktiva Produktif						
Z	Saldo Aktiva Produktif						



Lampiran 3

PT. BAKS MUSTAGIM ACEH (PERSEROJA)  
 KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (RPMAM)  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 SEPTEMBER 2021

Komponen Permodalan	31 DESEMBER 2021		Yang Diperhitungkan %	01 September 2021	
	Jumlah Tiap Komponen (Rp)	Jumlah (Rp)		Jumlah Tiap Komponen (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1. Modal Inti:</b>					
1.1 Modal Inti Utama					
1.1.1 Modal dasar	36.301.000.000	36.301.000.000	100%	66.001.000.000	66.001.000.000
1.1.2 Cadangan tambahan modal					
1.1.2.1 Agri Idisagro	45.000.000	45.000.000	100%		44.599.996
1.1.2.2 Dana Setoran Modal - Ekuitas			100%		
1.1.2.3 Tambahan Jumlah		0	100%		
1.1.2.4 Cadangan Luper			100%		
1.1.2.5 Lupa Rong: tak-lahur uli			100%		
1.1.2.7 Lupa laba - berupa: sekuritar (Malam dan besara) yang Psh akan diupayakan melalui sebuah dikurangi sekuritaran PPAF		0	100% (selanjutnya 50% apabila laba dan 100% apabila rugi)		
1.1.2.7.1 Laba (Rugi) tahun berjalan	1.061.460.726	1.061.460.726			
1.1.2.7.2 Keuntungan Pembentukan (Rugi)	827.594.262	827.594.262			
1.1.2.7.3 Taksiun yang Psh	(197.965.220)	1.97.965.220			
1.1.2.8 Pajak Langgitan			100%		
1.1.2.9 Goodwill			100%		
1.1.2.10 SYDA biaya sewa dan/atau bangunan					
1.1.2.10.1 Melainkan jika waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai kembali pada laporan posisi keuangan berikutnya			50%		
1.1.2.10.2 Melainkan jangka waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai kembali pada laporan posisi keuangan berikutnya			75%		
1.1.2.10.3 Melainkan angka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai kembali pada laporan posisi keuangan RPA berikutnya	307.466.350	307.466.350	100%	297.466.000	297.466.000

4. Dikawatirkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 September 2021, PT. BAKS MUSTAGIM ACEH (PERSEROJA) telah melaksanakan kewajiban modal minimum (RPMAM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**PT PRIS MUSTAQIM AGRI (PERSI RUMAH)**  
**KEMAJUAN PENYEDIAAN MODAL TAPILUM (KPMUM)**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 1 SEPTEMBER 2021**

1.1.11 AYDA (bagi pelaksanaan rencana dan pengembangannya)					
1.1.11.1 Melampai angka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengalihan sebesar 50% tercatat pada laporan posisi keuangan PER 21			50%		
1.1.11.2 Melampai angka waktu 2 tahun sejak pengalihan sebesar 100% tercatat pada laporan posisi keuangan PER 21			100%		
1.1.3 Jumlah Modal Indri Utama		67.949.605.350			67.949.627.900
1.2 Modal Int Tambahan		67.949.605.350			67.949.627.900
1.3 Jumlah Modal Intri (1.1.3 + 1.2)					
2. Modal Pelengkap					
2.1 Komponen modal yang mencantumkan persyaratan tertentu					
2.2 Keuntungan revaluasasi aset tetap					
2.3 PP&P Umum					
2.4 Jumlah Modal Pelengkap (2.1 + 2.2 + 2.3)					
3. Jumlah Modal (1.3 + 2.4)		67.949.605.350			67.949.627.900
Jumlah ATMR sebelum persentase lebih PP&P Umum					
Selisih lebih PP&P umum yang wajib dihitung dan dikalikan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan sebagai modal pendanaan ATMR				22.309.774.664	
Rasio KPMUM (CAR) = (Jumlah Modal - ATMR) X 100%			246,01%		303,05%
Jumlah ekuitas modal untuk mencapai rasio KPMUM sebesar 246,01% atau ATMR 246	2.314.545.387	6.463.616.953		3.632.472.982	6.463.616.953
Rasio Modal Intri - (Jumlah Modal Intri - ATMR) X 60%			246,01%		303,05%
jumlah ekuitas modal untuk mencapai rasio modal intri sebesar 246,01% dan ATMR 246	2.305.636.926			1.784.711.113	6.463.616.953

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (PERSEROA)**  
**FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)**  
**TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 September 2021 (Rp)
<b>DANA YANG DITERIMA</b>		
1 Simpanan Pihak Ketiga		
a. Tabungan	34.094.188.760	31.032.353.566
b. Deposito	51.561.162.344	44.081.662.344
2 Bank Indonesia	-	-
3 Antar Bank Pasiva lebih dari 3 bulan		
a. Pinjaman diterima bukan dari bank	-	-
b. Deposito dan pinjaman dari bank	3.450.000.000	3.450.000.000
4 Modal Pinjaman	-	-
5 Modal lain	67.849.005.050	67.616.507.600
<b>JUMLAH DANA YANG DITERIMA</b>	<b>167.054.956.454</b>	<b>146.190.544.700</b>
<b>KREDIT</b>		
Borang Murabahah	75.551.843.852	81.281.939.461
Pembiayaan Masyarakat	4.362.722.221	-
<b>JUMLAH KREDIT</b>	<b>80.914.566.073</b>	<b>81.281.939.461</b>
<b>FDR</b>	<b>48,43%</b>	<b>55,60%</b>

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (PERSERODA)**  
**PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI (BOPO)**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 1 SEPTEMBER 2021**

	31 Desember 2021 <u>(Rp)</u>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
Pendapatan bagi hasil	
Pendapatan bagi hasil	1.070.377.952
Jumlah pendapatan bagi hasil	<u>1.070.377.952</u>
Pendapatan operasional lainnya	305.775.384
Jumlah pendapatan operasional	<u>1.436.153.336</u>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban lainnya	
Beban Tenaga Kerja	3.334.103.300
Beban Administrasi dan Umum	873.676.481
Beban Penyisihan dan Penghapusan	82.564.103
Beban Operasional Lainnya	<u>952.893.733</u>
Jumlah beban operasional	<u>5.143.039.619</u>
<b>Rasio Efisiensi: (Beban operasional/Pendapatan operasional)</b>	<u><u>358,11%</u></u>

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (PERSEROA)**  
**PERHITUNGAN RETURN ON ASSETS**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 1 SEPTEMBER 2021**

	31 Desember 2021 (Rp)
<b>TOTAL ASET</b>	
Ekuitas	
September	150.641.398.145
1 Desember	171.553.389.742
Jumlah	<u>321.594.787.887</u>
Rata-rata aset	<u>150.797.393.943</u>
Laba bersih sebelum pajak penghasilan	<u>1.279.375.449</u>
<i>Return on Asset (laba sebelum pajak/rata-rata aset)</i>	<u>0,80%</u>

**PT BPRS MUSTAQIM ACEH (PERSERODA)**  
**PERKITUNGAN CASH RATIO**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 1 SEPTEMBER 2021**

	31 Desember 2021 <u>(Rp)</u>	1 September 2021 <u>(Rp)</u>
<b>ALAT LIKUID</b>		
a. Kas	1.972.483.000	1.585.101.500
b. Penempatan pada bank lain		
Giro	4.741.737.726	2.455.087.505
Salah Tabungan antar bank		
- Tabungan pada bank lain	1.723.509.832	1.872.119.895
- Tabungan antar bank lain		
Jumlah	<u>8.437.817.586</u>	<u>5.932.336.004</u>
<b>HUTANG LANCAR</b>		
a. Kewajiban segera	1.980.872.619	1.590.402.803
b. Simpanan pihak ketiga		
- Tabungan pihak ketiga	34.034.125.780	31.032.353.956
- Deposito berjangka pihak ketiga	61.551.167.344	44.082.882.344
Jumlah	<u>27.566.023.953</u>	<u>76.712.419.103</u>
<b>Cash Ratio (Alat likuid/Hutang lancar)</b>	<u><b>30,67%</b></u>	<u><b>7,76%</b></u>

**PT. PEMBANGUNAN ACEH**

**Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud  
Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh**

**LAPORAN KEUANGAN**

**31 Desember 2021 dan 2020**

**Beserta Laporan Auditor Independen**



**PEMA**

PT. PEMBANGUNAN ACEH

# Laporan Keuangan

Per 31 Desember 2021 dan 2020

*Sustainable Development For A Better Aceh*

Rumoh Budeya Jl. Tgk. H.  
Mohd. Daud Reureueh, Kec.  
Kuta Alam, Kota Banda Aceh

(0651) 7317090

admin@pema.co.id



**PEMA**

**PT. PEMBANGUNAN ACEH**

Perusahaan Terbuka Tbk. dan Anak Perusahaan  
Jl. Garuda II No. 11 Medan Sungkembah Kec. Bukit Darul, Kota Medan, Sumatera Utara 20137 - 4274

Tel. : 061 711 2601

Fax : 061 711 2601

Email : [info@pema.co.id](mailto:info@pema.co.id)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**  
**JENIANG**  
**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA JANGGAL 31 DESEMBER 2021**  
**PT. PEMBANGUNAN ACEH (PEMA)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ir. Drs. Zubir Sahlim, MM

Jabatan : Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh

Menyatakan :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan PT. Pembangunan Aceh telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengabaikan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT. Pembangunan Aceh.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BANDA ACEH, 06 April 2022**

PT. Pembangunan Aceh (PEMA)

  
MATERAI  
TEMPIL  
STAMP  
SUDALAKTERRANSIN

(Ir. Drs. Zubir Sahlim, MM)  
Direktur Utama



# JOHANNES JUARA & REKAN

Registered Public Accountants

Kawasan Niaga Citra Garden  
Blok AS/3

Jl Djamin Ginting  
Medan, 20156

Phone : +62 (61) 8443884

Email : [zkrncahman55@gmail.com](mailto:zkrncahman55@gmail.com)

## Laporan Auditor Independen

No: 0008/3.0368/AU.210210094-311ANV/2022

Kepada Yth,

Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam,  
Kota Banda Aceh

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Pembangunan Aceh terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketuntuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan tujuan untuk menyatakan opini atas

# JOHANNES JUARA & REKAN

Registered Public Accountants

keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audi kami.

## *Opini*

Menurut opini kami, laporan keuangan telampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT. Pembangunan Aceh** tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**KAP JOHANNES JUARA & REKAN**

  
**Drs. Zaki Salmadin, Ak. CPA**  
**NIAP. 8084**

Medan, 05 April 2022



**PEMA**

**PT. PEMBANGUNAN ACEH**

Raunan Bando, Jl. No. 14, Ward Daud Bando, Sar. Kung dan, Kota Banda Aceh, 21121 Aceh

Telp 0651 21 2282

Fax

www.pemab.com

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

**DAFTAR ISI**

Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
	<b>Halaman</b>
Laporan Neraca	1
Laporan Laba/Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 21



LAPORAN NERACA  
PER 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020

	Catatan	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setoran Kas	20, 4      64.427.300,392	1.698.405.503
Persediaan	5            878.990,000	878.990,000
Piutang Karyawan	20, 5      154.402,000	153.850,000
Piutang Usaha	20, 6      10.897.533,234	258.570,679
Pajak Dibayar Dimuka	6            7.148.143,2	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>76.867.715,107</b>	<b>3.015.762,181</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
<b>Penyertaan Modal</b>	7	
- Penyertaan pada PT Sarora Aceh Ventura	24.200,000	24.200,000
- Penyertaan pada PT. Patrol Nusantara Aceh	5.963.000,000	5.963.000,000
- Penyertaan pada PT. Geothermal Energi Seiutawah	25.000,000	25.000,000
- PT. Perma Jaminata Servis	36.400,000	36.400,000
- PT. Perma Petrogas Lhokseumawe	182.500,000	192.500,000
- PT. Perma Petrogas Ma'eka	22.500,000	22.500,000
- PT. Perma Global Energi	12.750,000	24.750,000
- PT. Kawasari Industri Aceh	24.750,000	-
<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>6.271.100,000</b>	<b>6.258.350,000</b>
<b>Aset Lainnya:</b>	8	
- Aset Lainnya	869.207,194	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>869.207,194</b>	-
<b>Investasi dalam Pengembangan:</b>	8	
- Investasi Didung Industri dan Perdagangan	7.451.302,579	1.261.825,513
- Investasi Bidang Migas dan Pertambangan	62.788,000	32.728,081
<b>Jumlah Investasi dalam Pengembangan</b>	<b>1.514.068,578</b>	<b>1.583.953,594</b>
<i>Asal tetap dan Renovasi Kantor - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020</i>	24, 10	
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	630.140,789	748.954,524
<b>Jumlah Aset</b>	<b>9.132.515,961</b>	<b>6.588.858,118</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>86.000.231,068</b>	<b>11.604.820,298</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Menupakan Bagian Tidak Terpisahkan  
Dan Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



**LAPORAN NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021**  
**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

	Catatan	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Lancar</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	2c.10	536.870.000	361.537.000
Utang Gaji	2c.11	275.800.270	179.350.000
Utang SPPD	2c.12	5.470.000	-
Utang Pajak	12	3.971.436.385	42.373.375
<b>Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>		<b>4.787.176.656</b>	<b>602.259.375</b>
<b>Liabilitas Tidak Lancar</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	2c.10	12.077.814.815	8.138.333.333
<b>Jumlah Liabilitas Lancar</b>		<b>13.077.814.815</b>	<b>8.138.333.333</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>			
		<b>17.864.991.471</b>	<b>8.740.592.708</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Modal</b>			
Modal Disetor	2e.13	75.000.000.000	3.582.800.000
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>25.000.000.000</b>	<b>3.582.800.000</b>
<b>Labra Rugi Tahun Lalu</b>			
Labra Rugi Tahun Berjalan (Per 31 Desember 2021)	13	(194.628.986)	1.828.533.986
<b>Jumlah Saldo Labra</b>		<b>43.351.988.553</b>	<b>(2.527.408.398)</b>
<b>Jumlah Saldo Labra</b>			
		<b>43.135.239.597</b>	<b>(698.772.410)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>			
		<b>68.135.239.597</b>	<b>2.964.027.590</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
		<b>86.000.231.068</b>	<b>11.604.620.298</b>

Lampiran atas Laporan Keuangan Merupakan Rangkai Tidak Terpisahkan  
 Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**PER 31 DESEMBER 2021**  
**DENGAN ANGGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

	Catatan	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>Pendapatan</b>	21.18	
Pendapatan Usaha	489.898.899	216.666.667
Pendapatan Lainnya	51.578.718.462	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<u>52.068.607.351</u>	<u>216.666.667</u>
<b>Beban Ahli Kelola WK B</b>	29.20	
Beban Ahli Kelola WK B	742.902.295	-
<b>Jumlah Beban Ahli Kelola WK B</b>	<u>742.902.295</u>	-
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>	29.19	
Beban Sekelompok	70.124.894	42.577.250
Beban Personalia	2.690.584.931	1.975.822.694
Gedun Perjalanan Dinas	316.340.520	41.348.781
Beban Kemarahan	278.194.500	234.250.000
Beban Umum	499.703.800	278.094.349
Beban Bunga Utang	178.890.000	178.890.000
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<u>4.023.838.635</u>	<u>2.760.971.054</u>
<b>Jumlah Beban</b>	<u>4.796.740.930</u>	<u>2.760.971.054</u>
<b>LABA-RUGI USAHA</b>	<u>47.298.866.421</u>	<u>(2.534.304.387)</u>
<b>Pendapatan dan (Beban Lain - lain)</b>	22	
Pendapatan Jasa Bank	25.537.352	7.835.232
Beban Lain-lain	39.823.489	937.243
<b>Jumlah Pendapatan dan (Beban Lain - lain)</b>	<u>(14.286.137)</u>	<u>6.897.989</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<u>47.284.580.304</u>	<u>(2.527.406.398)</u>
<b>(Beban) Pajak</b>		
Pajak Kini	3.964.713.751	-
<b>Jumlah Manfaat (Beban) Pajak</b>	<u>3.964.713.751</u>	-
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>	<u>43.319.866.553</u>	<u>(2.527.406.398)</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan  
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

**PEMA****PT. PEMBANGUNAN ACEH**

Perusahaan Terbuka di Atas Nama M. Mohd. Daud Berastana Km. Kete Kaya, Kota Banda Aceh 22131 Aceh

NIB : 0431141780

Email : admin@pema.co.id

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

Keterangan	Modal			Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
	Modal Disetor	Tambahan Modal disetor	Modal Donasi		
<b>Saldo per 01 Januari 2020</b>	<b>3.562.800.000</b>	-	-	-	<b>3.562.800.000</b>
Tambahan Modal	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Per 31 Desember 2019	-	-	-	1.828.633.988	1.828.633.988
Laba (Rugi) Per 31 Desember 2020	-	-	-	(2.527.406.398)	(2.527.406.398)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>3.562.800.000</b>	-	-	<b>(698.772.410)</b>	<b>2.864.027.590</b>
Tambahan Modal	-	21.437.200.000	-	-	21.437.200.000
Koreksi Laba (Rugi)	-	-	-	-	-
- Koreksi Tambahan Modal	-	-	-	-	-
- Koreksi Laba (Rugi)	-	-	-	514.145.454	514.145.454
Laba (Rugi) Tahun 2021	-	-	-	43.319.866.553	43.319.866.553
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>3.562.800.000</b>	<b>21.437.200.000</b>	-	<b>43.135.239.597</b>	<b>68.135.239.597</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan  
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*



**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK PERODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Labas (Rugi)	43.319.869.653
Penubatan modal Kerja	
Persediaan	
Pulang Karyawan	(552.000)
Pulang Usaha	(10.401.018.556)
Pajak Dibayar Dimuka	(7.1481.482)
Utang SPPD	3.470.030
Utang Pajak	3.929.057.011
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>36.139.343.526</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penyertaan Modal	(12.750.000)
Investasi dalam Pengembangan	69.485.016
Asal tetap	58.814.385
Asal lainnya	(569.207.194)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi</b>	<b>(543.657.843)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Modal	21.437.200.000
Koreksi saldo laba	514.145.454
Utang Kepada Pihak ketiga	5.191.871.762
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>27.143.217.207</b>
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	<b>62.736.902.889</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>1.688.406.603</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>64.427.308.392</b>

Untuk Catatan atas Laporan Keuangan Menunjukkan Bagian Tidak Terpisahkan  
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020

1. Umum

a. Panduan dan Informasi Umum

Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Perseroan) didirikan berdasarkan Undang-Undang Daerah Aceh (Sjilwewa Aceh No. 15 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 dan telah diubah pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh (Perseroan) No. 06 tanggal 05 April 2019, Akta Perubahan No. 24 tanggal 14 Oktober 2019, Akta Perubahan No. 35 tanggal 18 Oktober 2019 dan Akta Perubahan No. 30 tanggal 28 November 2019 dengan Notaris Cut Era Fitriyeni SH, MKn serta telah mendapat pengesahan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AH-U.031.01.03-04800319 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pembangunan Aceh

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Aceh disebutkan bahwa maksud dan tujuan PT. Pembangunan Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Aceh serta mengembangkan perekonomian Aceh Tujuan Perseroan adalah

1. Meningkatkan produksi perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk
2. Meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
3. Memperluas wilayah dan produk perusahaan;
4. Meningkatkan keuntungan yang optimal berdasarkan gura meningkatkan Pendapatan Asli Aceh;
5. Memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh lebih efisien efektif dan produktif;
6. Turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Aceh; dan
7. Mendukung percepatan investasi dan memperoleh lapangan kerja.

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan Anggaran Dasar

1. Pengawasan listrik, uap/air panas dan udara dingin;
2. Perencanaan dan Penggalian;
3. Perdagangan besar dan eceran;
4. Industri pengolahan;
5. Konstruksi;
6. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
7. Real estate;
8. Pengangkutan dan pergudangan; dan
9. Kesenian, hiburan dan rekreasi.

c. Model Perusahaan Daerah

Sesuai yang tercantum pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh (Perseroan) No. 06 tanggal 05 April 2019, Akta Perubahan No. 24 tanggal 14 Oktober 2019, Akta Perubahan No. 35 tanggal 18 Oktober 2019 dan Akta Perubahan No. 39 tanggal 28 November 2019 oleh Notaris Cut Era Fitriyeni SH, MKn secara telah mendapat pengesahan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AH-U.03-04800319 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perdan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pembangunan Aceh yaitu Rp. 3.562.800.000,-

- Tahun 2021 Model Dasar
- Tambahan Modal Disetor Tahun 2021

3.562.800.000  
21.437.200.000  
24.999.000.000

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh periode tahun 2021, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2021)

- Komisaris Utama : Muhammad Sulaiman, SE, MSW
- Komisaris : T. Ahmad Dadek, SH, MH
- : Aminulhikmah SE, MAK



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

Lanjutan

d Struktur Organisasi

2. Direksi (Per 31 Desember 2021)

- Direktur Utama : Ir. Drs. Zubir Sahm, MM
- Direktur Urusan dan Keuangan : Muhammad Oky
- Direktur Industri, dan Perdagangan : Fajar Salim

· Direktur Migas dan Perlebangan

: Hasbullah

3. Manajer (Per 31 Desember 2021)

- Urusan dan SDM : Mukti Prys
- Keuangan
- Migas dan Perlebangan
- Industri dan Perdagangan

4. Staf (Per 31 Desember 2021)

Keuangan

- Devi Darmadi
- Riski Maulana
- Fauzyl Ammar
- Syella Fardisa
- Wulan Chierama
- Muktiqin
- Rahmat Setuara
- Muhammad Mulla
- Dalqis Farsura
- M. Sunendra Rizki
- Putra Nusanlara
- Rachmad Lubis

· Industri dan Perdagangan

- Anif Ihsan
- Aulia Iwana Sathadi
- Mahzer
- Firdaus Azhar
- Odha Vadhilah
- Pance Tri Purwadani

· Migas dan Perlebangan

- Wulcan Puris
- Nafel Kaula
- Saifulna Usama Akbel Nasron
- Fikri Mahdi
- Muhammad Iqbal Faresi
- Teuku Muhammad Iqbal
- Nurmasyitali
- Ikhsan Filiswan Fonna Lajusa
- Ousair Andrian
- Ihsain
- Nur Adila
- M. Jarrir
- Rizki Novelia
- Munazir
- Murnatiah
- Basul
- Farrell Rizky

· Humas Sick B

· Humas KIA Ledsong



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

Lanjutan

4. Staf Per 31 Desember 2021

- Tenaga Pendukung : Dermawan A. Razab  
Muhammad Fauzan Nur  
Irwani

- Saluran :  
Pengawasan Rahmat Saleh  
Internal

**2. Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT Perbangunan Aceh yang mempengaruhi penentuan dan hasil usahanya adalah sebagai berikut :

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Perusahaan belum melakukan konsolidasi atas laporan keuangan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut standar ini, laporan keuangan harus dikonsolidasikan apabila kepemilikan entitas induk lebih dari 50% dan atau terdapat kemampuan signifikan untuk melakukan control atas manajemen entitas anak.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas perusahaan dalam aktifitas operasi, investasi dan pendanaan.

**b. Kas dan Setara Kas**

Perusahaan mengklasifikasikan saldo bank dan deposito berangka serta investasi jangka pendek lainnya dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal investasi atau pembelian dan tidak digunakan sebagai jaminan atas piyaman dan utang lainnya diklasifikasikan sebagai "setara kas".

**c. Piutang dan Utang**

Piutang dan utang dinyatakan dengan nilai nominalnya. Perusahaan tidak memcadangkan piutang ragu-ragu.

**d. Aset Tetap**

Aset tetap, kecuali tanah, dikukukan berdasarkan harga perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk perbaikan, dan penggantian yang dapat meningkatkan daya guna aset tetap dan jumlahnya signifikan.

Tarif penyusutan aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

- Kendaraan 10%
- Peralatan dan Mesin 20%
- Inventaris 20%
- Renovasi Kantor 20%

Tak alias tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan

**e. Modal**

Modal terdiri dari modal ditempatkan.

**f. Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan (akumulasi basis).

**g. Beban**

Beban diakui pada saat terjadinya kewajiban dan atau saat penggunaan/pemertasaan aset.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>3. Kas dan Setra Kas</b>		
Kas dan setra kas merupakan saldo uang tunai yang ada pada pengelompokan perusahaan (Kasir), serta kasirana yang diambil oleh Eks. Direktur Utama Eks. Direktur Industri dan Perdagangan dan Eks. Anggota Badan Pengawas serta saldo Bank yang ada pada Bank Bank Syariah Indonesia Periode 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu :		
- Kas Pada Kasir	-	-
- Kas PDPA pada Muhsin, SE, MM (Eks. Direktur Utama)	-	80.797.000
- Dana Pada Muhsin SE, MM (Antiklim dana dari Triangle Pabe Inc dan Bank BNI)	-	542.010.194
- Kas PDPA pada Machd Y Y Djuw (Eks. Direktur Industri dan Pedagangsn)	-	4.400.000
- Kas PDPA pada Adnyansyah (Eks. Anggota Badan Pengawas)	-	23.500.000
- Bank Aceh Syariah	44.474.180.806	832.167.514
- Bank Syariah Indonesia - USD Account	19.659.354.897	-
- Bank Syariah Indonesia	293.772.689	168.530.695
<b>Jumlah Kas dan Setra Kas</b>	<b>64.427.308.392</b>	<b>1.888.405.503</b>

**Kas PDPA pada Adnyansyah (Eks. Anggota Badan Pengawas)**

Kas sebesar Rp. 23.500.000,- nihil per posisi 31 Desember 2021 dikarenakan yang bersangkutan telah menyelesaikan pembayarannya via transfer (Bank) ke rekening Bank Aceh PT PEMA

**Kas PDPA pada Machd Y Y Djuw (Eks. Direktur Industri dan Perdagangan)**

Kas sebesar Rp. 38.400.000,- nihil per posisi 31 Desember 2021 dan sebelumnya Rp. 41.400.000,- dikarenakan yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban via transfer (Bank) ke rekening Bank Aceh PT PEMA sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 30 Maret 2021 dan per 31 Desember 2021 sesuai keputusan Direksi PT PEMA bahwa pemindahan pengakuan pencatatan dari Aset Lancar kepada Aset Lainnya

**Kas PDPA pada Muhsin, SE, MM (Eks. Direktur Utama)**

Kas sebesar Rp. 80.797.000,- nihil per posisi 31 Desember 2021 dan sebelumnya Rp. 80.797.000,- dikarenakan per 31 Desember 2021 sesuai keputusan Direksi PT PEMA bahwa pemindahan pengakuan pencatatan dari Aset Lancar kepada Aset Lainnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020

- Lanjutan
1. Kas dan Setoran Kas
- Dana pada Muhsin SE, MA (ambilkan dana dari Triangle Pase Inc dan Bank BTU)

Kas sebesar Rp. 642.010.194,- nilai per posisi 31 Desember 2021 dan sebelumnya Rp. 542.040.184,- ditambahkan per 31 Desember 2021 sesuai Keputusan Direksi PT PEMA bahwa peninjauan pengakuan pencatatan dari Aset Lancar sebada Aset Lainnya.

Kas dan Setoran Kas (Bank Syariah - USD Account)

Saldo per 31 Desember 2021 \$ 1.377.706,93, berdasarkan hasil konversi nilai kurs rata-rata uang USD ke IDR dengan rate Jisdey BI Rp. 14.289

4. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan tanah yang ada di Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh seluas 7.346 M<sup>2</sup> dan 2.018 M<sup>2</sup>. Tanah ini telah dijabarkan sebagai objek bisnis bangun bagi pembangunan rumah sejak awal Juni tahun 2017 oleh Muhsin SE, MA (Eks. Direktur Utama PDPA) dan sampai tanggal 30 September 2020 sudah terjual 5 Unit dengan Total Nilai Rp 1.611.000.000,-. Sampai dengan saat ini masih terdapat sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp. 876.990.000,-. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

- Rumah Pango Raya (Status sudah terjual)
- Rumah Pango Raya (I. Acoran KUPP No.161, SHM No. 02641 dan Luas 150 m<sup>2</sup>)
- Rumah Pango Raya (Laporan KUPP No.162, SHM No. 02843 dan Luas 131 m<sup>2</sup>)
- Jumlah Persediaan

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
	444.295.000	444.295.000
	432.695.000	432.695.000
	876.990.000	876.990.000

5. Piutang Karyawan

Piutang Karyawan merupakan akumulasi piutang karyawan sejak tahun 2006 sampai Per 31 Desember 2019 dan 08 April 2019 berdasarkan SK GUB No. 876/255/2001 dan SK GUB No 180/794/2016 adalah sebagai berikut :

- Piutang Anggota Badan Perawas
- Piutang Dirkei
- Piutang Karyawan
- Jumlah Piutang Karyawan

	80.000.000	80.000.000
	66.402.500	65.050.000
	8.000.000	9.000.000
	154.402.000	153.850.000



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

**Lampiran**

**5. Piutang Karyawan**

- Piutang Direksi
- Disposisi: Direktur Utama dan Direktur Keuangan tanggal 02 Februari 2020.
- Piutang Direksi sebesar Rp. 552.000,-. Terbukti karena adanya pinjeman pribadi (untuk biaya pembelian dan kuliah); Direktur Minas dan Perencanaan sebesar Rp. 40.000.000,-.
- Piutang jangka pendek tersebut direalisasikan sejak tanggal 08 Februari 2021 dan akan jatuh tempo di bulan Februari tahun 2022. Pembayaran dilakukan dengan cara langsung selama dua belas bulan melalui skema pemotongan gaji setiap bulannya.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Usaha Periode 31 Desember 2021 dan Piutang BPNM	30.000.000	30.000.000
- Piutang PT Palind Nusanlara Aceh	266.516.678	266.516.678
- Piutang PT Pema Global Energy	10.401.016.556	-
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>10.897.533.234</b>	<b>296.516.678</b>

Piutang Usaha pada Periode 31 Desember 2020 meningkat menjadi Rp. 296.516.678,-.

- Penyalurannya adalah sebagai berikut
- Piutang PT. Palind Nusanlara Aceh

Piutang PT Palind Nusanlara Aceh meningkat sebesar Rp. 106.932.789,-. Karena adanya pembayaran berupa sarana Tiket dan Hotel Travel perjalanan dinas sebesar Rp. 6.932.755,- kepada Direktur Utama PT. Palind Nusanlara Aceh (Pak Marzuki Daham) dan sekoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- ke Rekening PT. Palind Nusanlara Aceh yang diselujui oleh Komisaris PEMA.

- Piutang PT. Pema Global Energi
- Piutang PT. Pema Global Energi meningkat sebesar Rp. 10.401.016.556,-. Karena adanya pencapaian Dividen interim masa Oktober - Desember 2021 yang masih belum diterima oleh PT PEMA.

**7. Biaya Dibayar Dimuka**

Saldo Biaya Dibayar Dimuka Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah:

- Biaya Dibayar Dimuka**
- PPh Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah Air
  - PPh Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah K/L
  - Jumlah Aset Lainnya

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Biaya Dibayar Dimuka	688.000.000	-
- PPh Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah Air	23.481.482	-
- PPh Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah K/L	711.487.482	-
- Jumlah Aset Lainnya	-	-



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
<b>8. Penyertaan Modal</b>		
Penyertaan dicair sebesar r/la, penyektirin awal (cost method), Saldo Periode 31 Desember 2021 dan Periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:		
- PT. Sarana Aceh Ventura	24.200.000	24.200.000
- PT. Patrida Nusantara Aceh	5.963.000.000	5.963.000.000
- PT. Geothermal Energi Sawawah	25.000.000	25.000.000
- PT. Pema Jannata Servis	36.400.000	36.400.000
- PT. Pema Petrogas Lhokseumawe	162.500.000	162.500.000
- PT. Pema Petrogas Malaka	22.500.000	22.500.000
- PT. Pema Global Energi	12.750.000	24.750.000
- PT. Kawasan Industri Aceh	24.750.000	
<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>8.271.100.000</b>	<b>6.298.350.000</b>

- **Penyertaan Modal pada PT. Pema Jannata Servis**  
Penyertaan Modal pada PT. Pema Jannata Servis merupakan Seloran Modal PEMA pada anak usaha PEMA yang bergerak di bidang Outsourcing dan Jasa Lainnya, dalam hal ini PEMA bekerjasama dengan PT. Jannata Group Indonesia.

- **Penyertaan Modal pada PT. Pema Petrogas Lhokseumawe**  
Penyertaan Modal pada PT. Pema Petrogas Lhokseumawe merupakan Seloran Modal PEMA pada anak usaha PEMA yang bergerak di bidang Penemuan dan Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) 10% pada WUK Lhokseumawe

- **Penyertaan Modal pada PT. Pema Petrogas Malaka**  
Penyertaan Modal pada PT. Pema Petrogas Malaka merupakan Seloran Modal PEMA pada anak usaha PEMA yang bergerak di bidang Penemuan dan Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) 10% pada WUK NSO

- **Penyertaan Modal pada PT. Pema Global Energi**  
Penyertaan Modal pada PT. Pema Global Energi Per 31 Desember 2021 telah mengalami perubahan modal dibandingkan 31 Desember 2020, akibat telah terjadi transaksi jual beli saham sebesar 48% kepada PT. EMA Energi Aceh.

- **Penyertaan Modal pada PT. Kawasan Industri Aceh**  
Penyertaan Modal pada PT. Kawasan Industri Aceh merupakan Seloran Modal PEMA pada anak usaha PEMA yang bergerak di bidang kawasan industri saham 100%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
<b>9. Aset Lainnya</b>		
Saldo Aset Lainnya Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :		
Aset Lainnya	659.207.194	-
- Aset Lainnya	659.207.194	-
Jumlah Aset Lainnya	659.207.194	-

- Aset Lainnya  
Aset Lainnya sebesar Rp. 659.207.194,- per posisi 31 Desember 2021 dan sebelumnya nihil per 31 Desember 2020,- dikarenakan per 31 Desember 2021 sesuai keputusan pada Jajaran Komisaris PT PEMA bahwa peminjaman peninjauan pencalangan dari Aset Lancar kepada Aset Lainnya atas pengakuan pemecatan Kas PDPA pada Mutasi SE, MM (Eks Direktur Utama) sebesar Rp. 80.797.000,-. Dana PDPA pada Akunsi SE, MM (ambil dan Triangle Pass Inc dan Bank BNI) sebesar Rp. 642.010.194,- dan Kas PDPA pada Akhnd. YY Dinar (Eks Direktur Industri dan Perdagangan) sebesar Rp. 41.400.000,-.

**10. Investasi dalam Pengembangan**

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)

Investasi dicatat sebesar jumlah anggaran dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan investasi pada kegiatan bisnis yang dimaksud. Saldo Periode 30 September 2021 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

<b>Investasi Bidang Industri dan Perdagangan:</b>		
- Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (Ladang) Tahap I	993.085.500	983.085.500
- Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (Ladang) Tahap II	247.033.013	247.033.013
- Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (Ladang) Tahap III	152.848.028	-
- Investasi Pengembangan Pasar Induk "okseumawe	10.030.000	10.030.000
- Investasi Pengembangan KEK Arun	48.306.039	11.677.000
<b>Jumlah Investasi Bidang Industri dan Perdagangan</b>	<b>1.451.302.579</b>	<b>1.291.825.513</b>

**Investasi Bidang Migas dan Pertambangan:**

- Investasi Untuk Air Kenda WK D	-	287.343.081
- Investasi Untuk Pemanfaatan Sulfur	27.832.000	-
- Investasi Untuk Perolehan PI 10% WK A	10.604.000	10.115.000
- Investasi Untuk Perolehan PI 10% WK NISD	24.270.000	24.270.000
<b>Jumlah Bidang Migas dan Pertambangan</b>	<b>62.706.000</b>	<b>321.728.081</b>

**Total Jumlah Investasi dalam Pengembangan**

	<b>1.514.068.678</b>	<b>1.613.553.594</b>
--	----------------------	----------------------

**- Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladang Tahap I**

Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladang Tahap I adalah segala biaya yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA (dan PDPA) untuk kegiatan "investasi pada proyek bisnis KIA Ladang sampai dengan Periode 31 Desember 2019 dan pada periode ini dilaksanakan kegiatan berupa Ground Breaking Transcomhang dan Penanaman Lahai di KIA Ladang.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

**Lanjutan**

**10. Investasi dalam Pengembangan**

- **Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladang Tahap II**  
Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladang Tahap II adalah segala biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA untuk kegiatan proyek bisnis di KIA Ladang dan Periode 01 Januari 2020 sampai dengan sekarang.
- **Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladang Tahap III**  
Investasi Pada Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladang Tahap III adalah segala biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA untuk kegiatan project bisnis di KIA Ladang dan Periode 01 Januari 2021 sampai dengan sekarang.
- **Investasi Pengelolaan Pasar Induk Lhokseumawe**  
Investasi Pengelolaan Pasar Induk Lhokseumawe adalah segala biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA untuk kegiatan pengembangan Pasar Induk yang ada di Kota Lhokseumawe dan dalam hal ini PEMA bekerjasama dengan PT. Pucuk Iskandar Muda (PIM).
- **Investasi Pengembangan KEK Arun**  
Investasi Pengembangan KEK Arun adalah segala biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA untuk kegiatan project pengembangan KEK Arun di Kota Lhokseumawe dan dalam hal ini PEMA bekerjasama dengan PT. Pucuk Iskandar Muda (PIM).
- **Investasi untuk Aji Keliwa WK B**  
Investasi untuk Aji Keliwa WK B adalah segala biaya berupa investasi yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA untuk kegiatan pengembangan aji keliwa WK B yang terdapat di Aceh Utara. Ke depannya saat WK B berhasil diambil alih kelola, PEMA akan mengelola melalui anak usahanya yaitu PT. Pema Global Energi (PGE). Per 31 Desember 2021 telah terjadi perubahan saldo menjadi nihil dikarenakan sesuai keputusan Direksi PT Pema telah melakukan perubahan pengakuan pencatatan dari investasi kepada beban aji keliwa WK B.
- **Investasi Untuk Perolehan PI 10% WK A**  
Investasi untuk Perolehan PI 10% WK A adalah segala biaya berupa investasi yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA untuk kegiatan Perolehan PI 10% pada WK A. Saat ini dengan sabi ini WK A dikelola penuh oleh Medco E&P Malaya.
- **Investasi Untuk Perolehan PI 10% WK NSO**  
Investasi untuk Perolehan PI 10% WK NSO adalah segala biaya berupa investasi yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA untuk kegiatan Perolehan PI 10% pada WK NSO. Sampai dengan sabi ini WK NSO dikelola penuh oleh PHE NSO.
- **Investasi Pemanfaatan Sulfur**  
Investasi untuk Pemanfaatan Sulfur adalah segala biaya berupa investasi yang telah dikeluarkan oleh manajemen PEMA untuk kegiatan Pemanfaatan Sulfur.

**PEMA**

PT. PERBANGUNAN ACEH

Jl. Garuda Raya No. 10  
Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh  
No. Telp. (0651) 8111222No. Akta: 10/2017/PTU  
No. NIB: 1916017000000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

**11 Aset Tetap**

Saldo aset tetap Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan rias buku dari aset tetap yaitu nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan. Rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2021			Saldo Akhir 31 Desember 2021
	Saldo Awal Januari 2021	Penambahan Desember 2021	Pengurangan Desember 2021	
<b>Harga Perolehan</b>				
Tanah	333.000.000	-	-	333.000.000
Kendaraan <sup>1</sup>	11.374.336	-	-	11.374.336
Peralatan Kantor	380.853.453	70.584.620	7.780.000	344.078.273
Inventaris	331.823.669	-	-	331.823.669
Jumlah Harga Perolehan	957.051.458	70.584.620	7.780.000	1.020.278.278
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	11.374.336	-	-	11.374.336
Peralatan Kantor	84.306.396	59.813.183	3.651.167	140.467.407
Inventaris	114.417.212	65.877.134	-	180.294.346
Jumlah Akumulasi Penyusutan	210.098.934	125.690.321	3.651.167	339.440.422
Nilai Tercatat	<u>746.954.524</u>			<u>680.840.169</u>

Uraian	Tahun 2020			Saldo Akhir Tahun 2020
	Saldo Awal Tahun 2020	Penambahan Tahun 2020	Pengurangan Tahun 2020	
<b>Harga Perolehan</b>				
Tanah	333.000.000	-	-	333.000.000
Kendaraan	11.374.336	-	-	11.374.336
Peralatan Kantor	195.100.453	81.750.000	-	280.853.453
Inventaris	327.868.689	4.155.000	-	331.823.689
Jumlah Harga Perolehan	871.146.458	85.905.000	-	957.051.458
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	11.374.336	-	-	11.374.336
Peralatan Kantor	42.016.529	42.289.857	-	84.306.386
Inventaris	48.861.845	65.555.367	-	114.417.212
Jumlah Akumulasi Penyusutan	102.251.710	107.845.224	-	210.098.934
Nilai Tercatat	<u>768.894.748</u>			<u>746.954.524</u>

**12. Utang Kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>Kewajiban Lancar:</b>		
- Kantor Akuntan Publik (KAP) Rizal Yahya	-	23.750.000
- Bunga-Hutang Kepada PT. PIM	536.870.000	357.780.000

**Kewajiban Tidak Lancar:**

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
- PT Pelusaran Listrik Negera (PLN)	5.983.000.000	5.983.000.000
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga	<u>13.618.494.815</u>	<u>8.319.863.333</u>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

**Lanjutan**

**12. Utang Kepada Pihak Ketiga**

- Utang Kepada PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM)
- Utang Kepada PT. PIM adalah utang yang dibekukan oleh PT. PIM kepada PDPA terkait project bisnis KFK Arun, sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara PT. PIM dan PDPA.
- Bunga Utang Kepada PT. PIM
- Bunga Utang Kepada PT. PIM adalah besaran bunga utang sebesar 3% dan Utang Kepada PT. PIM sebagaimana yang telah ditetapkan pada "Perjanjian Pinjaman antara PT. PIM dan "CPA" pada Pasal 2 Point 2 + tentang "asilian Pinjaman halaman 4.
- Salipin dengan periode 31 Desember 2021 PT. PEMA mempunyai kewajiban terhadap bunga utang kepada PT. PIM sejumlah Rp. 447.226.000,- yang terditi atas tahun 2020 dan Per 31 Desember 2021. Masing-masing periode berjumlah sebesar Rp. 178.890.000,-.

- Utang Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Utang kepada PLN merupakan pendapatan sewa dibayar dimuka dan Sewa Labor di Aun dan di KIA Lingsong selama 29 Tahun

- Utang Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Rizal Yahya
- Saldo utang kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Rizal Yahya telah mengalami perubahan dari Rp. 23.750.000,- menjadi nihil per 31 Desember 2021 dikarenakan telah ditukarkannya galunasan atas utang tersebut

**13. Utang Gaji**

- Saldo utang gaji Periode 31 Desember 2021 dan Periode 31 Desember 2020 adalah sebagai
- Beban Peryawas
- Direksi
- Penyesuaian Komisaris Direksi & Karyawan
- Jumlah Utang Gaji

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	14.000.000	14.000.000
	164.350.000	164.360.000
	97.250.270	
	<b>275.600.270</b>	<b>178.360.000</b>

- Utang Gaji Penyesuaian Komisaris, Direksi & Karyawan
- Saldo utang gaji inihtu dikarenakan adanya keputusan Penyejang Sahab untuk penyesuaian gaji Kom saris dan Direksi per Desember 2021 dan Keputusan Direksi untuk penyesuaian gaji karyawan per Desember 2021



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

**14. Utang SPPD**

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Saldo utang SPPD Periode 31 Desember 2021 dan Periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:		
- Utang SPPD	3.470.000	
<b>Jumlah Utang SPPD</b>	<b>3.470.000</b>	

**15. Utang Pajak**

- <b>Utang SPPD</b>		
Saldo Utang SPPD timbul dikarenakan adanya belum diselesaikannya pembayaran sampai di akhir 31 Desember 2021		
<b>2021</b>	<b>2020</b>	
(Rp)	(Rp)	
	471.700	1.000.000
	3.964.713.761	
	6.250.935	42.779.976
	<b>8.971.436.386</b>	<b>42.879.976</b>

Utang Pajak yang timbul pada Periode 31 Desember 2021 (Akumulasi Utang Pajak dari Tahun 2021), penjelasannya sebagai berikut:

- **Utang PPh 23**  
 Utang PPh 23 yang berjumlah sebesar Rp. 471.700 per 31 Desember 2021, merupakan dajak yang timbul dari pembayaran biaya terkait Penerimaan Jasa Kuasa Hukun, Jasa Keluhan CCTV dan Pemeliharaan Taman Kantor pada masa Desember 2021.
- **Utang PPh Final Badan Usaha**  
 Utang PPh Final Badan Usaha berdasarkan perhitungan sesuai Ketentuan Umum Pajak Indonesia.
- **Utang PPh 21 Direksi dan Karyawan**  
 Utang PPh 21 yang berjumlah sebesar Rp. 8.250.935 per 31 Desember 2021, merupakan pajak yang timbul dari PPh Pasal 21 masa Desember 2021.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DEMANGAN ANGGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

**16. Modal**

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
Modal dasar yaitu Modal dasar berdasarkan yang tercantum pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh (Persero) No 06 tanggal 05 April 2019, Akta Perubahan No 24 tanggal 14 Oktober 2019, Akta Perubahan No. 35 tanggal 18 Oktober 2019 dan Akta Perubahan No 39 tanggal 28 November 2021 Nalaris Cufi Era Ferryeni SH, MKn serta telah mendapat pengesahan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH-01 03-0480319 Tahun 2021 tentang Sempoaahan Pengesahan Hurukun Perseroan Terbatal PT Pembangunan Aceh (Persero)al yaitu		
Modal Dasar Awal		
- Wedal yang disetor	3.562.800.000	3.562.800.000
- Tambahan modal disetor	21.437.200.000	-
Jumlah Modal	35.000.000.000	3.562.800.000

• **Tambahan Modal Disetor**  
Tambahan modal disetor oleh Pemerintah Aceh di tahun 2021 sebagai tanggungjawab Pemerintah Aceh sesuai dengan Isi Darun Aceh No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelraan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh

**17. Laba Rugi**

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
Akumulasi terdiri dari		
- Laba-Rugi Tahun Lalu	(658.772.470)	1.828.623.988
- Koreksi Laba Rugi Tahun Lalu	514.145.454	-
- Laba-Rugi Tahun Berjalan (Per 31 Desember 2021)	43.319.806.553	(2.527.406.398)
	43.136.239.597	(898.772.410)

**18. Pendapatan**

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
• Saldo jendapalan Periode 31 Desember 2021 dan Periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut		
- Pendapatan Usaha	488.888.889	218.888.887
- Pendapatan Lainnya	5.576.718.462	-
Jumlah Pendapatan	52.065.607.391	218.888.887

Pendapatan Usaha bersumber dari:

- Pendapatan Sewa Lahan & PEMA)	480.000.000
- Pendapatan Sewa Lahan KIA/Landng (KSP Pemerintah Aceh & PEMA)	8.888.889
Jumlah Pendapatan	488.888.889



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DEGAN ANGA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

Lanjutan

18. Pendapatan

Pendapatan Lainnya:

- Pendapatan atas Perjualan Saham Anak Usaha PT PGE (Pema Global Energi) sebesar 48%	22.704.800.000
- Pendaurulan alas U-viden Rretim dan Anak Usaha PT PGE (Pema Global Energi) Periode Mei-Desember 2021	28.871.918.482
Jumlah Pendapatan	51.576.718.482

19. Beban Administrasi dan Umum

Jumlah tersebut merupakan biaya yang menjadi beban selama Periode 31 Desember 2021 dan Periode 31 Desember 2020, sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>Beban Sekretaris</b>		
- ATK, Fotocopy	30.764.600	23.172.550
- Perengkapan Kantor	8.091.700	8.094.500
- L. Slink, Telepon, Faks dan Internet	12.777.284	9.088.200
- Beban Infomrasi dan Teknologi	13.491.300	
- Legalisasi Usaha	6.000.000	2.222.000
<b>Jumlah Beban Sekretaris</b>	<b>70.124.884</b>	<b>42.577.250</b>
<b>Beban Personalia</b>		
- Gaji Konsumsi	199.607.500	184.600.000
- Gaji Direksi	571.164.000	628.000.000
- Gaji Karyawan	1.438.267.080	551.120.000
- Baju Seragam	6.663.000	
- BPJS Kesehatan	50.771.500	24.137.500
- BPJS Ketenagakerjaan	135.858.714	102.251.194
- Tunjangan Meugang	78.600.000	47.000.000
- Tunjangan Hari Raya	107.073.687	91.326.000
- Penghasilan Piutang Karyawan	-	32.000.000
- Bantuan Uang Makan dan Transport Tenaga Magang	71.000.000	19.500.000
- Beban Pelatihan	3.920.000	
- Beban Employee Challenging	2.920.000	
- Beban Kesehatan, lainnya	7.000.000	
<b>Jumlah Beban Personalia</b>	<b>9.590.000</b>	
	<b>2.680.584.931</b>	<b>1.975.822.694</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		
- Beban Perjalanan Dinas	516.340.520	41.346.751
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>516.340.520</b>	<b>41.346.751</b>
<b>Beban Kendaraan</b>		
- Beban Operasional Kendaraan	12.418.500	9.330.000
- BBM Kendaraan	21.551.000	18.820.000
- Rental Mobil Ops. Direktur Utama	168.000.000	154.000.000
- Rental Mobil Ops. Direktur	76.200.000	51.200.000
- Service Kendaraan	25.000	300.000
<b>Jumlah Beban Kendaraan</b>	<b>278.194.500</b>	<b>234.250.000</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
 DENGAN ANGGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

**Lanjutan**

**19. Beban Administrasi dan Umum**

<b>Beban Umum</b>	2021	2020
- Beban Rapat Umum	13.155.400	31.507.050
- Beban Pasty	16.012.900	10.197.200
- Beban Promosi	15.000.000	8.609.500
- Beban Entertainment Direktur Utama	31.527.000	4.752.000
- Beba Entertainment Direktur Umum & Kasusnang	2.797.000	496.000
- Beban Entertainment Dir. Migas dan Pertambangan	1.513.000	269.000
- Beban Langganan Koran	1.080.000	1.080.000
- Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap	6.487.000	3.045.000
- Beban Penyusutan Aset Tetap	125.890.321	107.845.224
- Beban Pajak	110.906.359	40.779.375
- Beban Audit	49.159.000	65.731.000
- Beban Konsultan	32.605.191	-
- Beban Rapat RUPPS	5.280.000	188.000
- Beban Kegiatan Sosial dan Hari Besar Islam	4.205.800	500.000
- Beban Penghapusan Aset Tetap	4.108.833	-
- Beban Renovasi Kantor	80.123.916	3.665.000
- Jumlah Beban Umum	<u>498.703.500</u>	<u>278.084.349</u>

**Beban Bunga Utang**

- Beban Bunga Utang Pagar PT. PIM	179.850.000	178.860.000
- Jumlah Beban Bunga Utang	<u>179.850.000</u>	<u>178.860.000</u>

**Jumlah Beban Administrasi dan Umum**

<b>2021</b>	<b>2020</b>
(Rp)	(Rp)
<u>4.023.838.635</u>	<u>2.750.059.254</u>

**20. Beban Alih Kelola WK B**

Jumlah tersebut merupakan biaya investasi yang menjadi beban selama periode 31 Desember 2021 dan periode 31 Desember 2020, sebagai berikut

- Beban Alih Kelola WK B	742.902.295	-
- Jumlah Beban Alih Kelola WK B	<u>742.902.295</u>	<u>-</u>

**21. Beban Pajak Kini**

Jumlah tersebut merupakan biaya Pajak Badan Periode 31 Desember 2021 sebagai berikut.

- Beban Pajak Kini	3.964.713.751	-
- Jumlah Beban Pajak Kini	<u>3.964.713.751</u>	<u>-</u>

0	0
(Rp)	(Rp)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020**

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
<b>22. Pendapatan dan Beban Lain-lain)</b>		
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain selama tahun Periode 31 Desember 2021 dan Periode 31 Desember 2020, sebagai berikut :		
- Pendapatan Lain-lain (Bank) dan lainnya	25.537.352	7.836.232
- Beban lain-lain (Bank) dan lainnya	17.478.880	-
- Beban Lain-lain (Kerugian Kurs BANK R\$1-USD)	22.344.589	937.243
<b>Jumlah Pendapatan dan (Beban Lain-lain)</b>	<b>(14.286.117)</b>	<b>6.897.989</b>

Jumlah Pendapatan Lain-lain adalah merupakan bunga jasa giro Bank yang bersumber dan Bank Aceh Syariah dan bunga jasa giro bank dan selisih kurs bank Bank Syariah Indonesia-USD sedangkan (Beban) Lain-lain adalah merupakan bunga jasa giro kerugian selisih kurs Bank Syariah Indonesia-USD dan beban administrasi Bank yang bersumber dan Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Indonesia-USD.

**23. Petyeslesaian Laporan Keuangan**

Manajemen PT. Pembangunan Aceh (PEMA) bertanggung jawab penuh terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan yang diselesaikan pada tanggal 08 April 2022.





DALAM RENCANA PERUSAHAAN PERUSAHAAN  
 TAHUN 2021

No.	Nama/Rincian Barang	Tahun Perolehan	Kondisi Awal	Nilai Perolehan (01/01/2021)		Nilai Perolehan Per Desember 2021		Nilai Perolehan (31/12/2021)	Amanah dan Penyusutan (01/01/2021 - 31/12/2021)	Mutasi Tahun Per Desember 2021		Akumulasi penyusutan 31/12/2021	Nilai Buku Per 31/12/2021
				Tambahan	Kurang	Tambahan	Kurang						
1.	Tanah												
	- Selandia Tanah di Desa Lumbang Mergo Anan Pawa	1993		331.600.000				331.600.000					331.600.000
				331.600.000				331.600.000					331.600.000
2.	Kendaraan												
	- 1 Unit Motor Toyota King Max 16	1990		11.374.336				11.374.336	11.374.336			11.374.336	
				11.374.336				11.374.336				11.374.336	
3.	Peralatan Kantor												
	- 1 Unit Printer - Canon MP 187	2012	PEMA-PDM-01	500.000				500.000	500.000			500.000	
	- 4 Unit Hardisk Internal Maxtor	2012	PEMA-PDM-02	2.500.000				2.500.000	2.500.000			2.500.000	
	- 4 Unit Laptop dan Inverter - Epson	2014	PEMA-PDM-03	5.250.000				5.250.000	5.250.000			5.250.000	
	- 1 Unit Laptop Asus X45E	2017	PEMA-PDM-08	4.250.000				4.250.000	4.250.000			4.250.000	
	- 1 Unit TPU Lerdan - Irid Clus	2017	PEMA-PDM-09	143.300				143.300	143.300			143.300	
	- 1 Unit Mouse - Ankonita	2017	PEMA-PDM-10	500.000				500.000	500.000			500.000	
	- 1 Unit Printer	2017	PEMA-PDM-11	100.000				100.000	100.000			100.000	
	- 1 Unit Printer - Epson L385	2017	PEMA-PDM-12	3.500.000				3.500.000	3.500.000			3.500.000	
	- 1 Unit Printer - Epson L120	2017	PEMA-PDM-13	1.900.000				1.900.000	1.900.000			1.900.000	
	- 3 Unit Komputer (Pusat)	2017	PEMA-PDM-14	2.500.000				2.500.000	2.500.000			2.500.000	
	- 2 Unit Mouse - Gahr	2017	PEMA-PDM-15	110.000		7.800.000		7.910.000	7.910.000			7.910.000	
	- 2 Unit Mouse - Dekor	2017	PEMA-PDM-16	180.000				180.000	180.000			180.000	
	- 1 Unit Fajeri Pnc	2017	PEMA-PDM-17	3.000.000				3.000.000	3.000.000			3.000.000	
	- 1 Unit Dispenser - Miyako SU	2018	PEMA-PDM-18	345.000				345.000	345.000			345.000	
	- 2 Unit Mouse - English	2018	PEMA-PDM-19	300.000				300.000	300.000			300.000	
	- 2 Unit Mesin Pengaliran Kertas	2018	PEMA-PDM-20	2.800.000				2.800.000	2.800.000			2.800.000	
	- 1 Unit PABX	2018	PEMA-PDM-21	500.000				500.000	500.000			500.000	
	- 1 Unit Bangkai Kop - Mubas	2018	PEMA-PDM-22	711.500				711.500	711.500			711.500	
	- 1 Unit Dispenser - Miyako	2018	PEMA-PDM-23	300.000				300.000	300.000			300.000	
	- 1 Unit Tang Sampah Rusa	2018	PEMA-PDM-24	250.000				250.000	250.000			250.000	
	- 1 Unit Tang Sampah Rusa	2018	PEMA-PDM-25	300.000				300.000	300.000			300.000	
	- 1 Unit Keyboard Wireless 2.4G GHz White	2018	PEMA-PDM-26	110.000				110.000	110.000			110.000	
	- 1 Unit Mouse - E3 400 2481 PAS P5 2Y	2018	PEMA-PDM-27	1.900.000				1.900.000	1.900.000			1.900.000	
	- 1 Unit Head Unit SE pan - Roland Logo Usery (Gajah)	2018	PEMA-PDM-28	2.610.000		2.610.000		5.220.000	5.220.000			5.220.000	
	- 1 Unit Printer - Logitech Speedlink	2018	PEMA-PDM-29	1.321.500				1.321.500	1.321.500			1.321.500	
	- 1 Unit Perawat Laptop tipe 500	2018	PEMA-PDM-30	221.000				221.000	221.000			221.000	
	- 1 Unit Perawat Laptop Merk Asuscore	2018	PEMA-PDM-31	470.000				470.000	470.000			470.000	
	- Sampungul COTY Kertas	2018	PEMA-PDM-32	15.215.000				15.215.000	15.215.000			15.215.000	
	- 1 Unit Kamera - Canon EOS M10	2019	PEMA-PDM-33	5.600.000				5.600.000	5.600.000			5.600.000	
	- 1 Unit Printer - Pabrik Dimensi	2019	PEMA-PDM-34	5.304.071				5.304.071	5.304.071			5.304.071	
	- 2 Unit Mouse - Logitech M170 & M171	2019	PEMA-PDM-35	510.000				510.000	510.000			510.000	
	- 1 Unit Printer Epson L1300E Color	2019	PEMA-PDM-36	3.375.000				3.375.000	3.375.000			3.375.000	
	- 1 Unit Mouse - Logitech M170 & M171	2019	PEMA-PDM-37	544.1.000				544.1.000	544.1.000			544.1.000	
	- 1 Unit Mouse Logitech (2 Unit)	2019	PEMA-PDM-38	370.000				370.000	370.000			370.000	
	- 1 Unit Sirkuit Rana Mouse & Accurate 5	2019	PEMA-PDM-39	1.025.000				1.025.000	1.025.000			1.025.000	
	Perangdam AC	2019						1.024.800	1.024.800			1.024.800	
	1/3 Ltr AC 2pk - LG	2019	PEMA-PDM-41	20.647.478				20.647.478	20.647.478			20.647.478	
	Hard Disk External SEAGORIE 3 TB (Black)	2019	PEMA-PDM-42	2.300.000		2.300.000		4.600.000	4.600.000			4.600.000	
	PC Laptop H One B35-241 HD (1 Unit)	2019	PEMA-PDM-43	3.470.000				3.470.000	3.470.000			3.470.000	
	PC Laptop H One B35-241 HD (1 Unit)	2019	PEMA-PDM-44	4.000.000				4.000.000	4.000.000			4.000.000	
	CD Pengisian mobil	2019	PEMA-PDM-45	7.751.500				7.751.500	7.751.500			7.751.500	
	CRUAMex 500ml (1 Unit)	2019	PEMA-PDM-46	6.900.000				6.900.000	6.900.000			6.900.000	
	Laptop Asus ROG G732C-RTx	2019	PEMA-PDM-47	21.549.000				21.549.000	21.549.000			21.549.000	
	Processor Ryzen 5 3400 & 1 Unit Screen Proyektor	2019	PEMA-PDM-48	6.305.249				6.305.249	6.305.249			6.305.249	
	Mouse Logitech Wireless MITD (4 Ltr)	2019	PEMA-PDM-49	500.000				500.000	500.000			500.000	
	Note Book Yoga C740	2019	PEMA-PDM-50	8.700.000				8.700.000	8.700.000			8.700.000	
	Wagon Sharp 3 Pagar Pribi Soluson	2019	PEMA-PDM-51	4.650.000				4.650.000	4.650.000			4.650.000	
	Mainboard PC Laptop (1 Unit)	2020	PEMA-PDM-52	1.300.000				1.300.000	1.300.000			1.300.000	
	Laptop Lenovo Thinkpad T14-UMD (1 Unit)	2020	PEMA-PDM-53	15.100.000				15.100.000	15.100.000			15.100.000	
	Respon Surface Adu 1500 (1 Unit)	2020	PEMA-PDM-54	4.300.000				4.300.000	4.300.000			4.300.000	
	HP Printer Color Laser MFP 137 (1 Unit)	2020	PEMA-PDM-55	5.500.000				5.500.000	5.500.000			5.500.000	
	UPS APC BackUPS (1 Unit)	2020	PEMA-PDM-56	2.650.000				2.650.000	2.650.000			2.650.000	
	Hard Disk Ext (1 Unit)	2020	PEMA-PDM-57	2.500.000				2.500.000	2.500.000			2.500.000	
	PC Laptop Alienware A-3730 2510M 2 Unit	2020	PEMA-PDM-58	9.100.000				9.100.000	9.100.000			9.100.000	
	NO Adu 4x12L Kabin Rod 1 Unit	2020	PEMA-PDM-59	8.692.000				8.692.000	8.692.000			8.692.000	

DAFTAR HUKUM PERENCANAAN KEMUSJATAN  
 PER 22 DESEMBER 2021

No	Nama Ases Tetap	Tahun Perbaikan	Kode Ases	Nilai Perbaikan 01/01/2021	Mutasi Tahun Per Desember 2021		Nilai Perbaikan 01/01/2022	Amdulment penyusutan 24/01/2021	Mutasi Tahun Per Desember 2021		Amdulment penyusutan 31/12/2021	Nilai Buku Per 31/12/2021
					Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
	1. MS. Ayo 4432P4 (0301) MHR 1 Lin	2020	PEMA-PMA-50	4.700.000			4.700.000	437.900			2.187.920	6.942.500
	1. Pagar Mawar HD 720 P	2020	PEMA-PMA-51	2.500.000			2.500.000	125.000			2.375.000	1.825.000
	1. Lantai Lantai Kaca 440 315441	2020	PEMA-PMA-52	10.600.000			10.600.000	840.000			3.980.000	4.270.500
	1. Kusen AC-200	2021	PEMA-PMA-53	700.000			700.000			3.980.000	4.270.500	2.500.000
	1. Perbaikan Lantai MS -H 1-04-1022 JAW	2022	PEMA-PMA-54	3.000.000			3.000.000			141.400	141.400	550.600
	1. CCTV	02/02/2021	PEMA-PMA-55	3.000.000			3.000.000			1.783.800	1.216.200	2.716.800
	1. Dapur	02/02/2021	PEMA-PMA-56	3.000.000			3.000.000			216.967	2.783.033	1.033.233
	1. 20 Unsat 15 cm 4 Unsat	03/04/2021	PEMA-PMA-57	300.000			300.000			170.200	129.800	669.200
	1. 40 Unsat 15 cm 2 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-58	19.200.000			19.200.000			170.200	19.029.800	16.540.000
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-59	4.600.000			4.600.000			124.071	4.475.929	17.015.929
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-60	315.000			315.000			46.825	268.175	512.175
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-61	1.490.000			1.490.000			46.825	1.443.175	3.056.175
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-62	570.000			570.000			46.825	523.175	1.076.350
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-63	300.000			300.000			46.825	253.175	506.350
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-64	1.330.000			1.330.000			46.825	1.283.175	2.669.525
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-65	300.000			300.000			46.825	253.175	506.350
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-66	1.330.000			1.330.000			46.825	1.283.175	2.669.525
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-67	300.000			300.000			46.825	253.175	506.350
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	04/02/2021	PEMA-PMA-68	2.400.180			2.400.180			46.825	2.353.355	4.916.880
				36.674.273		7.780.000	44.454.273	85.654.518	63.475.183	140.147.407	254.671.947	
	4. Kusen Kaca											
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2012	PEMA-INA-10	1.740.500			1.740.500	1.450.000			290.500	3.240.500
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-11	70.000			70.000	70.000			0	70.000
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-12	174.000			174.000	174.000			0	174.000
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-13	500.000			500.000	500.000			0	500.000
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-14	1.367.000			1.367.000	1.367.000			0	1.367.000
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-15	665.500			665.500	665.500			0	665.500
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-16	327.100			327.100	327.100			0	327.100
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-17	6.510.000			6.510.000	6.510.000			0	6.510.000
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-18	23.825.000			23.825.000	23.825.000			0	23.825.000
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-19	10.471.478			10.471.478	10.471.478			0	10.471.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-20	6.917.478			6.917.478	6.917.478			0	6.917.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-21	8.147.478			8.147.478	8.147.478			0	8.147.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-22	10.397.478			10.397.478	10.397.478			0	10.397.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-23	14.955.478			14.955.478	14.955.478			0	14.955.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-24	11.147.478			11.147.478	11.147.478			0	11.147.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-25	8.147.478			8.147.478	8.147.478			0	8.147.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-26	6.147.478			6.147.478	6.147.478			0	6.147.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-27	6.147.478			6.147.478	6.147.478			0	6.147.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-28	10.397.478			10.397.478	10.397.478			0	10.397.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-29	9.147.478			9.147.478	9.147.478			0	9.147.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-30	3.297.478			3.297.478	3.297.478			0	3.297.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-31	2.647.478			2.647.478	2.647.478			0	2.647.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-32	4.432.478			4.432.478	4.432.478			0	4.432.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-33	14.247.478			14.247.478	14.247.478			0	14.247.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-34	12.322.478			12.322.478	12.322.478			0	12.322.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-35	4.547.478			4.547.478	4.547.478			0	4.547.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-36	4.547.478			4.547.478	4.547.478			0	4.547.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-37	17.867.478			17.867.478	17.867.478			0	17.867.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-38	12.647.478			12.647.478	12.647.478			0	12.647.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-39	3.147.478			3.147.478	3.147.478			0	3.147.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-40	7.147.478			7.147.478	7.147.478			0	7.147.478
	1. 1 Unsat 15 cm 1 Unsat	2014	PEMA-INA-41	1.526.478			1.526.478	1.526.478			0	1.526.478
							1.526.478	308.917	205.058	584.612	421.469	



DAFTAR RIWAYAT DAN KURUNGAN PERUSAHAAN  
 PER 31 DESEMBER 2021

No	Nama Awal Perusahaan	Tahun Perolehan	Kode Awal	Nilai Perolehan 01/01/2021	Mutasi tahun Per Desember 2021		Nilai Perolehan 31/12/2021	Akumulasi penyusutan 01/01/2021	Mutasi Tahun Per 2021		Akumulasi penyusutan 31/12/2021	Neto Buku Per 31/12/2021
					Tambahan	Kurang			Tambahan	Kurang		
	Bergas Poro 6 Keping	2019	PEMAK-12	565.000	-	-	565.000	175.950	-	-	389.050	262.500
	Elek. Rangka Rungtu	2019	PEMAK-13	48.800.000	-	-	48.800.000	14.450.000	9.750.000	-	34.250.000	24.250.000
	Komputer HP dan 20.0 Harddisk dan Plo. Digital	2019	PEMAK-14	400.000	-	-	400.000	225.000	150.000	-	250.000	150.000
	Tagihan Listrik 2.5 MVA Buehi	2019	PEMAK-15	350.000	-	-	350.000	37.500	72.000	-	427.500	495.000
	Wahana Logistik G3500	2020	PEMAK-16	2.150.000	-	-	2.150.000	37.500	72.000	-	2.222.000	177.500
	Kelembokan Logam 100 Kg	2020	PEMAK-17	160.000	-	-	160.000	36.667	50.000	-	216.667	133.333
	Sal. Perbaikan Suku Cadang	2020	PEMAK-18	250.000	-	-	250.000	13.077	37.000	-	287.077	191.333
	Buku Mutasi Peralihan SDA	2020	PEMAK-19	750.000	-	-	750.000	79.547	100.000	-	829.547	650.000
				3.315.000	-	-	3.315.000	582.133	587.500	-	3.902.500	3.260.000
				331.023.898	-	-	331.023.898	114.097.312	89.877.134	-	420.901.032	311.023.898
					7.163.000	1.020.276.271	1.027.439.271	206.445.767	728.580.821	-	1.755.925.038	895.140.198

**Lampiran Piutang Direktur dan Karyawan Per 31 Desember 2021**

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>Piutang Badan Pengawas :</b>		
- Kamaruddin Abu Bakar	40.000.000	40.000.000
- M. Nur Rasyid	10.000.000	10.000.000
- Sulaiman Aziz	15.000.000	15.000.000
- Murchin Husin	15.000.000	15.000.000
<b>Jumlah Piutang Badan Pengawas</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
<b>Piutang Direksi :</b>		
- Nasreddin Daud (Eks. Direktur Utama)	12.150.000	12.150.000
- Hasballah	552.000	
- Rudiyanca Yusuf	25.500.000	25.500.000
- T. B. Herman	28.200.000	28.200.000
<b>Jumlah Piutang Direksi</b>	<b>66.402.000</b>	<b>65.850.000</b>
<b>Piutang Karyawan :</b>		
- Mukhtar Jiyas		
- Syardiansyah	8.000.000	8.000.000
<b>Jumlah Piutang Karyawan</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Piutang Jangka Pendek</b>		
- Piutang Dir. Migas dan Pertambangan		
<b>Jumlah Piutang Jangka Pendek</b>		
<b>Jumlah Piutang</b>	<b>154.402.000</b>	<b>153.850.000</b>

**Lampiran Utang Gaji Per 31 Desember 2021**

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>Utang Gaji Badan Pengawas :</b>		
- Az'wari Hasan, SE, M.Si	7.500.000	7.500.000
- Adriyansyah	6.500.000	6.500.000
	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
<b>Utang Gaji Direksi :</b>		
- Zulkarnain Yusuf	18.000.000	18.000.000
- Syukri Ibrahim	7.500.000	7.500.000
- Sayed Fakhry	30.000.000	30.000.000
- Muhsin	20.000.000	20.000.000
- Drs. M. Yusuf USA	-	-
- Rizal Yahya	24.000.000	24.000.000
- Tripoly	-	-
- Cut Aisyah Ai	24.000.000	24.000.000
- Bachari Arhas	12.000.000	12.000.000
- Saifullah	5.000.000	5.000.000
- Imran A. Hamid	5.850.000	5.850.000
- Muhammad YY Dinar	18.000.000	18.000.000
	<b>164.350.000</b>	<b>164.350.000</b>
- Penyesuaian Gaji Komisaris, Direksi & Karyawan Des 2021	97.250.270	-

**Utang Gaji Karyawan :**  
**Jumlah Hutang Gaji**

<b>275.600.270</b>	<b>178.350.000</b>
--------------------	--------------------

